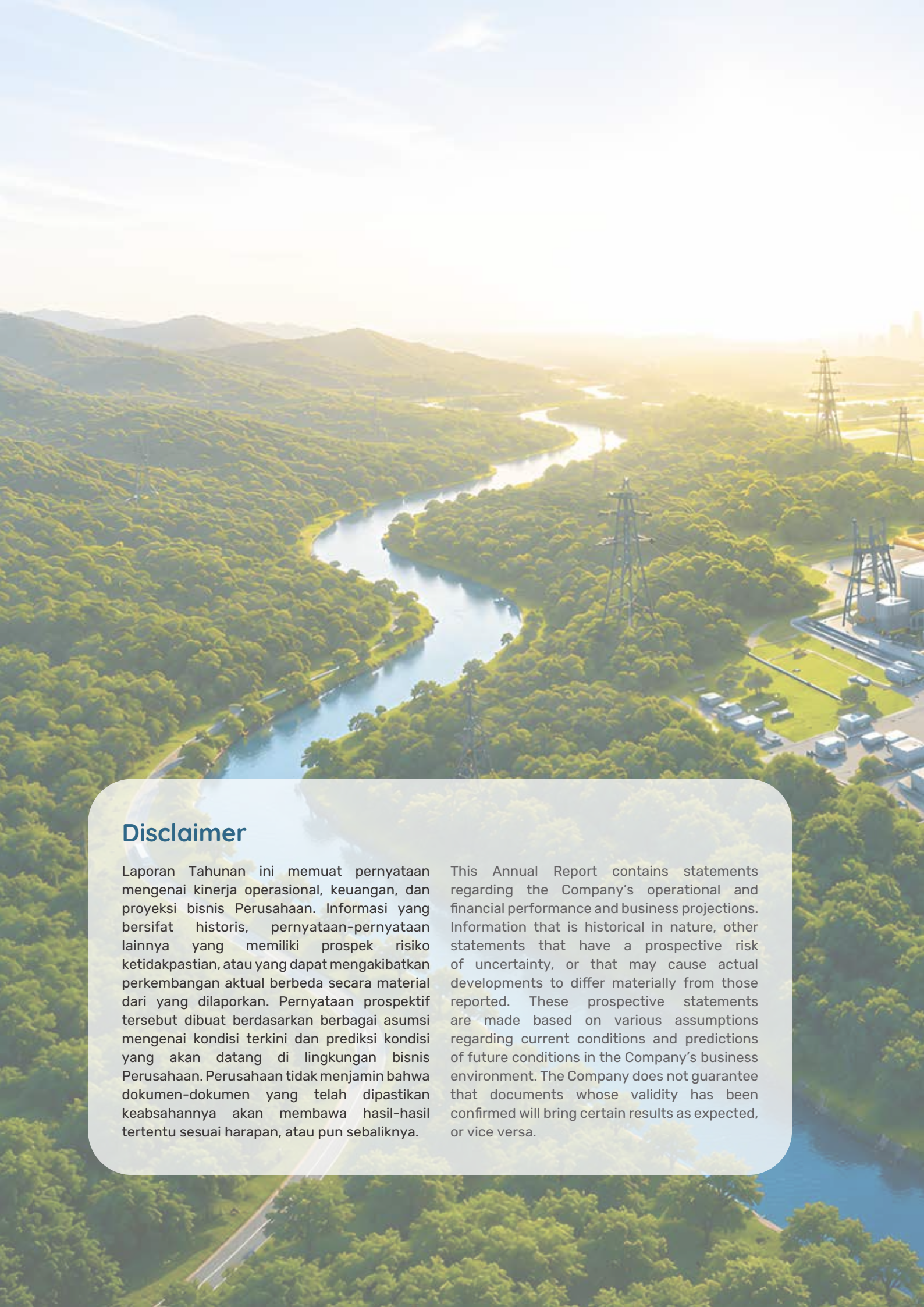
LAPORAN TAHUNAN • 2025 • ANNUAL REPORT

PLN Energi Gas

Meningkatkan Standar Tata Kelola, Memperkuat Infrastruktur Gas Berkelanjutan

Raising Governance Standards, Strengthening Sustainable Gas Infrastructure





Disclaimer

Laporan Tahunan ini memuat pernyataan mengenai kinerja operasional, keuangan, dan proyeksi bisnis Perusahaan. Informasi yang bersifat historis, pernyataan-pernyataan lainnya yang memiliki prospek risiko ketidakpastian, atau yang dapat mengakibatkan perkembangan aktual berbeda secara material dari yang dilaporkan. Pernyataan prospektif tersebut dibuat berdasarkan berbagai asumsi mengenai kondisi terkini dan prediksi kondisi yang akan datang di lingkungan bisnis Perusahaan. Perusahaan tidak menjamin bahwa dokumen-dokumen yang telah dipastikan keabsahannya akan membawa hasil-hasil tertentu sesuai harapan, atau pun sebaliknya.

This Annual Report contains statements regarding the Company's operational and financial performance and business projections. Information that is historical in nature, other statements that have a prospective risk of uncertainty, or that may cause actual developments to differ materially from those reported. These prospective statements are made based on various assumptions regarding current conditions and predictions of future conditions in the Company's business environment. The Company does not guarantee that documents whose validity has been confirmed will bring certain results as expected, or vice versa.



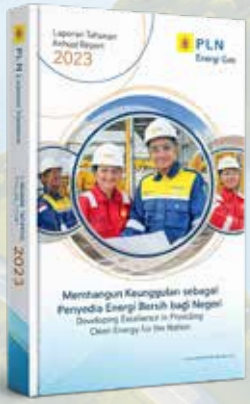
Tema Dan Kesinambungan Tema
Theme And Theme Continuity



2025



2024



2023



2022



2021

Tema dan Penjelasan Tema

PT PLN Energi Gas (PLN Energi Gas/Perusahaan) berkomitmen untuk terus memperkuat tata kelola perusahaan sebagai landasan dalam menjalankan usaha yang sehat, transparan, dan bertanggung jawab. Di tengah dinamika industri energi yang terus berkembang, penerapan prinsip tata kelola yang baik menjadi faktor penting untuk menjaga integritas operasional, meningkatkan kualitas pengambilan keputusan, serta memperkuat kepercayaan pemegang saham, pelanggan, dan seluruh pemangku kepentingan.

Sejalan dengan hal tersebut, Perusahaan terus mendorong penguatan infrastruktur gas yang andal, modern, dan terintegrasi guna menjawab kebutuhan energi nasional yang semakin meningkat. Pengembangan jaringan, fasilitas pendukung, serta optimalisasi rantai pasok gas dilakukan untuk memastikan layanan yang efisien, aman, dan berkelanjutan. Langkah ini juga mendukung peran gas bumi sebagai energi transisi yang penting dalam menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan target penurunan emisi.

Melalui tata kelola yang semakin kuat dan infrastruktur yang terus berkembang, PLN Energi Gas berupaya memperluas kontribusi dalam ekosistem energi nasional. Perusahaan berkomitmen menghadirkan nilai tambah yang berkelanjutan, memperkuat ketahanan energi, serta membuka peluang pertumbuhan usaha di masa depan. Hal ini menegaskan arah perusahaan untuk tumbuh secara sehat, adaptif, dan relevan dengan kebutuhan Indonesia yang terus bergerak maju.

Theme and Its Explanation

PT PLN Energi Gas (PLN Energi Gas/the Company) is committed to continuously strengthening corporate governance as a foundation for performing a sound, transparent, and responsible business. Amid the ever-evolving dynamics of the energy industry, the implementation of good governance principles is a crucial factor in maintaining operational integrity, improving the quality of decision-making, as well as strengthening the trust by the shareholders, customers, and all stakeholders.

In line with this, the Company continues to promote the strengthening of reliable, modern, and integrated gas infrastructure to meet the growing needs of national energy. The Company develops network, supports facilities, as well as optimizes gas supply chain in the context to ensure efficient, safe, and sustainable services. These steps also support the role of natural gas as a transitional energy source, crucial for maintaining the balance between economic growth and emission reduction targets.

Through the strengthened governance and continuously developing infrastructure, PLN Energi Gas strives to expand contribution to the national energy ecosystem. The Company is committed to providing sustainable added value, strengthening energy security, and opening up opportunities for future business growth. This reaffirms direction by the Company to grow soundly, adaptively, and relevantly to the needs of a rapidly evolving Indonesia.

Daftar Isi
Table of Contents

Pendahuluan
Introduction

Tema dan Kesinambungan Tema
Theme and Its Continuity 4

Pencapaian Penting 2025
Significant Achievements in 2025 8

Ikhtisar Data Keuangan Penting
Key Financial Data Highlights 10

Ikhtisar Kinerja Operasional
Operational Highlights 15

Ikhtisar Saham
Share Highlights 15

Ikhtisar Efek Lainnya
Other Securities Highlights 15

Aksi Korporasi 2025
Corporate Actions 15

Peristiwa Penting 2025
Significant Events in 2025 17

Penghargaan Dan Sertifikasi
Awards and Certifications 24

Laporan Manajemen
Management Report 31

Laporan Dewan Komisaris
Report from the Board of Commissioners 33

Laporan Direksi
Report from the Board of Directors 57

Surat Pernyataan Dewan Komisaris dan Direksi tentang Tanggung Jawab atas Laporan Tahunan 2025 PT PLN Energi & Gas
Statement by the Board of Commissioners and Directors on Responsibility for 2025 Annual Report of PT PLN Energi & Gas 70

Profil Perusahaan
Company Profile 73

Identitas Perusahaan
Corporate Identity 74

Riwayat Singkat Perusahaan
Brief History 75

Jejak Langkah
Milestones 78

Visi, Misi dan Tata Nilai Perusahaan
Vision, Mission, and Corporate Culture 80

Strategi Perusahaan
Corporate Strategy 83

Maksud dan Tujuan Perusahaan
Purpose and Objectives of the Company 85

Kegiatan Usaha Perusahaan
Business Activities 86

Produk dan Jasa Perusahaan
Products and Services 88

Skema Proses Bisnis
Business Process Scheme 89

Wilayah Kerja Operasional
Operational Areas 90

Struktur Organisasi
Organizational Structure 92

Informasi Perubahan Direksi pada Tahun Buku dan Setelah Tahun Buku 2025
Information on Changes to the Board of Directors Composition in and After 2025 Fiscal Year 94

Profil Direksi
Board of Directors Profile 96

Informasi Perubahan Dewan Komisaris pada Tahun Buku dan Setelah Tahun Buku 2025
Information on Changes to the Board of Commissioners Composition in and After 2025 Fiscal Year 100

Profil Dewan Komisaris
Board of Commissioners Profile 102

Profil BOD-1
BOD-1 Profile 108

Demografi dan Pengembangan Kompetensi Pegawai
Employee Demographics and Competency Development 110

Informasi Pemegang Saham
Shareholder Information 115

Struktur Grup Perusahaan, Entitas Anak, Entitas Asosiasi, Perusahaan Patungan dan Special Purpose Vehicle (SPV)
Company Group Structure and List of Subsidiaries, Associates, and Joint Ventures 118

Kronologis Pencatatan Saham
Share Listing Chronology 119

Kronologis Pencatatan Efek Lainnya
Other Securities Listing Chronology 119

Keanggotaan Asosiasi
Association Membership 119

Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik
Public Accounting Firms and Public Accountants 120

Lembaga dan Profesi Penunjang Perusahaan
Other Supporting Institutions and Professions 123

Sinergi antar Subholding & Anak Perusahaan
Company Collaboration with Partners Business 124

Informasi pada Website Perusahaan
Information on the Company's Website 125

Tinjauan Pendukung Bisnis
Business Support Overview 129

Penerapan Teknologi Informasi
Information Technology 130

Sumber Daya Manusia
Human Resources 134

Analisis & Pembahasan Manajemen
Management Discussion and Analysis 143

Analisis Industri
Industry Overview 144

Tinjauan Operasi per Segmen Usaha
Operational Review by Business Segment 149

Profitabilitas per Segmen
Income Statement 152

Analisis Kinerja Keuangan
Financial Overview 153

Analisis Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian
Statement of Financial Position 153

Analisis Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian
Cash Flow Statement 161

Analisis Laporan Arus Kas Konsolidasian
Analysis of the Consolidated Statement of Cash Flows 166

Aspek Pemasaran dan Pangsa Pasar
Marketing Aspects 169

Analisis Kemampuan Membayar Utang, Tingkat Kolektibilitas Piutang, dan Rasio Keuangan Lainnya
Analysis of Debt Repayment Capacity and Receivables Collectability, and Other Financial Ratios 171

Target dan Realisasi Tahun 2025 serta Proyeksi Tahun 2026
Comparison of Targets and Actuals for 2025 and Projections for 2026 175

Struktur Modal dan Kebijakan Manajemen atas Struktur Modal
Capital Structure 181

Kontribusi kepada Negara
Contribution to the State 184

Kebijakan dan Pembagian Dividen
Dividend Policy 185

Realisasi dan Ikatan Material Investasi Barang Modal
Realization and Material Commitments for Capital Goods Investments 187

Perubahan Kebijakan Akuntansi yang Berdampak Signifikan terhadap Perusahaan
Changes in Accounting Policies 195

Perubahan Peraturan dan Dampaknya terhadap Perusahaan
Changes in Regulations and the Impacts on the Company 196

Informasi Transaksi Material yang Mengandung Benturan Kepentingan dan/atau dengan Pihak Afiliasi/Berelasi
Information on Material Transactions Containing Conflicts of Interest and/or with Affiliated/Related Parties 197

Key Performance Indicator (KPI) dan Realisasinya
KPIs and Company Health Level 203

Prospek Usaha
Business Prospects 208

Informasi Kelangsungan Usaha
Business Continuity Information 212

Realisasi Dana Hasil Penawaran Umum
Realization of Proceeds from the Public Offering 214

Informasi dan Fakta Material yang Terjadi Setelah Tanggal Laporan Akuntan
Material Information and Facts Occurring After the Accountant's Report Date 214

Informasi Keuangan yang Mengandung Kejadian Luar Biasa dan Jarang Terjadi
Financial Information Containing Events Extraordinary and Rare Events 215

Informasi Material Mengenai Investasi, Ekspansi, Divestasi, Akuisisi, dan Restrukturisasi Utang atau Modal
Information on Material Transactions of Investment, Expansion, Divestment, Acquisition, and Debt/Capital Restructuring 216

Tata Kelola Perusahaan
Corporate Governance **219**

Mewujudkan Tata Kelola yang Berkelanjutan
Achieving Sustainable Governance 220

Rapat Umum Pemegang Saham
General Meeting of Shareholders 229

Dewan Komisaris
Board of Commissioners 238

Direksi
Board of Directors 248

Nominasi dan Remunerasi Dewan Komisaris serta Direksi
Nomination and Remuneration of the Board of Commissioners and Board of Directors 256

Kebijakan Pengungkapan Informasi Kepemilikan Saham
Share Ownership Information Disclosure Policy 268

Sekretaris Dewan Komisaris
Secretary to the Board of Commissioners 268

Komite Audit
Audit Committee 272

Komite Nominasi & Remunerasi dan Komite Manajemen Risiko
Nomination and Remuneration Committee and Risk Management Committee 279

Sekretaris Perusahaan
Corporate Secretary 289

Unit Audit Internal
Internal Audit Unit 293

Sistem Pengendalian Internal
Internal Control System 299

Sistem Manajemen Risiko
Risk Management System 306

Pengadaan Barang dan Jasa
Procurement of Goods and Services 312

Kode Etik Perusahaan
Company Code of Ethics 313

Kebijakan Informasi Perusahaan
Company Information Policy 316

Kebijakan Insider Trading
Insider Trading Policy 317

Kebijakan Pemenuhan Hak-Hak Kreditur
Creditor Rights Fulfillment Policy 318

Kebijakan Anti Korupsi
Anti-Corruption Policy 319

Perkara Hukum dan Sanksi Administratif
Legal Cases and Administrative Sanctions 324

Sistem Pelaporan Pelanggaran
Whistleblowing System 326

Pemenuhan Standar Penerapan Tata Kelola Perusahaan
Implementation Standards Compliance with Corporate Governance 330

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan
Corporate Social Responsibility **361**

Strategi Penerapan Program Tanggung Jawab Sosial Lingkungan
Strategy for Implementing the Social and Environmental Responsibility (TJSL) Program 362

Inisiatif Program Keberlanjutan
Sutainability Program Initiatives 370

Kinerja Ekonomi
Economic Performance 372

Kinerja Lingkungan
Environment Performance 373

Kinerja Sosial
Social Performance 379

Laporan Keuangan Audited
Audited Financial Statements **399**

Pencapaian Penting 2025
Important Achievement 2025



EBITDA Melampaui Target
EBITDA Exceeds Target

EBITDA mencapai Rp305,84 miliar, atau 108,17% dari target RKAP sebesar Rp282,72 miliar.
EBITDA reached Rp305.84 billion, or 108.17% of the RKAP target of Rp282.72 billion.



Pengembalian Investasi Semakin Optimal
Return Investment More Optimal

ROIC mencapai 11,78%, melampaui target 10,16% atau 110,00% dari target.
ROIC reached 11.78%, exceeding the target of 10.16% or 110.00% of the target.



Sinergi PLN Group
PLN Group Synergy

Nilai transaksi sinergi mencapai Rp718,50 miliar, lebih dari dua kali target Rp347,10 miliar (110,00%).
The synergy transaction value reached IDR 718.50 billion, more than twice the target of IDR 347.10 billion (110.00%).



Program Gasifikasi Punagaya Sesuai Target
Punagaya Gasification Program on Target

Penyelesaian Program Gasifikasi Punagaya mencapai target milestone yang ditetapkan dalam Kontrak Manajemen 2025
Completion of Punagaya Gasification Program has achieved the milestone target set in the 2025 Management Contract.



Peningkatan *Maturity Level* Kepatuhan
Improvement Maturity Level Compliance

Nilai *Maturity Level* Kepatuhan mencapai 3,56, melampaui target 3,30 (107,87%).
Maturity Level Value Compliance reached 3.56, exceeding the target of 3.30 (107.87%).



Efisiensi Operasional Meningkat
Increased Operational Efficiency

Operating Ratio sebesar 37,56%, lebih baik dari target 42,19% dengan tingkat pencapaian 110,00%.
Operating Ratio of 37.56%, better than the target of 42.19% with an achievement level of 110.00%.



Keandalan Infrastruktur Midstream Gas
Reliability Midstream Gas Infrastructure

EAF Midstream Gas mencapai 99,89%, melampaui target 98,95% dengan pencapaian 100,95%.
EAF Midstream Gas reached 99.89%, exceeding the target of 98.95% with achievement of 100.95%.



Penguatan Manajemen Risiko
Strengthening Risk Management

Implementasi *Roadmap* Manajemen Risiko mencapai 103,39% dari target.
Implementation of the Risk Management Roadmap reached 103.39% of the target.



Program Gasifikasi Tarakan Tuntas Lebih Cepat
Tarakan Gasification Program Completed Early

Target Gas In PLTMG Gunung Belah diselesaikan pada 14 September 2025, lebih cepat dari target 30 September 2025.
Gas target at Gunung Belah GEPP was to be completed on September 14, 2025, faster from the target of September 30, 2025.



Kinerja SDM dan Keselamatan Kerja Terjaga
Maintaining HR Performance and Occupational Safety

HCR dan OCR tercapai 100%, Rasio Kualifikasi Organ Pengelola Risiko mencapai 110%, serta *Lost Time Injury Frequency Rate* (LTIFR) = 0 (nihil kecelakaan kerja).
HCR and OCR achieved 100%, Ratio The qualification of the Risk Management Organ reached 110%, as well as Lost Time Injury Frequency Rate (LTIFR) = 0 (zero accidents) Work).



Rp 2.379,22
Aset (miliar)
Assets (billion)



Rp 521.48
Ekuitas (miliar)
Equity (billion)



Rp 480,95
Pendapatan Usaha (miliar)
Operating Revenue (billion)



Rp 94,74
Laba tahun berjalan (miliar)
Profit for the year (billion)



101,08
Key Performance Indicator (KPI)
Key Performance Indicator (KPI)



Rp 86,43
Kontribusi kepada Negara (miliar)
Contribution to the State (billion)

Assessment GCG

ASEAN Capital Markets Forum

74,39 poin

OJK OTORITAS JASA KEUANGAN

***Comply* 12**
***Explain* 13**

KNKG KOMITE NASIONAL KEBIJAKAN GOVERNANSI

***Apply* 40**
***Explain* 41**

Ikhtisar Data Keuangan Penting
Key Financial Data Highlights

Laporan Posisi Keuangan
Statement of Financial Position

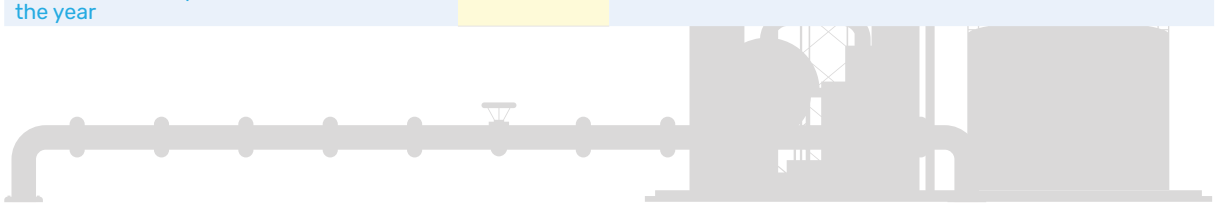
dalam Rp juta | in million Rp

Uraian Descripton	2025	2024	2023	2022	2021
Aset Asset					
Jumlah Aset Total Assets	2,379,218	2,442,680	2,541,888	2,542,319	874,234
Aset Lancar Current Assets	313,957	306,415	400,302	311,359	230,938
Aset Tidak Lancar Non-Current Assets	2,065,261	2,136,265	2,141,586	2,230,960	643,296
Liabilitas Liabilities					
Jumlah Liabilitas Total Liabilities	1,857,734	2,015,934	2,195,850	2,262,872	688,560
Liabilitas Jangka Pendek Short-Term Liabilities	282,032	268,360	290,536	259,870	296,715
Liabilitas Jangka Panjang Long-Term Liabilities	1,575,702	1,747,574	1,905,314	2,003,002	391,845
Jumlah Ekuitas Total Equity	521,484	426,746	346,038	279,447	185,674

Laporan Arus Kas
Statements of Cash Flows

dalam Rp juta | in million Rp

Uraian Descripton	2025	2024	2023	2022	2021
Arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi Net cash flow provided by operating activities	259,346	208,470	206,274	240,102	221,860
Arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi Net cash flow used in investing activities	(82,163)	(61,434)	-	-	(62,856)
Arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas pendanaan Net cash flow used in financing activities	(176,423)	(202,146)	(143,808)	(216,486)	(129,298)
(Penurunan)/kenaikan bersih kas dan setara kas Net (decrease)/increase in cash and cash equivalents	760	(55,110)	62,466	23,616	29,706
Kas dan setara kas pada awal tahun Cash and cash equivalents at the beginning of the year	113,361	168,471	106,004	82,388	52,682
Kas dan setara kas pada akhir tahun Cash and cash equivalents at the end of the year	114,121	113,361	168,470	106,004	82,388



Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain
Statements of Profit and Loss and Other Comprehensive Income

dalam Rp juta | in million Rp

Uraian Descripton	2025	2024	2023	2022	2021
Pendapatan Revenue	480,955	478,620	538,106	574,175	422,167
Beban Usaha Operating Expenses	(180,650)	(200,605)	(267,062)	(400,280)	(335,177)
Beban Pemeliharaan Maintenance Expenses	(35,364)	(43,091)	(39,439)	(50,982)	(56,837)
Beban Administrasi Administrative Expenses	(48,288)	(36,744)	(35,114)	(42,731)	(28,554)
Beban Kepegawaian Employee Expenses	(26,695)	(28,319)	(25,848)	(29,218)	(26,395)
Beban Transportasi Transportation Expenses	(64,765)	(87,391)	(166,059)	(115,744)	(51,228)
Beban Penyusutan Depreciation Expenses	(5,538)	(5,060)	(602)	(161,605)	(172,163)
Laba Usaha Operating Profit	300,305	278,015	271,044	173,895	86,990
Penghasilan Keuangan Finance Income	1,645	1,944	875	587	871
Beban Keuangan Finance Expense	(176,405)	(177,341)	(177,442)	(72,981)	(29,819)
(Beban)/Penghasilan Lain-Lain, Bersih Other Income, Net	(5,144)	2,425	1,543	10,597	388
Laba Sebelum Pajak Profit before Tax	120,401	105,043	96,020	112,098	58,430
Beban Pajak Penghasilan Income Tax Expense	(25,515)	(24,365)	(29,542)	(18,327)	(10,475)
Laba Tahun Berjalan Profit for the Year	94,886	80,678	66,478	93,771	47,955
Penghasilan Komprehensif Lain Tahun Berjalan Other Comprehensive Income for the Year	(148)	30	113	2	27
Jumlah Penghasilan Komprehensif Tahun Berjalan Total Comprehensive Income for the Year	94,738	80,708	66,591	93,773	47,982

Rasio - Rasio Keuangan
Financial Ratios

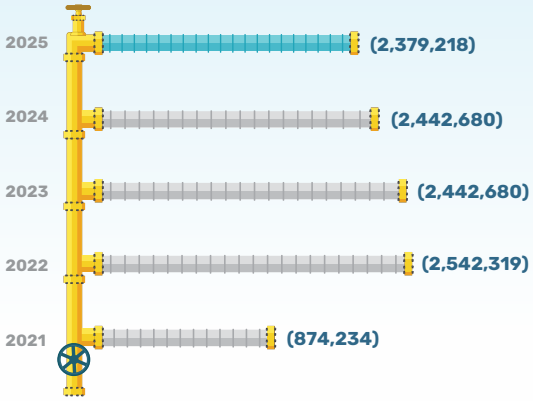
dalam Rp juta | in million Rp

Uraian Descripton	2025	2024	2023	2022	2021
Laba Bersih terhadap Aset Return on Assets	3.99%	3.30%	2.62%	3.69%	5.49%
Laba Bersih terhadap Ekuitas Return on Equity	18.20%	18.91%	19.21%	33.56%	25.83%
Laba Bersih terhadap Pendapatan Net Profit Margin	19.73%	16.86%	12.35%	16.33%	11.36%
Rasio Lancar Current Ratio	1,113 kali | times	1,142 kali | times	1,378 kali | times	1,198 kali | times	0,778 kali | times
Rasio Utang terhadap Ekuitas Debt to Equity Ratio	356.24%	472.40%	634.57%	809.77%	370.84%
Rasio Utang terhadap Jumlah Aset Debt to Total Assets Ratio	78.08%	82.53%	86.39%	89.01%	78.76%

Ikhtisar Data Keuangan Penting
Key Financial Data Highlights

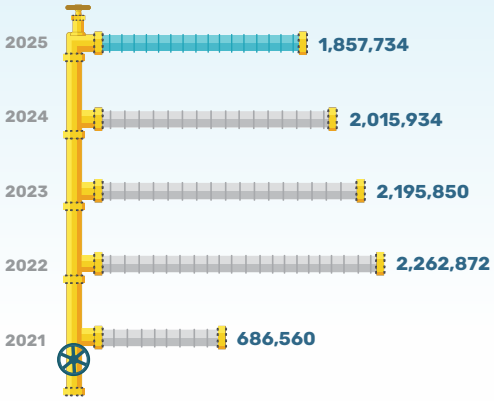
Grafik Aset
Chart of Assets

dalam Rp juta | in million Rp



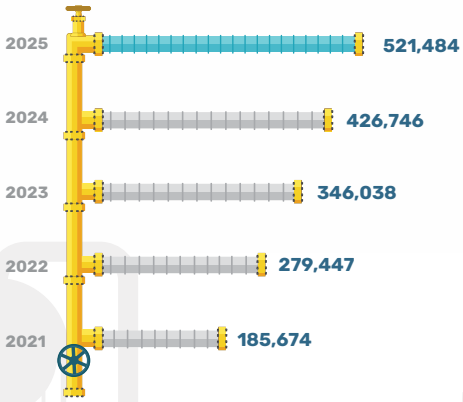
Grafik Liabilitas
Chart of Liabilities

dalam Rp juta | in million Rp



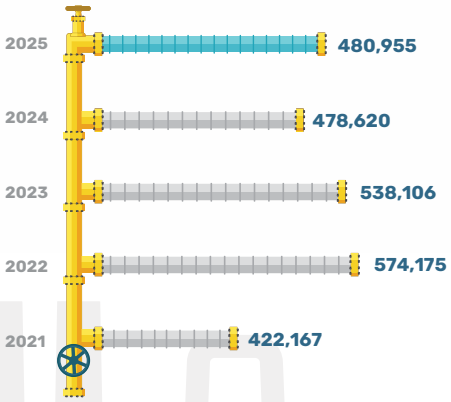
Grafik Ekuitas
Chart of Equity

dalam Rp juta | in million Rp



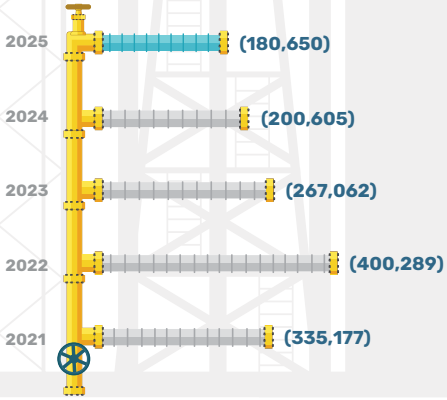
Grafik Pendapatan
Chart of Revenue

dalam Rp juta | in million Rp



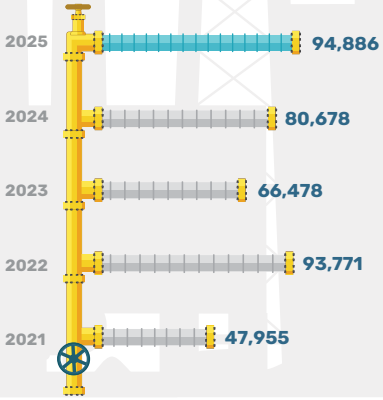
Grafik Beban Usaha
Chart of Operating Expenses

dalam Rp juta | in million Rp



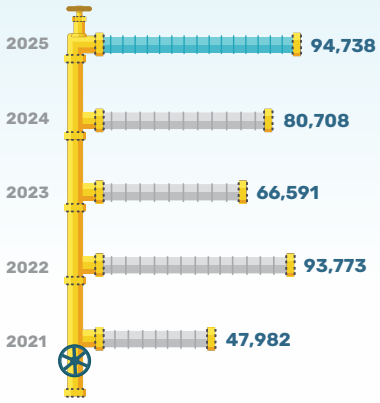
Grafik Laba Tahun Berjalan
Chart of Profit for The Year

dalam Rp juta | in million Rp



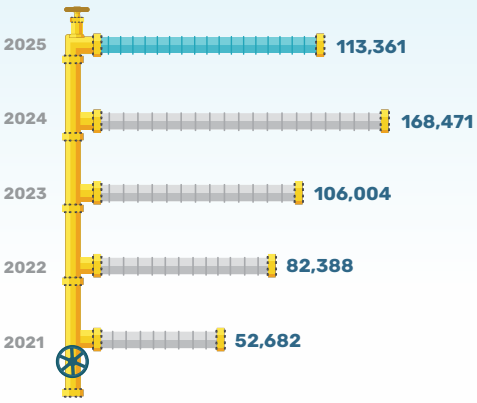
Grafik Penghasilan Komprehensif Tahun Berjalan
Chart of Comprehensive Income for the Year

dalam Rp juta | in million Rp



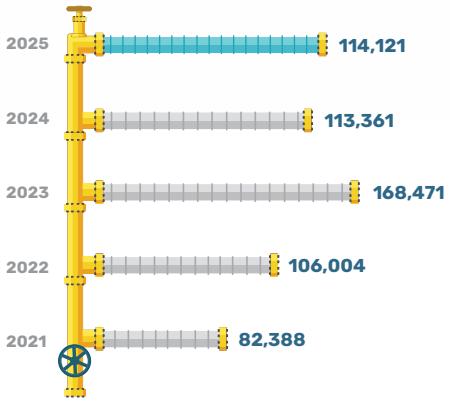
Grafik Kas dan Setara Kas Pada Awal Tahun
Chart Of Cash And Cash Equivalents at The Beginning of The Year

dalam Rp juta | in million Rp



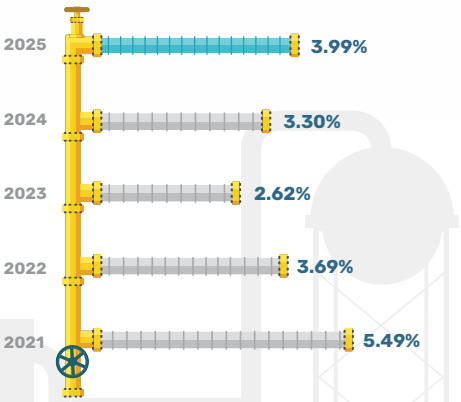
Grafik Kas Dan Setara Kas Pada Akhir Tahun
Chart Of Cash And Cash Equivalents at The End of The Year

dalam Rp juta | in million Rp



Grafik Laba Bersih Terhadap Aset
Chart of Return on Assets

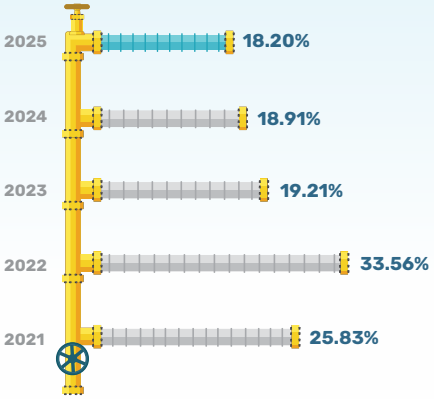
dalam Rp juta | in million Rp



Ikhtisar Data Keuangan Penting
Key Financial Data Highlights

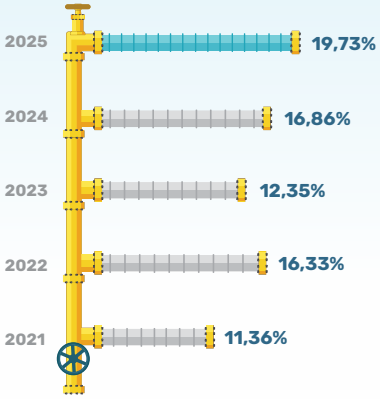
Grafik Laba Bersih Terhadap Ekuitas
Chart of Return on Equity

dalam Rp juta | in million Rp



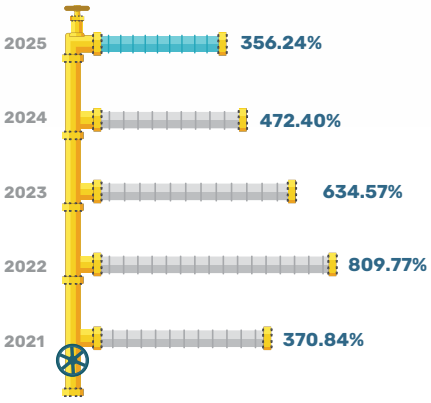
Grafik Laba Bersih Terhadap Pendapatan
Chart of Net Profit Margin

dalam Rp juta | in million Rp



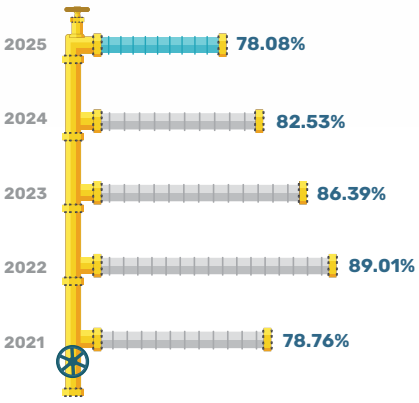
Grafik Rasio Utang Terhadap Ekuitas
Chart of Debt to Equity Ratio

dalam Rp juta | in million Rp



Grafik Rasio Utang Terhadap Aset
Chart of Debt to Total Assets Ratio

dalam Rp juta | in million Rp



Ikhtisar Kinerja Operasional
Operational Performance Highlights

Realisasi Kinerja *Equivalent Availability Factor* (EAF) Midstream Gas

Actual Performance of Equivalent Availability Factor (EAF) in Gas Midstream

2023	2024	2025
99.92%	99.94%	99.89%

Ikhtisar saham
Share Highlights

Sampai dengan akhir tahun 2025, PLN Energi Gas tidak melakukan perdagangan saham sehingga tidak ada informasi harga saham tertinggi, harga saham terendah dan harga saham penutupan serta volume saham yang diperdagangkan.

Until the end of 2025, PLN Energi Gas did not conduct share trading, so there is no information on the highest share price, lowest share price, and closing share price as well as the volume of shares traded.

Ikhtisar Efek Lainnya
Bond Highlights

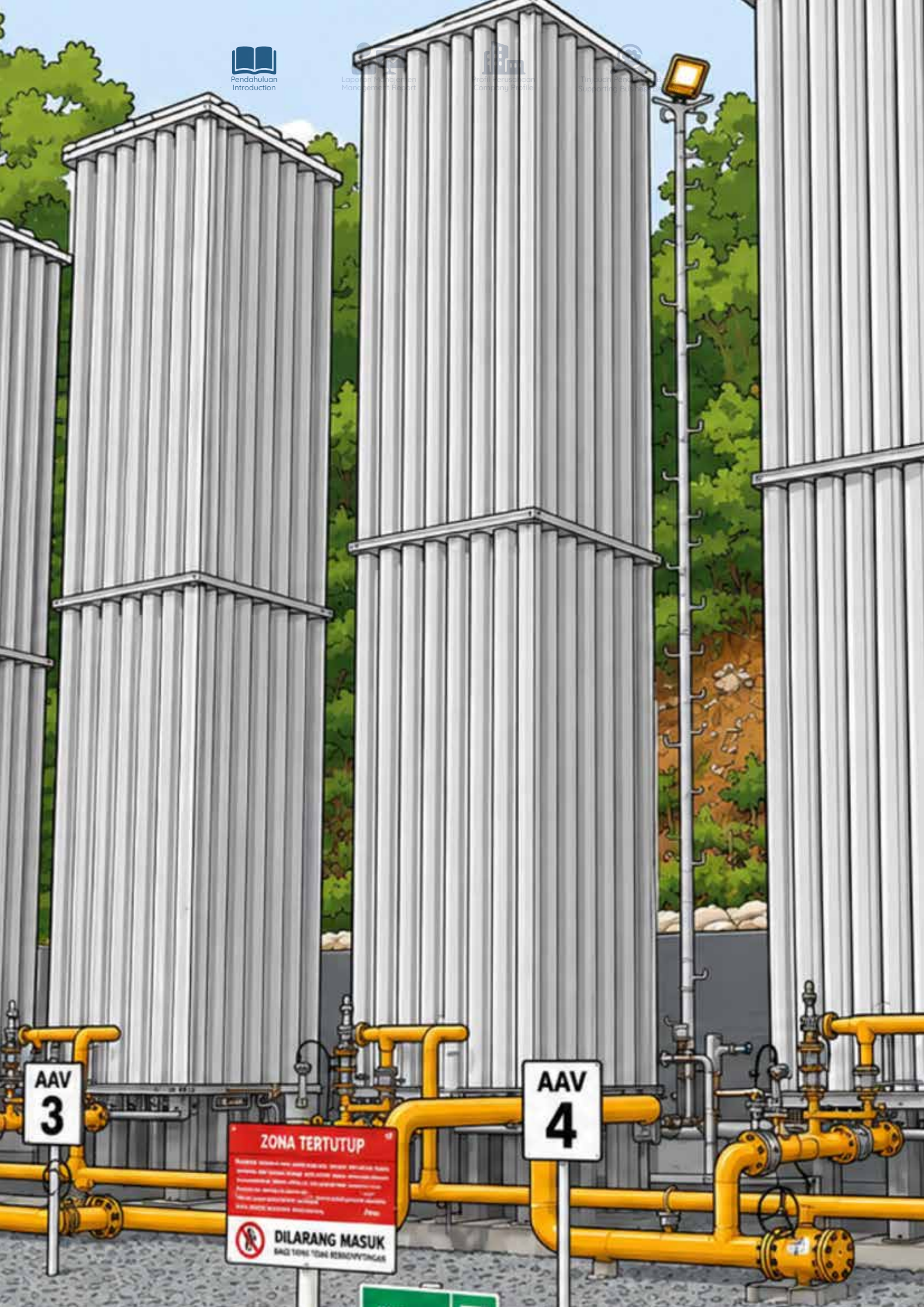
Sampai dengan akhir tahun 2025, PLN Energi Gas tidak menerbitkan obligasi, sukuk dan obligasi konversi sehingga tidak ada informasi terkait dengan jumlah obligasi/sukuk/obligasi konversi yang beredar, tingkat bunga/imbalan, tanggal jatuh tempo dan peringkat obligasi/sukuk.

Until the end of 2025, PLN Energi Gas did not issue bonds, sukuk, and convertible bonds so there is no information related to the number of outstanding bonds/sukuk/convertible bonds, interest rates/yields, maturity dates, and bonds/sukuk ratings.

Aksi Korporasi 2025
Corporate Actions

Pada tahun 2025, PLN Energi Gas tidak melakukan aksi korporasi terkait dengan aktivitas yang berpengaruh terhadap jumlah saham beredar, di antaranya pemecahan saham, penggabungan saham, dividen saham, saham bonus dan perubahan nilai nominal saham.

In 2025, PLN Energi Gas did not undertake any Corporate Actions related to activities affecting the number of outstanding shares, including stock splits, stock mergers, stock dividends, bonus shares, and changes in the nominal value of shares.


AAV
3
ZONA TERTUTUP
DILARANG MASUK
AAV
4

Peristiwa Penting 2025
2025 Significant Events



22 Januari - January

PLN Energi Gas Perkuat Infrastruktur Gas Nasional, Hemat Rp1,1 Triliun per Tahun
PLN Energi Gas berpartisipasi dalam *Press Briefing Corporate Exposure* PLN EPI sebagai upaya memperkuat sinergi dengan media sekaligus menegaskan komitmennya dalam mendukung keberlanjutan energi melalui pengoperasian Pipa Gas Tanjung Batu dan proyek Gasifikasi FSRU Gorontalo yang meningkatkan efisiensi serta keandalan pasokan energi nasional.

PLN Energi Gas Strengthens National Gas Infrastructure, Saving Rp1.1 Trillion per Year
PLN Energi Gas participated in the PLN EPI Corporate Exposure Press Briefing to strengthen synergy with the media and affirm commitment to supporting energy sustainability through the operation of the Tanjung Batu Gas Pipeline and the Gorontalo FSRU Gasification project, which increase the efficiency and reliability of the national energy supply.



28 Januari - January

PLN Energi Gas Memasuki Tahun ke-16 dengan Komitmen Transisi Energi Bersih
PLN Energi Gas merayakan Ulang Tahun ke-16 Dengan mengusung tema *"Building the Future with Clean Energy"* sebagai wujud komitmen dalam mendukung transisi energi berkelanjutan melalui penguatan layanan *Operation & Maintenance* (O&M) yang andal serta percepatan penyelesaian proyek gasifikasi di berbagai titik strategis guna meningkatkan pemanfaatan energi bersih dan mendukung percepatan transisi energi nasional.

PLN Energi Gas Enters Its 16th Anniversary with a Commitment to Clean Energy Transition
PLN Energi Gas celebrated its 16th anniversary with the theme "Building the Future with Clean Energy," demonstrating commitment to supporting a sustainable energy transition by strengthening reliable Operation & Maintenance (O&M) services and accelerating the completion of gasification projects at various strategic locations to increase the use of clean energy and support the acceleration of the national energy transition.



30 Januari - January

PLN Energi Gas Melaksanakan RUPS RKAP Tahun Buku 2025
PLN Energi Gas melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) untuk mengesahkan RKAP dan Kontrak Manajemen/KPI Tahun 2025 sebagai landasan pencapaian target operasional dan keuangan Perseroan serta penguatan tata kelola perusahaan yang baik guna mendukung pertumbuhan bisnis dan ketahanan energi nasional yang berkelanjutan.

PLN Energi Gas Held General Meeting of Shareholders (GMS) for 2025 Fiscal Year
PLN Energi Gas held General Meeting of Shareholders (GMS) to ratify the 2025 RKAP and Management Contract/KPI as the basis for achieving the Company's operational and financial targets and strengthening good corporate governance to support sustainable business growth and national energy security.



4 Februari - February

PLN Energi Gas dan PT Adhi Guna Putera Resmi Bermitra: Dorong Kelancaran Suplai LNG ke Pembangkit Tarakan
PLN Energi Gas menjalin kerja sama dengan PT Adhi Guna Putera melalui penandatanganan Perjanjian Jasa Transportasi Darat ISO Tank untuk fasilitas regasifikasi Pembangkit Tarakan guna mendukung kelancaran distribusi LNG dari miniLNG *Plant* Kayan ke Pembangkit Gunung Belah serta memastikan pasokan energi yang andal, efisien, dan berkelanjutan di Kalimantan Utara.

PLN Energi Gas and PT Adhi Guna Putera Officially Partner to Promote Smooth LNG Supply to the Tarakan Power Plant
PLN Energi Gas has established a partnership with PT Adhi Guna Putera through the signing of an ISO Tank Land Transportation Services Agreement for the Tarakan Power Plant's regasification facility. This agreement supports the smooth distribution of LNG from the Kayan miniLNG Plant to the Gunung Belah Power Plant and ensures a reliable, efficient, and sustainable energy supply in North Kalimantan.

Peristiwa Penting 2025
2025 Significant Events



5 Februari - February

PLN Energi Gas Tinjau Proses Pelapisan Pipa di Gresik untuk Proyek Onshore Gas Facilities Punagaya 2025
PLN Energi Gas melakukan kunjungan ke PT Indal, Gresik, untuk memantau proses *recoating* dan pelapisan pipa proyek Pembangunan Onshore Gas Facilities Punagaya sebagai upaya memastikan kualitas dan keandalan infrastruktur energi yang mendukung ketahanan energi nasional.

PLN Energi Gas Inspects Pipe Coating Process in Gresik for the Punagaya 2025 Onshore Gas Facilities Project
PLN Energi Gas visited PT Indal in Gresik to monitor the pipe recoating and coating process for the Punagaya Onshore Gas Facilities Development project, as part of the efforts to ensure the quality and reliability of energy infrastructure that supports national energy security.



10 Maret - March

PLN Energi Gas Gelar Safari Ramadan di Gorontalo, Perkuat Kebersamaan dengan Masyarakat
PLN Energi Gas menyelenggarakan Safari Ramadan di Marisa, Gorontalo, sebagai wujud kepedulian sosial dan komitmen Perusahaan dalam mempererat hubungan dengan masyarakat melalui kegiatan keagamaan serta pemberian santunan kepada anak-anak panti asuhan.

PLN Energi Gas Held Ramadan Safari in Gorontalo, Strengthening Community Engagement
PLN Energi Gas held Ramadan Safari in Marisa, Gorontalo, to actualize the Company's social responsibility and commitment to strengthening relationships with the community through religious activities and providing donations to children in orphanages.



11 Maret - March

PLN Energi Gas Lakukan Site Visit ke FSRU Gorontalo untuk Pastikan Keandalan Suplai Energi
PLN Energi Gas melaksanakan *site visit* ke *Floating Storage Regasification Unit* (FSRU) Gorontalo untuk memastikan kesiapan operasional dan keandalan pasokan energi dalam mendukung kelancaran operasional proyek strategis serta ketahanan energi nasional.

PLN Energi Gas Conducted Site Visit to Gorontalo FSRU to Ensure Reliability of Energy Supply
PLN Energi Gas conducted site visit to the Gorontalo Floating Storage Regasification Unit (FSRU) to ensure operational readiness and reliability of energy supply to support the smooth operation of strategic projects and national energy security.



23 April - April

Site Visit dan Monitoring Proyek Onshore Facilities untuk Pembangkit ITC Huadi Punagaya
Jajaran manajemen PLN Energi Gas melaksanakan site visit ke proyek pembangunan *Onshore Facilities* di Punagaya, Sulawesi Selatan, untuk memastikan progres pembangunan infrastruktur energi strategis yang mendukung keandalan pasokan listrik dan operasional Pembangkit ITC Huadi berjalan sesuai target.

Site Visit and Monitoring of the Onshore Facilities Project for the ITC Huadi Punagaya Power Plant
PLN Energi Gas management conducted site visit to the Onshore Facilities development project in Punagaya, South Sulawesi, to ensure that the strategic energy infrastructure, which supports reliable electricity supply and the operation of the ITC Huadi Power Plant, is on track.



21 Mei - May

PLN Energi Gas Serahkan Bantuan Sarana Kesehatan, Fasilitas MTQ, dan Air Bersih di Desa Balai Pungut
Sebagai bagian dari program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL), PLN Energi Gas menyalurkan bantuan sarana dan prasarana bagi masyarakat Desa Balai Pungut, Riau, guna mendukung peningkatan kesejahteraan, kesehatan, dan akses terhadap fasilitas dasar secara berkelanjutan.

PLN Energi Gas Provides Health Facilities, MTQ Facilities, and Clean Water to Balai Pungut Village
As part of Social and Environmental Responsibility (CSER) program, PLN Energi Gas provided facilities and infrastructure to the community of Balai Pungut Village, Riau, to support sustainable improvements in welfare, health, and access to basic services.



6 Juni - June

PLN Energi Gas Serahkan Hewan Kurban Idul Adha di Masjid Agung Jeneponto
Dalam rangka Hari Raya Idul Adha 1446 H, PLN Energi Gas menyalurkan hewan kurban kepada masyarakat melalui Masjid Agung Jeneponto, Sulawesi Selatan, sebagai wujud kepedulian sosial dan komitmen Perseroan dalam mendukung nilai-nilai keagamaan serta mempererat hubungan dengan masyarakat sekitar wilayah operasional.

PLN Energi Gas Distributes Sacrificial Animals for Eid al-Adha at the Jeneponto Grand Mosque
In celebration of Eid al-Adha 1446 H, PLN Energi Gas distributed sacrificial animals to the community at the Jeneponto Grand Mosque, South Sulawesi, to actualize the Company's social responsibility and commitment to supporting religious values and strengthening relationships with the communities surrounding the operational area.



12 Juni - June

Memperkuat Sinergi Pengembangan Energi di Wilayah Punagaya, PLN Energi Gas Gelar Audiensi Strategis dengan Bupati Jeneponto
PLN Energi Gas melaksanakan audiensi dengan Bupati Jeneponto untuk memperkuat sinergi dalam mendukung pengembangan proyek gasifikasi Punagaya, penguatan pasokan energi, serta kolaborasi pembangunan sosial dan ekonomi yang berkelanjutan di Sulawesi Selatan.

Strengthening Energy Development Synergy in the Punagaya Region, PLN Energi Gas Holds Strategic Audience with the Jeneponto Regent
PLN Energi Gas held an audience with the Regent of Jeneponto to strengthen synergy in supporting the development of the Punagaya gasification project, strengthening energy supply, and collaborating on sustainable social and economic development in South Sulawesi.



21 Juli - July

Gelar In House Training Pengenalan Unit Regasifikasi LNG di Tarakan
PLN Energi Gas menyelenggarakan *In House Training* Pengenalan Unit Regasifikasi LNG Tarakan untuk memperkuat kesiapan sumber daya manusia, kompetensi teknis, dan aspek keselamatan operasional menjelang beroperasinya proyek Regasifikasi LNG Tarakan.

In-House Training on LNG Regasification Unit Introduction in Tarakan
PLN Energi Gas held an in-house training on the introduction of the Tarakan LNG Regasification Unit to strengthen human resource readiness, technical competency, and operational safety aspects ahead of the Tarakan LNG Regasification project's operational phase.

Peristiwa Penting 2025
2025 Significant Events



25 Juli - July

Peresmian Kantor Baru PLN Energi Gas Resmikan Kantor Baru, Langkah Strategis Menuju Masa Depan Energi
PLN Energi Gas meresmikan kantor baru di Menara Bidakara 2, Jakarta Selatan, sebagai langkah strategis untuk memperkuat kinerja operasional, meningkatkan kolaborasi, dan mendukung ketahanan energi nasional secara berkelanjutan.

PLN Energi Gas Inaugurated New Office, a Strategic Step Towards the Future of Energy
PLN Energi Gas inaugurated new office at Menara Bidakara 2, South Jakarta, as a strategic step to strengthen operational performance, enhance collaboration, and support sustainable national energy security.



8 Agustus - August

Pelepasan PLT Komisaris Utama Bapak Dedi Utomo
PLN Energi Gas menyelenggarakan acara pelepasan PLT Komisaris Utama Dedi Budi Utomo sebagai bentuk apresiasi atas kontribusi dan dedikasinya dalam memperkuat tata kelola perusahaan serta mendukung pencapaian target strategis Perseroan selama masa jabatannya.

Send-Off Ceremony for Acting President Commissioner Dedi Utomo
PLN Energi Gas held send-off ceremony for Acting President Commissioner Dedi Budi Utomo as appreciation for his contributions and dedication to strengthening corporate governance and supporting the achievement of the Company's strategic targets during his tenure.



12 Agustus - August

Estafet Kepemimpinan, PLN Energi Gas Gelar Serah Terima Jabatan Vice President Keuangan, SDM dan Administrasi dan Sekretaris Perusahaan
PLN Energi Gas menyelenggarakan acara pisah sambut jabatan sebagai bagian dari proses transisi dan regenerasi kepemimpinan guna menjaga kesinambungan organisasi, memperkuat tata kelola perusahaan, serta mendukung transformasi dan pengembangan bisnis secara berkelanjutan.

Leadership Relay: PLN Energi Gas Holds Handover Ceremony for Vice President of Finance, Human Resources, and Administration and Corporate Secretary
PLN Energi Gas held a farewell ceremony as part of the leadership transition and regeneration process to maintain organizational continuity, strengthening corporate governance, and supporting sustainable business transformation and development.



14 September - September

PLN Energi Gas Sukses Laksanakan Commissioning & Gas In Fasilitas Penyimpanan dan Regasifikasi LNG Tarakan
PLN Energi Gas berhasil melaksanakan *commissioning* dan gas in Fasilitas Penyimpanan dan Regasifikasi LNG Tarakan pada 14 September 2025 sebagai tonggak penting dalam meningkatkan keandalan pasokan energi primer, memperkuat ketahanan energi nasional, dan mendukung transisi menuju energi yang lebih bersih dan berkelanjutan.

PLN Energi Gas Successfully Commissions and Gas In-Production of Tarakan LNG Storage and Regasification Facility
PLN Energi Gas successfully commissioned and gas in-production of the Tarakan LNG Storage and Regasification Facility on September 14, 2025, marking a significant milestone in improving the reliability of primary energy supply, strengthening national energy security, and supporting the transition to cleaner and more sustainable energy.



18 September - September

PLN Energi Gas dan PLN Nusantara Power Hadirkan Program TJSL "SAJI FARM" untuk Peternak Sapi di Balai Pungut
PLN Energi Gas bersama PLN Nusantara Power meluncurkan program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) SAJI FARM (Sapi dan Jagat Hijau Farm) di Kabupaten Bengkalis, Riau, sebagai upaya pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan peternakan sapi berbasis potensi lokal guna meningkatkan produktivitas, kemandirian ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

PLN Energi Gas and PLN Nusantara Power Launched the "SAJI FARM" Social and Environmental Responsibility Program for Cattle Farmers at Balai Pungut
PLN Energi Gas, together with PLN Nusantara Power, launched the SAJI FARM (Cattle and Jagat Hijau Farm) Social and Environmental Responsibility (TJSL) program in Bengkalis Regency, Riau, as an effort to empower communities through the development of cattle farming based on local potential to increase productivity, economic independence, and sustainable community welfare.



23 September - September

PLN Energi Gas Perkuat Komitmen Keselamatan Kerja dan Integritas melalui Vendor Gathering & Implementasi CSMS 2025
PLN Energi Gas menyelenggarakan *Vendor Gathering* & Implementasi *Contractor Safety Management System* (CSMS) 2025 untuk memperkuat sinergi dengan mitra kerja serta menegaskan komitmen bersama dalam penerapan standar keselamatan, integritas, dan tata kelola perusahaan yang berkelanjutan.

PLN Energi Gas Strengthened Commitment to Occupational Safety and Integrity through Vendor Gathering & CSMS 2025 Implementation
PLN Energi Gas held Vendor Gathering & Contractor Safety Management System (CSMS) 2025 Implementation to strengthen synergy with its partners and affirm its shared commitment to implementing sustainable safety, integrity, and corporate governance standards.



13 Oktober - October

Peresmian Fasilitas LNG Tarakan Perkuat Transisi Energi di Kalimantan Utara
Gubernur Kalimantan Utara meresmikan Fasilitas Penyimpanan dan Regasifikasi LNG Tarakan yang dikembangkan oleh PT PLN Energi Gas sebagai tonggak penting dalam mendukung Program Gasifikasi Nasional, meningkatkan keandalan pasokan listrik, serta mempercepat transisi menuju energi yang lebih bersih dan efisien di Kalimantan Utara.

Tarakan LNG Facility Inauguration Strengthens Energy Transition in North Kalimantan
The Governor of North Kalimantan inaugurated the Tarakan LNG Storage and Regasification Facility, developed by PT PLN Energi Gas, as a significant milestone in supporting the National Gasification Program, improving electricity supply reliability, and accelerating the transition to cleaner and more efficient energy in North Kalimantan.



19 November - November

PT PLN Energi Gas bersama PLN Nusantara Power ULPLTG/MG Duri kolaborasi program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) bertajuk BUGAR RAMA
PT PLN Energi Gas bersama PLN Nusantara Power ULPLTG/MG Duri meluncurkan program TJSL BUGAR RAMA (Budidaya Gurame – Rakyat Maju) di Desa Balai Pungut, Riau, untuk mendorong pemberdayaan masyarakat, penguatan ekonomi lokal, dan peningkatan kesejahteraan yang berkelanjutan melalui pengembangan budidaya perikanan air tawar.

PT PLN Energi Gas and PLN Nusantara Power, a subsidiary of the Duri Power Plant and Power Plant (ULPLTG/MG), collaborate on a Social and Environmental Responsibility (CSER) program called BUGAR RAMA.
PT PLN Energi Gas and PLN Nusantara Power, a subsidiary of the Duri Power Plant and Power Plant and Power Plant (ULPLTG/MG), launched the BUGAR RAMA (Gourami Cultivation – Advanced People) CSER program in Balai Pungut Village, Riau, to encourage community empowerment, strengthen the local economy, and improve sustainable welfare through the development of freshwater fisheries.

Peristiwa Penting 2025
2025 Significant Events



21 November - November

PT PLN Energi Gas berpartisipasi dalam forum Electricity Connect 2025
PT PLN Energi Gas berpartisipasi dalam forum *Electricity Connect* 2025 bersama PT PLN Energi Primer Indonesia untuk menampilkan proyek-proyek strategis di sektor gas dan energi primer serta memperkuat kolaborasi dalam mendukung ketahanan energi dan transisi energi berkelanjutan di Indonesia.

PT PLN Energi Gas participated in the Electricity Connect 2025 forum
PT PLN Energi Gas participated in the Electricity Connect 2025 forum with PT PLN Energi Primer Indonesia to showcase strategic projects in the gas and primary energy sectors and strengthen collaboration in supporting energy security and a sustainable energy transition in Indonesia.



27 November - November

PLN Energi Gas Perkuat Kapasitas Kepemimpinan melalui Pelatihan Coaching, Mentoring, dan Counseling (CMC)
PT PLN Energi Gas menyelenggarakan Pelatihan *Coaching, Mentoring*, dan *Counseling* (CMC) bagi jajaran manajemen dan Direksi sebagai upaya memperkuat kapabilitas kepemimpinan, mendorong pengembangan sumber daya manusia, serta mendukung terciptanya budaya kerja yang kolaboratif, adaptif, dan berorientasi pada kinerja berkelanjutan.

PLN Energi Gas Strengthens Leadership Capacity through Coaching, Mentoring, and Counseling (CMC) Training
PT PLN Energi Gas held Coaching, Mentoring, and Counseling (CMC) Training for management and the Board of Directors to strengthen leadership capabilities, encourage human resource development, and support the creation of a collaborative, adaptive, and sustainable performance-oriented work culture.



4 Desember - December

Mangrove untuk kehidupan Kota Tarakan
PLN Energi Gas dan PLN Energi Primer Indonesia bersama masyarakat melakukan penanaman sebanyak 1.000 bibit *mangrove* di kawasan pesisir Tarakan. Kegiatan ini bertujuan untuk mendukung rehabilitasi ekosistem mangrove yang memiliki peran penting dalam mencegah abrasi, menyerap karbon, serta menjaga keberlangsungan keanekaragaman hayati di wilayah pesisir.

Mangroves for the life of Tarakan City
PLN Energi Gas and PLN Energi Primer Indonesia, together with the community, planted 1,000 mangrove seedlings in the coastal area of Tarakan.This activity aims to support the rehabilitation of mangrove ecosystems, which play a crucial role in preventing coastal erosion, sequestering carbon, and maintaining biodiversity in coastal areas.



5 Desember - December

Program TPS3R (Reduce, Reuse, Recycle)
Penguatan pengelolaan lingkungan berbasis masyarakat melalui program TPS3R *(Reduce, Reuse, Recycle)* dan Urban Farming. Dalam kegiatan tersebut, insan PLN Energi Gas dan PLN Energi Primer Indonesia bersama masyarakat melakukan pembersihan kawasan hutan *mangrove* di sekitar TPS, mengumpulkan sampah yang kemudian ditimbang untuk diolah menjadi produk yang memiliki nilai tambah dan manfaat ekonomi.

The TPS3R (Reduce, Reuse, Recycle) Program
Strengthens community-based environmental management through TPS3R initiatives and urban farming. As part of this activity, personnel from PLN Energi Gas and PLN Energi Primer Indonesia collaborated with the local community to clean up the mangrove forest area near the TPS facility; they collected waste, which was then weighed and processed into products offering added value and economic benefits.



5 Desember - December

Site Visit Tanjung Batu Dukung Keandalan Pasokan Energi Nasional
Manajemen PT PLN Energi Gas melaksanakan *site visit* ke Pipa Gas Tanjung Batu untuk memastikan keandalan infrastruktur gas, memantau progres pembangunan pipa gas strategis, serta memperkuat koordinasi dalam mendukung pasokan energi yang aman, efisien, dan berkelanjutan.

Tanjung Batu Site Visit Supports National Energy Supply Reliability
PT PLN Energi Gas management conducted site visit to the Tanjung Batu Gas Pipeline to ensure the reliability of the gas infrastructure, monitor the progress of strategic gas pipeline construction, and strengthen coordination to support a safe, efficient, and sustainable energy supply.



8 Desember - December

PLN Energi Gas Raih Juara 3 Kategori BUMN Klaster di Bawah Rp1 Triliun pada Annual Report Award 2024
PT PLN Energi Gas berhasil meraih Juara 3 Kategori BUMN Klaster Pendapatan di bawah Rp1 Triliun pada ajang *Annual Report Award* (ARA) 2024 sebagai pengakuan atas komitmen Perseroan dalam menerapkan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan *Good Corporate Governance* (GCG) melalui penyusunan laporan tahunan yang berkualitas dan berkelanjutan.

PLN Energi Gas Won the Third Place in the SOE Cluster Under Rp1 Trillion Revenue Category at the 2024 Annual Report Awards
PT PLN Energi Gas won third place in the SOE Cluster Under Rp1 Trillion Revenue Category at the 2024 Annual Report Awards (ARA). This award recognizes the Company's commitment to implementing the principles of transparency, accountability, and Good Corporate Governance (GCG) through the preparation of high-quality and sustainable annual reports.



12 Desember - Desember

Site Visit Dewan Komisaris dan Direksi ke Proyek LNG Tarakan
Dewan Komisaris dan Direksi PT PLN Energi Gas melaksanakan site visit ke Proyek Fasilitas Penyimpanan dan Regasifikasi LNG Tarakan sebagai bentuk penguatan tata kelola perusahaan, pengawasan terhadap proyek strategis, serta memastikan pelaksanaan proyek berjalan sesuai rencana, standar keselamatan, dan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG).

Site Visit by the Board of Commissioners and Directors to the Tarakan LNG Project
The Board of Commissioners and Directors of PT PLN Energi Gas conducted site visit to the Tarakan LNG Storage and Regasification Facility Project to strengthen corporate governance, oversee strategic projects, and ensure project implementation is in line with plans, safety standards, and Good Corporate Governance (GCG) principles.



16 Desember - Desember

Penguatan Employee Engagement dan Kolaborasi Lintas Divisi melalui Program "Ngopi Yuk"
PT PLN Energi Gas menyelenggarakan program "Ngopi Yuk": Ngobrol Inspirasi Yukolaborasi! sebagai bagian dari transformasi budaya perusahaan untuk meningkatkan *employee engagement*, memperkuat kolaborasi lintas fungsi, membangun komunikasi yang konstruktif, serta mendukung pencapaian visi Perseroan sebagai penyedia solusi infrastruktur gas berkelas dunia.

Strengthening Employee Engagement and Cross-Division Collaboration through the "Let's Have Coffee" Program
PT PLN Energi Gas is holding the "Let's Have Coffee": Let's Chat About Inspiration, Let's Collaborate! program as part of its corporate culture transformation to increase employee engagement, strengthen cross-functional collaboration, build constructive communication, and support the Company's vision of becoming a world-class provider of gas infrastructure solutions.

Penghargaan Dan Sertifikasi
Awards and Certifications





PLN Energi Gas Raih Juara 3 Kategori BUMN Klaster di Bawah Rp1 Triliun pada Annual Report Award 2024

Komitmen PLN Energi Gas dalam menjunjung tinggi prinsip transparansi, akuntabilitas, dan tata kelola perusahaan yang baik membuahkan pengakuan nasional melalui peraihan Juara 3 Kategori BUMN Klaster Pendapatan di bawah Rp1 Triliun pada ajang *Annual Report Award* (ARA) 2024 yang diselenggarakan pada 8 Desember 2025. Penghargaan ini menjadi pencapaian perdana Perseroan dalam ajang ARA sekaligus tonggak penting yang menegaskan kualitas pelaporan korporasi serta konsistensi penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) di lingkungan PLN Energi Gas.

ARA merupakan penghargaan nasional yang diselenggarakan oleh Komite Nasional Kebijakan *Governance* (KNKG) bersama sejumlah institusi strategis, termasuk Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bursa Efek Indonesia (BEI), dan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). Sebagai salah satu tolok ukur kualitas tata kelola perusahaan di Indonesia, penghargaan ini diberikan kepada perusahaan yang mampu menunjukkan keterbukaan informasi, akuntabilitas, dan komitmen terhadap keberlanjutan dalam pelaporan korporasi.

Sejalan dengan tema ARA 2024, "*Leading with Integrity, Transparency, and Accountability: The Path to a Sustainable Future*", PLN Energi Gas mengusung tema laporan tahunan "Meningkatkan Standar Tata Kelola, Memperkuat Infrastruktur Gas Berkelanjutan". Penghargaan ini menjadi bukti bahwa upaya Perseroan dalam meningkatkan kualitas tata kelola dan pelaporan perusahaan telah memperoleh pengakuan dari pemangku kepentingan nasional. Capaian tersebut sekaligus memotivasi Perseroan untuk terus memperkuat praktik GCG, meningkatkan kualitas pelaporan korporasi, dan menciptakan nilai tambah yang berkelanjutan bagi pemegang saham serta seluruh pemangku kepentingan.

PLN Energi Gas Won the Third Place in the Category of SOE Cluster Under Rp1 Trillion at the 2024 Annual Report Awards

PLN Energi Gas has the commitment to upholding the principles of transparency, accountability, and good corporate governance, proofed by the achievement of national recognition through the third-place finish in the BUMN (State-Owned Enterprises) Category with Revenues Below Rp1 Trillion at the 2024 Annual Report Awards (ARA), held on December 8, 2025. This award indicates the Company's first ARA achievement and a significant milestone, affirming the quality of corporate reporting and the consistent implementation of Good Corporate Governance (GCG) within PLN Energi Gas.

ARA is a national award organized by the National Committee on Governance Policy (KNKG) in collaboration with several strategic institutions, including the Financial Services Authority (OJK), the Indonesia Stock Exchange (IDX), and the Indonesian Institute of Accountants (IAI). As a benchmark for corporate governance quality in Indonesia, this award recognizes companies that represent information transparency, accountability, and a commitment to sustainability in their corporate reporting.

In line with the ARA 2024 theme, "Leading with Integrity, Transparency, and Accountability: The Path to a Sustainable Future," PLN Energi Gas carries the theme of its annual report Raising Governance Standards, Strengthening Sustainable Gas Infrastructure". This award is proof that the Company's efforts in improving the quality of corporate governance and reporting have received recognition from national stakeholders. This achievement also motivates the Company to keep strengthening GCG practices, improving the quality of corporate reporting, and creating sustainable added value for shareholders and all stakeholders.



	Nama Sertifikasi Certification Name	Masa Berlaku Validity Period	Lembaga Pemberi Penghargaan Certification Agency
1	Sistem Manajemen Mutu Quality Management System ISO 9001:2015	24 Oktober 2025 hingga 23 Oktober 2028 October 24, 2025 to October 23, 2028	TUV Nord Indonesia
2	Sistem Manajemen Lingkungan Environmental Management System ISO 14001:2015	24 Oktober 2025 hingga 23 Okotber 2028 October 24, 2025 to October 23, 2028	TUV Nord Indonesia
3	ISO 37001:2016 (SMAP)	22 November 2024 hingga 21 November 2027 November 22, 2024 to November 21, 2027	TUV Nord Indonesia

Testimoni Untuk Laporan Tahunan
Testimonial For Annual Report



"Saya mengapresiasi kinerja PLN Energi Gas yang terus menunjukkan pertumbuhan positif serta memberikan kontribusi nyata bagi penguatan ekosistem energi nasional. Keberhasilan implementasi Regasifikasi LNG Tarakan menjadi tonggak penting yang mencerminkan komitmen perusahaan dalam menghadirkan pasokan energi yang lebih bersih, efisien, dan andal bagi sektor ketenagalistrikan. Capaian ini menegaskan peran PLN Energi Gas sebagai pelopor dalam pengembangan infrastruktur energi gas yang mendukung transisi energi dan memperkuat kemandirian energi Indonesia."

"I appreciate PLN Energi Gas performance, which keeps presenting positive growth and makes a real contribution to strengthening the national energy ecosystem. The successful implementation of the Tarakan LNG Regasification is an important milestone that reflects the Company's commitment to providing a cleaner, more efficient, and more reliable energy supply for the electricity sector. This achievement confirms PLN Energi Gas role as a pioneer in the development of gas energy infrastructure that supports the energy transition and strengthens energy independence of Indonesia."

Rakhmat Dewanto,
Direktur Perencanaan Korporat dan Pengembangan Bisnis PT PLN (Persero)
Director of Corporate Planning and Business Development PLN (Persero)

"Kami mengucapkan terima kasih kepada PLN Energi Gas atas komitmen dan dedikasinya dalam mewujudkan Proyek Regasifikasi Tarakan. Kehadiran proyek ini menjadi langkah strategis dalam memperkuat keandalan pasokan energi di Kota Tarakan. Kami berharap infrastruktur ini dapat terus mendukung stabilitas layanan energi sekaligus mendorong peningkatan kualitas pelayanan yang berkelanjutan bagi masyarakat."

"We thank PLN Energi Gas for the commitment and dedication in realizing the Tarakan Regasification Project. This project presence is a strategic step in strengthening the reliability of energy supply in Tarakan City. We hope this infrastructure will continue to support stable energy services while encouraging sustainable improvements in the quality of service for the community."

Dr. H. Khairul, M.Kes
Walikota Tarakan
Mayor of Tarakan



Testimoni Untuk Laporan Tahunan
Testimonial For Annual Report

"Kami menyambut baik komitmen PLN Energi Gas dalam mendukung pengembangan infrastruktur energi yang andal dan berkelanjutan. Langkah yang telah dilakukan menjadi kontribusi nyata dalam memperkuat ketahanan energi nasional sekaligus mendorong pemanfaatan energi yang lebih bersih. Kami berharap inisiatif ini dapat terus berkembang dan menjadi contoh dalam percepatan transisi energi di Indonesia."

"We welcome PLN Energi Gas commitment to supporting the development of reliable and sustainable energy infrastructure. The steps taken are real contribution to strengthening national energy security while encouraging the use of cleaner energy. We hope this initiative will continue to grow and turn as example in accelerating the energy transition in Indonesia."

Agung Kuswardono
PLT Direktur Perencanaan dan Pembangunan Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi
Acting Director of Oil and Gas Infrastructure Planning and Development





"Saya bangga melihat komitmen PLN Energi Gas dalam menghadirkan solusi energi yang andal dan berkelanjutan, terutama melalui Proyek Regasifikasi Tarakan. Semoga fasilitas ini memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat serta menjadi tonggak penting dalam pengembangan infrastruktur energi bersih di Indonesia. Teruslah berkarya, berinovasi, dan menjaga kinerja terbaik untuk mendukung terwujudnya sistem energi nasional yang semakin tangguh dan berkelanjutan."

"I am proud to see commitment by PLN Energi Gas to providing reliable and sustainable energy solutions, especially through the Tarakan Regasification Project. Hopefully, this facility will provide tangible benefits to the community and become an important milestone in the development of clean energy infrastructure in Indonesia. Continue to work, innovate, and maintain top performance to support the realization of an increasingly resilient and sustainable national energy system."

Nikson Silalahi
Komisaris Utama PT PLN Energi Primer Indonesia
President Commissioner of PT PLN Energi Primer Indonesia

Testimoni Untuk Laporan Tahunan
Testimonial For Annual Report



"Kami melihat PLN Energi Gas terus menunjukkan kinerja yang positif dalam memperkuat infrastruktur energi nasional dan mendukung keandalan sistem kelistrikan. Komitmen tersebut tercermin melalui hadirnya fasilitas Penyimpanan dan Regasifikasi LNG Tarakan yang menjadi bagian penting dalam menjaga kontinuitas pasokan energi bagi pembangkit listrik di Tarakan. Semoga PLN Energi Gas senantiasa menghadirkan inovasi, memperkuat kolaborasi, dan terus berkontribusi dalam membangun sistem energi nasional yang semakin tangguh, andal, dan berkelanjutan."

"We see PLN Energi Gas keeps presenting positive performance in strengthening the national energy infrastructure and supporting the reliability of the electricity system, proofed in the presence of the Tarakan LNG Storage and Regasification facility as a vital part of maintaining the continuity of energy supply for the Tarakan power plant. May PLN Energi Gas continue to present innovations, strengthen collaboration, and continue to contribute to building an increasingly resilient, reliable, and sustainable national energy system."

Rizal Calvary Marimbo
Direktur Manajemen Pembangkitan PT PLN (Persero)
Director of Generation Management PT PLN (Persero)



"Seiring dengan meningkatnya kebutuhan energi di Provinsi Kalimantan Utara, kehadiran infrastruktur energi yang andal dan berkelanjutan menjadi fondasi penting dalam mendukung pembangunan daerah serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kami mengucapkan selamat atas hadirnya fasilitas Penyimpanan dan Regasifikasi LNG Tarakan sebagai wujud komitmen PLN Energi Gas dalam memperkuat keandalan pasokan energi sekaligus mendukung penyediaan energi yang lebih bersih. Kami berharap inisiatif strategis ini memberikan manfaat yang luas bagi masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, serta memperkuat ketahanan energi di Kalimantan Utara. Semoga PLN Energi Gas terus menghadirkan inovasi dan memberikan kontribusi terbaik bagi pembangunan sektor energi Indonesia."

"As energy demand in North Kalimantan Province increases, the presence of reliable and sustainable energy infrastructure is a crucial foundation for supporting regional development and improving community welfare. We congratulate PLN Energi Gas on the launch of the Tarakan LNG Storage and Regasification facility, proofing the commitment to strengthening energy supply reliability while supporting the provision of cleaner energy. We hope this strategic initiative will provide broad benefits to the community, stimulate regional economic growth, and strengthen energy security in North Kalimantan. We hope PLN Energi Gas continues to innovate and make the best contribution to the development of energy sector in Indonesia."

Dr. H. Zainal A. Paliwang, SH., M.Hum
Gubernur Provinsi Kalimantan Utara
Governor of North Kalimantan Province

Testimoni Untuk Laporan Tahunan
Testimonial For Annual Report



"Kami mengapresiasi komitmen PLN Energi Gas dalam menghadirkan Program BUGAR RAMA sebagai implementasi TJSL yang berfokus pada pemberdayaan masyarakat. Kolaborasi ini menjadi bukti bahwa sinergi antar unit di lingkungan PLN Group mampu menghasilkan dampak sosial yang lebih luas dan berkelanjutan. Kami bangga dapat berkontribusi dalam kolaborasi strategis ini dan berharap kemitraan yang telah terjalin dapat terus diperkuat untuk menghadirkan lebih banyak manfaat bagi masyarakat dan mendukung pembangunan yang berkelanjutan."

"We appreciate PLN Energi Gas's commitment to launching the BUGAR RAMA Program as a Corporate Social and Environmental Responsibility (CSER) initiative focused on community empowerment. This collaboration demonstrates that synergy among PLN Group units can generate broader and more sustainable social impact. We are proud to contribute to this collaborative strategy and hope that our partnership will continue to strengthen, delivering further benefits to the community and supporting sustainable development."

Alfurqan Halim
Manajer PT PLN Nusantara Power ULPLTG/MG Duri
Manager PT PLN Nusantara Power ULPLTG/MG Duri



"Kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada PLN Energi Gas atas kepeduliannya melalui Program TJSL ini. Program ini menumbuhkan optimisme baru bagi kami untuk terus berkembang dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kami berharap inisiatif baik ini dapat terus berlanjut sehingga memberikan manfaat yang semakin luas bagi masyarakat."

"We extend our gratitude and appreciation to PLN Energi Gas for its commitment demonstrated through this Corporate Social and Environmental Responsibility (CSER) program. This program instills in us a renewed sense of optimism to continue growing and improving community welfare. We hope this commendable initiative will continue, thereby delivering even broader benefits to the community."

Wahidin
Ketua Kelompok Serai Serumpun
Chairperson of the Serai Serumpun Group



"Saya melihat Program SAJI FARM (Sapi dan Jagat Hijau Farm) menjadi bukti bahwa sebuah program TJSL dapat memberikan dampak yang jauh lebih besar ketika dijalankan melalui kolaborasi yang kuat. Tidak hanya menghadirkan dukungan bagi masyarakat, tetapi juga membangun semangat belajar dan berkembang di kalangan para peternak. Pendekatan tersebut memberikan ruang bagi para peternak untuk berkembang secara ekonomi sekaligus meningkatkan kompetensi mereka dalam mengelola usaha peternakan yang lebih produktif dan berdaya saing. Semoga inisiatif seperti ini terus berlanjut dan menjangkau lebih banyak komunitas."

"I view the SAJI FARM (Sapi dan Jagat Hijau Farm) program as proof that a Corporate Social and Environmental Responsibility (CSER) program can deliver a far greater impact when implemented through strong collaboration. It not only provides support to the community but also fosters a spirit of learning and growth among the livestock farmers." "This approach enables livestock farmers to grow economically while enhancing their competence in managing more productive and competitive farming operations. Hopefully, initiatives like this will continue and reach even more communities."

Dr. Bramada Winiar Putra, S.Pt., M.Si
Institut Pertanian Bogor Fakultas Peternakan
Institut Pertanian Bogor Faculty of Animal Science


PLN
Energi Gas
AGIL



Laporan Manajemen

Management Report



Saiful Chaniago

Komisaris Utama
President Commissioner

Laporan Dewan Komisaris
Report from the Board of Commissioners

Pandangan Dewan Komisaris Terhadap Kinerja Direksi Tahun 2025

Dewan Komisaris memandang bahwa Direksi telah menjalankan tugas pengurusan Perusahaan dengan baik sepanjang tahun 2025 di tengah dinamika industri energi, ketidakpastian ekonomi global, serta berbagai tantangan dalam pengembangan infrastruktur gas nasional. Strategi yang diterapkan Direksi dinilai telah selaras dengan visi dan misi Perusahaan, Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP), Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP), serta arah kebijakan PLN Group dan Pemegang Saham.

Berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan secara berkala sepanjang tahun buku 2025, Dewan Komisaris menilai bahwa Direksi berhasil menjaga kinerja operasional dan keuangan Perusahaan secara baik. Hal ini tercermin dari pencapaian Nilai Kinerja Organisasi (NKO) sebesar 101,08, laba tahun berjalan sebesar Rp94,74 miliar, EBITDA sebesar Rp305,84 miliar atau 108,17% dari target RKAP, *Return on Invested Capital* (ROIC) sebesar 11,78%, serta tingkat keandalan infrastruktur gas yang tercermin dari *Equivalent Availability Factor* (EAF) Midstream Gas sebesar 99,89%.

Dewan Komisaris juga memberikan apresiasi atas keberhasilan Direksi dalam menjaga keandalan operasional infrastruktur gas, memperkuat sinergi dengan PLN Group yang mencapai Rp718,50 miliar atau 110% dari target, serta melanjutkan berbagai proyek strategis yang mendukung pengembangan infrastruktur gas nasional dan ketahanan energi Indonesia.

Meskipun demikian, Dewan Komisaris mencermati bahwa realisasi investasi Perusahaan masih berada di bawah target RKAP, terutama akibat adanya penyesuaian desain, perubahan lingkup pekerjaan, dan penjadwalan ulang pada beberapa proyek strategis. Atas kondisi tersebut, Dewan Komisaris telah memberikan arahan kepada Direksi untuk memperkuat pengendalian proyek, meningkatkan efektivitas manajemen risiko, mempercepat penyelesaian proyek-proyek prioritas, serta memastikan optimalisasi manfaat ekonomi dari investasi yang telah dilakukan.

Viewpoint By The Board Of Commissioners For The Board Of Directors Performance In 2025

The Board of Commissioners believes that the Board of Directors performed the management duties effectively throughout 2025 amid the dynamics of the energy industry, global economic uncertainty, and various challenges in the development of national gas infrastructure. The Board of Directors applies the considered strategies to be aligned with the Company's vision and mission, the Company's Long-Term Plan (RJPP), the Company's Work Plan and Budget (RKAP), as well as the policy direction by the PLN Group and Shareholders.

According to the results of periodic oversight throughout the 2025 fiscal year, the Board of Commissioners assesses that the Board of Directors successfully maintained the Company's operational and financial performance as evidenced in the achievement for Organizational Performance Score (NKO) of 101.08, current year profit of Rp94.74 billion, EBITDA of Rp305.84 billion, or 108.17% of the RKAP target, Return on Invested Capital (ROIC) of 11.78%, and reliable gas infrastructure, as reflected in the Midstream Gas Equivalent Availability Factor (EAF) of 99.89%.

The Board of Commissioners also expressed appreciation for the Board of Directors success in maintaining the operational reliability of gas infrastructure, strengthening synergies with the PLN Group, which reached Rp718.50 billion, or 110% of the target, as well as keeping various strategic projects running to support the development of national gas infrastructure and Indonesia's energy security.

Nevertheless, the Board of Commissioners is fully aware that the Company's investment realization remained below the RKAP target, primarily due to design adjustments, changes in the scope of work, and the rescheduling of several strategic projects. In response to these conditions, the Board of Commissioners has directed the Board of Directors to strengthen project controls, increase the effectiveness of risk management, accelerate the completion of priority projects, and ensure the optimization of economic benefits from existing investments.

Dalam aspek tata kelola perusahaan, manajemen risiko, dan kepatuhan, Dewan Komisaris menilai Direksi telah menunjukkan komitmen yang kuat dalam memperkuat implementasi *Good Corporate Governance* (GCG), Sistem Pengendalian Internal, Sistem Manajemen Anti Penyuapan, serta penerapan *Governance, Risk Management and Compliance* (GRC) secara terintegrasi. Upaya tersebut menjadi fondasi penting dalam menjaga keberlanjutan usaha dan meningkatkan kepercayaan para pemangku kepentingan.

Dewan Komisaris juga menilai bahwa Direksi telah memperhatikan aspek *Environmental, Social and Governance* (ESG) dalam penyusunan dan implementasi strategi bisnis. Pengembangan infrastruktur gas yang dilakukan Perusahaan tidak hanya mendukung keandalan pasokan energi primer bagi pembangkit listrik, tetapi juga berkontribusi terhadap agenda transisi energi nasional menuju sistem energi yang lebih bersih dan berkelanjutan.

Memasuki tahun 2026, Dewan Komisaris memandang prospek usaha PLN Energi Gas tetap positif. Meningkatnya kebutuhan gas sebagai energi transisi, pengembangan program gasifikasi pembangkit, serta kebutuhan infrastruktur LNG dan midstream gas nasional memberikan peluang yang besar bagi Perusahaan untuk terus bertumbuh. Namun demikian, Dewan Komisaris mengingatkan Direksi agar tetap mewaspadai dinamika geopolitik global, volatilitas harga energi, risiko investasi, serta perubahan regulasi yang dapat memengaruhi kinerja usaha Perusahaan.

Dengan mempertimbangkan capaian kinerja, efektivitas strategi, kualitas tata kelola, serta prospek usaha yang dimiliki, Dewan Komisaris berpendapat bahwa Direksi telah melaksanakan tugas pengurusan Perusahaan secara efektif sepanjang tahun 2025 dan telah menunjukkan upaya yang memadai dalam menjaga pertumbuhan usaha, meningkatkan nilai perusahaan, serta mendukung pencapaian tujuan strategis PLN Energi Gas.

In terms of corporate governance, risk management, and compliance, the Board of Commissioners assesses that the Board of Directors has demonstrated strong commitment to strengthening the implementation of Good Corporate Governance (GCG), the Internal Control System, the Anti-Bribery Management System, and the integrated implementation of Governance, Risk Management, and Compliance (GRC). These efforts are crucial foundation for maintaining business sustainability and enhancing the stakeholders trust.

The Board of Commissioners also assesses that the Board of Directors has considered Environmental, Social, and Governance (ESG) aspects in the business strategies development and implementation. The Company develops gas infrastructure, not only supports the reliability of primary energy supply for power plants but also contributes to the national energy transition agenda towards a cleaner and more sustainable energy system.

Riding into 2026, the Board of Commissioners considers PLN Energi Gas business prospects as remaining positive. The increasing demand for gas as a transitional energy source, the development of the power plant gasification program, and the need for national LNG and midstream gas infrastructure provide significant opportunities for the Company to continue growing. Nevertheless, the Board of Commissioners reminds the Board of Directors to remain vigilant regarding global geopolitical dynamics, energy price volatility, investment risks, and regulatory changes that may impact business performance of the Company.

Considering performance achievements, strategic effectiveness, governance quality, and business prospects, the Board of Commissioners is of the opinion that the Board of Directors has effectively carried out management duties throughout 2025 and has demonstrated adequate efforts in maintaining business growth, increasing corporate value, and supporting the strategic objectives achievement of PLN Energi Gas.

Para Pemegang Saham dan Pemangku Kepentingan yang Terhormat,

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga Dewan Komisaris dapat menjalankan fungsi pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi dengan baik sepanjang tahun 2025. Di tengah dinamika perekonomian global, volatilitas sektor energi, serta tantangan dalam pengembangan infrastruktur gas nasional, Perusahaan mampu mempertahankan kinerja yang positif dan terus melanjutkan agenda transformasi bisnis secara berkelanjutan.

Sebagai organ perusahaan yang menjalankan fungsi pengawasan, Dewan Komisaris senantiasa memastikan bahwa pengelolaan Perusahaan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar, keputusan Pemegang Saham, serta prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik *(Good Corporate Governance)*. Melalui pelaksanaan fungsi pengawasan yang independen, objektif, dan konstruktif, Dewan Komisaris terus memberikan arahan, masukan strategis, serta rekomendasi kepada Direksi guna memastikan bahwa setiap kebijakan dan keputusan strategis yang diambil senantiasa berorientasi pada penciptaan nilai jangka panjang, pengelolaan risiko yang efektif, dan keberlanjutan usaha.

Sepanjang tahun 2025, Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan secara aktif terhadap implementasi Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP), pelaksanaan Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP), pengembangan proyek-proyek strategis, pencapaian kinerja operasional dan keuangan, penerapan manajemen risiko, pengendalian internal, serta implementasi tata kelola perusahaan. Dewan Komisaris juga melakukan evaluasi secara berkala terhadap kinerja Direksi melalui rapat bersama Direksi, pembahasan laporan manajemen, serta mekanisme pengawasan lainnya untuk memastikan bahwa strategi dan kebijakan perusahaan berjalan secara efektif sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Laporan Dewan Komisaris ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan fungsi pengawasan selama Tahun Buku 2025 sekaligus sebagai wujud komitmen Perusahaan dalam menerapkan prinsip transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan kewajaran.

Dear Shareholders and Stakeholders,

Our praise and gratitude to God Almighty for the grace and blessings which enabling the Board of Commissioners to effectively carry out supervisory and advisory functions to the Board of Directors throughout 2025. Amid the dynamics of the global economy, the volatility of the energy sector, and the challenges of developing national gas infrastructure, the Company has been able to maintain positive performance and continue sustainable business transformation agenda.

As the oversight institution within the Company, the Board of Commissioners consistently ensures the management compliance with laws and regulations, the Articles of Association, Shareholders resolutions, and the principles of Good Corporate Governance. Through its independent, objective, and constructive oversight function, the Board of Commissioners continues to provide direction, strategic input, and recommendations to the Board of Directors to ensure that every policy and strategic decision taken is oriented towards long-term value creation, effective risk management, and business sustainability.

Throughout 2025, the Board of Commissioners actively oversaw the implementation of the Company's Work Plan and Budget (RKAP), the Company's Long-Term Plan (RJPP), the development of strategic projects, the achievement of operational and financial performance, the implementation of risk management, internal control, and the implementation of corporate governance. The Board of Commissioners also periodically evaluated the performance of the Board of Directors through joint meetings, discussions of management reports, and other oversight mechanisms to ensure that the company's strategies and policies were implemented effectively in accordance with established objectives.

The Board of Commissioners prepared this report as accountability for the supervisory function implementation during 2025 Fiscal Year and presents commitment by the Company to implementing the principles of transparency, accountability, responsibility, independence, and fairness. Through

Melalui laporan ini, Dewan Komisaris menyampaikan pandangan atas kinerja Direksi, efektivitas pelaksanaan strategi perusahaan, penerapan tata kelola, serta prospek usaha Perusahaan sebagai bagian dari upaya memberikan nilai tambah bagi Pemegang Saham dan seluruh pemangku kepentingan.

this report, the Board of Commissioners conveys the viewpoints on the Board of Directors performance, the effectiveness of the Company's strategy implementation, the implementation of corporate governance, and the Company's business prospect as part of the efforts to provide added value to Shareholders and all stakeholders.

Pandangan Dewan Komisaris terhadap Kondisi Makroekonomi dan Industri Energi Tahun 2025

Viewpoints by the Board of Commissioners on Macroeconomic Conditions and the Energy Industry in 2025

Dewan Komisaris menilai bahwa sepanjang tahun 2025 Perusahaan menjalankan usahanya di tengah lingkungan bisnis yang masih penuh tantangan. Ketidakpastian geopolitik global, perlambatan pertumbuhan ekonomi di sejumlah negara, serta volatilitas harga energi dan komoditas masih memberikan tekanan terhadap industri energi. Namun demikian, ketahanan perekonomian Indonesia yang tetap terjaga, didukung oleh stabilitas makroekonomi, inflasi yang terkendali, serta aktivitas ekonomi domestik yang positif, menjadi faktor penting yang mampu menjaga prospek pertumbuhan sektor energi nasional.

The Board of Commissioners assesses that throughout 2025, the Company operated business amidst a challenging business environment. Global geopolitical uncertainty, slowing economic growth in several countries, and volatile energy and commodity prices kept exerting pressure on the energy industry. However, the maintained resilience of the Indonesian economy, supported by macroeconomic stability, controlled inflation, and positive domestic economic activity, are key factors in maintaining the growth prospects of the national energy sector.

Di tengah dinamika tersebut, Dewan Komisaris berpandangan bahwa industri gas bumi semakin memegang peranan strategis sebagai energi transisi dalam mendukung pencapaian target *Net Zero Emission* (NZE) Indonesia. Komitmen Pemerintah terhadap implementasi *Enhanced Nationally Determined Contribution* (*Enhanced* NDC), pengembangan program gasifikasi pembangkit, serta optimalisasi pemanfaatan gas bumi domestik memberikan peluang yang besar bagi pengembangan infrastruktur gas nasional. Pada saat yang sama, Dewan Komisaris juga mencermati masih adanya sejumlah tantangan yang perlu diantisipasi, antara lain optimalisasi pemanfaatan sumber daya gas domestik, percepatan pembangunan infrastruktur di berbagai wilayah, dinamika pasokan dan harga energi global, serta kebutuhan investasi yang semakin besar untuk mendukung pengembangan infrastruktur energi.

Amid these dynamics, the Board of Commissioners believes that the natural gas industry is increasingly undertaking strategic role as a transitional energy source in supporting the achievement of Indonesia's Net Zero Emission (NZE) target. Commitment by the government to implementing the Enhanced Nationally Determined Contribution (Enhanced NDC), developing the power plant gasification program, and optimizing domestic natural gas utilization provide significant opportunities for the development of national gas infrastructure. At the same time, the Board of Commissioners is also fully aware that several challenges remain need to be overcome, including optimizing the utilization of domestic gas resources, accelerating infrastructure development in various regions, the dynamics of global energy supply and prices, and the increasing need for investment to support energy infrastructure development.

Dalam konteks tersebut, Dewan Komisaris menilai bahwa PLN Energi Gas memiliki posisi yang semakin

In this context, the Board of Commissioners assesses that PLN Energi Gas has an increasingly

strategis sebagai bagian dari PLN Group dalam mendukung transformasi sektor ketenagalistrikan nasional. Melalui pengembangan dan pengoperasian infrastruktur midstream gas, termasuk jaringan pipa gas, fasilitas LNG, *Floating Storage Regasification Unit* (FSRU), serta sarana pendukung lainnya, Perusahaan berperan penting dalam menjamin keandalan pasokan gas bagi pembangkit listrik sekaligus mendukung upaya transisi menuju sistem energi yang lebih bersih, efisien, dan berkelanjutan.

Dewan Komisaris memberikan apresiasi atas langkah Direksi yang secara konsisten mengarahkan strategi perusahaan untuk memperkuat kapasitas infrastruktur gas, meningkatkan keandalan operasi, memperluas sinergi dalam PLN Group, serta mengembangkan peluang usaha baru yang mendukung pertumbuhan berkelanjutan. Menurut pandangan Dewan Komisaris, strategi tersebut telah sejalan dengan arah kebijakan Pemerintah dan kebutuhan pengembangan sektor energi nasional, sekaligus memperkuat posisi Perusahaan sebagai penyedia solusi infrastruktur gas yang terintegrasi.

Ke depan, Dewan Komisaris memandang bahwa meningkatnya kebutuhan gas bumi sebagai energi transisi akan terus membuka peluang pertumbuhan bagi Perusahaan. Namun demikian, Direksi diharapkan tetap memperkuat pengelolaan risiko, meningkatkan efektivitas pelaksanaan proyek-proyek strategis, mengoptimalkan pemanfaatan aset yang dimiliki, serta terus memperkuat tata kelola perusahaan agar Perusahaan mampu memanfaatkan peluang tersebut secara optimal dan berkelanjutan. Dengan langkah-langkah tersebut, Dewan Komisaris meyakini PLN Energi Gas akan semakin memperkokoh perannya dalam mendukung ketahanan energi nasional sekaligus menciptakan nilai tambah yang berkelanjutan bagi Pemegang Saham dan seluruh pemangku kepentingan.

strategic position as part of the PLN Group in supporting the transformation of the national electricity sector. Through the development and operation of midstream gas infrastructure, including gas pipelines, LNG facilities, Floating Storage Regasification Units (FSRUs), and other supporting facilities, the Company undertakes critical role in ensuring reliable gas supply for power plants while supporting the transition to a cleaner, more efficient, and more sustainable energy system.

The Board of Commissioners commends the Board of Directors for consistently directing the Company's strategy to strengthen gas infrastructure capacity, improve operational reliability, expand synergies within the PLN Group, and develop new business opportunities that support sustainable growth. The Board of Commissioners considers this strategy aligns with the government policy directions and the development needs of the national energy sector, while strengthening the Company's position as provider of integrated gas infrastructure solutions.

Going forward, the Board of Commissioners believes that the increasing demand for natural gas as a transitional energy source will continue to open up growth opportunities for the Company. However, the Board of Directors is expected to keep strengthening risk management, increasing the effectiveness of strategic project implementation, optimizing the utilization of existing assets, and continuing to strengthen corporate governance so that the Company is able to capitalize on these opportunities optimally and sustainably. With these steps, the Board of Commissioners believes that PLN Energi Gas will further strengthen the role in supporting national energy security while creating sustainable added values for the shareholders and all stakeholders.

Keterlibatan Dewan Komisaris dalam Proses Perumusan dan Pengawasan Implementasi Strategi

Sepanjang tahun 2025, Dewan Komisaris menjalankan fungsi pengawasan dan pemberian nasihat secara aktif guna memastikan bahwa strategi dan kebijakan yang ditetapkan Direksi mampu mendukung pencapaian sasaran perusahaan serta selaras dengan arah pengembangan PLN Group, Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP), Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP), serta kebijakan Pemerintah dalam mendukung transisi energi nasional.

Sejak tahap perumusan strategi, Dewan Komisaris terlibat melalui pemberian arahan, masukan, dan rekomendasi strategis kepada Direksi. Pembahasan dilakukan terhadap berbagai aspek penting, antara lain perkembangan industri energi, proyeksi kebutuhan infrastruktur gas nasional, peluang pengembangan bisnis midstream gas, kondisi keuangan perusahaan, kebutuhan investasi, profil risiko, hingga kesiapan organisasi dalam melaksanakan program-program strategis. Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, Dewan Komisaris menilai bahwa strategi bisnis dan RKAP Tahun 2025 telah disusun secara realistis, adaptif terhadap dinamika lingkungan usaha, serta mampu mendukung pertumbuhan perusahaan secara berkelanjutan. Atas dasar pertimbangan tersebut, Dewan Komisaris memberikan persetujuan terhadap RKAP sebagai acuan pelaksanaan dan pengukuran kinerja Direksi selama tahun buku 2025.

Dalam pelaksanaan strategi, Dewan Komisaris secara berkesinambungan melakukan pengawasan terhadap implementasi program kerja dan pencapaian target perusahaan. Pengawasan dilaksanakan melalui rapat Dewan Komisaris, rapat gabungan dengan Direksi, pembahasan laporan manajemen secara berkala, serta penelaahan atas perkembangan proyek-proyek strategis, kinerja operasional, kondisi keuangan, penerapan manajemen risiko, dan implementasi tata kelola perusahaan. Melalui mekanisme tersebut, Dewan Komisaris memberikan berbagai arahan dan rekomendasi kepada Direksi guna memastikan setiap kebijakan dan keputusan strategis dilaksanakan

The Board of Commissioners Involvement in the Strategy Formulation and Oversight Process

Throughout 2025, the Board of Commissioners actively oversaw and advised to ensure that the strategies and policies established by the Board of Directors supported the achievement of the Company's targets and aligned with the development direction by the PLN Group, the Company's Long-Term Plan (RJPP), the Company's Work Plan and Budget (RKAP), and Government policies supporting the national energy transition.

From the strategy formulation stage, the Board of Commissioners was involved by providing strategic direction, input, and recommendations to the Board of Directors. Discussions covered various important aspects, including developments in the energy industry, projected national gas infrastructure needs, opportunities for developing the midstream gas business, the company's financial condition, investment needs, risk profile, and organizational readiness to implement strategic programs. Based on the evaluation results, the Board of Commissioners assessed that the business strategy and RKAP for 2025 were formulated realistically, adaptive to the dynamics of the business environment, and capable of supporting the Company's sustainable growth. Based on these considerations, the Board of Commissioners approved the Work Plan and Budget (RKAP) as a reference for implementing and measuring the Board of Directors' performance during the 2025 fiscal year.

In implementing the strategy, the Board of Commissioners continuously monitors the implementation of work programs and the achievement of the Company targets. The Board of Commissioners oversight applied through meetings, joint meetings with the Board of Directors, periodic discussions of management reports, and reviews of strategic project developments, operational performance, financial condition, risk management implementation, and corporate governance. Through these mechanisms, the Board of Commissioners provides various directions and recommendations to the Board of Directors to ensure that every strategic

secara efektif, akuntabel, serta tetap berada dalam koridor prinsip kehati-hatian.

policy and decision is implemented effectively, accountably, and remains within the framework of prudent principles.

Selain melalui mekanisme rapat, Dewan Komisaris juga melakukan kunjungan ke fasilitas operasional dan proyek-proyek strategis untuk memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai pelaksanaan program kerja di lapangan. Hasil pengawasan tersebut menjadi bahan evaluasi dalam memberikan masukan kepada Direksi, khususnya terkait percepatan penyelesaian proyek strategis, peningkatan keandalan infrastruktur gas, optimalisasi investasi, penguatan pengendalian risiko, serta peningkatan efektivitas pengelolaan aset perusahaan.

More than meetings, the Board of Commissioners also visits operational facilities and strategic projects to gain a more comprehensive understanding of the implementation of work programs in the field. The monitoring results serve as evaluation material for providing input to the Board of Directors, particularly regarding the acceleration of strategic project completion, increasing the reliability of gas infrastructure, optimizing investments, strengthening risk control, and increasing the effectiveness of company asset management.

Berdasarkan hasil pengawasan sepanjang tahun 2025, Dewan Komisaris menilai bahwa Direksi telah melaksanakan strategi perusahaan secara efektif. Hal tersebut tercermin dari keberhasilan Perusahaan merealisasikan sebagian besar target strategis, menjaga keandalan operasional infrastruktur gas, meningkatkan efisiensi usaha, memperkuat sinergi dengan PLN Group, serta mempertahankan penerapan tata kelola perusahaan, manajemen risiko, dan kepatuhan secara konsisten. Meskipun demikian, Dewan Komisaris juga memberikan perhatian khusus terhadap realisasi investasi yang belum sepenuhnya mencapai target akibat penyesuaian pada beberapa proyek strategis. Atas kondisi tersebut, Dewan Komisaris telah memberikan arahan kepada Direksi untuk memperkuat pengendalian proyek, mempercepat penyelesaian investasi prioritas, serta mengoptimalkan manfaat ekonomi dari aset yang dibangun.

Based on the monitoring results throughout 2025, the Board of Commissioners assesses that the Board of Directors has implemented the Company's strategy effectively as reflected in the Company's success in achieving most of the strategic targets, maintaining the operational reliability of gas infrastructure, improving business efficiency, strengthening synergies with the PLN Group, and maintaining consistent implementation of good corporate governance, risk management, and compliance. However, the Board of Commissioners is also paying particular attention to the unfully achieved investment realization targets due to adjustments to several strategic projects. In response, the Board of Commissioners has directed the Board of Directors to strengthen project control, accelerate the completion of priority investments, and optimize the economic benefits of the assets under construction.

Dewan Komisaris meyakini bahwa sinergi yang erat antara Dewan Komisaris dan Direksi, disertai pelaksanaan fungsi pengawasan yang independen, objektif, dan konstruktif, telah menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga kinerja Perusahaan sepanjang tahun 2025. Ke depan, Dewan Komisaris akan terus mengawal implementasi strategi perusahaan agar tetap adaptif terhadap dinamika industri energi, mampu menciptakan nilai tambah yang berkelanjutan, serta mendukung terwujudnya visi PLN Energi Gas sebagai penyedia solusi infrastruktur gas yang andal dan berdaya saing.

The Board of Commissioners believes that the close synergy between the Board of Commissioners and the Board of Directors, coupled with the implementation of an independent, objective, and constructive supervisory function, has been a critical factor in maintaining the Company performance throughout 2025. Moving forward, the Board of Commissioners will continue to oversee the implementation of the Company's strategy to ensure it remains adaptive to the dynamics of the energy industry, creates sustainable added value, and supports the vision realization by PLN Energi Gas as a provider of reliable and competitive gas infrastructure solutions.

Fokus Pengawasan Strategi Dewan Komisaris Tahun 2025

Sepanjang tahun 2025, Dewan Komisaris memusatkan perhatian pada pengawasan terhadap implementasi strategi perusahaan guna memastikan bahwa seluruh kebijakan dan langkah strategis yang dijalankan Direksi selaras dengan Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP), Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP), arahan Pemegang Saham, serta kebijakan transformasi PLN Group. Fokus pengawasan diarahkan untuk memastikan bahwa strategi yang dijalankan mampu memperkuat daya saing perusahaan, menjaga keberlanjutan usaha, serta menciptakan nilai tambah bagi para pemegang saham dan pemangku kepentingan.

Dalam menjalankan fungsi tersebut, Dewan Komisaris memberikan perhatian khusus terhadap pencapaian target operasional dan keuangan, pelaksanaan proyek-proyek strategis pengembangan infrastruktur midstream gas, optimalisasi investasi dan pengelolaan aset, penguatan sinergi dengan PLN Group, serta efektivitas penerapan tata kelola perusahaan, manajemen risiko, pengendalian internal, dan kepatuhan. Evaluasi dilakukan secara berkala melalui pembahasan laporan manajemen, rapat Dewan Komisaris, rapat bersama Direksi, serta penelaahan atas realisasi RKAP dan Kontrak Manajemen. Melalui mekanisme tersebut, Dewan Komisaris menyampaikan berbagai arahan dan rekomendasi strategis guna memastikan bahwa setiap kebijakan dilaksanakan secara efektif, akuntabel, dan sesuai dengan prinsip kehati-hatian.

Berdasarkan hasil pengawasan sepanjang tahun 2025, Dewan Komisaris menilai bahwa Direksi telah melaksanakan sebagian besar prioritas strategis perusahaan secara efektif. Penilaian tersebut didasarkan pada keberhasilan Perusahaan menjaga keandalan operasional infrastruktur gas, meningkatkan efisiensi usaha, memperkuat sinergi dalam PLN Group, serta membukukan capaian kinerja yang secara umum memenuhi bahkan melampaui sebagian besar target yang telah ditetapkan. Meskipun demikian, Dewan Komisaris tetap memberikan perhatian terhadap realisasi investasi yang belum sepenuhnya mencapai target akibat penyesuaian pada beberapa proyek strategis. Atas kondisi tersebut, Dewan Komisaris telah

Strategic Oversight Focus by the Board of Commissioners in 2025

Throughout 2025, the Board of Commissioners focussed on overseeing the strategy implementation of the Company to ensure that all policies and strategic initiatives implemented by the Board of Directors align with the Company's Long-Term Plan (RJPP), the Company's Work Plan and Budget (RKAP), shareholders directives, and transformation policies of the PLN Group. The Company directs oversight focus at ensuring that the implemented strategy strengthens the Company's competitiveness, maintains business sustainability, and creates added value for shareholders and stakeholders.

In carrying out this function, the Board of Commissioners pays special attention to the achievement of operational and financial targets, the implementation of strategic midstream gas infrastructure development projects, the optimization of investment and asset management, strengthening synergies with the PLN Group, and the effectiveness of corporate governance, risk management, internal control, and compliance. PLN Energi Gas periodically evaluates through discussions of management reports, Board of Commissioners meetings, joint meetings with the Board of Directors, and reviews of the implementation of the RKAP and Management Contract. Through these mechanisms, the Board of Commissioners provides various strategic directives and recommendations to ensure that each policy is implemented effectively, accountably, and according to the prudent principles.

Based on the oversight results during 2025, the Board of Commissioners assesses that the Board of Directors has effectively implemented most of the Company's strategic priorities. This assessment is based on the Company's success in maintaining the operational reliability of its gas infrastructure, improving business efficiency, strengthening synergies within the PLN Group, and achieving performance that generally met or exceeded most of the established targets. Nevertheless, the Board of Commissioners remains concerned about the unfully achieved investment realization targets due to adjustments to several strategic projects. In response, the Board of Commissioners has directed

memberikan arahan kepada Direksi untuk memperkuat pengendalian proyek, mempercepat penyelesaian investasi prioritas, serta mengoptimalkan pemanfaatan aset agar mampu memberikan manfaat ekonomi secara optimal.

Dewan Komisaris berpandangan bahwa strategi yang dirumuskan dan diimplementasikan Direksi telah selaras dengan peran PLN Energi Gas sebagai bagian dari Subholding PLN Energi Primer Indonesia dalam mendukung penyediaan energi primer bagi sektor ketenagalistrikan nasional dan percepatan transisi energi. Sinergi yang terjalin secara konstruktif antara Dewan Komisaris dan Direksi menjadi faktor penting dalam menjaga efektivitas implementasi strategi, pengelolaan risiko, serta pencapaian sasaran perusahaan sepanjang tahun 2025.

Ke depan, Dewan Komisaris akan terus menjalankan fungsi pengawasan secara independen, objektif, dan konstruktif dengan memberikan arahan strategis kepada Direksi agar setiap program dan inisiatif perusahaan tetap adaptif terhadap dinamika industri energi, mampu mengelola risiko secara efektif, memperkuat tata kelola perusahaan, serta menciptakan pertumbuhan usaha yang berkelanjutan dan nilai tambah bagi seluruh pemangku kepentingan.

Pandangan Dewan Komisaris terhadap Kendala yang Dihadapi serta Upaya Direksi dalam Menghadapi Tantangan

Dewan Komisaris memahami bahwa sepanjang tahun 2025 Perusahaan menjalankan kegiatan usahanya di tengah berbagai tantangan, baik yang berasal dari dinamika eksternal maupun faktor internal perusahaan. Ketidakpastian ekonomi global, volatilitas harga energi, serta kompleksitas pembangunan infrastruktur gas yang melibatkan berbagai aspek teknis, perizinan, dan koordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan menjadi tantangan yang memerlukan pengelolaan secara cermat. Dewan Komisaris juga mencermati adanya penyesuaian pada beberapa proyek strategis yang berdampak terhadap realisasi investasi Perusahaan, khususnya pada proyek Gasifikasi Tarakan, infrastruktur Punagaya, dan pembangunan pipa gas Cilegon.

the Board of Directors to strengthen project control, accelerate the completion of priority investments, and optimize asset utilization to maximize economic benefits.

The Board of Commissioners believes that the strategies formulated and implemented by the Board of Directors align with PLN Energi Gas's role as part of the PLN Energi Primer Indonesia Subholding, supporting the provision of primary energy for the national electricity sector and accelerating the energy transition. The constructive synergy between the Board of Commissioners and the Board of Directors is a crucial factor in maintaining the effectiveness of strategy implementation, risk management, and achieving the company's goals throughout 2025.

Going forward, the Board of Commissioners will continue to carry out its oversight function independently, objectively, and constructively by providing strategic direction to the Board of Directors to ensure that every company program and initiative remains adaptive to the dynamics of the energy industry, manages risks effectively, strengthens corporate governance, and creates sustainable business growth and added value for all stakeholders.

Viewpoints by the Board of Commissioners on the Challenges Faced and the Board of Directors Efforts to Address

The Board of Commissioners understands that, the Company operated business amidst various challenges throughout 2025, originating from both external dynamics and internal factors. Global economic uncertainty, energy price volatility, and the complexity of gas infrastructure development, which involves various technical aspects, permits, and coordination with various stakeholders, brought the challenges that require careful management. The Board of Commissioners also transcribed adjustments to several strategic projects that impacted the Company's investment realization, particularly the Tarakan Gasification Project, the Punagaya infrastructure, and the Cilegon gas pipeline construction.

Terhadap kondisi tersebut, Dewan Komisaris menilai bahwa Direksi telah mengambil langkah-langkah yang tepat dan terukur dalam mengendalikan berbagai risiko yang dihadapi. Penguatan penerapan manajemen risiko secara terintegrasi, peningkatan pengawasan terhadap pelaksanaan proyek, koordinasi yang lebih intensif dengan PLN Group, regulator, kontraktor, dan pemangku kepentingan lainnya, serta implementasi program efisiensi biaya merupakan respons yang dinilai relevan dalam menjaga keberlangsungan operasional dan kinerja perusahaan di tengah perubahan lingkungan bisnis yang dinamis.

Dewan Komisaris juga memberikan apresiasi atas komitmen Direksi dalam memperkuat fundamental perusahaan melalui optimalisasi aset, pengembangan sumber pendapatan baru di luar bisnis utama (*beyond kWh*), percepatan transformasi digital, serta peningkatan kompetensi sumber daya manusia. Menurut pandangan Dewan Komisaris, berbagai inisiatif tersebut tidak hanya berkontribusi terhadap penyelesaian tantangan jangka pendek, tetapi juga memperkuat daya saing dan ketahanan perusahaan dalam menghadapi perubahan industri energi pada masa mendatang.

Berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan sepanjang tahun 2025, Dewan Komisaris menilai bahwa langkah-langkah mitigasi yang diterapkan Direksi telah memberikan hasil yang positif. Hal tersebut tercermin dari keberhasilan Perusahaan mempertahankan keandalan operasional, menjaga efisiensi usaha, serta membukukan Nilai Kinerja Organisasi (NKO) yang melampaui target. Capaian tersebut menunjukkan bahwa strategi yang diterapkan Direksi mampu menjaga keseimbangan antara pencapaian target bisnis, pengelolaan risiko, dan penguatan kapasitas organisasi secara berkelanjutan.

Meskipun demikian, Dewan Komisaris memandang bahwa masih terdapat beberapa area yang perlu terus menjadi perhatian Direksi, khususnya percepatan penyelesaian proyek-proyek strategis, peningkatan efektivitas pengelolaan investasi, serta optimalisasi manfaat ekonomi dari aset yang telah dibangun. Dewan Komisaris akan terus mengawal implementasi berbagai langkah perbaikan tersebut melalui fungsi pengawasan yang independen dan konstruktif agar Perusahaan mampu mempertahankan pertumbuhan yang sehat, memperkuat daya saing, serta mendukung keberhasilan agenda transisi energi nasional.

In response to these conditions, the Board of Commissioners assesses that the Board of Directors has taken appropriate and measured steps to manage the various risks faced. Strengthening the implementation of integrated risk management, increasing oversight of project implementation, more intensive coordination with the PLN Group, regulators, contractors, and other stakeholders, and implementing cost efficiency programs are responses deemed relevant to maintaining the Company's operational continuity and performance in the middle of dynamic business environment.

The Board of Commissioners also expressed appreciation for commitment by the Board of Directors to strengthening the Company's fundamentals through asset optimization, developing new revenue sources beyond the core business (beyond kWh), accelerating digital transformation, and enhancing human resource competency. In the Board of Commissioners considers these initiatives not only contribute to addressing short-term challenges but also strengthen the Company's competitiveness and resilience in facing future changes in the energy industry.

Based on the oversight results throughout 2025, the Board of Commissioners assesses that the mitigation measures implemented by the Board of Directors have presented positive results as evidenced in the Company's success in maintaining operational reliability, maintaining business efficiency, and achieving an Organizational Performance Score (ORS) that exceeded targets. These achievements demonstrate that the Board of Directors strategies are able to maintain balance between achieving business targets, managing risks, and strengthening organizational capacity on a sustainable basis.

Nevertheless, the Board of Commissioners believes that several areas still require sustainable attention from the Board of Directors, particularly accelerating the completion of wstrategic projects, increasing the effectiveness of investment management, and optimizing the economic benefits of the existing assets. The Board of Commissioners will continue to oversee the implementation of these various improvement measures through an independent and constructive supervisory function so that the Company is able to maintain healthy growth, strengthen competitiveness, and support the success of the national energy transition agenda.

Penilaian Dewan Komisaris terhadap Kinerja Direksi atas Pengelolaan Perusahaan

Berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan sepanjang tahun 2025, Dewan Komisaris menilai bahwa Direksi telah melaksanakan fungsi pengurusan perusahaan secara efektif serta mampu menjalankan strategi bisnis yang ditetapkan dengan baik. Di tengah dinamika industri energi dan berbagai tantangan eksternal, Direksi berhasil menjaga kesinambungan operasional perusahaan, meningkatkan efisiensi usaha, serta mempertahankan kinerja keuangan yang sehat. Capaian tersebut menunjukkan kemampuan Direksi dalam mengelola perusahaan secara adaptif, prudent, dan berorientasi pada penciptaan nilai tambah bagi pemegang saham.

Dewan Komisaris memberikan apresiasi atas keberhasilan Direksi dalam merealisasikan sebagian besar target strategis yang telah ditetapkan dalam RKAP Tahun 2025. Kinerja tersebut tercermin dari pencapaian berbagai indikator utama yang melampaui target, antara lain peningkatan profitabilitas, efisiensi operasional, tingkat keandalan infrastruktur gas, efektivitas pengelolaan modal, serta penguatan sinergi dengan PLN Group. Menurut penilaian Dewan Komisaris, capaian tersebut merupakan hasil dari implementasi strategi yang tepat, pengendalian operasional yang baik, serta kemampuan Direksi dalam merespons perubahan lingkungan usaha secara cepat dan terukur.

Dewan Komisaris juga menilai bahwa Direksi telah menunjukkan komitmen yang kuat dalam memperkuat fundamental perusahaan melalui penerapan tata kelola perusahaan yang baik, penguatan manajemen risiko, pengendalian internal, optimalisasi aset, transformasi digital, serta pengembangan kompetensi sumber daya manusia. Berbagai inisiatif tersebut tidak hanya mendukung pencapaian kinerja jangka pendek, tetapi juga menjadi fondasi penting bagi pertumbuhan perusahaan yang berkelanjutan.

Meskipun demikian, Dewan Komisaris mencermati masih terdapat beberapa target yang belum sepenuhnya tercapai, khususnya pada aspek

Board of Commissioners Assessment to the Board of Directors Performance in Company Management

Based on the oversight results throughout 2025, the Board of Commissioners assesses that the Board of Directors has effectively undertakes corporate management functions and successfully implements the established business strategy. Amid the dynamics of the energy industry and various external challenges, the Board of Directors has successfully maintained the Company's operational continuity, improved business efficiency, and maintained healthy financial performance. These achievements demonstrate the Board of Directors' ability to manage the Company adaptively, prudently, and with a focus on creating added values for the shareholders.

The Board of Commissioners commends the Board of Directors for achieving most of the strategic targets set out in the 2025 Work Plan and Budget (RKAP). PLN Energi Gas reflects this performance through the achievement of various key indicators that exceeded targets, including increased profitability, operational efficiency, gas infrastructure reliability, effective capital management, and strengthened synergy with the PLN Group. The Board of Commissioners assesses these achievements as the result of appropriate strategy implementation, sound operational controls, and the Board of Directors ability to respond quickly and measurably to changes in the business environment.

The Board of Commissioners also assessed that the Board of Directors has demonstrated a strong commitment to strengthening the Company's fundamentals through the implementation of good corporate governance, strengthened risk management, internal control, asset optimization, digital transformation, and human resource competency development. These initiatives not only support short-term performance but also serve as a crucial foundation for the company's sustainable growth.

Nevertheless, the Board of Commissioners transcribed several unfully achieved targets, particularly in terms of investment realization,

realisasi investasi, pendapatan usaha, dan laba tahun berjalan. Berdasarkan hasil evaluasi, kondisi tersebut terutama dipengaruhi oleh penyesuaian desain, perubahan lingkup pekerjaan, serta penjadwalan ulang pada beberapa proyek strategis yang berdampak terhadap pengakuan pendapatan. Dewan Komisaris berpandangan bahwa faktor-faktor tersebut telah dikelola secara memadai oleh Direksi melalui penerapan langkah-langkah mitigasi, namun tetap memerlukan perhatian dan pengawasan yang lebih intensif agar penyelesaian proyek dapat berjalan sesuai rencana.

operating revenue, and current year profit. Based on the evaluation, these conditions were primarily influenced by design adjustments, changes in the scope of work, and the rescheduling of several strategic projects, which impacted revenue recognition. The Board of Commissioners believes that these factors have been adequately managed by the Board of Directors through the implementation of mitigation measures, but they still require more intensive attention and oversight to ensure project completion is on track.

Sehubungan dengan hal tersebut, Dewan Komisaris telah memberikan arahan kepada Direksi untuk terus memperkuat pengendalian pelaksanaan proyek strategis, meningkatkan efektivitas pengelolaan investasi, mengoptimalkan pemanfaatan aset perusahaan, serta mempercepat pengembangan sumber-sumber pendapatan baru guna memperkuat pertumbuhan usaha pada tahun-tahun mendatang. Dewan Komisaris juga mendorong Direksi untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan risiko, memperkuat inovasi bisnis, serta menjaga keseimbangan antara pertumbuhan usaha, efisiensi operasional, dan penerapan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik.

In this regard, the Board of Commissioners has directed the Board of Directors to remain strengthening control over strategic project implementation, increasing the effectiveness of investment management, optimizing the utilization of company assets, and accelerating the development of new revenue sources to bolster business growth in the coming years. The Board of Commissioners also encourages the Board of Directors to continuously improve the quality of risk management, strengthen business innovation, and maintain a balance between business growth, operational efficiency, and the implementation of good corporate governance principles.

Secara keseluruhan, Dewan Komisaris berpendapat bahwa Direksi telah menunjukkan kepemimpinan yang efektif dalam mengelola PLN Energi Gas sepanjang tahun 2025. Berbagai strategi dan kebijakan yang dijalankan dinilai telah mampu memperkuat posisi Perusahaan sebagai penyedia solusi infrastruktur gas yang andal, mendukung ketahanan energi nasional, serta memberikan landasan yang kuat bagi pertumbuhan perusahaan yang berkelanjutan. Atas dasar tersebut, Dewan Komisaris memberikan apresiasi atas kinerja Direksi sekaligus berharap agar berbagai pembelajaran selama tahun 2025 dapat menjadi pijakan dalam meningkatkan kinerja dan memperkuat daya saing Perusahaan pada tahun 2026 dan tahun-tahun berikutnya.

Overall, the Board of Commissioners believes that the Board of Directors has demonstrated effective leadership in managing PLN Energi Gas throughout 2025. Various strategies and policies implemented are considered to have strengthened the Company's position as a reliable provider of gas infrastructure solutions, supported national energy security, and provided a strong foundation for sustainable company growth. Therefore, the Board of Commissioners commends the Board of Directors performance and expects that various lessons during 2025 may serve as a foundation for improving performance and strengthening the Company's competitiveness in 2026 and beyond.

Pandangan Dewan Komisaris terhadap Penerapan Tata Kelola, Manajemen Risiko, dan Kepatuhan

Dewan Komisaris berpandangan bahwa penerapan tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*/GCG), manajemen risiko, dan kepatuhan merupakan fondasi utama dalam menjaga keberlanjutan usaha serta mendukung terciptanya nilai jangka panjang bagi perusahaan. Oleh karena itu, Dewan Komisaris secara konsisten mengawasi implementasi ketiga aspek tersebut guna memastikan bahwa seluruh kegiatan usaha Perusahaan dilaksanakan sesuai dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan kewajaran, serta selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan praktik tata kelola terbaik.

Berdasarkan hasil pengawasan sepanjang tahun 2025, Dewan Komisaris menilai bahwa Direksi telah menunjukkan komitmen yang kuat dalam memperkuat sistem tata kelola perusahaan melalui penyempurnaan berbagai perangkat kebijakan dan pedoman perusahaan, penguatan budaya integritas, serta peningkatan efektivitas sistem pengendalian internal. Menurut penilaian Dewan Komisaris, langkah tersebut telah mendukung terciptanya proses pengambilan keputusan yang lebih akuntabel, transparan, dan berorientasi pada pengelolaan risiko secara prudent.

Dalam aspek manajemen risiko, Dewan Komisaris memberikan perhatian khusus terhadap efektivitas penerapan pendekatan *Governance, Risk Management, and Compliance* (GRC) yang terintegrasi. Dewan Komisaris menilai bahwa Direksi telah melaksanakan proses identifikasi, pengukuran, mitigasi, dan pemantauan terhadap risiko-risiko utama secara memadai, terutama yang berkaitan dengan pengembangan proyek strategis, operasional infrastruktur gas, keselamatan kerja, kepatuhan terhadap regulasi, serta pendanaan investasi. Capaian implementasi *Roadmap* Manajemen Risiko dan peningkatan tingkat kematangan kepatuhan yang melampaui target menunjukkan bahwa sistem pengelolaan risiko telah berkembang secara positif dan mampu mendukung pencapaian tujuan strategis perusahaan.

Viewpoint by the Board of Commissioners on the Implementation of Governance, Risk Management, and Compliance

The Board of Commissioners believes that the implementation of good corporate governance (GCG), risk management, and compliance are the primary foundations for maintaining business sustainability and supporting the creation of long-term value for the Company. Therefore, the Board of Commissioners consistently oversees the implementation of these three aspects to ensure that all Company business activities are conducted in accordance with the principles of transparency, accountability, responsibility, independence, and fairness, as well as according applicable laws and regulations and best governance practices.

Based on the oversight results throughout 2025, the Board of Commissioners assesses that the Board of Directors has demonstrated a strong commitment to strengthening the corporate governance system by refining various Company policies and guidelines, strengthening a culture of integrity, and increasing the effectiveness of the internal control system. The Board of Commissioners assesses these steps have supported the creation of a more accountable, transparent decision-making process, and a focus on prudent risk management.

In terms of risk management, the Board of Commissioners pays particular attention to the effectiveness of the integrated Governance, Risk Management, and Compliance (GRC) approach. The Board of Commissioners assesses that the Board of Directors has adequately implemented the identification, measurement, mitigation, and monitoring of key risks, particularly those related to strategic project development, gas infrastructure operations, occupational safety, regulatory compliance, and investment funding. The successful implementation of the Risk Management Roadmap and the increased compliance maturity level, which exceeded targets, demonstrate that the risk management system has developed positively and is capable of supporting the achievement of the company's strategic objectives.

Dewan Komisaris juga memberikan apresiasi atas konsistensi Direksi dalam memperkuat budaya kepatuhan dan integritas melalui penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) berbasis ISO 37001:2016, pengendalian gratifikasi, pengelolaan benturan kepentingan, kebijakan anti *Fraud*, serta optimalisasi mekanisme *Whistleblowing System* (WBS). Menurut pandangan Dewan Komisaris, berbagai inisiatif tersebut mencerminkan komitmen Perusahaan dalam membangun budaya perusahaan yang berintegritas, profesional, dan bebas dari praktik korupsi, kolusi, maupun nepotisme.

The Board of Commissioners also commends the Board of Directors' consistency in strengthening a culture of compliance and integrity through the implementation of an ISO 37001:2016-based Anti-Bribery Management System (SMAP), gratuity control, conflict of interest management, anti-fraud policies, and optimization of the Whistleblowing System (WBS). In the Board of Commissioners' view, these initiatives reflect the Company's commitment to building a corporate culture of integrity, professionalism, and freedom from corruption, collusion, and nepotism.

Dewan Komisaris juga mencermati langkah Direksi dalam melakukan penguatan tata kelola dengan mengacu pada berbagai standar dan praktik terbaik, termasuk *ASEAN Corporate Governance Scorecard* (ACGS), POJK Nomor 21/POJK.04/2015 beserta SEOJK Nomor 32/SEOJK.04/2015, serta Pedoman Umum Governansi Korporat Indonesia (PUGKI) 2021. Upaya pemetaan terhadap ketiga kerangka tersebut dinilai sebagai langkah yang tepat untuk mengidentifikasi area-area yang masih perlu ditingkatkan sekaligus mendorong perbaikan tata kelola secara berkelanjutan. Dewan Komisaris juga memberikan apresiasi atas keberhasilan Perusahaan meraih penghargaan Juara III *Annual Report Award* (ARA) 2024, yang mencerminkan peningkatan kualitas tata kelola dan keterbukaan informasi perusahaan.

The Board of Commissioners also observed the Board of Directors' steps in strengthening governance by referring to various standards and best practices, including the ASEAN Corporate Governance Scorecard (ACGS), POJK Number 21/POJK.04/2015 and SEOJK Number 32/SEOJK.04/2015, and the 2021 General Guidelines for Indonesian Corporate Governance (PUGKI). The Board of Commissioners considers that mapping these three frameworks as an appropriate step in identifying areas for improvement while simultaneously encouraging continuous governance improvement. The Board of Commissioners also expressed appreciation for the Company's success in winning Third Place in the 2024 Annual Report Award (ARA), reflecting improvements in the quality of corporate governance and information transparency.

Secara keseluruhan, Dewan Komisaris berpendapat bahwa penerapan tata kelola perusahaan, manajemen risiko, dan kepatuhan di PLN Energi Gas selama tahun 2025 telah berjalan secara efektif dan memberikan kontribusi positif terhadap pencapaian kinerja perusahaan. Meskipun demikian, Dewan Komisaris mendorong Direksi untuk terus meningkatkan kualitas implementasi GCG, memperkuat budaya risiko di seluruh lini organisasi, menyempurnakan sistem pengendalian internal, serta meningkatkan kualitas pengungkapan informasi agar sejalan dengan perkembangan regulasi dan praktik terbaik di tingkat nasional maupun internasional. Dengan demikian, Perusahaan diharapkan mampu mempertahankan kepercayaan pemegang saham dan seluruh pemangku kepentingan sekaligus memperkuat daya saing perusahaan dalam jangka panjang.

Overall, the Board of Commissioners believes that the implementation of corporate governance, risk management, and compliance at PLN Energi Gas throughout 2025 has been effective and has positively contributed to the Company's performance. Nevertheless, the Board of Commissioners encourages the Board of Directors to continuously improve the quality of GCG implementation, strengthen the risk culture across the organization, refine the internal control system, and enhance the quality of information disclosure to align with regulatory developments and best practices at the national and international levels. In this way, the Company is expected to maintain trust by the shareholders and all stakeholders while strengthening its long-term competitiveness.

Pandangan Dewan Komisaris terhadap Prospek Usaha yang Disusun Direksi dan Dasar Pertimbangannya

Dewan Komisaris telah melakukan penelaahan terhadap prospek usaha dan arah strategis yang disusun Direksi untuk tahun 2026. Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, Dewan Komisaris berpandangan bahwa prospek usaha Perusahaan masih sangat positif dan disusun berdasarkan asumsi yang realistis dengan mempertimbangkan perkembangan lingkungan bisnis, arah kebijakan Pemerintah, kebutuhan PLN Group, serta proyeksi pertumbuhan industri energi nasional.

Penilaian tersebut didasarkan pada meningkatnya peran gas bumi sebagai energi transisi dalam mendukung pencapaian target *Net Zero Emission* (NZE), komitmen Pemerintah dalam mempercepat pengembangan infrastruktur gas nasional, serta proyeksi peningkatan kebutuhan gas untuk pembangkit listrik yang akan terus bertumbuh dalam beberapa tahun ke depan. Menurut pandangan Dewan Komisaris, kondisi tersebut memberikan peluang yang besar bagi PLN Energi Gas untuk memperkuat perannya sebagai penyedia solusi infrastruktur midstream gas yang terintegrasi sekaligus mendukung ketahanan energi nasional.

Dewan Komisaris juga menilai bahwa strategi pengembangan usaha yang dirumuskan Direksi telah mempertimbangkan kekuatan dan kapabilitas Perusahaan, termasuk pengalaman dalam pengelolaan infrastruktur gas, dukungan sinergi dalam PLN Group, serta penguasaan kompetensi di bidang operasi dan pemeliharaan fasilitas midstream gas. Fokus pengembangan pada optimalisasi aset yang telah beroperasi, peningkatan keandalan infrastruktur, pengembangan proyek-proyek strategis, serta penjajakan peluang bisnis baru di sektor hilir gas dinilai telah sejalan dengan arah pengembangan Perusahaan dalam jangka menengah dan panjang.

Di sisi lain, Dewan Komisaris mengingatkan bahwa pelaksanaan strategi tersebut tetap perlu memperhatikan berbagai risiko yang berpotensi memengaruhi pencapaian target perusahaan, antara

Viewpoint by the Board of Commissioners on the Business Prospects Prepared by the Board of Directors and the Basis for Considerations

The Board of Commissioners reviewed the business prospects and strategic direction prepared by the Board of Directors for 2026. Based on this evaluation, the Board of Commissioners believes that the Company's business prospects remain highly positive and are in line with the realistic assumptions, considering the development in the business environment, government policy direction, the needs of the PLN Group, and projected growth in the national energy industry.

The Board of Commissioners conducted the assessment based on the increasing role of natural gas as a transitional energy source in supporting the achievement of the Net Zero Emission (NZE) target, the government commitment to accelerating the development of national gas infrastructure, and the projected increase in gas demand for power generation, which will continue to grow in the coming years. The Board of Commissioners considers these conditions present a significant opportunity for PLN Energi Gas to strengthen the role as a provider of integrated midstream gas infrastructure solutions while supporting national energy security.

The Board of Commissioners also assesses that the business development strategy formulated by the Board of Directors has taken into account the Company's strengths and capabilities, including the experience in gas infrastructure management, synergy support within the PLN Group, and expertise in the operation and maintenance of midstream gas facilities. The development focus on optimizing operating assets, improving infrastructure reliability, developing strategic projects, and exploring new business opportunities in the downstream gas sector is considered to be in line with the Company's medium- and long-term development direction.

Furthermore, the Board of Commissioners cautions that the implementation of this strategy still requires consideration of various risks that could potentially impact target achievement of the Company,

lain dinamika geopolitik global, volatilitas harga energi, perubahan regulasi, percepatan penyelesaian proyek strategis, serta kebutuhan investasi yang semakin besar. Oleh karena itu, Dewan Komisaris mendorong Direksi untuk terus memperkuat penerapan manajemen risiko, meningkatkan disiplin dalam pengelolaan investasi, mempercepat monetisasi proyek yang telah beroperasi, serta mengoptimalkan pemanfaatan aset guna meningkatkan profitabilitas perusahaan.

Secara keseluruhan, Dewan Komisaris berpendapat bahwa prospek usaha tahun 2026 yang disusun Direksi telah menggambarkan arah pengembangan perusahaan secara komprehensif dan memiliki landasan yang kuat. Dengan dukungan tata kelola perusahaan yang baik, pengelolaan risiko yang efektif, sinergi yang erat dalam PLN Group, serta komitmen seluruh insan perusahaan, Dewan Komisaris meyakini bahwa PLN Energi Gas memiliki peluang yang besar untuk terus meningkatkan kinerja, memperkuat daya saing, dan menciptakan nilai tambah yang berkelanjutan bagi pemegang saham serta seluruh pemangku kepentingan.

Pandangan Dewan Komisaris atas Penerapan *Whistleblowing System* (WBS)

Dewan Komisaris memandang bahwa *Whistleblowing System* (WBS) merupakan salah satu instrumen penting dalam memperkuat budaya integritas, meningkatkan akuntabilitas, serta mendukung efektivitas penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) di lingkungan PLN Energi Gas. Oleh karena itu, Dewan Komisaris secara konsisten melakukan pengawasan terhadap efektivitas implementasi WBS untuk memastikan bahwa setiap laporan dugaan pelanggaran ditangani secara independen, objektif, transparan, serta sesuai dengan kebijakan dan prosedur yang berlaku.

Dalam menjalankan fungsi pengawasan tersebut, Dewan Komisaris, dengan dukungan Komite Audit, secara berkala melakukan pemantauan terhadap pengelolaan WBS, mulai dari penerimaan laporan, proses verifikasi, investigasi, hingga tindak lanjut penyelesaiannya. Dewan Komisaris juga memastikan bahwa mekanisme perlindungan terhadap pelapor (*whistleblower*) serta prinsip kerahasiaan tetap

including global geopolitical dynamics, energy price volatility, regulatory changes, accelerated strategic project completion, and increasing investment needs. Therefore, the Board of Commissioners encourages the Board of Directors to continue strengthening the implementation of risk management, enhancing discipline in investment management, accelerating the monetization of operating projects, and optimizing asset utilization to increase the Company's profitability.

Overall, the Board of Commissioners believes that the 2026 business prospects prepared by the Board of Directors comprehensively outline the well-founded development direction by the Company. Supported by good corporate governance, effective risk management, strong synergy within the PLN Group, and the commitment by all company personnel, the Board of Commissioners believes that PLN Energi Gas has significant opportunities to continue improving performance, strengthening competitiveness, and creating sustainable added value for shareholders and all stakeholders.

Viewpoint by the Board of Commissioners on the Implementation of the Whistleblowing System (WBS)

The Board of Commissioners considers the Whistleblowing System (WBS) as a crucial instrument for strengthening a culture of integrity, increasing accountability, and supporting the effective implementation of Good Corporate Governance (GCG) within PLN Energi Gas. Therefore, the Board of Commissioners consistently oversees the effectiveness of the WBS implementation to ensure that every report of alleged violations is handled independently, objectively, transparently, and according to applicable policies and procedures.

In undertaking this oversight function, the Board of Commissioners, with the support of the Audit Committee, periodically monitors the management of the WBS, from report receipt through the verification process, investigation, and follow-up to resolution. The Board of Commissioners also ensures that whistleblower protection mechanisms and the principle of confidentiality are consistently

dijalankan secara konsisten sehingga WBS dapat berfungsi sebagai sarana pelaporan yang dipercaya oleh seluruh pemangku kepentingan.

Sepanjang tahun 2025, tidak terdapat laporan dugaan pelanggaran yang diterima melalui mekanisme WBS. Dewan Komisaris menilai bahwa kondisi tersebut perlu disikapi secara proporsional dan menjadi bagian dari evaluasi berkala terhadap efektivitas implementasi sistem. Oleh karena itu, Dewan Komisaris mendorong Direksi untuk terus meningkatkan sosialisasi, edukasi, serta penguatan budaya integritas agar seluruh insan perusahaan memahami fungsi WBS dan memiliki keyakinan untuk memanfaatkannya apabila menemukan dugaan pelanggaran.

Dewan Komisaris memberikan apresiasi atas komitmen Direksi dalam membangun lingkungan kerja yang menjunjung tinggi etika bisnis, kepatuhan, dan integritas melalui penerapan WBS sebagai bagian dari sistem tata kelola perusahaan. Menurut pandangan Dewan Komisaris, efektivitas WBS tidak hanya diukur dari jumlah laporan yang diterima, tetapi juga dari kualitas sistem, tingkat kepercayaan pelapor, perlindungan terhadap *whistleblower*, serta kemampuan perusahaan dalam mencegah dan mendeteksi potensi penyimpangan sejak dini.

Ke depan, Dewan Komisaris akan terus mengawasi penyempurnaan implementasi WBS sebagai bagian dari penguatan sistem tata kelola, manajemen risiko, dan kepatuhan. Dewan Komisaris meyakini bahwa penerapan WBS yang efektif akan semakin memperkuat budaya perusahaan yang berintegritas, meningkatkan kepercayaan para pemegang saham dan pemangku kepentingan, serta mendukung keberlanjutan usaha Perusahaan dalam jangka panjang.

Penilaian Kinerja Komite-Komite Penunjang Dewan Komisaris

Dalam melaksanakan fungsi pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi, Dewan Komisaris didukung oleh Komite Audit serta Komite Manajemen Risiko. Dewan Komisaris menilai bahwa kedua komite tersebut telah menjalankan tugas dan tanggung jawabnya secara independen, profesional, dan efektif sesuai dengan piagam masing-masing,

implemented so that the WBS can serve as a trusted reporting platform for all stakeholders.

Throughout 2025, no reports of alleged violations were received through the WBS mechanism. The Board of Commissioners believes that this situation requires a proportionate response and should be included as part of the periodic evaluation of the effectiveness of the system's implementation. Therefore, the Board of Commissioners encourages the Board of Directors to continuously improve outreach, education, and strengthening of the culture of integrity so that all company personnel understand the function of the WBS and have the confidence to utilize it if they discover suspected violations.

The Board of Commissioners appreciates the Board of Directors commitment to building a work environment that upholds business ethics, compliance, and integrity through the implementation of the WBS as part of the corporate governance system. In the Board of Commissioners' view, the effectiveness of the WBS is measured not only by the number of reports received, but also by the quality of the system, the level of trust of the reporters, protection for whistleblowers, and the company's ability to prevent and detect potential irregularities early.

Going forward, the Board of Commissioners will continue to oversee the refinement of the WBS implementation as part of strengthening the governance, risk management, and compliance systems. The Board of Commissioners believes that effective WBS implementation will further strengthen the company's culture of integrity, increase shareholder and stakeholder trust, and support the long-term sustainability of the Company's business.

Performance Assessment for the Board of Commissioners Supporting Committees

In carrying out supervisory and advisory functions to the Board of Directors, the Board of Commissioners is supported by the Audit Committee and the Risk Management Committee. The Board of Commissioners assesses that both committees have carried out their duties and responsibilities independently, professionally, and effectively

sehingga mampu memberikan dukungan yang optimal terhadap pelaksanaan fungsi pengawasan Dewan Komisaris sepanjang tahun 2025.

following their respective charters, thus providing optimal support for the implementation of the Board of Commissioners' oversight function throughout 2025.

Komite Audit

Audit Committee

Dewan Komisaris memberikan apresiasi atas kinerja Komite Audit yang selama tahun 2025 telah melaksanakan fungsi pengawasan secara efektif melalui penelaahan atas laporan keuangan, efektivitas sistem pengendalian internal, pelaksanaan audit internal dan audit eksternal, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, implementasi *Good Corporate Governance* (GCG), serta pemantauan atas tindak lanjut rekomendasi hasil audit. Komite Audit juga memberikan berbagai masukan dan rekomendasi kepada Dewan Komisaris dalam mengevaluasi usulan Direksi yang memerlukan persetujuan maupun tanggapan Dewan Komisaris, termasuk penelaahan terhadap RKAP, Kontrak Manajemen, laporan manajemen, serta berbagai isu strategis yang memengaruhi kinerja perusahaan. Seluruh tugas tersebut dilaksanakan melalui rapat Komite Audit yang diselenggarakan secara berkala dengan tingkat kehadiran anggota yang sangat baik, disertai penyampaian laporan kegiatan secara rutin kepada Dewan Komisaris.

The Board of Commissioners commends the Audit Committee for the effective performance in 2025, which includes reviewing financial statements, the effectiveness of the internal control system, internal and external audits, complying with laws and regulations, implementing Good Corporate Governance (GCG), and monitoring the follow-up of audit recommendations. The Audit Committee also provided various input and recommendations to the Board of Commissioners in evaluating proposals from the Board of Directors that require approval or response from the Board of Commissioners, including reviewing the Company's Work Plan and Budget (RKAP), Management Contracts, management reports, and various strategic issues affecting the Company performance. Audit Committee carries out these duties through regular meetings with excellent attendance, accompanied by the submission of regular activity reports to the Board of Commissioners.

Berdasarkan hasil evaluasi, Dewan Komisaris menilai bahwa Komite Audit telah memberikan kontribusi yang signifikan dalam meningkatkan kualitas pengawasan, memperkuat sistem pengendalian internal, menjaga kepatuhan perusahaan terhadap ketentuan yang berlaku, serta mendukung terciptanya tata kelola perusahaan yang semakin efektif. Ke depan, Dewan Komisaris mendorong Komite Audit untuk terus meningkatkan kualitas pengawasan berbasis risiko serta memperkuat pemantauan terhadap implementasi rekomendasi audit dan pengendalian internal seiring dengan meningkatnya kompleksitas kegiatan usaha Perusahaan.

Based on the evaluation results, the Board of Commissioners assesses that the Audit Committee has made significant contribution to improving the quality of supervision, strengthening the internal control system, maintaining the Company's compliance with applicable regulations, and supporting increasingly effective corporate governance. Going forward, the Board of Commissioners encourages the Audit Committee to continue improving the quality of risk-based supervision and strengthening monitoring of the implementation of audit recommendations and internal controls in line with the increasing complexity of business activities by the Company.

Komite Manajemen Risiko

Risk Management Committee

Dewan Komisaris juga memberikan apresiasi atas kinerja Komite Manajemen Risiko yang telah menjalankan fungsi pengawasan secara aktif dalam memastikan efektivitas penerapan manajemen risiko di seluruh aktivitas usaha Perusahaan. Sepanjang tahun 2025, Komite Manajemen Risiko

The Board of Commissioners also commends the performance of the Risk Management Committee, which has actively carried out the oversight function in ensuring the effectiveness of risk management implementation across all of the Company's business activities. Throughout 2025, the Risk

secara konsisten melakukan penelaahan terhadap profil risiko perusahaan, mengevaluasi kecukupan kebijakan dan strategi manajemen risiko, serta memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris terkait penguatan pengelolaan risiko perusahaan. Selain itu, Komite Manajemen Risiko turut memberikan masukan terhadap berbagai kebijakan strategis, program pengembangan perusahaan, serta pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) melalui rapat-rapat yang dilaksanakan secara berkala dan pelaporan rutin kepada Dewan Komisaris.

Management Committee consistently reviewed the company's risk profile, evaluated the adequacy of risk management policies and strategies, and provided recommendations to the Board of Commissioners regarding strengthening risk management of the Company. Furthermore, the Risk Management Committee provided input on various strategic policies, company development programs, and the implementation of the Company's Work Plan and Budget (RKAP) through regular meetings and regular reporting to the Board of Commissioners.

Dewan Komisaris menilai bahwa Komite Manajemen Risiko telah memberikan nilai tambah dalam mendukung pengambilan keputusan strategis yang lebih prudent dan berbasis risiko. Kontribusi Komite juga terlihat dalam penguatan budaya manajemen risiko, peningkatan kualitas proses identifikasi dan mitigasi risiko, serta pengawasan terhadap implementasi kerangka *Governance, Risk, and Compliance* (GRC) di lingkungan Perusahaan. Sejalan dengan dinamika industri energi yang semakin kompleks, Dewan Komisaris mendorong Komite Manajemen Risiko untuk terus meningkatkan efektivitas fungsi pengawasannya, khususnya dalam mengawal risiko-risiko strategis, risiko proyek, risiko investasi, serta risiko yang timbul akibat perubahan regulasi dan perkembangan industri energi.

The Board of Commissioners assesses that the Risk Management Committee has provided added value in supporting more prudent and risk-based strategic decision-making. Contribution by the Committee is also evident in strengthening the risk management culture, improving the quality of the risk identification and mitigation process, and overseeing the implementation of the Governance, Risk, and Compliance (GRC) framework within the Company. In line with the increasingly complex dynamics of the energy industry, the Board of Commissioners encourages the Risk Management Committee to continuously improve the effectiveness of its oversight function, particularly in overseeing strategic risks, project risks, investment risks, and risks arising from regulatory changes and developments in the energy industry.

Secara keseluruhan, Dewan Komisaris berpendapat bahwa Komite Audit dan Komite Manajemen Risiko telah melaksanakan fungsi, tugas, dan tanggung jawabnya secara efektif sepanjang tahun 2025. Rekomendasi dan kajian yang disampaikan kedua komite telah memberikan dukungan yang penting bagi Dewan Komisaris dalam menjalankan fungsi pengawasan, meningkatkan kualitas pengambilan keputusan, memperkuat penerapan tata kelola perusahaan yang baik, serta memastikan pengelolaan risiko dan pengendalian internal berjalan secara efektif. Dewan Komisaris akan terus melakukan evaluasi atas kinerja komite-komite pendukung guna memastikan efektivitas pelaksanaan fungsi pengawasan sejalan dengan perkembangan bisnis dan kebutuhan Perusahaan.

Overall, the Board of Commissioners believes that the Audit Committee and the Risk Management Committee effectively carried out their functions, duties, and responsibilities throughout 2025. Recommendations and studies submitted by both committees have provided significant support to the Board of Commissioners in carrying out oversight function, improving the quality of decision-making, strengthening the implementation of good corporate governance, and ensuring the effective implementation of risk management and internal control. The Board of Commissioners is going to continue to evaluate the performance of the supporting committees to ensure the effectiveness of their oversight function in line with business developments and the Company needs.

Perubahan Komposisi Dewan Komisaris

Sepanjang tahun buku 2025, terjadi perubahan dalam komposisi Dewan Komisaris sebagai bagian dari dinamika organisasi dan kebijakan Pemegang Saham dalam memperkuat fungsi pengawasan Perusahaan. Perubahan tersebut ditetapkan melalui Keputusan Pemegang Saham di Luar Rapat Umum Pemegang Saham (Sirkuler) tanggal 31 Juli 2025, yang menetapkan pemberhentian Bapak Dedi Budi Utomo dari jabatannya sebagai Pelaksana Tugas Komisaris Utama dan mengangkat Bapak Bayu Satria Pratama sebagai Pelaksana Tugas Komisaris Utama. Perubahan tersebut kemudian dituangkan dalam Akta Notaris Nomor 36 tanggal 8 September 2025. Setelah berakhirnya tahun buku 2025, susunan Dewan Komisaris kembali mengalami perubahan dengan pengangkatan Bapak Eko Yuniarto sebagai Pelaksana Tugas Komisaris yang efektif menjalankan tugas sejak 1 Januari 2026. Selanjutnya, berdasarkan Keputusan Pemegang Saham tanggal 28 April 2026, dilakukan perubahan susunan Dewan Komisaris dengan mengangkat Bapak Saiful Chaniago sebagai Komisaris Utama dan Bapak Airil Tanjung sebagai Komisaris.

Changes to the Board of Commissioners Composition

There were changes occurred to the composition of the Board of Commissioners during 2025 fiscal year as part of the organizational dynamics and Shareholder policies to strengthen the Company's oversight function. The Company established the changes through Shareholder Resolution Outside the General Meeting of Shareholders (Circular) dated July 31, 2025, which determined the dismissal of Mr. Dedi Budi Utomo from his position as Acting President Commissioner and the appointment of Mr. Bayu Satria Pratama as Acting President Commissioner. These changes were then outlined in Notarial Deed No. 36 dated September 8, 2025. Following the end of the 2025 fiscal year, the Board of Commissioners composition had further changes with the appointment of Mr. Eko Yuniarto as Acting Commissioner, effective January 1, 2026. Furthermore, based on a Shareholder Resolution dated April 28, 2026, changes were made to the Board of Commissioners composition with the appointment of Mr. Saiful Chaniago as President Commissioner and Mr. Airil Tanjung as Commissioner.

Atas nama Dewan Komisaris, kami menyampaikan ucapan selamat bergabung kepada para anggota Dewan Komisaris yang memperoleh amanah untuk bergabung dalam jajaran Dewan Komisaris PLN Energi Gas. Kami meyakini bahwa pengalaman, kompetensi, dan perspektif yang dimiliki akan semakin memperkuat pelaksanaan fungsi pengawasan, pemberian nasihat strategis kepada Direksi, serta mendukung implementasi tata kelola perusahaan yang baik. Dengan komposisi yang baru, diharapkan sinergi, soliditas, dan efektivitas kerja Dewan Komisaris semakin meningkat dalam mengawal pencapaian sasaran strategis Perusahaan serta mendukung keberhasilan agenda transformasi PLN Group.

On behalf of the Board of Commissioners congratulates the members who have been entrusted with joining the Board of Commissioners of PLN Energi Gas. We believe that their experience, competence, and perspective will further strengthen our oversight function, provide strategic advice to the Board of Directors, and support the implementation of good corporate governance. With the new composition, we expect to further enhance the synergy, solidarity, and effectiveness of the Board of Commissioners in overseeing the achievement of the Company's strategic goals and supporting the success of the PLN Group's transformation agenda.

Pada kesempatan yang sama, Dewan Komisaris menyampaikan penghargaan dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Bapak Dedi Budi Utomo atas dedikasi, integritas, dan kontribusi yang telah diberikan selama menjalankan amanah sebagai Pelaksana Tugas Komisaris Utama PLN Energi Gas. Berbagai arahan, pemikiran strategis, serta dukungan yang diberikan

On the same occasion, the Board of Commissioners expresses the highest appreciation and gratitude to Mr. Dedi Budi Utomo for his dedication, integrity, and contributions during his tenure as Acting President Commissioner of PLN Energi Gas. His guidance, strategic thinking, and support have been crucial in strengthening the Company's oversight function

telah menjadi bagian penting dalam memperkuat fungsi pengawasan dan mendorong peningkatan kinerja Perusahaan. Dewan Komisaris mendoakan agar beliau senantiasa diberikan kesehatan, kesuksesan, dan keberhasilan dalam mengemban amanah serta tanggung jawab di tempat penugasan berikutnya.

and driving improved performance. The Board of Commissioners wishes him constantly health, success, and success in carrying out mandates and responsibilities in his next assignment.

Dewan Komisaris meyakini bahwa melalui kolaborasi yang semakin kuat, komunikasi yang konstruktif dengan Direksi, serta komitmen yang tinggi terhadap penerapan tata kelola perusahaan yang baik, PLN Energi Gas akan semakin siap menghadapi berbagai tantangan industri energi, memanfaatkan peluang pertumbuhan bisnis, serta terus menciptakan nilai tambah yang berkelanjutan bagi pemegang saham dan seluruh pemangku kepentingan.

The Board of Commissioners believes that through stronger collaboration, constructive communication with the Board of Directors, and a strong commitment to the implementation of good corporate governance, PLN Energi Gas will be better prepared to face various challenges in the energy industry, take advantage of business growth opportunities, and continue to create sustainable added value for shareholders and all stakeholders.

Apresiasi dan Penutup

Atas nama Dewan Komisaris, kami menyampaikan apresiasi kepada Direksi beserta seluruh insan PLN Energi Gas atas dedikasi, profesionalisme, dan kerja keras yang telah ditunjukkan sepanjang tahun 2025. Di tengah berbagai tantangan yang dihadapi, Perusahaan mampu menjaga kinerja, memperkuat tata kelola perusahaan, serta terus mendukung agenda transisi energi nasional.

Letter of Appreciation and Closing

On behalf of the Board of Commissioners, we express our appreciation to the Board of Directors and the entire PLN Energi Gas employees for their dedication, professionalism, and hard work throughout 2025. Amidst the various challenges faced, the Company was able to maintain its performance, strengthen corporate governance, and continue to support the national energy transition agenda.

Kami juga menyampaikan terima kasih kepada Pemegang Saham, PLN Group, regulator, mitra usaha, pelanggan, serta seluruh pemangku kepentingan atas kepercayaan, dukungan, dan sinergi yang telah diberikan kepada Perusahaan.

We also express our gratitude to the Shareholders, PLN Group, regulators, business partners, customers, and all stakeholders for their trust, support, and synergy.

Memasuki tahun 2026, Dewan Komisaris optimistis PLN Energi Gas memiliki prospek yang baik untuk terus bertumbuh. Dewan Komisaris akan senantiasa menjalankan fungsi pengawasan dan pemberian nasihat secara independen, objektif, dan konstruktif guna memastikan Perusahaan terus dikelola dengan mengedepankan prinsip tata kelola perusahaan yang baik, manajemen risiko yang efektif, serta penciptaan nilai tambah yang berkelanjutan bagi pemegang saham dan seluruh pemangku kepentingan.

As we ride into 2026, the Board of Commissioners is optimistic that PLN Energi Gas has good prospects for sustainable growth. The Board of Commissioners will continue to perform supervisory and advisory functions independently, objectively, and constructively to ensure that the Company continues to be managed with a focus on the principles of good corporate governance, effective risk management, and the creation of sustainable added values for the shareholders and all stakeholders.

Akhir kata, Dewan Komisaris mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan kepercayaan dan dukungannya kepada PLN Energi

Finally, the Board of Commissioners would like to thank all parties who have placed their trust and support in PLN Energi Gas. With a spirit of

Gas. Dengan semangat kolaborasi, integritas, dan inovasi, kami meyakini Perusahaan akan terus memperkuat kontribusinya dalam mendukung ketahanan energi nasional dan mewujudkan pertumbuhan usaha yang berkelanjutan.

collaboration, integrity, and innovation, we believe the Company is going to continue to strengthen contribution to supporting national energy security and achieving sustainable business growth.

Jakarta, 30 Juni 2026
Jakarta, June 30, 2026



Saiful Chaniago
Komisaris Utama
President Commissioner





Edwin Bangun

PLT Direktur Utama
Acting President Director

Laporan Direksi
Board of Directors Report

Pemegang Saham dan Pemangku Kepentingan yang Kami Hormati,

Dengan penuh rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, kami menyampaikan bahwa PLN Energi Gas berhasil mengakhiri tahun 2025 dengan kinerja yang positif di tengah dinamika industri energi dan tantangan ekonomi global yang masih berlangsung. Berbagai ketidakpastian geopolitik, fluktuasi harga energi, serta perubahan lanskap industri tidak mengurangi komitmen Perusahaan untuk terus menjalankan mandat sebagai penyedia solusi infrastruktur gas yang andal bagi PLN Group dan sektor ketenagalistrikan nasional.

Sepanjang tahun 2025, Perusahaan mampu menjaga kinerja operasional dan keuangan yang sehat. Pendapatan usaha tercatat sebesar Rp480,95 miliar, sementara laba usaha mencapai Rp300,31 miliar. PLN Energi Gas juga membukukan laba tahun berjalan sebesar Rp94,74 miliar atau meningkat 17,6% dibandingkan tahun sebelumnya. Selain itu, total aset Perusahaan mencapai Rp2,38 triliun dengan ekuitas sebesar Rp521,48 miliar. Kinerja tersebut menunjukkan kemampuan Perusahaan dalam menjaga pertumbuhan usaha sekaligus menciptakan nilai tambah yang berkelanjutan bagi pemegang saham dan para pemangku kepentingan.

Dalam aspek kinerja korporasi, PLN Energi Gas berhasil membukukan Nilai Kinerja Organisasi (NKO) sebesar 101,08. Capaian tersebut mencerminkan keberhasilan Perusahaan dalam merealisasikan sebagian besar target strategis yang telah ditetapkan dalam RKAP 2025 sekaligus menunjukkan efektivitas implementasi strategi bisnis, pengelolaan operasional, tata kelola perusahaan, serta pengembangan organisasi secara berkelanjutan.

Melalui laporan ini, Direksi menyampaikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan pengelolaan Perusahaan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025. Laporan ini merupakan wujud akuntabilitas kepada Pemegang Saham sekaligus bentuk komitmen Perusahaan dalam menerapkan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*/GCG) secara konsisten.

Dear Shareholders and Stakeholders,

With gratitude to God Almighty, kindly allow us to announce that PLN Energi Gas successfully ended 2025 with positive performance amid the dynamics of the energy industry and ongoing global economic challenges. Geopolitical uncertainties, fluctuating energy prices, and changes in the industrial landscape did not bring down the Company's commitment to keeping the fulfilment of mandate as a reliable provider of gas infrastructure solutions for the PLN Group and the national electricity sector.

Throughout 2025, the Company maintained healthy operational and financial performance. Operating revenues reached Rp480.95 billion, while operating profit reached Rp300.31 billion. PLN Energi Gas also recorded profit for the year of Rp94.74 billion, a 17.6% increase compared to the previous year. Furthermore, the Company's total assets reached Rp2.38 trillion, with equity of Rp521.48 billion. This performance demonstrates the Company's ability to maintain business growth while creating sustainable added values for shareholders and stakeholders.

In terms of corporate performance, PLN Energi Gas achieved Organizational Performance Score (NKO) of 101.08. This achievement reflects the Company's success in realizing the most of the strategic targets set out in the 2025 Work Plan and Budget (RKAP) and demonstrates the effectiveness of its business strategy implementation, operational management, corporate governance, and sustainable organizational development.

Through this report, the Board of Directors conveys the accountability for the Company management during the fiscal year ending December 31, 2025. This report presents the accountability to the Shareholders as well as the Company's commitment to consistently implementing Good Corporate Governance (GCG) principles.

Kondisi Makroekonomi dan Industri Energi Tahun 2025

Sepanjang tahun 2025, perekonomian global masih diwarnai oleh berbagai tantangan yang berasal dari ketidakpastian geopolitik, perlambatan ekonomi di sejumlah negara, serta volatilitas harga komoditas dan energi. Meskipun demikian, perekonomian Indonesia tetap menunjukkan ketahanan yang baik dengan pertumbuhan ekonomi yang terjaga pada kisaran 5%, didukung oleh stabilitas makroekonomi, inflasi yang terkendali, serta aktivitas ekonomi domestik yang tetap kuat.

Di sektor energi, gas alam semakin memperoleh perhatian sebagai energi transisi yang berperan penting dalam mendukung pencapaian target dekarbonisasi dan *Net Zero Emission* (NZE). Sejalan dengan komitmen Indonesia melalui *Enhanced Nationally Determined Contribution* (*Enhanced* NDC), kebutuhan terhadap infrastruktur gas yang andal dan terintegrasi diperkirakan akan terus meningkat.

Dalam konteks tersebut, PLN Energi Gas memiliki posisi strategis sebagai bagian dari PLN Group yang berperan dalam pengembangan dan pengelolaan infrastruktur sektor midstream gas. Perusahaan berkontribusi dalam memastikan ketersediaan dan keandalan pasokan gas bagi pembangkit tenaga listrik, sekaligus mendukung transformasi sistem energi nasional menuju energi yang lebih bersih, efisien, dan berkelanjutan.

Strategi dan Kebijakan Strategis Tahun 2025

Tahun 2025 menjadi periode penting bagi PLN Energi Gas dalam memperkuat perannya sebagai penyedia solusi infrastruktur gas yang andal dan berkelanjutan guna mendukung transformasi sektor ketenagalistrikan nasional. Sejalan dengan arah pengembangan Perusahaan dalam Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) 2024–2028, PLN Energi Gas memfokuskan strategi bisnis pada pengembangan infrastruktur gasifikasi pembangkit, penguatan operasi dan pemeliharaan infrastruktur gas, peningkatan efisiensi biaya, pengembangan peluang usaha baru, serta penguatan kapabilitas organisasi dan sumber daya manusia. Strategi tersebut juga dirancang untuk mendukung agenda transformasi PLN Group yang berorientasi pada

Macroeconomic Conditions and the Energy Industry in 2025

Throughout 2025, global economy remained facing various challenges stemming from geopolitical uncertainty, economic slowdowns in several countries, as well as volatility in commodity and energy prices. Nevertheless, the Indonesian economy will continue to indicate good resilience, with economic growth maintained at around 5%, supported by macroeconomic stability, controlled inflation, and strong domestic economic activity.

In terms of energy sector, natural gas is gaining increasing attention as a transitional energy source undertaking crucial role in supporting the achievement of decarbonization and Net Zero Emissions (NZE) targets. In line with Indonesia's commitment through the Enhanced Nationally Determined Contribution (Enhanced NDC), the need for reliable and integrated gas infrastructure is expected to continue to increase.

In this context, PLN Energi Gas holds a strategic position as part of the PLN Group, playing a role in the development and management of midstream gas infrastructure. The Company contributes to ensuring the availability and reliability of gas supplies for power plants, while supporting the transformation of the national energy system towards cleaner, more efficient, and more sustainable energy.

Strategy and Strategic Policies for 2025

2025 marked as crucial year for PLN Energi Gas to strengthen the role as a provider of reliable and sustainable gas infrastructure solutions to support the transformation of the national electricity sector. In line with the Company's development direction outlined in the 2024–2028 Long-Term Plan (RJPP), PLN Energi Gas is focusing business strategy on developing gasification power plant infrastructure, strengthening gas infrastructure operations and maintenance, increasing cost efficiency, developing new business opportunities, and strengthening organizational and human resource capabilities. The Company also designed this strategyto support the PLN Group's transformation agenda, which focuses

keberlanjutan, efisiensi, inovasi, dan penguatan daya saing usaha.

Implementasi strategi dilakukan melalui pengembangan dan pengoperasian infrastruktur gas dan LNG, pembangunan jaringan pipa gas untuk mendukung kebutuhan pembangkit listrik, peningkatan layanan operasi dan pemeliharaan (*Operation & Maintenance*), serta pengembangan bisnis di luar pendapatan utama PLN Group (*beyond kWh*). Di saat yang sama, Perusahaan juga terus memperkuat tata kelola perusahaan, manajemen risiko, sistem keuangan yang berkelanjutan, serta transformasi digital guna meningkatkan efektivitas proses bisnis dan kualitas pengambilan keputusan. Arah strategis tersebut sejalan dengan mandat Perusahaan untuk mendukung keandalan pasokan energi primer serta menciptakan pertumbuhan usaha yang berkelanjutan.

Dalam menjalankan strategi tersebut, Perusahaan melihat berbagai peluang yang dapat mendukung pertumbuhan usaha di masa mendatang. Meningkatnya peran gas bumi sebagai energi transisi menuju target *Net Zero Emission*s (NZE) membuka ruang yang semakin luas bagi pengembangan infrastruktur gas nasional. Selain itu, program gasifikasi pembangkit PLN yang terus berkembang di berbagai wilayah Indonesia turut menciptakan kebutuhan baru terhadap fasilitas LNG, CNG, jaringan pipa, dan layanan operasi infrastruktur gas. Peluang lainnya juga berasal dari potensi pengembangan bisnis operasi dan pemeliharaan fasilitas gas, peningkatan pendapatan dari pelanggan di luar PLN Group, serta sinergi yang semakin kuat dengan PLN Group dan PLN Energi Primer Indonesia dalam membangun rantai pasok energi primer yang lebih efisien dan terintegrasi. Prospek tersebut semakin diperkuat oleh proyeksi peningkatan kebutuhan gas dan LNG untuk pembangkit listrik nasional dalam jangka panjang.

Dalam menjalankan strategi bisnis, Perusahaan senantiasa memperhatikan aspek *Environmental, Social, and Governance* (ESG). Pengembangan infrastruktur gas yang dilakukan Perusahaan merupakan bagian dari upaya mendukung transisi energi nasional melalui peningkatan pemanfaatan gas bumi sebagai energi yang lebih bersih dibandingkan bahan bakar fosil konvensional. Perusahaan juga terus memperkuat aspek keselamatan kerja,

on sustainability, efficiency, innovation, and strengthening business competitiveness.

This strategy will be implemented through the development and operation of gas and LNG infrastructure, the construction of gas pipelines to support power generation needs, improving operation and maintenance services, and developing businesses beyond PLN Group core revenue stream (beyond kWh). At the same time, the Company will continue to strengthen corporate governance, risk management, sustainable financial systems, and digital transformation to improve the effectiveness of business processes and the quality of decision-making. This strategic direction aligns with mandate by the Company to support reliable primary energy supplies and create sustainable business growth.

In implementing this strategy, the Company leverages various opportunities that can support future business growth. The increasing role of natural gas as a transitional energy source towards the Net Zero Emissions (NZE) target opens up greater scope for the development of national gas infrastructure. Furthermore, PLN growing power plant gasification program in various regions of Indonesia has created new demand for LNG and CNG facilities, pipelines, and gas infrastructure operations services. Other opportunities also arise from the potential development of the gas facility operations and maintenance business, increased revenue from customers outside the PLN Group, and stronger synergies with the PLN Group and PLN Energi Primer Indonesia in building a more efficient and integrated primary energy supply chain. These prospects are further strengthened by the projected increase in gas and LNG demand for national power generation in the long term.

In implementing business strategy, the Company consistently considers Environmental, Social, and Governance (ESG) aspects. The Company's gas infrastructure development is part of the efforts to support the national energy transition by increasing the use of natural gas as a cleaner energy source compared to conventional fossil fuels. The Company also continues to strengthen aspects of occupational safety, human resource development, and good

pengembangan SDM, serta tata kelola perusahaan yang baik sebagai fondasi keberlanjutan usaha.

Peran Direksi dalam Perumusan Strategi dan Kebijakan

Direksi memegang peran utama dalam proses perumusan strategi dan kebijakan Perusahaan. Dalam menjalankan fungsi pengurusan perusahaan, Direksi secara aktif melakukan evaluasi terhadap perkembangan lingkungan bisnis, dinamika industri energi, arah kebijakan Pemerintah, serta strategi PLN Group dan PT PLN Energi Primer Indonesia sebagai pemegang saham. Hasil evaluasi tersebut menjadi dasar dalam penyusunan strategi dan kebijakan perusahaan yang selaras dengan visi, misi, tujuan, serta arah pengembangan bisnis jangka panjang Perusahaan.

Dalam proses penyusunan dan implementasi strategi, Direksi juga memperoleh arahan, masukan, dan pengawasan dari Dewan Komisaris. Sinergi antara Direksi dan Dewan Komisaris menjadi salah satu faktor penting dalam memastikan strategi perusahaan berjalan sesuai arah pengembangan usaha dan prinsip tata kelola yang baik.

Proses yang Dilakukan Direksi untuk memastikan Implementasi Strategi

Proses perumusan strategi dilaksanakan melalui pembahasan secara berkala dalam rapat Direksi yang melibatkan manajemen dan unit-unit terkait. Dalam proses tersebut, Direksi melakukan kajian terhadap berbagai aspek strategis, termasuk kondisi pasar, peluang pengembangan bisnis, kebutuhan investasi, profil risiko perusahaan, aspek tata kelola, serta kesiapan sumber daya yang dimiliki Perusahaan. Direksi juga memastikan bahwa setiap strategi yang ditetapkan telah mempertimbangkan prinsip kehati-hatian, keberlanjutan usaha, serta penciptaan nilai tambah bagi pemegang saham dan pemangku kepentingan.

Sepanjang tahun 2025, Direksi secara aktif mengarahkan penyusunan dan implementasi berbagai kebijakan strategis yang berfokus pada penguatan bisnis midstream gas, peningkatan keandalan infrastruktur gas, optimalisasi aset perusahaan, penguatan tata kelola dan manajemen

corporate governance as foundation for business sustainability.

The Board of Directors Role in Strategy and Policy Formulation

The Board of Directors undertakes the key role in the formulation process of the Company's strategy and policy. In carrying out corporate management functions, the Board of Directors actively evaluates developments in the business environment, energy industry dynamics, government policy directions, and the strategies of the PLN Group and PT PLN Energi Primer Indonesia as the shareholders. These evaluations results serve as the basis for developing the Company strategies and policies following the Company's vision, mission, objectives, and long-term business development direction.

In the process of formulating and implementing strategies, the Board of Directors also receives direction, input, and oversight from the Board of Commissioners. Synergy between the Board of Directors and the Board of Commissioners is substantial in ensuring that the Company's strategy is aligned with business development directions and good governance principles.

Processes Undertaken by the Board of Directors to Ensure Strategy Implementation

The Company implements strategy formulation process through regular discussions in Board of Directors meetings involving management and relevant units. During this process, the Board of Directors reviews various strategic aspects, including market conditions, business development opportunities, investment needs, the Company's risk profile, governance aspects, and the Company's resource readiness. The Board of Directors also ensures that each established strategy considers the principles of prudence, business sustainability, and the creation of added value for shareholders and stakeholders.

Throughout 2025, the Board of Directors actively directed the development and implementation of various strategic policies focused on strengthening the midstream gas business, increasing the reliability of gas infrastructure, optimizing company assets, strengthening governance and risk management,

risiko, serta pengembangan kapabilitas organisasi. Direksi juga melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan strategi yang telah ditetapkan guna memastikan pencapaian target perusahaan sesuai dengan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) serta Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP).

Melalui keterlibatan yang aktif dalam proses perencanaan, pengambilan keputusan, dan pengawasan implementasi strategi, Direksi memastikan bahwa seluruh kebijakan dan program kerja yang dijalankan Perusahaan mampu mendukung pencapaian visi PLN Energi Gas sebagai "*Top-of-Mind Global Company in Gas Infrastructure Solution*" serta memperkuat kontribusi Perusahaan dalam mendukung ketahanan energi dan transisi energi nasional.

Direksi menilai bahwa strategi yang diterapkan sepanjang tahun 2025 telah berjalan efektif dan mampu mendukung pencapaian sebagian besar target perusahaan. Hal ini tercermin dari keberhasilan Perusahaan melampaui target pada sejumlah indikator utama, antara lain EBITDA, ROIC, EAF Midstream Gas, implementasi roadmap manajemen risiko, dan Nilai Kinerja Organisasi (NKO). Evaluasi tersebut menjadi dasar bagi Perusahaan dalam menyusun prioritas strategis tahun 2026.

Kendala yang dihadapi dan Cara Menghadapi Tantangan

Di tengah peluang yang besar tersebut, Perusahaan juga menghadapi sejumlah tantangan yang perlu dikelola secara cermat. Dinamika harga energi global dan ketidakpastian ekonomi masih berpotensi memengaruhi biaya investasi maupun operasional proyek-proyek infrastruktur gas. Selain itu, pembangunan infrastruktur gasifikasi dan jaringan pipa memiliki tingkat kompleksitas yang tinggi karena melibatkan berbagai aspek teknis, perizinan, serta koordinasi dengan banyak pemangku kepentingan. Selama tahun 2025, Perusahaan juga menghadapi tantangan berupa penyesuaian desain pada beberapa proyek strategis yang berdampak pada penundaan sebagian realisasi investasi. Kondisi tersebut turut memengaruhi pencapaian target investasi Perusahaan, terutama pada proyek gasifikasi Tarakan, proyek infrastruktur Punagaya, dan pembangunan pipa gas Cilegon. Di

and developing organizational capabilities. The Board of Directors also regularly monitors and evaluates the implementation of the established strategies to ensure the achievement of company targets in accordance with the Company's Work Plan and Budget (RKAP) and Long-Term Plan (RJPP).

Through active involvement in the planning, decision-making, and oversight of strategy implementation, the Board of Directors ensures that all policies and work programs implemented by the Company support the achievement of PLN Energi Gas vision as a "Top-of-Mind Global Company in Gas Infrastructure Solutions" and strengthens contribution by the Company to supporting energy security and the national energy transition.

The Board of Directors assesses that the strategies implemented throughout 2025 have been effective and have supported the achievement of most of the Company's targets. This is reflected in the Company's success in exceeding targets for several key indicators, including EBITDA, ROIC, EAF Midstream Gas, risk management roadmap implementation, and Organizational Performance Score (ORS). This evaluation serves as the basis for the Company's strategic priorities for 2026.

Obstacles Faced and How to Overcome

Amid these significant opportunities, the Company also faces several challenges that require careful management. Global energy price dynamics and economic uncertainty continue to potentially impact investment and operational costs for gas infrastructure projects. Furthermore, the development of gasification infrastructure and pipelines is highly complex, involving various technical aspects, permits, and coordination with numerous stakeholders. The Company also faced challenges during 2025 in the form of design adjustments for several strategic projects, which resulted in the delay of some investment realizations. This situation also impacted the achievement of the Company's investment targets, particularly for the Tarakan gasification project, the Punagaya infrastructure project, and the construction of the Cilegon gas pipeline. Furthermore, the increasingly

sisi lain, perkembangan industri energi yang semakin kompetitif juga menuntut Perusahaan untuk terus meningkatkan kompetensi SDM serta memperkuat kemampuan bisnis dan teknologi.

Untuk menghadapi berbagai tantangan tersebut, PLN Energi Gas menerapkan berbagai langkah mitigasi yang terintegrasi. Perusahaan memperkuat penerapan manajemen risiko pada seluruh proses bisnis dan proyek strategis, melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pencapaian proyek, serta meningkatkan koordinasi dengan PLN Group, regulator, kontraktor, dan pemangku kepentingan lainnya guna mempercepat penyelesaian proyek. Di bidang operasional, Perusahaan terus menjalankan program efisiensi biaya dan optimalisasi aset untuk menjaga profitabilitas dan daya saing usaha. Pengembangan sumber pendapatan baru melalui diversifikasi bisnis juga terus dilakukan untuk meningkatkan kontribusi pendapatan *beyond kWh*. Sementara itu, penguatan transformasi digital, peningkatan kompetensi SDM melalui pelatihan dan sertifikasi, serta penguatan budaya kinerja menjadi fokus utama untuk memastikan kesiapan organisasi dalam menghadapi perubahan industri yang semakin dinamis. Strategi ini sekaligus menjadi bagian dari upaya Perusahaan dalam mewujudkan pertumbuhan usaha yang berkelanjutan dan menciptakan nilai jangka panjang bagi para pemegang saham dan pemangku kepentingan.

Berbagai langkah strategis tersebut berhasil mendukung kinerja Perusahaan sepanjang tahun 2025. Hal ini tercermin dari capaian Nilai Kinerja Organisasi (NKO) sebesar 101,02 atau melampaui target yang ditetapkan, didukung oleh pencapaian yang baik pada aspek *Economic and Social Value*, *Business Model Innovation, Technology Leadership*, serta pengembangan talenta. Keberhasilan penyelesaian proyek-proyek strategis gasifikasi pembangkit dan penguatan kapabilitas organisasi menjadi fondasi penting bagi PLN Energi Gas untuk melanjutkan pertumbuhan usaha dan memperkuat posisinya sebagai penyedia solusi infrastruktur gas yang andal dan berkelanjutan di Indonesia.

competitive energy industry also requires the Company to continuously improve human resource competencies and strengthen business and technological capabilities.

To overcome these challenges, PLN Energi Gas implements various integrated mitigation measures. The Company strengthened the application of risk management across all business processes and strategic projects, regular monitoring and evaluation of project achievements, and improved coordination with the PLN Group, regulators, contractors, and other stakeholders to accelerate project completion. In operations, the Company continues to implement cost efficiency and asset optimization programs to maintain profitability and competitiveness. New revenue streams through business diversification are also being developed to increase revenue contributions beyond kWh. Meanwhile, strengthening digital transformation, enhancing human resource competencies through training and certification, and strengthening a performance culture are key focuses to ensure the organization readiness to face increasingly dynamic industry changes. This strategy also part of the Company's efforts to achieve sustainable business growth and create long-term value for shareholders and stakeholders.

These various strategic steps successfully supported the Company performance throughout 2025 as reflected in the Organizational Performance Score (NKO) of 101.02, exceeding the established target, supported by strong achievements in Economic and Social Value, Business Model Innovation, Technology Leadership, and talent development. The successful completion of strategic power plant gasification projects and strengthening organizational capabilities provide a critical foundation for PLN Energi Gas to continue business growth and strengthen the position as a provider of reliable and sustainable gas infrastructure solutions in Indonesia.

Tinjauan Kinerja Tahun 2025

Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2025

Tahun 2025 menjadi momentum penting bagi PLN Energi Gas dalam memperkuat fondasi pertumbuhan usaha melalui pengembangan infrastruktur gas yang andal, peningkatan efisiensi operasional, serta penguatan tata kelola perusahaan. Secara umum, Perusahaan berhasil merealisasikan sebagian besar target strategis yang ditetapkan dalam RKAP 2025 dengan capaian kinerja yang menunjukkan efektivitas pengelolaan bisnis dan operasional.

Dari sisi profitabilitas, Perusahaan membukukan EBITDA sebesar Rp305,84 miliar atau mencapai 108,17% dari target RKAP sebesar Rp282,72 miliar. Capaian tersebut didukung oleh optimalisasi pengelolaan pendapatan, efisiensi biaya operasional, serta penyelarasan lini bisnis pra-COD pada proyek Gasifikasi Pembangkit Tarakan. Selain itu, *Operating Ratio* tercatat sebesar 37,56%, lebih baik dibandingkan target sebesar 42,19%, yang menunjukkan keberhasilan Perusahaan dalam menjaga efisiensi biaya usaha. Sementara itu, *Return on Invested Capital* (ROIC) mencapai 11,78%, melampaui target sebesar 10,16%, mencerminkan efektivitas pengelolaan modal yang diinvestasikan dalam menghasilkan nilai tambah bagi perusahaan.

Pada aspek operasional, Perusahaan berhasil mempertahankan tingkat keandalan infrastruktur gas pada level yang sangat tinggi. *Equivalent Availability Factor* (EAF) Midstream Gas mencapai 99,89%, melampaui target sebesar 98,95%. Capaian tersebut menunjukkan kemampuan Perusahaan dalam menjaga ketersediaan dan keandalan infrastruktur gas untuk mendukung pasokan energi primer bagi pembangkit listrik PLN Group. Selain itu, pendapatan dari luar PLN Group (*beyond kWh*) mencapai Rp14,48 miliar atau 91,95% dari target yang ditetapkan. Meskipun belum sepenuhnya mencapai target, pencapaian ini menunjukkan keberhasilan Perusahaan dalam mengembangkan sumber pendapatan alternatif melalui diversifikasi bisnis dan pengembangan layanan di luar bisnis inti.

Dari sisi keuangan, Perusahaan mencatat pendapatan usaha sebesar Rp480,95 miliar atau

Performance Review for 2025

Targets and Actuals Comparison for 2025

2025 marked a crucial year for PLN Energi Gas to strengthen the foundations of business growth through the development of reliable gas infrastructure, increased operational efficiency, and strengthened corporate governance. Overall, the Company successfully achieved most of the strategic targets set out in the 2025 Work Plan and Budget (RKAP), demonstrating effective business and operational management.

In terms of profitability, the Company recorded Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation, and Amortization (EBITDA) of Rp305.84 billion, or 108.17% of the RKAP target of Rp282.72 billion. This achievement was supported by optimized revenue management, operational cost efficiency, and alignment of pre-COD business lines in the Tarakan Gasification Power Plant project. Furthermore, the Operating Ratio was recorded at 37.56%, exceeding the target of 42.19%, representing success by the Company in maintaining cost efficiency. Meanwhile, Return on Invested Capital (ROIC) reached 11.78%, exceeding the target of 10.16%, reflecting the effective management of invested capital in generating added value for the company.

Operationally, the Company successfully maintained a very high level of gas infrastructure reliability. The Equivalent Availability Factor (EAF) for Midstream Gas reached 99.89%, exceeding the target of 98.95%. This achievement demonstrates the Company's ability to maintain the availability and reliability of gas infrastructure to support primary energy supply for PLN Group power plants. Furthermore, revenue from outside the PLN Group (beyond kWh) reached Rp14.48 billion, or 91.95% of the set target. Despite not fully achieving the target, this achievement proofed the success by the Company in developing alternative revenue sources through business diversification and service development outside its core business.

Financially, the Company recorded operating revenue of Rp480.95 billion, or 99.29% of the target of

99,29% dari target sebesar Rp484,41 miliar. Belum tercapainya target pendapatan usaha terutama disebabkan oleh tertundanya pengakuan pendapatan dari proyek regasifikasi Tarakan yang semula diproyeksikan beroperasi lebih awal. Kondisi tersebut turut memengaruhi pencapaian laba tahun berjalan yang terealisasi sebesar Rp94,74 miliar atau 98,40% dari target sebesar Rp96,27 miliar. Meskipun demikian, Perusahaan berhasil menjaga efisiensi operasional dengan realisasi beban usaha sebesar Rp180,65 miliar atau lebih rendah dibandingkan target sebesar Rp204,35 miliar, antara lain melalui efisiensi biaya operasi dan pemeliharaan (O&M) Pipa Gas Tanjung Batu serta optimalisasi biaya sewa kompresor Gorontalo.

Rp484.41 billion. The failure to achieve the operating revenue target was primarily due to the delay in revenue recognition from the Tarakan regasification project, which was originally projected to begin operations earlier. This situation also impacted the current year's profit, which was realized at Rp94.74 billion, or 98.40% of the target of Rp96.27 billion. Nevertheless, the Company managed to maintain operational efficiency with operating expenses of Rp180.65 billion, lower than the target of Rp204.35 billion, partly through efficiency in operation and maintenance (O&M) costs for the Tanjung Batu Gas Pipeline and optimization of compressor rental costs in Gorontalo.

Pada aspek investasi dan pengembangan aset, realisasi investasi mencapai Rp103,60 miliar atau 51,37% dari target RKAP sebesar Rp201,67 miliar. Realisasi yang lebih rendah dibandingkan target terutama dipengaruhi oleh penyesuaian desain, perubahan lingkup pekerjaan, serta penjadwalan ulang pada beberapa proyek strategis. Meskipun demikian, Perusahaan tetap berhasil menyelesaikan sejumlah proyek prioritas yang mendukung pengembangan infrastruktur gas nasional, termasuk Program Gasifikasi Tarakan dan pembangunan infrastruktur pipa gas untuk Program Gasifikasi Punagaya. Capaian tersebut menjadi fondasi penting bagi pertumbuhan usaha Perusahaan pada tahun-tahun mendatang.

In terms of investment and asset development, investment realization reached Rp103.60 billion, or 51.37% of the RKAP target of Rp201.67 billion. The lower realization compared to the target was primarily due to design adjustments, changes in the scope of work, and the rescheduling of several strategic projects. Nevertheless, the Company successfully completed several priority projects supporting the development of national gas infrastructure, including the Tarakan Gasification Program and the construction of gas pipeline infrastructure for the Punagaya Gasification Program. These achievements provide a crucial foundation for the Company's business growth in the coming years.

Secara keseluruhan, realisasi kinerja tahun 2025 menunjukkan bahwa strategi yang diterapkan Perusahaan telah berjalan efektif dalam menjaga keandalan operasional, meningkatkan efisiensi, dan memperkuat fundamental bisnis. Berbagai pembelajaran yang diperoleh sepanjang tahun 2025 akan menjadi dasar bagi Perusahaan untuk meningkatkan kinerja dan mempercepat pengembangan usaha pada tahun 2026, seiring dengan meningkatnya kebutuhan infrastruktur gas sebagai bagian dari transisi energi nasional.

Overall, the 2025 performance indicated that the Company were effectively implemented strategies in maintaining operational reliability, increasing efficiency, and strengthening business fundamentals. Various lessons learned throughout 2025 will serve as the foundation for the Company to improve performance and accelerate business development in 2026, in line with the increasing need for gas infrastructure as part of the national energy transition.

Perusahaan juga terus memperkuat sinergi dengan PLN Group. Hal ini tercermin dari realisasi transaksi sinergi antar entitas PLN Group sebesar Rp718,50 miliar atau mencapai 110% dari target yang ditetapkan. Capaian tersebut menunjukkan semakin kuatnya kolaborasi antar entitas dalam menciptakan nilai tambah dan efisiensi operasional.

The Company also continues to strengthen synergies with the PLN Group as reflected in the realization of synergy transactions between PLN Group entities amounting to Rp718.50 billion, or 110% of the established target. This achievement indicates the increasingly strong collaboration among entities in creating added values and operational efficiency.

Meskipun sebagian besar indikator berhasil melampaui target, realisasi pendapatan usaha dan laba tahun berjalan masih berada sedikit di bawah target RKAP. Hal ini terutama dipengaruhi oleh penundaan pengakuan pendapatan dari proyek regasifikasi Tarakan yang mengalami penyesuaian jadwal penyelesaian. Perusahaan telah melakukan evaluasi menyeluruh dan menetapkan langkah percepatan penyelesaian proyek untuk mendukung peningkatan kinerja pada tahun 2026.

Penerapan Tata Kelola, Manajemen Risiko dan Kepatuhan

Direksi meyakini bahwa tata kelola perusahaan yang baik merupakan fondasi utama dalam menjaga keberlanjutan usaha serta menciptakan nilai tambah bagi pemegang saham dan seluruh pemangku kepentingan. Oleh karena itu, PLN Energi Gas terus memperkuat implementasi prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) yang meliputi transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan kewajaran dalam seluruh proses bisnis dan pengambilan keputusan strategis. Penerapan GCG dilakukan secara terintegrasi pada seluruh aktivitas pengembangan, operasi, dan pemeliharaan infrastruktur midstream gas sebagai bagian dari upaya mendukung keandalan pasokan energi nasional serta pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan.

Sepanjang tahun 2025, Perusahaan terus memperkuat perangkat tata kelola (*soft structure*) melalui penerapan berbagai kebijakan dan pedoman, antara lain Pedoman GCG, Pedoman Perilaku, Piagam Pengawasan Intern Terintegrasi, Pedoman Manajemen Risiko Terintegrasi, Kebijakan Anti *Fraud*, Sistem Manajemen Kepatuhan dan Anti Penyuapan, Pedoman Pengendalian Gratifikasi, Pedoman Benturan Kepentingan, Pedoman *Whistleblowing System*, serta Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa. Penguatan kebijakan tersebut menjadi bagian penting dalam membangun budaya perusahaan yang berintegritas, profesional, dan berorientasi pada kepatuhan.

Dalam aspek pengendalian internal, Perusahaan menerapkan Sistem Pengendalian Internal yang mengacu pada kerangka COSO (*Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission*). Sistem tersebut dirancang untuk memastikan efektivitas operasional, keandalan pelaporan keuangan, kepatuhan terhadap peraturan

Despite most indicators exceeded targets, the realization of operating revenue and profit for the year remained slightly below the RKAP targets. This was primarily influenced by the delay in revenue recognition from the Tarakan regasification project, which experienced an adjustment to the completion schedule. The Company comprehensively evaluates and establishes steps to accelerate project completion to support improved performance in 2026.

Implementation of Governance, Risk Management, and Compliance

The Board of Directors believes that good corporate governance is the primary foundation for maintaining business sustainability and creating added values for the shareholders and all stakeholders. Therefore, PLN Energi Gas keeps strengthening the implementation of Good Corporate Governance (GCG) principles, including transparency, accountability, responsibility, independence, and fairness, in all business processes and strategic decision-making. GCG implementation is integrated across all development, operation, and maintenance activities of midstream gas infrastructure as part of efforts to support the reliability of the national energy supply and sustainable business growth.

Throughout 2025, the Company remained strengthening governance framework (soft structures) through the implementation of various policies and guidelines, including the GCG Guidelines, Code of Conduct, Integrated Internal Audit Charter, Integrated Risk Management Guidelines, Anti-Fraud Policy, Compliance and Anti-Bribery Management System, Gratuity Control Guidelines, Conflict of Interest Guidelines, Whistleblowing System Guidelines, and Goods and Services Procurement Guidelines. Strengthening these policies is a crucial part of building a corporate culture of integrity, professionalism, and compliance.

In terms of internal control, the Company implements Internal Control System that adheres to the COSO (Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission) framework. The Company designed this system to ensure operational effectiveness, reliable financial reporting, compliance with laws and regulations, and prevent potential

perundang-undangan, serta pencegahan terhadap potensi penyimpangan dan kecurangan. Penguatan sistem pengendalian internal juga didukung oleh peran aktif Dewan Komisaris, Komite Audit, Direksi, Unit Audit Internal, serta seluruh insan perusahaan.

PLN Energi gas juga terus meningkatkan efektivitas penerapan manajemen risiko melalui pendekatan *Governance, Risk Management and Compliance* (GRC) yang terintegrasi. Sepanjang tahun 2025, PLN Energi Gas secara konsisten melakukan identifikasi, pengukuran, mitigasi, dan pemantauan terhadap risiko-risiko utama yang berpotensi memengaruhi pencapaian sasaran perusahaan, termasuk risiko pengembangan proyek strategis, risiko operasional infrastruktur gas, risiko keselamatan kerja, risiko regulasi, dan risiko pendanaan investasi. Upaya tersebut menghasilkan capaian Implementasi *Roadmap* Manajemen Risiko sebesar 103,39% serta *Maturity Level* Kepatuhan sebesar 3,56, melampaui target yang telah ditetapkan.

Dalam rangka memperkuat budaya integritas, Perusahaan secara konsisten menerapkan Kebijakan Anti *Fraud*, Pengendalian Gratifikasi, Pengelolaan Konflik Kepentingan, serta Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) berbasis ISO 37001:2016. Seluruh insan perusahaan didorong untuk berpartisipasi aktif dalam membangun lingkungan kerja yang bersih, transparan, dan bebas dari praktik korupsi, kolusi, maupun nepotisme. Sebagai bagian dari mekanisme pengawasan, Perusahaan juga mengimplementasikan Sistem Pelaporan Pelanggaran (*Whistleblowing System*/WBS) yang memberikan ruang bagi pemangku kepentingan untuk melaporkan dugaan pelanggaran secara aman dan rahasia. Sepanjang tahun 2025, tidak terdapat laporan pelanggaran yang masuk melalui saluran WBS Perusahaan.

Perusahaan juga terus memperkuat implementasi *Good Corporate Governance* (GCG) dengan mengacu pada berbagai standar dan praktik terbaik, antara lain *ASEAN Corporate Governance Scorecard* (ACGS), POJK Nomor 21/POJK.04/2015 beserta SEOJK Nomor 32/SEOJK.04/2015, serta Pedoman Umum Governansi Korporat Indonesia (PUGKI) 2021. Sebagai bagian dari upaya perbaikan berkelanjutan, pada tahun 2025 Perseroan melakukan pemetaan penerapan tata kelola berdasarkan ketiga acuan tersebut. Hasil pemetaan menunjukkan skor 74,39 untuk ACGS, 12 Comply dan 13 *Explain* berdasarkan POJK 21, serta 40 *Apply* dan

irregularities and fraud. The strengthening of the internal control system is also supported by the active participation of the Board of Commissioners, Audit Committee, Board of Directors, Internal Audit Unit, and all company personnel.

PLN Energi Gas also continues to improve the effectiveness of risk management implementation through an integrated Governance, Risk Management, and Compliance (GRC) approach. Throughout 2025, PLN Energi Gas consistently identified, measured, mitigated, and monitored key risks that could potentially impact the achievement of the Company objectives, including strategic project development risks, gas infrastructure operational risks, occupational safety risks, regulatory risks, and investment funding risks. These efforts resulted in a Risk Management Roadmap Implementation achievement of 103.39% and a Compliance Maturity Level of 3.56, exceeding the established target.

To strengthen a culture of integrity, the Company consistently implements Anti-Fraud Policy, Gratuity Control, Conflict of Interest Management, and Anti-Bribery Management System (SMAP) based on ISO 37001:2016. The entire employees are encouraged to actively participate in building a clean, transparent work environment free from corruption, collusion, and nepotism. As part of the oversight mechanism, the Company also implements Whistleblowing System (WBS), which provides a platform for the stakeholders to report suspected violations securely and confidentially. Throughout 2025, there were no reports of violations received through the Company's WBS channel.

The Company also continued to strengthen the implementation of Good Corporate Governance (GCG) by adopting recognized governance standards and best practices, including the ASEAN Corporate Governance Scorecard (ACGS), OJK Regulation (POJK) No. 21/POJK.04/2015 and OJK Circular Letter (SEOJK) No. 32/SEOJK.04/2015, as well as the 2021 Indonesian Code of Good Corporate Governance (PUGKI). As part of its commitment to continuous improvement, the Company conducted governance mapping against these three frameworks in 2025. The assessment resulted in an ACGS score of

41 *Explain* berdasarkan PUGKI 2021. Hasil tersebut menjadi dasar bagi Perseroan dalam mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan guna memperkuat kualitas tata kelola secara berkelanjutan.

74.39, 12 Comply and 13 Explain under POJK No. 21/POJK.04/2015, and 40 Apply and 41 Explain under PUGKI 2021. These results serve as a foundation for identifying areas for improvement and further strengthening the Company's governance practices.

Komitmen Perseroan dalam meningkatkan kualitas tata kelola dan pelaporan korporasi juga memperoleh apresiasi melalui raihan Juara III Kategori BUMN Klaster Pendapatan di bawah Rp1 Triliun pada *Annual Report Award* (ARA) 2024 yang diterima pada tahun 2025. Penghargaan ini menjadi dorongan bagi Perseroan untuk terus meningkatkan kualitas pengungkapan informasi dan penerapan tata kelola yang selaras dengan praktik terbaik.

The Company's commitment to enhancing corporate governance and the quality of its corporate reporting was further recognized through its achievement of Third Place in the State-Owned Enterprises Category with Revenue Below IDR 1 Trillion at the 2024 Annual Report Award (ARA), presented in 2025. This recognition reinforces the Company's commitment to continuously improving the quality of its corporate disclosures and governance practices in line with evolving best practices.

Direksi menilai bahwa penguatan tata kelola, pengendalian internal, manajemen risiko, dan budaya kepatuhan yang dijalankan secara konsisten telah menjadi salah satu faktor penting yang mendukung keberhasilan Perusahaan dalam mencapai target kinerja tahun 2025. Ke depan, Perusahaan akan terus meningkatkan kualitas tata kelola perusahaan agar sejalan dengan praktik terbaik, mendukung pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan, serta memperkuat kepercayaan pemegang saham dan seluruh pemangku kepentingan.

The Board of Directors believes that the consistent strengthening of governance, internal control, risk management, and compliance culture has been one of the important factors supporting the Company's success in achieving its 2025 performance targets. Going forward, the Company is going to continue to improve the quality of corporate governance to align with the best practices, support sustainable business growth, and strengthen the trust of shareholders and all stakeholders.

Prospek Usaha Tahun 2026

Direksi memandang prospek usaha PLN Energi Gas pada tahun 2026 tetap positif seiring dengan meningkatnya kebutuhan energi yang lebih bersih, andal, dan berkelanjutan. Meskipun perekonomian global masih menghadapi berbagai tantangan akibat ketidakpastian geopolitik dan volatilitas harga energi, pertumbuhan ekonomi Indonesia yang tetap resilien diperkirakan akan menjadi faktor pendukung bagi peningkatan kebutuhan energi dan pengembangan infrastruktur gas nasional.

Di sektor energi, gas alam diproyeksikan akan semakin berperan sebagai energi transisi dalam mendukung pencapaian target *Net Zero Emission* (NZE) Indonesia. Sejalan dengan proyeksi PT PLN Energi Primer Indonesia (PLN EPI), kebutuhan gas untuk pembangkit listrik diperkirakan akan terus meningkat dengan tingkat pertumbuhan sekitar 4,5% per tahun hingga tahun 2034. Pertumbuhan tersebut juga akan diikuti oleh peningkatan kebutuhan LNG

Business Prospects for 2026

The Board of Directors considers business prospects for 2026 by PLN Energi Gas as remaining positive, in line with the increasing demand for cleaner, more reliable, and sustainable energy. Despite the global economy continues to face various challenges due to geopolitical uncertainty and energy price volatility, Indonesia's resilient economic growth is expected to be a supporting factor for increasing energy demand and the development of national gas infrastructure.

In the energy sector, natural gas is projected to increasingly undertake the role as a transitional energy source in supporting the achievement of Indonesia's Net Zero Emission (NZE) target. In line with PT PLN Energi Primer Indonesia (PLN EPI) projections, gas demand for power generation is expected to continue to increase at a growth rate of around 4.5% per year until 2034. This growth will also be accompanied by the increased demand

dan pengembangan infrastruktur midstream gas di berbagai wilayah Indonesia.

Kondisi tersebut membuka peluang yang besar bagi PLN Energi Gas untuk memperkuat perannya sebagai penyedia solusi infrastruktur gas terintegrasi. Dengan pengalaman dalam pengelolaan infrastruktur gas, termasuk Pipa Gas Tanjung Batu dan FSRU Amurang, serta dukungan PLN Group, PLN Energi Gas berada pada posisi yang strategis untuk mendukung peningkatan kebutuhan energi primer pembangkit listrik sekaligus memperkuat ketahanan energi nasional.

Pada tahun 2026, PLN Energi Gas akan terus memfokuskan pengembangan bisnis pada peningkatan keandalan operasi dan pemeliharaan infrastruktur gas, optimalisasi aset yang dikelola, pengembangan proyek-proyek midstream gas, serta penjajakan peluang ekspansi bisnis pada sektor hilir (retail gas). Di saat yang sama, PLN Energi Gas akan terus memperkuat tata kelola, manajemen risiko, dan kapabilitas organisasi guna memastikan pertumbuhan usaha yang sehat dan berkelanjutan.

Direksi meyakini bahwa dengan fondasi bisnis yang kuat, dukungan pemegang saham, serta meningkatnya kebutuhan gas nasional, PLN Energi Gas memiliki peluang yang besar untuk terus tumbuh, menciptakan nilai tambah bagi pemegang saham, serta memperkuat kontribusinya dalam mendukung transisi energi dan ketahanan energi nasional.

Perubahan Komposisi Direksi

Sepanjang tahun 2025 tidak terdapat perubahan dalam susunan Direksi Perusahaan. Sampai dengan 31 Desember 2025, susunan Direksi Perusahaan masih sama dengan tahun sebelumnya.

Setelah tahun buku berakhir, berdasarkan Keputusan Pemegang Saham di Luar Rapat Umum Pemegang Saham (Sirkuler) tanggal 31 Desember 2025, terjadi perubahan pada jabatan PLT Direktur Operasional dari sebelumnya dijabat oleh Sdr. Yusuf Kusdinar kepada Sdr. Mohammad Faradhy.

Atas nama Direksi dan seluruh insan PLN Energi Gas, kami menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Sdr. Yusuf Kusdinar

for LNG and the development of midstream gas infrastructure in various regions of Indonesia.

This situation opens up significant opportunities for PLN Energi Gas to strengthen the role as a provider of integrated gas infrastructure solutions. With experience in gas infrastructure management, including the Tanjung Batu Gas Pipeline and the Amurang FSRU, and the support of the PLN Group, PLN Energi Gas is strategically positioned to support the increasing primary energy demand for power plants while strengthening national energy security.

In 2026, PLN Energi Gas is going to continue to focus business development on improving the operational reliability and maintenance of gas infrastructure, optimizing managed assets, developing midstream gas projects, and exploring business expansion opportunities in the downstream sector (gas retail). At the same time, PLN Energi Gas is going to continue to strengthen governance, risk management, and organizational capabilities to ensure healthy and sustainable business growth.

The Board of Directors believes that with a strong business foundation, shareholder support, and increasing national gas demand, PLN Energi Gas has significant opportunities for continued growth, creating added value for shareholders, and strengthening its contribution to supporting the energy transition and national energy security.

Changes to the Composition of the Board of Directors

There were no changes to the composition of the Company's Board of Directors throughout 2025. As of December 31, 2025, the composition of the Company's Board of Directors remains the same as the previous year.

Following the end of the fiscal year, based on a Shareholder Resolution outside the General Meeting of Shareholders (Circular) dated December 31, 2025, the position of Acting Director of Operations was changed from Mr. Yusuf Kusdinar to Mr. Mohammad Faradhy.

On behalf of the Board of Directors and all PLN Energi Gas employees, we express our deepest appreciation and gratitude to Mr. Yusuf Kusdinar

atas dedikasi, komitmen, serta kontribusi yang telah diberikan selama menjalankan amanah sebagai Direksi Perusahaan. Berbagai pemikiran, kerja keras, dan kontribusi beliau telah menjadi bagian penting dalam perjalanan dan pengembangan Perusahaan.

Kami juga menyambut dengan hangat bergabungnya Sdr. Mohammad Faradhy sebagai bagian dari jajaran Direksi PLN Energi Gas. Dengan pengalaman, kompetensi, dan integritas yang dimiliki, kami optimistis kehadiran beliau akan semakin memperkuat langkah Perusahaan dalam menghadapi berbagai peluang dan tantangan di masa mendatang.

Apresiasi

Keberhasilan PLN Energi Gas dalam mempertahankan kinerja yang positif sepanjang tahun 2025 tidak terlepas dari dukungan dan kepercayaan yang diberikan oleh Pemegang Saham, Dewan Komisaris, seluruh karyawan, pelanggan, mitra usaha, regulator, serta seluruh pemangku kepentingan.

Atas nama Direksi, kami menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan, kerja sama, dan kontribusi bagi kemajuan Perusahaan. Sinergi yang telah terbangun selama ini merupakan modal penting untuk menghadapi tantangan sekaligus memanfaatkan berbagai peluang yang ada di masa depan.

Dengan semangat kolaborasi, inovasi, dan tata kelola yang baik, kami optimistis PLN Energi Gas akan terus tumbuh menjadi perusahaan pilihan utama dalam solusi infrastruktur gas serta memberikan kontribusi yang lebih besar dalam mendukung ketahanan energi dan transisi energi nasional yang berkelanjutan.

for his dedication, commitment, and contributions during his tenure as a Director of the Company. His insights, hard work, and contributions have been instrumental in the Company's journey and development.

We also warmly welcome Mr. Mohammad Faradhy to the Board of Directors of PLN Energi Gas. With his experience, competence, and integrity, we are optimistic for further strengthen the Company's efforts to face future opportunities and challenges.

Letter of Appreciation

PLN Energi Gas successfully maintained positive performance throughout 2025, which is inseparable from the support and trust placed in by the Shareholders, Board of Commissioners, all employees, customers, business partners, regulators, and all stakeholders.

On behalf of the Board of Directors, we would like to express our deepest appreciation and gratitude to all parties who have provided support, cooperation, and contributions to the Company's progress. The built synergy so far is a primary asset for facing challenges and capitalizing on the various upcoming opportunities.

With a spirit of collaboration, innovation, and good governance, we are optimistic that PLN Energi Gas will continue to grow as the Company of choice for gas infrastructure solutions and make a greater contribution to supporting energy security as well as sustainable national energy transition.

Jakarta, 30 Juni 2026
Jakarta, June 30, 2026
Atas Nama Direksi
On Behalf of the Board of Directors

Edwin Bangun
PLT Direktur Utama
Acting President Director

Surat Pernyataan Dewan Komisaris dan Direksi tentang Tanggung Jawab atas Laporan Tahunan 2025 PT PLN Energi Gas

Statement of the Board of Commissioners and the Board of Directors on the Responsibility for the Annual Report 2025 of PT PLN Energi Gas

Kami yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa semua informasi dalam Laporan Tahunan PT PLN Energi Gas tahun 2025 telah dimuat secara lengkap dan bertanggung jawab penuh atas kebenaran isi Laporan Tahunan Perseroan.

We, the undersigned, testify that all information in the 2025 Annual Report of PT PLN Energi Gas is presented in its entirety and we are fully responsible for the correctness of the contents in this Annual Report of the Company.

Demikian Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

This Statement is hereby made in all truthfulness.

Jakarta, 30 Juni 2026
Jakarta, June 30, 2026

Dewan Komisaris
Board of Commissioners



Saiful Chaniago
Komisaris Utama
President Commissioner



Airil Tanjung
Komisaris
Commissioner

Direksi
Board of Directors



Edwin Bangun
PLT Direktur Utama
ACT President Director



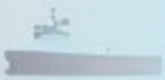
Rahmi Asnidar Harahap
PLT Direktur Keuangan dan Sumber Daya Manusia
ACT Director of Finance & HR



Mohammad Faradhy
PLT Direktur Operasi
ACT Director of Operation


PLN
Energi Gas
SECURITY LEVEL 1 COMPLY
NO SMOK
LIFE FIRS





Profil Perusahaan

Company Profile

Identitas Perusahaan
Corporate Identity

Nama Perusahaan Corporate Identity	PT PLN Energi Gas
Tanggal Pendirian Date of Establishment	28 Januari 2009 January 28, 2009
Dasar Hukum Pendirian Legal Basis for Establishment	Berdasarkan Akta Notaris Lenny Janis Ishak S.H. dengan No. 10 Tanggal 28 Januari 2009 dan Keputusan Menteri Hukum & HAM No. AHU-11269. AH.01.01. Tahun 2009, Perseroan didirikan dengan nama awal "PT PLN Geothermal" Based on the Notarial Deed of Lenny Janis Ishak SH with No. 10 dated January 28, 2009 and the Minister of Law & Human Rights Decree No. AHU-11269. AH.01.01. Year 2009, the Company was established with the initial name "PT PLN Geothermal"
Bidang Usaha Business fields	Perencanaan, Pengembangan, Pembangunan, *Operation & Maintenance* Infrastruktur Logistik dan Transportasi Gas Planning, Development, Construction, Operation & Maintenance of Logistics Infrastructure and Gas Transportation
Informasi Perubahan Nama Name Change Information	PT PLN Geothermal pertama kali didirikan berdasarkan Akta Notaris Lenny Janis Ishak S.H. dengan No. 10 Tanggal 28 Januari 2009 dan Keputusan Menteri Hukum & HAM No. AHU 11269. AH.01.01. Tahun 2009. Selanjutnya PT PLN Geothermal mengalami perubahan nama menjadi PT PLN Gas & Geothermal pada 10 Juli 2017 berdasarkan Akta Notaris Muhammad Hanafi S.H. dengan No. 73 tanggal 31 Juli 2017 dan Keputusan Menteri Hukum & HAM No. AHU-0017016. AH.01.02. Tahun 2017. Kemudian pada 15 September 2023, PT PLN Gas & Geothermal melakukan perubahan nama menjadi PT PLN Energi Gas sesuai dengan Akta Notaris Shahreza Annaz S.H., M.Kn. dengan No. 24 Tanggal 27 September 2023 dan Keputusan Menteri Hukum & HAM Nomor AHU-0059109.. AH.01.02.Tahun 2023. PT PLN Geothermal was first established based on Notarial Deed of Lenny Janis Ishak SH with No. 10 dated January 28, 2009 and the Minister of Law & Human Rights Decree No. AHU 11269. AH.01.01. Year 2009. Furthermore, PT PLN Geothermal changed name into PT PLN Gas & Geothermal on July 10, 2017 based on Notarial Deed of Muhammad Hanafi SH with No. 73 dated July 31, 2017 and the Minister of Law & Human Rights Decree No. AHU-0017016. AH.01.02. Year 2017. Then on September 15, 2023, PT PLN Gas & Geothermal changed name into PT PLN Energi Gas following Notarial Deed of Shahreza Annaz SH, M.Kn. with No. 24 Dated September 27, 2023 and the Minister of Law & Human Rights Decree Number AHU-0059109.. AH.01.02.Year 2023.
Jumlah Karyawan Tahun Buku Number of Employees for the Fiscal Year	167 Karyawan 167 Employees
Pemegang Saham Shareholders	PT PLN Energi Primer Indonesia ("PLN EPI"): 99,99% Yayasan Pendidikan dan Kesejahteraan PT PLN (Persero): 0,01%
Alamat Address	Menara Bidakara 2 Lantai 10 Jl. Gatot Subroto No.Kav. 71-73, RT.8/RW.8, Menteng Dalam, Kec. Tebet, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12870 Telp. +62 21 2972 1019 , +62 21 2972 1841 Situs web: https://www.plnenergigas.co.id E-mail: info@plnenergigas.co.id pln_energigas ptplnenergigas PT PLN Energi Gas

Riwayat Singkat Perusahaan
Brief History of the Company

Riwayat Singkat PT PLN Energi Gas

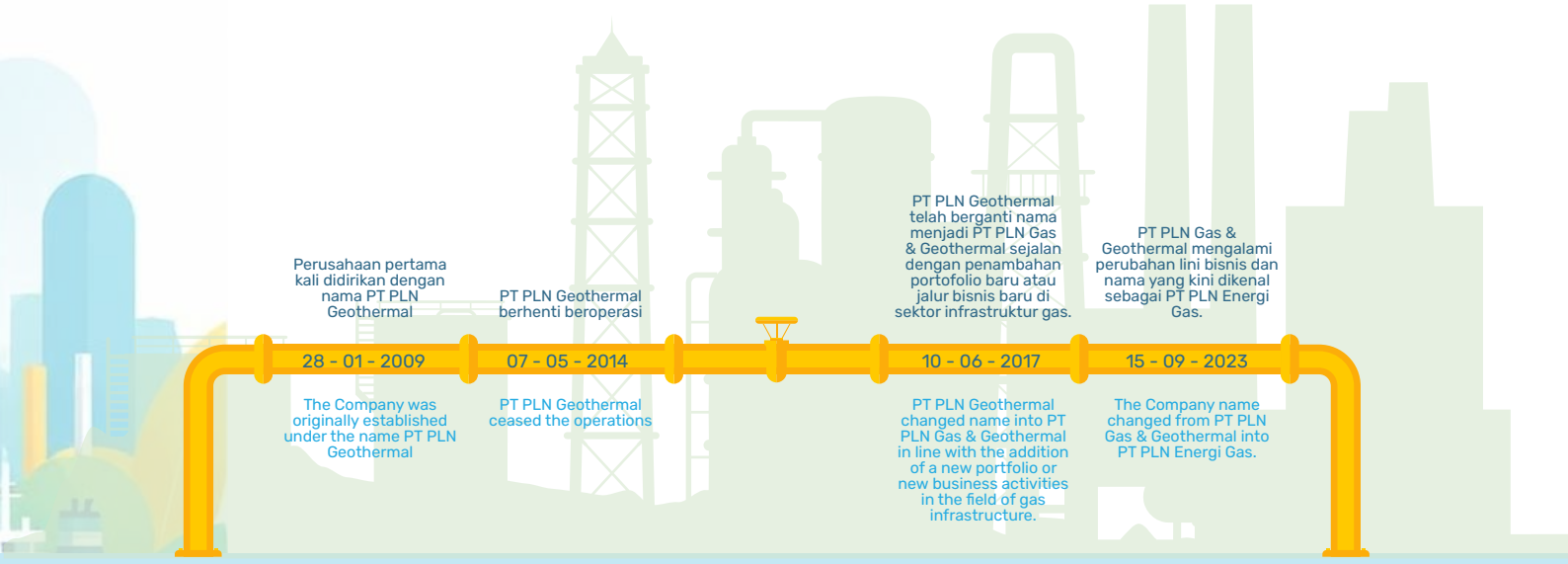
PT PLN Energi Gas (selanjutnya disingkat PLN EG) yang dahulu bernama PT PLN Gas & Geothermal adalah salah satu anak perusahaan PT PLN Energi Primer Indonesia dengan adanya pembentukan *Holding Sub-holding* PT PLN (Persero) dimana dilakukan penyertaan modal non-tunai (*inbreng*) kepada PT PLN Energi Primer Indonesia ("PLN EPI") berupa seluruh kepemilikan saham PT PLN (Persero) pada PLN EG, sesuai dengan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan No. 74 tanggal 30 Desember 2022, yang dibuat oleh dan di hadapan Muhammad Hanafi, S.H., yang telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana dibuktikan dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan Nomor AHU-AH.01.09-0000027 tanggal 1 Januari 2023 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0000016.AH.01.11.TAHUN 2024 tanggal 1 Januari 2023.

Pada tanggal 15 September 2023, perubahan nama PT PLN Gas & Geothermal menjadi PT PLN Energi Gas melalui Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham secara sirkuler serta disetujui oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU-059109. AH.01.02 Tahun 2023, pada 29 September 2023, PT Pengembang Listrik Nasional Energi Gas, menunjukan bahwa Perseroan mengubah nama dari semula PT PLN Gas & Geothermal menjadi PT PLN Energi Gas.

Brief History of PT PLN Energi Gas

PT PLN Energi Gas (hereinafter referred to as PLN EG)—formerly known as PT PLN Gas & Geothermal—is a subsidiary of PT PLN Energi Primer Indonesia. This status arose from the establishment of the PT PLN (Persero) holding and sub-holding structure, involving a non-cash capital contribution (*inbreng*) to PT PLN Energi Primer Indonesia ("PLN EPI") consisting of PT PLN (Persero)'s entire shareholding in PLN EG. This transaction was executed pursuant to the Deed of Statement of Shareholders' Resolutions No. 74 dated December 30, 2022, drawn up by and before Muhammad Hanafi, S.H.; the matter was notified to the Minister of Law and Human Rights—as evidenced by the Letter of Acceptance of Notification of Change in Company Data Number AHU-AH.01.09-0000027 dated January 1, 2023—and was registered in the Company Register under Number AHU-0000016. AH.01.11.TAHUN 2024 dated January 1, 2023.

On September 15, 2023, the name of PT PLN Gas & Geothermal was changed to PT PLN Energi Gas pursuant to a circular resolution of the General Meeting of Shareholders and approved by the Ministry of Law and Human Rights under Decree No. AHU-059109.AH.01.02 of 2023 dated September 29, 2023; this change signifies that the Company transitioned from its former name, PT PLN Gas & Geothermal, to PT PLN Energi Gas.



PLN Gas & Geothermal menjadi PT PLN Energi Gas

Pada sejarahnya, Perseroan dahulu merupakan anak perusahaan PT PLN (Persero), yang keberadaannya memiliki misi untuk mendukung usaha PT PLN (Persero). Sejarah perusahaan terlihat pada gambar pipa kuning di halaman sebelumnya. Pada awal berdirinya, PLN Energi Gas bernama PT Pengembang Listrik Nasional Geothermal (PLN G). PT PLN Geothermal didirikan berdasarkan akta No.10 tanggal 28 Januari 2009 dari Lenny Janis Iskak, SH dan disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. AHU-11269.AH.01.01 tahun 2009 tanggal 16 April 2009. Pada tahun 2013 dilakukan penghentian operasional Perseroan, berdasarkan Keputusan Pemegang Saham Perseroan secara sirkuler tanggal 7 Mei 2013 tentang penghentian operasional Perseroan.

Memperhatikan peluang usaha dan mendukung upaya penurunan tarif penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum di seluruh wilayah Indonesia, yang dijalankan oleh PT PLN (Persero) dan berdasarkan hasil kajian maka disetujui pengaktifan kembali operasional Perseroan melalui RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham) secara sirkuler tanggal 10 Juli 2017. Sesuai amanat RUPS tanggal 10 Juli 2017 tersebut dilakukan penyesuaian Anggaran Dasar dan nama Perseroan menjadi PT Pengembang Listrik Nasional Gas & Geothermal dengan Akta No. 73 tanggal 31 Juli 2017 dari M. Hanafi, S.H. dan penambahan lingkup usaha, yaitu pengelolaan gas beserta infrastrukturnya yang berkaitan dengan midstream gas dari sebelumnya hanya meliputi pengembangan dan peningkatan kapasitas pengelolaan Wilayah Kerja Panas Bumi (WKP).

Dalam rangka mencapai sasaran-sasaran strategis pada tahun 2025, PLN Energi Gas telah mencanangkan berbagai program utama dalam RKAP yang berfokus pada pengembangan usaha, keberlanjutan keuangan, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia. Adapun program-program utama Perseroan pada tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. *Value Creation* – Penyediaan Infrastruktur Gasifikasi;
2. Penyediaan O&M Gas/LNG/CNG;
3. Pembangunan dan O&M Pipa Gas;
4. Kajian dan Persiapan Konstruksi Infrastruktur Gasifikasi *Stargate* & Kolaka;

PLN Gas & Geothermal becomes PT PLN Energi Gas

Historically, the Company was a subsidiary of PT PLN (Persero), established with the mission of supporting PT PLN (Persero)'s business activities. The company's history is illustrated by the image of the yellow pipe on the preceding page. At its inception, PLN Energi Gas was named PT Pengembang Listrik Nasional Geothermal (PLN G). PT PLN Geothermal was established pursuant to Deed No. 10 dated January 28, 2009, drawn up by Notary Lenny Janis Iskak, S.H., and ratified by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia via Decree No. AHU-11269.AH.01.01 of 2009, dated April 16, 2009. In 2013, the Company's operations were discontinued in accordance with a circular resolution of the Company's shareholders dated May 7, 2013, regarding the cessation of the Company's operations.

In light of business opportunities and to support efforts to lower electricity supply tariffs for the public interest across Indonesia—an initiative led by PT PLN (Persero)—and based on the findings of a study, the reactivation of the Company's operations was approved via a circular resolution of the General Meeting of Shareholders (GMS) on July 10, 2017. Pursuant to the mandate of said GMS, the Company's Articles of Association and name were amended—changing the name to PT Pengembang Listrik Nasional Gas & Geothermal—under Deed No. 73 dated July 31, 2017, executed by Notary M. Hanafi, S.H.; additionally, the scope of business was expanded to include gas management and related infrastructure concerning the gas midstream sector, extending beyond the previous scope, which was limited to the development and capacity enhancement of Geothermal Working Area (WKP) management.

To achieve its strategic objectives for 2025, PLN Energi Gas has outlined key programs in its Work Plan and Budget (RKAP) that focus on business development, financial performance, and human resource quality enhancement. The Company's key programs for 2025 are as follows:

1. Value Creation – Provision of Gasification Infrastructure;
2. Provision of Gas/LNG/CNG O&M Services;
3. Construction and O&M of Gas Pipelines;
4. Study and Construction Preparation for Stargate & Kolaka Gasification Infrastructure;

5. Menjaga ketersediaan likuiditas Perusahaan;
6. Digitalisasi Sistem Keuangan dan Kepegawaian;
7. Pengelolaan Manajemen Risiko Keuangan Terintegrasi untuk Menjaga *Revenue Stream*;
8. Pemutakhiran Tata Kelola Kebijakan Utama *Human Capital*.

Sebagai perusahaan yang terus mengembangkan ekspansi di sektor penyediaan infrastruktur dan transportasi gas, PLN Energi Gas (PLN EG) berkomitmen untuk senantiasa mengoptimalkan kompetensi inti yang meliputi pemrosesan gas, penyimpanan gas, distribusi gas virtual/kendaraan pengangkut, serta ritel gas. Selain menjalankan kegiatan usaha utama tersebut, PLN EG juga mengembangkan berbagai lini bisnis lainnya yang sesuai dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI), sebagai berikut:

- Angkutan melalui saluran pipa;
- Penyimpanan minyak dan gas bumi;
- Perdagangan eceran Bahan Bakar Minyak (BBM), Bahan Bakar Gas (BBG), dan *Liquefied Petroleum Gas* (LPG) selain di sarana pengisian bahan bakar transportasi darat, laut dan udara;
- Industri bahan bakar dari pemurnian dan pengilangan minyak bumi;
- Pengadaan gas alam dan buatan;
- Angkutan bermotor untuk barang khusus.

5. Maintaining the Company's liquidity;
6. Digitalization of financial and human resources systems;
7. Integrated financial risk management to safeguard revenue streams;
8. Updating key human capital policy governance.

As a company continuously expanding its operations in the gas infrastructure and transportation sectors, PLN Energi Gas (PLN EG) is committed to consistently optimizing its core competencies, which encompass gas processing, gas storage, virtual gas distribution (via transport vehicles), and gas retail. In addition to these primary business activities, PLN EG is also developing various other business lines in accordance with the Indonesian Standard Industrial Classification (KBLI), as follows:

- Pipeline transport;
- Oil and natural gas storage;
- Retail trade of fuel oil, gaseous fuel, and Liquefied Petroleum Gas (LPG), excluding sales at land, marine, and air transport refueling facilities;
- Fuel industry based on petroleum refining and processing;
- Supply of natural and manufactured gas;
- Motorized transport for specialized cargo.



Jejak Langkah
Milestones

2025

- PLN Energi Gas Sukses Laksanakan Commissioning & Gas In Fasilitas Penyimpanan dan Regasifikasi LNG Tarakan
- Meraih Juara 3 Annual Report Award (ARA) 2024 pada kategori BUMN Non Go Public dengan pendapatan kurang dari Rp1 triliun, pengakuan atas kualitas keterbukaan informasi, penerapan tata kelola perusahaan yang baik (GCG), serta akuntabilitas pelaporan kinerja keberlanjutan Perseroan.

- PLN Energi Gas Successfully Completed the Commissioning and Gas-In at the Tarakan LNG Storage and Regasification Facility
- Won the 3rd Place in the 2024 Annual Report Award (ARA) in the Non-Publicly Traded State-Owned Enterprise category with revenue of less than Rp1 trillion, a recognition of the quality of information disclosure, the implementation of good corporate governance (GCG), and the accountability of the Company's sustainability performance reporting.

2024

Penandatanganan Perjanjian EPC Pembangunan Fasilitas Regasifikasi di Tarakan Antara PT PLN Energi Gas dan PT PLN Nusantara Power Construction.

Signing of the EPC Agreement for the Construction of Regasification Facility in Tarakan between PT PLN Energi Gas and PT PLN Nusantara Power Construction.

2023

Perubahan nama dari semula PT PLN Gas & Geothermal menjadi PT PLN Energi Gas.
The Company name changed from PT PLN Gas & Geothermal into PT PLN Energi Gas.

2022

- Penandatangan Nota Kesepahaman Rencana Kerja Sama Pemanfaatan Kapal Harbour TUG LNG dengan PT Jawa Satu Power;
- Penandatangan Nota Kesepahaman dengan PT PLN Nusantara Power;
- Diseminasi Perjanjian Jangka Panjang Pipa Gas Tanjung Batu

- Signing of Memorandum of Understanding on a Cooperation Plan for the Utilization of the Harbour TUG LNG Vessel with PT Jawa Satu Power;
- Signing of Memorandum of Understanding with PT PLN Nusantara Power; and
- Announcement of the Long-Term Agreement for Tanjung Batu Gas Pipeline

2021

- Penugasan mobilisasi Floating Storage & Regasification Unit (FSRU) Amurang ke PLTG Marisa Gorontalo;
- Pelaksanaan TJSL pertama di Tanjung Batu berupa Budidaya Lebah Klulut dan Budidaya Maggot;
- Berhasil mencatatkan pendapatan usaha sebesar Rp422,17 miliar;
- Perolehan laba bersih tahun berjalan dibukukan sebesar Rp47,98 miliar;
- Kinerja organisasi dinilai sebesar Rp104,90 miliar.

- Assignment of the Amurang Floating Storage & Regasification Unit (FSRU) to the Marisa Gorontalo Gas-Fired Power Plant;
- Implementation of the first Social and Environmental Responsibility (TJSL) program in Tanjung Batu, namely Klulut Bee Farming and Maggot Farming;
- Successfully recorded operating revenue of Rp422.17 billion;
- Net income for the current year was recorded at Rp47.98 billion; and
- Organizational performance was valued at Rp104.90 billion.

2020

Penyelesaian 2 (dua) proyek besar:
- Proyek Gasifikasi Pipa Gas Tanjung Batu sepanjang 48,3 km dengan ukuran pipa sebesar 16" di Samarinda;
- Proyek FSRU Sulawesi untuk Gasifikasi Lease Marine Vessel Power Plant (LMVPP) Karadeniz Powership Zeynep Sultan 120 MG di Amurang.

Completion of 2 (two) mega projects:
- The 48.3km Tanjung Batu Gas Pipeline Project with 16" pipes in Samarinda; and
- Sulawesi FSRU Project for the gasification of the Karadeniz Powership Zeynep Sultan 120 MG chartered power plant (LMVPP) in Amurang.

2017

PT PLN Geothermal melakukan perubahan nama menjadi PT PLN Gas & Geothermal seiring dengan penambahan portofolio baru atau kegiatan usaha baru di bidang infrastruktur gas.

PT PLN Geothermal changed name into PT PLN Gas & Geothermal in line with the addition of a new portfolio or new business activities in the field of gas infrastructure.

2014

PT PLN Geothermal berhenti beroperasi
PT PLN Geothermal ceased the operations

2009

Pertama kali didirikan dengan nama "PT PLN Geothermal"
Originally established under the name "PT PLN Geothermal"



Visi, Misi dan Tata Nilai Perusahaan
Vision, Mission, and Corporate Values

Visi PLN Energi Gas

"Menjadi Perusahaan Global Pilihan Utama Dalam Solusi Infrastruktur Gas"

Perusahaan Global
PLN Energi Gas bertekad untuk memiliki daya saing internasional dalam pengelolaan dan pengoperasian infrastruktur gas.

Global
Bukan sekedar ekspansi geografis, tetapi lebih kepada standar operasi, inovasi, dan keunggulan teknologi yang mampu bersaing di tingkat dunia.

Pilihan Utama (*Top of Mind*)
Pilihan utama yang terlintas di benak konsumen dan pemangku kepentingan yang membutuhkan solusi infrastruktur gas.

Solusi Infrastruktur
PLN Energi Gas menyediakan solusi infrastruktur gas terintegrasi, mencakup proses *liquefaction, compression*, logistik komprehensif melalui pipa gas, transportasi gas hingga tahap regasifikasi untuk memastikan pasokan energi yang andal.

PLN Energi Gas Vision

"To Be The Top-of-Mind Global Company in Gas Infrastructure Solution"

Global Company
PLN Energi Gas is determined to be an international competitiveness in the management and operation of gas infrastructure.

Global
Not just geographical expansion, but more about operational standards, innovation, and technological excellence that can compete at the global level.

Top of Mind
The first choice that comes to consumers and stakeholders' minds who need gas infrastructure solutions.

Infrastructure Solutions
PLN Energi Gas provides integrated gas infrastructure solutions, covering the processes of liquefaction, compression, comprehensive logistics through gas pipelines, gas transportation, and regasification stages to ensure a reliable and efficient energy supply.

Misi PLN Energi Gas

"Solution Provider for Gas Supply Infrastructure with Customer-Oriented Focus"
Menyediakan solusi atas kebutuhan infrastruktur pasokan gas untuk Pembangkit Tenaga Listrik dan Pelanggan lainnya dengan berorientasi kepada kebutuhan dan kepuasan pelanggan, anggota perusahaan dan pemegang saham.

Global Excellence in Reliable Operation of Gas Infrastructure
Mengelola infrastruktur gas yang andal dan efisien dengan standar operasi, inovasi, dan keunggulan teknologi yang mampu bersaing di tingkat dunia dengan tetap memprioritaskan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) serta berwawasan lingkungan.

Sustainable Growth Through Optimizing Profitability, Enhancing Expertise And Es-Grc Integration
Mengoptimalkan tingkat profitabilitas, meningkatkan SDM unggul dan meng-integrasikan prinsip-prinsip *Environmental, Social, Governance, Risk & Compliance* (ES-GRC) untuk mendorong pertumbuhan berkelanjutan.

PLN Energi Gas Mission

"Solution Provider for Gas Supply Infrastructure with Customer-Oriented Focus"
Providing solutions to the needs of gas supply infrastructure for Power Plants and other Customers by orienting to the needs and satisfaction of customers, company members, and shareholders.

Global Excellence in Reliable Operation of Gas Infrastructure
Managing reliable and efficient gas infrastructure with world-class operating standards, innovation, and technological excellence while prioritizing occupational health and safety (OHS) and environmental awareness.

Sustainable Growth Through Optimizing Profitability, Enhancing Expertise And Es-Grc Integration
Optimizing profitability, enhancing human capital, and integrating Environmental, Social, Governance, Risk & Compliance (ES-GRC) principles to boost sustainable growth.

Visi dan Misi PT PLN Energi Gas telah ditetapkan sebagai bagian dari Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) periode 2024–2028 dan menjadi landasan strategis yang mengarahkan seluruh kegiatan usaha serta pengembangan perusahaan dalam jangka panjang. Penetapan Visi dan Misi tersebut diputuskan melalui Keputusan Rapat Direksi tanggal 19 Maret 2025 dengan mempertimbangkan dinamika sektor energi nasional, arah kebijakan pemegang saham, serta peran PLN Energi Gas dalam mendukung transisi energi dan ketahanan pasokan gas bagi sektor kelistrikan.

PT PLN Energi Gas established vision and mission as part of the Company's long-term plan (RJPP) for the period 2024-2028 and is a strategic foundation that directs all business activities and the Company development in the long term. The Company decided the vision and mission through the decision of the Board of Directors meeting on March 19, 2025 by considering the dynamics of the national energy sector, the direction of shareholder policy, and the role of PLN Energi Gas in supporting the energy transition and gas supply security for the electricity sector.

Tata Nilai Perusahaan

Sebagai bagian dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN), PLN EG menerapkan nilai budaya AKHLAK sesuai dengan yang dicanangkan oleh Kementerian BUMN melalui surat Edaran Menteri BUMN Nomor SE-7/MBU/07/2020 tentang Nilai-nilai Utama *(Core Values)* Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara. Berikut penjabarannya:

Corporate Values

As part of the state-owned enterprises (SOEs), PLN Energi Gas implements moral cultural values following those proclaimed by the Ministry of SOEs through the Minister of SOEs circular number SE-7/MBU/07/2020 concerning the Core ValuesofHuman Resources of State-Owned Enterprises, with the following description:

A	**Amanah** **Trustworthy** Memegang teguh kepercayaan yang diberikan Upholding the trust given	• Memenuhi janji dan komitmen • Bertanggungjawab atas tugas, keputusan, dan tindakan yang dilakukan • Mematuhi nilai-nilai moral dan etika • Keeping promises and commitments • Being responsible for the tasks, decisions, and actions taken • Upholding the moral and ethical values
K	**Kompeten** **Competent** Terus belajar dan mengembangkan kapabilitas Continuing to learn and develop capabilities	• Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah • Membantu orang lain belajar • Menyelesaikan tugas dengan kualitas terbaik • Improving self-competence to respond to ever-changing challenges • Helping others in learning • Completing tasks with the highest quality
H	**Harmonis** **Harmonious** Saling peduli dan menghargai perbedaan Caring for each other and respecting differences	• Menghargai setiap orang apa pun latar belakangnya • Suka menolong orang lain • Membangun lingkungan kerja yang kondusif • Respecting everyone regardless of background • Willing to help others • Building conducive work environment
L	**Loyal** **Loyal** Berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara Dedicated and prioritizing the interest of the nation and state	• Menjaga nama baik sesama karyawan, pimpinan, BUMN, dan Negara • Rela berkorban untuk tujuan yang lebih besar • Patuh kepada pimpinan sepanjang tidak bertentangan dengan hukum dan etika • Maintaining the good reputation of fellow employees, leaders, SEOs, and the State • Willing to sacrifice to achieve a greater goal • Adhering the leadership as long as it is not against the law and ethics
A	**Adaptif** **Adaptive** Terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan atau pun menghadapi perubahan Keep innovating and being enthusiastic in driving or facing changes	• Cepat menyesuaikan diri untuk menjadi lebih baik • Terus-menerus melakukan perbaikan mengikuti perkembangan teknologi • Bertindak positif • Quickly adapting to be better • Continuously making improvements to keep up with technological developments • Acting proactively
K	**Kolaboratif** **Collaborative** Membangun kerja sama yang sinergis Building Synergistic Cooperation	• Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi • Terbuka untuk bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah • Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama • Providing opportunities for various parties to contribute • Open in working together to generate added value • Mobilizing the use of various resources for common goals

Strategi Perusahaan
Company Strategy

Direksi PLN Energi Gas secara rutin melakukan pengembangan dan peninjauan strategi Perusahaan setiap tahun guna memastikan keberlangsungan usaha serta kesiapan Perseroan dalam menghadapi dinamika industri energi dan bisnis gas nasional. Strategi tahun 2025 dirumuskan dengan mempertimbangkan peluang dan tantangan industri midstream gas, perkembangan kebijakan transisi energi, kondisi perekonomian nasional, tingkat persaingan usaha, serta kapabilitas internal perusahaan berdasarkan hasil analisis SWOT, PESTLE, dan 5M. Proses penyusunan strategi tersebut dilakukan secara terintegrasi dengan memperhatikan arah Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) 2024–2028, aspirasi pemegang saham, serta kebutuhan pengembangan bisnis Perseroan di masa mendatang.

Strategi yang telah ditetapkan kemudian diterjemahkan ke dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) tahun 2025 yang memuat berbagai program prioritas, target operasional, dan inisiatif strategis perusahaan. Implementasi strategi dilakukan secara terukur melalui pemantauan dan evaluasi berkala oleh Direksi bersama Dewan Komisaris guna memastikan efektivitas pelaksanaan strategi serta keselarasan dengan target kinerja perusahaan. Dalam hal terdapat perubahan kondisi bisnis atau dinamika eksternal yang signifikan, Perseroan melakukan penyesuaian strategi dan langkah mitigasi secara adaptif untuk menjaga keberlanjutan usaha dan daya saing perusahaan.

Sejalan dengan arah pengembangan usaha tersebut, strategi umum PLN Energi Gas pada tahun 2025 difokuskan pada beberapa prioritas utama sebagai berikut:

1. Implementasi program kerja Anggaran Investasi dan Pengembangan Usaha.
   a. *Value Creation* - Penyediaan Fasilitas Penyimpanan, Transportasi, Regasifikasi Untuk Gasifikasi Tarakan, Gasifikasi Punagaya, Gasifikasi Tanjung Selor, Penyediaan Infrastruktur Gas/LNG/CNG – Penyediaan O&M CNG Duri.
   b. Pembangunan dan O&M Pipa Gas – Pembangunan pipa Cilegon dan pipa gas Bali.
   c. Pembangunan *pipeline*, *piping* dan *metering system Stargate* dan Kolaka.

PLN Energi Gas Board of Directors routinely develops and reviews the Company's strategy annually to ensure business continuity and the Company's readiness to face the dynamics of the national energy and gas industries. The Company formulated the 2025 strategy by considering the opportunities and challenges of the midstream gas industry, developments in energy transition policies, national economic conditions, the level of business competition, and the Company's internal capabilities based on the results of SWOT, PESTLE, and 5M analyses. The Company processed the strategy formulation in an integrated manner, considering the direction in the Company's Long-Term Plan (RJPP) for 2024–2028, the shareholders aspirations, and future business development needs of the Company.

PLN Energi Gas translated the established strategy into the 2025 Corporate Work Plan and Budget (RKAP), which outlines various priority programs, operational targets, and strategic initiatives. The Company implements the strategy in a measurable manner through regular monitoring and evaluation by the Board of Directors and the Board of Commissioners to ensure the effectiveness of strategy implementation and alignment with the Company performance targets. In the event of significant changes in business conditions or external dynamics, the Company adjusts the strategy and implements adaptive mitigation measures to maintain business sustainability and competitiveness.

In line with this business development direction, PLN Energi Gas general strategy for 2025 focuses on the following key priorities:

1. Implementation of the Investment Budget and Business Development work program.
   a. Value Creation - Provision of Storage, Transportation, and Regasification Facilities for Tarakan Gasification, Punagaya Gasification, and Tanjung Selor Gasification, and Provision of Gas/LNG/CNG Infrastructure – Provision of O&M for Duri CNG.
   b. Gas Pipeline Construction and O&M – Construction of the Cilegon and Bali gas pipelines.
   c. Construction of the Stargate and Kolaka pipelines, piping, and metering systems.

2. Sistem Keuangan yang berkelanjutan.
   a. Menjaga ketersediaan likuiditas Perusahaan - Percepatan proses pengelolaan piutang, optimasi *cash release* restitusi pajak, monitoring dan evaluasi anggaran investasi untuk implementasi program kerja.
   b. Digitalisasi sistem keuangan dalam rangka menunjang program prioritas tahun 2025.
   c. Pengelolaan manajemen risiko terintegrasi dalam rangka menjaga *revenue stream* baru dan eksisting.
3. Pemenuhan FTK dan Pengembangan Kompetensi SDM.
   a. Pemutakhiran Tata Kelola Kebijakan Utama *Human Capital* - manajemen penghargaan, manajemen talenta, manajemen kinerja.
   b. Pemenuhan Kebutuhan SDM melalui pelaksanaan rekrutmen pegawai organik, penyediaan tenaga kerja alih daya, pemenuhan tenaga kerja *expert*.
   c. Peningkatan Kompetensi Pegawai - program peningkatan kompetensi keahlian, program sertifikasi kompetensi utama, pembelajaran/ diklat sesuai KKJ.
4. Pelaksanaan Program Tanggung Jawab Sosial & Lingkungan:
   a. Program pemberdayaan ekonomi masyarakat, pelatihan, peningkatan kapasitas, dan pengembangan UMKM.
   b. Pengelolaan sampah (TPS3R), konservasi hutan, penghijauan, energi terbarukan dan konservasi mangrove.
   c. Program kesehatan masyarakat, bantuan sosial kesehatan, peningkatan kualitas kesehatan masyarakat, dan dukungan ketahanan pangan.
5. Penguatan Budaya Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).
   a. Menyusun dan mengimplementasi *project and process safety management*.
   b. Menetapkan komitmen manajemen dan kebijakan K3 secara *top down*.
   c. Meningkatkan awareness terkait K3 kepada seluruh pegawai.
   d. Pelatihan dan sertifikasi untuk personil K3.
   e. Melakukan monitoring dan audit SMK3.

Reference : Buku RKAP PEG 2025, II.3. Program Utama Perseroan

2. Sustainable Financial System.
   a. Maintaining the Company's liquidity - Accelerating the accounts receivable management process, optimizing tax refund cash releases, and monitoring and evaluating the investment budget for work program implementation.
   b. Digitizing the financial system to support the 2025 priority programs.
   c. Integrated risk management to maintain new and existing revenue streams.
3. Fulfillment of Technical Requirements (FTK) and Development of Human Resource Competencies.
   a. Updating the Governance of Key Human Capital Policies – reward management, talent management, and performance management.
   b. Fulfilling human resource needs through the implementation of organic employee recruitment, provision of outsourced labor, and the provision of expert labor.
   c. Employee Competency Improvement - skills competency improvement programs, core competency certification programs, learning/ training according to the KKJ.
4. Implementation of Social & Environmental Responsibility Programs:
   a. Community economic empowerment programs, training, capacity building, and MSME development.
   b. Waste management (TPS3R), forest conservation, reforestation, renewable energy, and mangrove conservation.
   c. Public health programs, social health assistance, improving the quality of public health, and supporting food security. [1.1][1.2]
5. Strengthening Occupational Safety and Health (OHS) Culture.
   a. Developing and implementing project and process safety management.
   b. Establishing top-down management commitments and OHS policies.
   c. Increasing OHS awareness among all employees.
   d. Training and certification for OHS personnel.
   e. OHS monitoring and audits.

Maksud dan Tujuan Perusahaan
Purpose and Objectives of the Company

PLN Energi Gas memiliki tujuan utama untuk mendukung ketahanan dan keberlanjutan energi nasional melalui pemanfaatan gas bumi sebagai sumber energi yang bersih, andal, dan efisien. Sebagai entitas strategis di bawah PLN Group, PLN Energi Gas menyelenggarakan usaha ketenagalistrikan dalam rangka ikut serta melaksanakan dan menunjang kebijakan program pemerintah di bidang pengembangan dan penyediaan energi listrik berupa pasokan gas yang andal bagi pembangkit tenaga listrik guna menjamin kontinuitas layanan kelistrikan nasional.

Dalam pengembangan dan pengoperasiannya, PLN Energi Gas berfokus untuk memastikan ketersediaan pasokan gas khusus bagi PLTG/PLTGU di lingkungan PLN Group serta mengoptimalkan biaya produksi PLN Group melalui pengelolaan pasokan energi yang efisien dan terintegrasi. Melalui pengelolaan rantai pasok gas tersebut, PLN Energi Gas berupaya menciptakan nilai tambah secara berkelanjutan bagi seluruh pemangku kepentingan, sekaligus memperkuat perannya dalam mendukung program transisi energi nasional dan peningkatan keandalan sistem kelistrikan nasional.

Selain itu, PLN Energi Gas juga menempatkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik (GCG) sebagai landasan dalam menjalankan operasional perusahaan secara profesional, transparan, bertanggung jawab, dan berorientasi pada keberlanjutan serta penciptaan nilai jangka panjang.

PLN Energi Gas has the primary objective in the context to support national energy security and sustainability through the utilization of natural gas as a clean, reliable, and efficient energy source. As a strategic entity under the PLN Group, PLN Energi Gas operates in the electricity sector to help implement and support government policies and programs in the development and provision of electricity by ensuring a reliable gas supply to power plants, thereby guaranteeing the continuity of the national electricity service.

In the development and operations, PLN Energi Gas focuses on ensuring the availability of dedicated gas supplies for gas-fired power plants (GFPP) and combined-cycle gas-steam power plants (GSPP) within the PLN Group, as well as optimizing the PLN Group's production costs through efficient and integrated energy supply management. Through the management of this gas supply chain, PLN Energi Gas strives to create sustainable added values for all stakeholders, while strengthening its role in supporting the national energy transition program and enhancing the reliability of the national electricity system.

Moreover, PLN Energi Gas also upholds the principles of good corporate governance (GCG) as the foundation for undertaking operations in a professional, transparent, and responsible manner, with a focus on sustainability and the creation of long-term value.



Kegiatan Usaha Perusahaan
Business Activities

Kegiatan Usaha Sesuai Anggaran Dasar Terakhir

Berdasarkan Akta Notaris Lenny Janis Ishak, S.H. No. 10 tanggal 28 Januari 2009 dan Perubahan terakhir Akta Notaris Shahreza Annaz S.H., M.Kn. dengan No. 24 Tanggal 27 September 2023, kegiatan usaha utama yang dijalankan Perseroan adalah sebagai berikut:

1. Angkutan melalui saluran pipa, mencakup usaha pengangkutan minyak dan gas bumi (minyak bumi, bahan bakar minyak, hasil olahan dan gas bumi), cairan, air, lumpur, dan komoditas lainnya dari tempat pembuatan (produsen) ke tempat pemakai (konsumen) dengan saluran pipa atau dasar balas jasa (*fee*) atau kontrak, termasuk pengoperasian gardu pompa;
2. Penyimpanan minyak dan gas bumi, mencakup kegiatan usaha penyimpanan yang meliputi kegiatan penerimaan, pengumpulan, penampungan dan pengeluaran minyak bumi, bahan bakar gas dan/atau hasil olahan pada lokasi di atas dan/atau di bawah permukaan tanah dan/ atau permukaan air untuk tujuan komersial termasuk penyimpanan di zona perdagangan bebas;
3. Perdagangan eceran bahan bakar minyak, bahan bakar gas (BBG), dan *liquefied petroleum gas* (LPG) selain di sarana pengisian bahan bakar transportasi darat, laut dan udara, mencakup perdagangan eceran bahan bakar minyak, BBG, LPG, atau jenis bahan bakar lain selain di sarana pengisian bahan bakar untuk transportasi darat, laut, dan udara (seperti agen BBM, agen LPG, dan sebagainya);
4. Industri bahan bakar dari pemurnian dan pengilangan minyak bumi, mencakup usaha pemurnian dan pengilangan minyak bumi yang menghasilkan bahan bakar seperti Avigas, Avtur, Gasoline, Minyak Tanah atau Kerosin, Minyak Solar, Minyak Diesel, Minyak Bakar atau Bensin, Solvent/Pelarut, termasuk LPG dari hasil pengilangan minyak bumi;
5. Pengadaan gas alam dan buatan, mencakup usaha pengolahan bahan bakar gas yang dapat dimanfaatkan secara langsung sebagai bahan bakar dimana pembuatannya disertai usaha peningkatan mutu gas, termasuk pemurnian, pencampuran dan proses lainnya yang dihasilkan dari gas alam (termasuk LPG), karbonasi dan

Business Activities According to the Latest Articles of Association

According to Notarial Deed No. 10 dated January 28, 2009, drawn up by Lenny Janis Ishak, S.H., Notary, and the most recent amendment to Notarial Deed No. 24 dated September 27, 2023, drawn up by Shahreza Annaz, S.H., M.Kn., Notary, the Company runs the following primary business activities:

1. Pipeline transportation, including the transportation of oil and natural gas (crude oil, petroleum products, refined products, and natural gas), liquids, water, slurry, and other commodities from the production site (producer) to the consumption site (consumer) via pipelines on a fee or contract basis, including the operation of pumping stations;
2. Storage of crude oil and natural gas, encompassing storage operations that include the receipt, collection, storage, and dispensing of crude oil, petroleum fuels, and/or refined products at locations above and/or below ground and/or water surfaces for commercial purposes, including storage in free trade zones;
3. Retail trade in petroleum fuels, gaseous fuels (BBG), and liquefied petroleum gas (LPG) other than at refueling facilities for land, sea, and air transportation, covering the retail trade of petroleum fuels, BBG, LPG, or other types of fuel other than at refueling facilities for land, sea, and air transportation (such as fuel agents, LPG agents, and so on);
4. Petroleum and fuel industry refining, including petroleum refining and refining businesses that produce fuels such as Avigas, Avtur, Gasoline, Kerosene or Kerosene, Diesel Oil, Diesel Fuel Oil or Gasoline, Solvents, including LPG from petroleum refining;
5. Natural and artificial gas procurement, including gas fuel processing businesses that can be used directly as fuel, where the production is accompanied by efforts to improve the gas quality, including purification, blending, and other processes produced from natural gas (including LPG), carbonation and gasification of

gasifikasi batu bara, atau bahan hidrokarbon lain;
6. Angkutan bermotor untuk barang khusus, mencakup operasional angkutan barang dengan kendaraan bermotor atau barang yang secara khusus mengangkut satu jenis barang, seperti angkutan bahan bakar minyak, minyak bumi, hasil olahan, LPG, LNG dan CNG, angkutan barang berbahaya, limbah bahan berbahaya dan beracun, angkutan barang alat-alat berat, angkutan peti kemas, angkutan tumbuhan hidup, angkutan hewan hidup dan pengangkatan kendaraan bermotor.

Bidang Usaha yang Dijalankan Tahun 2025

Pada tahun 2025, Perseroan menjalankan kegiatan usaha, antara lain:

1. Pengoperasian Pipa Gas Tanjung Batu (Kalimantan Timur);
2. *Floating Storage and Regasification Unit* (FSRU) Gorontalo;
3. Fasilitas Penyimpanan dan Regasifikasi LNG Tarakan;
4. *Operation & Maintenance CNG Plant* Duri (Riau);
5. Kapal Tunda (*Tug Boat*) *Charter Operations;*
6. Melaksanakan pengembangan kompetensi SDM dengan melakukan program diklat dan sertifikasi.

coal, or other hydrocarbon materials;
6. Motorized transportation for special goods, including freight transportation operations using motorized vehicles or goods specifically transporting one type of goods, such as the transportation of fuel oil, petroleum, refined products, LPG, LNG, and CNG, the transportation of dangerous goods, hazardous and toxic waste, the transportation of heavy equipment, container transportation, the transportation of live plants, the transportation of live animals, and the lifting of motorized vehicles.

Business Segments in 2025

In 2025, the Company runs the following business activities:

1. Operation of the Tanjung Batu Gas Pipeline (East Kalimantan);
2. Gorontalo Floating Storage and Regasification Unit (FSRU);
3. Tarakan LNG Storage and Regasification Facility;
4. Operation & Maintenance of the Duri CNG Plant (Riau);
5. Tugboat Charter Operations;
6. Organized human resource competency development through training and certification programs.

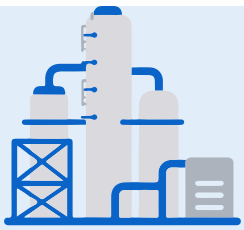


Produk dan Jasa Perusahaan
Products and Services

PLN Energi Gas merupakan anak perusahaan PT PLN Energi Primer Indonesia yang terus menunjukkan ekspansi di sektor midstream gas. Kompetensi inti Perusahaan adalah pendistribusian gas (gas pipa dan LNG) di darat dan di laut (FSRU & LNGC) untuk pembangkit listrik dengan keandalan tinggi yang akan dimanfaatkan oleh PLN Group.

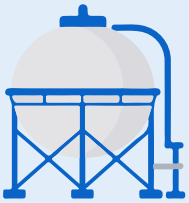
PLN Energi Gas is a subsidiary of PT PLN Energi Primer Indonesia that continues to show expansion in the gas midstream sector. The Company's core competency is the distribution of gas (pipeline gas and LNG) on land and at sea (FSRU & LNGC) for high reliability power plants that will be utilized by PLN Group.

Gas Processing
Proses pemurnian gas mentah agar memenuhi standar teknis dan keselamatan sebelum disuplai ke pembangkit.



Gas Processing
Raw gas purification process to meet technical and safety standards before being supplied to power plants.

Gas Storage
Penyimpanan gas dalam bentuk LNG, CNG, atau fasilitas bawah tanah untuk menjamin stabilitas dan kontinuitas pasokan.



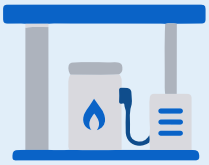
Gas Storage
Gas storage in the form of LNG, CNG, or underground facilities to ensure stability and continuity of supply.

Virtual Gas Conveyance / Vehicle
Distribusi gas tanpa jaringan pipa menggunakan truk CNG atau ISO tank LNG—solusi fleksibel untuk lokasi yang sulit dijangkau.



Virtual Gas Conveyance/Vehicle
Distribution of gas without pipelines using CNG trucks or ISO LNG tanks-a flexible solution for hard-to-reach locations.

Retail
Penyaluran gas ke konsumen industri dan komersial non-pembangkit untuk diversifikasi pasar dan nilai tambah usaha.



Retail
Gas distribution to non-power plant industrial and commercial customers for market diversification and value-added businesses.

Penyediaan O&M
Melaksanakan operasi dan pemeliharaan fasilitas penyimpanan gas seperti O&M CNG *Plant* Riau Balai Pungut, serta pemeliharaan pipa gas Tanjung Batu



Provision of O&M
Providing operation and maintenance of gas storage facilities such as O&M of CNG Plant Riau Balai Pungut, as well as maintenance of Tanjung Batu gas pipeline.

Skema Proses Bisnis
Business Process Scheme



Wilayah Kerja Operasional
Operational Work Areas



Wilayah kerja operasional PLN Energi Gas, adalah sebagai berikut:
PLN Energi Gas operational work area is as follows:

1. Kantor Pusat
Head Office
Alamat: Menara Bidakara 2, Lt 10, Gatot Subroto, Kav. 71-73, Menteng Dalam, Tebet, Jakarta Selatan - 12870
Email: info@plnenergigas.co.id
Telp: +62 21 2972 1019 atau +62 21 2972 1841

2. Kantor Unit Tanjung Batu
Unit Office Tanjung Batu
Alamat: Unit Office Tanjung Batu, Jl. Gn. Cermai No.15, Jawa, Kec. Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Kalimantan Timur 75122
Telp: (0541) 208850

3. Site Tanjung Batu
Tanjung Batu Site Unit
Alamat: Jalan Raya, Tj. Batu, Kec. Tenggarong Seberang, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur 75514
Pipa Gas Tanjung Batu

4. Site Gorontalo
Gorontalo Site
Alamat: Kec. Paguyaman, Kab. Pohuwato, Provinsi Gorontalo
Floating Storage and Regasification Unit (FSRU) Gorontalo, FSRU Sulawesi untuk PLTG Maleo: 4x25 MW Gorontalo, Sulawesi Utara

Wilayah Kerja Operasional
Operational Work Areas



5. Fasilitas Regasifikasi Tarakan
Tarakan Regasification Facility
Alamat: Jl Panglima Diponegoro no 2. Kelurahan Pamusian, Kecamatan Tarakan Tengah, Kota Tarakan, Kalimantan Utara.
Fasilitas Regasifikasi Tarakan

6. Penyediaan Jasa Operasi dan Pemeliharaan CNG Plant Duri
Provision of Operation and Maintenance Services for the Duri
Alamat: Desa Balai Pungut, Kecamatan Pinggir, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau
Operation & Maintenance CNG Duri

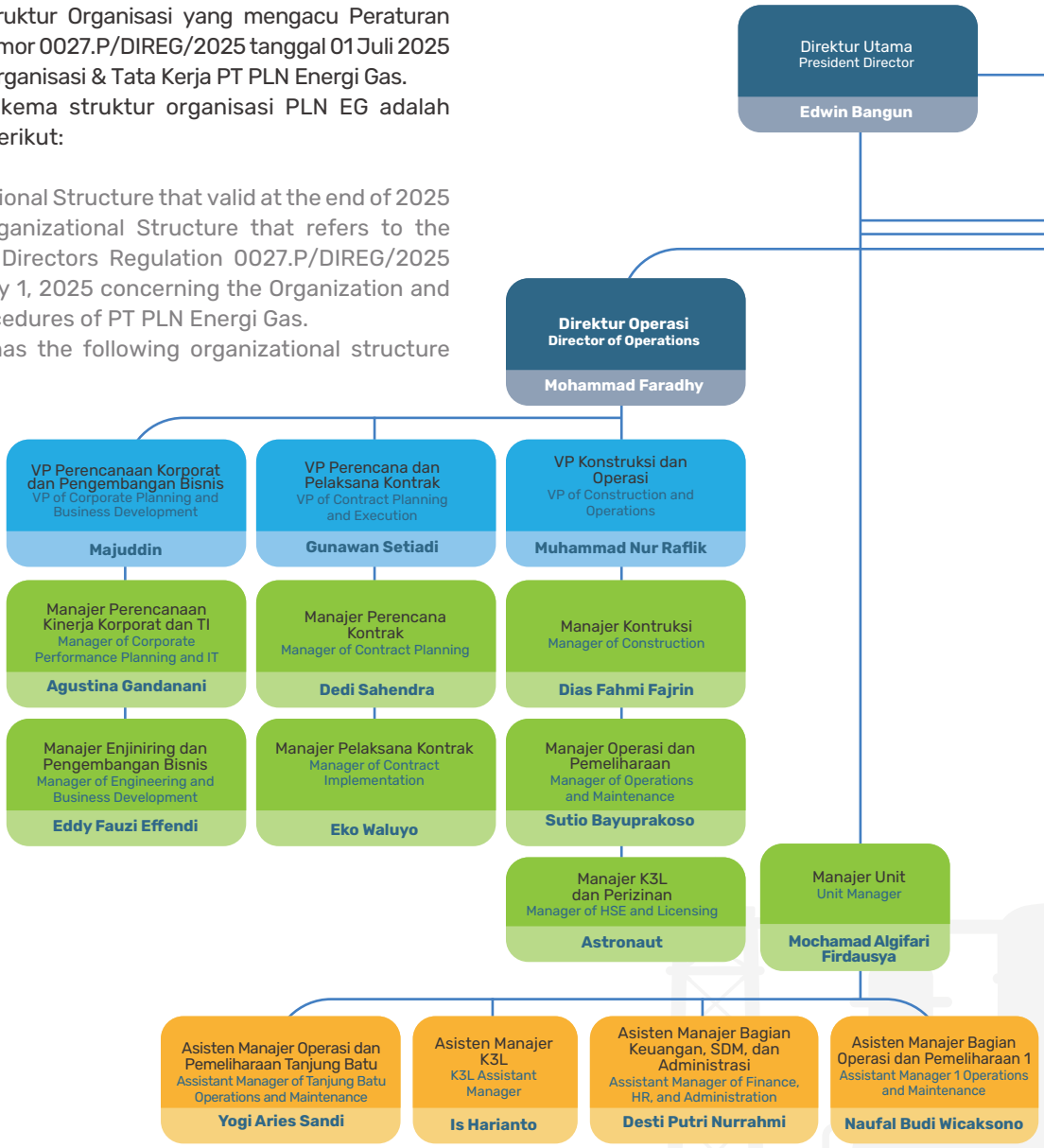
7. Proyek Punagaya
Punagaya Project
Alamat: Desa Punagaya, Kecamatan Bangkala, Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan.
Proyek Pembangunan Fasilitas Gasifikasi (*Gasification Facility Construction Project*)

8. Proyek Bali
Bali Project
Alamat: Kawasan Serangan, Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Bali

Struktur Organisasi
Organizational Structure

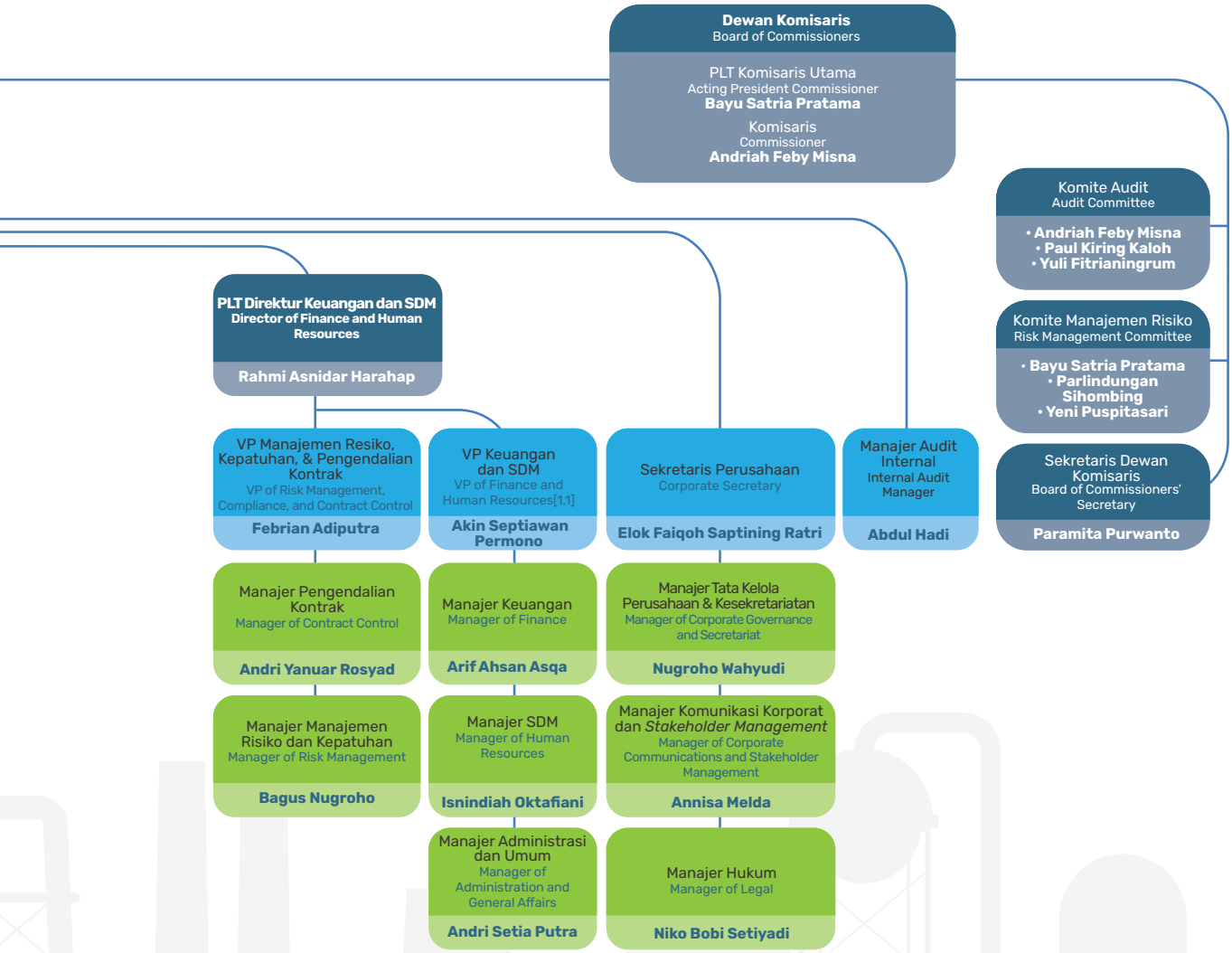
Struktur Organisasi yang berlaku di akhir tahun 2025 adalah Struktur Organisasi yang mengacu Peraturan Direksi Nomor 0027.P/DIREG/2025 tanggal 01 Juli 2025 tentang Organisasi & Tata Kerja PT PLN Energi Gas. Adapun skema struktur organisasi PLN EG adalah sebagai berikut:

Organizational Structure that valid at the end of 2025 is the Organizational Structure that refers to the Board of Directors Regulation 0027.P/DIREG/2025 dated July 1, 2025 concerning the Organization and Work Procedures of PT PLN Energi Gas.
PLN EG has the following organizational structure scheme:



Sepanjang tahun 2025, Perusahaan melakukan sejumlah penyesuaian pada struktur organisasi sebagai bagian dari upaya penguatan tata kelola dan efektivitas operasional. Tanggal 31 Juli 2025 telah dilakukan pergantian Pelaksana Tugas Komisaris Utama yang sebelumnya Sdr. Dedi Budi Utomo menjadi Sdr. Bayu Satria Pratama, tanggal 1 Desember 2025, Sdr. Andri Setia Putra bergabung dan menjabat sebagai Manager Administrasi dan Umum.

Throughout 2025, the Company made a number of adjustments to its organizational structure as part of efforts to strengthen governance and operational effectiveness. On July 31, 2025, the Acting Main Commissioner was replaced by Mr. Dedi Budi Utomo and Mr. Bayu Satria Pratama. As of December 1, 2025, Mr. Andri Setia Putra joined the Company and assumed the position of Administration and General Affairs Manager.



Pada fungsi Manajer SDM, telah dilakukan pergantian pejabat dari Sdri. Rosalia Febriani kepada Sdri. Isnindiah Oktaviani. Selanjutnya, per 31 Desember 2025, jabatan Manager Enjiniring dan Pengembangan Bisnis yang sebelumnya diemban oleh Sdr. Agung Priambodho dialihkan kepada Sdr. Eddy Fauzi Effendi. Selain itu, Sdr. Naufal Budi Wicaksono bergabung untuk mengemban jabatan sebagai Asisten Manajer Bagian Operasi dan Pemeliharaan 1.

In the Human Resources Manager role, there was a change in leadership from Ms. Rosalia Febriani to Ms. Isnindiah Oktaviani. Furthermore, effective December 31, 2025, the position of Manager of Engineering and Business Development, previously held by Mr. Agung Priambodho, was transferred to Mr. Eddy Fauzi Effendi. In addition, Mr. Naufal Budi Wicaksono joined the Company and was appointed to the position of Assistant Manager of Operations and Maintenance Division 1.

Informasi Perubahan Direksi pada Tahun Buku dan Setelah Tahun Buku 2025
Information on Changes to the Board of Directors in and After the 2025 Fiscal Year

Komposisi Direksi Tahun Buku 2025
Composition of the Board of Directors for Fiscal Year 2025

Periode 1 Januari 2025 – 31 Desember 2025 Period January 1, 2025 - December 31, 2025	
PLT Direktur Utama Acting President Director	Edwin Bangun
PLT Direktur Keuangan dan SDM Acting Director of Finance and Human Resources	Rahmi Asnidar Harahap
PLT Direktur Operasional Acting Director of Operations	Yusuf Kusdinar

Tabel diatas merupakan komposisi Direksi tahun buku 2025. Sepanjang tahun 2025 terdapat pergantian komposisi Direksi pada tanggal 31 Desember 2025. Namun, efektif pada tanggal 1 Januari 2026.

The table above shows the composition of the Board of Directors for fiscal year 2025. During 2025, there was a change in the composition of the Board of Directors on December 31, 2025; however, the change became effective on January 1, 2026.

Komposisi Direksi Setelah Tahun Buku 2025
Composition of the Board of Directors After the 2025 Fiscal Year

Perubahan komposisi Direksi Perusahaan ditetapkan melalui Keputusan Pemegang Saham di Luar Rapat Umum Pemegang Saham (Sirkuler) tertanggal 31 Desember 2025 dengan Keputusan memberhentikan Sdr. Yusuf Kusdinar dari jabatannya sebagai PLT Direktur Operasional dan mengangkat Sdr. Mohammad Faradhy sebagai PLT Direktur Operasional. Perubahan tersebut berdasarkan surat PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) ("PLN") Nomor 68124/SDM.07.01/F01080000/2025-SR tanggal 11 Desember 2025. Berikut susunan dan komposisi Direksi PT PLN Energi Gas tahun buku 2025 :

Changes to the composition of the Company's Board of Directors were established through a Shareholders' Resolution Outside the General Meeting of Shareholders (Circular) dated December 31, 2025, which resolved to remove Mr. Yusuf Kusdinar from his position as Acting Director of Operations and to appoint Mr. Mohammad Faradhy as Acting Acting Director of Operations. This change is based on a letter from PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) ("PLN") No. 68124/SDM.07.01/F01080000/2025-SR dated December 11, 2025. The following is the structure and composition of the Board of Directors of PT PLN Energi Gas for the 2025 fiscal year:

Periode 1 Januari 2026 – Saat ini Period January 1, 2026 - Present	
PLT Direktur Utama Acting President Director	Edwin Bangun
PLT Direktur Keuangan dan SDM Acting Director of Finance and Human Resources	Rahmi Asnidar Harahap
PLT Direktur Operasional Acting Director of Operations	Mohammad Faradhy



Alasan Perubahan Komposisi Direksi Setelah Tahun Buku 2025

Berdasarkan surat PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) ("PLN") Nomor 68124/SDM.07.01/F01080000/2025-SR tanggal 11 Desember 2025 perihal Pengisian Jabatan BOD di Lingkungan PT PLN Energi Primer Indonesia Grup (PT PLN Energi Gas), bahwa dalam rangka penguatan fungsi pengawasan, menjaga GCG dalam pengelolaan Anak Perusahaan, serta memperkuat operasional Perseroan.

Reasons for Changes in the Composition of the Board of Directors After Fiscal Year 2025

Based on a letter from PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) ("PLN") No. 68124/SDM.07.01/F01080000/2025-SR dated December 11, 2025, regarding the Filling of Board of Directors Positions within the PT PLN Energi Primer Indonesia Group (PT PLN Energi Gas), it is stated that this is intended to strengthen oversight functions, maintain good corporate governance (GCG) in the management of subsidiaries, and strengthen the Company's operations.

Profil Direksi
Directors Profile



Edwin Bangun

PLT Direktur Utama
Acting President Director

Tempat Dan Tanggal Lahir
Place and Date of Birth
Kabanjahe, 07 Juli | July 1969
Usia 56 tahun per 31 Desember 2025
56 years old as of December 31, 2025

Kewarganegaraan
Citizen
Warga Negara Indonesia
Indonesian citizen

Domisili
Domicile
Jakarta

Riwayat Pendidikan
Educational History
- S2 Teknik Lainnya, Universitas Sumatera Utara, Medan (2010-2015)
- S1 Listrik, Universitas Sumatera Utara, Medan (1989-1994)
- Master's degree in Other Engineering, University of North Sumatra, Medan (2010-2015)
- Bachelor's degree in Electrical Engineering, University of North Sumatra, Medan (1989-1994)

Dasar Hukum Pengangkatan
Legal Basis for Appointment
Keputusan Pemegang Saham di Luar Rapat Umum Pemegang Saham (Sirkuler) No. 3 tanggal 4 Oktober 2024.
Shareholders Resolution Outside the General Meeting of Shareholders (Circular) No. 3 dated October 4, 2024.

Rangkap Jabatan
Concurrent Position
Tidak memiliki rangkap jabatan baik di dalam Perusahaan maupun mau pun pada institusi lain.
Holding no concurrent positions within the Company or any other institution.

Riwayat Jabatan
Position History
- PLT *Senior Vice President* Pelaksanaan Pengadaan, Pengendalian Kontrak dan Infrastruktur Gas Pipa dan Logistik BBM Pada Divisi Pelaksanaan Pengadaan, Pengendalian Kontrak dan Infrastruktur Gas Pipa dan Logistik BBM Direktorat Gas dan BBM PLN Energi Primer Indonesia (01 Januari 2023 - 21 Desember 2023),
- *Senior Vice President* Pelaksanaan Pengadaan, Pengendalian Kontrak dan Infrastruktur Gas Pipa dan Logistik BBM Pada Divisi Pelaksanaan Pengadaan, Pengendalian Kontrak dan Infrastruktur Gas Pipa dan Logistik BBM Direktorat Gas dan BBM PLN Energi Primer Indonesia (01 Januari 2024 - 30 September 2024),
- Direktur Utama PT PLN Energi Gas (01 Oktober 2024 - Sekarang).
- Acting Senior Vice President of Procurement Implementation, Contract Control, and Pipeline Gas and Fuel Logistics Infrastructure in the Procurement Implementation, Contract Control, and Pipeline Gas and Fuel Logistics Infrastructure Division, Gas and Fuel Directorate, PLN Energi Primer Indonesia (January 1, 2023 - December 21, 2023),
- Senior Vice President of Procurement Implementation, Contract Control, and Pipeline Gas and Fuel Logistics Infrastructure in the Procurement Implementation, Contract Control, and Pipeline Gas and Fuel Logistics Infrastructure Division, Gas and Fuel Directorate, PLN Energi Primer Indonesia (January 1, 2024 - September 30, 2024),
- President Director at PT PLN Energi Gas (October 1, 2024 - Present).

Sertifikasi
Certification
- *Qualified Risk Governance Professsional (QRGP)*

Hubungan Afiliasi
Affiliated Relationships
Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Direksi lainnya, Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham.
Having no affiliations with other members of the Board of Directors, the Board of Commissioners, or shareholders.

Periode Menjabat dan Masa Jabatan
Term of Office
Periode pertama dan masa jabatan 2024-Sekarang.
First term and term of office for 2024-present.

Kepemilikan Saham
Share Ownership
Nihil
None

Pernyataan Independensi dan Pelatihan yang Diikuti Tahun 2025
Statement of Independence and Training Undertaken in 2025
Disajikan terpisah pada Bab Bab Tata Kelola Perusahaan di Sub Bab Direksi dalam Laporan Tahunan ini.
Presented separately in the Corporate Governance Chapter in the Board of Directors Sub-Chapter in this Annual Report.



Rahmi Asnidar Harahap

PLT Direktur Keuangan & SDM
Acting Director of Finance & HR

Tempat dan Tanggal Lahir
Place and Date of Birth
Pematang Siantar, 20 Juni | June 1981
Usia 44 tahun per Desember 2025
44 years old as of December, 2025

Kewarganegaraan
Citizen
Warga Negara Indonesia
Indonesian Citizen

Domisili
Domicile
Jakarta

Riwayat Pendidikan
Educational History
S1 Psikologi, Universitas Sumatera Utara, Medan (1999-2003)
Bachelor's degree in Psychology, University of North Sumatra, Medan (1999-2003)

Dasar Hukum Pengangkatan
Legal Basis for Appointment
Keputusan Pemegang Saham di Luar Rapat Umum Pemegang Saham (Sirkuler) No. 3 tanggal 4 Oktober 2024.
Shareholder Resolution Outside the General Meeting of Shareholders (Circular) No. 3 dated October 4, 2024.

Rangkap Jabatan
Concurrent Position
Tidak memiliki rangkap jabatan baik di dalam Perusahaan maupun mau pun pada institusi lain.
Holding no concurrent positions within the Company or any other institution.

Riwayat Jabatan
Position History
Specialist Sistem Manajemen Terintegrasi Pada PT PLN (Persero) Pusat Pendidikan Dan Pelatihan (01 November 2022 - 30 November 2022), *Vice President* Eksekutif Direksi Pada Bidang Eksekutif Direksi Direktorat Retail Dan Niaga PT PLN (Persero) Kantor Pusat (01 Desember 2022 - 30 September 2024), Direktur Keuangan Dan SDM PT PLN Gas & Geothermal Pada PT PLN Energi Gas (01 Oktober 2024 - Sekarang)
Integrated Management System Specialist at PT PLN (Persero) Education and Training Center (November 1, 2022 - November 30, 2022), Executive Vice President of the Board of Directors in the Executive Division of the Directorate of Retail and Commerce at PT PLN (Persero) Head Office (December 1, 2022 - September 30, 2024), Director of Finance and HR at PT PLN Gas & Geothermal at PT PLN Energi Gas (October 1, 2024 - Present)

Sertifikasi
Certification
- Supervisi Pengembangan Pelatihan (BNSP)
- Supervisi Kelola Pembelajaran (BNSP)
- Keinstrukturan Level 14 (BNSP)
- Master Lego Play (Risk Consulting)
- *Trainer & Facilitator (The National Federation of Neurolinguistic Programming)*
- Training Development Supervision (BNSP)
- Learning Management Supervision (BNSP)
- Level 14 Instructorship (BNSP)
- Lego Play Master (Risk Consulting)
- Trainer & Facilitator (The National Federation of Neurolinguistic Programming)

Hubungan Afiliasi
Affiliated Relationships
Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Direksi lainnya, Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham.
Having no affiliations with other members of the Board of Directors, the Board of Commissioners, or shareholders.

Periode Menjabat dan Masa Jabatan
Term of Office
Periode pertama dan masa jabatan 2024-Sekarang.
First term and term of office for 2024-present.

Kepemilikan Saham
Share Ownership
Nihil
None

Kepemilikan Saham dan Pelatihan 2025
Statement of Independence and Training Undertaken in 2025
Disajikan terpisah pada Bab Bab Tata Kelola Perusahaan di Sub Bab Direksi dalam Laporan Tahunan ini.
Presented separately in the Corporate Governance Chapter in the Board of Directors Sub-Chapter in this Annual Report.

Profil Direksi
Directors Profile



Yusuf Kusnidar

PLT Direktur Operasi
Acting Director of Operations

Tempat dan Tanggal Lahir
Place and Date of Birth
Garut, 05 Mei | May 1971
Usia 54 tahun per 31 Desember 2025
54 years old as of December 31, 2025

Kewarganegaraan
Citizen
Warga Negara Indonesia
Indonesian citizen

Domisili
Domicile
Jakarta

Riwayat Pendidikan
Educational History
- S2 Bidang Teknik Kimia, Universitas Indonesia, Jakarta (2016-2018)
- S1 Mesin, Universitas Jenderal Ahmad Yani, Bandung (2007-2009)
- Teknik Konversi Energi (SM) Politeknik ITB, Bandung
- Master's degree in Chemical Engineering, University of Indonesia, Jakarta (2016-2018)
- Bachelor's degree in Mechanical Engineering, Jenderal Ahmad Yani University, Bandung (2007-2009)
- Energy Conversion Engineering (EEC), ITB Polytechnic, Bandung

Dasar Hukum Pengangkatan
Legal Basis for Appointment
Keputusan Pemegang Saham di Luar Rapat Umum Pemegang Saham (Sirkuler) No. 3 tanggal 4 Oktober 2024.
Shareholders Resolution Outside the General Meeting of Shareholders (Circular) No. 3 dated October 4, 2024.

Rangkap Jabatan
Concurrent Position
Tidak memiliki rangkap jabatan baik di dalam Perusahaan maupun mau pun pada institusi lain.
Holding no concurrent positions within the Company or any other institution.

Riwayat Jabatan
Position History
- Deputi Manajer Administrasi Kontrak Gas Pada Bidang Pengendalian Kontrak Gas Satuan Gas dan BBM PT PLN (Persero) Kantor Pusat (01 September 2017 - 31 Mei 2018),
- PLT *Vice President* Konstruksi Dan Operasi Pada Direktorat Operasi PT PLN Gas & Geothermal (01 Juni 2018 - 30 September 2024),
- Direktur Operasi Pada PT PLN Energi Gas (01 Oktober 2024 - Sekarang).
- Deputy Manager of Gas Contract Administration in the Gas Contract Control Division of the Gas and Fuel Unit at PT PLN (Persero) Head Office (September 1, 2017 - May 31, 2018),
- Acting Vice President of Construction and Operations in the Operations Directorate at PT PLN Gas & Geothermal (June 1, 2018 - September 30, 2024),
- Director of Operations at PT PLN Energi Gas (October 1, 2024 - Present).

Sertifikasi
Certification
- Pengadaan Barang dan Jasa (Unit Sertifikasi PLN)
- *Certified Risk Governance Professional* (BNSP)
- Pengawas Utama Keselamatan kesehatan kerja (KEMEN ESDM)
- *Qualified Risk Governance Professional* (BNSP)
- *LNG Value Chain Expert Training (Korea Maritim and Ocean University)*
- Pembinaan Pengawasan Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) (KEMENAKER)
- *Executive Leadership in Utilities* (NTU Singapore)
- *Certified Energy Manager* (CEM) (AEE)
- Sertifikasi K3 Migas (BNSP)
- Procurement of Goods and Services (PLN Certification Unit)
- Certified Risk Governance Professional (BNSP)
- Chief Supervisor of Occupational Safety and Health (inistry of Energy and Mineral Resources)
- Qualified Risk Governance Professional (BNSP)
- LNG Value Chain Expert Training (Korea Maritime and Ocean University)
- Occupational Safety and Health (OSH) Standards Supervision Development (Ministry of Manpower)
- Executive Leadership in Utilities (NTU Singapore)
- Certified Energy Manager (CEM) (AEE)
- Oil and Gas OHS Certification (BNSP)

Hubungan Afiliasi
Affiliated Relationships
Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Direksi lainnya, Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham.
Having no affiliations with other members of the Board of Directors, the Board of Commissioners, or shareholders.

Periode Menjabat dan Masa Jabatan
Term of Office
Periode pertama dan masa jabatan 2024-31 Desember 2025.
First term and term of office for 2024-present.

Kepemilikan Saham
Share Ownership
Nihil
None

Pernyataan Independensi dan Pelatihan yang Diikuti Tahun 2025
Statement of Independence and Training Undertaken in 2025
Disajikan terpisah pada Bab Bab Tata Kelola Perusahaan di Sub Bab Direksi dalam Laporan Tahunan ini.

Direksi yang Diangkat Setelah Tahun Buku 2025



Mohammad Faradhy

PLT Direktur Operasi
Acting Director of Operations

Tempat dan Tanggal Lahir
Place and Date of Birth
Bekasi, 26 Mei | May 1982
44 Tahun Per 31 Desember 2026
44 years old as of December 31, 2026

Kewarganegaraan
Citizen
Warga Negara Indonesia
Indonesian citizen

Domisili
Domicile
Bekasi

Riwayat Pendidikan
Educational History
- *Master of Bussiness Administration, University Of Missouri-Saint Louis*, Amerika Serikat (2010-2012)
- S1 Teknik, Universitas Indonesia (2000-2004)
- Master of Business Administration, University of Missouri-St. Louis, United States (2010–2012)
- Bachelor of Engineering, University of Indonesia (2000–2004)

Dasar Hukum Pengangkatan
Legal Basis for Appointment
Keputusan Pemegang Saham di Luar Rapat Umum Pemegang Saham (Sirkuler) No. 36 tanggal 31 Desember 2025.
Resolution of Shareholders Outside the General Meeting of Shareholders (Circular) No. 36 dated December 31, 2025.

Rangkap Jabatan
Concurrent Position
Tidak memiliki rangkap jabatan baik di dalam Perusahaan maupun mau pun pada institusi lain.
Holding no concurrent positions within the Company or any other institution.

Riwayat Jabatan
Position History
- *Project Manager* PT PLN Gas & Geothermal (Jun 2018 - Mar 2021),
- Area Manager PT PLN Gas & Geothermal (Mar 2021 - Feb 2023),
- *Gas Pipe & Fuel Oil Implementation Contract Manager* PLN Energi Primer Indonesia (Feb 2023 - Jul 2024),
- *Assistant to Senior Vice President Business Development* & LNG Marketing PLN Energi Primer Indonesia (Jul 2024 - Jan 2026),
- PLT Direktur Operasi PT PLN Energi Gas (Januari 2026 - Saat ini).
- Project Manager at PT PLN Gas & Geothermal (June 2018 – March 2021),
- Area Manager at PT PLN Gas & Geothermal (March 2021 – February 2023),
- Gas Pipeline & Fuel Oil Implementation Contract Manager at PLN Energi Primer Indonesia (February 2023 – July 2024),
- Assistant to the Senior Vice President of Business Development & LNG Marketing at PLN Energi Primer Indonesia,
- (Jul 2024 – Jan 2026), Acting Director of Operations at PT PLN Energi Gas (January 2026 – Present).

Sertifikasi
Certification
- *Qualified Risk Governance Professional* (QRGP)

Hubungan Afiliasi
Affiliated Relationships
Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Direksi lainnya, Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham.
Having no affiliations with other members of the Board of Directors, the Board of Commissioners, or shareholders.

Periode Menjabat dan Masa Jabatan
Term of Office
Periode pertama dan masa jabatan 1 Januari 2026.
First term and tenure beginning January 1, 2026.

Kepemilikan Saham
Share Ownership
Nihil
None

Pelatihan 2025
Training 2025
Disajikan terpisah pada Bab Bab Tata Kelola Perusahaan di Sub Bab Direksi dalam Laporan Tahunan ini.
Presented separately in the Corporate *Governance* Chapter, under the Board of Directors SUB BAB, in this Annual Report.

Informasi Perubahan Dewan Komisaris pada Tahun Buku dan Setelah Tahun Buku 2025
Information on Changes to the Board of Commissioners Composition in and After the 2025 Fiscal Year

Komposisi Dewan Komisaris Tahun Buku 2025
Composition of the Board of Commissioners for Fiscal Year 2025

Periode 1 Januari 2025 - 31 Juli 2025 Term January 1, 2025 – July 31, 2025	
PLT Komisaris Utama Acting President Commissioner	Dedi Budi Utomo
Komisaris Commissioner	Andriah Feby Misna
PLT Komisaris Acting Commissioner	Bayu Satria Pratama

Tabel diatas merupakan komposisi Dewan Komisaris PT PLN Energi Gas tahun buku 2025. Sepanjang tahun 2025 terdapat dua kali perubahan komposisi dewan komisaris. Perubahan pertama ditetapkan melalui Keputusan Pemegang Saham di Luar Rapat Umum Pemegang Saham (Sirkuler) tertanggal 31 Juli 2025, dengan Keputusan memberhentikan Sdr. Dedi Budi Utomo dari jabatannya sebagai PLT Komisaris Utama dan pengangkatan Sdr. Bayu Satria Pratama sebagai PLT Komisaris Utama.

The table above shows the composition of the Board of Commissioners of PT PLN Energi Gas for the 2025 fiscal year. Throughout 2025, there were two changes to the composition of the Board of Commissioners. The first change was established through a Shareholder Resolution Outside the General Meeting of Shareholders (Circular) dated July 31, 2025, which removed Mr. Dedi Budi Utomo from his position as Acting President Commissioner and appointed Mr. Bayu Satria Pratama as Acting President Commissioner.

Periode 31 Juli 2025 - 31 Desember 2025 Term July 31, 2025 – December 31, 2025	
PLT Komisaris Utama Acting President Commissioner	Bayu Satria Pratama
Komisaris Commissioner	Andriah Feby Misna

Tabel diatas merupakan susunan dan komposisi Dewan Komisaris PT PLN Energi Gas Selama Periode 31 Juli 2025 hingga 31 Desember 2025. Perubahan ini telah dituangkan dalam Akta yang dibuat oleh Notaris Sutra Oktaviani, S.H., M.Kn No. 36 tanggal 8 September 2025.

The table above shows the composition of the Board of Commissioners of PT PLN Energi Gas for the period from July 31, 2025, to December 31, 2025. These changes have been formalized in a Deed drawn up by Notary Sutra Oktaviani, S.H., M.Kn., No. 36, dated September 8, 2025.

Alasan Perubahan Komposisi Dewan Komisaris

Berdasarkan Surat Pejabat Pelaksana Tugas Direktur Utama Perseroan Nomor: 0748/ORG.00.02/EG010000/2025 tanggal 27 Juli 2025. Hal Permohonan Rapat Umum Pemegang Saham. Penetapan Komisaris Utama ("Surat Dirut PEG 0748/2025") menyampaikan pengunduran diri Sdr. Dedi Budi Utomo sebagai pejabat Pelaksana Komisaris Utama PT PLN Energi Gas pada tanggal 28 Juni 2025.

Reason for the Change in the Composition of the Board of Commissioners

Based on the Letter from the Acting President Director of the Company No. 0748/ORG.00.02/EG010000/2025 dated July 27, 2025, regarding the Request for a General Meeting of Shareholders. Appointment of the President Commissioner ("President Director Letter PEG 0748/2025") announces the resignation of Mr. Dedi Budi Utomo as Acting President Commissioner of PT PLN Energi Gas on June 28, 2025.

Komposisi Dewan Komisaris Setelah Tahun Buku 2025

Setelah berakhirnya tahun buku 2025, susunan dan komposisi Dewan Komisaris Perusahaan mengalami perubahan. Berdasarkan surat PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) ("PLN") Nomor 68186/SDM.07.01/F01080000/2025-SR tanggal 11 Desember 2025 perihal Pengisian Jabatan BOD di Lingkungan PT PLN Energi Primer Indonesia Grup (PT PLN Energi Gas), bahwa dalam rangka penguatan fungsi pengawasan, menjaga GCG dalam pengelolaan Anak Perusahaan, serta memperkuat operasional Perseroan, maka PLN menyetujui untuk: Pengangkatan Sdr. Eko Yuniarto sebagai PLT Komisaris pada tanggal 31 Desember 2025 yang efektif bertugas pada 1 Januari 2026.

Composition of the Board of Commissioners After the 2025 Fiscal Year

Following the end of the 2025 fiscal year, the structure and composition of the Company's Board of Commissioners have changed. Based on a letter from PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) ("PLN") No. 68186/SDM.07.01/F01080000/2025-SR dated December 11, 2025, regarding the Filling of BOD Positions within the PT PLN Energi Primer Indonesia Group (PT PLN Energi Gas), in order to strengthen oversight functions, maintain Good Corporate Governance (GCG) in the management of subsidiaries, and enhance the Company's operations, PLN approved the appointment of Mr. Eko Yuniarto as Acting Commissioner on December 31, 2025, effective January 1, 2026.

Periode 1 Januari 2026 - 28 April 2026 Term January 1, 2026 – April 28, 2026	
PLT Komisaris Utama President Commissioner PLT	Bayu Satria Pratama
Komisaris Commissioner	Andriah Feby Misna
PLT Komisaris Commissioner PLT	Eko Yuniarto

Perubahan kedua ditetapkan melalui Keputusan Pemegang Saham di Luar Rapat Umum Pemegang Saham (Sirkuler) tertanggal 28 April 2026, dengan Keputusan memberhentikan Sdr. Bayu Satria Pratama dari jabatannya sebagai PLT Komisaris Utama, memberhentikan Sdr. Andriah Feby Misna dari jabatannya sebagai Komisaris, memberhentikan Sdr. Eko Yuniarto dari jabatannya sebagai PLT Komisaris, mengangkat Sdr. Saiful Chaniago sebagai Komisaris Utama dan Sdr. Airil Tanjung sebagai Komisaris. Berikut susunan dan komposisi Dewan Komisaris PT PLN Energi Gas setelah tahun buku 2025 hingga batas waktu penyampaian Laporan Tahunan Ini:

The second change was established through a Shareholders' Resolution Outside the General Meeting of Shareholders (Circular) dated April 28, 2026, which resolved to remove Mr. Bayu Satria Pratama from his position as Acting President Commissioner, dismissing Ms. Andriah Feby Misna from her position as Commissioner, dismissing Mr. Eko Yuniarto from his position as Acting Commissioner, and appointing Mr. Saiful Chaniago as President Commissioner and Mr. Airil Tanjung as Commissioner. The following is the structure and composition of the Board of Commissioners of PT PLN Energi Gas after the 2025 fiscal year until the deadline for submitting this Annual Report:

Periode 28 April 2026 - Saat ini Term April 28, 2026 – Present	
Komisaris Utama President Commissioner	Saiful Chaniago
Komisaris Commissioner	Airil Tanjung

Profil Dewan Komisaris
The Board of Commissioners Profile



Bayu Satria Pratama

PLT Komisaris Utama
Acting President Commissioner

Tempat dan Tanggal Lahir
Place and Date of Birth
Jakarta, 1 Desember | December 1983
Usia 42 tahun per 31 Desember 2025
42 years old as of December 31, 2025

Kewarganegaraan
Citizen
Warga Negara Indonesia
Indonesian citizen

Domisili
Domicile
Jakarta

Riwayat Pendidikan
Educational History
- Magister Studi Teknik, Magister Manajemen Rekayasa (2010-2011)
- Sarjana Teknik Kimia, Universitas Indonesia (2001-2005)
- Master of Engineering Studies, Master of Engineering Management (2010-2011)
- Bachelor of Chemical Engineering, University of Indonesia (2001-2005)

Dasar Hukum Pengangkatan
Legal Basis for Appointment
Keputusan Pemegang Saham di Luar Rapat Umum Pemegang Saham (Sirkuler) No. 3 tanggal 4 Oktober 2024.
Shareholders Decision Outside the General Meeting of Shareholders (Circular) No. 3 dated October 4, 2024.

Rangkap Jabatan
Concurrent Position
Dalam Perusahaan: Ketua Komite Manajemen Risiko (Oktober 2024-sekarang)
Di luar Perusahaan: *Senior Vice President* (SVP) Pengembangan Bisnis, Pemasaran, dan Perencanaan Pengadaan LNG di PT PLN Energi Primer Indonesia
Within the Company: Chairman of the Risk Management Committee (October 2024-present);
Outside the Company: Senior Vice President (SVP) of Business Development, Marketing, and LNG Procurement Planning at PT PLN Energi Primer Indonesia.

Riwayat Jabatan
Position History
- Analis Kebijakan pada Direktorat Pembinaan Program Migas (2006 - 2015);
- Kepala Seksi pada Subdit Penyiapan Program Minyak dan Gas Bumi (2015-2017);
- Asisten Wakil Menteri ESDM (2017-2019); Kasubdit Niaga Migas (2018-2019);
- Kasubdit Pengaturan Pemanfaatan Fasilitas BPH Migas (2019 – 2020);
- Koordinator Harga dan Subsidi (Plt Koordinator Niaga Migas) (Januari 2021 – Sept 2021);
- Koordinator Tata Kelola dan Neraca Komoditas Hilir Migas (2022-Jan 2023);
- *Senior Vice President* (SVP) Pengembangan Bisnis, Pemasaran, dan Perencanaan Pengadaan LNG di PT PLN Energi Primer Indonesia (Feb 2023 - saat ini).
- Policy Analyst at the Directorate of Oil and Gas Program Development (2006 - 2015);
- Head of Section at the Sub-Directorate of Oil and Gas Program Preparation (2015-2017);
- Assistant Deputy Minister of Energy and Mineral Resources (2017-2019);
- Head of Sub-Directorate of Oil and Gas Trading (2018-2019);
- Head of Sub-Directorate of Downstream Regulatory Agency for Oil and Natural Gas' Facility Utilization Regulation (2019 - 2020);
- Price and Subsidy Coordinator (Acting Oil and Gas Trading Coordinator) (January 2021 - September 2021);
- Coordinator of Downstream Oil and Gas Commodity Governance and Balance (2022-Jan 2023);
- Senior Vice President (SVP) of Business Development, Marketing, and LNG Procurement Planning at PT PLN Energi Primer Indonesia (Feb 2023 - present).

Sertifikasi
Certification
Qualified Chief Risk Officer (QCRO)
Qualified Risk Governance Professional (QRGP)

Hubungan Afiliasi
Affiliated Relationships
Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi, dan Pemegang Saham.
Having no affiliations with other members of the Board of Directors, the Board of Commissioners, or shareholders.

Periode Menjabat dan Masa Jabatan
Term of Office
Periode pertama dan masa jabatan 2024-2025.
First term and term of office for 2024-2025.

Kepemilikan Saham
Share Ownership
Nihil
None

Pernyataan Independensi, Kepemilikan Saham dan Pelatihan 2024
Statement of Independence and Training Undertaken in 2025
Disajikan terpisah pada Bab Tata Kelola Perusahaan di Sub Bab Direksi dalam Laporan Tahunan ini.
Presented separately in the Corporate *Governance* Chapter in the Board of Directors Sub-Chapter in this Annual Report.



Andriah Feby Misna

Komisaris
Commissioner

Tempat dan Tanggal Lahir
Place and Date of Birth
Banda Aceh, 13 Februari | February 1969
Usia 56 tahun per Desember 2025
56 years old as of December 2025

Kewarganegaraan
Citizen
Warga Negara Indonesia
Indonesian citizen

Domisili
Domicile
Bogor

Riwayat Pendidikan
Educational History
- *Double Degree Master of Development Planning and Management Infrastucture, ITB Bandung and Master of Environmental and Infrastructure Planning,* Groningen University, the Netherlands (2007);
- *Barchelor Degree* dari Syiah Kuala University, Indonesia (1994)
- Double Degree Master of Development Planning and Management Infrastucture, ITB Bandung and Master of Environmental and Infrastructure Planning, Groningen University, the Netherlands (2007);
- Barchelor Degree from Syiah Kuala University, Indonesia (1994)

Dasar Hukum Pengangkatan
Legal Basis for Appointment
Pernyataan keputusan pemegang saham PT. 14 tanggal 10 Desember 2021. Diangkat kembali berdasarkan Surat Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik PT PT. SSR-854/MBU/11/2021 tanggal 16 November 2021.
Statement of Shareholder Decision of PT PLN Energi Gas 14 dated December 10, 2021. Reappointed based on Letter of the Minister of State-Owned Enterprises of the Republic of Indonesia PT SSR-854/MBU/11/2021 dated November 16, 2021.

Rangkap Jabatan
Concurrent Position
Dalam Perusahaan: -
Di luar Perusahaan: Direktur Aneka Energi Baru dan Energi Terbarukan pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Republik Indonesia.
Within the Company: -
Outside the Company: Director of Various New and Renewable Energy at the Ministry of Energy and Mineral Resources (ESDM) of the Republic of Indonesia.

Riwayat Jabatan
Position History
- Kepala Subdirektorat Investasi dan Kerja Sama Aneka EBT (April 2017–Februari 2018);
- Direktur Bioenergi (15 February 2018–10 Januari 2022);
- Direktur Aneka Energi Baru dan Eneri Terbarukan (10 Januari 2022–sekarang).
- Head of the Investment and Cooperation Sub-Directorate for Various EBT (April 2017–February 2018);
- Director of Bioenergy (February 15, 2018–January 10, 2022);
- Director of Various New and Renewable Energy (January 10, 2022–present).

Hubungan Afiliasi
Affiliated Relationships
Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi, dan Pemegang Saham.
Having no affiliations with other members of the Board of Directors, the Board of Commissioners, or shareholders.

Periode Jabatan
Term of Office
Periode pertama dan masa jabatan 2021-Sekarang.
First term and term of office for 2021-present.

Kepemilikan Saham
Share Ownership
Nihil
None

Pernyataan Independensi, Kepemilikan Saham dan Pelatihan 2024
Statement of Independence and Training Undertaken in 2025
Disajikan terpisah pada Bab Bab Tata Kelola Perusahaan di Sub Bab Direksi dalam Laporan Tahunan ini.
Presented separately in the Corporate Governance Chapter in the Board of Directors Sub-Chapter in this Annual Report.

Dewan Komisaris yang Menjabat Setelah Tahun Buku 2025
Board of Commissioners Serving after the 2025 Fiscal Year



Eko Yuniarto

PLT Komisaris
Acting Commissioner

Tempat dan Tanggal Lahir
Place and Date of Birth
Bandung, 29 Juni | June 1970
56 tahun per 31 Desember 2026
56 years old as of December 31, 2026

Kewarganegaraan
Citizen
Warga Negara Indonesia
Indonesian citizen

Domisili
Domicile
Jakarta

Riwayat Pendidikan
Educational History
S1 Teknik Mesin - Institut Teknologi Bandung (1989 - 1994), S2 *Management* Magister - IPWI Jakarta (2008 - 2010)
Bachelor of Science in Mechanical Engineering - Bandung Institute of Technology (1989–1994), Master of Science in Management - IPWI Jakarta (2008–2010)

Dasar Hukum Pengangkatan
Legal Basis for Appointment
Keputusan Pemegang Saham di Luar Rapat Umum Pemegang Saham (Sirkuler) Tanggal 31 Desember 2025
Shareholders' Resolution Outside the General Meeting of Shareholders (Circular) dated December 31, 2025

Rangkap Jabatan
Concurrent Position
-

Riwayat Jabatan
Position History
- Komisaris - PT PLN Energi Gas (2026),
- *Senior Vice President* Pengembangan Usaha Batubara - PT PLN Energi Primer Indonesia (2023-2026),
- Direktur Pengembangan - PT PLN Batubara (2020 – 2022),
- Direktur Operasi - PT PLN Batubara (2020),
- Direktur Utama - PT Artha Daya Coalindo subsidiary PLN Indonesia Power (2019-2020),
- Kepala Departemen Pengadaan Usaha dan Energi Primer - PT PLN Indonesia Power (2017-2018),
- Kepala Departemen Sparepart dan Jasa - PT PLN Indonesia Power (2016-2017),
- General Manager - UPJP Kamojang Geotermal Power *Plant* PT PLN Indonesia Power (2014-2016),
- Direktur Indo Tenaga Hijau - Tangkuban Parahu (2010-2014).
- Board Member - PT PLN Energi Gas (2026),
- Senior Vice President of Coal Business Development - PT PLN Energi Primer Indonesia (2023–2026),
- Director of Development - PT PLN Batubara (2020–2022),
- Director of Operations - PT PLN Batubara (2020),
- President Director - PT Artha Daya Coalindo, a subsidiary of PLN Indonesia Power (2019–2020),
- Head of the Business Procurement and Primary Energy Department - PT PLN Indonesia Power (2017–2018),
- Head of the Spare Parts and Services Department - PT PLN Indonesia Power (2016–2017),
- General Manager - UPJP Kamojang Geothermal Power Plant, PT PLN Indonesia Power (2014–2016),
- Director of Indo Tenaga Hijau – Tangkuban Parahu (2010–2014).

Sertifikasi
Certification
-

Hubungan Afiliasi
Affiliated Relationships
Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi, dan Pemegang Saham.
Having no affiliations with other members of the Board of Directors, the Board of Commissioners, or shareholders.

Periode Menjabat dan Masa Jabatan
Term of Office
Periode pertama dan masa jabatan 2024-2025.
First term and tenure: January 2026 – April 2026.

Kepemilikan Saham
Share Ownership
Nihil
None

Pernyataan Independensi, Kepemilikan Saham dan Pelatihan 2024
Statement of Independence and Training Undertaken in 2025
Disajikan terpisah pada Bab Bab Tata Kelola Perusahaan di Sub Bab Direksi dalam Laporan Tahunan ini.
Presented separately in the Corporate *Governance* Chapter in the Board of Directors Sub-Chapter in this Annual Report.



Saiful Chaniago

Komisaris Utama
President Commissioner

Tempat dan Tanggal Lahir
Place and Date of Birth
Laha, 09 November | November 1978
48 Tahun Per 31 Desember 2026
48 years old as of December 31, 2026

Kewarganegaraan
Citizen
Warga Negara Indonesia
Indonesian citizen

Domisili
Domicile
Bekasi

Riwayat Pendidikan
Educational History
S1 Ekonomi, Universitas Pattimura
Bachelor's Degree in Economics, Pattimura University

Dasar Hukum Pengangkatan
Legal Basis for Appointment
Keputusan RUPS Sirkuler PLN Energi Gas tanggal 28 April 2026
Resolution of the Circular General Meeting of Shareholders of PLN Energi Gas dated April 28, 2026

Rangkap Jabatan
Concurrent Position
-

Riwayat Jabatan
Position History
- Komisaris Utama PT PLN Energi Gas,
- Owner PT Rivalia Prime Construction, dan
- Owner CV Rivalia Parlimentari
- President Commissioner at PT PLN Energi Gas,
- Owner of PT Rivalia Prime Construction, and
- Owner of CV Rivalia Parlimentari

Sertifikasi
Position History
Qualified Risk Governance Professional (QRGP)

Hubungan Afiliasi
Affiliated Relationships
Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi, dan Pemegang Saham.
Having no affiliations with other members of the Board of Directors, the Board of Commissioners, or shareholders.

Periode Jabatan
Term of Office
April 2026 - Saat ini.
April 2026 – Present.

Kepemilikan Saham
Share Ownership
Nihil
None

Pernyataan Independensi, Kepemilikan Saham dan Pelatihan 2024
Statement of Independence and Training Undertaken in 2025
Disajikan terpisah pada Bab Bab Tata Kelola Perusahaan di Sub Bab Direksi dalam Laporan Tahunan ini.
Presented separately in the Corporate Governance Chapter in the Board of Directors Sub-Chapter in this Annual Report.

Profil Dewan Komisaris
Commissioners Profile



Airil Tanjung

Komisaris
Commissioner

Tempat dan Tanggal Lahir
Place and Date of Birth
Biak, 10 April | April 1980
46 tahun per 31 Desember 2026
48 years old as of December 31, 2026

Kewarganegaraan
Citizen
Warga Negara Indonesia
Indonesian citizen

Domisili
Domicile
Bogor

Riwayat Pendidikan
Educational History
S1 Universitas Kebangsaan Republik Indonesia Bandung
Bachelor's Degree from the University of the Republic of Indonesia, Bandung

Dasar Hukum Pengangkatan
Legal Basis for Appointment
Keputusan RUPS Sirkuler PLN Energi Gas tanggal 28 April 2026
Resolution of the Circular General Meeting of Shareholders of PLN Energi Gas dated April 28, 2026

Rangkap Jabatan
Concurrent Position
-

Riwayat Jabatan
Position History
- Koord Intel Investigasi PT. Chevron Pasific Indonesia (2012-2015),
- Koord Pengamanan dan Pengembangan Wilayah WWI Wisata Gunung Pancar (2020-2025)
- Intelligence and Investigation Coordinator at PT. Chevron Pacific Indonesia (2012–2015),
- Security and Regional Development Coordinator at WWI Wisata Gunung Pancar (2020–2025)

Sertifikasi
Position History
Qualified Risk Governance Professional (QRGP)

Hubungan Afiliasi
Affiliated Relationships
Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi, dan Pemegang Saham.
Having no affiliations with other members of the Board of Directors, the Board of Commissioners, or shareholders.

Periode Jabatan
Term of Office
April 2026 - Saat ini.
April 2026 – Present.

Kepemilikan Saham
Share Ownership
Nihil
None

Pernyataan Independensi, Kepemilikan Saham dan Pelatihan 2024
Statement of Independence and Training Undertaken in 2025
Disajikan terpisah pada Bab Bab Tata Kelola Perusahaan di Sub Bab Direksi dalam Laporan Tahunan ini.
Presented separately in the Corporate Governance Chapter in the Board of Directors Sub-Chapter in this Annual Report.

Dewan Komisaris yang Pernah Menjabat pada Tahun Buku 2025
Board of Commissioners who Served the 2025 Fiscal Year



Dedi Budi Utomo

PLT Komisaris Utama
Acting President Commissioner

Tempat dan Tanggal Lahir
Place and Date of Birth
Malang, 21 April | April 1974
Usia 51 tahun per 31 Desember 2025
51 years old as of December 31, 2025

Kewarganegaraan
Citizen
Warga Negara Indonesia
Indonesian citizen

Domisili
Domicile
Jakarta

Riwayat Pendidikan
Educational History
Doctor in Human Resource Development, Univ. Airlangga (2021-2024)
Magister *Management*, Binus University (2018-2020)
Sarjana Teknik Industri, ITS Surabaya (1994-1999)
Doctor of Human Resource Development, Airlangga University (2021-2024)
Master of Management, Binus University (2018-2020)
Bachelor of Industrial Engineering, ITS Surabaya (1994-1999)

Dasar Hukum Pengangkatan
Legal Basis for Appointment
Keputusan Pemegang Saham di Luar Rapat Umum Pemegang Saham (Sirkuler) No. 3 tanggal 4 Oktober 2024.
Shareholders Resolution Outside the General Meeting of Shareholders (Circular) No. 3 dated October 4, 2024.

Rangkap Jabatan
Concurrent Position
Dalam Perusahaan: Tidak Ada
Di luar Perusahaan: Anggota Dewan Pengawas pada Dana Pensiun PLN
Within the Company: None
Outside the Company: Member of the Supervisory Board of the PLN Pension Fund

Riwayat Jabatan
Position History
- Deputi Manajer HR & Administrasi pada PT Pembangkitan Jawa Bali PLTA Brantas (2007–2009);
- Deputi Manajer HR & Administrasi pada PT Pembangkitan Jawa Bali PLTA Brantas, (2009–2010);
- Asisten Manajer *Organization Planning* & HR pada PT Pembangkitan Jawa Bali, (2010–2013);
- Manajer *Organization Planning & HC* pada PT Pembangkitan Jawa Bali, (2013–2016);
- Kepala Divisi *HC System & Organization* pada PT Pembangkitan Jawa Bali,(2016–2018);
- Direktur HR & *General Affair* pada PT Rekadaya Elektrika, (2018–2021);
- Direktur *Human Capital* pada PT PJB Services, (2021–2022);
- EVP *Human Capital Services* pada PT PLN (Persero), (2022–sekarang);
- Anggota Dewan Pengawas pada Dana Pensiun PLN, (2024–2025).
- Deputy Manager of HR & Administration at PT Pembangkitan Jawa Bali, Brantas HPP (2007–2009);
- Deputy Manager of HR & Administration at PT Pembangkitan Jawa Bali, Brantas HPP (2009–2010);
- Assistant Manager of Organization Planning & HR at PT Pembangkitan Jawa Bali (2010–2013);
- Manager of Organization Planning & HC at PT Pembangkitan Jawa Bali (2013–2016);
- Head of HC System & Organization Division at PT Pembangkitan Jawa Bali (2016–2018);
- Director of HR & General Affairs at PT Rekadaya Elektrika (2018–2021);
- Director of Human Capital at PT PJB Services (2021–2022);
- EVP of Human Capital Services at PT PLN (Persero) (2022–present);
- Member of the Supervisory Board at PLN Pension Fund (2024–2025).

Sertifikasi
Certification
- *Certification Risk Governance Profesional (BNSP)*
- *Certification of HR General Manager (BNSP)*
- *Certification of Talent Management*
- *Certification of Professional Human Resources*

Hubungan Afiliasi
Affiliated Relationships
Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi, dan Pemegang Saham.
Having no affiliations with other members of the Board of Directors, the Board of Commissioners, or shareholders.

Periode Menjabat dan Masa Jabatan
Term of Office
Periode pertama dan masa jabatan 2024-2025.
First term and term of office for 2024-2025.

Kepemilikan Saham
Share Ownership
Nihil
None

Pernyataan Independensi, Kepemilikan Saham dan Pelatihan 2024
Statement of Independence and Training Undertaken in 2025
Disajikan terpisah pada Bab Bab Tata Kelola Perusahaan di Sub Bab Direksi dalam Laporan Tahunan ini.
Presented separately in the Corporate Governance Chapter in the Board of Directors Sub-Chapter in this Annual Report.

Profil BOD-1
BOD-1 Profile



Elok Faiqoh Saptining Ratri

Sekretaris Perusahaan
Corporate Secretary

Pendidikan:
Education
- S1 Hukum, Universitas Jenderal Soedirman
- Bachelor's Degree in Law, Jenderal Soedirman University

SK Pengangkatan:
Appointment Decree
0078.K/DIREG/2025

Periode:
Period
2025 – Sekarang
2025 - Present

Akin Septiawan Permono

VP Keuangan dan SDM
VP of Finance and HR

Pendidikan:
Education
S1 Akuntansi, Universitas Diponegoro
Bachelor's Degree in Accounting, Diponegoro University

SK Pengangkatan:
Appointment Decree
0077.K/DIREG/2025

Periode:
Period
2025 – Sekarang
2025 - Present

Muhammad Nur Rafik

VP Konstruksi dan Operasi
VP of Construction and Operations

Pendidikan:
Education
D3 Kimia, Institut Teknologi Sepuluh November
Diploma in Chemistry, Sepuluh November Institute of Technology

SK Pengangkatan:
Appointment Decree
0095.K/DIR/2024

Periode:
Period
2024 – Sekarang
2024 - Present

Febrian Adiputra

VP Manajemen Risiko, Kepatuhan dan Pengendalian Kontrak
VP of Risk Management, Compliance, and Contract Control

Pendidikan:
Education
S2 *Energy*, University of Auckland
Master's Degree in Energy, University of Auckland

SK Pengangkatan:
Appointment Decree
0070.K/DIR/2025

Periode:
Period
2025 – Sekarang
2025 - Present



Gunawan Setiadi

VP Perencana dan Pelaksana Kontrak
VP of Contract Planning and Execution

Pendidikan:
Education
S1 Teknik Listrik, Universitas Diponegoro
Bachelor's Degree in Electrical Engineering, Diponegoro University

SK Pengangkatan:
Appointment Decree
0086.K/DIR/2025

Periode:
Period
2025 – Sekarang
2025 - Present

Abdul Hadi

Manager Audit Internal
Internal Audit Manager

Pendidikan:
Education
S1 Teknik Elektro, Universitas Negeri Riau
Bachelor's Degree in Electrical Engineering, Riau State University

SK Pengangkatan:
Appointment Decree
0039.K/DIREG/2024

Periode:
Period
2024 – Sekarang
2024 - Present

Majuddin

VP Perencanaan Korporat dan Enjiniring
VP of Corporate Planning and Engineering

Pendidikan:
Education
S2 Bidang Manajemen Stratejik Universitas Padjajaran
Master's Degree in Strategic Management, Padjadjaran University

SK Pengangkatan:
Appointment Decree
0069.K/DIR/2025

Periode:
Period
2025 – Sekarang
2025 - Present

Mochamad Algifari Firdausya

Manajer Unit Pengelolaan Operasi dan Pemeliharaan
Manager of Operations and Maintenance Management Unit

Pendidikan:
Education
S1 Teknik Perminyakan Institut Teknologi Bandung
Bachelor's Degree of Science in Petroleum Engineering, Institut Teknologi Bandung

SK Pengangkatan:
Appointment Decree
0071.K/DIR/2025

Periode:
Period
2025 – Sekarang
2025 - Present

Demografi dan Pengembangan Kompetensi Pegawai
Demographics and Development Employee Competencies

Pada akhir tahun 2025, PLN Energi Gas memiliki total 167 pegawai yang tersebar di kantor pusat maupun unit-unit operasional Perusahaan. Jumlah tersebut mencerminkan dukungan sumber daya manusia yang berperan penting dalam menunjang kelancaran kegiatan operasional dan pencapaian target bisnis Perusahaan. Komposisi pegawai PLN Energi Gas terdiri atas 26 pegawai tugas karya dari PLN Group, 1 pegawai organik, serta 140 tenaga alih daya yang mendukung berbagai fungsi operasional dan administrasi Perusahaan.

Sebagai bagian dari penerapan tata kelola perusahaan yang baik serta komitmen terhadap transparansi pengelolaan sumber daya manusia, PLN Energi Gas menyajikan informasi komposisi pegawai secara lebih rinci berdasarkan status kepegawaian, jenis kelamin, level jabatan, jenjang pendidikan, dan kelompok usia. Selain itu, Perusahaan juga menyampaikan tren komposisi tenaga kerja selama tiga tahun terakhir guna memberikan gambaran mengenai perkembangan dan dinamika pengelolaan sumber daya manusia secara berkelanjutan.

As of the end of 2025, PLN Energi Gas had a total of 167 employees spread across the Company's headquarters and operational units. This number reflects the human resources that play a vital role in ensuring the smooth operation of the Company's activities and the achievement of its business targets. The composition of PLN Energi Gas's workforce consists of 26 seconded employees from the PLN Group, 1 permanent employee, and 140 outsourced staff who support the Company's various operational and administrative functions.

As part of its implementation of good corporate governance and its commitment to transparency in human resource management, PLN Energi Gas presents more detailed information on its workforce composition based on employment status, gender, job level, educational background, and age group. Additionally, the Company reports trends in workforce composition over the past three years to provide an overview of the development and dynamics of sustainable human resource management.

Komposisi Karyawan Berdasarkan Status Kepegawaian
Employee Composition by Employment Status

Deskripsi Description	Tahun / *Year*		
	2025	2024	2023
Pegawai Tetap PLN dan PLN Group Permanent Employees of PLN and the PLN Group	27	24	25
Tenaga Kerja dari Penyedia Jasa Workers from Service Providers	140	97	30
Jumlah Total	167	121	55

Komposisi Karyawan Berdasarkan Jenis Kelamin
Employee Composition by Gender

Deskripsi Description	Tahun / *Year*		
	2025	2024	2023
Laki - laki Male	139	95	41
Perempuan Female	28	26	14
Jumlah Total	167	121	55

Komposisi Karyawan Berdasarkan Level Jabatan
Employee Composition by Position Level

Deskripsi Description	Tahun / *Year*		
	2025	2024	2023
Sekretaris Perusahaan/Kepala Audit Internal Corporate Secretary/Head of Internal Audit	2	2	2
Vice President Vice President	5	5	5
Manajer Unit Unit Manager	1	0	1
Manajer Manager	15	15	13
Asisten Manajer Assistant Manager	4	1	0
Tenaga Kerja Administrasi Administrative Staff	75	64	34
Tenaga Kerja Pemborongan Contract Workers	119	34	0
Jumlah Total	167	121	55

Komposisi Karyawan Berdasarkan Tingkat Pendidikan
Employee Composition by Education Level

Deskripsi Description	Tahun / *Year*		
	2025	2024	2023
Strata 2 (S2) Master's Degree	7	7	6
Strata 1 (S1) Bachelor's Degree	66	53	46
Diploma 3 (D3) Diploma	27	9	3
SMA/SMK High School/Vocational High School	67	52	0
Jumlah Total	167	121	55

Komposisi Karyawan Berdasarkan Usia
Employee Composition by Age

Deskripsi Description	Tahun / *Year*		
	2025	2024	2023
>50 tahun >50 years old	2	2	6
41 – 50 Tahun 41 – 50 years old	10	9	10
31 – 40 Tahun 31 – 40 years old	31	48	13
21 – 30 Tahun 21 – 30 years old	124	62	26
Jumlah Total	167	121	55

Pengembangan Kompetensi Pegawai

PLN Energi Gas meyakini bahwa Sumber Daya Manusia (SDM) yang tangguh, profesional, kompeten, dan adaptif terhadap perubahan merupakan faktor utama dalam menghadapi tantangan serta mendukung keberhasilan Perusahaan dalam jangka panjang. Pegawai dipandang sebagai penggerak utama dalam pelaksanaan strategi dan operasional Perusahaan, sehingga PLN Energi Gas terus memastikan ketersediaan talenta-talenta unggul di berbagai lini organisasi guna menjaga keberlanjutan dan pertumbuhan bisnis secara berkesinambungan.

Sebagai bentuk komitmen terhadap pe-ngembangan kualitas SDM, PLN Energi Gas secara berkelanjutan melaksanakan program pengembangan kompetensi yang mencakup peningkatan *soft skill* maupun *hard skill* bagi seluruh pegawai di setiap jenjang jabatan. Program tersebut dirancang untuk meningkatkan kemampuan individu sekaligus memperkuat kompetensi teknis dan manajerial, khususnya dalam mendukung kebutuhan tenaga ahli di bidang energi gas. Melalui penguatan kompetensi dan kapabilitas pegawai, Perusahaan berharap dapat terus meningkatkan kinerja serta mendorong terciptanya inovasi di tengah dinamika lingkungan bisnis yang terus berkembang.

PLN Energi Gas juga menjunjung tinggi prinsip keberagaman dan inklusivitas dengan memberikan hak dan kesempatan yang setara bagi seluruh pegawai untuk mengikuti program pendidikan, pelatihan, dan sertifikasi sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya. Pengembangan kompetensi dilakukan melalui berbagai program sertifikasi, baik di dalam maupun luar negeri, yang bekerja sama dengan lembaga eksternal kredibel seperti BNSP, PPSDM Migas, dan Kementerian Ketenagakerjaan. Program tersebut dilaksanakan berdasarkan pemetaan kompetensi pegawai, dimana sepanjang tahun 2025 sebanyak 100% pegawai telah memperoleh sertifikasi. Adapun selama tahun 2025, PLN Energi Gas juga telah mengikutsertakan pegawai dalam berbagai program pengembangan kompetensi sebagai berikut:

Employee Competency Development

PLN Energi Gas believes that a resilient, professional, competent, and adaptable workforce is a key factor in addressing challenges and supporting the Company's long-term success. Employees are viewed as the primary drivers in the implementation of the Company's strategies and operations; therefore, PLN Energi Gas continuously ensures the availability of top talent across all organizational levels to maintain business sustainability and continuous growth.

As a demonstration of its commitment to HR development, PLN Energi Gas continuously implements competency development programs that cover the enhancement of both soft and hard skills for all employees at every job level. These programs are designed to enhance individual capabilities while strengthening technical and managerial competencies, particularly to support the need for experts in the natural gas sector. By strengthening employees' competencies and capabilities, the Company aims to continuously improve performance and foster innovation amid the ever-evolving dynamics of the business environment.

PLN Energi Gas also upholds the principles of diversity and inclusivity by providing equal rights and opportunities for all employees to participate in education, training, and certification programs in accordance with their duties and responsibilities. Competency development is carried out through various certification programs, both domestically and internationally, in collaboration with credible external institutions such as BNSP, PPSDM Migas, and the Ministry of Manpower. These programs are implemented based on an employee competency assessment, with the goal that by the end of 2025, 100% of employees will have obtained certification. Throughout 2025, PLN Energi Gas has also enrolled employees in the following competency development programs:

Jenis Pelatihan Type of Training	Jumlah Peserta (orang) Number of Participants (Persons)
Seminar K3 OSH Seminar	1
Basic LNG Basic LNG	1
Analisis Laporan Keuangan Financial Statement Analysis	1
Fundamentals of IT Auditing Fundamentals of IT Auditing	1
Audit Investigasi Investigative Auditing	1
Internal Control Over Financial Reporting (ICOFR) Internal Control Over Financial Reporting (ICOFR)	1
Certified Balanced Scorecard Management System Professional Certified Balanced Scorecard Management System Professional	2
Pelatihan Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan 2025 Training on Strengthening National Values 2025	1
Project Management Profesional Project Management Professional	2
Pelatihan Stakeholder Management Stakeholder Management Training	1
Ahli K3 Umum General OSH Specialist	2
Penanggung Jawab Pengendalian Pencemaran Air (PPPA) Water Pollution Control Officer (PPPA)	1
Sertifikasi Kompetensi Kepala Teknik dan Wakil Kepala Teknik Migas Competency Certification for Director of Engineering and Deputy Chief Engineering in the Oil and Gas Industry	1
Qualified Risk Governance Professional (QRGP) Qualified Risk Governance Professional (QRGP)	3
Qualified Chief Risk Officer (QCRO) Qualified Chief Risk Officer (QCRO)	1
Pelaksana Program Pemberdayaan Masyarakat Community Empowerment Program Officer	2
Certified Procurement Officer Fundamental Certified Procurement Officer Fundamental	3
Certified International Procurement Professional (CIPP) Certified International Procurement Professional (CIPP)	1
Certified Procurement Specialist (CPSP) Certified Procurement Specialist (CPSP)	1
Sertifikasi Supervisor Kelistrikan Migas Oil and Gas Electrical Supervisor Certification	1
Sertifikasi Ahli Inspektur Sistem Alat Ukur dan Serah Terima Migas Certification as an Expert Inspector of Oil and Gas Measurement Systems and Handover Procedures	1
Qualified Risk Management Professional (QRMP) Qualified Risk Management Professional (QRMP)	4
Sertifikasi Kehumasan Public Relations Certification	1
Auditor Hukum Legal Auditor	1
Certified Energy Risk Associate (CERA) Certified Energy Risk Associate (CERA)	1
Qualified Internal Auditor (QIA) Qualified Internal Auditor (QIA)	1
Certified Risk Management Officer (CRMO) Certified Risk Management Officer (CRMO)	1
Sertifikasi Operator Muda Operasi Produksi Junior Production Operations Operator Certification	1
Inspektur Instalasi Pipa Penyalur Migas Oil and Gas Pipeline Installation Inspector	1
Penanggung Jawab Pengelolaan Limbah Bahan Bahaya dan Beracun (PPLB3) Hazardous and Toxic Waste Management Officer (PPLB3)	1

Rekapitulasi Pelatihan Berdasarkan Jumlah dan Rata-rata Jam
Summary of Training by Number and Average Hours

Jumlah Pegawai yang Memperoleh Pelatihan Number of Employees Who Received Training	Jam Pelatihan Training Hours	Rata-rata Jam Pelatihan Setiap Pegawai Average Training Hours per Employee
27	1152	42,6

Dalam penyelenggaraan berbagai program pelatihan dan pendidikan sepanjang tahun 2025, Perusahaan telah merealisasikan biaya investasi pengembangan kompetensi SDM sebesar Rp 609.259.522 Nilai tersebut meningkat sebesar 39% dibandingkan dengan realisasi biaya pengembangan kompetensi pada tahun 2024 yang tercatat sebesar Rp 438.314.250.

In organizing various training and education programs throughout 2025, the Company has allocated an investment of Rp609,259,522 for human resource competency development. This figure represents a 39% increase compared to the competency development expenditure in 2024, which totaled Rp438,314,250.



Informasi Pemegang Saham
Shareholders Information

Komposisi Kepemilikan Saham

Pemegang saham Perusahaan adalah PT PLN Energi Primer Indonesia (PLN EPI) dengan kepemilikan saham sebesar 99,99% dan Yayasan Pendidikan dan Kesejahteraan PLN dengan kepemilikan saham sebesar 0,01%. PT PLN (Persero) merupakan pemegang saham mayoritas dan pengendali Perusahaan. Berdasarkan Akta Notaris No. 74 tanggal 30 Desember 2022 tentang Perubahan Anggaran Dasar Perusahaan yang juga memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0000015. AH.01.11. tahun 2023. Komposisi modal saham Perusahaan yang berlaku sejak tanggal 1 Januari 2023 adalah sebagai berikut:

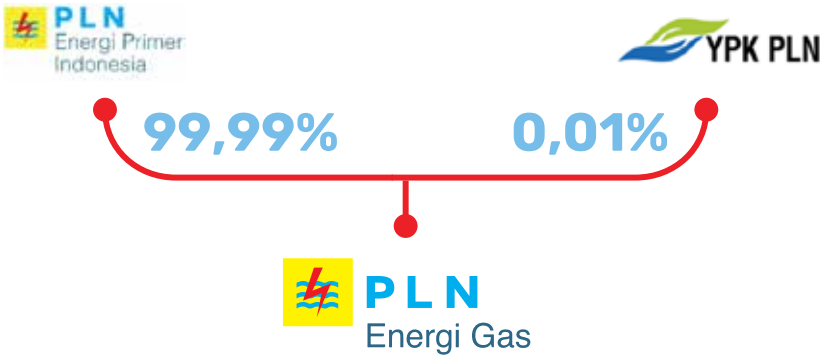
Share Ownership Composition

The Company's shareholders are PT PLN Energi Primer Indonesia (PLN EPI) with 99.99% share ownership and Yayasan Pendidikan dan Kesejahteraan PLN with 0.01% share ownership. PT PLN (Persero) is the majority and controlling shareholder of the Company. Based on Notarial Deed No. 74 dated December 30, 2022 concerning Amendments to the Company's Articles of Association which also obtained approval from the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia Number AHU-0000015.AH.01.11. of 2023. The composition of the Company's share capital effective as of January 1, 2023 is as follows:

Keterangan Information	Nilai Nominal Rp1.000.000,- per saham Nominal Value of IDR 1,000,000 per share		
	Jumlah saham Total Share	Jumlah Nilai Nominal (Rp) Total Nominal Value (Rp)	%
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh: Issued and Fully Paid Up Capital:			
• PT PLN Energi Primer Indonesia (PLN EPI)	24.999	24.999.000.000	99,99
• Yayasan Pendidikan dan Kesejahteraan PT PLN (Persero) (YPK PLN)	1	1.000.000	0,01
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh Total Issued and Fully Paid-Up Capital	25.000	25.000.000.000	100,00

Adapun skema struktur dan komposisi pemegang saham sampai dengan pemegang saham pengendali akhir (*ultimate shareholder*) dapat dilihat pada skema berikut:

Shareholders structure and composition scheme up to the ultimate controlling shareholder is as follows:



Informasi Pemegang Saham Utama dan Pengendali

Hingga akhir Desember 2025, Pemegang Saham mayoritas PLN Energi Gas adalah PT PLN Energi Primer Indonesia dengan kepemilikan sebesar 99,99% saham dengan jumlah saham sebanyak 24.999 lembar, sehingga Pemegang Saham Utama dan Pengendali PLN Energi Gas adalah PT PLN Energi Primer Indonesia.

Information on Major and Controlling Shareholders

As of the end of December 2025, the majority shareholder of PLN Energi Gas is PT PLN Energi Primer Indonesia, with 99.99% ownership of the shares, representing 24,999 shares. Therefore, PT PLN Energi Primer Indonesia is the Major and Controlling Shareholder of PLN Energi Gas.

Kepemilikan Saham Dewan Komisaris dan Direksi

Hingga 31 Desember 2025, tidak terdapat anggota Dewan Komisaris maupun Direksi yang memiliki saham baik secara langsung maupun tidak lansung di PLN Energi Gas.

Share Ownership of the Board of Commissioners and Directors

As of December 31, 2025, no members of the Board of Commissioners or Directors own shares, either directly or indirectly, in PLN Energi Gas.

Pemegang Saham Dengan Kepemilikan 5% atau Lebih 5%

Sampai dengan 31 Desember 2025, Pemegang Saham mayoritas PLN Energi Gas adalah hanya PT PLN Energi Primer Indonesia dengan persentase dengan persentase 99,99%.

Shareholders with Ownership of 5% or More

As of December 31, 2025, the majority shareholder of PLN Energi Gas is PT PLN Energi Primer Indonesia, with 99.99% ownership.

Kelompok Pemegang Saham Masyarakat dengan Kepemilikan Kurang dari 5%

PLN Energi Gas belum mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia, sehingga belum memiliki pemegang saham masyarakat.

Public Shareholders with Ownership of Less than 5%

PLN Energi Gas has not yet listed its shares on the Indonesia Stock Exchange, and therefore does not have any public shareholders.

Jumlah Pemegang Saham dan Persentase Kepemilikan, Berdasarkan Klasifikasi

Hingga akhir tahun 2025, kepemilikan saham PLN Energi Gas seluruhnya dimiliki oleh institusi lokal yaitu PT PLN Energi Primer Indonesia dan Yayasan Pendidikan dan Kesejahteraan PT PLN (Persero) yang seluruhnya berkedudukan di Indonesia sebagaimana yang dapat dilihat pada tabel berikut:

Number of Shareholders and Percentage of Ownership, Based on Classification

As of the end of 2025, PLN Energi Gas shares are entirely owned by local institutions, namely PT PLN Energi Primer Indonesia and Yayasan Pendidikan dan Kesejahteraan PT PLN (Persero), all domiciled in Indonesia, as shown in the following table:

Kepemilikan saham Share Ownership	Jumlah dan Persentase Kepemilikan Saham Number and Percentage of Share Ownership
Kepemilikan institusi lokal Local institutional ownership	1. PT PLN Energi Primer Indonesia dengan kepemilikan saham sebesar Rp 24.999.000.000 (99,99%) 2. Yayasan Pendidikan dan Kesejahteraan PT PLN (Persero) (YPK PLN) dengan kepemilikan saham Rp1.000.000 (0,01%) 1. PT PLN Energi Primer Indonesia, with shareholding valued at Rp 24,999,000,000 (99.99%). 2. Yayasan Pendidikan dan Kesejahteraan PT PLN (Persero) (YPK PLN), with shareholding valued at Rp 1,000,000 (0.01%).
Kepemilikan institusi asing Foreign institutional ownership	Tidak ada None
Kepemilikan individu lokal Local individual ownership	Tidak ada None
Kepemilikan individu asing Foreign individual ownership	Tidak ada None



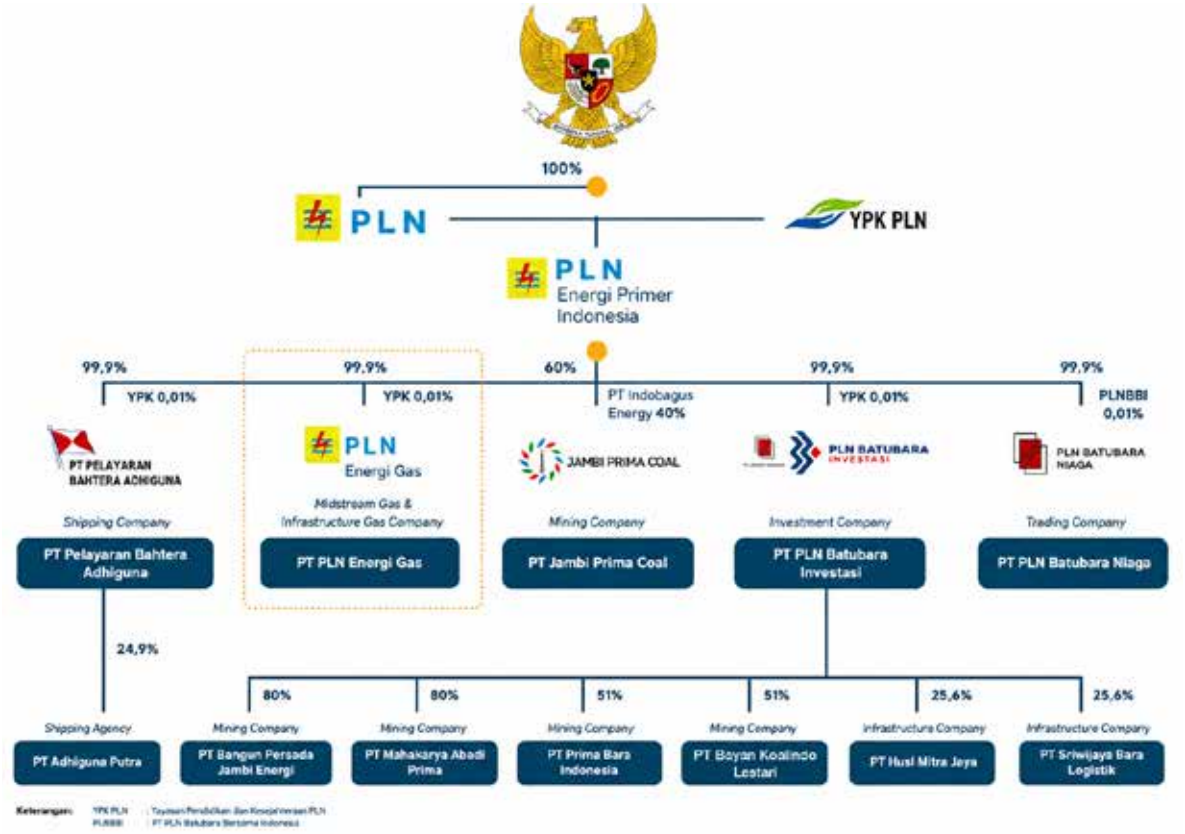
Struktur Grup Perusahaan, Entitas Anak, Entitas Asosiasi, Perusahaan Patungan dan *Special Purpose Vehicle* (SPV)
Corporate Group Structure, Subsidiaries, Associated Entities, Joint Ventures and Special Purpose Vehicles (SPV)

Struktur Grup Perusahaan

PLN Energi Gas merupakan bagian dari ekosistem bisnis energi PT PLN (Persero) yang memiliki peran strategis dalam pengelolaan dan pengembangan rantai pasok gas bumi. Dalam menjalankan kegiatan usahanya, PLN Energi Gas berada di bawah koordinasi PT PLN Energi Primer Indonesia (PLN EPI) selaku subholding PT PLN (Persero) yang bertanggung jawab atas pengelolaan energi primer secara terintegrasi. Melalui peran tersebut, PLN Energi Gas turut mendukung upaya penyediaan pasokan energi yang andal, efisien, dan berkelanjutan bagi kebutuhan kelistrikan nasional.

Corporate Group Structure

PLN Energi Gas is part of PT PLN (Persero)'s energy business ecosystem, undertaking strategic role in the management and development of the natural gas supply chain. In carrying out business activities, PLN Energi Gas is coordinated by PT PLN Energi Primer Indonesia (PLN EPI), a subholding of PT PLN (Persero), responsible for integrated primary energy management. Through this role, PLN Energi Gas supports efforts to provide a reliable, efficient, and sustainable energy supply for national electricity needs.



Entitas Anak, Entitas Asosiasi, Perusahaan Patungan dan *Special Purpose Vehicle (SPV)*

Entitas Anak adalah suatu perusahaan yang dikendalikan oleh PLN Energi Gas, memiliki kekuasaan untuk mengatur kebijakan keuangan dan operasionalnya untuk memperoleh manfaat dari aktivitas entitas tersebut. Per 31 Desember 2025, PLN Energi Gas tidak memiliki Entitas Anak, Entitas Asosiasi ataupun Perusahaan *Joint Venture* (Perusahaan Patungan) serta *Special Purpose Vehicle (SPV).*

Subsidiaries, Associated Entities, Joint Ventures, and Special Purpose Vehicles (SPVs)

A Subsidiary is a company controlled by PLN Energi Gas, which has the authority to regulate its financial and operational policies to obtain benefits from its activities. As of December 31, 2025, PLN Energi Gas did not have any Subsidiaries, Associated Entities, Joint Ventures, or Special Purpose Vehicles (SPVs).

Kronologis Pencatatan Saham
Chronology of Share Listing

Sejak pertama kali didirikan sampai dengan akhir 2025, PLN Energi Gas belum pernah mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia (BEI) dan bursa efek manapun. Oleh sebab itu, informasi terkait kronologi pencatatan saham tidak relevan untuk ditampilkan dalam Laporan Tahunan 2025.

Since it was founded until the end of 2025, the PLN Energi Gas has never listed its shares on the Indonesian Stock Exchange (IDX) or any other stock exchange. Therefore, information regarding the chronology of share listings is not relevant to be presented in the 2025 annual report.

Kronologis Pencatatan Efek Lainnya
Other Securities Listing Chronology

Sejak pertama kali didirikan sampai dengan akhir 2025, PLN Energi Gas belum pernah menerbitkan obligasi/sukuk/obligasi konversi atau efek-efek bersifat utang lainnya.

Since it was founded until the end of 2025, the PLN Energi Gas has never issued bonds/sukuk/convertible bonds or other debt securities.

Keanggotaan Asosiasi
Association Membership

Sampai dengan 31 Desember 2025, PLN Energi Gas telah tergabung sebagai anggota asosiasi nasional *Indonesian Gas Society* (IGS), yaitu organisasi nirlaba yang mewadahi para pemangku kepentingan industri gas Indonesia dari sektor hulu, menengah, hingga hilir.

As of December 31, 2025, PLN Energi Gas has joined as a member of the national association Indonesian Gas Society (IGS), a non-profit organization accommodating the stakeholders in the Indonesian gas industry from the upstream, midstream, to downstream sectors.

Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik
Public Accountants and Public Accounting Firms

Kantor Akuntan Publik (KAP) Public Accounting Firm	KAP Rintis, Jumadi, Rianto & Rekan (Firma Anggota Global PriceWaterhouseCoopers) No. Izin: KEP-315/KM.1/2024 Rintis, Jumadi, Rianto & Partners Public Accounting Firm (Global Member Firm of PriceWaterhouseCoopers) License No.: KEP-315/KM.1/2024
Nama Akuntan Publik Public Accountant	Firman Sababalat, CPA No. Izin: AP.1222
Alamat Address	WTC 3, Jl. Jenderal Sudirman Kav 29-31, RT. 4/RW. 2, Karet Setiabudi, Indonesia 12920
Periode Penugasan KAP Public Accounting Firm Assignment Period	Periode ke Tahun Buku 2025 2025 Fiscal Year Period
Periode Penugasan AP Firm Assignment Period	Periode ke Tahun Buku 2025 2025 Fiscal Year Period
Jasa Audit Audit Services	Audit Laporan Keuangan Financial Statement Audit
Jasa Non Audit Non-Audit Services	LHEK dan PSA-62
Fee Audit Audit Services	Ditanggung Pemegang Saham Borne by the shareholders
Fee Non-audit Non-Audit Services	Ditanggung Pemegang Saham Borne by the shareholders

Berikut Informasi Kantor Akuntan Publik dan Akuntan Publik yang bekerjasama dengan PT PLN Energi Gas dalam 3 (tiga) tahun terakhir:

The following is information on Public Accounting Firms and Public Accountants collaborated with PT PLN Energi Gas in the latest 3 (three) years:

	Tahun Buku Fiscal Year		
	2025	**2024**	**2023**
Kantor Akuntan Publik Public Accounting Firm	KAP Rintis, Jumadi, Rianto & Rekan	KAP Rintis, Jumadi, Rianto & Rekan	KAP Tanudireja, Wibisana, Rintis, & Rekan
Nama Akuntan Publik Public Accountant	Firman Sababalat	Firman Sababalat	Firman Sababalat
Jasa Audit Audit Services	Audit Laporan Keuangan Periode 31 Desember 2025 Financial Statements Audit for the Period of December 31, 2025	Audit Laporan Keuangan Periode 31 Desember 2024 Financial Statements Audit for the Period of December 31, 2024	Audit Laporan Keuangan Periode 31 Desember 2023 Financial Statements Audit for the Period of December 31, 2023
Biaya Fee	Biaya jasa akuntan public PwC dibayarkan oleh PLN Kantor Pusat PwC public accounting fees are paid by PLN Head Office.	Biaya jasa akuntan public PwC dibayarkan oleh PLN Kantor Pusat PwC public accounting fees are paid by PLN Head Office.	Biaya jasa akuntan public PwC dibayarkan oleh PLN Kantor Pusat PwC public accounting fees are paid by PLN Head Office.

PLN Energi Gas menggunakan jasa Akuntan Publik (AP) dan Kantor Akuntan Publik (KAP) sebagai pihak independen untuk melakukan audit terhadap laporan keuangan interim ataupun laporan keuangan tahunan Perseroan. Untuk menjamin kredibilitas dan objektivitas hasil audit, PLN Energi Gas selalu menggunakan jasa KAP yang terdaftar di OJK dalam melakukan audit terhadap laporan keuangan tahunan dan memberikan opini atas kesesuaian penyajian laporan keuangan tersebut

PLN Energi Gas used the services of Public Accountant (PA) and Public Accounting Firm (PAF) as independent parties to audit the Company's interim and annual financial statements. To ensure the credibility and objectivity of the audit results, PLN Energi Gas consistently used Public Accounting Firm registered with the Financial Services Authority (FSA) to audit the annual financial statements and provide an opinion on the conformity of the presentation of the financial statements to the

dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang berlaku di Indonesia.

Pada tahun 2025, sebagaimana ditetapkan oleh Dewan Komisaris dengan mempertimbangkan usulan dan rekomendasi dari Komite Audit, Perseroan menunjuk KAP Rintis, Jumadi, Rianto & Rekan sebagai auditor eksternal yang independen dan profesional untuk melakukan proses audit Laporan Keuangan Perseroan untuk periode 1 Januari hingga 31 Desember 2025.

Jasa Atestasi Lain

Selain jasa audit atas Laporan Keuangan, Akuntan Publik juga menyediakan jasa atestasi lainnya yang mencakup aspek kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, pengendalian internal, serta evaluasi kinerja Perusahaan. Berbagai layanan atestasi maupun non-atestasi tersebut menjadi bagian dari prioritas Perusahaan dalam mendukung penerapan tata kelola yang baik pada Tahun Buku 2024.

Dalam pelaksanaannya, Dewan Komisaris dengan dibantu Komite Audit melakukan pengawasan dan evaluasi atas efektivitas serta kualitas proses audit yang dilaksanakan oleh Kantor Akuntan Publik (KAP). Selain itu, Direksi bersama Kepala Satuan Pengawasan Internal juga secara aktif melakukan pemantauan terhadap tindak lanjut temuan audit eksternal melalui rapat koordinasi yang diselenggarakan secara berkala.

Pengawasan dan Penilaian atas Efektivitas Pelaksaan Tugas KAP

Dalam pelaksanaannya, Dewan Komisaris dengan dibantu Komite Audit melakukan pengawasan dan evaluasi atas efektivitas serta kualitas proses audit yang dilaksanakan oleh Kantor Akuntan Publik (KAP). Selain itu, Direksi bersama Kepala Satuan Pengawasan Internal juga secara aktif melakukan pemantauan terhadap tindak lanjut temuan audit eksternal melalui rapat koordinasi yang diselenggarakan secara berkala.

Pada tahun 2025, Dewan Komisaris, Komite Audit, Direksi, dan Kepala Satuan Pengawasan Internal telah melaksanakan rapat dengan agenda pembahasan terkait:

Financial Accounting Standards (SAK) applicable in Indonesia.

In 2025, as determined by the Board of Commissioners, after considering the proposals and recommendations of the Audit Committee, the Company appointed Rintis, Jumadi, Rianto & Partners as the independent and professional external auditor to audit the Company's Financial Statements for the period January 1 to December 31, 2025.

Other Attestation Services

More than auditing the Financial Statements, Public Accountant also provides other attestation services covering aspects of compliance with laws and regulations, internal control, and Company performance evaluation. These various attestation and non-attestation services are part of the Company's priorities in supporting the implementation of good governance in 2024 Fiscal Year.

In its implementation, the Board of Commissioners, assisted by the Audit Committee, supervises and evaluates the effectiveness and quality of the audit process carried out by the Public Accounting Firm (PAF). In addition, the Board of Directors, together with the Head of the Internal Audit Unit, actively monitors the follow-up to external audit findings through regular coordination meetings.

Monitor and Evaluation of the Effectiveness of Public Accounting Firm Duties

In its implementation, the Board of Commissioners, assisted by the Audit Committee, supervises and evaluates the effectiveness and quality of the audit process carried out by the Public Accounting Firm (PAF). In addition, the Board of Directors, together with the Head of the Internal Audit Unit, actively monitors the follow-up to external audit findings through regular coordination meetings.

In 2025, the Board of Commissioners, Audit Committee, Board of Directors, and Head of the Internal Audit Unit held meetings with the following agendas:

Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik
Public Accountant (AP) and Public Accounting Firm (KAP)

1. Kesesuaian progres penyelesaian audit dengan rencana kerja audit;
2. Kesesuaian pelaksanaan audit dengan standar profesi akuntan publik;
3. Hasil audit eksternal dan kualitas rekomendasi audit eksternal;
4. Tindak lanjut atas temuan hasil audit KAP.

Pengusulan Eksternal Auditor

Dewan Komisaris, melalui Surat Nomor 0109/ MNJ.00.01/DEKOM/PLNEG/2025 tanggal 17 Juni 2025 perihal Tanggapan Tertulis dan Persetujuan atas Usulan Penunjukan Kantor Akuntan Publik Tahun Buku 2025, telah menyampaikan usulan penunjukan Kantor Akuntan Publik (KAP) yang akan melakukan audit atas Laporan Keuangan Perusahaan untuk Tahun Buku 2025.

Usulan tersebut disusun berdasarkan hasil evaluasi serta dengan mempertimbangkan masukan dan rekomendasi dari komite di bawah Dewan Komisaris, dengan tujuan memastikan proses audit berjalan secara independen, objektif, dan selaras dengan prinsip tata kelola perusahaan yang baik.

1. Alignment of audit completion progress with the audit work plan;
2. Alignment of audit implementation with public accounting professional standards;
3. External audit results and the quality of external audit recommendations;
4. Follow-up on PAF audit findings.

Proposal for the Appointment of External Auditor

The Board of Commissioners, through Letter Number 0109/ MNJ.00.01/DEKOM/PLNEG/2025 dated June 17, 2025, concerning the Written Response and Approval of the Proposal to Appoint a Public Accounting Firm for the 2025 Fiscal Year, has submitted a proposal to appoint a Public Accounting Firm (KAP) to audit the Company's Financial Statements for the 2025 Fiscal Year.

These proposals are prepared based on the evaluation results and taking into account input and recommendations from committees under the Board of Commissioners, with the aim of ensuring that the audit process is conducted independently, objectively, and in accordance with the principles of good corporate governance.



Lembaga dan Profesi Penunjang Perusahaan
Company Supporting Professional Institutions

Lembaga Penunjang	Alamat	Layanan/Jasa
JTASYER LAW FIRM ("JTASyer")	Kompleks Graha Puri Blok F 64-65, Jalan Wijaya II, Kebayoran Baru Jakarta Selatan 12160	Konsultan Hukum Legal Consultant
Sutra Oktaviani, S.H., M.Kn.	Jl. RS Fatmawati 20 Rukan Fatmawati Mas Blok II/225 Lantai 3A Cilandak Barat, Kota Admnistrasi Jakarta Selatan	Notaris Notary
PT BDO	Prudential Tower, Lantai 17, Jl. Jenderal Sudirman, Kav. 79, Jakarta Selatan, 12910	Jasa profesional dalam audit, pajak, konsultasi bisnis, dan advisory. Professional services in audit, tax, business consulting, and advisory.
PT PLN (Persero) Pusat Pendidikan dan Pelatihan	Jl. RM. Harsono No. 59, Ragunan, Pasar Minggu, RT.11/RW.4, Ragunan, Kec. Ps. Minggu, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12550	Pendidikan dan pelatihan tenaga kelistrikan dan manajemen di lingkungan PLN dan mitra industry ketenagalistrikan. Education and training for electrical and management personnel within PLN and its electricity industry partners
TO-07	Rasuna Office Park, Menteng Atas, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan. DKI Jakarta	Organisasi yang memfasilitasi kolaborasi dan pertukaran pengetahuan dalam industri gas di Indonesia. An organization facilitating collaboration and knowledge exchange in the Indonesian gas industry
PPM Manajemen	9 Jalan Menteng Raya 10340 Menteng Jakarta	Konsultan dan lembaga Pendidikan manajemen terkemuka di Indonesia. A leading management consultant and education institution in Indonesia
PT Sinergy Solusi Pratama	Jl. D. I. Panjaitan Kav 2 RT 11 RW 12, Cipinang, Cempedak, Jatinegara, RT.11/RW.11, Cipinang Cempedak, Jatinegara, Kota Jakarta Timur, DKI Jakarta 13350 Jl. Raya Dukuh Menanggal No. 1A, Jawa Timur, Gayungan Surabaya, Indonesia 60234	Konsultan HSE, pelatihan teknis industri energi, dan sertifikasi. HSE consulting, energy industry technical training, and certification.
PT RAP Indonesia	Pakuwon Tower, Jl. Raya Casablanca No.Kav 88, RT.6/RW.14 12870 DKI Jakarta	Konsultan dan pelaksana proyek-proyek pelatihan dan pengembangan SDM di sektor publik dan swasta. Consultant and project implementation specialist in human resource training and development for the public and private sectors.
Forum Fasilitas Produksi Migas	Gandaria 8 Office Tower, 5th Floor, Jl. Sultan Iskandar Muda Jakarta 12440	Komunitas profesional yang membahas dan mengembangkan pengetahuan seputar fasilitas produksi migas. A professional community discussing and developing knowledge about oil and gas production facilities.
PwC Indonesia	Jl. Jend. Sudirman Kav. 29-31, Floors 33-43, Jakarta, DKI Jakarta 12920	Jasa profesional dalam audit, pajak, konsultasi bisnis, dan advisory. Professional services in audit, tax, business consulting, and advisory.
Yayasan Pendidikan Internal Audit (YPIA)	Gedung L Avenue Lt. 17 F Jl. Pasar Minggu Kav. 16, Pancoran, Kec. Pancoran, Jakarta Selatan. D.K.I. Jakarta	Pendidikan dan pengembangan profesi internal auditor di Indonesia. Education and professional development for internal auditors in Indonesia.
Global Integrated Risk Management Association	Jl. Pejaten Raya, Nomor. 17, Kel. Pejaten Barat, Kec. Pasar Minggu, 12510	Asosiasi profesional yang fokus pada manajemen risiko secara global A professional association focused on global risk management.

Sinergi Antar Subholding & Anak Perusahaan
Synergy between Subholding & Subsidiaries

PLN Energi Gas senantiasa melakukan sinergi dengan Subholding, Anak Perusahaan, serta Afiliasi PT PLN (Persero) dalam rangka memperkuat rantai pasok gas bumi serta meningkatkan efisiensi dan keandalan layanan pada sektor kelistrikan. Sinergi tersebut merupakan bagian dari strategi kolaboratif di lingkungan PLN Group untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya, mempercepat implementasi proyek, serta mendorong penciptaan nilai bersama secara berkelanjutan. Melalui pelaksanaan sinergi yang dilakukan secara konsisten dalam ekosistem PLN Group, sampai dengan Desember 2025 PLN Energi Gas berhasil membukukan realisasi pendapatan sebesar Rp 718,50 Miliar, yang mencerminkan efektivitas strategi kolaborasi dan optimalisasi sinergi Perusahaan.

PLN Energi Gas consistently synergizes with the Subholdings, Subsidiaries, and Affiliates of PT PLN (Persero) to strengthen natural gas supply chain and improve services efficiency and reliability in the electricity sector. This synergy is part of the PLN Group's collaborative strategy to optimize resource utilization, accelerate project implementation, and encourage sustainable shared value creation. Through consistent synergy implementation within the PLN Group ecosystem, PLN Energi Gas achieved revenues of Rp718.50 billion by December 2025, reflecting the effectiveness of the Company's collaborative strategy and synergy optimization.

Berikut Kolaborasi PLN Energi Gas dengan Entitas dalam Ekosistem PLN Grup:

The following is a summary of PLN Energi Gas collaborations with entities within the PLN Group ecosystem:

No	Perusahaan	Bentuk Kerjasama
1	PT PLN Nusantara Power	O&M CNG Riau, O&M FSRU Gorontalo serta pelaksanaan Jasa Aplikasi WE CARE dengan PLN NP untuk mendukung infrastruktur dan transformasi digital. Riau CNG & O&M, Gorontalo O&M FSRU, and the implementation of WE CARE Application Services with PLN NP to support infrastructure and digital transformation.
2	PT PLN Nusantara Power Construction	Sinergi dalam Pelaksanaan Infrastruktur melalui Kerjasama *Engineering, Procurement, and Construction* (EPC) Pekerjaan Gasifikasi Tarakan. Synergy in Infrastructure Implementation through Engineering, Procurement, and Construction (EPC) Collaboration for the Tarakan Gasification Project.
3	PT Paguntaka Cahaya Nusantara (PCN) dan PT Haleyora Powerindo (HPI).	Sinergi dalam Penyediaan Tenaga Alih Daya yang ditempatkan di Kantor Pusat maupun Unit. Synergy in the Provision of Outsourced Labor placed at the Head Office and Units.
4	PT PLN Icon Plus	Sinergi dalam Layanan Teknologi, berupa penggunaan layanan internet, sewa laptop, dan sewa kendaraan listrik. Synergy in Technology Services, in the internet access, laptop rentals, and electric vehicle rentals.
5	PT Pelayanan Energi Batam	Sinergi dalam Pelaksanaan Operation & Maintenance (O&M) pada berbagai proyek, seperti Pipa Gas Tanjung Batu, *Custody Flowmeter* di Station PK-52, Kompresor di FSRU Gorontalo dengan PEB, serta *Engineering, Procurement, and Construction* (EPC) Pekerjaan Gasifikasi Punagaya. Synergy in Operation & Maintenance (O&M) Implementation on various projects, such as the Tanjung Batu Gas Pipeline, Custody Flowmeter at Station PK-52, Compressors at the Gorontalo FSRU with PEB, and Engineering, Procurement, and Construction (EPC) for the Punagaya Gasification Project.
6	PT PLN Enjiniring	Sinergi dalam kajian enjiniring pada beberapa proyek seperti *Feasibility Study* (FS) Fasilitas Penyimpanan, Transportasi, dan Regasifikasi Tanjung Selor, FS Pembangkit Cilegon, Jasa Konsultansi Pekerjaan Pembangunan *Pipeline* ke Pembangkit Cilegon, dan Jasa Konsultansi Pembangunan *Additional Pipeline* untuk Sistem Pembangkit Bali. Synergy in engineering studies on several projects such as the Feasibility Study (FS) of the Tanjung Selor Storage, Transportation, and Regasification Facility, the Cilegon Power Plant FS, Consulting Services for Pipeline Construction Work to the Cilegon Power Plant, and Consulting Services for Additional Pipeline Construction for the Bali Power Plant System.

Reference : KK Sinergi 2025

Informasi Pada Website Perusahaan
Information on the Company's Website



Perseroan menunjukkan komitmen dan upayanya dalam menegakkan prinsip transparansi yang merupakan salah satu pilar dalam tata kelola perusahaan yang baik melalui pengelolaan situs web resmi yang beralamat di: https://www.plnenergigas.co.id/. Keberadaan laman web ini menjadi portal resmi yang dapat digunakan secara terbuka oleh para pemangku kepentingan tanpa terkecuali, kapan saja dan di mana saja, dengan tujuan untuk memberikan informasi yang komprehensif, akurat, dan aktual mengenai Perseroan kepada khalayak luas.

The Company presents commitment and efforts to upholding the principle of transparency, pillar of good corporate governance, through the management of its official website at https://www.plnenergigas.co.id/. This website serves as an official portal that can be accessed openly by all stakeholders, anytime and anywhere, with the purposes of providing comprehensive, accurate, and up-to-date information concerning the Company to the general public.

Pengelolaan laman web Perseroan senantiasa menjunjung tinggi prinsip keterbukaan informasi sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal dan ("POJK 8/2015") tentang Situs Web Emiten atau Perusahaan Publik dan Peraturan OJK No. 21/POJK.04/2015 ("POJK 21/2015") tentang Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka. Kendati demikian, penyajian berita dan informasi di dalam laman web Perseroan dipastikan tetap memerhatikan kebijakan kerahasiaan informasi perusahaan.

The Company consistently manages the website management by upholding the principle of information transparency as mandated by Law No. 8 of 1995 concerning Capital Markets and ("POJK 8/2015") concerning Websites of Issuers or Public Companies and OJK Regulation No. 21/POJK.04/2015 ("POJK 21/2015") concerning the Implementation of Guidelines for Public Company Governance. Nevertheless, the presentation of news and information on the Company's website ensures that it adheres to the Company's information confidentiality policy.

Secara garis besar, situs web Perseroan menampilkan informasi berikut ini:

In general, the Company's website displays the following information:

Informasi Pada Website Perusahaan
Information on the Company's Website

A	**Profil**
	Tentang Kami About Us
	• Perjalanan Kami • Our Journey
	• Visi dan Misi • Vision and Mission
	• Nilai Perusahaan • Company Values
	• Penghargaan dan Sertifikasi • Awards and Certifications
	Manajemen Management
	• Manajemen Struktur Organisasi • Organizational Structure
	• Dewan Komisaris • Board of Commissioners
	• Direksi • Board of Directors
	• Komite Audit • Audit Committee
	• Komite Manajemen Risiko • Risk Management Committee
	• BOD-1 • BOD-1
B	**Bisnis Kami** Our Business
	Bisnis Kami
	• Business Landscape • Business Landscape
	Operational Area Operational Area
	Our Partners Our Partners
C	**Hubungan Investor** Investor Information
	Informasi Investor Shareholder Information
	• Informasi Pemegang Saham • Financial Performance Overview
	• Kilas Kinerja Keuangan
	1. Pendapatan Usaha Operating Revenue
	2. Laba Bersih Net Profit
	3. Jumlah Aset Total Assets
	4. Jumlah Liabilitas Total Liabilities
	5. Jumlah Ekuitas Total Equity
	Laporan Perusahaan Corporate Reports
	• Laporan Keuangan • Financial Statements
	• Laporan Tahunan • Annual Reports
	• Laporan Keberlanjutan • Sustainability Reports
	• RUPS • GMS
	Procurements Procurements
	PPID PPID
D	**Tata Kelola** Corporate Governance
	Tata Kelola Perusahaan Good Corporate Governance
	• Roadmap & Sasaran Strategis GCG • GCG Roadmap & Strategic Objectives
	• Kebijakan Pelatihan pada SDM PLN Energi Gas • PLN Energi Gas Human Resources Training Policy
	• Dokumen Tata Kelola Perusahaan • Corporate Governance Documents
	1. Pedoman Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris dan Direksi The Board Charter
	2. Pedoman Perilaku Code of Conduct
	3. Pedoman GCG GCG Guidelines
	4. Piagam Komite Audit Audit Committee Charter
	5. Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi Nomination and Remuneration Committee Charter
	6. Manual Terintegrasi Integrated Manual
	7. Komitmen SMAP SMAP Commitment
	8. Anggaran Dasar Articles of Association
	9. Komitmen Manajemen Management Commitment
	Sistem Pelaporan Pelanggaran Whistleblowing System
	• Mekanisme Pelaporan Pelanggaran • Whistleblowing Mechanism
	• Alur Penanganan Pengaduan • Complaint Handling Flow
E	**Keberlanjutan** Sustainability
	K3L K3L

	Tanggung Jawab Sosial Social Responsibility
F	**Media** Media
	Media Press Release Media Press Release
G	**Kontak** Contact
	Kontak PLN Energi Gas Contact of PLN Energi Gas
H	**Lainnya** Others
	Alamat Address
	Sosial Media Social Media
	• Instagram
	• Youtube
	• LinkedIn
	Layanan Informasi Information Services
	• Email
	• Phone







Tinjauan Pendukung Bisnis

Business Support Review

Penerapan Teknologi Informasi
Information Technology Implementation

Kebijakan dan Pengelola TI

Kebijakan dan arah pengembangan TI PLN Energi Gas adalah untuk menunjang kebutuhan Perusahaan sehingga selaras dengan perkembangan industri dan kemajuan zaman. Pengembangan produk TI dilakukan untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas Otomatisasi proses bisnis serta sistem informasi manajemen dapat mempercepat pekerjaan. Implementasi transformasi digital diperlukan untuk tetap kompetitif, sehingga perusahaan atau institusi perlu mengadopsi teknologi terkini secara dalam operasional mereka.

Dalam struktur organisasi Perusahaan, penanggung jawab pengelolaan Teknologi informasi ada di fungsi Perencanaan Korporat dan Enjiniring pada bidang Perencanaan Kinerja, Korporat dan Teknologi Informasi dengan tugas dan wewenangnya secara garis besar terkait Pengelolaan dan penyelarasan Teknologi Informasi dengan kebutuhan Perusahaan guna menjamin keberhasilan usaha dan akuntabilitas Perusahaan.

Road Map TI

Pada tahun 2025 bidang TI PT PLN Energi Gas berfokus pada penguatan fondasi tata kelola (*governance*) dan pemenuhan kebutuhan infrastruktur jaringan di seluruh unit PT PLN Energi Gas. Bentuk penguatan fondasi tata kelola adalah standardisasi regulasi internal berupa Peraturan Direksi No. 0009.P/DIR/2025 tentang Pedoman dan Kebijakan Umum Tata Kelola Teknologi Informasi di Lingkungan PT PLN Energi Gas. Kemudian pemenuhan infrastruktur jaringan telah selesai diimplementasikan di Unit Pengelolaan Operasi dan Pemeliharaan yang berlokasi di Samarinda yang mempertimbangkan keamanan berupa *firewall router*. Hal ini menjadi batu pijakan untuk implementasi peningkatan keamanan siber serta penguatan keandalan operasi yang ditargetkan selesai pada tahun 2026.

Pada tahun 2026 TI juga menargetkan untuk penyelesaian Rencana Strategis Teknologi Informasi 2026 - 2030 sebagai pedoman dan roadmap program kerja jangka panjang TI.

IT Policy and Management

PLN Energi Gas designed policy and direction of IT development to support the Company's needs, ensuring alignment with industry developments and the advancement of the times. IT product is developed to increase efficiency and productivity. Automation of business processes and management information systems can expedite work. Implementing digital transformation is necessary to remain competitive, so the Company or institution needs to adopt the latest technology in their operations.

In the Company's organizational structure, the party responsible for information technology management is the Corporate Planning and Engineering function, within the Division of Performance, Corporate, and Information Technology Planning. Their main duties and authorities broadly relate to managing and aligning Information Technology with the Company's needs to ensure business success and accountability.

IT Road Map

In 2025, PT PLN Energi Gas focused the IT division on strengthening governance foundations and fulfilling network infrastructure needs across all units of PT PLN Energi Gas. The strengthening of governance foundations involves standardizing internal regulations through the Board of Directors Regulation No. 0009.P/DIR/2025 on Guidelines and General Policy for Information Technology Governance within PT PLN Energi Gas. Furthermore, network infrastructure fulfilment has been completed at the Operations and Maintenance Management Unit located in Samarinda, considering security via firewall routers. This serves as a stepping stone for implementing enhanced cybersecurity and strengthening operational reliability, targeted for completion by 2026.

In 2026, IT also targets the completion of the 2026-2030 Information Technology Strategic Plan as a guideline and roadmap for long-term IT work programs.

Strategi dan Program Kerja TI

Implementasi TI telah mendukung pencapaian tujuan strategis perusahaan dengan memastikan kelangsungan operasional dan mempercepat proses pelayanan PLN Energi Gas. Program kerja TI disusun berdasar target rencana jangka panjang perusahaan dimana TI dapat dioptimalkan lebih lanjut untuk meningkatkan efisiensi, keandalan, dan responsivitas Perusahaan terhadap perubahan pasar dan teknologi yang terus berkembang.

Kesinambungan program kerja, realisasi, dan target RJPP dalam ranah teknologi informasi PLN Energi Gas menjadi tonggak penting dalam perjalanan transformasi digital Perusahaan.
Pada tahun 2025, sebanyak 2 program kerja dikerjakan dengan rincian 2 program kerja yang sudah terencana pada RJPP.
Adapun strategi di bidang TI yang telah dilakukan Perusahaan selama tahun 2025 antara lain:

1) Penguatan Tata Kelola Teknologi Informasi di Lingkungan PT PLN Energi Gas.
2) Implementasi Infrastruktur Jaringan Setiap Unit PT PLN Energi Gas.

IT Strategy and Work Programs

IT implementation has supported the achievement of the Company's strategic objectives by ensuring operational continuity and accelerating the service processes of PLN Energi Gas. IT work programs are developed based on the Company's long-term plan targets, where IT can be further optimized to enhance efficiency, reliability, and responsiveness to evolving market and technological changes.

Work programs continuity, realization, and RJPP targets within the information technology domain of PLN Energi Gas serve as important milestones in the Company's digital transformation journey.
In 2025, PLN Energi Gas carried out two work programs, both of which were already planned in the RJPP.
The IT strategies implemented by the Company during 2025 include the following:

1. Strengthening Information Technology Governance within PT PLN Energi Gas.
2. Implementation of Network Infrastructure in Each Unit of PT PLN Energi Gas.

Arah Pengembangan TI

Arah pengembangan TI PT PLN Energi Gas berorientasi pada digitalisasi proses bisnis yang mampu mendukung efisiensi operasional bisnis. Pada tahun 2025 TI memulai inisiatif strategis dengan pekerjaan TI meliputi:

1. Penyusunan Rencana Strategis Teknologi Informasi 2026 - 2030 sebagai blueprint arah perkembangan teknologi Perusahaan jangka panjang yang selaras dengan RJP Perusahaan.
2. Pengembangan aplikasi *Enterprise Resource Planning* (ERP) berupa modul *Human Capital Information System* (HCIS) dan *Financial Management* (FM) guna optimalisasi proses bisnis internal.
3. Pengembangan sistem *Computerized Maintenance Management System* (CMMS) untuk efisiensi pemeliharaan aset dan fasilitas gas.
4. Implementasi *Unified Endpoint Management* (UEM) untuk keamanan dan manajemen perangkat kerja.

IT Development Direction

PT PLN Energi Gas provides direction for IT development oriented towards digitization of business processes that can support operational efficiency. In 2025, IT began strategic initiatives with the following IT work:

1. Preparation of the 2026-2030 Information Technology Strategic Plan as a blueprint for the Company's long-term technology development direction, aligned with the Company's Long-Term Corporate Plan (RJP).
2. Development of Enterprise Resource Planning (ERP) applications including the Human Capital Information System (HCIS) and Financial Management (FM) modules to optimize internal business processes.
3. Development of a Computerized Maintenance Management System (CMMS) for efficient maintenance of gas assets and facilities.
4. Implementation of Unified Endpoint Management (UEM) for security and management of work devices.

5. Revamp website korporat untuk meningkatkan citra digital, transparansi, dan aksesibilitas informasi.

5. Corporate website revamp to enhance digital image, transparency, and information accessibility.

Penguatan Keamanan Dunia Maya (*Cyber Security*)

Seiring dengan perkembangan zaman yang semakin maju, dan teknologi informasi berkembang dengan pesat, namun terdapat risiko yaitu semakin tingginya ancaman Keamanan Teknologi Informasi/*Cyber Security* yang dihadapi seperti virus/*malware*, *hacker, spyware*, PLN Energi Gas melakukan kegiatan pemeliharaan dan sosialisasi keamanan IT security antara lain dengan melakukan implementasi pengamanan yang berlapis. Dengan salah satu pengembangan TI yang bertujuan memperkuat keamanan digital, terutama dari ancaman siber dan pencurian data.

Pengelolaan Keamanan Informasi telah diatur di dalam Peraturan Direksi Peraturan Direksi No. 0009.P/DIR/2025 tentang Pedoman dan Kebijakan Umum Tata Kelola Teknologi Informasi di Lingkungan PT PLN Energi Gas bagian Pengelolaan Keamanan Informasi Teknologi Informasi.

Pada infrastruktur jaringan di PLN Energi Gas, telah mengimplementasikan penguatan keamanan berupa firewall router pada kantor pusat dan setiap kantor cabang/*site* untuk menyaring ancaman-ancaman yang masuk ke dalam jaringan PLN Energi Gas. Kemudian jaringan pada PLN Energi Gas akan mengimplementasikan konsep *site-to-site* VPN untuk melindungi data yang berjalan di dalam jaringan.

Strengthening Cyber Security

As times progress and information technology advances rapidly, there are risks, namely the increasing threat to Information Technology Security/Cyber Security, such as viruses/malware, hackers, and spyware. PLN Energi Gas carries out IT security maintenance and awareness activities, including implementing layered security measures. This is part of IT development aimed at strengthening digital security, especially against cyber threats and data theft.

Information Security Management is regulated under the Board of Directors Regulation No. 0009.P/DIR/2025 concerning General Guidelines and Policies for Information Technology Governance within PT PLN Energi Gas, specifically the Information Technology Information Security Management section.

In PLN Energi Gas network infrastructure, security has been strengthened by implementing firewall routers at the head office and each branch office/site to filter threats entering the PLN Energi Gas network. Furthermore, PLN Energi Gas network is going to apply site-to-site VPN concept to protect data transmitted over the network.

Risiko Utama TI dan Mitigasinya

PLN Energi Gas melaksanakan identifikasi terhadap adanya potensi risiko pada pengelolaan TI Perusahaan. Segala risiko yang berpotensi dapat mempengaruhi kegiatan dan pencapaian kinerja TI telah diketahui dan disiapkan mitigasinya. Adapun beberapa risiko utama dan upaya mitigasinya dalam pengelolaan TI Perusahaan adalah sebagai berikut:

Key IT Risks and The Mitigation

PLN Energi Gas identifies potential risks in the Company's IT management. All risks that may affect IT activities and performance have been identified and mitigation measures have been prepared. The main risks and mitigation efforts in the Company's IT management are as follows:

Risiko Utama TI Main IT Risks	Deskripsi Risiko Risk Description	Tindakan Mitigasi Mitigation Actions
Kelemahan Tata Kelola & Kepatuhan TI IT Governance & Compliance Weaknesses	Risiko ketidakselarasan operasional TI dengan regulasi yang berlaku Risk of IT operational misalignment with applicable regulations	Telah selesai menyusun Peraturan Direksi No. 0009.P/DIR/2025 tentang Pedoman dan Kebijakan Umum Tata Kelola Teknologi Informasi di Lingkungan PT PLN Energi Gas sebagai payung hukum utama TI Completed the drafting of Directors' Regulation No. 0009.P/DIR/2025 concerning Guidelines and General Policies for Information Technology Governance within PT PLN Energi Gas as the primary IT legal framework.
Ancaman Keamanan Siber Cybersecurity Threats	Risiko berupa peretasan, kebocoran data, atau interupsi jaringan Risk of hacking, data breaches, or network disruptions	Telah menyediakan infrastruktur jaringan yang dilengkapi dengan *firewall router* pada Unit Pengelolaan Operasi dan Pemeliharaan Samarinda Provision of network infrastructure equipped with a firewall router at the Samarinda Operations and Maintenance Management Unit.
Keterlambatan *Deployment System* System Delays	Risiko kegagalan atau keterlambatan implementasi proyek-proyek TI strategis yang direncanakan Risk of failure or delay in the implementation of planned strategic IT projects	Menjadi target KPI untuk bidang TI proyek pengembangan ERP dan CMMS pada tahun 2026 Became the KPI target for the IT sector of the ERP and CMMS development project by 2026.

Implementasi *Disaster Recovery Plan*

Implementasi *Disaster Recovery Planning* (DRP) ditargetkan selesai pada tahun 2026 sebagai bagian dari *Business Continuity Management* (BCM) guna menjamin keberlangsungan layanan TI dalam kondisi darurat. Implementasi DRP mencakup penetapan skenario kondisi darurat, mekanisme *Crisis Management Team* (CMT), serta penetapan target waktu pemulihan (RTO) untuk layanan TI kritikal.

Dalam pelaksanaannya, perusahaan memastikan kesiapan sumber daya pemulihan, termasuk ketersediaan perangkat cadangan, backup data dan konfigurasi, serta kesiapan personel yang tergabung dalam *Disaster Recovery Team*. Proses pemulihan dilakukan secara bertahap mulai dari asesmen kondisi, pemulihan layanan dasar, hingga normalisasi operasional secara menyeluruh.

Disaster Recovery Plan Implementation

The implementation of Disaster Recovery Planning (DRP) is targeted for completion by 2026 as part of Business Continuity Management (BCM) to ensure the continuity of IT services during emergencies. This implementation encompasses the establishment of emergency scenarios, Crisis Management Team (CMT) mechanisms, and Recovery Time Objectives (RTO) for critical IT services.

In executing this plan, the company ensures the readiness of recovery resources, including the availability of backup hardware, data and configuration backups, and the preparedness of personnel within the Disaster Recovery Team. The recovery process is carried out in stages, ranging from situation assessment and the restoration of basic services to the full normalization of operations.

Sumber Daya Manusia
Human Resources

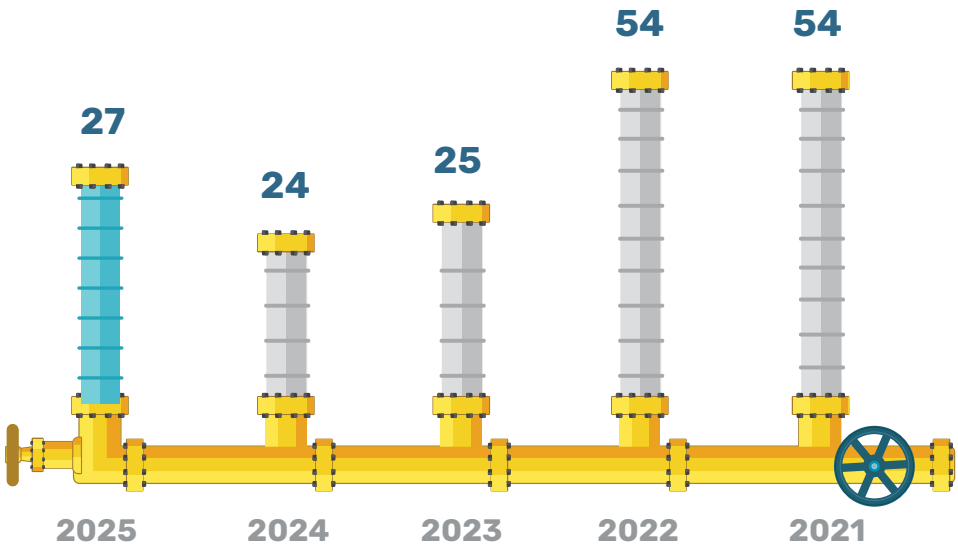
Profil dan Komposisi SDM

Hingga 31 Desember 2025, jumlah pekerja PLN Energi Gas sebanyak 167 orang di kantor pusat dan maupun Unit Pelaksana, yang terdiri dari 26 tugas karya PLN Holding dan PLN Grup, 1 pegawai organik, dan 140 tenaga alih daya. Jika dibandingkan dengan jumlah pegawai tetap tahun 2024 sebanyak 24 pegawai, terdapat peningkatan menjadi 2 pegawai pada tahun 2025.

HR Profile and Composition

As of December 31, 2025, PLN Energi Gas had 167 employees at the head office and operational units, consisting of 26 employees seconded from PLN Holding and PLN Group, 1 permanent employee, and 140 outsourced workers. Compared to the 24 permanent employees in 2024, there was an increase to 27 employees in 2025.

Grafik Pegawai Tetap PT PLN Energi Gas Tahun 2021-2025 (orang)
Chart of Permanent Employees at PT PLN Energi Gas 2021-2025 (person)



Informasi lebih lanjut mengenai komposisi pekerja telah disampaikan pada bagian Profil Perusahaan.

Further information on workforce composition is available in the Company Profile section.

Tenaga Alih Daya

PT PLN Energi Gas melaksanakan pengelolaan Tenaga Alih Daya (TAD) berdasarkan Edaran Direksi Nomor 0013.E/DIRGG/2025 tentang Standar Prosedur Pengelolaan Alih Daya di Lingkungan PT PLN Gas & Geothermal. Sepanjang tahun 2025, PLN

Outsourced Workers

PT PLN Energi Gas manages outsourced workers based on the Board of Directors Circular No. 0013.E/DIRGG/2025 concerning Standard Procedures for Outsourcing Management within PT PLN Gas & Geothermal. Throughout 2025, PLN Energi Gas

Energi Gas bekerja sama dengan beberapa penyedia tenaga alih daya, antara lain PT Haleyora Powerindo dan PT Paguntaka Cahaya Nusantara.

Total tenaga alih daya yang dikelola sebanyak 140 orang, yang terdiri dari TAD administrasi serta TAD jasa pemborongan (*operator, driver, cleaning service, dan office boy*). Pengelolaan tenaga alih daya dilakukan dengan memperhatikan prinsip efektivitas, efisiensi, serta kepatuhan terhadap kebijakan dan regulasi ketenagakerjaan yang berlaku.

collaborates with several outsourced worker providers, including PT Haleyora Powerindo and PT Paguntaka Cahaya Nusantara.

The Company manages a total of 140 outsourced workers, consisting of administrative TAD and contracted service TAD (operators, drivers, cleaning services, and office boys). The Company manages the outsourced workers by observing the principles of effectiveness, efficiency, and compliance with applicable labor policies and regulations.

Kebijakan Pengelolaan SDM

Kebijakan terkait pengelolaan SDM di PLN Energi Gas antara lain:

1. Peraturan Direksi PT PLN Energi Gas Nomor 0027.P/ DIREG/2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja PT PLN Energi Gas;
2. Peraturan Direksi PT PLN Energi Gas Nomor 0006.P/DIREG/2025 tentang *Human Capital Management* System;
3. Peraturan Direksi PT PLN Energi Gas Nomor 0026.P/DIREG/2025 tentang Sistem Manajemen Penghargaan Pegawai PT PLN Energi Gas;
4. Peraturan Direksi PT PLN Energi Gas Nomor 0007.P/DIREG/2025 tentang Sistem Manajemen Talenta dan Pegawai;
5. Peraturan Direksi PT PLN Energi Gas Nomor 0008.P/DIREG/2025 tentang Sistem Manajemen Kinerja Pegawai;
6. Peraturan Direksi PT PLN Energi Gas Nomor 0011.P/DIREG/2025 tentang Sistem Manajemen Akuisisi Pegawai;
7. Keputusan Direksi PT PLN Energi Gas di Luar Rapat Direksi (Sirkuler) Nomor 0026.K/DIREG/2024 tentang Sistem Remunerasi Pegawai Tugas Karya dari Selain PLN Holding;
8. Edaran DIreksi PT PLN Energi Gas Nomor 0002.E/ DIR/2022 tentang Standar Prosedur Sistem Manajemen Penghargaan Pegawai Tugas Karya dari PT PLN (Persero) di Lingkungan PT PLN Energi Gas;
9. Keputusan Direksi PT PLN Energi Gas Nomor 0004.K/ DIR/2022 tentang Penetapan Tarif Penghargaan Pegawai Tugas Karya dari PT PLN (Persero) di Lingkungan PT PLN Energi Gas;

HR Management Policy

Policies regarding HR management at PLN Energi Gas include the following:

1. PT PLN Energi Gas' Board of Directors Regulation No.0027.P/DIREG/2025 concerning Organization and Work Procedures of PT PLN Energi Gas;
2. PT PLN Energi Gas' Board of Directors Regulation No.0006.P/DIREG/2025 concerning Human Capital Management System;
3. PT PLN Energi Gas' Board of Directors Regulation No.0026.P/DIREG/2025 concerning Employee Reward Management System of PT PLN Energi Gas;
4. PT PLN Energi Gas' Board of Directors Regulation No.0007.P/DIREG/2025 concerning Talent and Employee Management System;
5. PT PLN Energi Gas' Board of Directors Regulation No.0008.P/DIREG/2025 concerning Employee Performance Management System;
6. PT PLN Energi Gas' Board of Directors Regulation No.0011.P/DIREG/2025 concerning Employee Acquisition Management System;
7. PT PLN Energi Gas' Board of Directors Decision Outside Board Meeting (Circular) Number 0026.K/ DIREG/2024 concerning Remuneration System for Assigned Employees from Non-PLN Holding;
8. PT PLN Energi Gas Board of Directors Circular No. 0002.E/DIR/2022 concerning Standard Procedures for the Reward Management System for Assigned Employees from PT PLN (Persero) within PT PLN Energi Gas;
9. PT PLN Energi Gas' Board of Directors Decree No.0004.K/DIR/2022 concerning Determination of Reward Rates for Assigned Employees from PT PLN (Persero) within PT PLN Energi Gas;

10. Keputusan Direksi PT PLN Energi Gas di Luar Rapat Direksi (Sirkuler) Nomor 0026.K/DIREG/2024 tentang Sistem Remunerasi Pegawai Tugas Karya dari Selain PLN *Holding*.

Perseroan berkomitmen untuk meningkatkan kompetensi pegawai melalui program sertifikasi di dalam negeri maupun luar negeri. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas teknis dan manajerial pegawai yang bertujuan agar pegawai siap menghadapi tantangan industri energi yang terus berkembang. Perusahaan telah melaksanakan sertifikasi maupun diklat kepada Pegawai berdasarkan dahan kompetensi pegawai. Hingga akhir tahun 2025 realisasi sertifikasi dan diklat yang telah dilaksanakan berjumlah 41 atau sebesar 100% dari target yang direncanakan.

Hingga akhir tahun 2025 realisasi sertifikasi dan diklat yang telah dilaksanakan berjumlah 41. Dengan realisasi biaya yang telah dikeluarkan sebesar Rp 609.259.522 atau 96,21% dari anggaran yang telah direncanakan sebesar Rp 633.250.000.

10. PT PLN Energi Gas' Board of Directors Decision Outside Board Meeting (Circular) Number 0026.K/DIREG/2024 concerning Remuneration System for Assigned Employees from Non-PLN Holding.

The Company is committed to enhancing employee competency through certification programs domestically and abroad. This program aims to improve employees' technical and managerial capacity so that they are ready to face the ever-evolving challenges of the energy industry. The Company has carried out certification and training for employees based on their competency branches. As of the end of 2025, the realization of certification and training conducted amounted to 41, or 100% of the planned target.

As of the end of 2025, the realized certification and training conducted amounted to 41. The realized costs incurred were Rp609,259,522, or 96.21% of the planned budget of Rp633,250,000.

Tabel target dan realisasi diklat dan sertifikasi tahun 2025
Table of targets and realization of training and certification in 2025

No.	Judul Title	Penyelenggara Organizer	Jumlah Peserta Total Participant
	Pelatihan		
1	Seminar K3 OHS Seminar	Akualita	1
2	*Basic* LNG	*Indonesian Gas Society*	1
3	Analisis Laporan Keuangan	IAI	1
4	*Fundamentals of IT Auditing*	*Institute of Internal Auditors*	1
5	Audit Investigasi Investigation Audit	YPIA	1
6	*Internal Control Over Financial Reporting* (ICOFR)	Ikatan Akuntan Indonesia Indonesian Institute of Accountants	1
7	Pelatihan Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan 2025 Training to Strengthen National Values 2025	CIDesICMI	1
8	*Project Management Profesional*	*Avenew Group*	2
9	Pelatihan Stakeholder Management Training of Stakeholder Management	*Traineed Indonesia Solutions*	1
	Sertifikasi		
1	*Certified Balanced Scorecard Management System Professional*	*The KPI Institute*	2
2	Ahli K3 Umum General Occupational Health and Safety Expert	BNSP	2
3	Penanggung Jawab Pengendalian Pencemaran Air (PPPA) Person in Charge of Water Pollution Control (PPPA)	BNSP	1
4	Sertifikasi Kompetensi Kepala Teknik Dan Wakil Kepala Teknik Migas Competency Certification for Head of Engineering and Deputy Head of Engineering for Oil and Gas	PPSDM MIGAS	1

5	*Qualified Risk Governance Professional (QRGP)*	LSP MKS (BNSP)	3
6	*Qualified Chief Risk Officer (QCRO)*	LSP MKS (BNSP)	1
7	Pelaksana Program Pemberdayaan Masyarakat Community Empowerment Program Executive	LSP RLI (BNSP)	2
8	*Certified Procurement Officer Fundamental*	LPKN (BNSP)	3
9	*Certified International Procurement Professional* (CIPP)	IPSCMI	1
10	*Certified Procurement Specialist* (CPSP)	LPKN (BNSP)	1
11	Sertifikasi Supervisor Kelistrikan Migas Oil and Gas Electrical Supervisor Certification	PPSDM MIGAS	1
12	Sertifikasi Ahli Inspektur Sistem Alat Ukur Dan Serah Terima Migas Oil and Gas Measurement and Handover System Inspector Expert Certification	PPSDM MIGAS	1
13	*Qualified Risk Management Professional* (QRMP)	LSP MKS (BNSP)	4
14	Sertifikasi Kehumasan Public Relations Certification	BNSP	1
15	Auditor Hukum	LSP Auditor Hukum Indonesia (BNSP) Indonesian Legal Auditor LSP (BNSP)	1
16	*Certified Energy Risk Associate* (CERA)	LSP Manajemen Risiko Terintegrasi Energi Kelistrikan (BNSP) Integrated Electricity Risk Management LSP (BNSP)	1
17	*Qualified Internal Auditor* (QIA)	PIA	1
18	*Certified Risk Management Officer* (CRMO)	LSP MKS (BNSP)	1
19	Sertifikasi Operator Muda Operasi Produksi Certification of Junior Production Operations Operator	PPSDM MIGAS	1
20	Inspektur Instalasi Pipa Penyalur Migas Oil and Gas Pipeline Installation Inspector	PPSDM MIGAS	1
21	Penanggung Jawab Pengelolaan Limbah Bahan Bahaya dan Beracun (PPLB3) Person in Charge of Hazardous and Toxic Waste Management (PPLB3)	LSP Pengendalian Pencemaran Lingkungan (BNSP) Environmental Pollution Control LSP (BNSP)	1

Sistem Penghargaan dan Manajemen Talenta Pegawai

PT PLN Energi Gas mempersiapkan dan mengelola sumber daya manusia yang profesional, kompeten dan berintegritas tinggi untuk mendukung operasional, kelangsungan bisnis dan peningkatan kinerja dan pencapaian visi Perusahaan. PLN Energi Gas melaksanakan sistem Penghargaan dengan Peraturan Direksi PT PLN Energi Gas Nomor 0007.P/DIREG/2025 tentang Sistem Manajemen Talenta dan Pegawai dan Peraturan Direksi Nomor 0026.P/DIREG/2025 tentang Sistem Manajemen Penghargaan Pegawai PT PLN Energi Gas .

Employees Reward and Talent Management System

PT PLN Energi Gas prepares and manages professional, competent, and highly integrity human resources to support operations, business continuity, and performance improvement and achievement of the Company's vision. PLN Energi Gas implements the Reward System based on PT PLN Energi Gas' Board of Directors Regulation No.0007.P/DIREG/2025 concerning Talent and Employee Management System and Board of Directors Regulation Number 0026.P/DIREG/2025 concerning Employee Reward Management System of PT PLN Energi Gas.

Human Capital Readiness (HCR) dan *Organizational Capability Readiness* (OCR)

Human Capital Readiness (HCR) merupakan indikator kesiapan kapasitas dan kapabilitas SDM dalam mendukung implementasi strategi perusahaan. Pada tahun 2025, PLN Energi Gas berhasil mencapai target HCR dengan 100% pegawai telah mengikuti diklat atau sertifikasi yang relevan dengan kebutuhan perusahaan. Pencapaian ini mencerminkan komitmen perusahaan dalam meningkatkan kompetensi SDM guna memastikan efektivitas operasional dan pencapaian target bisnis secara optimal.

Sedangkan *Organizational Capability Readiness* (OCR) merupakan indikator yang menggambarkan kesiapan organisasi dalam mengintegrasikan dan menyelaraskan faktor-faktor yang mendorong perbaikan serta pembelajaran berkelanjutan untuk mendukung agenda perubahan melalui implementasi strategi perusahaan. Sesuai dengan petunjuk teknis KPI PT PLN Energi Gas tahun 2025, OCR diukur berdasarkan empat aspek utama, yaitu:

- *OCR Alignment* – Mengukur keselarasan antara kinerja individu dan kinerja korporat dalam mendukung pencapaian tujuan perusahaan.
- *OCR Leadership* – Mengukur ketersediaan pemimpin yang berkualitas sebagai eksekutor strategi perusahaan.
- *OCR Culture* – Membentuk perilaku dan menciptakan iklim kerja yang kondusif guna mendukung eksekusi strategi bisnis.
- *OCR Business Ecosystem* - Mengukur kesiapan modal *human capital* dalam berperan aktif dan memberi nilai dalam ekosistem bisnis tempat perusahaan beroperasi.

Pada tahun 2025, PT PLN Energi Gas berhasil mencapai 100% pencapaian OCR, yang ditunjukkan melalui implementasi sistem manajemen kinerja, pelaksanaan program pengembangan talenta, serta survei *engagement* pegawai. Keberhasilan atas tercapainya HCR dan OCR ini mencerminkan kesiapan sumber daya manusia dan kapabilitas organisasi telah sepenuhnya memenuhi target yang ditetapkan, sehingga perusahaan dinilai siap mendukung pencapaian kinerja dan program strategis. Selain itu juga mencerminkan daya

Human Capital Readiness (HCR) and Organizational Capability Readiness (OCR)

Human Capital Readiness (HCR) is an indicator of the readiness of HR capacity and capability in supporting the implementation of the Company's strategy. In 2025, PLN Energi Gas successfully achieved its HCR target with 100% of employees having participated in training or certification relevant to the Company's needs. This achievement reflects the Company's commitment to improving HR competency to ensure operational effectiveness and the optimal achievement of business targets.

Meanwhile Organizational Capability Readiness (OCR) is an indicator that describes the organization's readiness to integrate and align factors that drive improvement and continuous learning to support the change agenda through the implementation of the Company's strategy. In accordance with the KPI technical guidelines of PT PLN Energi Gas for 2025, OCR is measured based on four main aspects, namely:

- OCR Alignment– Measuring the alignment between individual performance and corporate performance in supporting the achievement of the Company goals.
- OCR Leadership– Measuring the availability of quality leaders as executors of the Company strategy.
- OCR Culture– Shaping behavior and creates a conducive work climate to support the execution of the business strategy.
- OCR Business Ecosystem- Measuring the readiness of human capital in playing an active role and providing value in the business ecosystem where the Company operates.

In 2025, PT PLN Energi Gas achieved 100% OCR attainment, as demonstrated through the implementation of a performance management system, implementation of talent development programs, and employees engagement surveys. The achievement of HCR and OCR reflects that the readiness of human resources and organizational capabilities have fully met the set targets, so the Company is deemed ready to support performance achievement and strategic programs. It also reflects the organization's resilience and readiness to face

tahan dan kesiapan organisasi dalam menghadapi perubahan serta meningkatkan kapabilitas internal untuk mencapai target bisnis secara berkelanjutan.

Survei Kepuasan Pegawai

Untuk meningkatkan kenyamanan Pegawai dalam bekerja, Perseroan melakukan *Employee Engagement Survey* secara berkala setiap tahun. Implementasi program ini diharapkan akan berdampak pada peningkatan kepuasan Pegawai terhadap Perusahaan, hasil *Employee Engagement Survey* tahun 2025 sebesar 95,1% di mana tingkat capaian *Employee Engagement Survey* tahun 2024 sebesar 81%. Hal ini menunjukkan peningkatan tingkat keterikatan dan kepuasan pegawai terhadap perusahaan. Sebagai tindak lanjut atas survei dan bentuk komitmen perusahaan dalam menciptakan lingkungan kerja yang sehat, kolaboratif, dan produktif PLN Energi Gas menginisiasikan. kegiatan/ program antara lain :

1. CoC: Internalisasi Kebijakan SDM
2. *Coaching Clinic*
3. Forum Sharing Internal
4. *Employee's award*
5. *Employee Health Program*
6. Sertifikasi/ Pelatihan
7. *Talent Acquisition Planning*

Rencana Pengembangan SDM

Sebagai bentuk tanggung jawab Perusahaan dalam membentuk SDM yang unggul, dan sebagai langkah dalam memberdayakan dan mengembangkan SDM. PLN Energi Gas menginisiasi beberapa program ke depan antara lain:

1. Program Penguatan Budaya Perusahaan, sebagai upaya internalisasi nilai dan budaya kerja yang selaras dengan visi dan misi perusahaan guna mendorong terciptanya perilaku kerja yang unggul, kolaboratif, dan berorientasi pada pencapaian target strategis perusahaan.
2. Pengembangan *Career Path* Pegawai, melalui penyusunan jalur karier yang terstruktur, transparan, dan berbasis kompetensi sebagai bentuk pengelolaan talenta untuk mendukung pengembangan karier pegawai secara berkelanjutan serta pemenuhan kebutuhan organisasi.

changes and improve internal capabilities to achieve business targets sustainably.

Employee Satisfaction Survey

To improve employee satisfaction at work, the Company conducts annual Employee Engagement Survey. This program is expected to result in increased employee satisfaction with the Company. The 2025 Employee Engagement Survey results were 95.1%, compared to the 2024 Employee Engagement Survey results of 81%. This indicates an increase in employee engagement and satisfaction with the company. As a follow-up to the survey and as a manifestation of the company's commitment to creating a healthy, collaborative, and productive work environment, PLN Energi Gas has initiated the following activities/programs:

1. CoC: Internalization of HR Policies
2. Coaching Clinic
3. Internal Sharing Forum
4. Employee Awards
5. Employee Health Program
6. Certification/Training
7. Talent Acquisition Planning

HR Development Plan

The Company actualizes responsibility in building excellent human resources, and as a step in empowering and developing human resources. PLN Energi Gas initiates several future programs including:

1. Corporate Culture Strengthening Program, as an effort to internalize values and work culture that are aligned with the Company's vision and mission to encourage the creation of excellent, collaborative work behavior oriented towards achieving the Company's strategic targets.
2. Employee Career Path Development, through the preparation of a career path that is structured, transparent, and competency-based as a form of talent management to support sustainable employee career development and fulfilment of organizational needs.

3. Program *Leadership* dan *Coaching* Pegawai, melalui penguatan kapasitas kepemimpinan di seluruh level organisasi, termasuk implementasi coaching dan mentoring guna meningkatkan efektivitas kinerja, pengembangan potensi individu, serta kesiapan pegawai dalam menghadapi tantangan bisnis perusahaan.
4. Program Peningkatan Kompetensi Pegawai, yang disusun berdasarkan kebutuhan kompetensi jabatan (*job competency requirement*) guna memastikan kesiapan SDM dalam mengeksekusi program strategis perusahaan, mendukung transformasi bisnis, serta meningkatkan daya saing perusahaan secara berkelanjutan.

Pengelolaan Dana Pensiun

Perseroan berkomitmen untuk menjamin kesejahteraan finansial pegawai setelah masa pensiun melalui sistem pengelolaan dana pensiun yang aman, transparan, dan berkelanjutan. Keberhasilan pengelolaan dana pensiun tidak hanya ditentukan oleh kontribusi perusahaan dan pegawai, tetapi juga oleh strategi investasi yang efektif serta kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku.

Perusahaan mengelola dana pensiun melalui dua skema, yaitu Dana Pensiun PLN dan Dana Pensiun lembaga Keuangan (DPLK), dengan rincian partisipasi pegawai sampai dengan akhir tahun 2024 sebagai berikut:

- Dana Pensiun PT PLN (Persero) : 15 pegawai
- DPLK (BRI, BNI) : 12 pegawai

Kontribusi perusahaan dalam pengelolaan dana pensiun, atau yang dikenal sebagai Iuran Pemberi Kerja (IPK), ditetapkan sebesar 19,14% untuk Dana Pensiun PLN dan 4% untuk DPLK. Sementara itu, pegawai berkontribusi melalui pemotongan penghasilan rutin sebesar 6% dari P1 (*Pay for Person*). Dengan demikian, total iuran pensiun pegawai adalah 23,14% bagi peserta Dana Pensiun PLN dan 10% bagi peserta DPLK. Melalui mekanisme ini, PLN Energi Gas memastikan kesiapan finansial pegawai di masa pensiun serta menciptakan kesejahteraan jangka panjang yang berkelanjutan bagi seluruh karyawan.

3. Employee Leadership and Coaching, through strengthening leadership capacity at all levels of the organization, including the implementation of coaching and mentoring to improve performance effectiveness, develop potential individuals, and employee readiness in facing the Company's business challenges.
4. Employee Competency Enhancement Program, which is prepared based on position competency requirements(job competency requirement)to ensure HR readiness in executing the Company's strategic programs, supporting business transformation, and continuously enhancing the Company's competitiveness.

Pension Fund Management

The Company is committed to ensuring employees' financial well-being after retirement through a pension fund management system that is safe, transparent, and sustainable. The success of pension fund management is determined not only by company and employee contributions but also by effective investment strategies and compliance with applicable regulations.

The Company manages pension funds through two schemes, namely the PLN Pension Fund and the Financial Institution Pension Fund (DPLK), with details of employee participation as of the end of 2024 as follows:

- PT PLN (Persero) Pension Fund: 15 employees
- DPLK (BRI, BNI) : 12 employees

The Company contributes to pension fund management, known as the Employer Contribution (Employer Contributions /IPK), is set at 19.14% for the PLN Pension Fund and 4% for DPLK. Meanwhile, employees contribute through regular income deductions of 6% from P1 (Pay for Person). Thus, the total employee pension contribution is 23.14% for PLN Pension Fund participants and 10% for DPLK participants. Through this mechanism, PLN Energi Gas ensures employees' financial readiness for retirement and creates sustainable long-term welfare for all employees.

Insentif Jangka Panjang Pegawai

Insentif Jangka panjang pegawai PLN Energi Gas pada tahun 2025 berdasarkan Peraturan Direksi PT PLN Energi Gas Nomor 0026.P/DIREG/2025 tentang Sistem Manajemen Penghargaan Pegawai PT PLN Energi Gas dan Edaran Direksi Nomor 0002.E/DIR/2022 tentang Standar Prosedur Sistem Manajemen Penghargaan Pegawai Tugas Karya dari PT PLN (Persero) di Lingkungan Perseroan, dengan jumlah pegawai yang mendapatkan cuti besar sebanyak 4 orang dan cuti winduan sebanyak 1 orang. pada tahun 2025 Perseroan belum menerapkan insentif jangka panjang pegawai.

Employee Long-Term Incentives

PLN Energi Gas employee long-term incentives in 2025 are based on PT PLN Energi Gas Board of Directors Regulation No. 0026.P/DIREG/2025 concerning the Employee Reward Management System of PT PLN Energi Gas and Board of Directors Circular No. 0002.E/DIR/2022 concerning Standard Procedures for the Employee Reward Management System for Work Assignment Employees from PT PLN (Persero) within the Company, with the number of employees receiving long leave being 4 persons and windu leave being 1 person. In 2025, the Company has not yet implemented employee long-term incentives.







Analisis & Pembahasan Manajemen

Management Analysis and Discussion

Analisis Industri
Industry Analysis

Perkembangan Industri Gas dan *Midstream*

Gas alam diposisikan sebagai solusi yang paling terukur dan responsif untuk memenuhi kebutuhan energi yang terus meningkat dan menstabilkan jaringan listrik. Permintaan gas alam secara global meningkat sebesar 78 miliar meter kubik (1,9%) pada tahun 2024, mencapai 4.122 miliar meter kubik (bcm), dan diperkirakan akan terus meningkat pada tahun 2025 sebesar 71 bcm (1,7%), menurut Laporan Gas Global 2025 oleh *International Gas Union* (IGU) dan Snam.

Perdagangan LNG terus tumbuh pada semester pertama tahun 2025, dipimpin oleh kebangkitan kembali di Eropa, di mana impor tumbuh sebesar 16 miliar meter kubik (23,6%) dibandingkan dengan semester pertama tahun 2024. Tren yang diamati menunjukkan bahwa permintaan energi global diperkirakan akan mengikuti tren peningkatan selama dekade berikutnya, terutama menjelang tahun 2030. Konsumsi energi diperkirakan akan melonjak di Tiongkok dan India, sehingga mendorong peningkatan permintaan gas alam, menempatkan Asia sebagai penggerak utama permintaan energi global, yang didukung oleh pertumbuhan di Amerika Utara.

Di tahun 2025 Perkembangan industri gas di Indonesia berhasil mencatatkan surplus pasokan tanpa melakukan impor gas sama sekali. Meskipun menghadapi dinamika transisi energi dan beberapa tantangan operasional hulu, gas alam semakin memantapkan posisinya sebagai "energi jembatan" utama menuju era rendah karbon. Dalam hal ini perlu ditekankan pentingnya infrastruktur energi dan kolaborasi lintas sektor dalam memperkuat pasokan gas domestik guna mendukung pertumbuhan industri sekaligus mewujudkan kedaulatan energi nasional.

Peran sektor *midstream* adalah menjembatani ketidakseimbangan suplai dan permintaan antar wilayah, serta memastikan energi dapat diakses oleh seluruh lapisan industri. integrasi infrastruktur *midstream* merupakan penghubung krusial antara potensi gas bumi di sektor hulu dan kebutuhan besar

Gas and Midstream Industry Developments

Natural gas is positioned as the most measurable and responsive solution to meet the continuously increasing energy demand and stabilize the power grid. Global demand for natural gas increased by 78 billion cubic meters (1.9%) in 2024, reaching 4,122 billion cubic meters (bcm), and is expected to continue increasing in 2025 by 71 bcm (1.7%), according to the Global Gas Report 2025 from the International Gas Union (IGU) and Snam.

LNG trade continues to grow in the first half of 2025, led by a resurgence in Europe, where imports increased by 16 billion cubic meters (23.6%) compared to the first half of 2024. The observed trend indicates that global energy demand is expected to follow an upward trajectory over the next decade, particularly leading up to 2030. Energy consumption is expected to surge in China and India, driving an increase in natural gas demand, positioning Asia as the key driver of global energy demand, supported by growth in North America.

In 2025, the development of the gas industry in Indonesia successfully recorded a supply surplus without gas imports. Despite facing the dynamics of the energy transition and several upstream operational challenges, natural gas is increasingly solidifying its position as the main "bridge fuel" toward a low-carbon era. In this regard, it is crucial to emphasize the significance of energy infrastructure and cross-sector collaboration in strengthening domestic gas supply to support industrial growth while achieving national energy sovereignty.

The role of the midstream sector is to bridge the supply and demand imbalance between regions and ensure that energy is accessible to all layers of industry. The integration of midstream infrastructure is a crucial link between the potential of natural gas in the upstream sector and the significant demand

di sektor hilir. Kolaborasi seluruh pihak dibutuhkan agar manfaat gas bumi tidak hanya dinikmati kawasan industri mapan, tetapi juga menjangkau pusat-pusat pertumbuhan baru. Tanpa dukungan jalur transmisi, pertumbuhan sektor hulu akan stagnan. Tanpa *midstream*, *upstream* tidak bisa tumbuh. Oleh sebab itu, penemuan cadangan gas baru sangat bergantung pada kesiapan jaringan pipa.

in the downstream sector. Collaboration among all parties is needed so that the benefits of natural gas are not only appreciated by established industrial areas but also reach new growth centers. Without the support of transmission lines, the growth of the upstream sector will stagnate. Without midstream, upstream cannot develop. Therefore, the discovery of new gas reserves is highly dependent on the readiness of the pipeline network.

Pertumbuhan Ekonomi Indonesia

Indonesian Economic Growth

Perekonomian Indonesia tahun 2025 berdasarkan besaran Produk Domestik Bruto (PDB) atas dasar harga berlaku mencapai Rp23.821,1 triliun dan PDB per kapita mencapai Rp83,7 juta atau USD 5.083,4. Ekonomi Indonesia tahun 2025 tumbuh sebesar 5,11 persen, lebih tinggi dibandingkan capaian tahun 2024 yang mengalami pertumbuhan sebesar 5,03 persen *(c-to-c)*. Dari sisi produksi, Lapangan Usaha Jasa Lainnya mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 9,93 persen. Sementara dari sisi pengeluaran, Komponen Ekspor Barang dan Jasa mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 7,03 persen.

The Indonesian economy in 2025, based on the Gross Domestic Product (GDP) at current prices, reached Rp23,821.1 trillion and a per capita GDP of Rp83.7 million or US$5,083.4. Indonesia's economy increased by 5.11 percent in 2025, higher than the 5.03 percent increase achieved in 2024 (c-to-c). From the production side, the Other Services Sector experienced the highest increase at 9.93 percent. Meanwhile, from the expenditure side, the Goods and Services Export Component experienced the highest increase at 7.03 percent.

Ekonomi Indonesia triwulan IV-2025 jika dibandingkan dengan triwulan IV-2024 mengalami pertumbuhan sebesar 5,39 persen *(y-on-y)*. Dari sisi produksi, Lapangan Usaha Transportasi dan Pergudangan mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 8,98 persen. Sementara dari sisi pengeluaran, Komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 6,12 persen.

Indonesia's economy in the fourth quarter of 2025, compared to the fourth quarter of 2024, experienced an increase of 5.39 percent (y-on-y). From the production side, the Transportation and Warehousing Business Sector experienced the highest increase at 8.98 percent. Meanwhile, from the expenditure side, the Gross Fixed Capital Formation (PMTB) component experienced the highest increase at 6.12 percent.

Ekonomi Indonesia triwulan IV-2025 jika dibandingkan dengan triwulan III-2025 mengalami pertumbuhan sebesar 0,86 persen *(q-to-q)*. Dari sisi produksi, Lapangan Usaha Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 13,59 persen. Sementara dari sisi pengeluaran, Komponen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (PK-P) mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 37,68 persen.

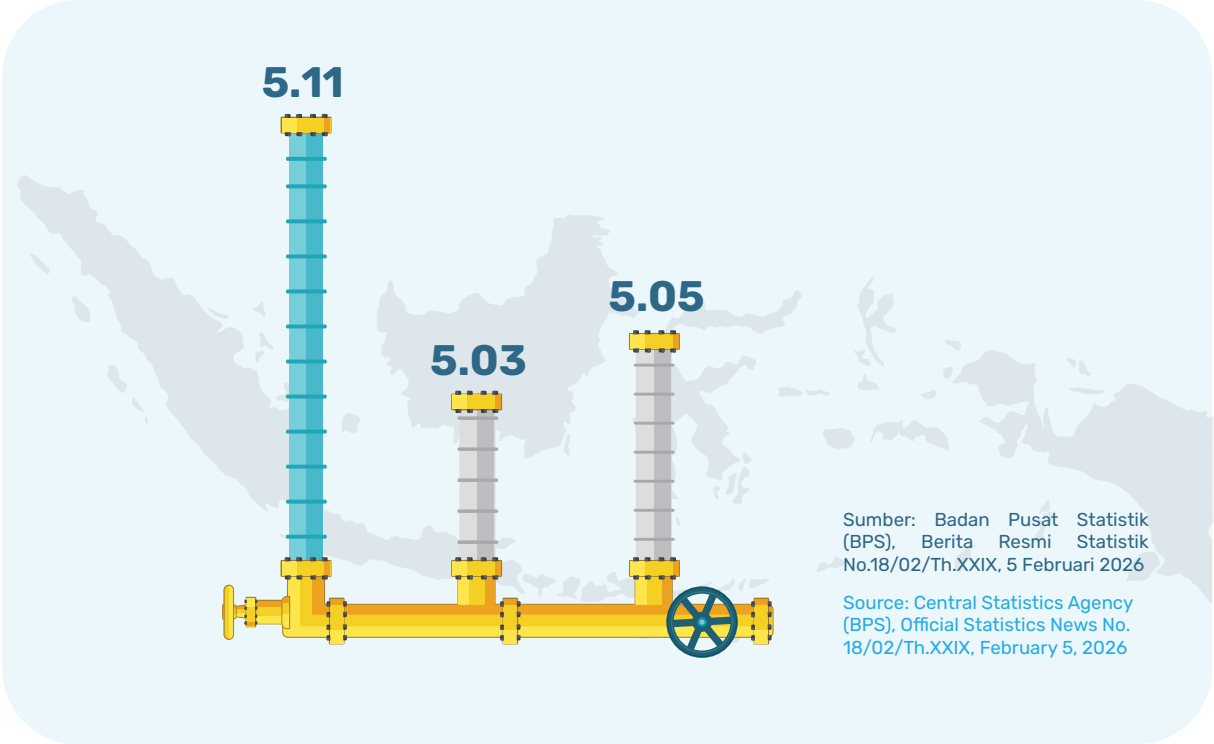
The Indonesian economy in the fourth quarter of 2025, compared to the third quarter of 2025, experienced an increase of 0.86 percent (q-to-q). From the production side, the Government Administration, Defense, and Mandatory Social Security Business Sector experienced the highest increase at 13.59 percent. Meanwhile, from the expenditure side, the Government Consumption Expenditure Component (PK-P) experienced the highest increase at 37.68 percent.

Selama tahun 2025, kelompok provinsi di Pulau Jawa mendominasi ekonomi Indonesia secara spasial dengan kontribusi mencapai 56,93 persen dan mencatat pertumbuhan sebesar 5,30 persen *(c-to-c)*.

During 2025, the group of provinces on the Javaisland spatially dominated Indonesia's economy with a contribution of 56.93 percent and recorded a growth of 5.30 percent (c-to-c).

Tren Pertumbuhan Ekonomi Indonesia (dalam %)

Trend of Indonesia's Economic Growth (in %)



Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), Berita Resmi Statistik No.18/02/Th.XXIX, 5 Februari 2026

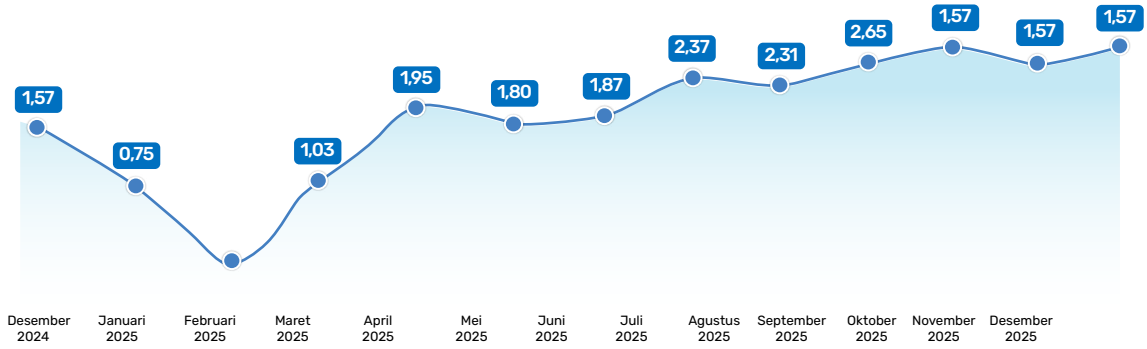
Source: Central Statistics Agency (BPS), Official Statistics News No. 18/02/Th.XXIX, February 5, 2026

Pada Desember 2025 terjadi inflasi *year on year (y-on-y)* sebesar 2,92 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 109,92. Inflasi *y-on-y* tertinggi di tingkat provinsi terjadi di Provinsi Aceh sebesar 6,71 persen dengan IHK sebesar 114,40 dan terendah terjadi di Provinsi Sulawesi Utara sebesar 1,23 persen dengan IHK sebesar 108,60. Sementara itu, inflasi *y-on-y* tertinggi di tingkat kabupaten/kota terjadi di Kota Gunungsitoli sebesar 10,84 persen dengan IHK sebesar 119,24 dan terendah terjadi di Maumere dan Kabupaten Minahasa Utara masing-masing sebesar 0,38 persen dengan IHK masing-masing sebesar 109,62 dan 111,03. Tingkat inflasi *month-to-month (m-to-m)* pada Desember 2025 sebesar 0,64 persen sedangkan tingkat inflasi *year to date (y-to-d)* pada Desember 2025 sebesar 2,92 persen. Tingkat inflasi *y-on-y* komponen inti pada Desember 2025 sebesar 2,38 persen; dengan inflasi m-to-m sebesar 0,20 persen; dan inflasi *y-to-d* sebesar 2,38 persen.

In December 2025, there was a year-on-year (y-o-y) inflation of 2.92 percent with a Consumer Price Index (CPI) of 109.92. The highest y-o-y inflation at the provincial level occurred in Aceh Province at 6.71 percent with a CPI of 114.40, and the lowest in North Sulawesi Province at 1.23 percent with a CPI of 108.60. Meanwhile, the highest y-o-y inflation at the district/city level occurred in Gunungsitoli City at 10.84 percent with a CPI of 119.24, and the lowest in Maumere and North Minahasa Regency at 0.38 percent each with a CPI of 109.62 and 111.03, respectively. The month-to-month (m-to-m) inflation rate in December 2025 was 0.64 percent, while the year-to-date (y-to-d) inflation rate in December 2025 was 2.92 percent. The year-on-year (y-on-y) inflation rate for core components in December 2025 was 2.38 percent, with a month-to-month (m-to-m) inflation of 0.20 percent and a year-to-date (y-to-d) inflation of 2.38 percent.

Perkembangan Inflasi Indonesia Tahun 2023-2025 (dalam %)

Indonesia's Inflation Trends 2023-2025 (in %)



INFLASI TERTINGGI
2,92%
Desember 2025

INFLASI TERENDAH
-0,09%
Februari 2025

Sumber: Badan Pusat Statistik

Peran PLN Energi Gas Dalam Industri *Midstream* Gas

Di tahun 2025 PLN Energi Primer Indonesia (PLN EPI) mempercepat pengembangan proyek LNG *midstream* sebagai strategi menjaga keandalan suplai energi primer sekaligus menekan biaya pokok penyediaan listrik (BPP). Langkah ini penting mengingat kebutuhan listrik nasional terus meningkat, sementara pasokan gas pipa ke sejumlah sistem kelistrikan kian menurun. Proyeksi kebutuhan listrik nasional pada 2034 mencapai 511 TWh, masih didominasi Pulau Jawa namun dengan pertumbuhan signifikan di Kalimantan dan Sulawesi. Sementara itu, pasokan gas pipa terus menurun dan konsumsi BBM untuk pembangkit naik 10-15 persen sejak 2023. PLN EPI mencatat kebutuhan LNG mencapai sekitar 90 kargo dan diproyeksikan meningkat menjadi 104 kargo tahun depan. Dengan kapasitas pembangkit batubara yang tidak dapat bertambah, peningkatan kebutuhan energi tersebut akan dipenuhi dari LNG.

Pengembangan infrastruktur *midstream* LNG menjadi langkah penting dalam mendukung pencapaian *Net Zero Emission* melalui percepatan transisi energi. Di mana pengembangan ini memainkan peran kunci dalam transisi energi menuju pengurangan penggunaan bahan bakar fosil dan dukungan terhadap energi terbarukan. Pengembangan infrastruktur LNG *midstream* dilakukan agar sistem

PLN Energi Gas' Role in the Gas Midstream Industry

In 2025, PLN Energi Primer Indonesia (PLN EPI) accelerated the development of midstream LNG projects as a strategy to maintain the reliability of primary energy supply while also reducing the cost of electricity supply (BPP). This step is important considering national electricity demand continues to increase, while the supply of pipeline gas to several electrical systems is substantially declining. The projection for national electricity demand in 2034 reaches 511 TWh, still dominated by Java Island but with significant growth in Kalimantan and Sulawesi. Meanwhile, the supply of pipeline gas continues to decline, and fuel consumption for power generation has increased by 10-15 percent since 2023. PLN EPI recorded the need for LNG reaching around 90 cargoes and projected to increase to 104 cargoes next year. With the coal power plant capacity unable to increase, the rise in energy demand will be met with LNG.

The development of midstream LNG infrastructure is a crucial step in supporting the achievement of Net Zero Emissions through the acceleration of the energy transition. This development plays a key role in the energy transition toward reducing the use of fossil fuels and supporting renewable energy. The development of midstream LNG infrastructure is carried out so that the supply system can be more

supply bisa lebih fleksibel dan efisien. *Demand* dan *supply* harus terintegrasi. Dalam pengembangannya, proyek LNG *midstream* ke dua fase. Tahap pertama mencakup pembangunan fasilitas suplai di Nias, enam titik di Sulawesi-Maluku, delapan titik di Nusa Tenggara, dan empat titik di Papua Utara. Sejumlah FSRU baru tengah direncanakan antara lain FSRU Jawa Barat 2 di Muara Tawar, serta FSRU di Bali, Cilegon, Kalbar, Kalsel, Kalteng, Pomala, dan Stargate. Keberhasilan eksekusi proyek-proyek tersebut membutuhkan dukungan seluruh mitra dan pemangku kepentingan. PLN Energi Gas sebagai anak usaha PLN Energi Primer Indonesia memainkan peran vital di sektor *midstream* sebagai rantai penghubung utama antara produsen gas hulu dan pembangkit listrik. Perusahaan memastikan rantai pasok energi berjalan efisien, aman, dan tepat sasaran.

Perseroan bertekad untuk menjadi mitra utama dalam menyediakan layanan energi bersih di Indonesia. Hal ini tentunya memiliki tantangan bahwa dalam mewujudkan energi bersih bukanlah hal yang mudah. Namun, dengan tekad yang kuat dan visi yang jelas, serta terciptanya sinergi dan kolaborasi di antara pemangku kepentingan, PLN Energi Gas siap menghadapi tantangan dalam mewujudkan sektor kelistrikan dan energi yang andal di Indonesia. PLN Energi Gas diposisikan PLN EPI sebagai perusahaan infrastruktur gas yang memiliki dua aset infrastruktur gas yang saat ini dikelola secara langsung. Kedua aset tersebut adalah pipa gas Tanjung Batu dan FSRU Amurang.
Dalam rangka usaha mencapai sasaran-sasaran strategis, PLN Energi Gas menginisiasi implementasi program kerja anggaran investasi dan pengembangan usaha berupa *Value Creation* antara lain:

- Penyediaan fasilitas penyimpanan, transportasi, regasifikasi untuk gasifikasi Tarakan, gasifikasi Punagaya, gasifikasi Tanjung Selor, Penyediaan infrastruktur gas Kepulauan Madura dan tempat lainya yang tidak termasuk program gasifikasi *cluster*, dan *bridging solution* infrastruktur gas Gorontalo pasca relokasi FSRU SRGS.
- Penyediaan Infrastruktur Gas/LNG/CNG - Penyediaan O&M CNG Duri dan CNG Gresik.
- Pembangunan dan O&M Pipa Gas - Pembangunan pipa Cilegon dan pipa gas Bali.

flexible and efficient. Demand and supply must be integrated. In its development, the midstream LNG project is in two phases. The first phase includes the construction of supply facilities in Nias, six points in Sulawesi-Maluku, eight points in Nusa Tenggara, and four points in North Papua. Several new FSRUs are being planned, including FSRU Jawa Barat 2 in Muara Tawar, as well as FSRUs in Bali, Cilegon, West Kalimantan, Central Kalimantan, Pomala, and Stargate. The successful execution of these projects requires the support of all partners and stakeholders. PLN Energi Gas, as a subsidiary of PLN Energi Primer Indonesia, plays a vital role in the midstream sector as the main link between upstream gas producers and power plants. The Company ensures that the energy supply chain operates efficiently, safely, and effectively.

The Company is determined to become a key partner in providing clean energy services in Indonesia. This certainly presents a challenge, as realizing clean energy is not an easy task. However, with strong determination and a clear vision, as well as the creation of synergy and collaboration among stakeholders, PLN Energi Gas is ready to face the challenges in realizing a reliable electricity and energy sector in Indonesia. PLN EPI places PLN Energi Gas as a gas infrastructure company that currently manages two gas infrastructure assets directly. The two assets are the Tanjung Batu gas pipeline and the Amurang FSRU.

To achieve strategic objectives, PLN Energi Gas has initiated the implementation of an investment budget work program and business development in the form of value creation, including:

- Provision of storage, transportation, and regasification facilities for the gasification of Tarakan, Punagaya, Tanjung Selor, provision of gas infrastructure for the Madura Islands and other locations excluded in the cluster gasification program, and a bridging solution for Gorontalo gas infrastructure post-relocation of FSRU SRGS.
- Provision of Gas/LNG/CNG Infrastructure - Provision of O&M CNG Duri and CNG Gresik.
- Gas Pipeline Development and O&M - Development of the Cilegon pipeline and the Bali gas pipeline.

Tinjauan Operasi per Segmen Usaha
Operational Review by Business Segment

PLN Energi Gas menjalankan kegiatan usaha di bidang penyediaan tenaga listrik yang mencakup kegiatan pengembangan dan pengoperasian pembangkitan tenaga listrik panas bumi. Perseroan melakukan sejumlah kegiatan usahanya, yaitu:

1. Angkutan melalui saluran pipa;
2. Penyimpanan minyak dan gas bumi;
3. Perdagangan eceran Bahan Bakar Minyak (BBM), bahan bakar gas (BBG), dan *Liquid Petroleum Gas* (LPG) selain di sarana pengisian bahan bakar transportasi darat, laut, dan udara;
4. Industri bahan bakar dari pemurnian dan pengilangan minyak bumi;
5. Pengadaan gas alam dan buatan;
6. Angkutan bermotor untuk barang khusus.

Secara garis besar kinerja operasi per segmen usaha PLN Energi Gas antara lain yaitu FSRU Sulawesi, Pipa Gas Tanjung Batu, *Tugboat*, dan *Operations & Maintenance* (O&M). Pada tahun 2025 kinerja per segmen sebagai berikut.

Pipa Gas Tanjung Batu

Dilatarbelakangi dengan adanya keterbatasan akses pipa gas menyebabkan alokasi gas bumi untuk pembangkit Listrik menginisiasi PLN Energi Gas membangun infrastruktur pipa gas untuk menghubungkan Pasokan gas lebih efisien dengan pengurangan biaya distribusi akibat listrik di Tanjung Batu tidak optimal. Ketergantungan pada transportasi LNG via kapal yang kurang efisien dari sisi biaya dan waktu.

Pipa gas merupakan suatu bentuk usaha yang fokus pada penyaluran gas bumi melalui jaringan pipa. Usaha ini mencakup kegiatan seperti transmisi dan distribusi gas bumi, yang dioperasikan sebagai satu sistem terintegrasi. PLN EG membangun infrastruktur pipa gas untuk menghubungkan sumber gas ke Tanjung Batu dengan mengurangi ketergantungan LNG berbasis kapal dengan transportasi berbasis pipa gas dari sumber terdekat.

Pipa Gas Tanjung Batu adalah pipa gas berukuran 16 inci ini dirancang untuk menyalurkan gas sebesar 80

PLN Energi Gas carries out business activities in the field of electricity supply which includes the development and operation of geothermal power generation. The Company carries out several business activities, namely:

1. Transportation through pipelines;
2. Storage of oil and natural gas;
3. Retail trade of Fuel Oil (BBM), Gas Fuel (BBG), and Liquefied Petroleum Gas (LPG) other than at refueling facilities for land, sea, and air transportation;
4. Fuel industry from refining and processing of crude oil;
5. Supply of natural and manufactured gas;
6. Motorized transportation for special goods.

In general, the operational performance of PLN Energi Gas's business segments can be seen from the FSRU Sulawesi, Tanjung Batu Gas Pipeline, Tugboat, and Operations & Maintenance (O&M). In 2025, performance of each segment is outlined below.

Tanjung Batu Gas Pipeline

Due to limited access to gas pipelines, which limits the allocation of natural gas for power generation, PLN Energi Gas initiated the construction of gas pipeline infrastructure to connect gas supplies more efficiently and reduce distribution costs. Previously, distribution relied on LNG transportation via ships, which was less costly and time-consuming.

Gas pipelines are a form of business that focuses on the distribution of natural gas through a network of pipes. This business includes activities such as the transmission and distribution of natural gas, which are operated as an integrated system. PLN Energi Gas built gas pipeline infrastructure to connect gas sources to Tanjung Batu by reducing dependence on ship-based LNG with gas pipeline transportation from the nearest source.

The Tanjung Batu Gas Pipeline is a 16-inch gas pipeline designed to deliver 80 MMSCFD of gas to

MMSCFD ke pembangkit-pembangkit gas di wilayah PLTGU Tanjung Batu, yang sepanjang 48,3 km.

Floating Storage Regasification Unit (FSRU) Sulawesi

Floating Storage Regasification Unit (FSRU) adalah sebuah terminal apung yang digunakan untuk menyimpan dan meregasifikasi gas alam cair (LNG). FSRU berfungsi sebagai tempat penyimpanan sementara LNG dan kemudian mengubahnya kembali menjadi gas alam yang dapat disalurkan. PLN EG memastikan pasokan LNG yang stabil dari sumber domestik untuk mendukung pembangkit di wilayah tersebut. Oleh karena itu, PLN Energi Gas membangun dan mengoperasikan FSRU untuk mengalirkan LNG ke Amurang. Dengan adanya FSRU ini dapat membuat proses penyaluran gas menjadi lebih efisien. Oleh karena itu, PLN Energi Gas membangun dan mengoperasikan FSRU untuk mengalirkan LNG ke Amurang. FSRU adalah sebuah terminal apung yang digunakan untuk menyimpan dan meregasifikasi gas alam cair (LNG). FSRU berfungsi sebagai tempat penyimpanan sementara LNG dan kemudian mengubahnya kembali menjadi gas alam yang dapat disalurkan. PLN Energi Gas memastikan pasokan LNG yang stabil dari sumber domestik untuk mendukung pembangkit di wilayah tersebut.

FSRU yang dioperasikan oleh PLN Energi Gas adalah unit penyimpanan dan regasifikasi terapung yang berlokasi di Gorontalo, Sulawesi yang dahulu berlokasi di Amurang, Sulawesi Utara. Pada 10 Juni 2021 PLN Energi Gas ditugaskan untuk memobilisasi FSRU dan peralatan pendukung operasinya dari Amurang ke PLT Marisa Gorontalo serta menyediakan jasa kompresi. Relokasi tersebut dilakukan untuk menyediakan pasokan listrik ke Pusat Listrik Tenaga Gas (PLTG) Gorontalo yang sebelumnya masih menggunakan *High Speed Diesel* (HSD) beralih menjadi *Liquified* Natural Gas (LNG). FSRU ini memiliki kapasitas yang mampu memenuhi kebutuhan pembangkitan Listrik sebesar 120 MW, sedangkan untuk fasilitas kompresi memiliki kapasitas 100 MW.

gas power plants in the Tanjung Batu CCPP area, spanning 48.3 km.

Floating Storage Regasification Unit (FSRU) Sulawesi

An FSRU is a floating terminal used to store and regasify liquefied natural gas (LNG). An FSRU serves as a temporary storage facility for LNG and then converts it back into natural gas that can be distributed. PLN EG ensures a stable supply of LNG from domestic sources to support power generation in the region. The difficulty in meeting the gas needs for the Amurang power plant is due to a high dependence on fuel oil, which has high costs. This dependence on fuel oil causes supply instability and high operational cost fluctuations. Therefore, PLN Energi Gas built and operates a Floating Storage Regasification Unit (FSRU) to supply LNG to Amurang. FSRU is a floating terminal used to store and regasify liquefied natural gas (LNG). The FSRU serves as a temporary storage facility for LNG and then converts it back into natural gas that can be distributed. PLN Energi Gas ensures a stable supply of LNG from domestic sources to support power plants in the region.

The FSRU operated by PLN Energi Gas is a floating storage and regasification unit located in Gorontalo, Sulawesi which was formerly located in Amurang, North Sulawesi. On June 10, 2021, PLN Energi Gas was assigned to mobilize the FSRU and its operation support equipment from Amurang to Marisa Gorontalo power plant and provide compression services. This relocation was carried out to supply electricity to the Gorontalo Gas Power Plant (GTPP), which previously used High-Speed Diesel (HSD) and switched to Liquefied Natural Gas (LNG). This FSRU has a capacity capable of meeting the electric power generator needs of 120 MW, while the compression facility has a capacity of 100 MW.

Tugboat

Segmen bisnis tugboat di PLN Energi Gas adalah kapal yang disewakan sebagai *supporting* untuk wilayah operasional Jawa Satu Power.

Operation & Maintenance (O&M)

Saat ini PLN Energi Gas memiliki kompetensi inti dalam pembangunan & pengoperasian infrastruktur *midstream* gas yang bisa dikembangkan menjadi bisnis baru, Dimana PLN Energi Gas bisa mengambil peran sebagai *Operation & Maintenance* untuk infrastruktur gas. Dalam rangka pengembangan portofolio Perusahaan ini, PLN Energi Gas mulai merintis bisnis pengelolaan CNG *Plant* dengan pendampingan tenaga ahli di bidangnya. Di tahun 2024 sendiri, PLN Energi Gas mengelola operasional peralatan CNG *Plant* Balai Pungut Duri 10 MMSCFD milik PLN NP yang berada dibawah pengelolaan UP Pekanbaru.

COD akan dioperasikan dalam kondisi preservasi/ standby operasi, serta melaksanakan pemeliharaan peralatan CNG *Plant* Balai Pungut Duri 10 MMSCFD untuk mencapai *availability* dan *reliability* yang optimal sesuai batasan teknis, jadwal pemeliharaan sesuai panduan manual dari pabrikan (preventif, prediktif, korektif) dengan biaya yang optimal serta dengan menjalankan program *safety* dan lingkungan (HSE).

Secara umum, pada tahun 2025 klasifikasi pendapatan usaha PLN Energi Gas terdiri dari beberapa kontributori antara lain sebagai berikut:

1. *Revenue Stream Existing* (Pipa gas Tanjung Batu Rp139,37 miliar , FSRU Sulawesi & Kompresor Gorontalo) sebesar Rp 314,71 miliar;
2. *Revenue Stream* Baru (*Midstream* Gas Tarakan sebesar Rp3,95 miliar dan O&M CNG Duri sebesar Rp8,44 miliar;
3. *Revenue Stream beyond* Kwh Jasa sewa Tugboat sebesar Rp14,47 miliar.

Tugboat

The tugboat business segment at PLN Energi Gas is a vessel that is rented as support for the Jawa Satu Power operational area.

Operation & Maintenance (O&M)

Currently, PLN Energi Gas has core competencies in the construction & operation of midstream gas infrastructure that can be developed into a new business, where PLN Energi Gas can take on the role of Operation & Maintenance for gas infrastructure. In order to develop this Company's portfolio, PLN Energi Gas has begun pioneering the CNG Plant management business with the assistance of experts in their fields. In 2024, PLN Energi Gas will manage the operational equipment of the Balai Pungut Duri 10 MMSCFD CNG Plant owned by PLN NP which is under the management of UP Pekanbaru.

It is planned that after COD, it will be operated in preservation/standby operation conditions, and the 10 MMSCFD CNG Plant Balai Pungut Duri will be maintained to achieve optimal availability and reliability according to technical limits, maintenance schedules according to the manufacturer's manual guidelines (preventive, predictive, corrective) with optimal costs, and by implementing safety and environmental programs (HSE).

Generally, in 2025, PLN Energi Gas' operating revenue classification consisted of several contributors, including the following matters:

1. Revenue Stream from the Existing Tanjung Batu Gas Pipeline of Rp139.37 billion, and from the Sulawesi FSRU and Gorontalo Compressor of Rp314.71 billion;
2. New Revenue Streams (Tarakan Midstream Gas at Rp3.95 billion and Duri CNG O&M at Rp8.44 billion);
3. Revenue Stream beyond kWh of Tugboat lease services at Rp14.47 billion.

Profitabilitas Per Segmen
Profitability by Segment

Berdasarkan pengelompokkan pendapatan PLN Energi Gas terbagi menjadi 4 (empat) berikut adalah pendapatan per segmen usaha Perusahaan:

Based on the classification, PLN Energi Gas' revenue is divided into the following 4 (four) categories:

Tabel Pendapatan Per Segmen
Table of Revenue by Segment

(dalam Rp juta) | (Rp million)

Uraian Description	2025	2024	2023	Peningkatan/ Penurunan Increase/Decrease (%)
Pendapatan bunga sewa Interest income from lease	347.87	355.328	365.698	(2,10)
Jasa terminal fasilitas penyimpanan dan regasifikasi Floating storage and regasification terminal services	113.087	113.622	166.895	(0,47)
Pengelolaan *Operation & Maintenance* (O&M) Infrastruktur gas Gas Infrastructure Operation & Maintenance (O&M) Management	8.447	2.982	-	183,27
Sewa kapal tunda Tugboat lease	7.716	6.688	4.630	15,37
Lain-lain Others	3.835	-	883	100,00
Jumlah Pendapatan Total Revenues	480.955	478.620	538.106	(0,49)



Analisis Kinerja Keuangan
Analysis of Financial Performance

Uraian dan analisis kinerja keuangan disajikan berdasarkan Laporan Keuangan Konsolidasian PT PLN Energi Gas untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Rintis, Jumadi, Rianto & Rekan, pada tanggal 13 Mei 2026 dengan opini "wajar, dalam semua hal yang material". Laporan Keuangan Konsolidasian sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) yang berlaku di Indonesia. Selanjutnya, Laporan Keuangan Konsolidasian dilampirkan menjadi satu kesatuan dengan Laporan Tahunan ini pada bagian tersendiri.

The description and analysis of financial performance are presented based on the Consolidated Financial Statements of PT PLN Energi Gas for the years ended December 31, 2025, and 2024, which have been audited by the Public Accounting Firm (KAP) Rintis, Jumadi, Rianto & Partners on May 13, 2026, with an opinion of "fairly, in all material respects". The Consolidated Financial Statements are in accordance with the Statement of Financial Accounting Standards (PSAK) applicable in Indonesia. Furthermore, the Consolidated Financial Statements are attached as an integral part of this Annual Report in a separate section.

Analisis Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian
Analysis of the Consolidated Statement of Financial Position

Posisi keuangan PLN Energi Gas tahun 2025 terdiri dari jumlah aset sebesar Rp2,38 triliun, jumlah liabilitas sebesar Rp1,86 triliun, dan jumlah ekuitas sebesar Rp521,48 miliar.

In 2025, the financial position of PLN Energi Gas consists of total assets amounting to Rp2.38 trillion, total liabilities amounting to Rp1.86 trillion, and total equity amounting to Rp521.48 billion.

Tabel Posisi Keuangan
Table of Financial Position

(dalam Rp juta, kecuali dinyatakan lain) | in million Rp, unless stated otherwise

Uraian Description	2025	2024	2023	Kenaikan (Penurunan) 2024-2025 Increase (Decrease)	
				Selisih Difference	Persentase Percentage
Aset **Assets**					
Aset Lancar Current Assets	313.957	306.415	400.302	7.542	2,46
Aset Tidak Lancar Non-Current Assets	2.065.261	2.136.265	2.141.586	(71.004)	(3,32)
Jumlah Aset Total Assets	2.379.218	2.442.680	2.541.888	(63.462)	(2,60)
Liabilitas **Liabilities**					
Liabilitas Jangka Pendek Current Liabilities	282.032	268.360	290.536	13.672	5,09
Liabilitas Jangka Panjang Non-Current Liabilities	1.575.702	1.747.574	1.905.314	(171.872)	(9,83)
Jumlah Liabilitas Total Liabilities	1.857.734	2.015.934	2.195.850	(158.200)	(7,85)
Jumlah Ekuitas Total Equity	521.484	426.746	346.038	94.738	22,20
Jumlah Liabilitas dan Ekuitas Total Liabilities and Equity	2.379.218	2.442.680	2.541.888	(63.462)	(2,60)

Aset

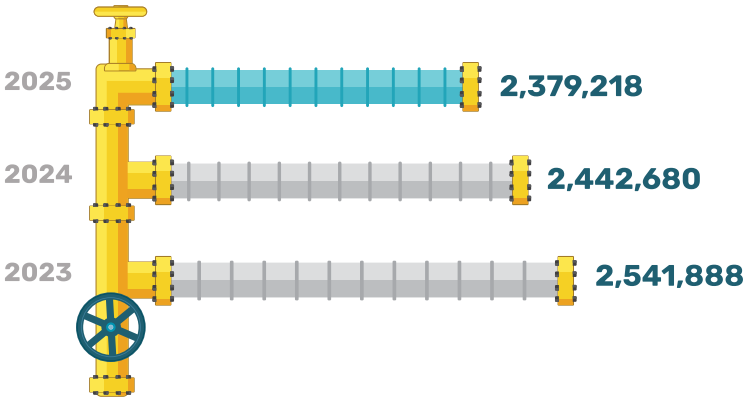
Jumlah aset PLN Energi Gas pada tahun 2025 adalah sebesar Rp2,38 triliun, yaitu mengalami penurunan 2,60% atau sebesar Rp63,46 miliar dibandingkan tahun 2024 dengan capaian aset sebesar Rp2,44 triliun.

Assets

In 2025, the total assets of PLN Energi Gas amounted to Rp2.38 trillion, a decrease of 2.60% or Rp63.46 billion compared to the 2024 figure of Rp2.44 trillion.

Grafik Jumlah Aset
Chart of Total Assets

dalam Rp juta | in million Rp



Aset Lancar

Jumlah aset lancar PLN Energi Gas pada tahun 2025 adalah sebesar Rp313,96 miliar, yaitu mengalami peningkatan 2,46% atau sebesar Rp7,54 miliar dibandingkan tahun 2024 dengan capaian aset lancar sebesar Rp306,41 miliar.

Current Assets

PLN Energi Gas' total current assets in 2025 amounted to Rp313.96 billion, an increase of 2.46% or Rp7.54 billion compared to 2024, which had current assets of Rp306.41 billion.

Tabel Aset Lancar
Table of Current Assets

dalam Rp juta, kecuali dinyatakan lain | in million Rp, unless stated otherwise

Uraian Description	2025	2024	2023	Kenaikan (Penurunan) 2024-2025 Increase (Decrease)	
				selisih Difference	Persentase Percentage
Kas dan setara kas Cash and cash equivalents	114.121	113.361	168.47	760	0,67
Piutang usaha Trade receivables	61.670	70.614	70.759	(8.944)	(12,67)
Piutang non usaha Non-trade receivables	1.210	1.391	35	(181)	(13,01)
Piutang sewa pembiayaan, bagian lancar Finance lease receivables, current portion	136.922	120.361	161.003	16.561	13,76
Aset lancar lainnya Other current assets	34	688	35	(654)	(95,06)
Jumlah Aset Lancar Total Current Assets	**313.957**	**306.415**	**400.302**	**7.542**	**2,46**

Aset Tidak Lancar

Jumlah aset tidak lancar PLN Energi Gas pada tahun 2025 adalah sebesar Rp2,06 triliun, yaitu mengalami penurunan 3,32% atau sebesar Rp71 miliar dibandingkan tahun 2024 dengan capaian aset sebesar Rp2,14 triliun.

Non-Current Assets

In 2025, PLN Energi Gas' total non-current assets were Rp2.06 trillion, a decrease of 3.32% or Rp71 billion compared to 2024, with asset achievement of Rp2.14 trillion.

Tabel Aset Tidak Lancar
Table of Non Current Assets

(dalam Rp juta, kecuali dinyatakan lain) | in million Rp, unless stated otherwise

Uraian Description	2025	2024	2023	Kenaikan (Penurunan) 2024-2025 Increase (Decrease)	
				Selisih Difference	Persentase Percentage
Aset Tetap Fixed Assets	143.597	61.434	-	82.163	133,74
Piutang sewa pembiayaan, bagian tidak lancar Finance lease liabilities, non-current portion	1.823.756	1.960.672	2.081.027	(136.916)	(6,98)
Aset hak-guna Right-of-use assets	14.508	13.775	550	733	5,32
Pajak dibayar di muka Prepaid tax					
• Pajak lainnya • Other taxes	70.115	97.037	58.757	(26.922)	(27,74)
Aset tidak lancar lainnya Other non-current assets	13.285	3.347	964	9.938	296,92
Jumlah Aset Tidak Lancar Total Non-current Assets	**2.065.261**	**2.136.265**	**2.141.586**	**(71.004)**	**(3,32)**

Liabilitas

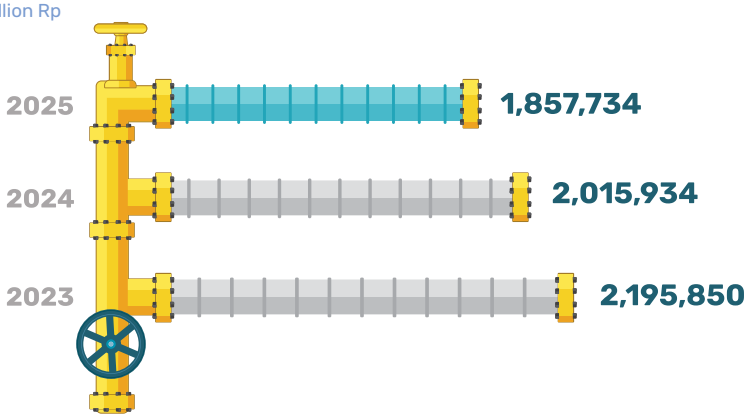
Jumlah liabilitas PLN Energi Gas pada tahun 2025 adalah sebesar Rp1,86 triliun, yaitu mengalami penurunan 7,85% atau sebesar Rp158,20 miliar dibandingkan tahun 2024 dengan capaian aset sebesar Rp2,02 triliun.

Liabilities

The total liabilities of PLN Energi Gas in 2025 amounted to Rp1.86 trillion, a decrease of 7.85% or Rp158.20 billion compared to 2024, with liabilities achievements of Rp2.02 trillion.

Grafik Jumlah Liabilitas
Chart of Total Liabilities

dalam Rp juta | in million Rp



Liabilitas Jangka Pendek

Jumlah liabilitas jangka pendek PLN Energi Gas pada tahun 2025 adalah sebesar Rp282,03 miliar, yaitu mengalami peningkatan 5,09% atau sebesar Rp13,67 miliar dibandingkan tahun 2024 dengan capaian aset sebesar Rp268,36 miliar.

Current Liabilities

In 2025, total current liabilities of PLN Energi Gas were Rp282.03 billion, an increase of 5.09% or Rp13.67 billion compared to 2024, with total liabilities of Rp268.36 billion.

Tabel Liabilitas Jangka Pendek
Table of Current Liabilities

dalam Rp juta, kecuali dinyatakan lain | in million Rp, unless stated otherwise

Uraian Description	2025	2024	2023	Kenaikan (Penurunan) 2024-2025 Increase (Decrease)	
				selisih Difference	Persentase Percentage
Utang usaha Trade payables					
• Pihak ketiga • *Third parties*	57.557	60.186	41.729	(2.629)	(4,37)
• Pihak berelasi • *Related parties*	14.296	16.207	20.721	(1.911)	(11,79)
Utang lain - lain Other payables	4.204	2.449	79	1.755	71,66
Biaya masih harus dibayar Other payables	13.055	9.221	8.379	3.834	41,58
Liabilitas jangka panjang jatuh tempo dalam satu tahun Other Non-current Assets					
• Liabilitas sewa • *Lease liabilities*	134.327	122.578	162.841	11.749	9,58
• Pinjaman pemegang saham • *Shareholder loan*	55.275	52.456	52.534	2.819	5,37
Utang pajak Taxes payable					
• Pajak lain-lain • *Other Taxes*	3.158	5.103	4.158	(1.945)	(38,11)
Liabilitas imbalan pasca kerja jangka pendek Post-employment benefits liabilities, current portion	160	160	95	-	-
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek Total Current Liabilities	**282.032**	**268.360**	**290.536**	**13.672**	**5,09**

Liabilitas Jangka Panjang

Jumlah liabilitas jangka panjang PLN Energi Gas pada tahun 2025 adalah sebesar Rp1,57 riliun, yaitu mengalami penurunan 9,83% atau sebesar Rp171,87 miliar dibandingkan tahun 2024 dengan capaian aset sebesar Rp1,75 triliun.

Non-Current Liabilities

PLN Energi Gas' total long-term liabilities in 2025 amounted to Rp1.57 trillion, a decrease of 9.83% or Rp171.87 billion compared to the 2024 liabilities achievement of Rp1.75 trillion.

Tabel Liabilitas Jangka Panjang
Table of Non-Current Liabilities

dalam Rp juta, kecuali dinyatakan lain | in million Rp, unless stated otherwise

Uraian Description	2025	2024	2023	Kenaikan (Penurunan) 2024-2025 Increase (Decrease)	
				selisih Difference	Persentase Percentage
Liabilitas jangka panjang, setelah dikurangi bagian jatuh tempo dalam satu tahun Non-current liabilities, after deducting the portion due within one year					
• Liabilitas sewa • *Lease Liabilities*	1.402.911	1.532.356	1.653.591	(129.445)	(8,45)
• Pinjaman pemegang saham • *Shareholder Loans*	156.583	202.604	243.174	(46.021)	(22,71)
Liabilitas imbalan pascakerja, jangka panjang Long-term Post employment Benefit Liabilities	3.180	2.083	379	1.097	52,66
Liabilitas pajak tangguhan Deferred Tax Liabilities	13.028	10.531	8.170	2.497	23,71
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang Total Non-current Liabilities	**1.575.702**	**1.747.574**	**1.905.314**	**(171.872)**	**(9,83)**

Ekuitas

Jumlah ekuitas PLN Energi Gas pada tahun 2025 adalah sebesar Rp521,48 miliar, yaitu mengalami peningkatan 22,20% atau sebesar Rp94,74 miliar dibandingkan tahun 2024 dengan capaian aset sebesar Rp426,75 miliar.

Equity

PLN Energi Gas' total equity in 2025 was Rp521.48 billion, an increase of 22.20% or Rp94.74 billion compared to 2024, with equity achievement of Rp426.75 billion.

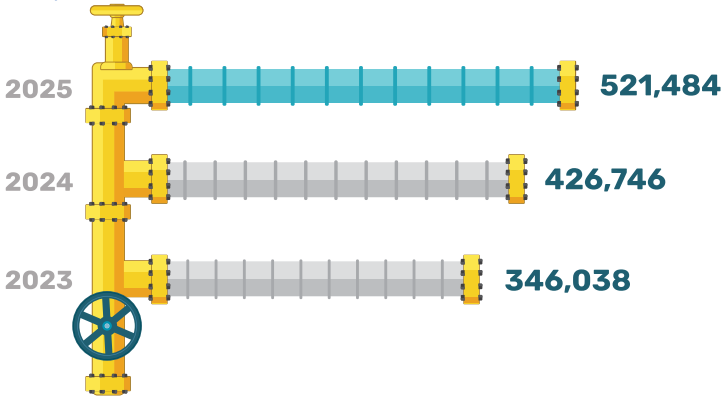
Tabel ekuitas
Table of Equity

dalam Rp juta, kecuali dinyatakan lain | in million Rp, unless stated otherwise

Uraian Description	2025	2024	2023	Kenaikan (Penurunan) 2024-2025 Increase (Decrease)	
				selisih Difference	Persentase Percentage
Modal saham Share capital	25.000	25.000	25.000	-	-
Tambahan modal disetor Additional paid-in capital	112.848	112.848	112.848	-	-
Saldo laba Retained earnings	383.636	288.898	208.190	94.738	32,79
Jumlah Ekuitas Total Equity	**521.484**	**426.746**	**346.038**	**94.738**	**22,20**

Grafik Jumlah Ekuitas
Chart of Total Equity

dalam Rp juta | in million Rp



Analisis Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian
Analysis of the Consolidated Statement of Profit or Loss and Other Comprehensive Income

Pada tahun 2025, PLN Energi Gas berhasil membukukan laba tahun berjalan sebesar Rp94,74 miliar, yaitu mengalami peningkatan 17,38% atau Rp14,03 miliar dibandingkan tahun 2024 dengan capaian sebesar Rp80,71 miliar.

In 2025, PLN Energi Gas successfully recorded a profit for the year of Rp94.74 billion, an increase of 17.38% or Rp14.03 billion compared to the 2024 figure of Rp80.71 billion.

Peningkatan ini terutama dipengaruhi oleh adanya penyelesaian proyek gasifikasi Tarakan sehingga dapat dilakukan *commisioning* pada Tahun 2025 serta perseroan telah melakukan usaha terbaik dalam menjaga kehandalan operasional untuk mengoptimalkan pengelolaan pendapatan serta efektivitas dan efisiensi dalam pengendalian biaya operasional.

This increase was mainly influenced by the completion of the Tarakan gasification project so that commissioning could be carried out in 2025 and the Company has made the best efforts in maintaining operational reliability to optimize revenue management as well as effectiveness and efficiency in controlling operational costs.

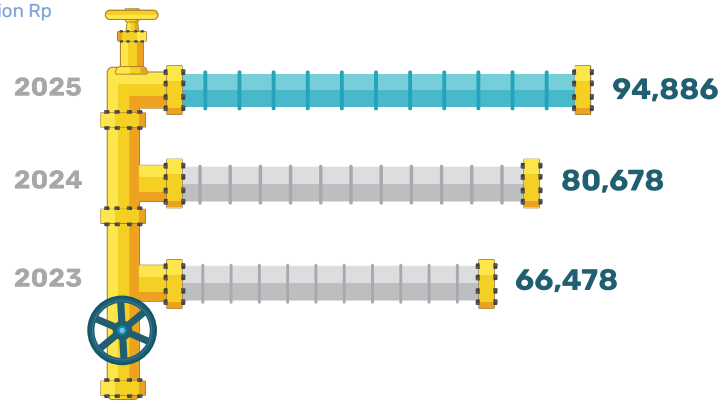
Tabel Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian
Table of the Consolidated Statement of Profit or Loss and Other Comprehensive Income

dalam Rp juta, kecuali dinyatakan lain | in million Rp, unless stated otherwise

Uraian Description	2025	2024	2023	Kenaikan (Penurunan) 2024-2025 Increase (Decrease)	
				selisih Difference	Persentase Percentage
Pendapatan Revenue	480.955	478.620	538.106	2.335	0,49
Beban usaha Operating expenses	(180.650)	(200.605)	(266.460)	19.955	(9,95)
Laba usaha Operating profit	300.305	278.015	271.044	22.290	8,02
Penghasilan keuangan Finance income	1.645	1.944	875	(299)	(15,38)
Beban keuangan Finance expense	(176.405)	(177.341)	(177.442)	936	(0,53)
Penghasilan lain-lain bersih Other income, net	(5.144)	2.425	1.543	(7.569)	(312,12)
Laba sebelum pajak Profit before tax	120.401	105.043	96.020	15.358	14,62
Beban pajak penghasilan Income tax expense	(25.515)	(24.365)	(29.542)	(1.150)	4,72
Laba tahun berjalan Profit for the year	**94.886**	**80.678**	**66.478**	**14.208**	**17,61**
Jumlah penghasilan komprehensif lain tahun berjalan Total other comprehensive income for the year	(148)	30	113	(178)	(593,33)
Jumlah penghasilan komprehensif tahun berjalan Total comprehensive income for the year	**94.738**	**80.708**	**66.591**	**14.030**	**17,38**

Grafik Laba Tahun Berjalan
Chart of Profit for The Year

dalam Rp juta | in million Rp



Pendapatan

Jumlah pendapatan PLN Energi Gas tahun 2025 sebesar Rp480,95 miliar, yaitu mengalami peningkatan 0,49% atau Rp2,33 miliar dibandingkan tahun 2024 dengan capaian sebesar Rp478,62 miliar. Peningkatan ini terutama dipengaruhi atas capaian Perseroan menyelesaikan tahap commisioning pada 14 September 2025. Sehingga Perusahaan mendapatkan pendapatan pra COD sebesar Rp3,95 miliar.

Revenue

In 2025, the total revenue of PLN Energi Gas was Rp480.95 billion, an increase of 0.49% or Rp2.33 billion compared to the 2024 figure of Rp478.62 billion. This increase was mainly influenced by the Company's achievement in completing the commissioning stage on September 14, 2025. As a result, the Company received Pre-COD Revenue of Rp3.95 billion.

Tabel Pendapatan
Table of Revenue

(dalam Rp juta, kecuali dinyatakan lain) | in million Rp, unless stated otherwise

Uraian Description	2025	2024	2023	Kenaikan (Penurunan) 2024-2025 Increase (Decrease)	
				selisih Difference	Persentase Percentage
Pendapatan bunga sewa Interest income from lease	347.870	355.328	365.698	(7.458)	(2,10)
Jasa terminal fasilitas penyimpanan dan regasifikasi Floating storage and regasification terminal services	113.087	113.622	166.895	(535)	(0,47)
Pengelolaan OM infrastruktur gas Gas infrastructure OM Management	8.447	2.982	-	5.465	183,27
Sewa kapal tunda Tugboat lease	7.716	6.688	4.630	1.028	15,37
Lain-lain Others	3.835	-	883	(3.835)	(100,00)
Jumlah Pendapatan Usaha Total Operating Revenues	**480.955**	**478.62**	**538.106**	**2.335**	**0,49**

Beban Usaha

Jumlah beban usaha PLN Energi Gas tahun 2025 sebesar Rp180,65 miliar, yaitu mengalami penurunan 9,95% atau Rp19,95 miliar dibandingkan tahun 2024 dengan capaian sebesar Rp200,60 miliar. Penurunan ini terutama dipengaruhi oleh Efektifitas Perseroan dalam melakukan pengelolan beban usaha dengan melakukan efisiensi atas biaya O&M Pipa Gas Tanjung Batu dan penurunan biaya sewa Kompresor Gorontalo.

Operating Expenses

PLN Energi Gas' operating expenses in 2025 amounted to Rp180.65 billion, a decrease of 9.95% or Rp19.95 billion compared to 2024, with an achievement of Rp200.61 billion. This decrease was mainly influenced by the Company's effectiveness in managing operating expenses by implementing efficiency in the O&M costs of the Tanjung Batu Gas Pipeline and reducing the rental costs of the Gorontalo Compressor.

Tabel Beban Usaha
Table of Operating Expenses

(dalam Rp juta, kecuali dinyatakan lain) | in million Rp, unless stated otherwise

Uraian Description	2025	2024	2023	Kenaikan (Penurunan) 2024-2025 Increase (Decrease)	
				selisih Difference	Persentase Percentage
Beban penyusutan Depreciation expense	(5.538)	(5.060)	(602)	(478)	9,45
Beban pemeliharaan Maintenance expense	(35.364)	(43.091)	(39.439)	7.727	(17,93)
Beban transportasi Transportation expense	(64.765)	(87.391)	(166.059)	22.626	(25,89)
Beban administrasi Administrative expense	(48.288)	(36.744)	(35.114)	(11.544)	31,42
Beban kepegawaian Personnel expense	(26.695)	(28.319)	(25.848)	1.624	(5,73)
Jumlah beban usaha Total operating expenses	**(180.650)**	**(200.605)**	**(266.460)**	**19.955**	**(9,95)**

Laba Usaha

Jumlah laba usaha PLN Energi Gas tahun 2025 sebesar Rp300,30 miliar, yaitu mengalami peningkatan 8,02% atau Rp22,29 miliar dibandingkan tahun 2024 dengan capaian sebesar Rp278,01 miliar. Pencapaian ini mencerminkan kinerja perusahaan yang semakin kuat dan berkelanjutan, didukung oleh pertumbuhan pendapatan usaha, optimalisasi pemanfaatan aset, peningkatan efisiensi operasional, serta pengelolaan biaya yang semakin efektif. Hasil tersebut menunjukkan keberhasilan perusahaan dalam menjalankan strategi bisnis secara konsisten sehingga mampu meningkatkan profitabilitas dan menciptakan nilai tambah bagi pemangku kepentingan.

Operating Profit

PLN Energi Gas' operating profit in 2025 amounted to Rp300.30 billion, an increase of 8.02% or Rp22.29 billion compared to 2024, which recorded Rp278.01 billion. This achievement reflects the Company's increasingly strong and sustainable performance, supported by revenue growth, optimized asset utilization, increased operational efficiency, and increasingly effective cost management. These results demonstrate the Company's success in consistently implementing its business strategy, thereby increasing profitability and creating added value for stakeholders.

(Beban)/penghasilan lain-lain, bersih

Jumlah beban lain-lain, bersih PLN Energi Gas pada tahun 2025 sebesar Rp(5,14) miliar, yaitu mengalami penurunan 312,12% atau Rp7,57 miliar dibandingkan tahun 2024 dengan capaian penghasilan lain-lain, bersih sebesar Rp2,42 miliar. Penurunan ini terutama dipengaruhi oleh akurasi dalam melakukan pencatatan shingga dapat meminimalisir beban penyesuaian tahun lalu.

Laba Sebelum Pajak

Jumlah laba sebelum pajak PLN Energi Gas tahun 2025 sebesar Rp120,40 miliar, yaitu mengalami peningkatan 14,62% atau Rp15,36 miliar dibandingkan tahun 2024 dengan capaian sebesar Rp105,04 miliar. Pencapaian ini mencerminkan kinerja perusahaan yang semakin kuat dan berkelanjutan, didukung oleh pertumbuhan pendapatan usaha, optimalisasi pemanfaatan aset, peningkatan efisiensi operasional, serta pengelolaan biaya yang semakin efektif. Hasil tersebut menunjukkan keberhasilan perusahaan dalam menjalankan strategi bisnis secara konsisten sehingga mampu meningkatkan profitabilitas dan menciptakan nilai tambah bagi pemangku kepentingan.

Beban Pajak Penghasilan

Jumlah beban pajak penghasilan PLN Energi Gas tahun 2025 sebesar Rp25,51 miliar, yaitu mengalami peningkatan 4,72% atau Rp1,15 miliar dibandingkan tahun 2024 dengan capaian sebesar Rp24,36 miliar. Peningkatan ini terutama dipengaruhi oleh pertumbuhan kinerja usaha dan peningkatan laba perusahaan selama tahun berjalan. Kenaikan beban pajak tersebut mencerminkan capaian operasional yang semakin baik serta kemampuan perusahaan dalam menciptakan nilai tambah yang lebih besar, sehingga memberikan kontribusi yang lebih optimal kepada negara melalui pemenuhan kewajiban perpajakan.

Other (expenses)/income, net

In 2025, PLN Energi Gas' total other expenses, net, amounted to Rp(5.14) billion, a decrease of 312.12% or Rp7.57 billion compared to 2024, with net other income of Rp2.42 billion. In 2025, PLN Energi Gas' total other expenses, net, amounted to Rp(5.14) billion, a decrease of 312.12% or Rp7.57 billion compared to 2024, with net other income of Rp2.42 billion. This decrease was mainly influenced by accuracy in recording so as to minimize the burden of adjustments the previous year.

Profit Before Tax

PLN Energi Gas' total profit before tax in 2025 was Rp120.40 billion, an increase of 14.62% or Rp15.36 billion compared to the 2024 figure of Rp105.04 billion. This achievement reflects the Company's increasingly strong and sustainable performance, supported by revenue growth, optimized asset utilization, increased operational efficiency, and increasingly effective cost management. These results demonstrate the Company's success in consistently implementing business strategy, thereby increasing profitability and creating added value for stakeholders.

Income Tax Expense

The total income tax expense of PLN Energi Gas in 2025 was Rp25.51 billion, an increase of 4.72% or Rp1.15 billion compared to 2024, with an achievement of Rp24.36 billion. This increase was primarily influenced by growth in business performance and increased company profits during the year. The increase in the tax burden reflects improved operational performance and the Company's ability to create greater added value, thus providing a more optimal contribution to the state by fulfilling its tax obligations.

Penghasilan Komprehensif Lain

PLN Energi Gas tahun 2025 memperoleh penghasilan komprehensif lain sebesar Rp148 juta, yaitu mengalami penurunan 593,33% atau Rp178 juta dibandingkan tahun 2024 dengan capaian sebesar Rp30 juta. Penurunan ini terutama dipengaruhi oleh penyesuaian asumsi perhitungan aktuarian atas imbalan jangka Panjang.

Jumlah Penghasilan Komprehensif Tahun Berjalan

Jumlah penghasilan komprehensif tahun berjalan PLN Energi Gas di tahun 2025 sebesar Rp94,74 miliar, yaitu mengalami peningkatan 17,38% atau Rp14,03 miliar dibandingkan tahun 2024 dengan capaian sebesar Rp80,71 miliar Peningkatan ini terutama dipengaruhi oleh pertumbuhan laba bersih perusahaan yang didukung oleh peningkatan kinerja operasional, optimalisasi pendapatan usaha, serta efektivitas pengelolaan biaya. Capaian tersebut mencerminkan fundamental bisnis yang semakin kuat dan keberhasilan perusahaan dalam menjalankan strategi pertumbuhan yang berkelanjutan, sehingga mampu memberikan nilai tambah yang lebih besar bagi para pemangku kepentingan.

Other Comprehensive Income

In 2025, PLN Energi Gas recorded other comprehensive income of Rp(148) million, a decrease of 593.33% or Rp178 million compared to 2024, with an achievement of Rp30 million. This decrease was mainly influenced by adjustments to actuarial calculation assumptions for long-term benefits.

Total Comprehensive Income for the Year

The total comprehensive income for the year of PLN Energi Gas in 2025 amounted to Rp94.74 billion, an increase of 17.38% or Rp14.03 billion compared to the 2024 figure of Rp80.71 billion. This increase was primarily driven by the Company's net profit growth, supported by improved operational performance, revenue optimization, and effective cost management. This achievement reflects the increasingly strong business fundamentals and the Company's success in implementing a sustainable growth strategy, thereby delivering greater added value to the stakeholders.

Analisis Laporan Arus Kas Konsolidasian
Analysis of Consolidated Statement of Cash Flows

Pada tahun 2025, jumlah kas dan setara kas akhir tahun PLN Energi Gas tercatat sebesar Rp114,12 miliar, yaitu mengalami peningkatan 0,67% atau sebesar Rp760 juta dibandingkan tahun 2024 dengan capaian sebesar Rp113,36 miliar. Peningkatan tersebut terutama dipengaruhi oleh penerimaan atas restitusi pajak sebesar Rp65,78 Miliar

In 2025, PLN Energi Gas' cash and cash equivalents at the end of the year were recorded at Rp114.12 billion, an increase of 0.67% or Rp760 million compared to the 2024 figure of Rp113.36 billion. This increase was mainly influenced by the receipt of tax restitution amounting to Rp65.78 billion.

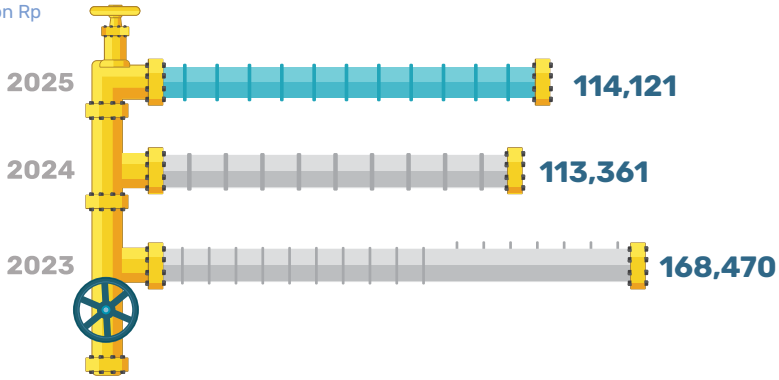
Tabel Laporan Arus Kas Konsolidasian
Table of the Consolidated Statement of Cash Flows

dalam Rp juta, kecuali dinyatakan lain | in million Rp, unless stated otherwise

Uraian Description	2025	2024	2023	Kenaikan (Penurunan) 2024-2025 Increase (Decrease)	
				selisih Difference	Persentase Percentage
Arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi Net cash flow provided by operating activities	259.346	208.470	206.274	50.876	24,40
Arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi Net cash flow used in investing activities	(82.163)	(61.434)	-	(20.729)	33,74
Arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas pendanaan Net cash flow used in financing activities	(176.423)	(202.146)	(143.808)	25.723	(12,72)
(Penurunan)/kenaikan bersih kas dan setara kas Net (decrease)/increase in cash and cash equivalents	760	(55.110)	62.466	55.870	(101,38)
Kas dan setara kas pada awal tahun Cash and cash equivalents at the beginning of the year	113.361	168.471	106.004	(55.110)	(32,71)
Kas dan setara kas pada akhir tahun ***Cash and cash equivalents at the end of the year***	**114.121**	**113.361**	**168.470**	**760**	**0,67**

Grafik Jumlah Kas dan Setara Kas
Chart of Total Cash and Cash Equivalents

dalam Rp juta | in million Rp



Arus Kas Aktivitas Operasi

Jumlah kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi PLN Energi Gas pada tahun 2025 adalah sebesar Rp259,35 miliar, yaitu mengalami peningkatan 24,40% atau sebesar Rp50,88 miliar dibandingkan tahun 2024 dengan capaian sebesar Rp208,47 miliar. Peningkatan tersebut terutama dipengaruhi oleh utamanya dikarenakan penerimaan kas atas restitusi pajak sebesar Rp 65,78 Miliar dan perbaikan *collecting period* 49 hari.

Cash Flows from Operating Activities

The net cash provided by the operational activities of PLN Energi Gas in 2025 amounted to Rp259.35 billion. It represents an increase of 24.40% or Rp50.88 billion compared to 2024, which recorded Rp208,47 billion. This increase was mainly influenced by cash receipts from tax refunds amounting to Rp65.78 billion and an improvement in the collection period of 49 days.

Tabel Arus Kas Dari Aktivitas Operasi 2023-2025
Table of Cash Flows From Operating Activities 2023-2025

dalam Rp juta, kecuali dinyatakan lain | in million Rp, unless stated otherwise

Uraian Description	2025	2024	2023	Kenaikan (Penurunan) 2024-2025 Increase (Decrease)	
				selisih Difference	Persentase Percentage
Penerimaan dari pelanggan Receipts from customers	489.899	477.595	526.704	12.304	2,58
Pembayaran kepada pemasok dan karyawan Payment to suppliers and employees	(98.165)	(94.334)	(137.296)	(3.831)	4,06
Pembayaran pajak penghasilan Payment of income taxes	(22.847)	(20.370)	(20.185)	(2.477)	12,16
Pembayaran beban keuangan Payment of finance expense	(176.975)	(167.698)	(163.824)	(9.277)	5,53
Penerimaan restitusi pajak Receipts of tax refund	65.789	11.333	-	54.456	480,51
Penerimaan penghasilan keuangan Receipts of finance income	1.645	1.944	875	(299)	(15,38)
Kas bersih dari aktivitas operasi Net cash from operating activities	**259.346**	**208.470**	**206.274**	**50.876**	**24,40**

Arus Kas Aktivitas Investasi

Jumlah kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi PLN Energi Gas pada tahun 2025 adalah sebesar Rp82,16 miliar, yaitu mengalami peningkatan 33,74% atau sebesar Rp20,73 miliar dibandingkan tahun 2024 dengan capaian sebesar Rp61,43 miliar. Peningkatan tersebut terutama dipengaruhi oleh adanya *bridging fund* dana internal untuk proyek Gasifikasi Tarakan & Punagaya.

Cash Flows from Investing Activities

In 2025, the net cash used in PLN Gas Energy investment activities is Rp82.16 billion, an increase of 33.74% or Rp20.73 billion compared to 2024, with an achievement of Rp61.43 billion. The increase was primarily due to an internal bridging fund for the Tarakan & Punagaya Gasification projects.

Arus Kas Aktivitas Pendanaan

Jumlah kas bersih yang digunakan untuk aktivitas pendanaan PLN Energi Gas pada tahun 2025 adalah sebesar Rp176,42 miliar, yaitu mengalami penurunan 12,72% atau sebesar Rp25,72 miliar dibandingkan tahun 2024 dengan capaian sebesar Rp202,15 miliar. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh utamanya karena masih berjalannya pengajuan *shareholder loan* (SHL) atas proyek Gasifikasi Tarakan.

Cash Flows for Financing Activities

The net cash used in PLN Gas Energy financing activities in 2025 amounted to Rp176.42 billion, a decrease of 12.72% or Rp25.72 billion compared to the 2024 figure of Rp202.15 billion. The decrease was primarily due to the ongoing submission of the shareholder loan (SHL) for the Tarakan Gasification project.

Tabel Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan 2023-2025
Table of Cash Flows from Financing Activities 2023-2025

(dalam Rp juta, kecuali dinyatakan lain) | in million Rp, unless stated otherwise

Uraian Description	2025	2024	2023	Kenaikan (Penurunan) 2024-2025 Increase (Decrease)	
				selisih Difference	Persentase Percentage
Pembayaran liabilitas sewa Payment of lease liabilities	(123.967)	(161.498)	(105.047)	37.531	(23,24)
Pembayaran pinjaman kepada pemegang saham Payment of shareholder loans	(52.456)	(40.648)	(38.761)	(11.808)	29,05
Kas bersih yang digunakan untuk aktivitas pendanaan Net cash used in financing activities	**(176.423)**	**(202.146)**	**(143.808)**	**25.723**	**(12,72)**

Aspek Pemasaran dan Pangsa Pasar
Marketing and Market Share Aspects

PLN Energi Gas senantiasa terus berkembang dan memberikan kontribusi maksimal bagi sektor energi, dalam rangka menghadapi tantangan ekonomi dan persaingan bisnis yang semakin ketat. Hal ini diwujudkan dengan memperkuat sinergi dengan PLN Grup serta Stakeholders lainnya untuk memastikan pasokan energi yang andal dan efisien bagi Pelanggan. Perusahaan senantiasa melakukan akselerasi Transformasi Digital dalam mendukung internal business process maupun dalam layanan untuk meningkatkan kepuasan Pelanggan. Hal ini tercermin dari realisasi pendapatan PLN Energi Gas di tahun 2025 dengan capaian sebesar 98,47% dari target yang ditetapkan untuk pelanggan PLN Grup, serta dari sisi pendapatan *Beyond* kWh dari pelanggan non-PLN dengan capaian sebesar 91,94% dari target yang ditetapkan.

PLN Energi Gas continues to develop and provide maximum contributions to the energy sector, to face economic challenges and increasingly tight business competition. It is realized by strengthening synergy with the PLN Group and other stakeholders to ensure a reliable and efficient energy supply for customers. The Company consistently accelerates Digital Transformation to support internal business processes and services to improve customer satisfaction. It is reflected in the realization of PLN Energi Gas's revenue in 2025, achieving 98.47% of the target set for PLN Group customers, as well as in the beyond kWh revenue from non-PLN customers, achieving 91.94% of the target set.

Strategi Pemasaran

Dalam rangka mendukung program gasifikasi pembangkit listrik yang tersebar di berbagai kepulauan di Indonesia, perusahaan memastikan keandalan rantai pasok gas yang lebih efisien serta mendukung pemenuhan kebutuhan gas di wilayah operasional Perusahaan untuk meningkatkan kepuasan pelayanan kepada Pelanggan. Hal ini diwujudkan dengan menyiapkan semua perangkat pendukung teknis maupun non-teknis yang diperlukan bagi kelancaran kehandalan operasonal untuk mendukung transaksi internal dengan PLN Grup maupun dengan pihak Ketiga, serta menyiapkan dukungan Teknologi informasi dan hal lainnya yang diperlukan.

Strategi pemasaran yang dilakukan di tahun 2025 berfokus pada meningkatkan pangsa pasar di luar PLN EPI Grup, dan melakukan pengembangan usaha untuk memasuki pasar non-PLN. Namun, sesuai kompetensi utama bisnis perseroan dengan tetap memperhatikan *risk appetite* Perseroan serta mengutamakan security of *supply* PLN EPI Grup. Selain itu terkait rencana keikutsertaan dalam kepemilikan entitas bisnis Gas dan LNG.

Di tahun 2025 Perseroan telah meningkatkan pangsa pasar di luar PLN Grup dengan melaksanakan pekerjaan *Beyond* kWh seperti penyewaan jasa *tugboat*. Selain meningkatkan pangsa pasar di luar PLN Grup, PLN Energi

Marketing Strategy

In order to support the gasification program for power plants spread across various islands in Indonesia, the Company ensures a more efficient gas supply chain and supports the fulfillment of gas needs in the Company's operational areas to enhance service satisfaction for Customers. It is realized by preparing all necessary technical and non-technical supporting devices for the ease of operational reliability to support internal transactions with the PLN Group or with third parties, as well as preparing the necessary information technology support and other required matters.

The marketing strategy implemented in 2025 focuses on increasing market share outside the PLN EPI Group and developing business to enter the non-PLN market. However, it aligns with the Company's core business competencies while considering its risk appetite and prioritizing the security of supply for the PLN EPI Group. Additionally, it relates to plans for participation in the ownership of Gas and LNG business entities.

In 2025, the Company increased its market share outside the PLN Group by undertaking beyond kWh work, such as tugboat lease services. In addition to increasing its market share outside the PLN Group, PLN Energi Gas

Gas juga telah melakukan kajian kelayakan operasional dan finansial, yang kemudian didukung dengan implementasi penerapan kajian manajemen risiko atas kegiatan tersebut. Perseroan telah melakukan Kajian *Feasibility Study* (FS) dan Kajian Risiko untuk Gasifikasi Tanjung Selor, Bridging Solution Gorontalo, dan Kajian Modifikasi Kapal LCT Berbasis ISO Tank.

Perseroan berupaya meningkatkan *value creation* melalui penyediaan fasilitas penyimpanan, transportasi, dan regasifikasi di Tarakan, Punagaya dan Tanjung Selor. Infrastruktur gas di Kepulauan Madura dan wilayah lainnya yang belum terjangkau juga dikembangkan sebagai bagian dari strategi pemerataan energi. Untuk memastikan keberlanjutan pasokan gas di Gorontalo, perusahaan juga mengimplementasikan bridging solution pasca relokasi FSRU SRGS.

Pangsa Pasar

PLN Energi Gas memiliki 2 segmentasi pelanggan yaitu PLN Grup dan luar PLN Grup. Adapun pelanggan untuk masing-masing segmen usaha Perseroan sebagaimana berikut.

FSRU Gorontalo	: PLN Nusantara Power
Pipa Gas Tanjung Batu	: PLN Indonesia Power
Tugboat	: PT Jawa Satu Power
Fasilitas Regasifikasi Tarakan	: PLN Nusantara Power
Operation & Mantenance	: PLN Nusantara Power

also conducted operational and financial feasibility studies, which were subsequently supported by the implementation of risk management studies for these activities. The Company has conducted a Feasibility Study (FS) and Risk Assessment for the Gasification of Tanjung Selor, Bridging Solution Gorontalo, and Modification Study of LCT Ships Based on ISO Tank.

The Company strives to enhance value creation through the provision of storage, transportation, and regasification facilities in Tarakan, Punagaya, and Tanjung Selor. Gas infrastructure in the Madura Islands and other unserved areas is also being developed as part of the energy equity strategy. To ensure the sustainability of gas supply in Gorontalo, the Company also implements a bridging solution for the FSRU SRGS post-relocation.

Market Share

PLN Energi Gas serves two categories of customers: the PLN Group and parties outside the PLN Group. The respective customers for each of the Company's business segments are as follows.

FSRU Gorontalo	: PLN Nusantara Power
Tanjung Batu Gas Pipeline	: PLN Indonesia Power
Tugboat	: PT Jawa Satu Power
Tarakan Regasification Facility	: PLN Nusantara Power
Operation & Maintenance	: PLN Nusantara Power

Analisis Kemampuan Membayar Utang, Tingkat Kolektibilitas Piutang, dan Rasio Keuangan Lainnya
Analysis of Solvency, Receivables Collectibility, and Other Financial Ratios

Kemampuan Membayar Utang

Kemampuan Perusahaan dalam membayar utang dilihat dari rasio likuiditas untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menyelesaikan kewajiban jangka pendeknya dan rasio solvabilitas untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menyelesaikan kewajiban jangka pendek dan panjang. Berikut adalah rincian tanggal jatuh tempo kontraktual untuk liabilitas keuangan dengan pembayaran yang telah disepakati:

Solvency

The Company's ability to pay debts is based on liquidity ratios to measure the Company's ability to settle its short-term obligations and solvency ratios to measure the Company's ability to settle short and long-term obligations. The following are the details of the contractual due dates for financial liabilities with agreed-upon payments:

Uraian Description	Jatuh tempo kontraktual liabilitas keuangan Contractual maturities of financial liabilities				
	< 1 tahun < 1 year	1-3 tahun 1 - 3 years	3-5 tahun 3 - 5 years	> 5 tahun > 5 years	Jumlah total
2025					
Utang usaha Trade payables	71.853	-	-	-	71.853
Biaya masih harus dibayar Accrued expenses	13.055	-	-	-	13.055
Utang lain-lain Other payables	4.204	-	-	-	4.204
Pinjaman pemegang saham Shareholder loans	60.397	115.746	74.886	-	251.029
Liabilitas sewa Lease liabilities	251.983	487.910	446.007	1.000.204	2.186.104
	401.492	**603.656**	**520.893**	**1.000.204**	**2.526.245**

*KETERANGAN : | *DESCRIPTION:
< 1 tahun : Kurang dari satu tahun | < 1 year : Less than one year
1 - 3 tahun : Lebih dari satu tahun tetapi tidak lebih dari tiga tahun | 1 - 3 years : More than one year but not more than three years
3 - 5 tahun : Lebih dari tiga tahun tetapi tidak lebih dari lima tahun | 3 - 5 years : More than three years but not more than five years
> 5 tahun : Lebih dari lima tahun | > 5 years : More than five years

Rasio Solvabilitas

Rasio solvabilitas merupakan rasio yang mengukur kemampuan Perusahaan membayar seluruh utangnya baik jangka pendek maupun jangka panjang. Rasio solvabilitas dapat dilihat melalui beberapa rasio keuangan diantaranya adalah Rasio Utang terhadap Aset (DAR) dan Rasio Utang terhadap Ekuitas (DER).

Pada tahun 2025, hasil perhitungan DAR adalah sebesar 0,78 kali, lebih kecil dibandingkan dengan tahun 2024

Solvency Ratio

The solvency ratio is a ratio that measures the Company's ability to pay all its debts, both short-term and long-term. The solvency ratio can be seen through several financial ratios, including the Debt-to-Asset Ratio (DAR) and the Debt-to-Equity Ratio (DER).

In 2025, the DAR calculation result was 0.78 times, lower than the 2024 figure of 0.83 times. It indicates a strengthening of the Company's financial structure,

sebesar 0,83 kali. Hal ini menunjukkan bahwa semakin kuatnya struktur keuangan perusahaan, yang tercermin dari menurunnya proporsi aset yang dibiayai oleh utang. Sedangkan DER Perusahaan diperoleh sebesar 3,56 kali, menurun dibandingkan nilai DER tahun 2024 senilai 4,72 kali. Nilai DER utamanya di dominasi oleh utang sewa jangka panjang sebagai bentuk perseroan menerapkan standar PSAK 116 dimana penurunan DER secara tahunan menunjukkan bahwa penguatan struktur permodalan perusahaan yang didukung oleh peningkatan porsi ekuitas selaras dengan penambahan laba bersih tahun berjalan dan pengelolaan utang yang lebih optimal sebagai bentuk komitmen perseroan dalam melunasi kewajiban kepada pihak ketiga.

as reflected by the decreasing proportion of assets financed by debt. Meanwhile, the Company's DER was obtained at 3.56 times, a decrease compared to the 2024 DER value of 4.72 times. The DER value is mainly dominated by long-term lease liabilities as the Company implements PSAK 116 standards, where the annual decrease in DER indicates the strengthening of its capital structure, supported by an increase in the equity portion, in line with the addition of the profit for the year, and more optimal debt management as a form of the Company's commitment to settling obligations to third parties.

Rasio Likuiditas

Rasio likuiditas dipakai untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban atau membayar utang jangka pendek yang telah jatuh tempo. Perhitungan rasio likuiditas terdiri dari rasio lancar dan rasio kas.

Rasio lancar tahun 2025 dibukukan sebesar 1,11 kali, lebih rendah dari tahun 2024 sebesar 1,14 kali. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat likuiditas perusahaan tetap berada pada level yang memadai untuk memenuhi kewajiban jangka pendek. Penurunan ini mencerminkan optimalisasi pengelolaan modal kerja dalam mendukung aktivitas investasi dan pengembangan bisnis.

Sementara itu, rasio kas tahun 2025 diperoleh sebesar 0,40 kali, lebih rendah dari tahun 2024 yang sebesar 0,42 kali. Hal ini menunjukkan bahwa Perusahaan mencerminkan optimalisasi pemanfaatan kas perusahaan untuk mendukung kegiatan operasional dan investasi strategis. Meskipun demikian, perusahaan tetap menjaga kecukupan likuiditas guna memenuhi kewajiban jangka pendek secara tepat waktu.

Liquidity Ratio

Liquidity ratios are used to measure the Company's ability to meet obligations or pay short-term debt that has matured. The calculation of the liquidity ratio consists of the current ratio and cash ratio.

The current ratio for 2025 was recorded at 1.11 times, lower than the 2024 ratio of 1.14 times. It indicates that the Company's liquidity level remains adequate to meet short-term obligations. This decline reflects the optimization of working capital management in supporting investment activities and business development.

Meanwhile, the cash ratio for 2025 was obtained at 0.40 times, lower than the 0.42 times in 2024. This indicates that the Company optimizes cash utilization to support operational activities and strategic investments. Nevertheless, the Company maintains sufficient liquidity to meet short-term obligations promptly.

Tabel Rasio Likuiditas dan Solvabilitas
Liquidity and Solvency Ratios Table

Uraian Description	2025	2024	2023	Selisih 2025-2024 Difference 2025-2024
Rasio Likuiditas Liquidity Ratios				
Rasio kas Cash ratio	0,405	0,422	0,580	(0,02)
Rasio lancar Current ratio	1,113	1,503	1,580	(0,028)
Rasio Solvabilitas Solvency Ratio				
Rasio liabilitas terhadap ekuitas Debt-to-equity ratio	3,56	0,50	1,06	(1,16)
Rasio liabilitas terhadap aset Debt-to-assets ratio	0,78	0,83	0,86	(0,04)

Tingkat Kolektibilitas Piutang

Tingkat kolektibilitas piutang merupakan kemampuan Perusahaan dalam menagih piutangnya. Indikator yang digunakan Perusahaan adalah Rata-rata periode penagihan piutang.

Rata-rata periode penagihan piutang pada tahun 2025 adalah 49 hari yaitu lebih cepat dibandingkan tahun 2024 selama 53 hari. Hal ini menunjukkan peningkatan efektivitas pengelolaan dan penagihan piutang. Kondisi ini mencerminkan percepatan konversi piutang menjadi kas, sehingga mendukung penguatan likuiditas dan efisiensi modal kerja perusahaan.

Receivables Collectibility

The receivables collectibility rate is the Company's ability to collect its receivables. The indicator used by the Company is the average collection period of trade receivables.

The average trade receivable collection period in 2025 was 50 days, which is faster compared to 53 days in 2024. This indicates an improvement in the effectiveness of accounts receivable management and collection. This condition reflects the acceleration of converting receivables into cash, thereby supporting the strengthening of the Company's liquidity and working capital efficiency.

Rasio Keuangan Lainnya

Selain rasio untuk mengetahui kemampuan Perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek dan jangka panjang serta tingkat kolektibilitas piutang, berikut diuraikan rasio penting lainnya yang relevan di PLN Energi Gas untuk mengukur kinerja keuangan.

Kemampuan Perusahaan dalam menghasilkan laba pada tahun 2025 secara umum mengalami Pertumbuhan. Hal ini dibuktikan dengan adanya peningkatan pada seluruh rasio profitabilitas yang digunakan Perusahaan.

Other Financial Ratios

In addition to ratios to determine the Company's ability to meet short-term and long-term obligations and the receivables collectibility rate, the following describes other important ratios relevant to PLN Energi Gas to measure financial performance.

In general, the Company's ability to generate profits in 2025 experienced an increase. It was proven by the decrease in all profitability ratios used by the Company.

Tabel Rasio Profitabilitas
Table of Liquidity and Solvency Ratios

Uraian Description	2025	2024	2023	Selisih 2025-2024 Difference 2025-2024
Rasio laba bersih terhadap aset Return on assets	3,99	3,30	2,62	0,69
Rasio laba bersih terhadap ekuitas Return on equity	18,20	18,91	19,24	(0,71)
Margin laba bruto Gross profit margin	62,44	34,59	22,81	27,85
Margin laba bersih Net profit margin	19,73	16,86	12,38	2,87

Target dan Realisasi Tahun 2025 serta Proyeksi Tahun 2026
Target and Realization in 2025 and Projection for 2026

Perbandingan Target, Realisasi, dan Proyeksi Kinerja Operasional

Comparison of Target, Realization, and Projection of Operational Performance

Tabel Target, Realisasi, dan Proyeksi Kinerja Operasional
Table of Target, Realization, and Projection of Operational Performance

Uraian Description	Satuan Unit	Target 2025 2025 Target	Realisasi 2025 2025 Realization	Pencapaian Achievement	Proyeksi 2026 Projection for 2026
EBITDA	Rp Miliar Rp Billion	282,72	305,84	108,17%	308,43
Operating Ratio	%	42,19	37,56	110,00%	44,36
ROIC	%	10,16	11,78	110,00%	-
EAF *Midstream* Gas EAF of Midstream Gas	%	98,95	99,89	100,95%	94,80
Pendapatan dari Luar PLN Group (*beyond kWh*) Revenue from Non-PLN Group Entities (Beyond kWh)	Rp Miliar Rp Billion	15,75	14,48	91,95%	28,59

- *Earning Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization (EBITDA)*
  Realisasi EBITDA mencapai Rp305,84 miliar, melampaui target yang ditetapkan dalam RKAP 2025 sebesar Rp282,72 miliar. Dengan pencapaian ini, EBITDA berhasil mencapai 108,17% dari target tahunan. Hal ini dipengaruhi oleh adanya penyelarasan lini bisnis Pra COD Untuk Gasifikasi Pembangkit Tarakan dan perseroan telah melakukan usaha terbaik dalam efektivitas pengelolaan pendapatan dan pengendalian biaya operasional. Sedangkan di tahun 2026 Perusahaan memproyeksikan EBITDA sebesar 308,43, lebih tinggi dari realisasi 2025.

- *Operating Ratio*
  Realisasi *Operating Ratio* telah mencapai 37,56%, lebih rendah dibandingkan dengan target yang ditetapkan sebesar 42,19%. Dengan pencapaian ini, *Operating ratio* berhasil mencapai 110,00% dari target tahunan. Pencapaian ini mencerminkan efektivitas dalam pengelolaan biaya usaha guna meningkatkan profitabilitas Sedangkan di tahun 2026 Perusahaan memproyeksikan *Operating ratio* sebesar 44,36%, lebih rendah dari realisasi 2025.

- Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization (EBITDA)
  EBITDA realization reached Rp305.84 billion, exceeding the target set in the 2025 ABOP of Rp282.72 billion. With this achievement, EBITDA successfully reached 108.17% of the annual target. It is influenced by the alignment of the Pre-COD business line for the Tarakan Power Plant Gasification, and the Company made its best efforts in the effectiveness of revenue management and operational cost control. Meanwhile, in 2026, the Company projects an EBITDA of 308.43, higher than the realization in 2025.

- Operating Ratio
  The realization of the Operating Ratio reached 37.56%, lower than the target set at 42.19%. With this achievement, the Operating Ratio reached 110.00% of the annual target. This achievement reflects the effectiveness in managing operating costs to increase profitability. Meanwhile, in 2026, the Company projects an operating ratio of 44.36%, lower than the realization in 2025.

- *Return on Invested Capital* (ROIC)
  Sampai Desember 2025, realisasi *Return on Invested Capital* (ROIC) sebesar 11,78%, melampaui target yang ditetapkan sebesar 10,16%. Dengan pencapaian ini, *Return on Invested Capital* (ROIC) berhasil mencapai 110,00% dari target tahunan. Pencapaian ini menunjukkan menunjukkan efisiensi dalam pengelolaan modal yang diinvestasikan, sehingga perusahaan mampu menghasilkan keuntungan yang lebih optimal dibandingkan dengan perencanaan awal.

- EAF *Midstream* Gas
  Di akhir tahun 2025, realisasi *Equivalent Availability Factor* (EAF) *Midstream* Gas mencapai sebesar 99,89%, melampaui target yang ditetapkan sebesar 98,95%. Dengan pencapaian ini, EAF *Midstream* Gas berhasil mencapai 100,95% dari target tahunan. Pencapaian ini menunjukkan kinerja operasional yang sangat baik. Sedangkan di tahun 2026 Perusahaan memproyeksikan EAF *Midstream* Gas sebesar 94,80% lebih rendah dari realisasi 2025.

- Pendapatan dari luar PLN *Group* (*Beyond* kWh)
  Pada tahun 2025, realisasi pendapatan dari luar PLN *Group* (*Beyond* kWh) sebesar Rp14,48 miliar, tidak mencapai target yang ditetapkan sebesar Rp15,75 miliar. Dengan pencapaian ini, pendapatan dari luar PLN *Group* (*Beyond* kWh) mencapai 91,95% dari target tahunan. Pencapaian ini menunjukkan strategi diversifikasi pendapatan yang berjalan cukup baik, serta efektivitas dalam memanfaatkan peluang di luar *core* bisnis Perseroan. Sedangkan di tahun 2026 Perusahaan memproyeksikan Pendapatan dari luar PLN *Group* (Pendapatan Inovatif sebesar) Rp28,59 miliar.

- Return on Invested Capital (ROIC)
  Until December 2025, the realization of Return on Invested Capital (ROIC) was 11.78%, exceeding the set target of 10.16%. With this achievement, the Return on Invested Capital (ROIC) reached 110.00% of the annual target. This achievement shows efficiency in the management of invested capital, allowing the Company to generate more optimal profits compared to the initial plan.

- EAF of Midstream Gas
  At the end of 2025, the realization of the Equivalent Availability Factor (EAF) for Midstream Gas reached 99.89%, exceeding the set target of 98.95%. With this achievement, the EAF for Midstream Gas successfully reached 100.95% of the annual target. This achievement demonstrates excellent operational performance. Meanwhile, in 2026, the Company projects the EAF for Midstream Gas to be 94.80%, lower than the realization in 2025.

- Beyond kWh Revenue
  In 2025, the realization of revenue from outside the PLN Group (beyond kWh) Rp14.48 billion, not achieving the set target of Rp15.75 billion. With this achievement, beyond kWh revenue reached 91.95% of the annual target. This achievement shows a well-executed revenue diversification strategy and effectiveness in capitalizing on opportunities outside the Company's core business. Meanwhile, in 2026, the Company projects revenue from outside the PLN Group (Innovative Revenue) amounting to Rp28.59 billion.

Perbandingan Target, Realisasi, dan Proyeksi Kinerja Keuangan

Perbandingan Target, Realisasi, dan Proyeksi Laba Rugi

Pada tahun 2025 realisasi pendapatan usaha sebesar Rp480,95 miliar atau mencapai 99,29% dari target yang ditetapkan tahun 2025 sebesar Rp484,41 miliar. Disebabkan adanya dinamika proses kontruksi pada

Comparison of Target, Realization, and Projection of Profit or Loss

Comparison of Target, Realization, and Projection of Profit or Loss

In 2025, the realization of operating revenue amounted to Rp480.95 billion, achieving 99.29% of the target set for 2025, which was Rp484.41 billion. It was due to the dynamics of the construction

proyek gasifikasi pembangkit Tarakan dan Punagaya. Dimana untuk Pendapatan Gasifikasi Pembangkit Tarakan di targetkan dapat COD pada Bulan Maret Tahun 2025, dengan nilai total pendapatan sebesar Rp47,35 miliar, Perusahaan berhasil menyelesaikan tahap *commissioning* pada 14 September 2025. Sehingga Perusahaan mendapatan Pendapatan Pra COD sebesar Rp3,95 miliar. Saat ini PLN Energi Gas telah memperoleh kesepakatan terkait dimulainya operasional Jasa *Midstream* Gasifikasi Tarakan Gunung Belah terhitung sejak 1 Januari 2026 (COD), dengan proyeksi pendapatan operasional sebesar Rp6,5 miliar per bulan. Serta pendapatan Gasifkasi Punagaya Perseroan telah berhasil menyelesaikan penyediaan infrastruktur Pipa Gas Tahap 1 (*Onshore Facility*) pada tanggal 29 Agustus 2025. Pekerjaan EPC untuk *offshore facility* dan *metering system* terjadi penundaan sejak tanggal 08 Agustus 2025 sampai 19 November 2025, dan saat ini masih berkoordinasi intensif dengan PLN EPI atas ruang lingkup pekerjaan yang akan dilanjutkan. Pada tahun 2026 Perusahaan memproyeksikan jumlah pendapatan usaha sebesar Rp535,87 miliar.

process in the Tarakan and Punagaya gasification power plant projects. Where the Tarakan Gasification Power Plant Revenue is targeted to COD in March 2025, with a total revenue value of Rp47.35 billion, the Company successfully completed the commissioning stage on September 14, 2025. Therefore, the Company received Pre COD Revenue of Rp3.95 billion. Currently, PLN Energi Gas has obtained agreement regarding the commencement of the Tarakan Gunung Belah Gasification Midstream Service operation starting January 1, 2026 (COD), with a projected operational revenue of Rp6.5 billion per month. As well as Punagaya Gasification revenue, the Company has successfully completed the provision of Phase 1 Gas Pipeline infrastructure (Onshore Facility) on August 29, 2025. EPC work for offshore facilities and metering systems has been delayed from August 8, 2025 to November 19, 2025, and is currently still coordinating with PLN EPI regarding the scope of work to be continued. In 2026, the Company projects total operating revenue of Rp535.87 billion.

Tabel Target, Realisasi, dan Proyeksi Pendapatan dan Laba
Table of Target, Realization, and Projection of Revenue and Profit

(dalam Rp juta, kecuali dinyatakan lain) | in million Rp, unless stated otherwise

Uraian Description	Target 2025 2025 Target	Realisasi 2025 2025 Realization	Pencapaian Achievement %	Proyeksi 2026 Projection of 2026
Pendapatan Usaha Revenue	484.412	480.955	99,29%	537.235
Beban Usaha Operating Expenses	204.353	180.650	180,83%	238.313
Laba (Rugi) Tahun Berjalan Profit (Loss) for the Year	96.275	94.738	98,40%	102.764

Realisasi beban usaha sebesar Rp180,65 miliar atau mencapai 88,40% dari target yang ditetapkan tahun 2025 sebesar Rp204,35 miliar. Efektifitas Perseroan dalam melakukan pengelolan beban usaha dipengaruhi oleh adanya efisiensi atas biaya O&M Pipa Gas Tanjung Batu dan penurunan biaya sewa Kompresor Gorontalo. Pada Tahun 2026 Perusahaan memproyeksikan jumlah beban usaha sebesar Rp238,31 miliar selaras dengan pertumbuhan pendapatan.

Operating expenses reached Rp180.65 billion, or 88.40% of the Rp204.35 billion target set for 2025. The Company's effectiveness in managing operating expenses was influenced by efficiencies in the Tanjung Batu Gas Pipeline O&M costs and a decrease in Gorontalo Compressor rental costs. In 2026, the Company projects operating expenses to reach Rp238.31 billion, in line with revenue growth.

Realisasi laba (rugi) tahun berjalan di 2025 sebesar Rp94,74 miliar atau mencapai 98,40% dari target yang ditetapkan tahun 2025 sebesar Rp96,27 miliar. Dengan masih didominasinya kinerja keuangan atas pendapatan *existing*, Perusahaan terus berupaya meningkatkan pengendalian terhadap biaya operasional yang efektif dan efisien, dimana pada Tahun 2025 ditargetkan adanya pendapatan baru atas proyek Gasifkasi Pembangkit Tarakan dan Punagaya dengan berupaya melakukan akselerasi penyelesaian progress konstruksi maka pada tahun 2026 Perusahaan memproyeksikan jumlah laba (rugi) tahun berjalan sebesar Rp102,76 miliar.

The realization of profit (loss) for the year in 2025 amounted to Rp94.74 billion or 98.40% of the target set for 2025 of Rp96.27 billion. With financial performance still dominated by existing revenue, the Company continues to strive to improve control over effective and efficient operational costs, where in 2025 it is targeted to have new revenue from the Tarakan and Punagaya Power Plant Gasification projects by trying to accelerate the completion of construction progress, so that in 2026 the Company projects the total profit (loss) for the current year to be IDR 102.76 billion.

Perbandingan Target, Realisasi, dan Proyeksi Posisi Keuangan

Comparison of Target, Realization, and Projection of Financial Position

Pada tahun 2025 realisasi total aset sebesar Rp2,38 triliun atau mencapai 86,49% dari target yang ditetapkan tahun 2025 sebesar Rp2,75 triliun.

In 2025, the total asset realization was Rp2.38 trillion or reached 86.49% of the target set in 2025 of Rp2.75 trillion.

Tabel Target, Realisasi, dan Proyeksi Posisi Keuangan
Table of Financial Position Targets, Actuals, and Projections

dalam Rp juta, kecuali dinyatakan lain | in million Rp, unless stated otherwise

Uraian Description	Target 2025 Target 2025	Realisasi 2025 2025 Realization	Pencapaian Achievement %	Proyeksi 2026 Projection for 2026
Total Aset Total Assets	2.750.996	2.379.218	86,49%	2.596.636
Total Liabilitas Total Liabilities	2.228.718	1.857.734	83,35%	1.985.031
Total Ekuitas Total Equity	522.278	521.484	99,85%	611,605

Sebagai bentuk kepatuhan Perseroan terhadap ketentuan akuntansi yang berlaku dimana komposisi aset PT PLN Energi Gas terimplikasi penerapan PSAK 116 dengan persentase sebesar 82,41% atau senilai Rp1,96 triliun dari nilai Aset, yang berasal dari piutang sewa pembiayaan atas aset Pipa Gas Tanjung Batu dan FSRU Sulawesi. Secara prinsip akuntansi, nilai aset tersebut akan mengalami amortisasi secara berkala setiap tahun sesuai dengan perhitungan *Lease Payment Schedule*. Dengan demikian, nilai aset akan cenderung menurun sepanjang periode sewa apabila belum terdapat realisasi investasi baru yang bersumber dari pendanaan/pinjaman dari pemegang saham.

Actualization of the Company compliance with applicable accounting provisions where the composition of PT PLN Energi Gas assets is implied by the implementation of SFAS 116 with a percentage of 82.41% or Rp1.96 trillion of the Asset value, generated from finance lease receivables for the Tanjung Batu Gas Pipeline and Sulawesi FSRU assets. In accounting principles, the value of these assets will experience periodic amortization every year in accordance with the Lease Payment Schedule calculation. Thus, the asset value will tend to decrease throughout the lease period if there is no realization of new investments sourced from funding/loans from shareholders.

Pada tahun 2025 realisasi total liabilitas sebesar Rp1,86 triliun atau mencapai 83,35% dari target tahun 2025 sebesar Rp2,23 triliun. Di tahun 2026 Perusahaan memproyeksikan total liabilitas sebesar Rp 1,98 triliun dengan asumsi Pada RKAP 2026.

In 2025, the total liabilities were Rp1.86 trillion, reaching 83.35% of the 2025 target of Rp2.23 trillion. In 2026, the Company projects total liabilities of Rp1.98 trillion with the assumption of 2026 ABOP.

Pada tahun 2025 realisasi total ekuitas sebesar Rp521,48 miliar atau mencapai 99,85% dari target tahun 2025 sebesar Rp522,28 miliar. Di tahun 2026 Perusahaan memproyeksikan total ekuitas sebesar Rp611,60 miliar dengan asumsi Pada RKAP 2026.

In 2025, the actual total equity amounted to Rp521.48 billion, achieving 99.85% of the 2025 target of Rp522.28 billion. In 2026, the Company projects total equity of Rp611.60 billion, with the assumption of 2026 ABOP.

Perbandingan Target, Realisasi, dan Proyeksi Struktur Modal

Realisasi Struktur Modal tahun 2025 adalah sebesar Rp2,38 triliun dengan pencapaian 86,49% dari target RKAP 2025. Sedangkan untuk target RKAP 2026, Perseroan memproyeksikan struktur modal sebesar Rp2,59 triliun atau meningkat 109,14 % dari realisasi tahun 2025.

Comparison of Target, Realization, and Projection of Capital Structure

The realization of the Capital Structure in 2025 was Rp2.38 trillion, achieving 86.49% of the 2025 ABOP target. Meanwhile, for the 2026 ABOP target, the Company projects a capital structure of Rp 2.59 trillion, an increase of 109.14% from the 2025 realization.

Tabel Target, Realisasi, dan Proyeksi Struktur Modal
Table of Capital Structure Targets, Actuals, and Projections

dalam Rp juta, kecuali dinyatakan lain | in million Rp, unless stated otherwise

Uraian Description	Target RKAP 2025 2025 ABOP Target (1)		Realisasi 2025 2025 Realization (2)		Realisasi 2025: Target RKAP 2025 2025 Realization : 2025 ABOP Target	Proyeksi 2026 2026 Projection	
	Nominal Amount	Komposisi Composition	Nominal Amount	Komposisi Composition		Nominal	Komposisi Composition
Liabilitas Liabilities	2.228.718	81,01%	1.857.734	78,08%	83,35	1.985.031	105,83%
Ekuitas Equity	522.278	18,99%	521.484	21,92%	99,85	611,605	117,28%
Aset Assets	2.750.996	100,00%	2.379.218	100,00%	86,49	2.596.636	109,14%

Perbandingan Target, Realisasi, dan Proyeksi Investasi

Comparison of Target, Realization, and Projection of Investment

Tabel Target, Realisasi, dan Proyeksi Investasi
Investment Targets, Actuals, and Projections Table

dalam Rp juta | in million Rp

Uraian Description	Target 2025 Target 2025	Realisasi 2025 2025 Actual	Pencapaian Achievement %	Proyeksi 2026 2026 Projection
Investasi Investment	201.670	103.600	51,37%	137,68
Jumlah Total	201.670	103.600	51,37%	137,68

Sepanjang tahun 2025, realisasi penggunaan anggaran Perusahaan untuk investasi telah mencapai Rp103,60 miliar, dengan tingkat pencapaian 51,37% dari target yang ditetapkan dalam RKAP sebesar Rp201,67 miliar. Di tahun 2026, Perseroan memproyeksikan investasi sebesar Rp137,68 miliar.

Throughout 2025, the realization of the Company's budget usage for investments reached Rp103.60 billion, with an achievement rate of 51.37% of the target set in the ABOP amounting to Rp201.67 billion. In 2026, the Company projects an investment of Rp137.68 billion.

Proyeksi Kebijakan Dividen

Terkait proyeksi kebijakan dividen diputuskan mengacu pada Keputusan RUPS didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Projection for Dividend Policy

Regarding the projection for dividend policy, it is decided by referring to the GMS Resolution based on the prevailing laws and regulations.

Struktur Modal dan Kebijakan Manajemen atas Struktur Modal
Capital Structure and Management Policy on Capital Structure

Struktur modal menggambarkan pembiayaan permanen yang terdiri atas utang berbasis bunga dan modal sendiri. PLN Energi Gas berupaya memiliki alternatif pendanaan yang efisien, salah satunya dengan memiliki struktur modal yang optimal yaitu dengan bauran antara liabilitas dan modal sendiri yang sesuai. Perusahaan mengelola struktur modal untuk menjamin keberlanjutan bisnis dan memaksimalkan imbalan bagi Pemegang Saham.

Capital structure shows permanent financing consisting of interest-based debt and equity capital. PLN Energi Gas strives to have efficient funding alternatives, one of which is by having an optimal capital structure, namely with an appropriate mix of liabilities and equity capital. The Company manages its capital structure to ensure business sustainability and maximize shareholder returns.

Komposisi struktur modal Perusahaan didominasi oleh liabilitas dalam tiga tahun terakhir. Berikut komposisi struktur modal Perusahaan dalam tiga tahun terakhir.

The composition of the Company's capital structure is dominated by liabilities in the last three years. The following is the composition of the Company's capital structure in the last three years.

Tabel Struktur Modal
Table of Capital Structure

Uraian Description	2025		2024		2023	
	Nominal Amount	Komposisi Composition	Nominal Amount	Komposisi Composition	Nominal Amount	Komposisi Composition
	(Rupiah)	(%)	(Rupiah)	(%)	(Rupiah)	(%)
Jumlah Liabilitas Total Liabilities	1.857.734	78,08	2.015.934	82,53	2.195.850	86,39
Jumlah Ekuitas Total Equity	521.484	21,92	426.746	17,47	346.038	13,61
Jumlah Total	2.379.218	100,00	2.442.680	100,00	2.541.888	100,00

Kebijakan Manajemen atas Struktur Modal

Aktivitas Perusahaan rentan terhadap berbagai risiko keuangan: risiko pasar (termasuk risiko nilai tukar mata uang asing dan risiko tingkat bunga), risiko kredit dan risiko likuiditas. Program manajemen risiko Perusahaan secara keseluruhan dipusatkan pada pasar keuangan yang tidak dapat diprediksi dan Perusahaan berusaha untuk memperkecil efek yang berpotensi merugikan kinerja keuangan Perusahaan.

Manajemen risiko merupakan tanggung jawab Direksi. Direksi bertugas menentukan prinsip dasar kebijakan manajemen risiko Perusahaan secara keseluruhan serta kebijakan pada area tertentu seperti risiko mata uang asing, risiko suku bunga, risiko kredit dan risiko likuiditas.

Management Policy on Capital Structure

The Company's activities are vulnerable to various financial risks: market risk (including foreign exchange risk and interest rate risk), credit risk, and liquidity risk. The Company's overall risk management program is focused on the unpredictable financial markets, and the Company strives to minimize the potentially adverse effects on its financial performance.

Risk management is the Board of Directors' responsibility. The Board is tasked with determining the fundamental principles of the Company's overall risk management policy as well as policies in specific areas such as foreign exchange risk, interest rate risk, credit risk, and liquidity risk.

Risiko Pasar

- Risiko Nilai Tukar Mata Uang Asing
  Secara kas, mayoritas transaksi Perusahaan dilakukan dalam mata uang Rupiah sehingga mengurangi dampak dari fluktuasi nilai tukar mata uang asing. Oleh karena itu, Perusahaan menilai bahwa risiko nilai tukar mata uang asing adalah minimal.

- Risiko Suku Bunga
  Eksposur terhadap suku bunga dimonitor untuk meminimalkan dampak negatif terhadap Perusahaan. Pinjaman pemegang saham Perusahaan menggunakan suku bunga tetap, sehingga tidak terdapat risiko pengaruh suku bunga mengambang dari pinjaman pemegang saham.

Pada tanggal 31 Desember 2025, aset keuangan dan liabilitas keuangan Perusahaan yang dipengaruhi oleh suku bunga mengambang adalah kas dan setara kas di bank. Risiko pengaruh suku bunga mengambang pada kas dan setara kas dan setara kas di bank tidak signifikan.

Risiko Kredit

Risiko kredit terutama berasal dari kas dan setara kas di bank, piutang usaha, piutang non-usaha, dan piutang sewa Pembiayaan.

Untuk piutang usaha dan piutang sewa pembiayaan, Perusahaan menilai bahwa risiko kredit adalah minimal karena piutang usaha dan piutang sewa pembiayaan berasal dari PLN. Untuk kas dan setara kas, Perusahaan meminimalisir risiko kredit dengan melakukan penempatan pada beberapa bank untuk menghindari pemusatan yang signifikan dengan satu institusi.

Risiko Likuiditas

Risiko likuiditas muncul dalam situasi Perusahaan kesulitan memperoleh pendanaan. Kebijakan manajemen risiko likuiditas yang berhati-hati dilakukan dengan menjaga kecukupan kas. Perusahaan mengelola risiko likuiditas dengan memonitor perkiraan arus kas dan arus kas aktual serta menyesuaikan profil jatuh tempo dari aset dan liabilitas keuangan.

Market Risk

- Foreign exchange rate risk On a cash basis, the majority of the Company's transactions are denominated in Rupiah, which reduces the impact of fluctuations in foreign exchange rates. Therefore, the Company assesses the foreign exchange risk as minimal.

- Interest rate risk
  Interest rate exposure is monitored to minimize any negative impact to the Company. Interest rate of the Company's shareholder loans are using fixed rates, therefore there is no floating interest rate risk from the shareholder loans.

As at December 31, 2025, the financial assets and financial liabilities of the Company which are impacted by floating interest rates are cash and cash equivalents in banks. Floating interest rate risk on cash and cash equivalents in banks is not significant.

Credit Risk

Credit risk arises from cash and cash equivalents in bank, trade receivables, non-trade receivables and finance lease receivables.

For trade receivables and finance lease receivables, the Company assesses the credit risk is minimal as trade receivables and finance lease receivables are from PLN. For cash and cash equivalents, the Company minimize credit risk by placing the funds in several banks to avoid significant concentration of cash and cash equivalents with one institution.

Liquidity risk

Liquidity risk arises in situations where the Company has difficulties in obtaining funding. Prudent liquidity risk management implies maintaining sufficient cash. The Company manages liquidity risk by continuously monitoring forecast and actual cash flows and matching the maturity profiles of financial assets and liabilities.

Perusahaan mengelola risiko modal untuk memastikan bahwa mereka akan mampu untuk melanjutkan kelangsungan usaha dan untuk memastikan pemenuhan batasan rasio kecukupan modal. Struktur modal Perusahaan terdiri dari pinjaman ekuitas pemegang saham. Direksi dan Dewan Komisaris Perusahaan secara berkala melakukan tinjauan struktur permodalan Perusahaan. Sebagai bagian dari tinjauan ini, Direksi dan Dewan Komisaris mempertimbangkan biaya permodalan dan risiko yang berhubungan. Selain itu, Perusahaan secara berkala meninjau dan menjaga struktur modal untuk memastikan kemampuan dan kelayakan yang dimiliki. Hal ini dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan modal di masa mendatang dan efisiensi modal Perusahaan, meliputi profitabilitas saat ini dan proyeksi ke depan, serta proyeksi arus kas operasional. Manajemen berpendapat bahwa nilai buku dari aset dan liabilitas keuangannya mendekati nilai wajar dari aset dan liabilitas keuangan tersebut pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024.

The Company manages capital risk to ensure that it will be able to continue as a going concern. The Company's capital structure consists of shareholders' equity. The Company's Board of Directors and Board of Commissioners regularly reviews the Company's capital structure. As part of this review, the Board of Directors and Board of Commissioners considers the cost of capital and related risks. In addition, the Company periodically reviews and maintains its capital structure to ensure its capabilities and viability. This is carried out by considering the future capital needs and the Company's capital efficiency, including current profitability and future projections, as well as operational cash flow projections. Management believes that the book value of its financial assets and liabilities approaches the fair value of those financial assets and liabilities as of December 31, 2025, and 2024.

Manajemen mengelola struktur permodalan dan mempertahankan rasio modal yang sehat dalam rangka mendukung usaha dan memaksimalkan imbalan bagi Pemegang Saham. Manajemen memastikan adanya tingkat pengembalian modal dengan menjaga kebijakan modal yang terdiri dari modal saham biasa, tambahan modal disetor, dan saldo laba. Pengawasan struktur modal dilakukan dengan menggunakan rasio liabilitas terhadap ekuitas.

Management manages the capital structure and maintains sound capital ratios to support the business and maximize shareholder returns. Management ensures return on capital by maintaining a capital policy consisting of common share capital, additional paid-in capital, and retained earnings. Monitoring of the capital structure is carried out using the debt-to-equity ratio.

Kontribusi kepada Negara
Contribution to the State

Sebagai bentuk komitmen PLN Energi Gas dalam pemenuhan kewajiban perpajakan dan sebagai bagian dari dukungan terhadap pembangunan nasional dan pelayanan publik. Realisasi pemenuhan kewajiban keuangan pada Negara sampai dengan tahun 2025 adalah sebesar Rp86,43 miliar dengan rincian sebagai berikut:

As a form of PLN Energi Gas' commitment to fulfilling tax obligations and as part of support for national development and public services. The realization of the fulfillment of financial obligations to the State until 2025 is Rp86.43 billion with the following details:

Tabel Pembayaran Pajak Tahun 2023-2025
Table of Tax Payment 2023–2025

dalam Rp juta | in million Rp

Jenis Pajak Types of Taxes	2023	2024	2025
PPh Pasal 21 Income Tax – Article 21	4.405	3.990	6.232
PPh Pasal 23 Income Tax – Article 23	13.836	13.012	13.121
PPh Pasal 25 Income Tax – Article 25	6.349	7.390	8.375
PPh Pasal 29 Income Tax – Article 29	1.964	1.936	1.815
PPh Pasal 4 Ayat 2 Income Tax – Article 4 (2)	130	2.018	2.475
PPN Dalam Negeri Domestic Value Added Tax (Domestic VAT)	50.320	55.371	54.415
Jumlah Total	77.004	83.676	86.434

Pengelolaan Pajak

Beban pajak kini dihitung berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku pada tanggal pelaporan keuangan, di negara di mana Perusahaan beroperasi dan menghasilkan pendapatan kena pajak. Manajemen secara periodik mengevaluasi posisi yang dilaporkan di Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) sehubungan dengan situasi di mana aturan pajak yang berlaku membutuhkan interpretasi. Jika perlu, manajemen menentukan provisi berdasarkan jumlah yang diharapkan akan dibayar kepada otoritas pajak. Berdasarkan Undang-Undang Perpajakan yang berlaku di Indonesia, Perusahaan menghitung, menetapkan dan membayar sendiri besarnya jumlah pajak yang terutang. DJP dapat menetapkan atau mengubah liabilitas pajak tersebut dalam batas waktu lima tahun sejak saat terutangnya pajak.

Tax Management

The tax charge is currently calculated based on tax regulations in effect at the financial reporting date in the countries where the Company operates and generates taxable income. Management periodically evaluates positions reported in annual tax returns regarding situations where applicable tax rules require interpretation. Where necessary, management establishes provisions based on the amounts expected to be paid to tax authorities. Under applicable Indonesian tax laws, the Company self-assesses and pays the amount of tax due. The Directorate General of Taxes (DGT) may determine or adjust such tax liabilities within five years from the time the tax became due.

Kebijakan dan Pembagian Dividen
Dividend Policy and Distribution

Kebijakan Dividen Perseroan diatur berdasarkan Anggaran Dasar PLN Energi Gas Pasal 26 tentang Penggunaan Laba yaitu sebagai berikut:

1. Penggunaan laba bersih termasuk jumlah penyisihan untuk cadangan kerugian diputuskan oleh Rapat Umum Pemegang Saham;
2. Seluruh laba bersih setelah dikurangi penyisihan untuk cadangan dibagikan kepada Pemegang Saham sebagai dividen kecuali ditentukan lain oleh Rapat Umum Pemegang Saham;
3. Dividen hanya boleh dibagikan apabila Perseroan mempunyai saldo laba positif;
4. Kecuali bagian dividen yang menjadi hak PT PLN Energi Primer Indonesia, dividen yang tidak diambil dalam waktu 5 (lima) tahun setelah disediakan untuk dibayarkan, dimasukan dalam dana cadangan yang khusus diperuntukkan untuk itu;
5. Dividen dalam dana cadangan khusus tersebut dapat diambil oleh Pemegang Saham yang berhak dengan menyampaikan bukti haknya atas dividen tersebut yang dapat diterima oleh Direksi Perseroan dengan syarat pengambilannya tidak secara sekaligus dan dengan membayar biaya administrasi yang ditetapkan Direksi;
6. Dividen yang telah dimasukkan dalam cadangan khusus dan tidak diambil dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun akan menjadi hak Perseroan;
7. Perseroan dapat membagikan dividen interim sebelum tahun buku Perusahaan berakhir apabila diminta oleh Pemegang Saham yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari saham yang telah dikeluarkan, dengan memperhatikan proyeksi perolehan laba dan kemampuan keuangan Perusahaan;
8. Pembagian dividen interim ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi setelah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris;
9. Dalam hal setelah tahun buku berakhir ternyata Perseroan menderita kerugian, dividen interim yang telah dibagikan harus dikembalikan oleh Pemegang Saham kepada Perseroan;
10. Direksi dan Dewan Komisaris bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian Perusahaan, dalam hal Pemegang Saham tidak dapat mengembalikan dividen interim.

The Company's Dividend Policy is regulated based on the Articles of Association of PLN Energi Gas Article 26 on the Use of Profits as follows:

1. The use of net profit, including the amount set aside for loss reserves, is decided by the General Meeting of Shareholders;
2. All net profit after deducting the provision for reserves is distributed to Shareholders as dividends unless otherwise determined by the General Meeting of Shareholders;
3. Dividends may only be distributed if the Company has a positive retained earnings balance;
4. Except for the portion of the dividend entitled to PT PLN Energi Primer Indonesia, dividends that are not claimed within 5 (five) years after being provided for payment are included in a special reserve fund designated for that purpose;
5. Dividends in the special reserve fund can be claimed by entitled Shareholders by submitting proof of their entitlement to the dividend, which can be accepted by the Company's Board of Directors, provided that the claim is not made all at once and the administrative fee set by the Board of Directors is paid;
6. Dividends that have been placed in the special reserve and not claimed within a period of 10 (ten) years will become the Company's right;
7. The Company can distribute interim dividends before the Company's fiscal year ends if requested by Shareholders representing at least 1/10 (one-tenth) of the issued shares, taking into account the projected profit and the Company's financial capability;
8. The distribution of interim dividends is determined by the decision of the Board of Directors after obtaining the approval of the Board of Commissioners;
9. If the Company incurs a loss after the fiscal year ends, the interim dividends that have been distributed must be returned by the Shareholders to the Company;
10. The Board of Directors and the Board of Commissioners are jointly responsible for the Company's losses if the Shareholders cannot return the interim dividends.

Pembagian Dividen

Hingga akhir tahun 2024 dan 2025 Perseroan belum membagikan dividen sehingga tidak ada informasi yang dapat diungkapkan terkait persentase jumlah dividen yang dibagikan terhadap laba bersih, jumlah dan tanggal dividen kas yang dibagikan serta distribusi dividen non kas, jumlah dividen per saham, serta jumlah dividen yang dibayar per tahun.

Dividend Distribution

Until the end of 2024 and 2025, the Company did not distribute dividends. Therefore, there is no information that can be disclosed regarding the percentage of dividends distributed to net profit, the amount and date of cash dividends distributed and non-cash dividend distribution, the amount of dividends per share, and the amount of dividends paid per year.

Realisasi dan Ikatan Material Investasi Barang Modal
Realization and Material Commitments of Capital Asset Investments

Investasi merupakan pengeluaran yang dilakukan oleh Perusahaan untuk memperoleh Aset Tetap atau menambah nilai Aset Tetap yang telah dimiliki dengan tujuan akan memberikan nilai manfaat di masa yang akan datang. Secara umum, tujuan investasi barang modal yang dilakukan adalah untuk mendukung kinerja operasional Perusahaan. Strategi investasi pada aset strategis diharapkan dapat memberikan manfaat jangka Panjang, sehingga aktivitas pekerjaan berjalan secara optimal, memaksimalkan pelayanan kepada Pengunjung, memastikan kelancaran pelaksanaan usaha di tahun-tahun yang mendatang, meningkatkan pendapatan, serta menjamin keberlangsungan usaha.

Investment is an expenditure made by the Company to acquire fixed assets or enhance the value of existing fixed assets to provide benefits in the future. In general, the purpose of capital investment is to support the operational performance of the Company. The investment strategy in strategic assets is expected to provide long-term benefits, ensuring that work activities run optimally, maximizing service to Visitors, ensuring the smooth operation of the business in the coming years, increasing revenue, and guaranteeing business continuity.

Investasi Barang Modal dalam Pembangunan Fasilitas Gasifikasi

Sebagai bagian dari strategi pengembangan jangka panjang, Perseroan terus melaksanakan program kegiatan investasi guna memperkuat infrastruktur energi. Pelaksanaan program investasi ini dilakukan berdasarkan penugasan dari Pemegang Saham, yaitu PLN EPI, dengan tujuan mendukung ketahanan energi serta transisi menuju energi yang lebih bersih. Investasi yang dilakukan difokuskan pada pembangunan fasilitas yang mendukung infrastruktur gasifikasi, transportasi, penyimpanan, serta regasifikasi, yang diharapkan dapat meningkatkan keandalan pasokan energi bagi berbagai sektor.

Capital Goods Investment in the Construction of Gasification Facilities

As part of its long-term development strategy, the Company continues to implement a program of investment activities to strengthen gas energy infrastructure. The implementation of this investment program is carried out based on the assignment of the Shareholder, PLN EPI, to support energy security and the transition to cleaner energy. Investments made are focused on facilities construction that support gasification, transportation, storage, and regasification infrastructure, which are expected to increase the reliability of energy supply for various sectors.

Melalui kerja sama strategis dengan berbagai pemangku kepentingan, Perseroan berkomitmen untuk memastikan bahwa seluruh investasi yang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Pendekatan yang diterapkan meliputi sinergi dengan mitra strategis, optimalisasi alokasi anggaran, serta pemantauan progres proyek secara berkala. Dengan dukungan penuh dari PLN EPI dan koordinasi yang intensif, Perseroan optimis bahwa program kegiatan investasi ini akan memberikan dampak positif terhadap ketahanan energi serta mendukung pencapaian target operasional pada tahun-tahun mendatang. Pada tahun 2025 investasi barang modal yang dilakukan PLN Energi Gas adalah pelaksanaan gasifikasi Tarakan, gasifikasi Punagaya, Infrastruktur *pipeline* gas PLTGU Cilegon, *Additional Pipeline* untuk sistem pembangkit Bali, serta

Through strategic cooperation with various stakeholders, the Company is committed to ensuring that all investments made run in accordance with the plans that have been set. The approach adopted includes synergy with strategic partners, optimization of budget allocation, and regular monitoring of project progress. With full support from PLN EPI and intensive coordination, the Company is optimistic that this investment activity program will have a favorable impact on energy security and support the achievement of operational targets in the coming years. In 2025, the capital goods investment made by PLN Energi Gas includes the implementation of gasification in Tarakan, gasification in Punagaya, gas *pipeline* infrastructure for the Cilegon CCPP, additional *pipeline*s for the Bali power plant system, as well as the construction of the Stargate and

Pembangunan *Pipeline*, *Piping*, dan *Metering System Stargate* dan Kolaka.

Pelaksanaan Gasifikasi Tarakan

Pada tahun 2024, Perseroan mendapatkan penugasan dari Pemegang Saham untuk membangun fasilitas transportasi, penyimpanan, dan regasifikasi di Tarakan. Proyek ini dimulai dengan pelaksanaan *Engineering, Procurement, dan Construction* (EPC) yang perjanjiannya telah ditandatangani bersama PT PLN Nusantara Power Construction (PLN NPC), bagian dari PLN *Group*, pada 27 September 2024. Kerja sama ini bertujuan untuk mengoptimalkan sinergi dalam realisasi kontrak manajemen yang telah ditetapkan.

Program Gasifikasi Pembangkit Tarakan telah dilaksanakan Gas In pada tanggal 14 September 2025, terdapat keterlambatan Gas In yang direncanakan pada 31 Maret 2025 dikarenakan terdapat perubahan desain akibat pemanfaatan komponen regasifikasi LNG ex-Sanberra tidak dapat digunakan. Setelah Gas In, infrastruktur regasifikasi LNG melalui tahapan *commissioning* sampai dengan 31 Desember 2025 dan melakukan *Commercial On Date* (COD) pada tanggal 1 Januari 2026. Pembangunan fasilitas gasifikasi di Tarakan menjadi bagian dari strategi Perseroan dalam mendukung ketahanan energi serta transisi ke energi yang lebih bersih.

Pelaksanaan Gasifikasi Punagaya

Di tahun 2025 Perseroan mendapatkan penugasan berupa pembangunan fasilitas transportasi, penyimpanan, dan regasifikasi di Punagaya sesuai dengan surat Direktur Utama PT PLN EPI No. 1838/EPI.01.02/PLNEPI0100/2025 tanggal 19 Februari 2024 perihal Penugasan penyiapan infrastruktur gas untuk Pembangkit ITC Huadi (Punagaya) dan PLTG Gorontalo. Di penghujung tahun 2025, progres pekerjaan berdasarkan *S-Curve* SPMK 1 *Engineering*, *Procurement*, dan *Construction* (EPC) Punagaya mencapai 49,5% yang dikerjakan oleh mitra kerja yaitu PT Pelayanan Energi Batam (PEB). Selanjutnya konstruksi infrastruktur gas Gasifikasi Punagaya

Kolaka Pipeline, Piping, and Metering System.

Tarakan Gasification Implementation

In 2024, the Company was assigned by the Shareholders to build a transportation, storage, and regasification facility in Tarakan. The project started with the implementation of Engineering, Procurement, and Construction (EPC), whose agreement was signed with PT PLN Nusantara Power Construction (PLN NPC), part of PLN Group, on September 27, 2024. This cooperation aims to optimize synergies in the realization of the established management contract.

A Gas-In was run on the Tarakan Power Plant Gasification Program on September 14, 2025. There was a delay in Gas-In, which was initially scheduled for March 31, 2025, due to design changes because the LNG regasification components from Sambera were incompatible. After Gas-In, the LNG regasification infrastructure went through the commissioning phase until December 31, 2025, and achieved Commercial On Date (COD) on January 1, 2026. The construction of the gasification facility in Tarakan is part of the Company's strategy to support energy resilience and the transition to cleaner energy.

Punagaya Gasification Implementation

In 2025, the Company received an assignment to build transportation, storage, and regasification facilities in Punagaya in accordance with the letter from the President Director of PT PLN EPI No. 1838/EPI.01.02/PLNEPI0100/2025 dated February 19, 2024, regarding the assignment for the preparation of gas infrastructure for the ITC Huadi Power Plant (Punagaya) and the Gorontalo GTPP. At the end of 2025, the progress of the work based on the S-Curve SPMK 1 Engineering, Procurement, and Construction (EPC) Punagaya reached 49.5%, carried out by the partner, PT Pelayanan Energi Batam (PEB). Subsequently, the construction of the Punagaya

dihentikan untuk sementara waktu berdasarkan Surat Direktur Gas dan BBM PT PLN Energi Primer Indonesia No. 10000/EPI.01.02/PLNEPI0300/2025 tanggal 08 Agustus 2025 perihal Kelanjutan Penyediaan Infrastruktur Gas di MPP Indonesia 1 Punagaya.

Pembangunan Infrastruktur Pipeline Gas PLTGU Cilegon

Di tahun 2025 Perseroan mendapatkan penugasan berdasarkan surat Direktur Gas dan BBM PT PLN Energi Primer Indonesia No. 6873/EPI.01.02/PLNEPI0300/2025 tanggal 12 Juni 2025 perihal Penugasan Penyediaan Infrastruktur Pipa Gas untuk Kepentingan Niaga PT PLN EPI, berupa pembangunan infrastruktur gas yang menyambungkan pipa gas hulu PHE OSES dengan pipa gas distribusi milik PGN di lokasi PLTGU Cilegon agar gas milik PLN EPI yang dibeli dari PHE OSES dapat disalurkan ke pembangkit lain yang memungkinkan ketika PLTGU Cilegon mengalami *Reverse Shutdown*. PLN EG telah selesai membuat Perjanjian EPC dan Pembangunan pipe spool sudah dilaksanakan, namun pada bulan November 2025 pekerjaan konstruksi pembangunan infrastruktur gas dilakukan penundaan berdasarkan arahan PLN EPI berdasarkan surat Direktur Gas dan BBM PT PLN Energi Primer Indonesia nomor 15702/EPI.01.02/PLNEPI0300/2025 tanggal 25 November 2025 perihal Tindak Lanjut Penugasan Pembangunan *Pipa Jumper Line* PLTGU Cilegon.

Pembangunan Additional Pipeline Untuk Sistem Pembangkitan Bali

Berdasarkan surat Direktur Gas dan BBM PT PLN Energi Primer Indonesia No. 10977/EPI.01.02/PLNEPI0300/2025 tanggal 31 Agustus 2025 perihal Rencana Pembangunan Pipa Gas Tambahan untuk Sistem Pembangkitan Bali, PLN EPI menugaskan PLN EG untuk melakukan penyusunan Kajian Kelayakan Proyek ("KKP") dengan ruang lingkup meliputi pembangunan Pipa Gas Tambahan (*Additional* gas *pipeline*) dengan kapasitas 50 BBTUD di Area Pengembangan II Benoa Utara yang diperuntukkan untuk Sistem Pembangkitan Pesanggaran, Bali, serta pembangunan *Metering Regulating Station* (MRS)

Gasification infrastructure was temporarily halted based on the letter from the Director of Gas and Fuel of PT PLN Energi Primer Indonesia No. 10000/EPI.01.02/PLNEPI0300/2025 dated August 8, 2025, regarding the Continuation of Gas Infrastructure Provision at MPP Indonesia 1 Punagaya.

Construction of the Gas Pipeline Infrastructure for the Cilegon CCPP

In 2025, the Company received an assignment based on the letter from the Director of Gas and Fuel of PT PLN Energi Primer Indonesia No. 6873/EPI.01.02/PLNEPI0300/2025 dated June 12, 2025, regarding the Assignment for the Provision of Gas Pipeline Infrastructure for the Commercial Interests of PT PLN EPI. It involved the construction of gas infrastructure connecting the upstream gas pipeline from PHE OSES to the distribution gas pipeline owned by PGN at the Cilegon CCPP location. Thus, the gas owned by PLN EPI purchased from PHE OSES could be distributed to other power plants when Cilegon CCPP experiences a Reverse Shutdown. PLN EG completed the EPC Agreement, and the construction of the pipe spool was executed. However, in November 2025, the construction work on the gas infrastructure was postponed based on the directive from PLN EPI as per the letter from the Director of Natural Gas of PT of PLN Energi Primer Indonesia number 15702/EPI.01.02/PLNEPI0300/2025 dated November 25, 2025, regarding the Follow-Up on the Assignment for the Construction of the Cilegon CCPP Jumper Line Pipe.

Construction of an Additional Pipeline for the Bali Generation System

Based on the letter from the Director of Gas and Fuel of PT PLN Energi Primer Indonesia No. 10977/EPI.01.02/PLNEPI0300/2025 dated August 31, 2025, regarding the Additional Gas *Pipeline* Development Plan for the Bali Generation System, PLN EPI assigned the Company to conduct a Project Feasibility Study ("KKP") with a scope that includes the construction of an Additional Gas *Pipeline* with a capacity of 50 BBTUD in the Benoa North Development Area II, intended for the Pesanggaran Generation System, Bali, as well as the construction of a Metering Regulating Station (MRS) in the gas distribution

pada sistem penyaluran gas ke Sistem Pembangkitan Pesanggaran, Bali.

PLN EG telah berhasil menyelesaikan kajian enjiniring 100% pada 27 November 2025 dan melakukan relokasi pipa dari Tanjung Batu ke Pelabuhan Benoa Bali pada tanggal 24 Desember 2025. Proyek ini ditargetkan akan selesai tahap 1 pada Q1 2026 dan Tahap 2 pada Q3 2026. Pembangunan *additional pipeline* untuk sistem pembangkitan Bali menjadi bagian dari strategi Perseroan dalam mendukung ketahanan energi.

Ikatan Material untuk Investasi Barang Modal

Perseroan bergerak dalam bidang usaha gas bumi berupa kegiatan usaha *midstream* dan hilir gas bumi yang mencakup perencanaan, pembangunan, pengelolaan, dan usaha *midstream* dan hilir bidang gas bumi yang meliputi kegiatan pengolahan, pengangkutan, penyimpanan, dan niaga untuk mendukung penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum di seluruh wilayah Indonesia. Oleh karena itu, apabila ada penugasan yang membutuhkan mitra kerja sama dan pendanaan, Perseroan melakukan perikatan yang material untuk membangun infrastruktur agar proses bisnis dapat berjalan dengan optimal. Hingga tahun 2025 ikatan material yang masih dilaksanakan oleh Perseroan antara lain:

1. *Floating Storage Regasification Unit* (FSRU)
- PT PLN Nusantara Power
  Pada tanggal 16 September 2020, Perusahaan dan PLN menandatangani perjanjian tentang jasa terminal fasilitas penyimpanan dan regasifikasi klaster Sulawesi dan transportasi LNG. Perjanjian ini awalnya berlaku sampai 31 Oktober 2020. Perjanjian ini telah diubah beberapa kali di mana perubahan terakhir disepakati di tanggal 20 Desember 2022 menjadi perjanjian dengan PLN NP yang berlaku sampai dengan 18 September 2035.

system to the Pesanggaran Generation System, Bali.

The Company successfully completed 100% of the engineering study on November 27, 2025, and relocated the *pipeline* from Tanjung Batu to Benoa Harbor, Bali, on December 24, 2025. This project is targeted to be completed in Phase 1 by Q1 of 2026 and Phase 2 by Q3 of 2026. The construction of an additional *pipeline* for the Bali generation system is part of the Company's strategy to support energy resilience.

Material Commitments for Capital Goods Investment

The Company is engaged in the natural gas business in the form of midstream and downstream natural gas business activities, which include planning, development, management, and midstream and downstream natural gas business activities, which include processing, transportation, storage, and trading to support the provision of electricity for the public interest throughout Indonesia. Therefore, when assignments require cooperation partners and funding, the Company conducts material commitments to build infrastructure so that business processes can run optimally. In 2025, material commitments carried out by the Company included:

1. Floating Storage Regasification Unit (FSRU)
- PT PLN Nusantara Power
  On September 16, 2020, the Company and PT PLN (Persero) signed an agreement regarding terminal services for storage and regasification facilities in the Sulawesi cluster and LNG transportation. This agreement was initially valid until October 31, 2020. The agreement has been amended several times, with the latest amendment agreed upon based on PLN EG Agreement Number 0031.Pj/EPI.01.02/GG10000/2022 on December 20, 2022, becoming an agreement with PT PLN Energi Primer Indonesia (as the party holding the PLN KJM) valid until September 18, 2035.

- PT Sulawesi Regas Satu
  Pada tanggal 11 Februari 2020, Perusahaan dan PT Sulawesi Regas Satu menandatangani perjanjian sewa, operasi dan pemeliharaan fasilitas penyimpanan dan regasifikasi terapung untuk proyek gasifikasi klaster Sulawesi yang berlaku selama 15 tahun dari tanggal Commercial Operation Date (COD).

2. Pipa Gas Tanjung Batu
- PT PLN Indonesia Power
  Pada tanggal 27 April 2021, Perusahaan dan PLN menandatangani perjanjian tentang pemanfaatan fasilitas pipa gas ruas PK 52 -Tanjung Batu. Perjanjian ini telah diubah beberapa kali di mana perubahan terakhir disepakati pada tanggal 30 Agustus 2022 yang berlaku sampai 30 Agustus 2047. Perjanjian tersebut kini dialihkan menjadi perjanjian dengan PLN IP mulai dari tahun 2022. Pada tahun 2025, perjanjian tersebut telah diamendemen dan dinovasi, di mana posisi PLN IP dialihkan kepada PLN EPI.

- PT Pelayanan Energi Batam
  Pada tanggal 18 Desember 2019, Perusahaan dan PEB menandatangani perjanjian tentang jasa pengukuran, pengoperasian dan pemeliharaan fasilitas *custody flow meter* di PK 52 Kaltimra. Kesepakatan ini berlaku sampai 18 Desember 2029.

3. Jasa penyewaan kapal tunda
- PT Jawa Satu Power
  Pada tanggal 1 September 2023, Perusahaan dan PT Jawa Satu Power menandatangani Perjanjian Sewa Kapal Tunda dengan Jawa Satu Power untuk penyewaan sebanyak 2 kapal tunda yang berlaku 5 tahun dari tanggal ditandanganinya perjanjian.

- PT Jasa Armada Indonesia
  Pada tanggal 1 September 2023, Perusahaan menandatangani kontrak kerja sama dengan PT Jasa Armada Indonesia tentang Sewa Kapal Tunda Untuk Wilayah Operasional PT Jawa Satu Power. Perjanjian ini berlaku sampai dengan lima tahun, dan dapat diubah sewaktu waktu.

- PT Sulawesi Regas Satu
  On February 11, 2020, the Company and PT Sulawesi Regas entered into a floating storage and regasification facility rental, operation and maintenance agreement for the Sulawesi cluster gasification project which is valid for 15 years from the Commercial Operation Date (COD).

2. Tanjung Batu Gas Pipe
- PT PLN Indonesia Power
  On April 27, 2021, the Company and PLN signed an agreement regarding the utilization of gas pipeline facility for PK 52 - Tanjung Batu. This agreement has been amended several times with the latest amendment agreed on August 30, 2022, and is valid until August 30, 2047. This agreement is now foreclosed to PLN IP starting in 2022. In 2025, the agreement was amended and novated, whereby PLN IP's position was transferred to PLN EPI.

- PT Pelayanan Energi Batam
  On December 18, 2019, the Company and PEB entered into an agreement regarding the measurement, operation and maintenance services for custody flow meter facilities at PK 52 Kaltimra. This agreement is valid until December 18, 2029.

3. Tugboat leases
- PT Jawa Satu Power
  On September 1, 2023, the Company and PT Jawa Satu Power signed a Tugboat Rental Agreement with Jawa Satu Power for the rental of two tugboats which is valid for five years from the date of signing the agreement.

- PT Jasa Armada Indonesia
  On September 1, 2023, the Company signed a cooperation contract with PT Jasa Armada Indonesia regarding Tugboat Rental for the Operational Area of PT Jawa Satu Power. This agreement is valid for up to five years, and can be changed at any time.

- PT Adhi Guna Putera
  Dalam perjanjiannya, JAI mengetahui bahwa terdapat Kerja Sama Operasi yang dilakukan oleh Perusahaan dan AGP. Dalam perjanjian ini, diketahui bahwa AGP bersedia untuk menanggung dan menerima sebesar 30% bagian dalam melaksanakan sewa.

4. Pekerjaan *Engineering, Construction*, dan Pembangunan Fasilitas Regasifikasi di Tarakan

- PT PLN Nusantara Power Construction
  Pada tanggal 26 September 2024, Perusahaan menandatangani kontrak kerja sama dengan NPC dalam hal pembangunan fasilitas regasifikasi di Tarakan dalam semua aspek mulai dari perancangan sampai dengan pemeliharaan dalam rangka rencana pemindahan FSRU ke Tarakan.

- PT PLN Energi Primer Indonesia
  Pada 4 September 2024, Perusahaan ditunjuk oleh PLN EPI untuk mengelola dan menyediakan jasa *midstream* LNG ke PLTMG Gunung Belah dan Pembangkit Kampung Satu (atas nama PLN EPI) dalam halnya meliputi jasa penyimpanan LNG, jasa transportasi LNG, jasa regasifikasi dan jasa penyaluran gas. Pekerjaan berakhir tiga tahun setelah tanggal efektif.

5. Pekerjaan *Engineering, Procurement, Construction* (EPC) Pembangunan *Onshore Gas Facility* Pembangkit di Punagaya
- PT Pelayanan Energi Batam
  Pada tanggal 17 Desember 2024, Perusahaan mengadakan kontrak dengan PEB untuk pekerjaan EPC atas pembangunan fasilitas gas bagi pembangkit di Punagaya sampai dengan diterimanya COD proyek.

6. Pengadaan jasa pengelolaan CNG *Plant* 10 MMSDCFD Riau
   Pada tanggal 27 Mei 2024, Perusahaan menandatangani kontrak dengan PLN NP atas jasa pengelolaan operasional kinerja pembangkit dan aset CNG Riau 10 MMSCFD milik PT PLN. Pendapatan dari perjanjian ini terdiri atas dua tahap kegiatan, yaitu kegiatan praoperasi dan kegiatan operasi. Jangka waktu perjanjian ini berlaku sampai dengan 1 Desember 2025.

- PT Adhi Guna Putera
  In the agreement, JAI acknowledges that there isa Joint Operation carried out by the Company and AGP. In this agreement, it is known that AGP is willing to bear and receive 30% from carrying out the lease.

4. Engineering, Construction, and Construction Work for the Development of a Regasification Facility in Tarakan
- PT PLN Nusantara Power Construction
  On September 26, 2024, the Company signed a cooperation contract with NPC for the development of a regasification facility in Tarakan, covering all aspects from design to maintenance, as part of the plan to relocation of the FSRU to Tarakan.

- PT PLN Energi Primer Indonesia
  On September 4, 2024, the Company is appointed by PLN EPI to manage and provide midstream LNG services to Gunung Belah GEPP and Kampung Satu Power Plant (on behalf of PLN EPI), including LNG storage services, LNG transportation services, regasification services, and gas distribution service. The expected completion of this work are three years after effective date.

5. Engineering, Procurement, Construction (EPC) Work for the Development of an Onshore Gas Facility for the Power Plant in Punagaya
- PT Pelayanan Energi Batam
  On December 17, 2024, the Company entered into a contract with PEB for EPC work on the construction of a gas facility for the power plant in Punagaya until the project reaches its COD.

6. Procurement of management services for a 10 MMSCFD CNG Plant in Riau
   On May 27, 2024, the Company signed a contract with PLN NP for operational management services for PT PLN's CNG Riau 10 MMSCFD power plant and assets. Revenue from this agreement consists of two phases of activities: pre-operational and operational activities. The term of this agreement is valid until December 1, 2025. This agreement has been extended for 12 months following the

Perjanjian ini telah diperpanjang selama 12 bulan setelah berakhirnya masa perjanjian.

7. Pekerjaan *Additional Pipeline* untuk Sistem Pembangkitan Bali
- PT Sinergi Solusi Utama
  Pada tanggal 15 Desember 2025, Perseroan dengan SSU telah melakukan Relokasi Pipa dari Tanjung Batu untuk dapat diutilisasi pada proyek Bali. Hal ini dilakukan guna mempercepat masa pengadaan dan konstruksi dari pekerjaan *Additional Pipeline* untuk Sistem Pembangkitan Bali serta melakukan utilisasi aset yang dimiliki Perseroan.
- PT PLN Enjiniring
  Pada tanggal 20 Oktober 2025, Perseroan telah menyelesaikan Kajian Enjiniring berupa FS dan FEED bersama PLN Enjiniring untuk pekerjaan *Additional Pipeline* untuk Sistem Pembangkitan Bali. Hal ini merupakan salah satu dokumen untuk dapat dilakukan pembangunan dari proyek tersebut.

expiration of the original term.

7. Additional Pipeline Work for the Bali Generation System
- PT Sinergi Solusi Utama
  On December 15, 2025, the Company, in collaboration with SSU, relocated a pipeline from Tanjung Batu to be used in the Bali project. This was conducted to accelerate the procurement and construction phases of the Additional Pipeline project for the Bali Generation System and to utilize the Company's assets.
- PT PLN Enjiniring
  On October 20, 2025, the Company completed an Engineering Study, consisting of a Feasibility Study (FS) and Front-End Engineering Design (FEED), in collaboration with PLN Enjiniring for the Additional Pipeline project for the Bali Generation System. It is one of the documents required to proceed with the construction of the project.

Sumber Dana untuk Investasi Barang Modal

Sampai dengan Desember 2025, total realisasi investasi yaitu sebesar Rp103,59 miliar, atau sebesar 51,37% dibandingkan target RKAP 2025 sebesar Rp201,67 miliar. Pendanaan yang digunakan untuk investasi merupakan sumber pendanaan internal Perseroan dan *Shareholder Loan*.

Sources of Funds for Capital Investment

As of December 2025, total realized investment amounted to Rp103.59 billion, or 51.37% of the 2025 ABOP target of Rp201.67 billion. The funds used for investment came from the Company's internal sources and a Shareholder Loan.

Mata Uang yang Menjadi Denominasi dan Mitigasi Nilai Tukar Mata Uang Asing

Transaksi dalam mata uang asing dijabarkan menjadi mata uang fungsional menggunakan kurs yang berlaku pada tanggal transaksi. Pada tanggal pelaporan, setiap aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing disesuaikan untuk mencerminkan kurs yang berlaku pada tanggal tersebut. Keuntungan dan kerugian selisih kurs yang timbul dari penyelesaian transaksi dalam mata uang asing dan dari penjabaran aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing menggunakan kurs yang berlaku pada akhir tahun pelaporan diakui dalam laba rugi. Perikatan untuk investasi barang modal di PLN Energi Gas menggunakan mata uang Rupiah. Selain itu, secara kas, mayoritas transaksi Perusahaan dilakukan dalam mata uang Rupiah sehingga mengurangi dampak dari fluktuasi nilai tukar mata uang asing. Oleh karena itu, Perusahaan menilai bahwa risiko nilai tukar mata uang asing adalah minimal. sehingga tidak terdapat langkah perlindungan risiko terhadap posisi mata uang asing.

Denominated Currencies and Foreign Exchange Mitigation

Transactions in foreign currencies are translated into the functional currency using the exchange rate applicable on the transaction date. On the reporting date, each monetary asset and liability in foreign currencies is adjusted to reflect the exchange rate applicable on that date. Exchange rate gains and losses arising from the settlement of transactions in foreign currencies and from the translation of monetary assets and liabilities in foreign currencies using the exchange rate applicable at the end of the reporting year are recognized in profit or loss. The commitment for capital investment in PLN Energi Gas uses the Rupiah currency. In addition, cash-wise, the majority of the Company's transactions are conducted in Rupiah, thereby reducing the impact of foreign exchange rate fluctuations. Therefore, the Company considers foreign exchange risk to be minimal. Consequently, there are no risk mitigation measures in place for foreign currency positions.

Perubahan Kebijakan Akuntansi yang Berdampak Signifikan terhadap Perusahaan
Changes in Accounting Policies with Significant Impact on the Company

Perubahan pada Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan Interpretasi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (ISAK)

Perubahan pada PSAK dan ISAK

Penerapan dari amendemen berikut yang berlaku efektif mulai 1 Januari 2025, tidak menimbulkan perubahan substansial terhadap kebijakan akuntansi Perusahaan dan pengaruh yang material atas jumlah yang dilaporkan atas periode berjalan atau tahun-tahun sebelumnya.

1. Amendemen PSAK 221 "Pengaruh Perubahan Kurs Valuta Asing" - Kekurangan Ketertukaran
2. PSAK 117 "Kontrak Asuransi"

Penerapan dari amendemen berikut yang berlaku efektif mulai 1 Januari 2026, tidak menimbulkan perubahan substansial terhadap kebijakan akuntansi Perusahaan dan pengaruh yang material atas jumlah yang dilaporkan atas periode berjalan atau tahun-tahun sebelumnya.

1. Amendemen PSAK 109 dan PSAK 107 "Pengungkapan tentang Klasifikasi dan Pengukuran Instrumen Keuangan"
2. Amendemen PSAK 109 dan PSAK 107 terkait Kontrak yang Mengacu pada Listrik Bergantung Alam
3. Revisi atas PSAK 338 "Kombinasi Bisnis Entitas Sepengendali"

Dampak terhadap Laporan Keuangan Perusahaan

Pada tanggal laporan keuangan ini, Perusahaan sedang mempelajari dampak yang mungkin timbul dari penerapan standar baru, amendemen dan interpretasi pada laporan keuangan Perusahaan.

Changes in the Statement of Financial Accounting Standards (PSAK) and Interpretation of the Statement of Financial Accounting Standards (ISAK)

Changes in PSAK and ISAK

The implementation of the following amendment, effective from January 1, 2025, does not result in any substantial changes to the Company's accounting policies and has no material impact on the reported amounts for the current period or previous years.

1. Amendment to PSAK 221 "Effect of Changes in Foreign Exchange Rates" - Lack of Exchangeability
2. PSAK 117 "Insurance Contracts"

The implementation of the following amendment, effective from January 1, 2026, does not result in substantial changes to the Company's accounting policies and has no material impact on the reported amounts for the current period or previous years.

1. Amendment to PSAK 109 and PSAK 107 "Disclosures on the Classification and Measurement of Financial Instruments"
2. Amendment to PSAK 109 and PSAK 107 regarding Contracts Referencing Nature-dependent Electricity
3. Revision of PSAK 338 "Business Combination of Entities under Common Control"

Impact on the Company's Financial Statements

As of the date of this financial statement, the Company is studying the potential impact of the implementation of new standards, amendments, and interpretations on the Company's financial statements.

Perubahan Peraturan dan Dampaknya terhadap Perusahaan
Regulatory Changes and Their Impact on the Company

PLN Energi Gas melakukan kajian terhadap berbagai ketentuan yang diterbitkan regulator untuk menganalisa dampak yang mungkin ditimbulkan dari perubahan ketentuan tersebut secara rutin. Berikut peraturan yang berlaku efektif sepanjang tahun 2025 serta dampaknya terhadap kinerja Perusahaan.

PLN Energi Gas reviews various regulations issued by regulators to analyze the impact that may result from changes in these regulations regularly. The following regulations are effective throughout 2025 and their impact on the Company's performance.

Peraturan Regulation	Hal-Hal Yang Diatur Matters Regulated	Dampak Kuantitatif dan/atau Kualitatif Quantitative and/or Qualitative Impacts
Permen ESDM Nomor 15 Tahun 2022 tentang Cara Penetapan Pengguna Gas Bumi Tertentu dan Harga Gas Bumi Tertentu di Bidang Industri Regulation of the Minister of EMR Number 15 of 2022 on Procedures for the Stipulation of Certain Natural Gas Users and Certain Natural Gas Prices in the Industrial Sector	Mengatur bahwa komponen pembentukan harga gas dapat mempertimbangkan biaya penyaluran, termasuk biaya pengangkutan melalui LNG, CNG, penyimpanan dan regasifikasi Regulating that the components of gas pricing formation can consider distribution costs, including transportation costs through LNG, CNG, storage, and regasification	Sebagai bagian dari PLN Group yang bergerak di sektor gas, PLN Energi Gas perlu memperhatikan regulasi ini agar penetapan harga gas tetap kompetitif, transparan, dan patuh terhadap ketentuan pemerintah. Struktur biaya operasi, investasi infrastruktur, serta margin jasa harus terdokumentasi dengan baik dan memiliki dasar keekonomian yang jelas As part of the PLN Group operating in the gas sector, PLN Energi Gas needs to pay attention to this regulation to ensure that gas pricing remains competitive, transparent, and compliant with government regulations. The structure of operating costs, infrastructure investments, and service margins must be well-documented and have a clear economic basis

Informasi Transaksi Material yang Mengandung Benturan Kepentingan dan/atau dengan Pihak Afiliasi/Berelasi
Disclosure of Material Transactions Involving Conflicts of Interest and/or with Affiliated/Related Parties

Transaksi Material yang Mengandung Benturan Kepentingan

Selama tahun 2025, tidak terdapat transaksi yang mengandung benturan kepentingan, sehingga tidak terdapat informasi yang diungkapkan.

Material Transaction Containing Conflict of Interest

During 2025, there were no transactions containing conflicts of interest. Therefore, there is no information to be disclosed.

Transaksi dengan Pihak Afiliasi atau Berelasi

Transactions with Affiliated/ Related Parties

Pihak-pihak Berelasi

Perusahaan telah melakukan transaksi dengan pihak-pihak berelasi tertentu, sesuai dengan PSAK No. 224, "Pengungkapan Pihak-pihak Berelasi" sebagai berikut:

a. Orang atau anggota keluarga dekatnya mempunyai relasi dengan entitas pelapor jika orang tersebut:
   i. Memiliki pengendalian atau pengendalian bersama atas entitas pelapor;
   ii. Memiliki pengaruh signifikan atas entitas pelapor; atau
   iii. Merupakan personil manajemen kunci entitas pelapor atau entitas induk dari entitas pelapor.
b. Suatu entitas berelasi dengan entitas pelapor jika memenuhi salah satu hal berikut:
   i. Entitas dan entitas pelapor adalah anggota dari kelompok usaha yang sama (artinya entitas induk, entitas anak, dan entitas anak berikutnya saling berelasi dengan entitas lain);
   ii. Satu entitas adalah entitas asosiasi atau ventura bersama dari entitas lain (atau entitas asosiasi atau ventura bersama yang merupakan anggota suatu kelompok usaha, yang mana entitas lain tersebut adalah anggotanya);
   iii. Kedua entitas tersebut adalah ventura bersama dari pihak ketiga yang sama;
   iv. Satu entitas adalah ventura bersama dari entitas ketiga dan entitas yang lain adalah entitas asosiasi dari entitas ketiga;
   v. Entitas tersebut adalah suatu program imbalan pascakerja untuk imbalan kerja dari salah satu entitas pelapor atau entitas

Related Parties

The Company has made transactions with certain related parties, pursuant to PSAK No. 224, "Related-Parties Disclosure," as follows:

a. A person or their close family member is related to the reporting entity if that person:
   i. Has control or joint control over the reporting entity;
   ii. Has significant influence over the reporter or the reporting entity; or
   iii. Is a key management personnel of the reporting entity or a parent of the reporting entity.

b. An entity is related to the reporting entity if it fulfills any of the following matters:
   i. The entity and the reporting entity are members of the same group (meaning that the parent, subsidiary, and fellow subsidiary are related to each other);
   ii. One entity is an associate or joint venture of another entity (or an associate or joint venture that is a member of a group of which the other entity is a member);
   iii. Both entities are joint ventures of the same third party;
   iv. One entity is a joint venture of a third entity, and the other entity is an associate of the third entity;
   v. The entity is a post-employment benefit plan for employee benefits of either the reporting entity or an entity related to the reporting

yang terkait dengan entitas pelapor. Jika entitas pelapor adalah entitas yang menyelenggarakan program tersebut, maka entitas sponsor juga berelasi dengan entitas pelapor;

vi. Entitas yang dikendalikan atau dikendalikan bersama oleh orang yang diidentifikasi dalam huruf (a);

vii. Orang yang diidentifikasi dalam huruf (a) memiliki pengaruh signifikan atas entitas atau personil manajemen kunci entitas (atau entitas induk dari entitas); atau

viii. Entitas, atau setiap anggota dari kelompok yang menjadi bagiannya, memberikan jasa personil manajemen kunci kepada entitas pelapor atau kepada entitas induk dari entitas pelapor.

Entitas yang berelasi dengan Pemerintah adalah entitas yang dikendalikan, dikendalikan bersama, atau dipengaruhi oleh Pemerintah. Pemerintah mengacu kepada Pemerintah Indonesia, instansi Pemerintah dan badan yang serupa baik lokal, nasional maupun internasional.

Seluruh transaksi dan saldo yang signifikan dengan pihak berelasi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan No.18.

Sifat Hubungan Berelasi

Perseroan melakukan berbagai macam transaksi dengan pihak-pihak berelasi dengan syarat dan ketentuan yang disetujui kedua belah pihak. Sifat hubungan dengan pihak berelasi PLN Energi Gas antara lain:

a. PLN EPI dan YPK PLN merupakan pemegang saham Perusahaan;
b. Pemerintah Republik Indonesia merupakan pemegang saham PLN dan BUMN lainnya; dan
c. Dewan Komisaris dan Direksi merupakan personil manajemen kunci Perseroan.

Pihak-pihak dibawah ini merupakan pihak berelasi Perusahaan baik secara kepemilikan dan atau manajemen atau pemegang saham. Transaksi dan saldo yang signifikan dengan pihak-pihak berelasi adalah sebagai berikut:

entity. If the reporting entity is the entity that organizes the plan, the sponsoring entity is also related to the reporting entity;

vi. Entities controlled or jointly controlled by a person identified in (a);

vii. The person identified in (a) (i) has significant influence over the entity or the entity's key management personnel (or a parent of the entity);

viii. The entity, or each member of the group of which it is a part, provides key management personnel services to the reporting entity or to a parent of the reporting entity.

Government-related entities are entities that are controlled, jointly controlled, or influenced by the Government. Government refers to the Indonesian Government, Government agencies, and similar agencies, whether local, national, or international.

All significant transactions and balances with related parties are disclosed in the Note to the Financial Statements No. 18.

Nature of Related Party Relationship

The Company conducts various transactions with related parties with terms and conditions agreed by both parties. The nature of relationships with related parties of PLN Energi Gas, among others:

a. PLN EPI and YPK PLN are the Company's shareholders;
b. The Government of the Republic of Indonesia is a shareholder of PLN and other SOEs; and
c. The Board of Commissioners and Board of Directors are the Company's key management personnel.

The following parties are related parties of the Company either by ownership and/or management or shareholders. Significant transactions and balances with related parties are as follows:

Tabel Pihak Berelasi Tahun 2025
2025 Related Parties Table

Pihak-Pihak Berelasi Related Parties	Sifat Hubungan Nature of the Relationship	Sifat Transaski Nature of the Transaction
PLN	Entitas induk Utama Ultimate parent entity	Piutang usaha, utang usaha, pinjaman kepada pemegang saham, pendapatan Trade receivables, trade payables, loans to shareholders, revenue
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	Entitas berelasi dengan Pemerintah Entities related to the Government	Penempatan kas dan setara kas Placement of cash and cash equivalents
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	Entitas berelasi dengan Pemerintah Entities related to the Government	Penempatan kas dan setara kas Placement of cash and cash equivalents
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	Entitas berelasi dengan Pemerintah Entities related to the Government	Penempatan kas dan setara kas Placement of cash and cash equivalents
PT Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk	Entitas berelasi dengan Pemerintah Entities related to the Government	Penempatan kas dan setara kas Placement of cash and cash equivalents
PLN EPI	Entitas induk Perusahaan Parent entity of the Company	Utang usaha Trade payables
PLN NP	Entitas sepengendali dengan Perusahaan Entity under common control with the Company	Utang usaha, piutang usaha, piutang sewa, pendapatan Trade payables, trade receivables, rent receivables, revenue
PLN IP	Entitas sepengendali dengan Perusahaan Entity under common control with the Company	Utang usaha, piutang usaha, piutang sewa, pendapatan Other payables and outsourcing services
HPI	Entitas anak PT PLN Electricity Services, entitas sepengendali dengan Perusahaan Subsidiary of PT PLN Electricity, entity under common control with the Company	Utang lain-lain dan jasa penyedia tenaga alih daya Other payables and outsourcing services
PLN ND	Entitas sepengendali dengan Perusahaan Entity under common control with the Company	Utang lain-lain dan jasa penyedia tenaga alih daya Trade payables, internet services, and lease
ICON+	Entitas sepengendali dengan Perusahaan Entity under common control with the Company	Utang usaha, jasa internet dan sewa Trade payables, internet services, and lease
PEB	Entitas anak PT PLN Batam, entitas sepengendali dengan Perusahaan Subsidiary of PT PLN Batam, entity under common control with the Company	Utang usaha, sewa instalasi dan mesin dan jasa operasi dan pemeliharaan Trade payables, installation and machine lease, and operation and maintenance services
PCN	Entitas anak PLN ND, entitas sepengendali dengan Perusahaan Subsidiary of PLN ND, entity under common control with the Company	Jasa tenaga kerja dan utang usaha Manpower service and trade payables
FAGP	Entitas Asosiasi Pelayaran Bahtera Adhiguna Associate of Pelayaran Bahtera Adi Guna	Utang usaha Trade payables
PT PLN Nusantara Power Construction	Entitas anak PLN NP entitas sepengendali dengan Perusahaan Subsidiary of PLN NP, entity under common control with the Company	Penambahan PDP proyek Tarakan Additional Work in Progress on the Tarakan project

Nilai Transaksi dan Saldo Dengan Pihak Berelasi

Berikut adalah saldo dan transaksi dengan pihak berelasi tahun 2024 dan 2025, berikut adalah perjanjian/ transaksi signifikan dengan pihak berelasi:

Value of Transactions and Balances with Related Parties

The following are balances and transactions with related parties in 2024 and 2025, as well as significant agreements/transactions with related parties:

Tabel Transaksi Pihak Berelasi Tahun 2024-2025
Table of Related Party Transactions for the Years 2024-2025

dalam Rp juta | in million Rp

Jenis Transaksi Type of Transaction	Pihak Yang Bertransaksi Transacting Party	2024	2025
Pendapatan Revenues	PLN NP	358.310	323.269
	PLN IP	113.622	127.938
	PLN EPI	-	15.272
	Total	471.932	466.479
Beban Usaha Operating Expenses	PEB	87.161	83.457
	ICON+	951	47.551
	PLNE	-	7.504
	NPC	-	872
	PLN EPI	-	835
	PLN NP	158	251
	PLN	-	146
	HPI	8.443	-
	AGP	3.204	-
	PCN	2.912	-
	Total	102.829	140.616

Kewajaran Transaksi

Perseroan telah melakukan transaksi dengan pihak-pihak berelasi tertentu, sesuai dengan PSAK No. 224, "Pengungkapan Pihak-pihak Berelasi". Seluruh transaksi dan saldo yang material dengan pihak berelasi diungkapkan dalam Catatan 18 dalam Laporan Keuangan Audited dari KAP.

Saldo dan transaksi yang material antara Perseroan dengan Pemerintah Negara Republik Indonesia dan entitas berelasi dengan Pemerintah diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan yang relevan.

Fairness of Transactions

The Company has entered into transactions with certain related parties in accordance with PSAK No. 224 "Related Party Disclosures". All material transactions and balances with related parties are disclosed in Note 18 in the Audited Financial Statements of KAP.

Material balances and transactions between the Company and the Government of the Republic of Indonesia and entities related to the Government are disclosed in the relevant notes to the financial statements.

Perseroan memilih untuk mengungkapkan transaksi dengan entitas berelasi dengan Pemerintah dengan menggunakan pengecualian dari persyaratan pengungkapan pihak berelasi. Transaksi ini dilakukan berdasarkan persyaratan yang disetujui oleh kedua belah pihak, yang mungkin tidak sama dengan transaksi lain yang dilakukan dengan pihak yang tidak berelasi. Manajemen berpendapat bahwa nilai buku dari aset dan liabilitas keuangannya mendekati nilai wajar dari aset dan liabilitas keuangan tersebut pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024.

The Company chooses to disclose transactions with entities related to the Government using the exemption from related party disclosure requirements. These transactions are conducted under terms agreed by both parties, which may not be similar to other transactions conducted with unrelated parties. Management is of the opinion that the carrying value of its financial assets and liabilities approximates the fair value of the financial assets and liabilities as at 31 December 2025 and 2024.

Tujuan Transaksi Pihak Berelasi

PLN Energi Gas melakukan transaksi dengan pihak berelasi dengan tujuan untuk saling mendukung kelancaran bisnis kedua belah pihak secara profesional dan menguntungkan. Transaksi material tersebut merupakan kegiatan usaha yang dijalankan dalam rangka menghasilkan pendapatan usaha dan dijalankan secara rutin, berulang, dan/atau berkelanjutan.

Purpose of Transactions with Related Parties

PLN Energi Gas conducts transactions with related parties to mutually support the smooth running of the business of both parties professionally and profitably. These material transactions are business activities carried out in order to generate business income and are carried out regularly, repeatedly, and/or continuously.

Kebijakan Perseroan Terkait dengan Tentang Mekanisme Review atas Transaksi

Perseroan melakukan berbagai macam transaksi dengan pihak-pihak berelasi dengan syarat dan ketentuan yang disetujui kedua belah pihak. Pihak-pihak dibawah ini merupakan pihak berelasi Perseroan baik secara kepemilikan dan atau manajemen atau pemegang saham.

Mekanisme review atas transaksi dengan pihak berelasi melalui proses audit baik yang dilakukan oleh auditor internal maupun auditor eksternal. Sebagai upaya untuk memastikan tingkat kewajaran transaksi dan kesesuaian dengan standar akuntansi yang berlaku umum di Indonesia, laporan transaksi afiliasi di atas telah diaudit oleh Auditor.

Company Policy Related to Review Mechanism of Transaction

The Company conducts various transactions with related parties with terms and conditions agreed by both parties. The parties below are related parties of the Company either by ownership and/or management or shareholders.

The review mechanism for transactions with related parties is through an audit process conducted by both internal and external auditors. As an effort to ensure the fairness of transactions and conformity with generally accepted accounting standards in Indonesia, the above-related party transaction reports have been audited by the Auditor.

Keterlibatan Organ Perseroan dalam Proses Review Transaksi Pihak Berelasi

Mekanisme reviu atas transaksi dengan pihak berelasi dilakukan melalui proses audit, baik oleh auditor internal maupun auditor eksternal. Dalam proses audit tersebut, Perseroan melibatkan Organ Perseroan diantaranya Dewan Komisaris, Direksi, Komite Audit dan beberapa Divisi yang terkait.

Komite Audit telah melakukan penelaahan terhadap transaksi pihak berelasi yang dilakukan Perusahaan selama tahun buku 2025, termasuk transaksi yang berpotensi mengandung benturan kepentingan. Berdasarkan hasil kajian, Komite Audit menyimpulkan bahwa seluruh transaksi pihak berelasi telah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, menggunakan prinsip kewajaran usaha, serta tidak mengandung benturan kepentingan yang merugikan Perseroan maupun pemegang saham minoritas. Dewan Komisaris turut berperan dalam memberikan arahan dan masukan kepada Direksi agar transaksi dengan pihak berelasi dapat dilaksanakan sesuai dengan prinsip transaksi yang wajar (*arms-length principle*).

Direksi memastikan seluruh transaksi dengan pihak berelasi di sepanjang tahun 2025, telah melalui prosedur yang memadai dan telah dilaksanakan sesuai dengan praktik bisnis yang berlaku umum dan memenuhi prinsip transaksi yang wajar (*arms-length principle*). Transaksi dan saldo yang material dengan pihak berelasi diungkapkan dalam Catatan 18 dalam Laporan Keuangan Audited.

Di tahun 2025 tidak terdapat transaksi afiliasi dan/atau transaksi benturan kepentingan, sehingga tidak informasi terkait persetujuan Pemegang Saham Independen dan pelaksanaan RUPS yang menyetujui transaksi tersebut.

Involvement of Company Organs in the Review Process of Related Party Transactions

The review mechanism for transactions with related parties is carried out through an audit process, both by internal and external auditors. In the audit process, the Company involves its organs, including the Board of Commissioners, Board of Directors, Audit Committee, and several related Divisions.

The Audit Committee has reviewed the related-party transactions conducted by the Company during the fiscal year 2025, including transactions that potentially involve conflicts of interest. Based on the study results, the Audit Committee concluded that all related-party transactions were conducted in accordance with applicable provisions, using the principle of business fairness. Additionally, it did not involve conflicts of interest detrimental to the Company or minority shareholders. The Board of Commissioners also plays a role in providing guidance and input to the Board of Directors. Hence, transactions with related parties can be carried out in accordance with the arms-length principle.

The Board of Directors ensures that all transactions with related parties throughout 2025 have gone through adequate procedures and been carried out in accordance with generally accepted business practices and meet the arms-length principle. Material transactions and balances with related parties are disclosed in Note 20 in the Audited Financial Statements.

In 2025, there were no related party transactions and/or conflict of interest transactions. Therefore, there is no information related to the approval of Independent Shareholders and the GMS implementation that approved the transaction.

Key Performance Indicator (KPI) dan Realisasinya
Key Performance Indicators (KPI) and Actual Results

Key Performance Indicator (KPI)

KPI atau *Key Performance Indicators* merupakan parameter kuantitatif yang digunakan untuk mengukur kinerja Perusahaan. Proses penentuan KPI dilakukan *cascading* oleh PT PLN Energi Primer Indonesia (EPI) selaku Pemegang Saham Mayoritas Perseroan secara berkala setiap awal tahun yang mencakup target-target untuk dicapai dalam rangka mendorong perkembangan Perusahaan. KPI Perusahaan disahkan melalui RUPS Sirkuler Perseroan pada saat RUPS RKAP Tahun 2025 yang dilaksanakan tanggal 30 Januari 2025. KPI Perusahaan terdiri dari 6 perspektif antara lain Nilai Ekonomi dan Sosial untuk Indonesia, Inovasi Model Bisnis, Kepemimpinan Teknologi, Peningkatan Investasi, Pengembangan Talenta, dan Kepatuhan. Hasil pencapaian selama tahun berjalan tersebut kemudian dinilai berdasarkan Petunjuk Teknis KPI Perusahaan yang mengacu pada Peraturan Direksi PT PLN Energi Primer Indonesia Nomor:0081.P/DIRUT/2023 tentang Manajemen Kinerja Korporasi dan Penilaian Kinerja Organisasi tanggal 22 September 2023 PLN Energi Gas dan merujuk pada Kontrak Manajemen Tahun 2025.

Key Performance Indicator (KPI)

KPIs or Key Performance Indicators are quantitative parameters used to measure the Company's performance. The process of determining KPIs is carried out cascading by PT PLN Energi Primer Indonesia (EPI) as the Company's Major Shareholder periodically, at the beginning of each year, which includes targets to be achieved to encourage the development of the Company. The Company's KPIs were ratified through the Company's Circular GMS during the 2025 ABOP GMS held on January 30, 2025. The Company's KPIs consist of six perspectives, including Economic and Social Value for Indonesia, Business Model Innovation, Technology Leadership, Increased Investment, Talent Development, and Compliance. The achievements during the current year are then evaluated based on the Company's KPI Technical Guidelines, which refer to the PT PLN Energi Primer Indonesia Board of Directors Regulation No: 0081.P/DIRUT/2023 on Corporate Performance Management and Organizational Performance Assessment dated September 22, 2023, and refer to the 2025 Management Contract.

Realisasi Capaian KPI

Tabel Capaian *Key Performance Indicator* (KPI) Korporat Tahun 2025

Realization of KPI Achievements

Table of Corporate Key Performance Indicator (KPI) Achievements in 2025

Tabel Nilai Kinerja Organisasi
Table of Organizational Performance Score

NO	INDIKATOR KINERJA PERFORMANCE INDICATOR	SATUAN UNIT	BOBOT WEIGHT	TARGET 2025	REALISASI REALIZATION	PENCAPAIAN ACHIEVEMENT	NILAI SCORE	KET DESCRIPTION
A	Nilai Ekonomi dan Sosial untuk Indonesia Economic and Social Value for Indonesia		50				51,84	
1	EBITDA	Rp. Miliar Rp Billion	10	282,72	305,84	108,17%	10,81	●
2	*Operating Ratio*	%	10	42,19	37,56	110,00%	11,00	●
3	ROIC	%	6	10,16	11,78	110,00%	6,60	●
4	*EAF Midstream Gas*	%	8	98,95	99,89	100,95%	8,07	●
5	Pendapatan dari luar PLN *Group* (*Beyond* kWh) Beyond kWh Revenue	Rp. Miliar Rp Billion	8	15,75	14,48	91,95%	7,35	●
6	Pengelolaan TJSL TJSL Management	%	4	100,00	100,00	100,00%	4,00	●
7	Penyelesaian RJPP Completion of Long-term Business Plan	%	4	100,00	100,29	100,29%	4,01	●
B	Inovasi Model Bisnis Business Model Innovation		14				15,04	
1	Sinergi Antar *Sub Holding*, Anak Perusahaan Lain dan Pusharlis Synergy between Sub Holding, Other Subsidiaries, and Pusharlis	Rp. Miliar Rp Billion	6	347,10	718,50	110,00%	6,60	●
2	Implementasi *Roadmap* Perbaikan Penerapan Manajemen Risiko Implementation of the Risk Management Improvement Roadmap	%	4	100,00	103,39	103,39%	4,13	●
3	*Maturity Level* Kepatuhan Compliance Maturity Level	Level	4	3,30	3,56	107,87%	4,31	●
C	Kepemimpinan Teknologi Technology Leadership		15				15,02	
1	Penyelesaian Program Gasifikasi Tarakan Completion of the Tarakan Gasification Program	Waktu Time	8	Gas in PLTMG Gunung Belah pada 30 September 2025 Gas at the Gunung Belah GEPP on September 30, 2025	Gas in PLTMG Gunung Belah pada 14 September 2025 Gas at the Gunung Belah GEPP on September 14, 2025	100,00%	8,00	●

Tabel Nilai Kinerja Organisasi
Table of Organizational Performance Score

NO	INDIKATOR KINERJA PERFORMANCE INDICATOR	SATUAN UNIT	BOBOT WEIGHT	TARGET 2025	REALISASI REALIZATION	PENCAPAIAN ACHIEVEMENT	NILAI SCORE	KET DESCRIPTION
2	Penyelesaian Program Gasifikasi Punagaya Completion of the Punagaya Gasification Program	Waktu Time	7	Penyediaan Infrastruktur Pipa Gas Tahap 1 pada 31 Agustus 2025 Provision of Phase 1 Gas Pipeline Infrastructure on August 31, 2025	Penyediaan Infrastruktur Pipa Gas Tahap 1 pada 29 Agustus 2025 Provision of Phase 1 Gas Pipeline Infrastructure on August 29, 2025	100,29%	7,02	●
D	Peningkatan Investasi Increased Investment		11				8,74	
1	Pengendalian Penggunaan Anggaran Kas Investasi sesuai RKAP 2025 Control of Investment Budget Utilization according to 2025 ABOP	%	6	95-100	51,37	54,07%	3,24	●
2	*Collecting Periode*	Hari Day	5	60,00	50,19	110,00%	5,50	●
E	Pengembangan Talenta Talent Development		10				10,60	
1	*Human Capital Readiness (HCR) Organizational Capital Readiness* (OCR)	%	4	100,00	100,00	100,00%	4,00	●
2	Rasio Pemenuhan Kualifikasi Organ Pengelola Risiko Ratio of Compliance with Risk Management Organ Qualification	%	4	90	100,00	110,00%	4,40	●
3	*Lost Time Injury Frequency Rate*	Indeks (per 1 juta jam kerja) Index (per one million working hours)	2	6,000	0,000	110,00%	2,20	●
F	Kepatuhan Compliance						(0,16)	
1	*Compliance* (GCG, Kepatuhan HSSE, Auditor, *Reporting*, PACA) Compliance (GCG, HSSE Compliance, Auditor, Reporting, PACA)	Nilai Pengurang Deduction Value	Max -10	-	-	-	(0,16)	
							101,08	●

Keterangan:
*) Untuk pencapaian ≥ 110,00% ditulis 110,00%.
Note:
*) For achievements ≥ 110.00%, it is written as 110.00%.

Pencapaian KPI korporat sebesar 101,08 menunjukkan bahwa Perseroan berhasil melampaui target kinerja yang telah ditetapkan untuk tahun 2025. Keberhasilan ini mencerminkan efektivitas strategi perusahaan dalam mengoptimalkan sumber daya, meningkatkan efisiensi operasional, serta memperkuat daya saing di pasar. Faktor utama yang mendukung pencapaian ini antara lain pencapaian EBITDA sebesar 108,17%, serta keberhasilan dalam inovasi model bisnis dan kepemimpinan teknologi yang mencapai target sesuai rencana strategis.

Selain itu, aspek Pengembangan Talenta yang seluruh KPI-nya tercapai menunjukkan bahwa perusahaan memiliki kesiapan SDM dalam menghadapi tantangan bisnis di masa depan. Namun, masih terdapat ruang perbaikan, terutama dalam pengelolaan investasi yang baru mencapai 54,07% dari target yang ditetapkan. Secara keseluruhan, dengan capaian KPI yang melebihi 100%, perusahaan berada dalam kondisi yang sehat dan memiliki daya tahan yang baik terhadap dinamika industri. Hal ini sekaligus mencerminkan keberhasilan tata kelola dan manajemen risiko yang efektif dalam menjaga keseimbangan antara pertumbuhan bisnis dan keberlanjutan perusahaan.

Tingkat Kesehatan Perusahaan

Berdasarkan realisasi kinerja hingga Desember 2025, perusahaan berhasil mencapai tingkat kesehatan perusahaan sebesar 101,31%, yang mencerminkan pencapaian yang sangat baik dalam berbagai aspek bisnis dan operasional. Keberhasilan ini berkontribusi terhadap tingkat kesehatan perusahaan sesuai dengan PER-2/MBU/03/2023, yang menilai aspek finansial, operasional, kepatuhan serta SDM.

- **Aspek Keuangan (Bobot 50%)**

1. EBITDA;
2. *Operating ratio*;
3. ROIC;
4. Pendapatan dari Luar PLN *Group* (*Beyond* kWh);
5. Sinergi Antar *Sub Holding*, Anak Perusahaan Lain, dan Pusharlis;
6. Pengendalian penggunaan Anggaran Kas Investasi sesuai RKAP 2025; dan
7. *Collecting Period*.

The corporate KPI achievement of 101.08% shows that the Company managed to exceed the performance target set for 2025. This success reflects the effectiveness of the Company's strategy in optimizing resources, improving operational efficiency, and strengthening competitiveness in the market. The main factors supporting this achievement, among others, were EBITDA growth of 108.17%, as well as success in business model innovation and technology leadership that achieved targets in accordance with the strategic plan.

In addition, the Talent Development aspect, with all its KPIs achieved, indicates that the Company has HR readiness to deal with future business challenges. However, there is still room for improvement, especially in investment management, which has only reached 54.07% of the set target. Overall, with KPI achievements exceeding 100%, the Company is in a healthy condition and has good resilience against industry dynamics. It also reflects the success of effective governance and risk management in maintaining the balance between business growth and corporate sustainability.

Company's Soundness Level

Based on performance realization until December 2025, the Company successfully achieved a company soundness level of 101.02%, reflecting excellent achievements in various business and operational aspects. This success contributes to the Company's soundness level in accordance with PER-2/MBU/03/2023, which assesses financial, operational, compliance, and HR aspects.

- **Financial Aspect (Weight 50%)**

1. EBITDA;
2. Operating ratio;
3. ROIC;
4. Beyond kWh Revenue;
5. Synergy between Sub Holding, Other Subsidiaries, and Pusharlis;
6. Control of Investment Budget Utilization according to 2025 ABOP; and
7. Collecting Period.

- **Aspek Operasional (Bobot 25%)**

1. *EAF Midstream Gas*;
2. Penyelesaian proyek investasi sesuai dengan target; dan
3. *Lost Time Injury Frequency Rate*.

- **Aspek Administrasi & Kepatuhan (Bobot 15%)**

1. Pengelolaan TJSL;
2. Penyelesaian RJPP;
3. Implementasi *Roadmap* Perbaikan Penerapan Manajemen Risiko; dan
4. *Maturity Level* Kepatuhan.

- **Aspek Sumber Daya Manusia (SDM) (Bobot 10%)**

1. *Human Capital Readiness* (HCR) dan *Organizational Capital Readiness* (OCR); dan
2. Pemenuhan Kualifikasi Organ Pengelola Risiko.

Dengan capaian tingkat kesehatan perusahaan sebesar 101,31% maka perusahaan menunjukkan kinerja baik dan berada dalam kategori Sehat sesuai dengan standar PER-2/MBU/03/2023. Pencapaian ini didorong oleh stabilitas keuangan, inovasi bisnis, kepemimpinan teknologi, kesiapan SDM, serta penerapan tata kelola yang baik. Perseroan berkomitmen untuk terus melakukan pencapaian yang optimal dengan mempertahankan efisiensi keuangan, meningkatkan inovasi bisnis juga memperkuat tata kelola dan kepatuhan.

- **Operational Aspect (Weight25%)**

1. EAF of Midstream Gas;
2. Completion of investment projects in accordance with targets; and
3. Lost Time Injury Frequency Rate.

- **Administration & Compliance Aspect (Weight 15%)**

1. TJSL Management;
2. Completion of the RJPP;
3. Implementation of the Risk Management Improvement Roadmap; and
4. Compliance Maturity Level.

- **Human Resources (HR) Aspect (Weight 10%)**

1. Human Capital Readiness (HCR) and Organizational Capital Readiness (OCR); and
2. Compliance with Risk Management Organ Qualification.

With the achievement of 101,31%, the Company shows good performance and falls into the Healthy category according to the PER-2/MBU/03/2023 standard. This achievement is driven by financial stability, business innovation, technological leadership, HR readiness, and the implementation of good governance. The Company is committed to continuously achieving optimal results by maintaining financial efficiency, enhancing business innovation, and strengthening governance and compliance.

Prospek Usaha
Business Prospects

Prospek Perekonomian Global

Pertumbuhan PDB global diproyeksikan tetap stabil di angka 2,9% pada tahun 2026 sebelum sedikit meningkat menjadi 3,0% pada tahun 2027, didukung oleh investasi terkait teknologi yang kuat dan tarif efektif yang secara bertahap lebih rendah. Namun, konflik yang berkembang di Timur Tengah membebani pertumbuhan dan menimbulkan ketidakpastian yang signifikan seputar permintaan global. Proyeksi ini mengasumsikan bahwa gangguan pasar energi saat ini bersifat sementara, dengan harga yang mereda mulai pertengahan tahun 2026 dan seterusnya. Secara umum, Pertumbuhan global tetap tangguh sebelum adanya konflik, tetapi kenaikan harga energi dan ketidakpastian kini membebani prospek ekonomi.

Harga energi yang lebih tinggi akan memperpanjang inflasi global. Tekanan inflasi akan berlanjut lebih lama dengan inflasi G20 yang sekarang diperkirakan lebih tinggi pada tahun 2026 daripada yang diproyeksikan sebelumnya, mencerminkan lonjakan harga energi global. Inflasi G20 diproyeksikan 1,2 poin persentase lebih tinggi dari yang diperkirakan sebelumnya pada tahun 2026 menjadi 4,0%, sebelum mereda menjadi 2,7% pada tahun 2027 dengan asumsi meredanya tekanan harga energi. Inflasi inti di negara-negara maju G20 diperkirakan akan melemah, dari 2,6% pada tahun 2026 menjadi 2,3% pada tahun 2027. Lonjakan harga energi lebih lanjut akan berdampak signifikan terhadap pertumbuhan dan inflasi.

Sumber : https://www.oecd.org/en/publications/oecd-economic-outlook-interim-report-march-2026_d4623013-en.html

Global Economic Outlook

Global GDP growth is projected to remain stable at 2.9% in 2026 before slightly increasing to 3.0% in 2027, supported by strong technology-related investments and gradually lower effective tariffs. However, the escalating conflict in the Middle East is weighing on growth and creating significant uncertainty around global demand. This projection assumes that the current disruptions in the energy market are temporary, with prices stabilizing from mid-2026 onward. In general, global growth remained robust before the conflict, but increasing energy prices and uncertainty are now weighing on economic prospects.

Higher energy prices will prolong global inflation. Inflationary pressures will persist longer with G20 inflation now projected to be higher in 2026 than previously estimated, reflecting the global surge in energy prices. G20 inflation is projected to be 1.2 percentage points higher than previously estimated in 2026 at 4.0%, before easing to 2.7% in 2027, assuming the easing of energy price pressures. Core inflation in G20 advanced economies is expected to weaken, from 2.6% in 2026 to 2.3% in 2027. Further spikes in energy prices will substantially impact growth and inflation.

Source : https://www.oecd.org/en/publications/oecd-economic-outlook-interim-report-march-2026_d4623013-en.html

Prospek Perekonomian Nasional

Kinerja sektor manufaktur Indonesia melanjutkan tren ekspansi pada Februari 2026 dengan PMI Manufaktur meningkat ke level 53,8 dari 52,6 pada Januari 2026, sekaligus menjadi capaian tertinggi dalam hampir dua tahun terakhir. Peningkatan ini didorong lonjakan permintaan baru yang diimbangi pertumbuhan produksi yang signifikan.

Resiliensi ekonomi domestik menjadi modal penting bagi Indonesia di tengah dinamika global. Oleh karena out, berbagai upaya ditempuh untuk menjaga

National Economic Outlook

The performance of Indonesia's manufacturing sector continued its expansion trend in February 2026, with the Manufacturing PMI increasing to 53.8 from 52.6 in January 2026, marking the highest achievement in nearly two years. This increase was driven by a surge in new Demand, balanced by significant production growth.

The resilience of the domestic economy has become a vital asset for Indonesia amidst global dynamics. Therefore, various efforts are made to maintain the

stabilitas dan ketahanan perekonomian domestik akan terus didorong, terutama melalui stimulus fiskal, iklim investasi, dan penciptaan lapangan kerja. Sentimen bisnis tetap solid seiring ekspektasi penguatan permintaan dan stabilitas harga. PMI manufaktur sejumlah mitra dagang utama Indonesia juga berada di zona ekspansif, seperti Vietnam (54,3), Thailand (53,5), India (57,5), Jepang (53,0), dan Amerika Serikat (51,2), sehingga mendukung prospek ekspor manufaktur nasional.

Dari sisi harga, inflasi Februari 2026 tercatat 4,76 persen (yoy), terutama dipengaruhi dampak kebijakan diskon listrik pada awal 2025. Tanpa faktor tersebut, inflasi diperkirakan sekitar 2,59 persen. Pemerintah menilai tekanan harga secara fundamental tetap terkendali dan diperkirakan kembali normal mulai Maret 2026. Pemerintah juga terus memantau risiko global, termasuk konflik di Timur Tengah yang berpotensi mengganggu rantai pasok energi dan meningkatkan volatilitas di pasar keuangan global.

Sumber : https://fiskal.kemenkeu.go.id/baca/2026/03/03/4589-ketahanan-ekonomi-indonesia-tetap-kuat-di-tengah-dinamika-global

stability and resilience of the domestic economy, specifically through fiscal stimulus, investment climate, and job creation. Business sentiment remains solid in line with expectations of demand strengthening and price stability. The manufacturing PMI of several of Indonesia's main trading partners is also in the expansion zone, such as Vietnam (54.3), Thailand (53.5), India (57.5), Japan (53.0), and the United States (51.2), thereby supporting the prospects for national manufacturing exports.

From a price perspective, inflation in February 2026 was recorded at 4.76 percent (yoy), mainly influenced by the impact of the electricity discount policy at the beginning of 2025. Without this factor, inflation is estimated to be around 2.59 percent. The government assesses that fundamental price pressures remain under control and are expected to return to normal starting in March 2026. Additionally, the government continuously monitors global risks, including conflicts in the Middle East that could disrupt energy supply chains and increase global financial market volatility.

Souce : https://fiskal.kemenkeu.go.id/baca/2026/03/03/4589-ketahanan-ekonomi-indonesia-tetap-kuat-di-tengah-dinamika-global

Prospek Industri Gas dan Midstream

Pertumbuhan pasokan LNG yang lebih kuat diperkirakan akan mendorong pertumbuhan permintaan gas alam global yang lebih tinggi pada tahun 2026. Pertumbuhan pasokan LNG global diperkirakan akan semakin meningkat pada tahun 2026 hingga mencapai laju tercepat sejak tahun 2019. Dalam perkiraan kami, produksi LNG global meningkat lebih dari 7% (atau lebih dari 40 miliar meter kubik) pada tahun 2026. Amerika Utara kembali diperkirakan akan mendorong pertumbuhan ini, dengan Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko menyumbang lebih dari 85% peningkatan pasokan LNG global pada tahun 2026.

Fundamental pasokan yang membaik diperkirakan akan mendorong pertumbuhan permintaan gas global yang lebih kuat, terutama didorong oleh Tiongkok dan pasar negara berkembang di Asia. Permintaan gas alam di kawasan Asia Pasifik

Gas and Midstream Industry Outlook

Stronger LNG supply growth is expected to drive higher global natural gas demand growth in 2026. Global LNG supply growth is projected to further increase in 2026, reaching its fastest rate since 2019. In our forecast, we expect global LNG production to increase by more than 7% (or more than 40 billion cubic meters) in 2026. North America is expected to drive this growth, with the United States, Canada, and Mexico accounting for more than 85% of the increase in global LNG supply in 2026.

Improved supply fundamentals are expected to drive stronger global gas demand growth, particularly driven by China and emerging markets in Asia. Natural gas demand in the Asia-Pacific region is projected to increase by 4% in 2026, contributing to

diperkirakan akan meningkat sebesar 4% pada tahun 2026, yang menyumbang sekitar setengah dari pertumbuhan permintaan gas global. PT PLN Energi Primer Indonesia (PLN EPI) memproyeksikan kebutuhan gas untuk pembangkit listrik akan terus meningkat seiring lonjakan konsumsi listrik nasional dan percepatan elektrifikasi di berbagai sektor. Hingga 2034, kebutuhan gas PLN diperkirakan tumbuh sekitar 4,5% per tahun, dengan *Liquefied Natural Gas* (LNG) menjadi tulang punggung dalam mendukung transisi energi Indonesia. Kebutuhan gas PLN diperkirakan meningkat dari 1.748 BBTUD pada 2026 menjadi 2.490 BBTUD pada 2034. Kenaikan ini akan didominasi oleh LNG sebagai solusi atas penurunan pasokan gas pipa domestik.

approximately half of the global gas demand growth. PT PLN Energi Primer Indonesia (PLN EPI) projects that the demand for gas for power plants will continue to increase, along with the surge in national electricity consumption and the acceleration of electrification in various sectors. By 2034, PLN's gas demand is projected to increase by approximately 4.5% per year, with Liquefied Natural Gas (LNG) becoming the backbone in supporting Indonesia's energy transition. PLN's gas demand is expected to increase from 1,748 BBTUD by 2026 to 2,490 BBTUD in 2034. This increase will be dominated by LNG as a solution to the decline in domestic pipeline gas supply.

Sejalan dengan proyeksi tersebut, kebutuhan kargo LNG juga diperkirakan meningkat 4.5% per tahun dari 103 kargo pada 2026 menjadi 214 kargo pada 2034. Untuk mengantisipasi lonjakan kebutuhan tersebut, PLN EPI terus mengembangkan infrastruktur gas dan LNG nasional melalui berbagai proyek *midstream*, termasuk *Floating Storage Regasification Unit* (FSRU), LNG *carrier*, *Onshore Receiving Unit* (ORU) di berbagai wilayah Indonesia dan pembangunan pipa WNTS-Pemping.

In line with that projection, the demand for LNG cargoes is also expected to increase by 4.5% per year from 103 cargoes in 2026 to 214 cargoes in 2034. To anticipate the surge in demand, PLN EPI continues to develop the national gas and LNG infrastructure through various midstream projects, including Floating Storage Regasification Units (FSRU), LNG carriers, Onshore Receiving Units (ORU) in various regions of Indonesia, and the construction of the WNTS-Pemping pipeline.

Penguatan infrastruktur LNG menjadi langkah strategis untuk mengurangi ketergantungan pada bahan bakar minyak (BBM) serta meningkatkan ketahanan energi nasional dan transisi energi Indonesia. Oleh karena itu, PLN EPI saat ini telah mempercepat pengembangan proyek LNG *midstream* sebagai strategi menjaga keandalan suplai energi primer sekaligus menekan biaya pokok penyediaan listrik (BPP).

Strengthening LNG infrastructure has become a strategic step to reduce dependence on oil fuels (BBM) and enhance national energy resilience and Indonesia's energy transition. Therefore, PLN EPI is currently accelerating the development of midstream LNG projects as a strategy to maintain the reliability of primary energy supply while also reducing the cost of electricity supply (BPP).

PLN Energi Gas sebagai perusahaan infrastruktur gas memiliki kompetensi inti dalam distribusi gas (gas pipa dan LNG) di darat dan laut (FSRU) untuk pembangkit listrik dengan kehandalan yang tinggi, serta eksplorasi panas bumi yang akan dimanfaatkan oleh PT PLN (Persero). PLN Energi Gas memiliki dua aset infrastruktur gas yang saat ini dikelola secara langsung. Kedua aset tersebut adalah pipa gas Tanjung Batu dan FSRU Amurang. Dari sisi rekam jejak, PLN Energi Gas memiliki peran strategis dalam pengelolaan portofolio gas nasional di bawah PLN EPI, termasuk optimalisasi pasokan

PLN Energi Gas, as a gas infrastructure company, possesses core competencies in gas distribution (pipeline gas and LNG) on land and at sea (FSRU) for high-reliability power plants, as well as geothermal exploration that will be utilized by PT PLN (Persero). PLN Energi Gas has two gas infrastructure assets managed directly. These two assets are the Tanjung Batu gas pipeline and the Amurang FSRU. From a track record perspective, PLN Energi Gas plays a strategic role in managing the national gas portfolio under PLN EPI, including optimizing gas and LNG supply for power plants in various regions of Indonesia and

gas dan LNG untuk pembangkit di berbagai wilayah Indonesia serta pengembangan distribusi LNG ke wilayah kepulauan, yang menegaskan kontribusinya dalam meningkatkan efisiensi biaya pembangkitan, menjaga ketahanan energi, dan mendukung transisi energi nasional menuju sistem yang lebih bersih. Selain itu, PLN Energi Gas di masa depan akan melakukan ekspansi bisnis ke arah hilir (retail gas).

developing LNG distribution to island areas, which underscores its contribution to improving generation cost efficiency, maintaining energy resilience, and supporting the national energy transition toward a cleaner system. In addition, PLN Energi Gas will expand its business into the downstream (retail gas) in the future.

Informasi Kelangsungan Usaha
Business Continuity Information

Asumsi Kelangsungan Usaha

Secara berkala dan konsisten manajemen PLN Energi Gas terus memantau secara seksama operasi, likuiditas dan sumber daya yang dimiliki, serta bekerja secara aktif untuk mengurangi dampak saat ini dan dampak masa depan dari situasi ini yang belum pernah dialami sebelumnya. Dengan melakukan *assessment* risiko untuk mengidentifikasi daftar potensi risiko yang apabila terjadi dapat memberi dampak terhadap tujuan, strategi, sasaran dan atau rencana program kerja Perusahaan. Hasil *assessment* risiko dianalisis untuk dikelola secara sistematis dan terstruktur dalam profil risiko korporat kemudian manajemen menyusun rencana mitigasi atas setiap risiko sesuai dengan Pedoman Manajemen Risiko.

Proses manajemen risiko di PLN Energi Gas terus dilaksanakan secara menyeluruh dan berkelanjutan untuk menghadapi ketidakpastian dan perubahan lingkungan bisnis yang bergerak dinamis serta semakin kompleksnya risiko usaha yang dihadapi. Dengan pengendalian dan strategi penanganan risiko yang terus dikembangkan, Manajemen PLN Energi Gas berkeyakinan Perseroan tetap *sustain* dalam menjalankan kegiatan usahanya.

Hal-hal yang Berpengaruh terhadap Kelangsungan Usaha Perusahaan di Tahun 2025

Sepanjang tahun 2025, tidak terdapat kendala yang signifikan berpengaruh terhadap kinerja Perusahaan. Hal ini diperkuat dengan pencapaian realisasi kinerja hingga Desember 2025, perusahaan berhasil mencapai 101,08. Pencapaian ini didorong oleh pencapaian kinerja perspektif nilai ekonomi dan sosial untuk Indonesia, inovasi model bisnis, kepemimpinan teknologi, peningkatan investasi, pengembangan talenta, serta aspek kepatuhan yang baik. Keberhasilan ini berkontribusi terhadap tingkat kesehatan perusahaan sesuai dengan PER-2/MBU/03/2023, yang menilai aspek finansial, operasional, kepatuhan, serta SDM. Selain itu pencapaian KPI Perusahaan sebesar 101,08, keberhasilan ini mencerminkan efektivitas strategi perusahaan dalam mengoptimalkan sumber daya, meningkatkan efisiensi operasional, serta memperkuat daya saing di pasar.

Going Concern Assumption

PLN Energi Gas management regularly and consistently monitors its operations, liquidity, and resources and works actively to mitigate the current and future impacts of this unprecedented situation. By conducting a risk assessment to identify a list of potential risks with an impact on the Company's goals, strategies, objectives, and/or work program plans. The results of the risk assessment are analyzed to be managed systematically and structured in a corporate risk profile then management prepares a mitigation plan for each risk in accordance with the Guidelines for Risk Management.

The risk management process at PLN Energi Gas continues to be carried out thoroughly and sustainably to deal with the uncertainty and changes in the dynamic business environment and the increasing complexity of business risks faced. With the continued development of control and risk management strategies, PLN Energi Gas Management believes that the Company remains sustainable in its business activities.

Matters Affecting the Company's Business Continuity in 2025

Throughout 2025, there were no significant obstacles affecting the Company's performance. It is supported by the achievement of performance manifestation until December 2025, where the Company successfully reached 101.08. It is driven by performance achievements in the economic and social value perspectives for Indonesia, focusing on business model innovation, technology leadership, increased investment, talent development, and good compliance aspects. This success contributes to the Company's soundness level pursuant to PER-2/MBU/03/2023, which assesses financial, operational, compliance, and HR aspects. Additionally, the Company's KPI achievement of 101.08 reflects the effectiveness of its strategy in optimizing resources, improving operational efficiency, and strengthening market competitiveness.

Asesmen Manajemen atas Hal-hal Berpotensi Berpengaruh Signifikan terhadap Kelangsungan Usaha Perusahaan

Manajemen PLN Energi Gas berpendapat bahwa Perseroan masih tetap memiliki kemampuan untuk mengelola dan memenuhi semua kewajiban keuangannya kepada pegawai dan krediturnya sebagaimana dimuat dalam Laporan Keuangan tahun buku 2025 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Rintis, Jumadi, Rianto & Rekan, pada tanggal 13 Mei 2026 dengan opini "wajar, dalam semua hal yang material". Selain itu, PLN Energi Gas juga senantiasa melakukan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), aktivitas operasional serta fungsi pendukung bisnis lainnya. Dengan berbagai strategi, upaya, dan inovasi yang dilakukan, Perseroan berkeyakinan dapat terus menjaga kelangsungan usaha serta meningkatkan kontribusi kepada Pemegang Saham.

Management Assessment of Matters Potentially Significantly Affecting the Company's Business Continuity

The management of PLN Energi Gas considers that the Company still has the ability to manage and fulfill all its financial obligations to its employees and creditors as contained in the Financial Statements for the 2025 fiscal year, which have been audited by KAP Rintis, Jumadi, Rianto & Partners on May 29, 2026, with an opinion of "present fairly in all material respects". In addition, PLN Energi Gas also continuously enhances the quality of Human Resources (HR), operational activities, and other business support functions. With various strategies, efforts, and innovations made, the Company believes it can continue to maintain business continuity and increase contributions to Shareholders.

Realisasi Dana Hasil Penawaran Umum
Realization of Public Offering Proceeds

Sampai dengan 31 Desember 2025, PLN Energi Gas bukan merupakan perusahaan terbuka dan belum melakukan penawaran umum, sehingga tidak terdapat informasi mengenai total perolehan dana, rencana penggunaan dana, rincian penggunaan dana, saldo dana, maupun tanggal persetujuan RUPS atas perubahan penggunaan dana.

As of December 31, 2025, PLN Energi Gas was not a public company and had not conducted a public offering. Therefore, there was no information regarding the total proceeds, the planned use of funds, details of the use of funds, the balance of funds, or the date of GMS approval for changes in the use of funds.

Informasi dan Fakta Material yang Terjadi Setelah Tanggal Laporan Akuntan
Material Information and Facts Occurring After the Auditor's Report Date

Setelah Laporan Keuangan Konsolidasian tahun buku 2025 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Rintis, Jumadi, Rianto & Rekan, terdapat informasi terkait Informasi dan Fakta Material yang Terjadi Setelah Tanggal Laporan Akuntan terjadi di tahun 2025 antara lain:

- Perubahan susunan Dewan Komisaris
  Berdasarkan Akta No. 06 tanggal 12 Mei 2026 yang dibuat di hadapan Sutra Oktaviani, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, para pemegang saham menyetujui perubahan susunan Dewan Komisaris Perusahaan sebagai berikut:
  Dewan Komisaris Tahun 2026
  Komisaris Utama : Saiful Chaniago
  Komisaris : Airil Tanjung

- PDP fasilitas regasifikasi Tarakan
  Berdasarkan Berita Acara No. 0072.BA/EPI.01.02/EG010000/2026 tanggal 30 Januari 2026, pembangunan fasilitas regasifikasi Tarakan telah mencapai COD pada tanggal 30 Januari 2026.

After the Consolidated Financial Statements for the 2025 fiscal year, audited by the Public Accounting Firm (KAP) Rintis, Jumadi, Rianto & Partners, there is information on Information and Material Facts that Occurred After the Accountant's Report Date in 2025, including:

- Change in the composition of the Board of Commissioners
  Based on Deed No. 06 dated May 12, 2026, made before Sutra Oktaviani, S.H., M.Kn., Notary in South Jakarta, the shareholders approved the changes to the composition of the Company's Board of Commissioners as follows:
  Board of Commissioners in 2026
  President Commissioner : Saiful Chaniago
  Commissioner : Airil Tanjung

- Work on the Implementation of the Tarakan Regasification Facility
  Based on Minutes of Meeting No. 0072.BA/EPI.01.02/EG010000/2026 dated January 30, 2026, the construction of the Tarakan regasification facility has reached COD on January 30, 2026.

Informasi Keuangan yang Mengandung Kejadian Luar Biasa dan Jarang Terjadi
Financial Information Containing Extraordinary and Rare Items

Setelah Laporan Keuangan Konsolidasian tahun buku 2025 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP), tidak terdapat informasi terkait peristiwa yang mengandung kejadian luar biasa dan jarang terjadi di tahun 2025.

After the Consolidated Financial Statements for the 2025 fiscal year that had been audited by Public Accounting Firm (KAP), there is no information related to events that involve extraordinary and rare events in 2025.

Informasi Material Mengenai Investasi, Ekspansi, Divestasi, Akuisisi, dan Restrukturisasi Utang atau Modal

Material Information on Investments, Expansions, Divestments, Acquisitions, And Debt or Capital Restructuring



Investasi

Pada tahun 2025, PLN Energi Gas melakukan aktivitas investasi dalam bentuk penambahan aset tetap sebesar Rp82.163 juta. Penambahan aset tetap seluruhnya terdiri dari Pekerjaan Dalam Pelaksanaan (PDP). PDP merupakan biaya-biaya yang berhubungan langsung dengan pembangunan aset tetap. PDP dinyatakan sebesar biaya perolehan, termasuk biaya pinjaman selama masa pembangunan dari pinjaman yang digunakan untuk pembangunan. PDP akan dipindahkan ke aset tetap yang bersangkutan pada saat selesai dan siap digunakan. Penyusutan dimulai pada saat aset tersebut siap untuk digunakan sesuai dengan tujuan yang diinginkan manajemen.

Pada tanggal 31 Desember 2025, Perusahaan memiliki PDP sebesar Rp143.597 juta Dimana pada tahun 2024 sebesar Rp61.434 juta, terkait pembangunan fasilitas pembangkit gas *onshore* Tarakan dan Punagaya. Pembangunan fasilitas tersebut diperkirakan akan selesai pada tahun 2026 dan 2027.

Berdasarkan penelaahan manajemen, tidak terdapat peristiwa atau perubahan keadaan yang

Investasi

In 2025, PLN Energi Gas invested in fixed assets totaling Rp82,163 million. The total fixed assets consisted entirely of Construction in Progress (CIP). CIP represents costs directly related to the construction of fixed assets. PDP is stated at acquisition cost, including borrowing costs during the construction period from the loans used for construction. CIP will be transferred to the related fixed assets upon completion and readiness for use. Depreciation begins when the asset is ready for its intended use.

As of December 31, 2025, the Company had CIP of Rp143,597 million. In 2024, it was Rp61,434 million, relating to the construction of onshore gas plant facilities in Tarakan and Punagaya. The construction of these facilities is expected to be completed in 2026 and 2027.

Based on management's assessment, there were no events or changes in circumstances indicating

mengindikasikan adanya penurunan nilai aset tetap secara signifikan pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024. Selama tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024, Perusahaan tidak mengkapitalisasi beban bunga ke PDP. Informasi terkait tanggal, nilai, dan objek transaksi, nama pihak yang melakukan transaksi, sifat hubungan, penjelasan kewajaran transaksi, dan pemenuhan ketentuan terkait lain sudah dimuat dalam sub bab Realisasi dan Ikatan Material Investasi Barang Modal dalam Bab ini.

Ekspansi

Pada tahun 2025, PLN Energi Gas tidak melakukan aktivitas ekspansi sehingga tidak terdapat informasi terkait tanggal, nilai, dan objek transaksi, nama pihak yang melakukan transaksi, sifat hubungan, penjelasan kewajaran transaksi, dan pemenuhan ketentuan terkait.

Divestasi

Pada tahun 2025, PLN Energi Gas tidak melakukan aktivitas divestasi sehingga tidak terdapat informasi terkait tanggal, nilai, dan objek transaksi, nama pihak yang melakukan transaksi, sifat hubungan, penjelasan kewajaran transaksi, dan pemenuhan ketentuan terkait.

Akuisisi

Pada tahun 2025, PLN Energi Gas tidak melakukan aktivitas akuisisi sehingga tidak terdapat informasi terkait tanggal, nilai, dan objek transaksi, nama pihak yang melakukan transaksi, sifat hubungan, penjelasan kewajaran transaksi, dan pemenuhan ketentuan terkait.

Restrukturisasi Utang atau Modal

Pada tahun 2025, PLN Energi Gas tidak melakukan aktivitas restrukturisasi utang atau modal sehingga tidak terdapat informasi terkait tanggal, nilai, dan objek transaksi, nama pihak yang melakukan transaksi, sifat hubungan, penjelasan kewajaran transaksi, dan pemenuhan ketentuan terkait.

any significant impairment in the value of property and equipment as at 31 December 2025 and 2024. Information regarding the date, value, and object of the transaction, the name of the party conducting the transaction, the nature of the relationship, explanation of the fairness of the transaction, and compliance with related provisions are included in the Realization and Material Commitments of Capital Goods Investment sub-chapter in this chapter.

Expansion

In 2025, PLN Energi Gas did not carry out expansion activities, so there is no information regarding the date, value, and object of the transaction, the name of the party conducting the transaction, the nature of the relationship, explanation of the fairness of the transaction, and compliance with related provisions.

Divestment

In 2025, PLN Energi Gas did not carry out divestment activities, so there is no information regarding the date, value, and object of the transaction, the name of the party conducting the transaction, the nature of the relationship, explanation of the fairness of the transaction, and compliance with related provisions.

Acquisition

In 2025, PLN Energi Gas did not carry out acquisition activities, so there is no information regarding the date, value, and object of the transaction, the name of the party conducting the transaction, the nature of the relationship, explanation of the fairness of the transaction, and compliance with related provisions.

Debt or Capital Restructuring

In 2025, PLN Energi Gas did not carry out debt or capital restructuring activities, so there is no information regarding the date, value, and object of the transaction, the name of the party conducting the transaction, the nature of the relationship, explanation of the fairness of the transaction, and compliance with related provisions.





Tata Kelola Perusahaan

Good Corporate Governance

Mewujudkan Tata Kelola yang Berkelanjutan
Achieving Sustainable Governance

"Perusahaan terus memperkuat penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*/GCG) guna mendukung penyediaan energi yang andal, berkualitas, dan terjangkau. Melalui strategi adaptif dan inovasi berkelanjutan, PLN EG memperkuat pengelolaan bisnis *midstream* gas, termasuk pengembangan infrastruktur penyaluran gas pipa dan regasifikasi melalui *Floating Storage Regasification Unit* (FSRU), sebagai bagian dari ekspansi infrastruktur dan transportasi gas nasional yang berkelanjutan."

"The Company continues to strengthen the implementation of Good Corporate Governance (GCG) to support the provision of reliable, high quality, and affordable energy. Through adaptive strategies and continuous innovation, PLN Energi Gas strengthens its management of the gas midstream business, including the development of gas pipeline transmission infrastructure and regasification facilities through Floating Storage Regasification Units (FSRUs), as part of the sustainable expansion of the national gas infrastructure and transportation network."

Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik menjadi fondasi utama PLN EG dalam menjaga konsistensi kinerja dan mendukung pencapaian tujuan strategis Perusahaan. Dengan menjunjung tinggi prinsip transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan kesetaraan, Perusahaan secara berkelanjutan memperkuat sistem tata kelola guna mendukung pengambilan keputusan yang efektif, pengelolaan risiko yang terukur, serta keberlanjutan usaha di tengah dinamika industri energi nasional.

The implementation of Good Corporate Governance serves as a key foundation for PLN Energi Gas in maintaining consistent performance and supporting the achievement of the Company's strategic objectives. By upholding the principles of transparency, accountability, responsibility, independence, and fairness, the Company continuously strengthens its governance system to support effective decision making, prudent risk management, and business sustainability amid the dynamics of the national energy industry.

Implementasi GCG dilakukan secara terintegrasi dalam seluruh proses bisnis Perusahaan, khususnya pada pengembangan, operasi, dan pemeliharaan infrastruktur gas. Sebagai perusahaan yang berfokus pada pengelolaan infrastruktur midstream gas, PLN EG terus memperkuat kompetensi inti dalam penyaluran gas melalui jaringan pipa dan penyediaan infrastruktur regasifikasi melalui *Floating Storage Regasification Unit* (FSRU). Langkah ini menjadi bagian dari upaya Perusahaan dalam mendukung keandalan pasokan energi nasional sekaligus memperluas pengembangan infrastruktur dan transportasi gas secara berkelanjutan.

GCG is implemented in an integrated manner across all of the Company's business processes, particularly in the development, operation, and maintenance of gas infrastructure. As a Company focused on managing gas midstream infrastructure, PLN Energi Gas continues to strengthen its core capabilities in gas transmission through pipeline networks and the provision of regasification infrastructure through Floating Storage Regasification Units (FSRUs). This effort forms part of the Company's commitment to supporting the reliability of the national energy supply while expanding gas infrastructure and transportation development on a sustainable basis.

Sejalan dengan arah strategis PLN Grup, penerapan GCG di PLN EG terus diperkuat untuk mendukung *Securing Business Sustainability, Optimizing Cost Efficiency, Leading Industry Capabilities, Increase Profit/Margin Contribution*, serta *Developing New Edge* (SOLID). Melalui pengelolaan infrastruktur *midstream* gas yang profesional dan berorientasi pada keberlanjutan, Perusahaan turut mendukung peningkatan efisiensi biaya, penguatan *security of supply*, serta peran sebagai price setter dalam industri energi nasional.

In line with the strategic direction of the PLN Group, the implementation of GCG at PLN Energi Gas continues to be strengthened to support Securing Business Sustainability, Optimizing Cost Efficiency, Leading Industry Capabilities, Increase Profit/Margin Contribution, and Developing New Edge (SOLID). Through professional and sustainability oriented management of gas midstream infrastructure, the Company also supports greater cost efficiency, stronger security of supply, and its role as a price setter within the national energy industry.

Sebagai bagian dari transformasi berkelanjutan PLN Grup, PLN EG terus memperkuat budaya kerja yang

As part of the PLN Group's ongoing transformation, PLN Energi Gas continues to strengthen a work culture

Green, Lean, Innovative, dan *Customer Focused* guna menciptakan nilai tambah yang berkelanjutan bagi seluruh pemangku kepentingan serta mendukung percepatan transisi energi nasional.

Dasar Hukum Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik

PLN Energi Gas menempatkan GCG sebagai landasan untuk meningkatkan kepercayaan pemangku kepentingan, kinerja perusahaan, serta keberlanjutan usaha jangka panjang. Implementasi GCG dilakukan secara konsisten dan terintegrasi dalam seluruh proses bisnis dan pengambilan keputusan strategis melalui penguatan pengendalian internal, manajemen risiko yang prudent, serta budaya kerja berintegritas. Hal ini menjadi dasar dalam menciptakan nilai tambah berkelanjutan sekaligus mendukung transformasi Perusahaan di sektor infrastruktur dan midstream gas yang berlandaskan pada:

1. Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.
3. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara.
4. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor PER-3/MBU/03/2023 tanggal 20 Maret 2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara.
5. Anggaran Dasar PT PLN Energi Gas.

Struktur Tata Kelola Perusahaan

Struktur tata kelola Perusahaan mencakup hubungan dan mekanisme koordinasi antar organ utama dan pendukung untuk memastikan efektivitas pengambilan keputusan serta fungsi pengawasan. Organ utama PLN *EG* terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Dewan Komisaris, dan Direksi yang masing-masing

that is Green, Lean, Innovative, and Customer Focused to create sustainable value for all stakeholders while supporting the acceleration of the national energy transition.

Legal Basis for the Implementation of Good Corporate Governance

PLN Energi Gas places GCG as a foundation for strengthening stakeholder trust, improving Company performance, and ensuring long term business sustainability. GCG is implemented consistently and integrated throughout all business processes and strategic decision making through stronger internal controls, prudent risk management, and a culture of integrity. This serves as the basis for creating sustainable added value while supporting the Company's transformation in the infrastructure and gas midstream sector based on:

1. Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies.
2. Law No. 19 of 2003 concerning State-Owned Enterprises, as amended several times, most recently by Law No. 16 of 2025 concerning the Fourth Amendment to Law No. 19 of 2003 concerning State-Owned Enterprises.
3. Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises of the Republic of Indonesia No. PER-2/MBU/03/2023 concerning Guidelines for Governance and Significant Corporate Activities of State-Owned Enterprises.
4. Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises of the Republic of Indonesia No. PER-3/MBU/03/2023 on March 20, 2023 concerning the Organs and Human Resources of State-Owned Enterprises.
5. Articles of Association of PT PLN Energi Gas.

Corporate Governance Structure

The Company's governance structure encompasses the relationships and coordination mechanisms among its principal and supporting organs to ensure effective decision making and oversight. The principal organs of PLN Energi Gas consist of the General Meeting of Shareholders (GMS), the Board of

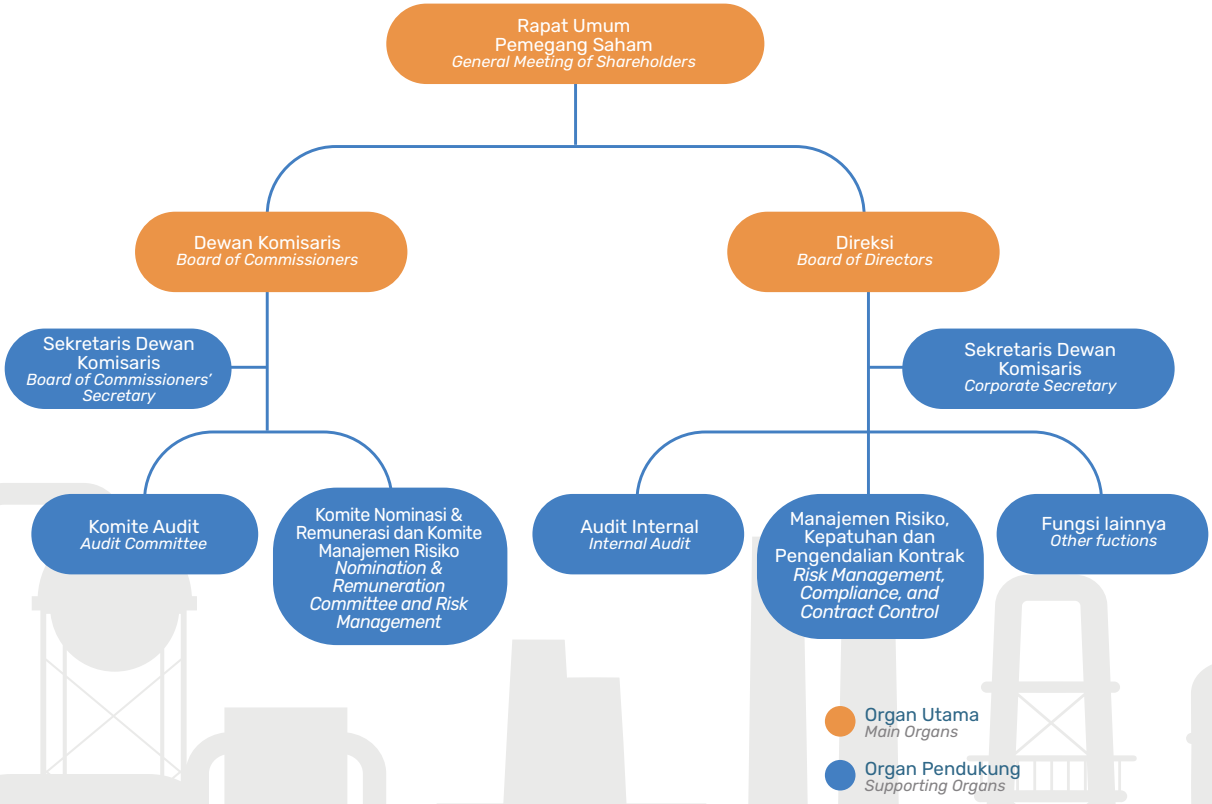
memiliki peran dalam menjaga keseimbangan antara fungsi pengawasan dan operasional.

Dalam pelaksanaannya, Dewan Komisaris dan Direksi didukung oleh organ pendukung seperti komite-komite, Sekretariat Dewan Komisaris, Sekretariat Perusahaan, Satuan Audit Internal, serta unit kerja fungsional lainnya yang berperan memastikan efektivitas pengawasan, pengendalian, dan pelaksanaan operasional Perusahaan secara profesional dan independen.

Commissioners, and the Board of Directors, each of which plays a role in maintaining a balance between oversight and operational functions.

In carrying out their duties, the Board of Commissioners and the Board of Directors are supported by various supporting organs, including committees, the Board of Commissioners Secretariat, the Corporate Secretariat, the Internal Audit Unit, and other functional work units that help ensure effective oversight, control, and the professional and independent execution of the Company's operations.

Struktur Tata Kelola Perusahaan
Corporate Governance Structure



Kebijakan Tata Kelola Perusahaan

Perusahaan menyusun perangkat kebijakan (*soft structure*) sebagai dasar penerapan tata kelola Perusahaan. Kebijakan tersebut mencakup pedoman normatif dan teknis yang mengatur fungsi utama Perusahaan, kode etik, serta hubungan antar organ tata kelola dan pemangku kepentingan. Beberapa kebijakan utama yang telah diterapkan oleh PLN Energi Gas antara lain adalah:

1. Pedoman *Good Corporate Governance* (GCG);
2. Pedoman Perilaku;
3. Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris dan Direksi;
4. Piagam Komite Audit;
5. Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi dan Komite Manajemen Risiko;
6. Piagam Pengawasan Intern Terintegrasi (*Integrated Audit Charter*);
7. Pedoman Umum Manajemen Risiko Terintegrasi;
8. Manual Integrasi;
9. Kebijakan Anti *Fraud*;
10. Sistem Manajemen Kepatuhan dan Anti Penyuapan;
11. Pedoman Benturan Kepentingan;
12. Pedoman Pengendalian Gratifikasi;
13. Pedoman Pelaporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN);
14. Pedoman Sistem Pengaduan Pelanggaran (*Whistle Blowing System*);
15. Pedoman Umum Pengadaan Barang/Jasa;
16. Kebijakan, Pedoman, dan Prosedur Operasional lainnya.

Corporate Governance Policies

The Company has established governance instruments (soft structure) as the basis for implementing corporate governance. These policies include normative and technical guidelines governing the Company's key functions, code of conduct, and relationships among governance organs and stakeholders. The principal policies implemented by PLN Energi Gas include:

1. Good Corporate Governance (GCG) Guidelines;
2. Code of Conduct;
3. Board of Commissioners and Board of Directors Work Guidelines and Procedures;
4. Audit Committee Charter;
5. Nomination and Remuneration Committee and Risk Management Committee Charter;
6. Integrated Audit Charter;
7. Integrated Risk Management General Guidelines;
8. Integration Manual;
9. Anti-Fraud Policy;
10. Compliance and Anti-Bribery Management System;
11. Conflict of Interest Guidelines;
12. Gratification Control Guidelines;
13. Guidelines on the Reporting of State Officials' Assets (LHKPN);
14. Whistleblowing System Guidelines;
15. General Procurement Guidelines for Goods and Services; and
16. Other operational policies, guidelines, and procedures.

Sasaran Strategis Tata Kelola Perusahaan

Penerapan tata kelola perusahaan yang baik menjadi salah satu sasaran strategis Perusahaan berdasarkan perspektif pembelajaran dan pertumbuhan. Hal ini menegaskan bahwa GCG merupakan fondasi penting dalam mendukung peningkatan kinerja organisasi sekaligus memastikan keberlanjutan pertumbuhan bisnis jangka panjang. Sasaran strategis tersebut juga menjadi bagian dari upaya penguatan budaya kerja yang sehat serta peningkatan kompetensi dan kesadaran seluruh insan perusahaan terhadap pentingnya kepatuhan dan etika bisnis.

Strategic Objectives of Corporate Governance

The implementation of good corporate governance is one of the Company's strategic objectives under the learning and growth perspective. This reflects the Company's view that GCG is an important foundation for improving organizational performance while ensuring sustainable long term business growth. This strategic objective also supports efforts to strengthen a healthy work culture and enhance the competence and awareness of all Company personnel regarding compliance and business ethics.

Untuk memastikan pencapaian sasaran tersebut dapat diukur secara objektif, Perseroan menetapkan sejumlah indikator utama (*Key Performance Indicators*/KPI) yang mencerminkan tingkat implementasi tata kelola perusahaan yang baik. Indikator utama yang digunakan untuk mengukur pencapaian penerapan tersebut sebagai bentuk komitmen PLN EG terhadap tata kelola perusahaan yang baik adalah:

1. Hasil *assessment* GCG di atas 90 pada tahun 2028, ini menunjukkan bahwa Perseroan berupaya untuk mematuhi prinsip-prinsip GCG yang diterima secara internasional dan memastikan bahwa praktik bisnis yang dijalankan memenuhi standar etika dan transparansi yang tinggi. Nilai di atas 90 menggambarkan tingkat kepercayaan dan akuntabilitas yang tinggi.
2. Nilai skor ERM *maturity* mencapai 4 di tahun 2028, ini mengacu pada kedewasaan manajemen risiko Perseroan (*enterprise risk management*). Pencapaian skor 4 menunjukkan bahwa Perseroan telah mengidentifikasi, mengelola dan mengurangi risiko dengan efektif dalam seluruh kegiatan operasional.
3. Nilai *Human Capital Readiness* (HCR) dan *Organizational Capital Readiness* (OCR) sebesar 4,5 pada tahun 2028, pencapaian nilai HCR dan OCR tersebut menunjukan bahwa Perseroan memiliki sumber daya manusia dan model organisasi yang kuat untuk menghadapi tantangan masa depan. Pencapaian nilai 4,5 menggambarkan bahwa Perusahaan telah berinvestasi dengan baik dalam pengembangan sumber daya manusia dan model organisasi Perseroan.
4. Nilai *assessment* ESG antara 10-20 tahun 2028, berdasarkan pedoman *assessment* ESG oleh *Sustainalytics* diadopsi sebagai pedoman *assessment* terhadap Perseroan terbuka oleh Bursa Efek Indonesia nilai *assessment* SD 10 sampai 20 menunjukkan bahwa Perseroan berada pada kategori low dan memiliki risiko SD yang rendah Hal ini tentu penting untuk dicapai oleh PLN sebagai bukti komitmen Perseroan terhadap praktik bisnis yang *sustainable*.

Perseroan juga telah menetapkan *Good Corporate Governance Roadmap* tahun 2025-2029 dalam rangka mendukung pencapaian sasaran strategis tersebut, sebagai berikut:

To ensure that achievement of these objectives can be measured objectively, the Company has established a number of Key Performance Indicators (KPIs) that reflect the level of GCG implementation. The key indicators used to measure achievement of this commitment are as follows:

1. A GCG assessment score above 90 by 2028. This demonstrates the Company's commitment to complying with internationally accepted GCG principles and ensuring that its business practices meet high ethical and transparency standards. A score above 90 reflects a high level of trust and accountability.
2. An Enterprise Risk Management (ERM) maturity score of 4 by 2028. This indicator reflects the maturity of the Company's risk management practices. Achieving a score of 4 indicates that the Company has effectively identified, managed, and mitigated risks across all operational activities.
3. Human Capital Readiness (HCR) and Organizational Capital Readiness (OCR) scores of 4.5 by 2028. These scores indicate that the Company possesses strong human resources and organizational capabilities to address future challenges. A score of 4.5 demonstrates substantial investment in human capital development and organizational strengthening.
4. An ESG assessment score ranging from 10 to 20 by 2028. Based on the ESG assessment methodology developed by Sustainalytics and adopted by the Indonesia Stock Exchange as a guideline for assessing public companies, a score within the range of 10 to 20 indicates a low ESG risk category. Achieving this score is important for PLN as evidence of the Company's commitment to sustainable business practices.

The Company has also established a Good Corporate Governance Roadmap for 2025–2029 to support the achievement of these strategic objectives, as follows:

Good Corporate Governance Roadmap 2025-2029



2025 Transformed	2026 Integrated	2027 Trusted	2028 Resilience	2029 Sustainable
GCG *Orientation* • Transformasi pengemba-ngan standar GCG • Penyesuaian ketentuan GCG BUMN terbaru • Pengembangan kebijakan terkait GCG sejalan dengan *best practice* • Transformation of GCG standard development • • Alignment with the latest GCG provisions for SOEs • • Development of GCG policies in line with best practices	GCG *Orientation* • Sinergi berbagai standar GCG yang diadopsi • Implementasi GCG terintegrasi • Synergy among the various GCG standards adopted • Integrated implementation of GCG	GCG *Orientation* • Kekuatan identitas sebagai perusahaan sangat terpercaya • Pengakuan publik • Rujukan *benchmark* • Identity strength as a highly trusted company • Public recognition; • Benchmark reference	GCG *Orientation* • Efektivitas manajemen risiko • Talenta unggul • Digitalisasi menyeluruh • Keuangan sehat dan bertumbuh • *Security of supply*, optimasi logistik dan distribusi enegi primer • Effectiveness of risk management • Top talent • Comprehensive digitalization • Sound and growing finances • Security of supply, optimization of logistics and primary energy distribution	GCG *Orientation* • Kelompok perusahaan dengan GCG terbaik dari berbagai standar • Menerapkan konsep berkelanjutan terbaik • Groups of companies with the best GCG from various standards • • Implementing best practices in sustainability
Main Driver • *Regulator* • *Corporate* • *Stakeholders*	*Main Driver* • *Corporate* • *Stakeholders*	*Main Driver* • *Regulator* • *Corporate* • *Stakeholders*	*Main Driver* • *Corporate* • *Stakeholders*	*Main Driver* • *Regulator* • *Corporate* • *Stakeholders*
Main Indicator 1. Kajian dan analisa standar GCG *listed company* dan internasional serta peraturan terbaru BUMN 2. Penyusunan, *review*, penyempurnaan serta sosialisasi GCG *Roadmap* dan *Soft Structure* sesuai dengan standar terbaru BUMN, POJK 3. Penguatan Etika dan *Corporate Culture* 4. *Assessment* GCG standar BUMN, POJK, GRC, CGPI, ESG dan tindak lanjut *assessment* AoI *Assessment* GCG 5. Pengungkapan ataspenyempurnaan dan implementasi standar yang dikembangkan serta berpartisipasi pada kompetisi bidang transparansi pengungkapan informasi	*Main Indicator* 1. Integrasi GCG dalam proses bisnis 2. Integrasi GCG EPI dan Anak Perusahaan Peningkatan Kepuasan Karyawan, Pelanggan dan Mitra. 3. Penguatan etika dan *corporate culture* 4. *Assessment* GCG standar BUMN, POJK, GRC, CGPI, ESG dan tindak lanjut AoI *Assessement* GCG 5. Pengungkapan atas penyempurnaan dan implementasi standar yang diintegrasikan serta berpartisipasi pada kompetisi bidang transparansi pengungkapan informasi	*Main Indicator* 1. Kepercayaan dan apresiasi tertinggi dalam implementasi GCG 2. Kepercayaan sebagai tujuan *benchmark* GCG 3. Penguatan Etika dan *Corporate Culture* 4. Assessment GCG standar BUMN, POJK, GRC, CGPI, ESG dan tindak lanjut AoI *Assessment* GCG 5. Pengungkapan atas implementasi GCG serta berkompetisi bidang Transparansi dalam rangka mengokohkan sebagai *Most Trusted Company*	*Main Indicator* 1. Etika dan *Corporate Culture* terimplementasi secara konsisten (tercapai *zero fraud*) 2. Penguatan manajemen risiko 3. Efektivitas organisasi dan penguatan sistem HC berbasis TI 4. Pemanfaatan teknologi informasi secara menyeluruh 5. *Assessment* GCG standar BUMN, POJK, GRC, CGPI, ESG dan tindak lanjut AoI *Assessement* GCG 6. Pengungkapan atas implementasi GCG serta berkompetisi bidang transparansi dalam rangka mengokohkan *corporate culture*	*Main Indicator* 1. Pengelolaan lingkungan dengan standar PROPER Emas 2. Pengelolaan manajemen Risiko dengan tingkat maturitas tertinggi 3. Pengelolaan K3 memenuhi standar SMK3 4. Pengelolaan GCG memenuhi standar Kementerian BUMN, POJK, ACGS, GRC, CGPI, ESG 5. Pengungkapan informasi Perusahaan memenuhi standar kriteria ARA dan SRA
1. Review and analysis of GCG standards for listed companies and international standards, as well as the latest regulations for SOEs 2. Development, review, refinement, and dissemination of the GCG Roadmap and Soft Structure in accordance with the latest SOE standards, POJK 3. 3. Strengthening ethics and corporate culture 4. 4. Assessment of GCG standards under SOE regulations, POJK, GRC, CGPI, and ESG, and follow-up on the AoI CG Assessment 5. 5. Disclosure of improvements and implementation of the developed standards, as well as participation in competitions related to transparency in information disclosure	1. Integration of GCG into business processes 2. Integration of GCG at EPI and its Subsidiaries to Enhance Employee, Customer, and Partner Satisfaction. 3. Strengthening ethics and corporate culture 4. GCG assessments based on SOE standards, POJK, GRC, CGPI, and ESG, and follow-up on the AoI GCG Assessment 5. Disclosure regarding the refinement and implementation of integrated standards, as well as participation in competitions related to transparency in information disclosure	1. The highest level of trust and appreciation in the implementation of GCG 2. Trust as the benchmark objective of GCG 3. Strengthening Ethics and Corporate Culture 4. GCG assessment based on SOE standards, POJK, GRC, CGPL ESG, and follow-up on the AoI GCG Assessment 5. Disclosure of GCG implementation and competing in the field of Transparency to affirm our status as the Most Trusted Company	1. Ethics and Corporate Culture are consistently implemented (achieving zero fraud) 2. Strengthening risk management 3. Organizational effectiveness and strengthening IT-based HR systems 4. Comprehensive utilization of information technology 5. GCG assessment based on SOE standards, POJK, GRC, CGPI, and ESG, and follow-up on the AoI GCG Assessment 6. Disclosure of GCG implementation and participation in the transparency competition to uphold corporate culture	1. Environmental management in accordance with the PROPER Gold standard 2. Risk management at the highest level of maturity 3. OHS management in accordance with OHSMS standards 4. GCG management in accordance with the standards of the Ministry of SOEs, POJK, ACGS, GRC, COPI, and ESG 5. Corporate information disclosure complies with ARA and SRA criteria

Integrasi Prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik

Prinsip-prinsip GCG diintegrasikan secara menyeluruh dalam setiap proses operasional dan pengambilan keputusan strategis sebagai bagian dari komitmen untuk menciptakan nilai jangka panjang yang berkelanjutan bagi seluruh pemangku kepentingan. Penerapan ini juga ditujukan untuk menjaga kepercayaan publik serta memperkuat reputasi Perusahaan di mata para pemangku kepentingan.

Prinsip dasar GCG (transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan kewajaran) menjadi landasan dalam membangun budaya kerja yang profesional, berintegritas, dan beretika. Konsistensi penerapannya tidak hanya memastikan kepatuhan terhadap regulasi, tetapi juga mendorong peningkatan efektivitas pengelolaan risiko, efisiensi operasional, serta kualitas layanan kepada pelanggan.

Sesuai Pedoman Governansi Korporat KNKG 2021, prinsip-prinsip tersebut dirangkum dalam 4 (empat) pilar governansi korporat yang diuraikan sebagai berikut:

Pilar Perilaku Beretika

Penjelasan:
Dalam melaksanakan kegiatan usahanya, Perseroan senantiasa mengedepankan asas kejujuran, memperlakukan semua pihak dengan penuh rasa hormat (*respect*), memenuhi komitmen yang sudah disepakati, serta membangun dan menjaga nilai-nilai moral dan kepercayaan secara konsisten. Selain itu, Perseroan juga memperhatikan kepentingan Pemegang Saham dan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan (*fairness*), serta mematikan pengurusan Perseroan senantiasa dikelola secara independen sehingga masing-masing organ Perseroan tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain.

Implementasi di Perseroan:
1. Pengambilan segala bentuk keputusan Perseroan dilakukan secara objektif dan berdasarkan keputusan bersama, memastikan bahwa keputusan tersebut merupakan hasil pemikiran yang cermat dan tidak dipengaruhi oleh kepentingan pribadi.
2. Setiap insan Perseroan menjalankan tugas dan

Integration of Good Corporate Governance Principles

GCG principles are integrated throughout operational processes and strategic decision making as part of the Company's commitment to creating sustainable long term value for all stakeholders. Their implementation also helps maintain public trust and strengthen the Company's reputation among stakeholders.

The fundamental GCG principles of transparency, accountability, responsibility, independence, and fairness serve as the basis for fostering a professional, ethical, and integrity driven work culture. Consistent application of these principles not only ensures compliance with applicable regulations but also improves risk management effectiveness, operational efficiency, and service quality.

In accordance with the 2021 KNKG Corporate Governance Guidelines, these principles are grouped into four corporate governance pillars as follows:

Ethical Behavior Pillar

Description:
In conducting its business activities, the Company consistently upholds honesty, treats all parties with respect, fulfills agreed commitments, and builds and maintains moral values and trust. The Company also considers the interests of Shareholders and other stakeholders based on the principles of fairness and equality while ensuring that the management of the Company remains independent, allowing each corporate organ to perform its role without domination or intervention from other parties.

Implementation within the Company:
1. All Company decisions are made objectively and based on collective deliberation, ensuring that decisions are carefully considered and free from personal interests.
2. Every Company employee performs their

tanggung jawabnya sesuai dengan peran dan fungsi masing-masing, tanpa adanya tekanan dari pihak manapun yang bertentangan dengan kepentingan Perseroan. Hal ini menjamin bahwa setiap langkah yang diambil merupakan refleksi dari komitmen yang kuat terhadap integritas dan profesionalisme.

3. Perseroan berkomitmen untuk melindungi hak-hak seluruh pemegang saham, termasuk pemegang saham minoritas, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang maupun Peraturan Perusahaan. Dengan demikian, Perseroan menunjukkan dedikasinya terhadap transparansi dan keadilan dalam menjalankan operasionalnya.
4. Prinsip integritas dijunjung tinggi di Perseroan, yang tercermin melalui penandatanganan Pakta Integritas oleh jajaran Manajemen Puncak (Dewan Komisaris dan Direksi) serta seluruh karyawan. Tindakan ini menegaskan komitmen Perseroan dalam memastikan bahwa setiap interaksi dan keputusan diambil dengan mempertimbangkan nilai-nilai etika dan moral yang tinggi.

duties and responsibilities according to their respective roles and functions without pressure from any party whose interests conflict with those of the Company. This ensures that every action reflects a strong commitment to integrity and professionalism.

3. The Company is committed to protecting the rights of all shareholders, including minority shareholders, in accordance with applicable laws and Company regulations. This demonstrates the Company's commitment to transparency and fairness in its operations.
4. Integrity is upheld throughout the Company, as reflected in the signing of Integrity Pacts by the top management, namely the Board of Commissioners and the Board of Directors, as well as all employees. This action reinforces the Company's commitment to ensuring that all interactions and decisions are guided by ethical and moral values.

Pilar Akuntabilitas

Penjelasan:
Perseroan dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar melalui pengelolaan bisnis secara benar, terukur, dan sesuai dengan kepentingan Perseroan dengan tetap memperhitungkan kepentingan Pemegang Saham dan pemangku kepentingan lainnya.

Implementasi di Perseroan:
1. Setiap insan Perseroan menjalankan tugas dan tanggung jawab yang berbeda-beda sesuai dengan kapabilitasnya masing-masing sebagaimana tercantum dalam *Board Manual* ataupun piagam masing-masing organ yang telah disahkan demi tercapainya kepentingan Perseroan; dan
2. Dewan Komisaris dan Direksi mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada pemegang saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Pilar Transparansi

Penjelasan:
Perseroan menjamin ketersediaan informasi yang

Accountability Pillar

Description:
The Company is accountable for its performance in a transparent and fair manner through proper, measurable business management that aligns with the Company's interests while taking into account the interests of Shareholders and other stakeholders.

Implementation within the Company:
1. Every Company employee carries out distinct duties and responsibilities according to their respective capabilities, as stipulated in the Board Manual and the charter of each corporate organ, to support the achievement of the Company's objectives; and
2. The Board of Commissioners and the Board of Directors are accountable to shareholders for their performance through the General Meeting of Shareholders (GMS).

Transparency Pillar

Description:
The Company ensures the availability of material and

material dan relevan secara jelas, terbuka, dan akurat melalui media yang mudah diakses dan dipahami oleh para pemangku kepentingan. Namun, pengungkapan informasi perusahaan tetap memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku mengenai transparansi informasi perusahaan.

Implementasi di Perseroan:
1. Perseroan memiliki situs web resmi yang dapat diakses dengan mudah oleh publik, yaitu: www.plnenergigas.co.id; dan
2. Proses diskusi dan pengambilan keputusan Dewan Komisaris dan Direksi dilakukan secara transparan melalui rapat internal maupun rapat gabungan.

relevant information in a clear, open, and accurate manner through media that are easily accessible and understandable to stakeholders. At the same time, the disclosure of Company information remains subject to applicable laws and regulations governing corporate transparency.

Implementation within the Company:
1. The Company maintains an official website that is easily accessible to the public: www.plnenergigas.co.id; and
2. Discussions and decision making processes of the Board of Commissioners and the Board of Directors are conducted transparently through internal meetings and joint meetings.

Pilar Keberlanjutan

Penjelasan:
Perseroan mematuhi peraturan perundang-undangan serta berkomitmen melaksanakan tanggung jawab penuh terhadap masyarakat dan lingkungan agar berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan melalui kerja sama dengan semua pemangku kepentingan terkait meningkatkan taraf kehidupannya dengan cara yang selaras dengan kepentingan bisnis dan agenda pembangunan berkelanjutan.

Implementasi di Perseroan:
1. Pengelolaan usaha Perseroan dilakukan secara profesional sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Pelaksanaan program dan/atau kegiatan *Corporate Social Responsibility* (CSR) setiap tahun;
3. Mengikuti perkembangan regulasi terkini baik yang berkaitan dengan industri sekuritas maupun pasar modal melalui laporan pemantauan *review* regulasi yang dilakukan secara berkala; dan
4. Melaksanakan kewajiban keterbukaan informasi sesuai regulasi yang berlaku.

Sustainability Pillar

Description:
The Company complies with applicable laws and regulations and is committed to fulfilling its responsibilities to society and the environment to contribute to sustainable development through collaboration with stakeholders aimed at improving quality of life in a manner consistent with business interests and sustainable development goals.

Implementation within the Company:
1. The Company's business activities are managed professionally in accordance with the Articles of Association and applicable laws and regulations;
2. Corporate Social Responsibility (CSR) programs and activities are implemented annually;
3. The Company monitors regulatory developments related to both the securities industry and capital markets through periodic regulatory review and monitoring reports; and
4. The Company fulfills its information disclosure obligations in accordance with applicable regulations.

Rapat Umum Pemegang Saham
Annual General Meeting of Shareholders

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) merupakan wadah bagi pemegang saham untuk melaksanakan hak dan kewenangannya dalam pengambilan keputusan strategis Perusahaan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebagai organ Perusahaan dengan kewenangan tertinggi, RUPS berperan dalam menetapkan arah kebijakan Perusahaan serta memberikan persetujuan terhadap agenda penting yang berkaitan dengan keberlangsungan usaha dan penerapan tata kelola perusahaan yang baik. Pelaksanaan RUPS dilakukan dengan tetap memperhatikan batas kewenangan masing-masing organ Perusahaan. RUPS tidak melakukan intervensi terhadap tugas dan tanggung jawab Direksi maupun Dewan Komisaris di luar kewenangan yang telah diatur dalam Anggaran Dasar dan ketentuan hukum yang berlaku.

Sesuai Anggaran Dasar Perusahaan, RUPS terdiri atas RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa. RUPS Tahunan diselenggarakan setiap tahun buku sebagai sarana penyampaian dan persetujuan atas laporan pengelolaan Perusahaan, termasuk Laporan Tahunan, Laporan Keuangan yang telah diaudit, serta Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP). Adapun RUPS Luar Biasa dapat diselenggarakan sewaktu-waktu apabila terdapat kebutuhan Perusahaan yang memerlukan keputusan segera dari pemegang saham. Pelaksanaan RUPS juga dapat dilakukan melalui mekanisme sirkuler sesuai ketentuan yang berlaku dengan tetap mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan terhadap tata kelola perusahaan.

The General Meeting of Shareholders (GMS) serves as a forum for shareholders to exercise their rights and authority in making strategic decisions for the Company in accordance with the provisions of the Articles of Association and applicable laws and regulations. As the Company's highest governing body, the GMS plays a role in determining the Company's policy direction and approving important agenda items related to business continuity and the implementation of good corporate governance. The conduct of the GMS is carried out while respecting the respective limits of authority of each corporate body. The GMS does not interfere with the duties and responsibilities of the Board of Directors or the Board of Commissioners beyond the authority stipulated in the Articles of Association and applicable laws.

In accordance with the Company's Articles of Association, the GMS consists of the Annual General Meeting of Shareholders and the Extraordinary General Meeting of Shareholders. The Annual General Meeting of Shareholders is held each fiscal year as a forum for presenting and approving reports on the Company's management, including the Annual Report, the audited Financial Statements, and the Company's Work Plan and Budget (RKAP). An Extraordinary GMS may be convened at any time if the Company's needs require an immediate decision from shareholders. The GMS may also be conducted through a circular resolution mechanism in accordance with applicable regulations, while upholding the principles of transparency, accountability, and compliance with corporate governance standards.

Pelaksanaan RUPS Tahun 2025

Sepanjang tahun 2025, Perusahaan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan sebanyak 2 (dua) kali. RUPS Tahunan pertama dilaksanakan pada 30 Januari 2025, terkait persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2025. Selanjutnya, RUPS Tahunan kedua diselenggarakan pada 30 Juni 2025, terkait persetujuan Laporan Tahunan dan pengesahan Laporan Keuangan Tahun Buku 2024 sebagai bentuk pertanggungjawaban pengelolaan Perusahaan.

Conduct of the 2025 GMS

Throughout 2025, the Company held two (2) Annual General Meetings of Shareholders (AGMs). The first AGM was held on January 30, 2025, to approve the Company's Work Plan and Budget (RKAP) for 2025. Subsequently, the second Annual General Meeting was held on June 30, 2025, to approve the Annual Report and ratify the Financial Statements for the 2024 fiscal year as a form of accountability for the Company's management.

Dalam pelaksanaan RUPS, Perusahaan tidak menggunakan pihak independen secara khusus untuk melakukan penghitungan suara. Proses penghitungan suara dilakukan dengan bantuan Notaris guna memastikan pelaksanaan rapat berjalan sesuai ketentuan yang berlaku.

In conducting the AGMs, the Company does not specifically engage an independent party to count the votes. The vote-counting process is carried out with the assistance of a notary to ensure that the meeting is conducted in accordance with applicable regulations.

Pelaksanaan RUPS
Conduct of the AGM

RUPS Tahunan Annual General Meeting	Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Company Work Plan and Budget	Laporan Pertanggung Jawaban Accountability Report
Tanggal Pemanggilan Convening Date	15 Januari 2025 January 15, 2025	5 Juni 2025 June 5, 2025
Pimpinan Rapat Chair of the Meeting	Pemegang Saham Shareholders	Pemegang Saham Shareholders
Kehadiran Orang Utama Attendance of Key Personnel	Dewan Komisaris (100%) Direksi (100%) Board of Commissioners (100%) Board of Directors (100%)	Dewan Komisaris (100%) Direksi (100%) Board of Commissioners (100%) Board of Directors (100%)
Pihak Independen Independent Parties	Notaris Notary	Notaris Notary

Perusahaan telah menindaklanjuti dan melaksanakan seluruh keputusan yang ditetapkan dalam RUPS, termasuk persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2025 serta penyampaian dan penerimaan Laporan Pertanggungjawaban Direksi untuk Tahun Buku 2024. Pelaksanaan keputusan tersebut dilakukan secara berkelanjutan sebagai wujud komitmen Perseroan dalam mendukung pencapaian sasaran strategis yang telah ditetapkan, melalui penguatan tata kelola, optimalisasi sumber daya, serta peningkatan efektivitas operasional di seluruh lini bisnis. Upaya ini juga diarahkan untuk menjaga pertumbuhan kinerja jangka panjang yang stabil, berdaya saing, dan berkelanjutan.

The Company has followed up on and implemented all decisions made at the General Shareholders' Meeting, including the approval of the 2025 Corporate Work Plan and Budget (RKAP) as well as the submission and acceptance of the Board of Directors' Accountability Report for the 2024 Fiscal Year. The implementation of these decisions is carried out continuously as a manifestation of the Company's commitment to supporting the achievement of established strategic objectives, through strengthening corporate governance, optimizing resources, and enhancing operational effectiveness across all business lines. These efforts are also aimed at maintaining stable, competitive, and sustainable long-term performance growth.

Keputusan RUPS Persetujuan RKAP Tahun 2025
GMS Resolution on Approval of the 2025 Budget Plan

No	Agedan dan Pemungutan Suara Agenda and Voting	Keputusan dan Realisasi Decision and Outcome
1.	Agenda Persetujuan dan Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Tahun 2025. Hasil Pemungutan Suara Suara setuju = 100 % Tidak setuju = 0 % Abstain = 0 % Agenda Approval and Ratification of the Company's 2025 Work Plan and Budget. Voting Results Votes in favor = 100% Votes against = 0% Abstentions = 0%	Keputusan RUPS menyetujui dan mengesahkan RKAP tahun 2025. Realisasi RKAP Tahun 2025 telah disahkan pada saat RUPS berlangsung. Decision The General Meeting of Shareholders approved and ratified the 2025 Budget Plan. Implementation The 2025 Annual Budget Plan was ratified during the AGM.
2.	Agenda Persetujuan dan Pengesahan Kontrak Manajemen/Key *Performance Indicator* Tahun 2025. Hasil Pemungutan Suara Suara setuju = 100 % Tidak setuju = 0 % Abstain = 0 % Agenda Approval and Ratification of the *2025* Management Contract/ Key Performance Indicators. Voting Results Votes in favor = 100% Votes against = 0% Abstentions = 0%	Keputusan RUPS menyetujui dan mengesahkan Kontrak Manajemen/ *Key Performance Indicator* (KPI) 2024 antara Direksi, Dewan Komisaris dan Pemegang Saham Perusahaan. Realisasi Kontrak Manajemen/*Key Performance Indicator* Tahun 2025 telah disahkan pada saat RUPS berlangsung. Resolution The General Meeting of Shareholders approved and ratified the 2024 Management Contract/Key Performance Indicators (KPIs) between the Board of Directors, the Board of Commissioners, and the Company's Shareholders. Implementation The 2024 Management Contract/Key Performance Indicator was ratified during the AGM.



Keputusan RUPS Laporan Pertanggung Jawaban Tahun Buku 2024
General Meeting of Shareholders Resolution: Accountability Report for Fiscal Year 2024

No	Agenda dan Pemungutan Suara Agenda and Voting	Keputusan dan Realisasi Decisions and Implementation
1	Agenda Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Konsolidasi Keuangan Perusahaan, Persetujuan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris selama Tahun Buku 2024, sekaligus Pemberian Pembebasan Tanggung Jawab Sepenuhnya (*Volledig Acquit De Charge*) kepada Direksi atas Tindakan Pengurusan Perusahaan dan Dewan Komisaris atas Tindakan Pengawasan Perusahaan yang dijalankan selama Tahun Buku 2024, sepanjang tindakan tersebut bukan merupakan tindakan pidana dan tercermin dalam buku Perusahaan, termasuk Laporan Keuangan Perusahaan Tahun Buku 2024. Hasil Pemungutan Suara Suara setuju = 100 % Tidak setuju = 0 % Abstain = 0 % Agenda Approval of the Annual Report and ratification of the Company's Consolidated Financial Statements, approval of the Board of Commissioners' supervisory report for the 2024 financial year, as well as the granting of full release and discharge of responsibility (*volledig acquit de charge*) to the Board of Directors for the Company's management actions and to the Board of Commissioners for the Company's supervisory actions carried out during the 2024 financial year, provided that such actions do not constitute criminal acts and are reflected in the Company's books, including the Company's Finansial Statements for the 2024 financial year. Voting Results Votes in favor = 100% Votes against = 0% Abstentions = 0	Keputusan • RUPS menyetujui dan menerima Laporan Tahunan mengenai keadaan dan jalannya Perusahaan selama tahun buku 2024 yang terdiri atas Laporan Keuangan, Laporan Evaluasi Kinerja dan Laporan Kepatuhan. • RUPS menyetujui dan menerima Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris selama Tahun Buku 2024. • RUPS mengesahkan Laporan Keuangan Perusahaan Tahun Buku 2024 yang memuat Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian, Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain, Laporan Arus Kas dan Laporan Perubahan Ekuitas beserta penjelasannya yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Rintis, Jumadi, Rianto & Rekan dengan pendapat "Wajar dalam semua hal yang material" sebagaimana dimaksud dalam laporannya Nomor 01045/2.1457/AU.1/02/1789-4/1/VI/2025 tanggal 18 Juni 2025. • RUPS memberikan pembebasan sepenuhnya (*Volledig Acquit De Charge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perusahaan atas pengurusan dan pengawasan sesuai dengan tanggung jawab dan tindakan dalam bidang masing-masing yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2024, sepanjang tindakan-tindakan tersebut bukan merupakan tindakan pidana, tercermin dalam pembukuan Perusahaan, tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta termuat dalam Laporan Keuangan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Rintis, Jumadi, Rianto & Rekan. • Pengesahan serta Pembebasan tanggung jawab tersebut tidak melepaskan tanggung jawab hukum terhadap Direksi dan/atau Dewan Komisaris apabila laporan yang diungkapkan tersebut terbukti melanggar ketentuan dan prosedur hukum yang berlaku, dan/atau ternyata dikemudian hari terbukti adanya tindakan yang menyimpang dan/atau merugikan Perusahaan. Realisasi Persetujuan dan Pengesahan Laporan Perusahaan Tahun Buku 2024 termasuk Laporan Pelaksanaan Pengawasan Dewan Komisaris Tahun Buku 2024 serta Pemberian Pembebasan Tanggung Jawab Sepenuhnya (*Volledig Acquit De Charge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris atas pengelolaan dan Pengawasan yang telah dijalankan selama tahun 2024 telah disahkan pada saat RUPS berlangsung. Resolutions • The GMS approved and accepted the Annual Report regarding the state and conduct of the Company's business during the 2024 financial year, comprising the Financial Statements, Performance Evaluation Report, and Compliance Report. • The GMS approved and accepted the Report on the Supervisory Duties of the Board of Commissioners during the 2024 financial year. • The GMS ratified the Company's Financial Statements for the 2024 financial year—including the Consolidated Statement of Financial Position, Statement of Profit or Loss and Other Comprehensive Income, Statement of Cash Flows, and Statement of Changes in Equity, along with their notes—which were audited by the Public Accounting Firm Rintis, Jumadi, Rianto & Rekan with an opinion of "Fair in all material respects," as stated in their report Number 01045/2.1457/AU.1/02/1789-4/1/VI/2025 dated June 18, 2025. • The GMS granted full discharge and release from liability (*volledig acquit et de charge*) to the Company's Board of Directors and Board of Commissioners regarding the management and supervision—in accordance with their respective responsibilities and actions—carried out during the 2024 financial year, provided that such actions did not constitute criminal acts, were properly recorded in the Company's books, did not contravene applicable laws and regulations, and were included in the Financial Statements audited by the Public Accounting Firm Rintis, Jumadi, Rianto & Rekan. • Such ratification and release from liability do not absolve the Board of Directors and/or the Board of Commissioners of legal liability if the reported matters are proven to violate applicable legal provisions and procedures, and/or if it is subsequently proven that actions were taken that caused loss or damage to the Company. Implementation The approval and ratification of the Company's report for the 2024 financial year—including the Board of Commissioners' supervisory performance report for the 2024 financial year—as well as the granting of full release and discharge (*volledig acquit et de charge*) to the Board of Directors and the Board of Commissioners regarding the management and supervision carried out during 2024, were ratified during the General Meeting of Shareholders.

2	Agenda Penetapan Penggunaan Laba Bersih Tahun Buku 2024. Hasil Pemungutan Suara Suara setuju = 100 % Tidak setuju = 0 % Abstain = 0 % Agenda Determination of the Allocation of Net Profit Financial Year 2024. Voting Results Votes in favor = 100% Votes against = 0% Abstentions = 0	Keputusan RUPS memberi Kuasa kepada Pemegang Saham mayoritas untuk menetapkan Penggunaan Laba Bersih Tahun Buku 2024 yang akan ditetapkan melalui keputusan terpisah. Realisasi PT PLN Energi Primer Indonesia selaku Pemegang Saham Mayoritas telah menetapkan penggunaan laba bersih tahun buku 2024 melalui surat penetapan penggunaan laba bersih tahun 2024, remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris tahun 2025, tantiem Direksi dan Dewan Komisaris tahun 2024 serta bonus karyawan tahun buku 2024. Resolutions The General Meeting of Shareholders (GMS) authorized the majority shareholder to determine the allocation of net profit for the 2024 financial year, which is to be established through a separate decision. Implementation PT PLN Energi Primer Indonesia, as the majority shareholder, has determined the allocation of net profit for the 2024 financial year—as well as the remuneration for the Board of Directors and Board of Commissioners for 2025, performance-based incentives (tantiem) for the Board of Directors and Board of Commissioners for 2024, and employee bonuses for the 2024 financial year—via an official determination letter.
3	Agenda Penetapan Gaji/Honorarium berikut Fasilitas dan Tunjangan Tahun Buku 2025 serta Tantiem/Insentif Kinerja/Insentif Khusus atas kinerja Tahun Buku 2024 untuk Direksi dan Dewan Komisaris Perusahaan, serta pemberian Bonus Karyawan Tahun Buku 2024. Hasil Pemungutan Suara Suara setuju = 100 % Tidak setuju = 0 % Abstain = 0 % Agenda Determination of salaries/ honoraria, facilities, and allowances for the 2025 financial year, as well as bonuses/performance incentives/special incentives based on performance in the 2024 financial year for the Company's Board of Directors and Board of Commissioners, and the provision of employee bonuses for the 2024 financial year.	Keputusan RUPS memberi Kuasa kepada Pemegang Saham mayoritas untuk menetapkan Gaji/Honorarium berikut Fasilitas dan Tunjangan Tahun Buku 2025 serta Tantiem/Insentif Kinerja/Insentif Khusus atas kinerja Tahun Buku 2024 untuk Direksi dan Dewan Komisaris Perusahaan, serta pemberian Bonus Karyawan Tahun Buku 2024 yang akan ditetapkan melalui keputusan terpisah. Realisasi PT PLN Energi Primer Indonesia selaku Pemegang Saham Mayoritas telah menetapkan Gaji/Honorarium berikut Fasilitas dan Tunjangan Tahun Buku 2025 serta Tantiem/Insentif Kinerja/Insentif Khusus atas kinerja Tahun Buku 2024 untuk Direksi dan Dewan Komisaris Perusahaan, serta pemberian Bonus Karyawan Tahun Buku 2024 melalui surat penetapan penggunaan laba bersih tahun 2024, remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris tahun 2025, tantiem Direksi dan Dewan Komisaris tahun 2024 serta bonus karyawan tahun buku 2024. Resolutions The General Meeting of Shareholders (GMS) authorized the majority shareholder to determine the salaries/honoraria—including facilities and allowances—for the 2025 financial year, as well as the *tantiem* (profit-sharing bonuses), performance incentives, and special incentives based on performance in the 2024 financial year for the Company's Board of Directors and Board of Commissioners; the GMS also authorized the determination of employee bonuses for the 2024 financial year, to be finalized through a separate decision. Implementation PT PLN Energi Primer Indonesia, acting as the majority shareholder, has established the salaries/honoraria—including facilities and allowances—for the 2025 financial year, as well as the *tantiem*, performance incentives, and special incentives based on performance in the 2024 financial year for the Company's Board of Directors and Board of Commissioners, and the employee bonuses for the 2024 financial year. This was effected through a letter determining the utilization of net profit for 2024, remuneration for the Board of Directors and Board of Commissioners for 2025, tantiem for the Board of Directors and Board of Commissioners for 2024, and employee bonuses for the 2024 financial year.

Rapat Umum Pemegang Saham
Annual General Meeting of Shareholders

4	Agenda Penetapan Kantor Akuntan Publik untuk Audit Laporan Keuangan Perusahaan Tahun Buku 2025. Hasil Pemungutan Suara Suara setuju = 100 % Tidak setuju = 0 % Abstain = 0 % Agenda Appointment of a Public Accounting Firm for the Audit of the Company's Financial Statements for the 2025 Financial Year. Voting Results Votes in favor = 100% Votes against = 0% Abstentions = 0	Keputusan RUPS menetapkan Kantor Akuntan Publik sebagai auditor yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perusahaan, Laporan Evaluasi Kinerja dan Laporan Kepatuhan, untuk Tahun Buku 2025 adalah sama dengan Kantor Akuntan Publik yang mengaudit PT PLN Energi Primer Indonesia. Realisasi PT PLN Energi Primer Indonesia selaku Pemegang Saham Mayoritas telah menunjuk Kantor Akuntan Publik Rintis, Jumadi, Rianto & Rekan untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Tahun Buku 2025. Resolutions The General Meeting of Shareholders (GMS) appointed a Public Accounting Firm to audit the Company's Financial Statements, Performance Evaluation Report, and Compliance Report for the 2025 financial year—specifically, the same Public Accounting Firm that audits PT PLN Energi Primer Indonesia. Realization PT PLN Energi Primer Indonesia, as the majority shareholder, has appointed the Public Accounting Firm Rintis, Jumadi, Rianto & Rekan to conduct the audit of the Financial Statements for the 2025 financial year.



Keputusan RUPS Tahun Buku 2024

Seluruh keputusan yang ditetapkan oleh Para Pemegang Saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) telah dilaksanakan, termasuk persetujuan atas Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2024 serta Laporan Pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan dan kinerja selama Tahun Buku 2023. Implementasi tersebut dilakukan tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Resolutions of the 2024 Fiscal Year General Shareholders' Meeting

All decisions made by the Shareholders at the General Shareholders' Meeting (GSM) have been implemented, including approval of the 2024 Corporate Work Plan and Budget (RKAP) as well as the Accountability Report on the implementation of activities and performance during the 2023 Fiscal Year. These implementations were carried out on time and in accordance with applicable regulations.

Keputusan RUPS Persetujuan RKAP Tahun 2024
AGM Resolutions: Approval of the 2024 RKAP

No	Keputusan Resolution	Realisasi Implementation
1	Persetujuan dan Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2024. Approval and Ratification of the 2024 Corporate Work Plan and Budget (RKAP).	RKAP Tahun 2024 telah disahkan pada saat RUPS berlangsung. The 2024 RKAP was ratified during the AGM.
2	Persetujuan dan pengesahan *Key Performance Indicator* Tahun 2024. Approval and ratification of the 2024 Key Performance Indicators.	Kontrak Manajemen/*Key Performance Indicator* Tahun 2024 telah disahkan pada saat RUPS berlangsung. The 2024 Management Contract/Key Performance Indicators were ratified during the AGM.



Keputusan RUPS Laporan Pertanggung Jawaban Tahun Buku 2023
AGM Resolution on the Accountability Report for Fiscal Year 2023

No	Keputusan Decision	Realisasi Implementation
1	• RUPS menyetujui dan menerima Laporan Tahunan mengenai keadaan dan jalannya Perusahaan selama tahun buku 2023 yang terdiri atas Laporan Keuangan, Laporan Evaluasi Kinerja dan Laporan Kepatuhan. • RUPS menyetujui dan menerima Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris selama Tahun Buku 2023. • RUPS mengesahkan Laporan Keuangan Perusahaan Tahun Buku 2023 yang memuat Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian, Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian, Laporan Arus Kas Konsolidasian dan Laporan Perubahan Ekuitas Konsolidasian beserta penjelasannya yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Rintis, Jumadi, Rianto & Rekan dengan pendapat "Wajar dalam semua hal yang material" sebagaimana dimaksud dalam laporannya Nomor 00157/2.1457/AU.1/02/1789-3/1/2024 tanggal 12 Juni 2024. • RUPS memberikan pembebasan sepenuhnya (*Volledig Acquit De Charge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perusahaan atas pengurusan dan pengawasan sesuai dengan tanggung jawab dan tindakan dalam bidang masing-masing yang telah dijalankan selama tahun buku 2023, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta termuat dalam Laporan Keuangan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Rintis, Jumadi, Rianto & Rekan. • The General Meeting of Shareholders approves and accepts the Annual Report on the condition and operations of the Company during the 2023 fiscal year, which consists of the Financial Statements, the Performance Evaluation Report, and the Compliance Report. • The General Meeting of Shareholders approved and accepted the Report on the Board of Commissioners' Supervisory Duties for the 2023 fiscal year. • The General Meeting of Shareholders ratified the Company's Financial Statements for the 2023 fiscal year, which include the Consolidated Statement of Financial Position, the Consolidated Statement of Income and Other Comprehensive Income, the Consolidated Statement of Cash Flows, and the Consolidated Statement of Changes in Equity, along with their notes, which have been audited by the public accounting firm Rintis, Jumadi, Rianto & Partners, with an opinion of "Unqualified in all material respects" as stated in their report No. 00157/2.1457/AU.1/02/1789-3/1/2024 dated June 12, 2024. • The General Meeting of Shareholders granted full discharge (Volledig Acquit De Charge) to the Company's Board of Directors and Board of Commissioners for their management and supervision in accordance with their respective responsibilities and actions , which were carried out during the 2023 fiscal year, provided that such actions did not conflict with applicable laws and regulations and were included in the Financial Statements audited by the public accounting firm Rintis, Jumadi, Rianto & Partners.	Persetujuan dan Pengesahan Laporan Perusahaan Tahun Buku 2023 termasuk Laporan Pelaksanaan Pengawasan Dewan Komisaris Tahun Buku 2023 serta Pemberian Pembebasan Tanggung Jawab Sepenuhnya (*Volledig Acquit De Charge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris atas pengelolaan dan Pengawasan yang telah dijalankan selama tahun 2023 telah disahkan pada saat RUPS berlangsung. The approval and ratification of the Company's Financial Statements for the 2023 fiscal year, including the Report on the Board of Commissioners' Oversight Activities for the 2023 fiscal year, as well as the granting of full discharge of liability (Volledig Acquit De Charge) to the Board of Directors and the Board of Commissioners for the management and oversight carried out during 2023, were approved during the AGM.
2	RUPS memberi Kuasa kepada Pemegang Saham mayoritas untuk menetapkan Penggunaan Laba Bersih Tahun Buku 2023. The GMS authorized the majority shareholders to determine the appropriation of net income for the 2023 fiscal year.	PT PLN Energi Primer Indonesai selaku Pemegang Saham Mayoritas telah menetapkan penggunaan laba bersih tahun buku 2023 melalui surat penetapan penggunaan laba bersih tahun 2023, remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris tahun 2024, tantiem Direksi dan Dewan Komisaris tahun 2023 serta bonus karyawan tahun buku 2023. PT PLN Energi Primer Indonesia, as the majority shareholder, has determined the allocation of net income for the 2023 fiscal year through a letter specifying the allocation of net income for 2023, the remuneration for the Board of Directors and the Board of Commissioners for 2024, the performance bonuses for the Board of Directors and the Board of Commissioners for 2023, and employee bonuses for the 2023 fiscal year.

3	RUPS memberi Kuasa kepada Pemegang Saham mayoritas untuk menetapkan Tantiem Tahun Buku 2023 dan Remunerasi Tahun Buku 2024 bagi Direksi dan Dewan Komisaris serta Bonus bagi karyawan untuk Tahun Buku 2023. The General Meeting of Shareholders granted authority to the majority shareholder to determine the 2023 performance bonuses and 2024 remuneration for the Board of Directors and Board of Commissioners, as well as employee bonuses for the 2023 fiscal year.	PT PLN Energi Primer Indonesai selaku Pemegang Saham Mayoritas telah menetapkan Tantiem Tahun Buku 2023 dan Remunerasi Tahun Buku 2024 bagi Direksi dan Dewan Komisaris, serta Bonus bagi karyawan untuk Tahun Buku 2023 melalui surat penetapan penggunaan laba bersih tahun 2023, remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris tahun 2024, tantiem Direksi dan Dewan Komisaris tahun 2023 serta bonus karyawan tahun buku 2023. PT PLN Energi Primer Indonesia, as the Majority Shareholder, has determined the 2023 fiscal year performance bonuses and the 2024 fiscal year remuneration for the Board of Directors and the Board of Commissioners, as well as employee bonuses for the 2023 fiscal year, through a letter of determination regarding the use of 2023 net profit, the 2024 remuneration for the Board of Directors and the Board of Commissioners, the 2023 bonuses for the Board of Directors and Board of Commissioners, and employee bonuses for the 2023 fiscal year.
4	RUPS menetapkan Kantor Akuntan Publik sebagai auditor yang akan mengaudit Laporan Perusahaan Tahun Buku 2024 (Laporan Keuangan Perusahaan, Laporan Evaluasi Kinerja dan Laporan Kepatuhan) sama dengan Kantor Akuntan Publik yang mengaudit Laporan Pemegang Saham mayoritas Tahun Buku 2024. The General Meeting of Shareholders appointed the Public Accounting Firm to audit the Company's Reports for Fiscal Year 2024 (the Company's Financial Statements, Performance Evaluation Report, and Compliance Report), the same firm that will audit the majority shareholder's reports for Fiscal Year 2024.	PT PLN Energi Primer Indonesai selaku Pemegang Saham Mayoritas telah menunjuk Kantor Akuntan Publik Rintis, Jumadi, Rianto & Rekan untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Tahun Buku 2024. PT PLN Energi Primer Indonesia, as the Majority Shareholder, has appointed the Public Accounting Firm Rintis, Jumadi, Rianto & Partners to audit the Financial Statements for Fiscal Year 2024.

Tindak Lanjut Arahan Pemegang Saham

Keputusan dan arahan yang disampaikan oleh Para Pemegang Saham dalam RUPS terkait persetujuan RKAP serta Laporan Pertanggungjawaban telah direalisasikan oleh Perusahaan secara menyeluruh. Adapun rekapitulasi pelaksanaan arahan tersebut adalah sebagai berikut:

Follow-up on Shareholders' Directives

The Company has fully implemented the decisions and directives conveyed by the Shareholders at the General Meeting of Shareholders regarding the approval of the Budget Plan and the Accountability Report. A summary of the implementation of these directives is as follows:

Tindak Lanjut Arahan Pemegang Saham
Follow-up on Shareholders' Directives

Arahan Pemegang Saham dalam RUPS Shareholders' Directives at the AGM	Jumlah Number	Selesai Completed	Selesai Berkelanjutan Ongoing	Proses Tindak Lanjut Follow-up Process
RUPS persetujuan RKAP Tahun 2024 AGM to Approve the 2024 Annual Business Plan	33	29	4	-
RUPS persetujuan RKAP Tahun 2025 AGM to Approve the 2025 Budget Plan	54	15	36	3

Dewan Komisaris
Board of Commissioners

Dewan Komisaris merupakan organ penting dalam tata kelola Perusahaan yang berperan dalam mengawasi pengelolaan Perusahaan agar berjalan sesuai dengan prinsip GCG. Dalam menjalankan fungsinya, Dewan Komisaris bertugas melakukan pengawasan terhadap kegiatan operasional Perusahaan serta memberikan nasihat dan arahan strategis kepada Direksi dalam pelaksanaan pengurusan Perusahaan. Seluruh tugas dan tanggung jawab tersebut dilaksanakan secara kolegial sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Masa jabatan anggota Dewan Komisaris ditetapkan selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang kembali untuk satu periode jabatan berikutnya setelah masa jabatan berakhir.

The Board of Commissioners is a key body in the Company's governance structure, responsible for overseeing the Company's management to ensure it operates in accordance with the principles of Good Corporate Governance (GCG). In carrying out its functions, the Board of Commissioners is tasked with supervising the Company's operational activities and providing strategic advice and guidance to the Board of Directors in the management of the Company. All duties and responsibilities of the Board of Commissioners ( ) are carried out collectively as an indivisible unit. The term of office for members of the Board of Commissioners is set at 5 (five) years and may be extended for one subsequent term after the current term expires.

Susunan Dewan Komisaris

Sepanjang tahun 2025, terdapat perubahan pada susunan Dewan Komisaris Perusahaan. Komposisi Dewan Komisaris per 31 Desember 2025 ditetapkan berdasarkan Keputusan Pemegang Saham di Luar Rapat Umum Pemegang Saham (Sirkuler) yang disahkan pada Juli 2025, dengan susunan sebagai berikut:

- PLT Komisaris Utama : Bayu Satria Pratama
- Komisaris : Andriah Feby Misna

Terdapat satu anggota Dewan Komisaris yang memenuhi kriteria sebagai Komisaris Independen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu Sdri. Andriah Feby Misna. Jumlah tersebut setara dengan 50% dari total anggota Dewan Komisaris yang menjabat pada akhir tahun 2025. Meskipun demikian, dalam keputusan pengangkatannya, yang bersangkutan tidak secara tegas dicantumkan sebagai Komisaris Independen.

Composition of the Board of Commissioners

Throughout 2025, there were changes in the composition of the Company's Board of Commissioners. The composition of the Board of Commissioners as of December 31, 2025, was determined based on a Shareholders' Resolution Outside the General Meeting of Shareholders (Circular) approved in July 2025, with the following composition:

- Acting President Commissioner : Bayu Satria Pratama
- Commissioner : Andriah Feby Misna

There is one member of the Board of Commissioners who meets the criteria for an Independent Commissioner in accordance with applicable laws and regulations, namely Ms. Andriah Feby Misna. This number is equivalent to 50% of the total members of the Board of Commissioners serving at the end of 2025. However, in the appointment resolution, she was not explicitly designated as an Independent Commissioner.

Pedoman Dewan Komisaris

Dewan Komisaris menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan berpedoman pada Tata Laksana Kerja Direksi dan Dewan Komisaris (*Board Manual*) yang mengatur berbagai aspek tata kelola, termasuk tugas, tanggung jawab, dan wewenang Dewan Komisaris, mekanisme rapat, serta organ pendukung Dewan Komisaris. Perusahaan telah melakukan peninjauan dan pemutakhiran terhadap pedoman tersebut yang kemudian disahkan pada 24 Desember

Board of Commissioners Guidelines

The Board of Commissioners carries out its duties and responsibilities in accordance with the Board Manual, which governs various aspects of corporate governance, including the duties, responsibilities, and authorities of the Board of Commissioners, meeting procedures, and the Board's supporting bodies. The Company has reviewed and updated these guidelines, which were subsequently approved on December 24, 2024, under the title "Guidelines and

2024 dengan nama Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris dan Direksi. Peninjauan terhadap pedoman ini dilakukan secara berkala dan dapat diperbarui sewaktu-waktu apabila diperlukan sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan Perusahaan.

Rules of Procedure for the Board of Commissioners and the Board of Directors." These guidelines are reviewed periodically and may be updated at any time as necessary in accordance with the Company's needs and developments.

Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

Duties and Responsibilities of the Board of Commissioners

Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris dan Direksi yang mengacu pada Anggaran Dasar Perusahaan mengatur bahwa Dewan Komisaris memiliki tanggung jawab untuk melakukan pengawasan atas kebijakan dan pelaksanaan pengurusan Perusahaan oleh Direksi, baik yang berkaitan dengan Perusahaan maupun kegiatan usaha secara keseluruhan. Dewan Komisaris juga berperan memberikan nasihat kepada Direksi, termasuk melakukan pengawasan terhadap implementasi Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP), Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP), kepatuhan terhadap Anggaran Dasar, keputusan Rapat Umum Pemegang Saham, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam rangka mendukung pencapaian tujuan Perusahaan.

The Guidelines and Rules of Procedure for the Board of Commissioners and the Board of Directors, which are based on the Company's Articles of Association, stipulate that the Board of Commissioners is responsible for overseeing the policies and management of the Company by the Board of Directors, both with regard to the Company and its business activities as a whole. The Board of Commissioners also plays a role in advising the Board of Directors, including overseeing the implementation of the Company's Long-Term Plan (RJPP), the Company's Work Plan and Budget (RKAP), compliance with the Articles of Association, resolutions of the General Meeting of Shareholders, and applicable laws and regulations, in order to support the achievement of the Company's objectives.

Pembagian tugas Dewan Komisaris ditetapkan melalui keputusan Dewan Komisaris sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan Dewan Komisaris Nomor: 004.DEKOM/PLNGG/I/2022 dengan susunan sebagai berikut:

The division of duties among the members of the Board of Commissioners is established by a resolution of the Board of Commissioners as set forth in Board of Commissioners Resolution No. 004.DEKOM/PLNGG/I/2022, with the following composition:

Jabatan Position	Tugas dan Tanggung jawab Duties and Responsibilities
Komisaris Utama President Commissioner	Bertanggung jawab penuh atas seluruh fungsi pengawasan Dewan Komisaris terhadap pengelolaan Perusahaan yang dilakukan oleh Direksi sesuai tugas dan kewajiban sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan *Board Manual* Perusahaan untuk kepentingan Perusahaan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perusahaan termasuk pengawasan terhadap pelaksanaan: 1. Rencana Jangka Panjang Perusahaan. 2. Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan. 3. Ketentuan Anggaran Dasar. 4. Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham. 5. Peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bears full responsibility for all supervisory functions of the Board of Commissioners regarding the Company's management carried out by the Board of Directors in accordance with the duties and obligations as stipulated in the Company's Articles of Association and Board Manual for the benefit of the Company and in accordance with the Company's goals and objectives, including oversight of the implementation of: 1. The Company's Long-Term Plan. 2. The Company's Work Plan and Budget. 3. Provisions of the Articles of Incorporation. 4. Resolutions of the General Meeting of Shareholders. 5. Applicable laws and regulations.

Dewan Komisaris
Board of Commissioners

Komisaris selaku Ketua Komite Audit The Commissioner serving as Chair of the Audit Committee	Bertanggung jawab penuh atas seluruh fungsi pengawasan Dekom terhadap pengelolaan Perusahaan yang dilakukan oleh Direksi yang berada dibawah area tugas dan kewajiban Komite Audit sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Dewan Komisaris yang mencakup tidak terbatas pada penelaahan dan pengkajian atas: 1. Usulan Direksi terkait pemberian Keputusan/Tanggapan Tertulis atas Kewenangan Direksi yang memerlukan Persetujuan/Tanggapan Tertulis dari Dewan Komisaris yang bersifat kepatuhan terhadap peraturan dan ketentuan. 2. RKAP dan Kontrak Manajemen (KPI) dan perubahannya jika ada, yang diusulkan Direksi. 3. Laporan pengaduan dari Stakeholders Perusahaan. 4. Sistem Pengendalian Internal yang dijalankan Perusahaan. 5. Efektivitas Audit Internal dan Audit Eksternal. 6. Sistem kebijakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan. 7. Kebijakan mutu dan pelayanan Perusahaan. 8. Tingkat kepatuhan Perusahaan terkait GCG. 9. Laporan Manajemen, kinerja Perusahaan terkait Kontrak Manajemen (KPI) dan realisasi Kontrak Manajemen (KPI) Direktorat. 10. Pemenuhan arahan RUPS. Is fully responsible for all oversight functions of the Board of Commissioners regarding the management of the Company carried out by the Board of Directors, which falls under the scope of duties and responsibilities of the Audit Committee as stipulated in the Board of Commissioners' Resolution, including but not limited to the review and assessment of: 1. Proposals from the Board of Directors regarding the issuance of Written Decisions/Responses within the Board of Directors' authority that require Written Approval/Responses from the Board of Commissioners, which pertain to compliance with regulations and provisions. 2. The Annual Budget Plan (RKAP) and Management Contracts (KPIs), as well as any amendments thereto, as proposed by the Board of Directors. 3. Complaint reports from the Company's stakeholders. 4. The Company's internal control system. 5. The effectiveness of internal and external audits. 6. The Company's accounting policies and financial reporting procedures. 7. The Company's quality and service policies. 8. The Company's level of compliance with GCG. 9. Management Report, the Company's performance regarding Management Contract KPIs, and the Directorate's achievement of Management Contract KPIs. 10. Compliance with General Shareholders' Meeting directives.
Komisaris selaku Ketua Komite Manajemen Risiko Commissioner as Chair of the Risk Management Committee	Bertanggung jawab penuh atas seluruh fungsi pengawasan Dewan Komisaris terhadap pengelolaan Perusahaan yang dilakukan oleh Direksi yang berada dibawah area tugas dan kewajiban Komite Manajemen Risiko sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Dewan Komisaris yang mencakup namun tidak terbatas pada penelaahan dan pengkajian atas: 1. Usulan Direksi terkait pemberian Keputusan/Tanggapan Tertulis atas Kewenangan Direksi yang memerlukan Persetujuan/Tanggapan Tertulis dari Dewan Komisaris yang bersifat teknis. 2. RJPP dan perubahannya jika ada, yang diusulkan Direksi. 3. Pelaksanaan Manajemen Risiko Perusahaan. 4. Pengembangan Organisasi dan Sumber Daya Manusia. 5. Rencana dan implementasi Teknologi Informasi. 6. Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa. 7. Strategi Perusahaan terkait dengan perubahan lingkungan bisnis. 8. Pengelolaan Anak Perusahaan dan Perusahaan Afiliasi. 9. Pemenuhan arahan RUPS. 10. Nominasi dan remunerasi. Is fully responsible for all supervisory functions of the Board of Commissioners regarding the Company's management carried out by the Board of Directors within the scope of duties and responsibilities of the Risk Management Committee, as stipulated in the Board of Commissioners' Resolution, which includes but is not limited to the review and assessment of: 1. Proposals from the Board of Directors regarding the issuance of Decisions/Written Responses concerning the Board of Directors' authority that require technical approval or written responses from the Board of Commissioners. 2. The Long-Term Business Plan (RJPP) and any amendments thereto, if any, proposed by the Board of Directors. 3. The implementation of the Company's risk management. 4. Organizational and Human Resources Development. 5. Information Technology plans and implementation. 6. Policies on the Procurement of Goods and Services. 7. Corporate Strategy related to changes in the business environment. 8. Management of Subsidiaries and Affiliates. 9. Compliance with General Shareholders' Meeting directives. 10. Nominations and Remuneration.

Pelaksanaan Pengawasan Dewan Komisaris

Dewan Komisaris telah menyusun Rencana Kerja Dewan Komisaris tahun 2025 sebagai pedoman pelaksanaan fungsi, tugas, dan tanggung jawab pengawasan terhadap pengurusan Perusahaan yang dijalankan oleh Direksi. Rencana kerja tersebut memuat indikator serta target kinerja mandiri Dewan Komisaris. Pelaksanaan fungsi pengawasan dilakukan dengan mengkaji dan mengevaluasi kinerja Direksi berdasarkan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) serta Kontrak Manajemen (KM) yang telah ditetapkan oleh Pemegang Saham. Pengawasan tersebut dilaksanakan melalui permintaan data, laporan, serta rapat koordinasi secara berkala. Setiap rekomendasi yang disampaikan Dewan Komisaris kepada Direksi senantiasa berlandaskan pada prinsip tata kelola perusahaan yang baik.

Pada tahun buku 2025, program utama PLN EG sesuai RKAP 2025 difokuskan pada pengembangan infrastruktur gas, meliputi penyediaan fasilitas penyimpanan, transportasi, serta perluasan jaringan gasifikasi di berbagai wilayah dengan tujuan meningkatkan keandalan pasokan gas. Selain itu, kegiatan pemeliharaan dan pengoperasian (*Operation & Maintenance*) menjadi aspek penting dalam memastikan keberlanjutan operasional Perusahaan.

Dewan Komisaris telah menjalankan tugas dan tanggung jawab pengawasan atas pengurusan Perusahaan sesuai Rencana Kerja Dewan Komisaris serta mencapai target kinerja yang telah ditetapkan, di antaranya:

1. Melaksanakan Rapat Internal dan/atau Rapat Koordinasi dengan Direksi.
2. Mengikuti RUPS untuk Pengesahan RKAP dan Kontrak Manajemen tahun 2025 serta RUPS untuk Persetujuan LPT dan Pengesahan Laporan Keuangan Tahun Buku 2024.
3. Mengevaluasi dan menandatangani Laporan Manajemen Berkala bersama Direksi.
4. Melakukan telaah dan memberikan arahan / rekomendasi atas pelaksanaan program Perusahaan.

Supervisory Activities of the Board of Commissioners

The Board of Commissioners has prepared the 2025 Board of Commissioners Work Plan as a guideline for carrying out its oversight functions, duties, and responsibilities regarding the Company's management as executed by the Board of Directors. This work plan includes performance indicators and targets specific to the Board of Commissioners. The oversight function is carried out by reviewing and evaluating the Board of Directors' performance based on the Company's Work Plan and Budget (RKAP) and the Management Contract (KM) established by the Shareholders. This oversight is conducted through requests for data and reports, as well as periodic coordination meetings. Every recommendation submitted by the Board of Commissioners to the Board of Directors is always based on the principles of good corporate governance.

In the 2025 fiscal year, PLN Energi Gas's main programs, as outlined in the 2025 RKAP, are focused on gas infrastructure development, including the provision of storage and transportation facilities, as well as the expansion of gasification networks in various regions with the aim of improving the reliability of gas supply. In addition, maintenance and operations (Operation & Maintenance) are critical aspects in ensuring the Company's operational sustainability.

The Board of Commissioners has carried out its duties and responsibilities for overseeing the Company's management in accordance with the Board of Commissioners' Work Plan and has achieved the established performance targets, including:

1. Conducting internal meetings and/or coordination meetings with the Board of Directors.
2. Attending the General Shareholders' Meeting (GSM) to approve the 2025 Annual Business Plan (RKAP) and Management Contract, as well as the GSM to approve the Long-Term Plan (LPT) and ratify the Financial Statements for the 2024 Fiscal Year.
3. Evaluating and signing the Periodic Management Report together with the Board of Directors.
4. Conducting a review and providing guidance/ recommendations on the implementation of the Company's programs.

5. Monitoring tindak lanjut arahan RUPS dan Dewan Komisaris.
6. Mengikuti program pengembangan / peningkatan kompetensi bagi anggota Dewan Komisaris.
7. Melakukan evaluasi semesteran kinerja Perusahaan dan Direksi secara individual.
8. Melakukan evaluasi triwulanan kineja Organ Pendukung Dewan Komisaris.

Rapat Dewan Komisaris

Rapat Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris dan Direksi dapat diselenggarakan secara tatap muka maupun melalui media telekonferensi, video konferensi, atau sarana komunikasi lainnya yang memungkinkan seluruh peserta rapat saling melihat, mendengar, dan berpartisipasi secara langsung. Dewan Komisaris melaksanakan rapat sekurang-kurangnya satu kali dalam setiap bulan, dan dalam pelaksanaannya dapat mengundang Direksi untuk hadir dalam rapat tersebut.

Dewan Komisaris merencanakan penyelenggaraan Rapat Internal Dewan Komisaris serta Rapat Gabungan Dewan Komisaris dengan Direksi dengan jumlah dan waktu pelaksanaan sesuai ketentuan yang berlaku, yaitu minimal 12 (dua belas) kali dalam satu tahun atau satu kali setiap bulan. Sepanjang tahun 2025, realisasi Rapat Internal Dewan Komisaris telah dilaksanakan sebanyak 10 kali, sementara Rapat Gabungan Dewan Komisaris dengan Direksi juga terealisasi sebanyak 11 kali. Tingkat kehadiran Dewan Komisaris dalam rapat-rapat tersebut adalah sebagai berikut:

5. Monitor the follow-up on directives from the General Shareholders' Meeting and the Board of Commissioners.
6. Participating in competency development and enhancement programs for members of the Board of Commissioners.
7. Conducting semi-annual evaluations of the Company's performance and the individual performance of the Board of Directors.
8. Conduct quarterly performance evaluations of the Board of Commissioners' support bodies.

Board of Commissioners Meetings

Board of Commissioners meetings, as stipulated in the Guidelines and Rules of Procedure for the Board of Commissioners and the Board of Directors, may be held in person or via teleconference, video conference, or other communication means that allow all meeting participants to see, hear, and participate directly with one another. The Board of Commissioners holds meetings at least once a month and may invite members of the Board of Directors to attend these meetings.

The Board of Commissioners plans to hold Internal Meetings of the Board of Commissioners and Joint Meetings of the Board of Commissioners with the Board of Directors, with the frequency and timing in accordance with applicable regulations, namely at least 12 (twelve) times a year or once a month. Throughout 2025, 10 Internal Meetings of the Board of Commissioners were held, while 11 Joint Meetings of the Board of Commissioners and the Board of Directors were also held. The attendance rate of the Board of Commissioners at these meetings is as follows:

Tingkat Kehadiran Dewan Komisaris
Attendance Rate of the Board of Commissioners

Nama Name	Jabatan Position	Rapat Internal Dewan Komisaris Internal Board of Commissioners Meetings			Rapat Dewan Komisaris bersama Direksi Joint Meetings of the Board of Commissioners and the Board of Directors			RUPS AGM		
		Total Rapat Total Meetings	Jumlah Kehadiran Number of Attendees	Tingkat Kehadiran Attendance Rate	Total Rapat Total Meetings	Jumlah Kehadiran Number of Attendees	Tingkat Kehadiran Attendance Rate	Total Rapat Total Meetings	Jumlah Kehadiran Number of Attendees	Tingkat Kehadiran Attendance Rate
Dedi Budi Utomo[1]	PLT Komisaris Utama Acting President Commissioner	6	5	100%	5	5	100%	2	1	50%
Bayu Satria Pratama[2]	PLT Komisaris Utama Acting President Commissioner	10	10	100%	11	11	100%	2	2	100%
Andriah Feby Misna	Komisaris Commissioner	10	9	100%	11	11	100%	2	2	100%

Keterangan:
1. Menjabat sampai dengan 31 Juli 2025
2. Menjabat sejak 31 Juli 2025 dimana sebelumnya menjabat sebagai PLT Komisaris

Notes:
1. Term of office until July 31, 2025
2. Served since July 31, 2025, having previously served as Acting Commissioner

Program Pengenalan Dewan Komisaris

Setiap anggota Dewan Komisaris yang pertama kali diangkat wajib mengikuti program pengenalan mengenai Perusahaan. Pelaksanaan program pengenalan bagi Komisaris baru dilakukan sesuai dengan Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris dan Direksi. Program tersebut diselenggarakan bersamaan dengan agenda serah terima jabatan Komisaris dari pejabat lama kepada pejabat baru. Sepanjang tahun 2025 tidak terdapat pengangkatan Dewan Komisaris baru sehingga tidak terdapat program pengenalan mengenai Perusahaan.

Board of Commissioners Orientation Program

Every member of the Board of Commissioners appointed for the first time is required to participate in an orientation program regarding the Company. The orientation program for new Commissioners is conducted in accordance with the Guidelines and Rules of Procedure for the Board of Commissioners and the Board of Directors. The program is held in conjunction with the handover ceremony from the outgoing Commissioner to the incoming Commissioner. Throughout 2025, there were no new appointments to the Board of Commissioners; therefore, no orientation program regarding the Company was held.

Peningkatan Kompetensi Dewan Komisaris

Dewan Komisaris menyelenggarakan program pelatihan dan sertifikasi guna meningkatkan kompetensi anggota Dewan Komisaris sesuai dengan kebutuhan yang ada. Pelaksanaan program tersebut berpedoman pada Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris dan Direksi. Adapun program pelatihan yang diikuti Dewan Komisaris sepanjang tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Enhancement of the Board of Commissioners' Competencies

The Board of Commissioners organizes training and certification programs to enhance the competencies of its members in accordance with existing needs. The implementation of these programs is guided by the Guidelines and Rules of Procedure for the Board of Commissioners and the Board of Directors. The training programs attended by the Board of Commissioners throughout 2025 are as follows:

Program Pelatihan Dewan Komisaris
Board of Commissioners Training Programs

Nama Name	Pelatihan Training	Tanggal Date
Bayu Satria Pratama	*Qualified Risk Governance Professional (QRGP)*	11 Juni | June 2025
Andriah Feby Misna	*Qualified Risk Governance Professional (QRGP)*	8 Mei | May 2025

Pengusulan Eksternal Auditor

Dewan Komisaris, melalui Surat Nomor 0109/MNJ.00.01/DEKOM/PLNEG/2025 perihal Tanggapan Tertulis dan Persetujuan atas Usulan Penunjukan Kantor Akuntan Publik Tahun Buku 2025, telah menyampaikan usulan penunjukan Kantor Akuntan Publik (KAP) yang akan melakukan audit atas Laporan Keuangan Perusahaan untuk Tahun Buku 2025.

Usulan tersebut disusun berdasarkan hasil evaluasi serta dengan mempertimbangkan masukan dan rekomendasi dari komite di bawah Dewan Komisaris, dengan tujuan memastikan proses audit berjalan secara independen, objektif, dan selaras dengan prinsip tata kelola perusahaan yang baik.

Proposal for External Auditor

The Board of Commissioners, through Letter No. 0109/MNJ.00.01/DEKOM/PLNEG/2025 regarding the Written Response and Approval of the Proposed Appointment of a Public Accounting Firm for Fiscal Year 2025, has submitted a proposal to appoint a Public Accounting Firm (KAP) to audit the Company's Financial Statements for Fiscal Year 2025.

This proposal was prepared based on the results of an evaluation and taking into account input and recommendations from committees under the Board of Commissioners, with the aim of ensuring that the audit process is conducted independently, objectively, and in accordance with the principles of good corporate governance.

Penilaian Kinerja Dewan Komisaris

Dewan Komisaris melaksanakan evaluasi tahunan secara objektif untuk menilai efektivitas kinerja Dewan, Komite, serta masing-masing individu Komisaris. Evaluasi tersebut disusun berdasarkan tolok ukur atau kriteria penilaian yang spesifik, terukur, dapat dicapai, dan relevan, serta disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Penilaian kinerja Dewan Komisaris dilakukan untuk mengevaluasi efektivitas fungsi pengawasan atas pengelolaan Perusahaan oleh Direksi, baik yang ditetapkan oleh Pemegang Saham maupun melalui mekanisme evaluasi mandiri. Dalam pelaksanaannya, Dewan Komisaris telah menetapkan target kinerja yang tercantum dalam rencana kerja sebagai acuan evaluasi pelaksanaan tugas dan tanggung jawab.

Performance Evaluation of the Board of Commissioners

The Board of Commissioners conducts an objective annual evaluation to assess the effectiveness of the Board, its committees, and each individual Commissioner. This evaluation is based on specific, measurable, achievable, and relevant benchmarks or assessment criteria, and is presented to the General Meeting of Shareholders (GMS).

The performance evaluation of the Board of Commissioners is conducted to assess the effectiveness of its oversight function regarding the Board of Directors' management of the Company, whether established by the Shareholders or through a self-evaluation mechanism. In carrying out this evaluation, the Board of Commissioners has established performance targets outlined in its work plan as a benchmark for evaluating the fulfillment of its duties and responsibilities.

Ruang lingkup evaluasi mencakup pelaksanaan rapat internal maupun rapat koordinasi dengan Direksi, penyelenggaraan RUPS untuk pengesahan RKAP dan Kontrak Manajemen tahun 2025, serta RUPS untuk persetujuan LPT dan pengesahan Laporan Keuangan Tahun Buku 2024. Selain itu, evaluasi juga mencakup penandatanganan Laporan Manajemen Berkala bersama Direksi, pemberian arahan dan rekomendasi atas pelaksanaan program Perusahaan, pengembangan kompetensi anggota Dewan Komisaris, evaluasi semesteran kinerja Perusahaan dan Direksi secara individual, serta evaluasi triwulanan kinerja organ pendukung Dewan Komisaris. Pemegang Saham juga melakukan penilaian atas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris berdasarkan laporan pengawasan yang disampaikan secara berkala.

The scope of the evaluation includes the conduct of internal meetings and coordination meetings with the Board of Directors, the convening of the General Meeting of Shareholders (GMS) to approve the 2025 Annual Business Plan (RKAP) and Management Contract, as well as the GMS to approve the Annual Performance Report (LPT) and ratify the Financial Statements for the 2024 fiscal year. In addition, the evaluation also covers the signing of the Periodic Management Report together with the Board of Directors, the provision of guidance and recommendations on the implementation of the Company's programs, the development of the competencies of members of the Board of Commissioners, the semiannual evaluation of the performance of the Company and individual members of the Board of Directors, as well as the quarterly evaluation of the performance of the supporting bodies of the Board of Commissioners. Shareholders also assess the Board of Commissioners' performance of its duties and responsibilities based on periodic oversight reports.

Selain itu, Dewan Komisaris menerapkan mekanisme penilaian mandiri (*self assessment*) untuk mengevaluasi kinerja secara kolegial. Penilaian ini dilakukan oleh masing-masing anggota Dewan Komisaris sebagai bentuk kontribusi dalam peningkatan kinerja secara berkelanjutan.

In addition, the Board of Commissioners implements a self-assessment mechanism to evaluate its performance collectively. This assessment is conducted by each member of the Board of Commissioners as a form of contribution to continuous performance improvement.

Penilaian Kinerja Direksi

Pelaksanaan penilaian kinerja Direksi merupakan bagian dari target kinerja yang ditetapkan dalam Rencana Kerja Dewan Komisaris. Dewan Komisaris melakukan evaluasi semesteran terhadap kinerja Direksi, baik secara kolegial maupun individual, berdasarkan RKAP serta kriteria yang tercantum dalam Kontrak Manajemen/*Key Performance Indicator* (KPI)/ Nilai Kinerja Organisasi (NKO) Direksi tahun 2025. Penilaian tersebut mencakup 18 (delapan belas) indikator yang meliputi aspek *Economic and Social Value, Business Model Innovation, Technology Leadership, Energize Investment, Unleash Talent,* dan *Compliance*. Hasil evaluasi kinerja Direksi, baik kolegial maupun individual, dituangkan dalam Laporan Pengawasan sebagai bagian dari pelaksanaan fungsi pengawasan Dewan Komisaris.

Board of Directors Performance Evaluation

The performance evaluation of the Board of Directors is part of the performance targets set forth in the Board of Commissioners' Work Plan. The Board of Commissioners conducts a semi-annual evaluation of the Board of Directors' performance, both collectively and individually, based on the Annual Work Plan (RKAP) and the criteria outlined in the Management Contract/ Key Performance Indicators (KPIs)/Organizational Performance Values (NKO) for the Board of Directors for the year 2025. This assessment covers 18 (eighteen) indicators encompassing the aspects of Economic and Social Value, Business Model Innovation, Technology Leadership, Energize Investment, Unleash Talent, and Compliance. The results of the Board of Directors' performance evaluation, both collectively and individually, are documented in the Oversight Report as part of the Board of Commissioners' oversight functions.

Realisasi capaian program kerja Perusahaan hingga Triwulan IV tahun 2025 tercermin dalam pencapaian

The Company's progress in achieving its work program through the fourth quarter of 2025 is

NKO sebesar 101,02, yang telah sesuai dengan target dan merupakan hasil kolektif dari sub-sub KPI masing-masing Direktorat.
Penilaian KPI disesuaikan dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing Direktur, yang dihitung berdasarkan penyelarasan KPI Perusahaan secara korporat. Adapun pencapaian KPI masing-masing Direktur adalah Direktur Operasi sebesar 100,80, serta Direktur Keuangan & SDM sebesar 101,65.

Atas upaya seluruh jajaran Direksi dalam mengelola Perusahaan serta mewujudkan pembangunan infrastruktur kepatuhan sesuai koridor GCG sebagaimana arahan Pemegang Saham dalam RUPS RKAP 2025, Dewan Komisaris menilai bahwa Direksi yang terdiri dari Direktur Utama, Direktur Operasi, dan Direktur Keuangan & SDM telah menjalankan perannya secara optimal dan penuh tanggung jawab, yang tercermin dari pencapaian NKO tahun 2025 sebesar 101,02.

reflected in an OVP score of 101.02, which is in line with the target and represents the collective result of the sub-KPIs of each Directorate.
KPI assessments are tailored to the duties and responsibilities of each Director and are calculated based on the alignment with the Company's corporate-level KPIs. The KPI achievements for each Director are as follows: the Director of Operations at 100.80, and the Director of Finance & Human Resources at 101.65.

In recognition of the efforts of the entire Board of Directors in managing the Company and implementing compliance infrastructure in accordance with the principles of Good Corporate Governance (GCG), as directed by the Shareholders at the 2025 Annual General Meeting of Shareholders (AGM) regarding the 2025 Business Plan, the Board of Commissioners assesses that the Board of Directors—comprising the President Director, the Director of Operations, and the Director of Finance & Human Resources—has optimally and responsibly fulfilled its roles, as reflected in the 2025 NKO achievement of 101.02.

Penilaian Kinerja Komite Dewan Komisaris

Penilaian kinerja Komite Dewan Komisaris merupakan bentuk evaluasi yang dilakukan secara berkala sebagai upaya untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan fungsi pengawasan, dengan menggunakan metode yang telah ditetapkan oleh Dewan Komisaris.

Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja Komite berdasarkan kriteria yang tercantum dalam rencana kerja tahunan yang telah ditetapkan, serta lingkup tugas yang diatur dalam Surat Keputusan Dewan Komisaris. Adapun kriteria serta hasil penilaian Komite Dewan Komisaris tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Performance Evaluation of the Board of Commissioners' Committees

The performance evaluation of the Board of Commissioners' Committees is a periodic assessment conducted to enhance the effectiveness of oversight functions, using methods established by the Board of Commissioners.

The Board of Commissioners assesses the Committee's performance based on criteria outlined in the approved annual work plan, as well as the scope of duties stipulated in the Board of Commissioners' Resolution. The criteria and results of the 2025 Board of Commissioners' Committee performance assessment are as follows:

Penilaian Kinerja Komite
Committee Performance Assessment

Kriteria Penilaian Assessment Criteria	Komite Audit Audit Committee	Komite Nominasi & Remunerasi dan Manajemen Risiko Nomination & Remuneration and Risk Management Committee
1. Kontribusi dan keaktifan dalam kegiatan rapat internal Dewan Komisaris. Contributions and active participation in internal meetings of the Board of Commissioners.	9	9
2 Kontribusi dan keaktifan dalam kegiatan rapat koordinasi Dewan Komisaris-Direksi. Contributions and active participation in coordination meetings between the Board of Commissioners and the Board of Directors.	9	9
3 Kontribusi dalam penyiapan materi Dewan Komisaris untuk RUPS RKAP dan LPT. Contribution to the preparation of Board of Commissioners materials for the AGM, the Annual Budget Plan (RKAP), and the Annual Performance Report (LPT).	9	9
4 Melaksanakan rapat berkala (internal/koordinasi) dengan manajemen. Conducting periodic meetings (internal/coordination) with management.	9	9
5 Kontribusi dalam penyiapan dan penyelesaian Laporan Pengawasan berkala. Contribute to the preparation and completion of periodic oversight reports.	9	9
Jumlah Total	45	45
Rata-rata Average	9	9
Kesimpulan Penilaian Assessment Conclusion	Sangat Baik Very Good	Sangat Baik Very Good



Direksi
Board of Directors

Direksi merupakan organ utama dalam tata kelola perusahaan yang bertanggung jawab penuh atas pengelolaan dan pengendalian operasional Perusahaan untuk mencapai visi, misi, dan tujuan strategis perusahaan serta memberikan nilai tambah bagi para pemangku kepentingan. Dalam menjalankan tugasnya, Direksi berwenang mengambil keputusan strategis maupun operasional serta mewakili Perusahaan di dalam dan di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi mengacu pada Anggaran Dasar Perusahaan, Pedoman Kerja Direksi, dan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik guna menjamin transparansi, akuntabilitas, serta integritas dalam pengelolaan Perusahaan. Masa jabatan anggota Direksi adalah 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.

Susunan Direksi

Direksi Perusahaan mengalami perubahan sepanjang tahun 2025. Susunan Direksi per 31 Desember 2025 ditetapkan terakhir kali berdasarkan Keputusan Pemegang Saham di Luar Rapat Umum Pemegang Saham (Sirkuler) yang disahkan pada 1 Oktober 2024, dengan komposisi sebagai berikut:

- PLT Direktur Utama : Edwin Bangun
- PLT Direktur Operasi : Yusuf Kusdinar
- PLT Direktur Keuangan dan SDM : Rahmi Asnidar Harahap

Pedoman Direksi

Direksi menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan berpedoman pada Tata Laksana Kerja Direksi dan Dewan Komisaris (*Board Manual*) yang mengatur berbagai aspek tata kelola, termasuk pembagian tugas, kewenangan dan tanggung jawab Direksi, mekanisme rapat, serta fungsi organ pendukung Direksi. Dalam rangka menyesuaikan dengan perkembangan kebutuhan tata kelola perusahaan, telah dilakukan peninjauan dan pemutakhiran terhadap pedoman tersebut yang kemudian disahkan pada 24 Desember 2024 dengan nama Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris dan Direksi. Peninjauan terhadap pedoman ini dilakukan secara berkala dan dapat diperbarui sewaktu-waktu apabila diperlukan sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan Perusahaan.

The Board of Directors is the primary governing body of the Company, bearing full responsibility for managing and overseeing the Company's operations to achieve its vision, mission, and strategic objectives, as well as to create value for stakeholders. In carrying out its duties, the Board of Directors has the authority to make strategic and operational decisions and to represent the Company in and out of court in accordance with applicable regulations. The Board of Directors carries out its duties and responsibilities in accordance with the Company's Articles of Association, the Board of Directors' Work Guidelines, and the principles of good corporate governance to ensure transparency, accountability, and integrity in the management of the Company. The term of office for members of the Board of Directors is 4 (four) years, and they may be reappointed for one additional term.

Composition of the Board of Directors

The Company's Board of Directors underwent changes throughout 2025. The composition of the Board of Directors as of December 31, 2025, was most recently established based on a Shareholders' Resolution Outside the General Meeting of Shareholders (Circular) ratified on October 1, 2024, with the following composition:

- Acting President Director : Edwin Bangun
- Acting Director of Operations : Yusuf Kusdinar
- Acting Director of Finance and Human Resources : Rahmi Asnidar Harahap

Board of Directors Guidelines

The Board of Directors carries out its duties and responsibilities in accordance with the Board of Directors and Board of Commissioners Work Procedures (Board Manual), which governs various aspects of corporate governance, including the division of duties, authorities, and responsibilities of the Board of Directors, meeting procedures, and the functions of the Board's supporting bodies. To align with evolving corporate governance needs, these guidelines were reviewed and updated, and subsequently approved on December 24, 2024, under the title Guidelines and Rules of Procedure for the Board of Commissioners and the Board of Directors. These guidelines are reviewed periodically and may be updated at any time as necessary, in accordance with the Company's needs and developments.



Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris dan Direksi yang mengacu pada Anggaran Dasar Perusahaan menjelaskan bahwa Direksi bertugas dan bertanggung jawab menjalankan seluruh tindakan pengurusan Perusahaan untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud serta tujuan Perusahaan, serta mewakili Perusahaan baik di dalam maupun di luar pengadilan, dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar, dan/atau keputusan RUPS.

Pembagian tugas antar anggota Direksi dilakukan guna mendukung efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas, yang selanjutnya dijabarkan lebih rinci dalam struktur organisasi dan ketentuan terkait lainnya. Meskipun telah dilakukan pembagian tugas dan tanggung jawab, Direksi sebagai organ Perusahaan tetap menjalankan fungsi pengurusan secara kolektif, termasuk atas tugas yang secara khusus dipercayakan kepada masing-masing anggota Direksi sesuai dengan ruang lingkup tugasnya.

Penetapan nomenklatur Direksi telah dilakukan terakhir kali berdasarkan Keputusan Pemegang Saham di Luar Rapat Umum Pemegang Saham (Sirkuler) pada Desember 2025. Adapun pembagian tugas dan tanggung jawab masing-masing anggota Direksi adalah sebagai berikut:

Duties and Responsibilities of the Board of Directors

The Guidelines and Rules of Procedure for the Board of Commissioners and the Board of Directors, which refer to the Company's Articles of Association, stipulate that the Board of Directors is tasked with and responsible for carrying out all management actions of the Company in the best interests of and in accordance with the Company's objectives and purposes, as well as representing the Company both in and out of court, while adhering to applicable laws and regulations, the Articles of Association, and/or decisions of the General Meeting of Shareholders (GMS).

The division of duties among members of the Board of Directors is carried out to support the effectiveness and efficiency of task execution, which is further detailed in the organizational structure and other relevant provisions. Although duties and responsibilities have been divided, the Board of Directors, as an organ of the Company, continues to perform its management functions collectively, including with respect to tasks specifically entrusted to each member of the Board of Directors in accordance with their respective scopes of duty.

The Board of Directors' titles were last established based on a Shareholders' Resolution Outside the General Meeting of Shareholders (Circular) in December 2025. The division of duties and responsibilities among each member of the Board of Directors is as follows:

Direksi
Board of Directors

Pembagian Tugas dan Tanggung Jawab Direksi
Division of Duties and Responsibilities of the Board of Directors

Jabatan Position	Tugas dan Tanggung jawab Duties and Responsibilities
Direktur Utama President Director	Memiliki tugas dan bertanggung jawab penuh terhadap kegiatan operasional Perusahaan dan mengkoordinasikan seluruh fungsi untuk menjalankan strategi yang telah ditetapkan dalam rangka mencapai tujuan Perusahaan. Direktur Utama membawahi langsung beberapa fungsi, yaitu: Sekretaris Perusahaan, Satuan Audit Internal, dan Unit. Has full duties and responsibility for the Company's operational activities and coordinates all functions to implement the established strategy in order to achieve the Company's objectives. The President Director directly oversees several functions, namely: the Corporate Secretary, the Internal Audit Unit, and the Operations Unit.
Direktur Operasi Director of Operations	Memiliki tugas dan bertanggung jawab membantu Direktur Utama dalam menjalankan fungsi pengelolaan Perusahaan yang membawahi beberapa fungsi, yaitu: Divisi Perencanaan Korporat & Pengembangan Bisnis, Divisi Pengadaan dan Divisi Konstruksi & Operasi. Assumes the duty and responsibility of assisting the President Director in managing the Company's operations, overseeing the following functions: the Corporate Planning & Business Development Division, the Procurement Division, and the Construction & Operations Division.
Direktur Keuangan dan SDM Director of Finance and Human Resources	Memiliki tugas dan bertanggung jawab membantu Direktur Utama dalam menjalankan fungsi pengelolaan Perusahaan yang membawahi beberapa fungsi, yaitu: Divisi Pengendalian Kontrak & Portofolio dan Divisi Keuangan dan SDM. Is tasked with and responsible for assisting the President Director in carrying out the Company's management functions, overseeing the following units: the Contract & Portfolio Control Division and the Finance and Human Resources Division.

Keputusan Direksi yang Memerlukan Persetujuan Dewan Komisaris

Direksi wajib memperoleh persetujuan tertulis dari Dewan Komisaris atas tindakan-tindakan tertentu sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perusahaan dan ketentuan yang berlaku. Adapun tindakan yang memerlukan persetujuan tertulis dari Dewan Komisaris meliputi:

1. Mengagunkan aktiva tetap untuk penarikan kredit jangka pendek (sampai dengan 1 (satu) tahun);
2. Mengadakan transaksi, kontrak, perjanjian, kesepakatan dan/atau kerjasama dengan badan usaha/pihak lain dengan nilai atau jangka waktu tertentu yang ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham;
3. Menerima atau memberikan pinjaman jangka menengah/panjang (lebih dari 1 (satu) tahun) yang tidak bersifat operasional, kecuali pinjaman (utang atau piutang) yang diberikan kepada Anak Perusahaan dengan ketentuan pinjaman kepada Anak Perusahaan dilaporkan kepada Dewan Komisaris;
4. Menghapuskan dari pembukuan piutang macet dan persediaan barang mati;

Board of Directors' Decisions Requiring Approval from the Board of Commissioners

The Board of Directors is required to obtain written approval from the Board of Commissioners for certain actions as stipulated in the Company's Articles of Association and applicable regulations. The actions requiring written approval from the Board of Commissioners include:

1. Pledging fixed assets as collateral for short-term loans (up to 1 (one) year);
2. Entering into transactions, contracts, agreements, arrangements, and/or collaborations with business entities or other parties with a specific value or term as determined by the General Meeting of Shareholders;
3. Receiving or granting medium- or long-term loans (more than 1 (one) year) that are not of an operational nature, except for loans (liabilities or receivables) granted to Subsidiaries, provided that such loans to Subsidiaries are reported to the Board of Commissioners;
4. Write off bad debts and obsolete inventory from the books;

5. Melepaskan aktiva tetap bergerak dengan umur ekonomis yang lazim berlaku dalam industri pada umumnya sampai dengan 5 (lima) tahun;
6. Menetapkan struktur organisasi 1 (satu) tingkat di bawah Direksi, tidak termasuk pengangkatan pejabatnya.

Direksi hanya dapat melakukan tindakan-tindakan tertentu setelah memperoleh tanggapan tertulis dari Dewan Komisaris dan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perusahaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain sebagai berikut:

1. Menggunakan aktiva tetap untuk penarikan kredit jangka menengah/panjang (lebih dari 1 (satu) tahun);
2. Melakukan penyertaan modal pada Perusahaan lain, termasuk penambahan modal kepada Anak Perusahaan dan/atau Perusahaan Patungan;
3. Mendirikan Anak Perusahaan dan/atau Perusahaan Patungan;
4. Melepaskan penyertaan baik sebagian maupun keseluruhan modal pada Anak Perusahaan dan/atau Perusahaan Patungan;
5. Melakukan penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pemisahan dan pembubaran Anak Perusahaan dan/atau Perusahaan Patungan;
6. Mengikat Perusahaan sebagai penjamin (*borg* atau *avalist*) dan jaminan lainnya (*corporate guarantee* dan sejenisnya), kecuali untuk penerbitan *Standby Letter of Credit* / SBLC, *Letter of Credit* / LC yang timbul karena transaksi bisnis tetap mengacu pada ketentuan Pasal 11 ayat 8 huruf b Anggaran Dasar Perusahaan;
7. Mengadakan transaksi, kontrak, perjanjian, kesepakatan dan/atau kerjasama dengan badan usaha / pihak lain yang melebihi nilai atau jangka waktu tertentu yang ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat 8 huruf b Anggaran Dasar Perusahaan;
8. Tidak menagih lagi piutang macet yang telah dihapusbukukan;
9. Melepaskan dan menghapuskan aktiva tetap Perusahaan kecuali aktiva tetap bergerak dengan umur ekonomis yang lazim berlaku dalam industri pada umumnya sampai dengan 5 (lima) tahun;

5. Dispose of movable fixed assets with an economic life generally accepted in the industry of up to 5 (five) years;
6. Establishing a one-tier organizational structure under the Board of Directors, excluding the appointment of its officers.

The Board of Directors may only take certain actions after obtaining a written response from the Board of Commissioners and the approval of the General Meeting of Shareholders (GMS) in accordance with the provisions of the Company's Articles of Association and applicable laws and regulations, including the following:

1. Using fixed assets to secure medium- or long-term loans (more than 1 (one) year);
2. Making equity investments in other companies, including capital increases for Subsidiaries and/or Joint Ventures;
3. Establishing Subsidiaries and/or Joint Ventures;
4. Divesting all or part of the equity interest in Subsidiaries and/or Joint Ventures;
5. Carrying out mergers, consolidations, takeovers, spin-offs, and dissolutions of Subsidiaries and/or Joint Ventures;
6. Binding the Company as a guarantor (borg or avalist) and providing other guarantees (corporate guarantees and the like), except for the issuance of Standby Letters of Credit (SBLCs); Letters of Credit (LCs) arising from business transactions shall continue to be governed by the provisions of Article 11, paragraph 8, letter b of the Company's Articles of Association;
7. To enter into transactions, contracts, agreements, arrangements, and/or collaborations with business entities or other parties that exceed a certain value or duration as determined by the General Meeting of Shareholders as referred to in Article 11, paragraph 8, letter b of the Company's Articles of Association;
8. To cease collecting on bad debts that have been written off;
9. Disposing of and writing off the Company's fixed assets, except for movable fixed assets with an economic life generally accepted in the industry of up to 5 (five) years;

10. Menetapkan *blue print* organisasi Perusahaan;
11. Menetapkan dan merubah logo Perusahaan;
12. Melakukan tindakan-tindakan sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 Ayat 8 Anggaran Dasar yang belum ditetapkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan, termasuk melakukan perubahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan, kecuali untuk perubahan pos anggaran maupun peruntukannya wajib mendapat persetujuan Dewan Komisaris;
13. Membentuk yayasan, organisasi dan/atau perkumpulan baik yang berkaitan langsung maupun tidak langsung dengan Perusahaan yang dapat berdampak bagi Perusahaan;
14. Pembebanan biaya Perusahaan yang bersifat tetap dan rutin untuk yayasan, organisasi dan/atau perkumpulan baik yang berkaitan langsung maupun tidak langsung dengan Perusahaan;
15. Pengusulan wakil Perusahaan untuk menjadi calon anggota Direksi dan Dewan Komisaris pada Perusahaan Patungan dan/atau Anak Perusahaan yang memberikan kontribusi signifikan kepada Perusahaan dan/atau bernilai strategis yang ditetapkan Rapat Umum Pemegang Saham.

10. Establishing the Company's organizational blueprint;
11. Establish and amend the Company's logo;
12. To take actions as referred to in Article 11, Paragraph 8 of the Articles of Association that have not yet been stipulated in the Company's Work Plan and Budget ( ), including making changes to the Company's Work Plan and Budget, except that changes to budget items or their allocations must obtain the approval of the Board of Commissioners;
13. Establishing foundations, organizations, and/or associations—whether directly or indirectly related to the Company—that may have an impact on the Company;
14. Allocating the Company's fixed and routine expenses to foundations, organizations, and/or associations, whether directly or indirectly related to the Company;
15. Nominating Company representatives to be candidates for the Board of Directors and Board of Commissioners of Joint Ventures and/or Subsidiaries that make a significant contribution to the Company and/or are of strategic value as determined by the General Meeting of Shareholders.

Pelaksanaan Pengelolaan Perusahaan Direksi

Direksi menjalankan kegiatan operasional dan kebijakan strategis Perusahaan berdasarkan RKAP dan RJPP yang telah disusun secara komprehensif dan disetujui oleh Pemegang Saham melalui RUPS. RKAP tersebut menjadi acuan utama bagi Direksi dalam melaksanakan program kerja yang mendukung pencapaian sasaran strategis Perusahaan.

Pada tahun 2025, dalam rangka mencapai sasaran strategis Perusahaan, PLN EG menyusun berbagai program kerja yang akan dilaksanakan sepanjang tahun. Program utama yang menjadi fokus Perusahaan meliputi implementasi program kerja anggaran investasi dan pengembangan usaha, antara lain melalui *Value Creation* penyediaan infrastruktur gasifikasi, penyediaan layanan operasi dan pemeliharaan (O&M) gas/LNG/CNG, pembangunan dan O&M pipa gas, serta kajian

Implementation of Corporate Management by the Board of Directors

The Board of Directors carries out the Company's operational activities and strategic policies based on the Annual Business Plan (RKAP) and the Medium-Term Business Plan (RJPP), which have been comprehensively formulated and approved by the Shareholders through the General Meeting of Shareholders (RUPS). The RKAP serves as the primary guideline for the Board of Directors in implementing work programs that support the achievement of the Company's strategic objectives.

In 2025, to achieve the Company's strategic objectives, PLN Energi Gas has formulated various work programs to be implemented throughout the year. The Company's key focus areas include the implementation of work programs related to investment budgets and business development, such as creating value through the provision of gasification infrastructure, providing gas/LNG/CNG operations and maintenance (O&M) services, constructing and maintaining gas pipelines, as

dan persiapan konstruksi infrastruktur gasifikasi *Stargate* dan Kolaka. Selain itu, Perusahaan juga berfokus pada penguatan sistem keuangan yang berkelanjutan dengan menjaga ketersediaan likuiditas perusahaan, melakukan digitalisasi sistem keuangan, serta menerapkan pengelolaan manajemen risiko keuangan yang terintegrasi guna menjaga keberlanjutan sumber pendapatan (*revenue stream*). Di bidang pengembangan organisasi dan sumber daya manusia, PLN EG melaksanakan program pengembangan fungsi, tugas, dan kewenangan (FTK) serta peningkatan kompetensi SDM melalui pemutakhiran tata kelola kebijakan utama *Human Capital*, pemenuhan kebutuhan SDM, peningkatan kompetensi pegawai, dan digitalisasi sistem kepegawaian.

Realisasi pelaksanaan program kerja tersebut disampaikan secara berkala kepada Dewan Komisaris dan Pemegang Saham melalui Laporan Manajemen. Laporan tersebut memuat evaluasi menyeluruh atas kinerja Perusahaan, yang mencakup aspek pemasaran, operasional, sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi, akuntansi dan keuangan, manajemen risiko, pengendalian internal, pengelolaan investasi, pencapaian kinerja korporasi, evaluasi rencana jangka panjang, serta pelaksanaan program kemitraan dan tanggung jawab sosial dan lingkungan (TJSL).

Rapat Direksi

Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris dan Direksi mengatur bahwa rapat Direksi dapat diselenggarakan secara fisik atau tatap muka maupun melalui media telekonferensi, video konferensi, atau sarana komunikasi lainnya yang memungkinkan seluruh peserta rapat saling melihat, mendengar, dan berpartisipasi secara langsung. Rapat Direksi wajib dilaksanakan secara berkala, sekurang-kurangnya satu kali setiap bulan, dan dalam pelaksanaannya Direksi dapat mengundang Dewan Komisaris untuk menghadiri rapat tersebut.

Jumlah dan agenda rapat Direksi disusun sebelum dimulainya tahun buku, dengan frekuensi pelaksanaan paling sedikit satu kali setiap bulan sesuai dengan ketentuan Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris dan Direksi. Sepanjang tahun 2025, Rapat Direksi telah dilaksanakan sebanyak

well as conducting studies and preparing for the construction of the Stargate and Kolaka gasification infrastructure. In addition, the Company is also focused on strengthening a sustainable financial system by maintaining the Company's liquidity, digitizing financial systems, and implementing integrated financial risk management to ensure the sustainability of revenue streams. In the area of organizational and human resources development, PLN Energi Gas is implementing programs to develop functions, duties, and authorities (FTK) and enhance human resource competencies through updating the governance of key human capital policies, meeting human resource needs, improving employee competencies, and digitizing the human resources management system.

Progress on the implementation of these work programs is reported periodically to the Board of Commissioners and Shareholders through Management Reports. These reports contain a comprehensive evaluation of the Company's performance, covering aspects such as marketing, operations, human resources, technology utilization, accounting and finance, risk management, internal controls, investment management, corporate performance achievements, evaluation of long-term plans, as well as the implementation of partnership programs and social and environmental responsibility (SER) initiatives.

Board of Directors Meetings

The Guidelines and Rules of Procedure for the Board of Commissioners and the Board of Directors stipulate that Board of Directors meetings may be held in person or face-to-face, or via teleconference, video conference, or other means of communication that allow all meeting participants to see, hear, and participate directly with one another. Board of Directors meetings must be held periodically, at least once a month, and the Board of Directors may invite members of the Board of Commissioners to attend these meetings.

The number of Board of Directors meetings and their agendas are determined before the start of the fiscal year, with a frequency of at least once a month in accordance with the provisions of the Guidelines and Rules of Procedure for the Board of Commissioners and the Board of Directors. Throughout 2025, Board

11 (sebelas) kali, sedangkan Rapat Gabungan Dewan Komisaris dan Direksi telah diselenggarakan sebanyak 11 (sebelas) kali. Tingkat kehadiran Direksi dalam rapat-rapat tersebut adalah sebagai berikut:

of Directors meetings were held 11 (eleven) times, while Joint Meetings of the Board of Commissioners and the Board of Directors were held 11 (eleven) times. The attendance rate of the Board of Directors at these meetings is as follows:

Tingkat Kehadiran Direksi
Board of Directors Attendance Rate

Nama Name	Jabatan Position	Rapat Internal Direksi Internal Board of Directors Meetings			Rapat Dewan Komisaris bersama Direksi Joint Board of Commissioners and Board of Directors Meetings			RUPS Name		
		Total Rapat Total Meetings	Jumlah Kehadiran Number of Attendees	Tingkat Kehadiran Attendance Rate	Total Rapat Total Meetings	Jumlah Kehadiran Number of Attendees	Tingkat Kehadiran Attendance Rate	Total Rapat Total Meetings	Jumlah Kehadiran Number of Attendees	Tingkat Kehadiran Attendance Rate
Edwin Bangun	Direktur Utama President Director	11	11	100%	11	11	100%	2	2	100%
Rahmi Asnidar Harahap	Direktur Keuangan & SDM Director of Finance & Human Resources	11	11	100%	11	11	100%	2	2	100%
Yusuf Kusdinar	Direktur Operasi Director of Operations	11	11	100%	11	11	100%	2	2	100%

Program Pengenalan Direksi

Anggota Direksi yang diangkat untuk pertama kalinya wajib mengikuti program pengenalan mengenai Perusahaan. Program pengenalan bagi Anggota Direksi baru dilaksanakan sesuai dengan Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris dan Direksi. Pelaksanaan program tersebut dilakukan bersamaan dengan agenda serah terima jabatan Direksi dari pejabat lama kepada pejabat baru. Sepanjang tahun 2025 tidak terdapat pengangkatan Direksi baru sehingga tidak terdapat program pengenalan mengenai Perusahaan.

Board of Directors Orientation Program

Board members appointed for the first time are required to participate in an orientation program regarding the Company. The orientation program for new Board members is conducted in accordance with the Guidelines and Rules of Procedure of the Board of Commissioners and the Board of Directors. The program is held in conjunction with the handover of duties from outgoing to incoming Board members. Throughout 2025, there were no new appointments to the Board of Directors; therefore, there was no orientation program regarding the Company.

Peningkatan Kompetensi Direksi

Direksi melaksanakan program pelatihan dan pengembangan kompetensi secara berkelanjutan untuk meningkatkan kemampuan Anggota Direksi sesuai dengan kebutuhan, guna mendukung efektivitas pelaksanaan tugas Direksi. Program pengembangan tersebut dilaksanakan melalui berbagai kegtviatan peningkatan pengetahuan, baik

Enhancement of Board of Directors' Competencies

The Board of Directors conducts ongoing training and competency development programs to enhance the capabilities of Board members as needed, in order to support the effective performance of the Board's duties. These development programs are carried out through various knowledge-enhancement activities, both formal and informal, such as seminars, training

formal maupun nonformal, seperti seminar, pelatihan, *workshop*, maupun studi banding. Pelaksanaan program ini mengacu pada Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris dan Direksi. Adapun program pelatihan yang diikuti Direksi sepanjang tahun 2025 adalah sebagai berikut:

sessions, workshops, and benchmarking studies. The implementation of these programs is guided by the Guidelines and Rules of Procedure for the Board of Commissioners and the Board of Directors. The training programs attended by the Board of Directors throughout 2025 are as follows:

Program Pelatihan Direksi
Board of Directors Training Programs

Nama Name	Pelatihan Training	Tanggal Date
Edwin Bangun	1. Sertifikasi Kompetensi Kepala Teknik dan Wakil Kepala Teknik Migas Competency Certification for Chief Engineers and Deputy Chief Engineers in the Oil and Gas Industry	19 Mei | May 2025
	2. *Qualified Risk Governance Professional (QRGP)* Qualified Risk Governance Professional (QRGP)	11 Juni | June 2025
Yusuf Kusdinar	Sertifikasi Kepala Teknik dan Wakil Kepala Teknik Certification for Chief Engineers and Deputy Chief Engineers	19 Mei | May 2025
Rahmi Asnidar Harahap	1. Penguatan Budaya K3 dan Kompetensi SDM Pada Era Transisi Energi Untuk Produktivitas Menuju *Zero Harm Zero Loss* Strengthening Occupational Safety and Health (OSH) Culture and Human Resource Competencies in the Energy Transition Era for Productivity Toward Zero Harm, Zero Loss	12 Februari | February 2025
	2. *Qualified Risk Governance Professional (QRGP)* Qualified Risk Governance Professional (QRGP)	8 Mei | May 2025

Komite Pendukung Direksi

Perusahaan belum memiliki komite di bawah Direksi untuk mendukung pelaksanaan tugas Direksi hingga akhir tahun 2025. Dengan demikian, tidak terdapat penilaian Direksi terhadap kinerja komite yang mendukung pelaksanaan tugas Direksi.

Board Support Committee

The Company does not yet have a committee under the Board of Directors to support the Board's duties through the end of 2025. Consequently, there is no Board assessment of the performance of committees that support the Board's duties.



Nominasi dan Remunerasi Dewan Komisaris serta Direksi
Nomination and Remuneration of the Board of Commissioners and the Board of Directors

Kewenangan untuk menetapkan kebijakan nominasi dan remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi sepenuhnya berada pada Pemegang Saham, yang diputuskan melalui mekanisme RUPS. Sebagai entitas yang tergabung dalam *subholding* energi primer PT PLN (Persero), yang merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Perusahaan menjalankan kebijakan nominasi dan remunerasi sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri BUMN. Dalam proses nominasi, aspek keberagaman juga menjadi salah satu pertimbangan penting, baik dari sisi latar belakang pendidikan, pengalaman, dan kompetensi, maupun dari sisi demografis seperti usia dan gender. Hal ini bertujuan untuk menciptakan struktur kepemimpinan yang lebih representatif, adaptif, dan mendukung pencapaian kinerja berkelanjutan.

The authority to determine the nomination and remuneration policies for the Board of Commissioners and the Board of Directors rests solely with the Shareholders and is exercised through the General Meeting of Shareholders (GMS). As an entity under the primary energy subholding of PT PLN (Persero), a State-Owned Enterprise (SOE), the Company implements its nomination and remuneration policies in accordance with the provisions stipulated in the Minister of SOEs Regulation. In the nomination process, diversity is also taken into consideration, including educational background, experience, and competencies, as well as demographic aspects such as age and gender. This is intended to establish a leadership structure that is more representative, adaptive, and capable of supporting the achievement of sustainable performance.

Fungsi Nominasi dan Remunerasi Dewan Komisaris serta Direksi

Perusahaan telah membentuk Komite Nominasi & Remunerasi dan Manajemen Risiko pada tahun 2025 sebagai langkah strategis dalam memperkuat penerapan prinsip GCG. Pembentukan komite tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan efektivitas fungsi pengawasan, mendukung proses pengambilan keputusan yang lebih objektif, serta memberikan rekomendasi yang komprehensif kepada Dewan Komisaris dalam lingkup tugas dan tanggung jawabnya.

Khusus untuk proses nominasi Dewan Komisaris dan Direksi, pelaksanaannya tetap mengacu pada ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri BUMN. Seluruh tahapan dan keputusan akhir dalam penetapan anggota Dewan Komisaris dan Direksi sepenuhnya berada pada kewenangan Pemegang Saham yang ditetapkan melalui mekanisme RUPS. Dengan demikian, Komite Nominasi & Remunerasi dan Manajemen Risiko berperan sebagai organ pendukung yang memberikan kajian, evaluasi, serta rekomendasi berbasis kompetensi dan kebutuhan Perusahaan, tanpa mengurangi kewenangan utama Pemegang Saham dalam proses penetapan tersebut.

Nomination and Remuneration Functions of the Board of Commissioners and the Board of Directors

The Company established the Nomination & Remuneration and Risk Management Committee in 2025 as a strategic initiative to strengthen the implementation of GCG principles. The establishment of the Committee is intended to enhance the effectiveness of the supervisory function, support a more objective decision-making process, and provide comprehensive recommendations to the Board of Commissioners within the scope of its duties and responsibilities.

Specifically for the nomination process of the Board of Commissioners and the Board of Directors, its implementation continues to refer to the provisions stipulated in the Minister of SOEs Regulation. All stages and final decisions regarding the appointment of members of the Board of Commissioners and the Board of Directors remain under the authority of the Shareholders through the General Meeting of Shareholders (GMS). Accordingly, the Nomination & Remuneration and Risk Management Committee serves as a supporting organ that provides assessments, evaluations, and recommendations based on competencies and the Company's needs, without diminishing the primary authority of the Shareholders in the appointment process.

Nominasi Dewan Komisaris dan Direksi

Kebijakan Nominasi Perusahaan dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan yang ditetapkan oleh PT PLN (Persero) selaku entitas induk dari pemegang saham pengendali utama. Penerapan kebijakan ini juga mengacu pada Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor PER-3/MBU/03/2023 tanggal 20 Maret 2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara, yang menjadi acuan utama dalam pengelolaan tata kelola perusahaan, khususnya terkait aspek nominasi dan pengelolaan sumber daya manusia. Implementasi kebijakan ini diharapkan dapat mendukung terwujudnya struktur organisasi yang profesional, akuntabel, serta selaras dengan prinsip-prinsip GCG, sehingga mampu menunjang pencapaian kinerja Perusahaan secara berkelanjutan.

Kebijakan Keberagaman Komposisi Dewan Komisaris dan Direksi

Perusahaan belum secara khusus menetapkan kebijakan keberagaman untuk komposisi Dewan Komisaris dan Direksi. Namun, penerapan prinsip keberagaman tetap mengacu pada Anggaran Dasar, keputusan Pemegang Saham, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Keberagaman mencakup aspek pendidikan, kompetensi, pengalaman, dan keahlian guna mendukung efektivitas fungsi pengawasan Dewan Komisaris dan pengelolaan Direksi. Prinsip ini juga mencerminkan komitmen Perusahaan terhadap kesetaraan, inklusivitas, dan keberlanjutan, termasuk perhatian pada usia dan representasi gender, untuk menciptakan lingkungan kerja yang profesional dan setara serta mendukung pencapaian tujuan jangka panjang Perusahaan.

Keberagaman dalam komposisi Dewan Komisaris dan Direksi, yang mencakup aspek pengetahuan, kompetensi, pengalaman, keahlian, serta usia dan gender, tercermin secara rinci dalam bagian Profil Dewan Komisaris dan Profil Direksi pada laporan ini. Dalam rangka memenuhi aspek keberagaman Dewan Komisaris dan Direksi serta manajemen kunci, KPI Perseroan memuat indikator kinerja

Nomination of the Board of Commissioners and the Board of Directors

The Company's Nomination Policy is implemented in accordance with the provisions established by PT PLN (Persero) as the parent entity of the controlling shareholder. The implementation of this policy also refers to the Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises of the Republic of Indonesia No. PER-3/MBU/03/2023 of March 20, 2023 concerning the Organs and Human Resources of State-Owned Enterprises, which serves as the primary reference for the implementation of corporate governance, particularly in relation to nomination and human resource management. The implementation of this policy is expected to support the establishment of a professional and accountable organizational structure that is aligned with GCG principles, thereby supporting the Company's sustainable performance.

Diversity Policy for the Composition of the Board of Commissioners and the Board of Directors

The Company has not established a specific diversity policy for the composition of the Board of Commissioners and the Board of Directors. Nevertheless, the implementation of diversity principles continues to refer to the Company's Articles of Association, Shareholders' resolutions, and the prevailing laws and regulations. Diversity encompasses educational background, competencies, experience, and expertise to support the effectiveness of the Board of Commissioners' supervisory function and the Board of Directors' management function. This principle also reflects the Company's commitment to equality, inclusiveness, and sustainability, including consideration of age and gender representation, to foster a professional and equitable working environment while supporting the achievement of the Company's long-term objectives.

The diversity of the composition of the Board of Commissioners and the Board of Directors, including knowledge, competencies, experience, expertise, as well as age and gender, is presented in detail in the Board of Commissioners Profile and Board of Directors Profile sections of this Annual Report. To support diversity within the Board of Commissioners, the Board of Directors, and key management, the



Human Capital Readiness (HCR) dan *Organizational Capital Readiness* (OCR) dengan realisasi mencapai 100% dari target tahun 2025 sebesar 100%. Upaya pencapaian keberagaman pada manajemen kunci tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan aspek komposisi, tetapi juga erat kaitannya dengan kesiapan kapabilitas organisasi yang tercermin melalui *Human Capital Readiness (HCR)* dan *Organizational Capital Readiness (OCR)*.

Company's KPIs include Human Capital Readiness (HCR) and Organizational Capital Readiness (OCR) performance indicators, both of which achieved 100% of the 2025 target. Efforts to promote diversity in key management are not limited to fulfilling composition requirements but are also closely linked to organizational capability readiness as reflected in Human Capital Readiness (HCR) and Organizational Capital Readiness (OCR).

Dari sisi *Human Capital Readiness* (HCR), keberagaman didorong melalui penguatan kualitas individu yang mengisi posisi manajemen kunci. Hal ini mencakup ketersediaan talenta dengan latar belakang pendidikan, pengalaman, kompetensi, serta perspektif yang beragam. Pengembangan HCR memastikan bahwa Perusahaan memiliki *pipeline* talenta yang memadai, tidak hanya dari sisi jumlah, tetapi juga dari keberagaman profil kepemimpinan. Melalui proses pengembangan, pelatihan, dan talent *Management* yang terstruktur, Perusahaan dapat meningkatkan kesiapan individu untuk mengisi posisi strategis secara lebih inklusif dan berimbang.

Sementara itu, *Organizational Capital Readiness* (OCR) berperan dalam menciptakan sistem, kebijakan, dan budaya organisasi yang mendukung terwujudnya keberagaman tersebut. OCR mencakup kerangka tata kelola, kebijakan nominasi, sistem suksesi, serta budaya kerja yang mendorong inklusivitas dan kesetaraan kesempatan. Dengan OCR yang kuat, proses seleksi dan pengembangan manajemen kunci dapat berjalan secara objektif, transparan, dan berbasis kompetensi, sehingga mengurangi potensi bias serta membuka ruang yang lebih luas bagi keberagaman.

Pencapaian indikator *Human Capital Readiness* (HCR) dan *Organizational Capital Readiness* (OCR) menjadi faktor kunci dalam memastikan bahwa keberagaman pada manajemen kunci tidak hanya menjadi target formal, tetapi benar-benar terintegrasi dalam sistem pengelolaan sumber daya manusia dan tata kelola organisasi. Dengan demikian, Perusahaan dapat membangun kepemimpinan yang lebih adaptif, representatif, dan selaras dengan kebutuhan bisnis yang dinamis serta berkelanjutan.

Persyaratan Anggota Dewan Komisaris dan Direksi

Anggota Dewan Komisaris dan Direksi wajib memenuhi berbagai ketentuan persyaratan yang telah ditetapkan. Persyaratan tersebut diklasifikasikan ke dalam tiga kelompok utama, yaitu sebagai berikut:

From the Human Capital Readiness (HCR) perspective, diversity is promoted through strengthening the quality of individuals occupying key management positions. This includes the availability of talent with diverse educational backgrounds, experience, competencies, and perspectives. HCR development ensures that the Company maintains an adequate talent pipeline, not only in terms of quantity but also in terms of leadership diversity. Through structured development, training, and talent management processes, the Company enhances the readiness of individuals to assume strategic positions in a more inclusive and balanced manner.

Meanwhile, Organizational Capital Readiness (OCR) plays a role in establishing systems, policies, and an organizational culture that support the implementation of diversity. OCR encompasses the governance framework, nomination policies, succession system, and a workplace culture that promotes inclusiveness and equal opportunities. With strong OCR, the selection and development processes for key management can be conducted objectively, transparently, and based on competencies, thereby minimizing potential bias and creating broader opportunities for diversity.

The achievement of the Human Capital Readiness (HCR) and Organizational Capital Readiness (OCR) indicators is a key factor in ensuring that diversity in key management is not merely a formal target but is fully integrated into the Company's human resource management system and organizational governance. Accordingly, the Company is able to build a leadership structure that is more adaptive, representative, and aligned with dynamic and sustainable business needs.

Requirements for Members of the Board of Commissioners and the Board of Directors

Members of the Board of Commissioners and the Board of Directors are required to meet the prescribed eligibility requirements. These requirements are classified into the following three main categories:

Nominasi dan Remunerasi Dewan Komisaris serta Direksi
Nomination and Remuneration of the BOC and the BOD



Persyaratan Anggota Dewan Komisaris dan Direksi
Requirements for Members of the Board of Commissioners and the Board of Directors

Persyaratan Requirements	Dewan Komisaris Board of Commissioners	Direksi Board of Directors
Materiil Substantive	1. Integritas; 2. Dedikasi; 3. Memahami masalah-masalah manajemen Perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen; 4. Memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha di mana yang bersangkutan dicalonkan; 5. Dapat menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya; dan 6. Harus memiliki kemauan yang kuat (antusias) untuk memajukan dan mengembangkan Perusahaan di mana yang bersangkutan dicalonkan. 1. Integrity; 2. Dedication; 3. Understanding of the Company's management issues related to at least one management function; 4. Adequate knowledge of the business sector for which the individual is nominated; 5. Ability to devote sufficient time to perform the duties; and 6. Strong commitment and enthusiasm to advance and develop the Company for which the individual is nominated.	1. Keahlian; 2. Integritas; 3. Kepemimpinan; 4. Pengalaman; 5. Jujur; 6. Perilaku yang baik; dan 7. Dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan Perusahaan. 1. Expertise; 2. Integrity; 3. Leadership; 4. Experience; 5. Honesty; 6. Good conduct; and 7. Strong dedication to advancing and developing the Company.
Formal Formal	1. Orang perseorangan; 2. Mampu melaksanakan perbuatan hukum; 3. Tidak pernah dinyatakan pailit dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan; 4. Tidak pernah menjadi anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu BUMN, Anak Perusahaan dan/atau badan usaha lainnya dinyatakan pailit dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan; dan 5. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan Negara, BUMN, Anak Perusahaan, badan usaha lainnya dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan.	1. Orang perseorangan; 2. Mampu melaksanakan perbuatan hukum; 3. Tidak pernah dinyatakan pailit dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan; 4. Tidak pernah menjadi anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu Perusahaan, Anak Perusahaan dan/atau badan usaha lainnya dinyatakan pailit dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan; atau 5. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan Negara, Perusahaan, Anak Perusahaan, badan usaha lainnya dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan.

	1. Anindividual; 2. Legally competent to perform legal acts; 3. Has not been declared bankrupt within 5 (five) years prior to the appointment; 4. Has not served as a member of the Board of Directors or the Board of Commissioners/Supervisory Board who was found guilty of causing a State-Owned Enterprise (SOE), Subsidiary, and/or other business entity to be declared bankrupt within 5 (five) years prior to the appointment; and 5. Has not been convicted of a criminal offense that caused losses to the State, a State-Owned Enterprise (SOE), Subsidiary, other business entity, and/or the financial sector within 5 (five) years prior to the appointment.	1. An individual; 2. Legally competent to perform legal acts; 3. Has not been declared bankrupt within 5 (five) years prior to the appointment; 4. Has not served as a member of the Board of Directors or the Board of Commissioners/Supervisory Board who was found guilty of causing a Company, Subsidiary, and/or other business entity to be declared bankrupt within 5 (five) years prior to the appointment; or 5. Has not been convicted of a criminal offense that caused losses to the State, the Company, Subsidiary, other business entity, and/or the financial sector within 5 (five) years prior to the appointment.
Lain Other	1. Bukan pengurus partai politik, calon anggota legislatif, dan/atau anggota legislatif pada Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota; 2. Bukan calon kepala/wakil kepala daerah dan/atau kepala/wakil kepala daerah, termasuk pejabat kepala/wakil kepala daerah; 3. Tidak sedang menduduki jabatan yang berpotensi menimbulkan benturan kepentingan dengan Perusahaan/Anak Perusahaan yang bersangkutan; 4. Tidak menjabat sebagai anggota Dewan Komisaris pada Perusahaan atau Dewan Komisaris pada Anak Perusahaan yang bersangkutan selama 2 (dua) periode; 5. Tidak sedang menduduki jabatan yang berdasarkan Peraturan Perundang-undangan dilarang untuk dirangkap dengan jabatan anggota Dewan Komisaris; 6. Sehat jasmani dan rohani yang tidak sedang menderita suatu penyakit yang dapat menghambat pelaksanaan tugas sebagai anggota Dewan Komisaris, yang dibuktikan dengan surat keterangan sehat dari Rumah Sakit; dan 7. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan telah melaksanakan kewajiban membayar pajak selama 2 (dua) tahun terakhir. 1. Is not an official of a political party, a legislative candidate, and/or a member of the House of Representatives (DPR), Regional Representative Council (DPD), Provincial Regional House of Representatives (DPRD Provinsi), or Regency/Municipal Regional House of Representatives (DPRD Kabupaten/Kota); 2. Is not a candidate for regional head/deputy regional head and/or serving as a regional head/deputy regional head, including acting regional head/deputy regional head; 3. Does not currently hold a position that may give rise to a conflict of interest with the relevant Company/Subsidiary; 4. Has not served as a member of the Board of Commissioners of the Company or the Board of Commissioners of the relevant Subsidiary for 2 (two) terms; 5. Does not currently hold a position that is prohibited by prevailing laws and regulations from being concurrently held with the position of a member of the Board of Commissioners; 6. Is physically and mentally fit and not suffering from any illness that may hinder the performance of duties as a member of the Board of Commissioners, as evidenced by a medical certificate issued by a hospital; and 7. Holds a Taxpayer Identification Number (NPWP) and has fulfilled tax payment obligations for the last 2 (two) years	1. Bukan pengurus Partai Politik, calon anggota legislatif dan/atau anggota legislatif pada Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota; 2. Bukan calon kepala/wakil kepala daerah dan/atau kepala/wakil kepala daerah, termasuk pejabat kepala/wakil kepala daerah; 3. Tidak menjabat sebagai anggota Direksi pada Perusahaan atau Anak Perusahaan selama 2 (dua) periode; 4. Tidak sedang menjabat sebagai pejabat pada kementerian/lembaga, anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas pada BUMN lain, anggota Direksi pada BUMN lain, anggota Direksi pada Anak Perusahaan dan/atau badan usaha lainnya; 5. Tidak sedang menduduki jabatan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan dilarang untuk dirangkap dengan jabatan anggota Direksi; 6. Memiliki dedikasi dan menyediakan waktu sepenuhnya untuk melakukan tugasnya, yang dinyatakan dengan surat pernyataan dari yang bersangkutan; 7. Sehat jasmani dan rohani, yakni tidak sedang menderita suatu penyakit yang dapat menghambat pelaksanaan tugas sebagai anggota Direksi, yang dibuktikan dengan surat keterangan sehat dari rumah sakit; dan 8. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan telah melaksanakan kewajiban membayar pajak selama 2 (dua) tahun terakhir. 1. Is not an official of a political party, a legislative candidate, and/or a member of the House of Representatives (DPR), Regional Representative Council (DPD), Provincial Regional House of Representatives (DPRD Provinsi), or Regency/Municipal Regional House of Representatives (DPRD Kabupaten/Kota); 2. Is not a candidate for regional head/deputy regional head and/or serving as a regional head/deputy regional head, including acting regional head/deputy regional head; 3. Has not served as a member of the Board of Directors of the Company or its Subsidiary for 2 (two) terms; 4. Does not currently serve as an official of a ministry/government institution, a member of the Board of Commissioners/Supervisory Board of another State-Owned Enterprise (SOE), a member of the Board of Directors of another State-Owned Enterprise (SOE), a member of the Board of Directors of a Subsidiary, and/or another business entity; 5. Does not currently hold a position that is prohibited by prevailing laws and regulations from being concurrently held with the position of a member of the Board of Directors; 6. Demonstrates full dedication and is able to devote sufficient time to perform the duties, as evidenced by a written statement from the individual concerned; 7. Is physically and mentally fit and not suffering from any illness that may hinder the performance of duties as a member of the Board of Directors, as evidenced by a medical certificate issued by a hospital; and 8. Holds a Taxpayer Identification Number (NPWP) and has fulfilled tax payment obligations for the last 2 (two) years.

Prosedur Nominasi Dewan Komisaris dan Direksi

Prosedur nominasi anggota Dewan Komisaris dan Direksi dilaksanakan melalui tahapan yang sistematis, meliputi penjaringan, evaluasi, hingga penetapan, dengan berpedoman pada ketentuan Pemegang Saham, Anggaran Dasar Perseroan, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam rangka suksesi, Dewan Komisaris dan Direksi melakukan identifikasi serta penilaian terhadap *nominated talent* yang berpotensi mengisi posisi kepemimpinan di masa mendatang. Hasil evaluasi tersebut kemudian direkomendasikan kepada Pemegang Saham untuk dipertimbangkan dalam proses penetapan.

Nomination Procedure for the Board of Commissioners and Board of Directors

The nomination procedures for members of the Board of Commissioners and the Board of Directors are carried out through a systematic process, comprising candidate sourcing, evaluation, and appointment, in accordance with the provisions established by the Shareholders, the Company's Articles of Association, and the prevailing laws and regulations. As part of the succession process, the Board of Commissioners and the Board of Directors identify and assess nominated talent with the potential to assume future leadership positions. The results of the evaluation are subsequently recommended to the Shareholders for consideration in the appointment process.

Prosedur Nominasi Komisaris
Nomination Procedures for the Board of Commissioners

Proses Penjaringan
Candidate Sourcing Process

Tim Evaluasi menerima usulan dan mencari informasi bakal Calon Anggota Dewan Komisaris dari berbagai sumber.
Tim Evaluasi melakukan seleksi berdasarkan kriteria dan persyaratan administrasi yang ditetapkan (daftar riwayat hidup, dokumen lain, dan informasi yang diterima) untuk menyusun Daftar Bakal Calon (*long list*) paling sedikit 3 (tiga) kali lipat jumlah jabatan Dewan Komisaris yang lowong untuk jabatan anggota Dewan Komisaris.
Tim Evaluasi menyerahkan Daftar Bakal Calon (*long list*) kepada Direksi Pemegang Saham untuk memperoleh persetujuan.

The Evaluation Team receives nominations and gathers information on prospective candidates for the Board of Commissioners from various sources.
The Evaluation Team conducts a selection process based on the established criteria and administrative requirements (curriculum vitae, supporting documents, and other information received) to prepare a Long List comprising at least three (3) times the number of vacant Board of Commissioners positions.
The Evaluation Team submits the Long List to the Board of Directors of the Shareholder for approval.

Proses Penilaian
Assessment Process

Tim evaluasi melakukan penilaian terhadap bakal Calon Anggota Dewan Komisaris yang namanya tercantum dalam Daftar Bakal Calon Anggota Dewan Komisaris (*long list*) yang telah disetujui oleh Pemegang Saham untuk memperoleh calon-calon terbaik yang akan diusulkan kepada Direksi Pemegang Saham sebagai Calon Anggota Dewan Komisaris.
Hasil penilaian ditetapkan dalam Daftar Calon Anggota Dewan Komisaris (*short list*) yang terdiri dari 2 (dua) kali lipat jabatan Anggota Dewan Komisaris yang lowong dengan peringkat nilai terbaik.
Tim evaluasi menyampaikan Daftar Calon Anggota Dewan Komisaris (*short list*) kepada Direksi Pemegang Saham untuk penetapan Calon Direksi terpilih disertai dengan penjelasan mengenai proses penetapannya dan lampiran hasil penilaian lengkap.

The Evaluation Team assesses the prospective candidates for the Board of Commissioners whose names are included in the Long List approved by the Shareholders to identify the best candidates to be proposed to the Board of Directors of the Shareholder as candidates for the Board of Commissioners.
The assessment results are compiled into a Short List consisting of candidates equal to two (2) times the number of vacant Board of Commissioners positions, ranked based on the highest assessment scores.
The Evaluation Team submits the Short List to the Board of Directors of the Shareholder for the appointment of the selected candidates for the Board of Commissioners, accompanied by an explanation of the selection process and the complete assessment results.

Proses Penetapan
Appointment Process

Direksi Pemegang Saham melakukan evaluasi akhir atas hasil Penilaian untuk menetapkan 1 (satu) Calon Anggota Dewan Komisaris terpilih untuk masing-masing jabatan Anggota Dewan Komisaris.
Direksi Pemegang Saham mengajukan Calon Anggota Dewan Komisaris untuk ditetapkan dalam RUPS menjadi Anggota Dewan Komisaris Perusahaan.
Keputusan Pemegang Saham baik di dalam RUPS maupun di luar RUPS menetapkan Calon Anggota Dewan Komisaris terpilih sebagai Anggota Dewan Komisaris Perusahaan.

The Board of Directors of the Shareholder conducts a final evaluation of the assessment results to determine one (1) selected candidate for the Board of Commissioners for each vacant position.
The Board of Directors of the Shareholder proposes the selected candidates for the Board of Commissioners to be appointed as members of the Company's Board of Commissioners through the General Meeting of Shareholders (GMS).
The Shareholders' resolution, whether adopted at or outside the General Meeting of Shareholders (GMS), formally appoints the selected candidates as members of the Company's Board of Commissioners.

Prosedur Nominasi Direktur
Nomination Procedures for the Board of Directors

Proses Penjaringan
Candidate Sourcing Process

Tim Evaluasi menerima usulan dan mencari informasi bakal Calon Anggota Direksi dari berbagai sumber.
Tim Evaluasi melakukan seleksi berdasarkan kriteria dan persyaratan administrasi yang ditetapkan (daftar riwayat hidup, dokumen lain, dan informasi yang diterima) untuk menyusun Daftar Bakal Calon (*long list*) sebanyak minimal 5 (lima) orang calon untuk masing-masing jabatan anggota Direksi.
Tim Evaluasi menyerahkan Daftar Bakal Calon (*long list*) kepada Direksi Pemegang Saham untuk memperoleh persetujuan.

The Evaluation Team receives nominations and gathers information on prospective candidates for the Board of Directors from various sources.
The Evaluation Team conducts a selection process based on the established criteria and administrative requirements (curriculum vitae, supporting documents, and other information received) to prepare a Long List consisting of at least five (5) candidates for each position on the Board of Directors.
The Evaluation Team submits the Long List to the Board of Directors of the Shareholder for approval.

Proses Penilaian
Assessment Process

Tim evaluasi melakukan penilaian terhadap bakal calon yang namanya tercantum dalam Daftar Bakal Calon Anggota Direksi (*long list*) yang telah disetujui oleh Direksi Pemegang Saham untuk memperoleh calon-calon terbaik yang akan diusulkan kepada Direksi Pemegang Saham sebagai Calon Anggota Direksi.
Dalam hal Asesmen dilakukan oleh Lembaga Profesional, hasil Asesmen disampaikan oleh Lembaga Profesional kepada tim evaluasi untuk dievaluasi.
Hasil Asesmen ditetapkan oleh tim evaluasi dalam Daftar Calon Anggota Direksi (*short list*) yang terdiri dari 3 (tiga) orang untuk masing-masing jabatan anggota Direksi dengan peringkat nilai terbaik.
Tim evaluasi menyampaikan Daftar Calon Anggota Direksi (*short list*) kepada Direksi Pemegang Saham untuk penetapan Calon Direksi terpilih disertai dengan penjelasan mengenai proses penetapannya dan lampiran hasil penilaian lengkap.

The evaluation team assesses the prospective candidates whose names are included in the List of Prospective Board of Directors Candidates (long list) approved by the Board of Directors of the Shareholder to identify the best candidates to be proposed to the Board of Directors of the Shareholder as nominees for the Board of Directors.
If the assessment is conducted by a Professional Institution, the assessment results are submitted by the Professional Institution to the evaluation team for evaluation.
Based on the assessment results, the evaluation team prepares the List of Board of Directors Candidates (short list), consisting of three candidates for each position on the Board of Directors, ranked according to the highest assessment scores.
The evaluation team submits the List of Board of Directors Candidates (short list) to the Board of Directors of the Shareholder for the determination of the selected Board of Directors candidates, accompanied by an explanation of the selection process and the complete assessment results as an attachment.

Proses Penetapan
Appointment Process

Direksi Pemegang Saham melakukan evaluasi akhir atas hasil Penilaian untuk menetapkan 1 (satu) Calon Anggota Direksi terpilih untuk masing-masing jabatan Anggota Direksi.
Direksi Pemegang Saham mengajukan Calon Anggota Direksi untuk ditetapkan dalam RUPS menjadi anggota Direksi Perusahaan.
Pengajuan untuk ditetapkan dalam RUPS dilakukan setelah Calon AnggotaDireksi yang bersangkutan menandatangani Kontrak Manajemen.
Keputusan Pemegang Saham baik di dalam RUPS maupun di luar RUPS menetapkan calon Direksi terpilih sebagai Anggota Direksi Perusahaan.

The Board of Directors of the Shareholder conducts a final evaluation of the assessment results to determine one selected candidate for each position on the Board of Directors.
The Board of Directors of the Shareholder nominates the selected Board of Directors candidates for appointment as members of the Company's Board of Directors at the GMS.
The nomination for appointment at the GMS is made after the respective Board of Directors candidate has signed the Management Contract.
The Shareholder's resolution, whether adopted at or outside the GMS, appoints the selected Board of Directors candidates as members of the Company's Board of Directors.

Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi

Kebijakan remunerasi Perusahaan diterapkan dengan mengacu pada ketentuan yang ditetapkan oleh PT PLN (Persero) selaku holding dari pemegang saham utama dan pengendali. Kebijakan ini berpedoman pada Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor PER-3/MBU/03/2023 tanggal 20 Maret 202 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara sebagai acuan dalam pengelolaan remunerasi.

Struktur Remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris

Komponen remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi meliputi gaji atau honorarium, tunjangan, fasilitas, serta insentif kinerja yang diberikan berdasarkan pencapaian kinerja individu maupun kinerja Perusahaan secara keseluruhan, dengan mengacu pada ketentuan Pemegang Saham. Gaji Direktur Utama ditetapkan oleh Pemegang Saham, sedangkan gaji anggota Direksi lainnya ditetapkan sebesar 85% dari gaji Direktur Utama. Adapun honorarium Komisaris Utama ditetapkan sebesar 45% dari gaji Direktur Utama, dan honorarium anggota Dewan Komisaris sebesar 90% dari honorarium Komisaris Utama.

Remuneration of the Board of Commissioners and the Board of Directors

Kebijakan remunerasi Perusahaan diterapkan dengan mengacu pada ketentuan yang ditetapkan oleh PT PLN (Persero) selaku holding dari pemegang saham utama dan pengendali. Kebijakan ini berpedoman pada Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor PER-3/MBU/03/2023 tanggal 20 Maret 202 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara sebagai acuan dalam pengelolaan remunerasi.

Remuneration Structure of the Board of Directors and the Board of Commissioners

The remuneration components for the Board of Commissioners and the Board of Directors comprise salaries or honoraria, allowances, facilities, and performance incentives granted based on the achievement of individual performance as well as the overall performance of the Company, in accordance with the provisions of the Shareholder. The President Director's salary is determined by the Shareholder, while the salaries of the other members of the Board of Directors are set at 85% of the President Director's salary. The President Commissioner's honorarium is set at 45% of the President Director's salary, while the honorarium of the other members of the Board of Commissioners is set at 90% of the President Commissioner's honorarium.

Struktur Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi
Remuneration Structure of the Board of Commissioners and the Board of Directors

Struktur Remunerasi Remuneration Structure	Dewan Komisaris Board of Commissioners	Direksi Board of Directors
Jangka Pendek Short-term	1. Honorarium 2. Tunjangan 3. Fasilitas 4. Tantiem 1. Honorarium 2. Allowances 3. Facilities, consisting of: 4. Tantiem	1. Gaji 2. Tunjangan 3. Fasilitas terdiri dari: 4. Tantiem 1. Salary 2. Allowances 3. Facilities, consisting of: 4. Tantiem
Jangka Panjang Long-term	Perusahaan belum menerapkan skema kompensasi dalam jangka panjang kepada Dewan Komisaris. The Company has not implemented a long-term compensation scheme for the Board of Commissioners.	Perusahaan belum menerapkan skema kompensasi dalam jangka panjang kepada Direksi.

Prosedur Penetapan Usulan Remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris

Penetapan komponen penghasilan tetap bagi Dewan Komisaris dan Direksi, yang mencakup gaji atau honorarium, tunjangan, dan fasilitas, dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dengan mempertimbangkan skala dan kompleksitas usaha, tingkat inflasi, kondisi keuangan Perusahaan, serta faktor relevan lainnya. Sementara itu, penghasilan variabel berupa insentif kinerja ditetapkan berdasarkan capaian kinerja serta kemampuan keuangan Perusahaan. Adapun prosedur penetapan remunerasi dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:

Procedure for Determining the Proposed Remuneration of the Board of Directors and the Board of Commissioners

The determination of the fixed remuneration components for the Board of Commissioners and the Board of Directors, comprising salaries or honoraria, allowances, and facilities, is carried out in accordance with the prevailing laws and regulations, taking into account the scale and complexity of the business, the inflation rate, the Company's financial condition, and other relevant factors. Meanwhile, variable remuneration in the form of performance incentives is determined based on performance achievement and the Company's financial capability. The procedure for determining remuneration is carried out through the following stages:

Prosedur Penetapan Usulan Remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris
Procedure for Determining the Proposed Remuneration of the Board of Directors and the Board of Commissioners

Usulan Remunerasi oleh Direksi
Proposed Remuneration by the Board of Directors

Direksi melakukan kajian dan mengajukan usulan remunerasi kepada Dewan Komisaris.

The Board of Directors conducts a review and submits the proposed remuneration to the Board of Commissioners.

Pembahasan dan Persetujuan oleh Dewan Komisaris
Review and Approval by the Board of Commissioners

Dewan Komisaris melakukan penelaahan atas usulan remunerasi dengan mempertimbangkan kondisi pasar untuk pekerjaan yang bersangkutan pada perusahaan lainnya dengan bidang usaha dan status yang sama, memperhitungkan kinerja usaha Perusahaan dan kontribusi masing-masing individu, kemudian dilakukan pembahasan untuk menyiapkan rekomendasi.
The Board of Commissioners reviews the proposed remuneration by considering market conditions for comparable positions at other companies with similar business activities and status, taking into account the Company's business performance and the contribution of each individual. The proposal is then discussed to formulate the recommendation.

Penyampaian Usulan
Submission of the Proposal

Dewan Komisaris menyampaikan usulan remunerasi kepada pemegang saham untuk mendapat persetujuan dan penetapan.
The Board of Commissioners submits the proposed remuneration to the Shareholder for approval and determination.

Persetujuan dan Penetapan Remunerasi
Approval and Determination of Remuneration

Pemegang Saham memberikan persetujuan dan menetapkan remunerasi melalui RUPS.
The Shareholder approves and determines the remuneration through the GMS.

Jumlah Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi

Perusahaan mencatat total remunerasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris secara keseluruhan pada tahun 2025 sebesar Rp4.639.404.234.

Total Remuneration of the Board of Commissioners and the Board of Directors

The Company recorded total remuneration for the Board of Directors and the Board of Commissioners amounting to Rp4.639.404.234. in 2025.

Remunerasi Dewan Komisaris
Remuneration of the Board of Commissioners

Jabatan Position	Besaran Remuneration
Komisaris Utama President Commissioner	45% dari gaji Direktur Utama 45% of the President Director's salary
Komisaris Commissioner	90% dari honorarium Komisaris Utama 90% of the President Commissioner's honorarium

Remunerasi Direksi
Remuneration of the Board of Directors

Jabatan Position	Besaran Remuneration
Direktur Utama President Director	100% 100%
Direktur Director	85% dari gaji Direktur Utama 85% of the President Director's salary

Komponen Remunerasi Berupa Insentif Lainnya Bagi Dewan Komisaris dan Direksi

Perusahaan tidak memberlakukan kebijakan pemberian bonus kinerja jangka panjang, bonus di luar kinerja, maupun opsi saham kepada manajemen dan/atau karyawan, termasuk program kepemilikan saham oleh manajemen atau *Management Stock Ownership Program* (MSOP). Oleh karena itu, remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi tidak mencakup bentuk kompensasi maupun insentif jangka panjang yang berbasis kinerja.

Other Remuneration Components in the Form of Incentives for the Board of Commissioners and the Board of Directors

The Company does not implement a policy on long-term performance bonuses, non-performance bonuses, or stock options for management and/or employees, including a Management Stock Ownership Program (MSOP). Accordingly, the remuneration of the Board of Commissioners and the Board of Directors does not include any form of long-term performance-based compensation or incentives.



Kebijakan Pengungkapan Informasi Kepemilikan Saham
Share Ownership Information Disclosure Policy

Pengungkapan informasi mengenai kepemilikan saham oleh anggota Direksi dan Dewan Komisaris dilakukan sesuai ketentuan yang tercantum dalam Anggaran Dasar Perusahaan. Informasi tersebut dicatat dalam daftar khusus yang diperbarui secara berkala dan dilaporkan setiap tahun sebagai bagian dari komitmen terhadap transparansi serta penerapan tata kelola perusahaan yang baik.

Setiap anggota Direksi dan Dewan Komisaris juga berkewajiban menyampaikan laporan kepada Perusahaan terkait kepemilikan saham pribadi maupun milik anggota keluarga, baik yang berkaitan dengan saham Perusahaan maupun entitas lainnya. Namun demikian, saat ini belum terdapat ketentuan internal yang secara tegas mengatur batas waktu pelaporan perubahan kepemilikan saham, termasuk kewajiban pelaporan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak terjadinya transaksi. Hal ini disebabkan status Perusahaan yang bukan merupakan perusahaan terbuka, sehingga belum terdapat kewajiban penerapan ketentuan pelaporan sebagaimana berlaku bagi emiten di pasar modal. Meskipun demikian, pengaturan yang lebih rinci terkait mekanisme dan batas waktu pelaporan tetap menjadi perhatian dalam rangka penguatan akuntabilitas dan transparansi internal.

Disclosure of share ownership information by members of the Board of Directors and the Board of Commissioners is carried out in accordance with the provisions set out in the Company's Articles of Association. Such information is recorded in a special register that is updated periodically and reported annually as part of the Company's commitment to transparency and good corporate governance.

Each member of the Board of Directors and the Board of Commissioners is also required to report to the Company any personal share ownership as well as share ownership held by family members, whether related to shares in the Company or in other entities. However, the Company has not yet established an internal regulation that specifically stipulates the deadline for reporting changes in share ownership, including a requirement to report transactions no later than three working days after they occur. This is because the Company is not a public company and therefore is not subject to the reporting obligations applicable to issuers in the capital market. Nevertheless, the development of more detailed provisions regarding reporting mechanisms and reporting deadlines remains a consideration as part of efforts to strengthen internal accountability and transparency.

Sekretaris Dewan Komisaris
Secretary to the Board of Commissioners

Dewan Komisaris menetapkan Sekretaris Dewan Komisaris sebagai organ pendukung yang berperan dalam membantu kelancaran pelaksanaan tugas, tanggung jawab, dan wewenang Dewan Komisaris, termasuk aspek administratif, pengelolaan agenda, serta fasilitasi penyampaian informasi kepada dan dari Dewan Komisaris. Sekretaris Dewan Komisaris diangkat langsung oleh Dewan Komisaris dan berada di bawah koordinasi serta tanggung jawab Dewan Komisaris. Dalam pelaksanaan tugasnya, Sekretaris Dewan Komisaris didukung oleh seorang staf yang merupakan pegawai internal Perusahaan, guna memastikan efektivitas komunikasi dan kelancaran koordinasi antara Dewan Komisaris dengan organ Perusahaan lainnya.

The Board of Commissioners has established the Secretary to the Board of Commissioners as a supporting organ responsible for facilitating the effective execution of the duties, responsibilities, and authorities of the Board of Commissioners, including administrative matters, agenda management, and the facilitation of information exchange to and from the Board of Commissioners. The Secretary to the Board of Commissioners is appointed directly by and reports to the Board of Commissioners. In carrying out their duties, the Secretary to the Board of Commissioners is supported by a staff member who is an internal employee of the Company, ensuring effective communication and smooth coordination between the Board of Commissioners and other Company organs.

Sekretaris Dewan Komisaris yang menjabat pada tahun 2024 ditetapkan melalui Surat Keputusan Dewan Komisaris Nomor 006.K/DEKOM/PLNGG/2023 tanggal 31 Mei 2023 tentang Perpanjangan Masa Kerja Sekretaris Dewan Komisaris, yang kemudian diperpanjang kembali melalui Surat Keputusan Dewan Komisaris Nomor 003.K/DEKOM/PLNEG/2024 tanggal 31 Mei 2024 tentang Perpanjangan Masa Kerja Sekretaris Dewan Komisaris.

Tugas dan Tanggung Jawab Sekretaris Dewan Komisaris

Sekretaris Dewan Komisaris bertanggung jawab dalam mendukung efektivitas pelaksanaan tugas Dewan Komisaris. Peran tersebut mencakup pengelolaan administrasi dan kesekretariatan secara menyeluruh serta pemberian dukungan fungsional untuk memastikan Dewan Komisaris dapat menjalankan fungsi pengawasan atas operasional dan kinerja Perusahaan secara optimal. Selain itu, Sekretaris Dewan Komisaris juga berperan dalam memastikan seluruh kegiatan Dewan Komisaris berjalan selaras dengan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik. Adapun ruang lingkup tanggung jawab Sekretaris Dewan Komisaris antara lain meliputi:

1. Sekretaris Dewan Komisaris bertugas melakukan kegiatan untuk membantu Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugasnya berupa:
   a. Mempersiapkan rapat, termasuk bahan rapat (*briefing sheet*) Dewan Komisaris;
   b. Membuat risalah rapat Dewan Komisaris sesuai ketentuan Anggaran Dasar Perseroan;
   c. Mengadministrasikan dokumen Dewan Komisaris, baik surat masuk, surat keluar, risalah rapat maupun dokumen lainnya termasuk data-data teknis yang berasal dari Kornite-Komite di lingkungan Dewan Komisaris;
   d. Menyusun Rancangan Rencana Kerja dan Anggaran Dewan Komisaris;
   e. Menyusun Rancangan Laporan-laporan Dewan Komisaris;
   f. Melaksanakan tugas lainnya dari Dewan Komisaris.

The Secretary to the Board of Commissioners serving in 2024 was appointed pursuant to Board of Commissioners Decree No. 006.K/DEKOM/PLNGG/2023 on May 31, 2023 concerning the Extension of the Term of Office of the Secretary to the Board of Commissioners. The appointment was subsequently extended through Board of Commissioners Decree No. 003.K/DEKOM/PLNEG/2024 on May 31, 2024 concerning the Extension of the Term of Office of the Secretary to the Board of Commissioners.

Duties and Responsibilities of the Secretary to the Board of Commissioners

The Secretary to the Board of Commissioners is responsible for supporting the effective performance of the Board of Commissioners' duties. This role includes comprehensive administrative and secretarial functions as well as functional support to ensure that the Board of Commissioners can optimally carry out its oversight responsibilities over the Company's operations and performance. The Secretary to the Board of Commissioners also plays a role in ensuring that all activities of the Board of Commissioners are conducted in accordance with the principles of Good Corporate Governance. The scope of responsibilities includes:

1. The Secretary to the Board of Commissioners carries out activities to assist the Board of Commissioners in performing its duties, including:
   a. Preparing meetings, including meeting materials (briefing sheets) for the Board of Commissioners;
   b. Preparing minutes of Board of Commissioners meetings in accordance with the Company's Articles of Association;
   c. Administering Board of Commissioners documents, including incoming correspondence, outgoing correspondence, meeting minutes, and other documents, including technical data originating from committees under the Board of Commissioners;
   d. Preparing the draft Work Plan and Budget of the Board of Commissioners;
   e. Preparing draft reports of the Board of Commissioners; and
   f. Performing other duties assigned by the Board of Commissioners.

2. Selain melaksanakan tugas sebagaimana di atas, Sekretaris Dewan Komisaris selaku pimpinan sekretariat melaksanakan tugas lain berupa:
   a. Memastikan bahwa Dewan Komisaris mematuhi peraturan perundang-undangan serta menerapkan prinsip-prinsip GCG;
   b. Memberikan informasi yang dibutuhkan oleh Dewan Komisaris secara berkala dan/atau sewaktu-waktu apabila diminta;
   c. Mengkoordinasikan anggota Komite, jika diperlukan dalam rangka memperlancar tugas Dewan Komisaris;
   d. Sebagai penghubung (*liaison officer*) Dewan Komisaris dengan pihak lain.
3. Dalam rangka tertib administrasi dan pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik, Sekretaris Dewan Komisaris wajib memastikan dokumen penyelenggaraan kegiatan sebagaimana dimaksud angka 1 (satu) di atas tersimpan dengan baik di Perseroan.

Pedoman Kerja Sekretaris Dewan Komisaris

Pedoman kerja Sekretaris Dewan Komisaris mengacu pada ketentuan yang tertuang dalam Board Manual sebagai dokumen acuan utama dalam pelaksanaan fungsi dan tanggung jawab organ tata kelola perusahaan, termasuk Sekretaris Dewan Komisaris. Pedoman ini menguraikan secara rinci peran, tanggung jawab, kewenangan, serta tata kerja Sekretaris Dewan Komisaris dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan fungsi pengawasan oleh Dewan Komisaris.

Pelaksanaan Tugas Sekretaris Dewan Komisaris

Sepanjang tahun 2025, Sekretaris Dewan Komisaris telah melaksanakan tugas dan kewenangannya secara konsisten dengan berpedoman pada Pedoman Kerja dalam Board Manual. Pelaksanaan tugas tersebut ditujukan untuk mendukung efektivitas kinerja Dewan Komisaris, khususnya dalam menjalankan fungsi pengawasan serta memastikan penerapan prinsip-prinsip GCG.

2. In addition to the duties above, the Secretary to the Board of Commissioners, as head of the secretariat, performs the following duties:
   a. Ensuring that the Board of Commissioners complies with applicable laws and regulations and implements GCG principles;
   b. Providing information required by the Board of Commissioners on a regular basis and/or upon request;
   c. Coordinating committee members, when necessary, to facilitate the duties of the Board of Commissioners; and
   d. Serving as a liaison officer between the Board of Commissioners and other parties.
3. To support proper administration and good corporate governance practices, the Secretary to the Board of Commissioners is responsible for ensuring that all documents relating to the activities referred to in point 1 above are properly maintained by the Company.

Work Guidelines of the Secretary to the Board of Commissioners

The work guidelines of the Secretary to the Board of Commissioners refer to the provisions set out in the Board Manual, which serves as the primary reference document governing the functions and responsibilities of the Company's governance organs, including the Secretary to the Board of Commissioners. These guidelines provide a detailed description of the roles, responsibilities, authorities, and working procedures of the Secretary to the Board of Commissioners in supporting the effective implementation of the Board of Commissioners' oversight function.

Implementation of the Duties of the Secretary to the Board of Commissioners

Throughout 2025, the Secretary to the Board of Commissioners consistently carried out their duties and authorities in accordance with the Board Manual. These activities were intended to support the effectiveness of the Board of Commissioners, particularly in carrying out its oversight function and ensuring the implementation of GCG principles.

Sekretaris Dewan Komisaris
Secretary to the Board of Commissioners

Sekretaris Dewan Komisaris telah menjalankan berbagai kegiatan strategis dan administratif yang mencerminkan perannya sebagai penghubung antara Dewan Komisaris dan para pemangku kepentingan. Adapun kegiatan yang telah dilaksanakan antara lain meliputi:

1. Pengelolaan Rapat Dewan Komisaris, termasuk penyusunan agenda, distribusi undangan, penyusunan dan dokumentasi notulen rapat, serta tindak lanjut hasil rapat;
2. Penyusunan dan pelaporan administrasi kesekretariatan, seperti dokumentasi surat-menyurat resmi Dewan Komisaris dan pelaporan berkala;
3. Koordinasi komunikasi antara Dewan Komisaris dan Komite Dewan Komisaris dengan Direksi serta unit-unit kerja terkait di dalam Perseroan;
4. Pendampingan dalam evaluasi kinerja Dewan Komisaris, baik secara individual maupun kolektif, serta dalam penyusunan laporan evaluasi tahunan;
5. Monitoring kepatuhan terhadap prinsip GCG, dengan memastikan setiap proses dan keputusan Dewan Komisaris didukung oleh informasi yang memadai dan sesuai dengan peraturan yang berlaku;
6. Partisipasi dalam pembaruan dokumen tata kelola, termasuk memberikan masukan dalam *review Board Manual* dan kebijakan-kebijakan pendukung lainnya.

The Secretary to the Board of Commissioners undertook various strategic and administrative activities that reflected their role as a liaison between the Board of Commissioners and stakeholders. These activities included:

1. Managing Board of Commissioners meetings, including agenda preparation, distribution of invitations, preparation and documentation of meeting minutes, and follow-up on meeting resolutions;
2. Preparing and reporting secretarial administration, including documentation of official correspondence of the Board of Commissioners and periodic reporting;
3. Coordinating communication between the Board of Commissioners and its committees with the Board of Directors and relevant work units within the Company;
4. Providing support in the evaluation of the performance of the Board of Commissioners, both individually and collectively, as well as in the preparation of annual evaluation reports;
5. Monitoring compliance with GCG principles by ensuring that every process and decision of the Board of Commissioners is supported by adequate information and complies with applicable regulations; and
6. Participating in the updating of governance documents, including providing input in the review of the Board of Commissioners and Board of Directors Working Procedures and supporting policies.

Komite Audit
Audit Committee

Komite Audit merupakan organ pendukung Dewan Komisaris yang memiliki tugas membantu pelaksanaan fungsi pengawasan di Perusahaan. Komite Audit memastikan laporan keuangan Perusahaan disusun secara akurat dan dapat dipercaya, sistem pengendalian internal berjalan efektif, serta proses audit internal dan eksternal dilaksanakan sesuai standar yang berlaku. Selain itu, Komite Audit juga melakukan penelaahan terhadap kepatuhan Perusahaan atas peraturan dan ketentuan hukum yang berlaku. Dalam menjalankan tugasnya, Komite Audit bekerja secara independen, objektif, dan menjunjung tinggi integritas.

The Audit Committee is a supporting organ of the Board of Commissioners that assists in carrying out the Company's oversight function. The Audit Committee ensures that the Company's financial statements are prepared accurately and reliably, that the internal control system operates effectively, and that internal and external audit processes are conducted in accordance with applicable standards. The Audit Committee also reviews the Company's compliance with applicable laws and regulations. In carrying out its duties, the Audit Committee operates independently, objectively, and with integrity.

Ketua dan anggota Komite Audit yang berasal dari Dewan Komisaris memiliki masa jabatan yang mengikuti masa jabatan mereka sebagai anggota Dewan Komisaris. Perusahaan dapat mengangkat kembali anggota Komite Audit sesuai ketentuan dalam Piagam Komite Audit. Masa jabatan anggota Komite Audit yang bukan merupakan anggota Dewan Komisaris Perseroan paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan dengan ketentuan bahwa akumulasi masa kerja dimaksud tidak melebihi masa kerja Dewan Komisaris, dengan tidak mengurangi hak Dewan Komisaris untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.

The term of office of the Chairperson and members of the Audit Committee who are members of the Board of Commissioners follows their term as members of the Board of Commissioners. The Company may reappoint Audit Committee members in accordance with the provisions of the Audit Committee Charter. Audit Committee members who are not members of the Board of Commissioners may serve for a maximum term of three years and may be reappointed as necessary, provided that their cumulative term does not exceed the term of the Board of Commissioners, without prejudice to the right of the Board of Commissioners to dismiss them at any time.

Keanggotaan Komite Audit

Komite Audit paling kurang terdiri dari 2 (dua) orang, yang terdiri dari Ketua dan Anggota. Ketua Komite Audit merupakan anggota Dewan Komisaris. Anggota Komite Audit dapat berasal dari Dewan Komisaris atau dari luar Perseroan. Anggota Komite Audit yang bukan berasal dari anggota Dewan Komisaris maksimal berjumlah 2 (dua) orang.

Membership of the Audit Committee

The Audit Committee consists of at least two members, comprising a Chairperson and Members. The Chairperson of the Audit Committee must be a member of the Board of Commissioners. Audit Committee members may come from within the Board of Commissioners or from outside the Company. A maximum of two Audit Committee members may be individuals who are not members of the Board of Commissioners.

Susunan Komite Audit tahun 2025 ditetapkan berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris PT PLN Energi Gas Nomor: 008.K/DEKOM/PLNEG/2024 tanggal 30 Juni 2024 tentang Perpanjangan Masa Kerja dan Penetapan Kembali Komite Audit Dewan Komisaris PT PLN Energi Gas, dengan susunan keanggotaan Komite Audit sebagai berikut:

- Ketua Komite : Andriah Feby Misna
- Sekretaris merangkap Anggota Komite : Rahman Mulya
- Anggota Komite : Paul Kiring Kaloh

The composition of the Audit Committee for 2025 was established pursuant to Board of Commissioners Decree of PT PLN Energi Gas No. 008.K/DEKOM/PLNEG/2024 on June 30, 2024 concerning the Extension of the Term of Office and Reappointment of the Audit Committee of the Board of Commissioners of PT PLN Energi Gas, with the following composition:

- Chairperson of the Committee: Andriah Feby Misna
- Secretary and Committee Member: Rahman Mulya
- Committee Member: Paul Kiring Kaloh

Kemudian mengalami perubahan berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris PT PLN Energi Gas Nomor: 003.K/DEKOM/PLNEG/2025 tanggal 02 Januari 2025 tentang Pemberhentian Anggota, Pengangkatan dan Penetapan, Komite Audit Dewan Komisaris PT PLN Energi Gas, dengan susunan keanggotaan Komite Audit sebagai berikut:

- Ketua Komite : Andriah Feby Misna
- Sekretaris merangkap Anggota Komite : Yuli Fitrianingrum
- Anggota Komite : Paul Kiring Kaloh

The composition was subsequently amended pursuant to Board of Commissioners Decree of PT PLN Energi Gas No. 003.K/DEKOM/PLNEG/2025 on January 2, 2025 concerning the Dismissal, Appointment, and Determination of Members of the Audit Committee of the Board of Commissioners of PT PLN Energi Gas, resulting in the following composition:

- Chairperson of the Committee: Andriah Feby Misna
- Secretary and Committee Member: Yuli Fitrianingrum
- Committee Member: Paul Kiring Kaloh

Andriah Feby Misna	
Ketua Komite Audit Chairperson of the Audit Committee	
Ditetapkan kembali sebagai Ketua Komite Audit terakhir kali berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris PT PLN Energi Gas Nomor: 003.K/DEKOM/PLNEG/2025 tanggal 02 Januari 2025 tentang Pemberhentian Anggota, Pengangkatan dan Penetapan, Komite Audit Dewan Komisaris PT PLN Energi Gas,	Most recently reappointed as Chairperson of the Audit Committee pursuant to Board of Commissioners Decree of PT PLN Energi Gas No. 003.K/DEKOM/PLNEG/2025 on January 2, 2025 concerning the Dismissal, Appointment, and Determination of Members of the Audit Committee of the Board of Commissioners of PT PLN Energi Gas.
Profil lengkap Sdri. Andriah Feby Misna dapat dilihat pada bagian profil Dewan Komisaris.	The complete profile of Ms. Andriah Feby Misna is presented in the Board of Commissioners Profile section.
Periode Jabatan : Kesatu	Term Period : First
Masa Jabatan : Mengikuti masa jabatan Dewan Komisaris di Perseroan.	Term of Office : Follows the term of office of the Board of Commissioners of the Company.

Yuli Fitrianingrum	
Sekretaris merangkap Anggota Komite Audit Secretary and Member of the Audit Committee	
Ditetapkan sebagai Anggota Komite Audit berdasarkan berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris PT PLN Energi Gas Nomor: 003.K/DEKOM/PLNEG/2025 tanggal 02 Januari 2025 tentang Pemberhentian Anggota, Pengangkatan dan Penetapan, Komite Audit Dewan Komisaris PT PLN Energi Gas.	Appointed as a Member of the Audit Committee pursuant to Board of Commissioners Decree of PT PLN Energi Gas No. 003.K/DEKOM/PLNEG/2025 on January 2, 2025 concerning the Dismissal, Appointment, and Determination of Members of the Audit Committee of the Board of Commissioners of PT PLN Energi Gas.
Warga Negara Indonesia, Usia 42 tahun Per Desember 2025.	Indonesian citizen, 42 years old as of December 2025.
Periode Jabatan : Pertama	Term Period : First
Masa Jabatan : 2025 - 2028	Term of Office : 2025 - 2028
Rangkap Jabatan : Vice President Manajemen Risiko & Kepatuhan PT PLN Energi Primer Indonesia	Concurrent Position : Vice President of Risk Management & Compliance, PT PLN Energi Primer Indonesia

Komite Audit
Audit Committee

Riwayat Pendidikan • Sarjana Teknik Kimia dari ITS Surabaya • Magister Teknik Sistem Energi dari Universitas Indonesia	Educational Background • Bachelor's Degree in Chemical Engineering, Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya • Master's Degree in Energy Systems Engineering, University of Indonesia
Pengalaman Kerja • Assistant Analyst Laboratorium Kimia PLN Nusantara Power (2008 - 2010) • Assistant Analyst Kepatuhan PLN Nusantara Power (2010 - 2012.) • Assistant Analyst Manajemen Mutu Risiko dan Kepatuhan PLN Nusantara Power (2012 - 2015) • SPV Senior Manajemen Mutu Risiko dan Kepatuhan PLN Nusantara Power (2015-2019) • SPV Senior Manajemen Risiko & Kepatuhan PT PLN Nusantara Power (2019-2022) • Manajer Manajemen Risiko & Kepatuhan PLN Energi Primer Indonesia (2023-2025)	Professional Experience • Assistant Analyst, Chemical Laboratory, PLN Nusantara Power (2008–2010) • Assistant Analyst, Compliance, PLN Nusantara Power (2010–2012) • Assistant Analyst, Quality, Risk, and Compliance Management, PLN Nusantara Power (2012–2015) • Senior Supervisor, Quality, Risk, and Compliance Management, PLN Nusantara Power (2015–2019) • Senior Supervisor, Risk Management & Compliance, PT PLN Nusantara Power (2019–2022) • Manager of Risk Management & Compliance, PLN Energi Primer Indonesia (2023–2025)

Paul Kiring Kaloh

Anggota Komite Audit
Member of the Audit Committee

Ditetapkan sebagai Anggota Komite Audit berdasarkan berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris PT PLN Energi Gas Nomor: 008.K/DEKOM/PLNEG/2024 tanggal 30 Juni 2024 tentang Perpanjangan Masa Kerja dan Penetapan Kembali Komite Audit Dewan Komisaris PT PLN Energi Gas.	Appointed as a Member of the Audit Committee pursuant to Board of Commissioners Decree of PT PLN Energi Gas No. 008.K/DEKOM/PLNEG/2024 on June 30, 2024 concerning the Extension of the Term of Office and Reappointment of the Audit Committee of the Board of Commissioners of PT PLN Energi Gas.
Warga Negara Indonesia, Usia 48 tahun Per Desember 2024.	Indonesian citizen, 48 years old as of December 2024.
Periode Jabatan : Pertama	Term Period : First
Masa Jabatan : 2025 - 2028	Concurrent Position : Vice President of Risk Management & Compliance, PT PLN Energi Primer Indonesia
Rangkap Jabatan : Vice President Pengendalian Pembangkitan PLN Pada Bidang Pengendalian Pembangkitan PLN Divisi Pengendalian Pembangkitan dan Independent Power Producer Direktorat Manajemen Pembangkitan PT PLN (Persero) (2023 – Sekarang).	Concurrent Position Vice President of Generation Control, PLN, under the Generation Control and Independent Power Producer Division, Generation Management Directorate, PT PLN (Persero) (2023–Present)
Riwayat Pendidikan • Sarjana Teknik Mesin dari Universitas Hasanudin (2001)	Educational Background • Bachelor's Degree in Mechanical Engineering, Hasanuddin University (2001)
Pengalaman Kerja • Manajer Sektor Kendari Pada PT PLN (Persero) Pembangkitan dan Penyaluran Sulawesi (2018), • Manager Unit Pelaksana Pengendalian Pembangkitan Kendari Pada PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangkitan dan Penyaluran Sulawesi (2018 – 2021), • Senior Manager Pembangkitan Pada PT PLN (Persero) Unit Induk Wilayah Nusa Tenggara Timur (2021 – 2023).	Professional Experience • Sector Manager, PT PLN (Persero) Sulawesi Generation and Transmission (2018) • Manager, Kendari Generation Control Implementation Unit, PT PLN (Persero) Sulawesi Generation and Transmission Main Unit (2018–2021) • Senior Manager of Generation, PT PLN (Persero) East Nusa Tenggara Regional Main Unit (2021–2023)

Profil Komite Audit Independensi Komite Audit

Setiap anggota Komite Audit wajib menjaga independensi dengan tidak memiliki hubungan afiliasi maupun kepentingan pribadi yang dapat menimbulkan benturan kepentingan dengan Perusahaan, anak perusahaan, atau entitas afiliasi. Anggota Komite Audit tidak diperkenankan melakukan transaksi yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan. Anggota Komite Audit juga wajib menghindari jabatan rangkap yang dapat memengaruhi objektivitas dan profesionalitas dalam pengambilan keputusan. Kepatuhan terhadap ketentuan tersebut wajib mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk mendukung penerapan tata kelola perusahaan yang baik dan transparan.

Profile of the Audit Committee Independence of the Audit Committee

Each Audit Committee member is required to maintain independence and must not have any affiliation or personal interest that could create a conflict of interest with the Company, its subsidiaries, or affiliated entities. Audit Committee members are prohibited from engaging in transactions that may give rise to conflicts of interest. They must also avoid holding concurrent positions that could affect their objectivity and professionalism in decision making. Compliance with these requirements must be in accordance with applicable laws and regulations to support transparent and sound corporate governance.

Pernyataan Independensi Komite Audit Aspek Independensi
Audit Committee independence statement

Aspek Independensi Independence Criteria	Andriah Feby Misna	Yuli Fitrianingrum	Paul Kiring Kaloh
Tidak memiliki hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi dan/atau sesama anggota Komite Audit. No family relationship with members of the Board of Commissioners, Board of Directors, and/or fellow Audit Committee members.	√	√	√
Tidak memiliki hubungan usaha baik langsung atau tidak langsung dengan usaha Perseroan. No direct or indirect business relationship with the Company's business activities.	√	√	√
Tidak memiliki hubungan kepemilikan saham di Perseroan dan Anak Perusahaan. No share ownership in the Company and its Subsidiaries.	√	√	√
Tidak bekerja pada kantor akuntan publik, kantor konsultan hukum, atau pihak lain yang memberikan jasa audit dan non-audit atau jasa konsultasi lain kepada Perseroan sekurang-kurangnya dalam waktu 1 (satu) tahun. Has not worked for a public accounting firm, law firm, or other party providing audit, non-audit, or consulting services to the Company for at least one year.	√	√	√

Komite Audit
Audit Committee

Piagam Komite Audit

Komite Audit melaksanakan tugas dan tanggung jawab berdasarkan pedoman kerja yang tercantum dalam Piagam Komite Audit. Piagam tersebut menjadi acuan utama dalam mendukung fungsi pengawasan Dewan Komisaris. Piagam Komite Audit telah disahkan oleh Dewan Komisaris pada 30 Juni 2022 dan diperbarui pada 24 Januari 2025 sebagai dasar pelaksanaan kegiatan Komite Audit. Sebagai komitmen terhadap penerapan tata kelola perusahaan yang baik, Komite Audit melakukan peninjauan dan evaluasi secara berkala terhadap Piagam Komite Audit. Hal ini dilakukan untuk memastikan isi dan ruang lingkup piagam tetap relevan, sesuai dengan kebutuhan Perusahaan, serta sejalan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Audit

Komite Audit memiliki peran penting dalam mendukung efektivitas fungsi pengawasan yang dijalankan oleh Dewan Komisaris. Komite Audit bertugas untuk melakukan penelaahan dan pengkajian atas:

1. Usulan Direksi terkait pemberian Keputusan/Tanggapan Tertulis atas Kewenangan Direksi yang memerlukan Persetujuan/Tanggapan Tertulis dari Dewan Komisaris yang bersifat kepatuhan terhadap peraturan dan ketentuan.
2. RKAP dan Kontrak Manajemen (*Key Performance Indicators* - KPI) dan perubahannya jika ada, yang diusulkan Direksi.
3. Laporan pengaduan dari Stakeholders Perusahaan.
4. Sistem Pengendalian Internal yang dijalankan Perusahaan.
5. Efektivitas Audit Internal dan Audit Eksternal.
6. Sistem kebijakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan.
7. Kebijakan mutu dan pelayanan Perusahaan.
8. Tingkat kepatuhan Perseroan terkait *Good Corporate Governance* (GCG).
9. Laporan Manajemen, kinerja Perseroan terkait Kontrak Manajemen (KPI) dan realisasi Kontrak Manajemen (KPI) Direktorat.
10. Pemenuhan arahan RUPS.

Audit Committee Charter

The Audit Committee carries out its duties and responsibilities based on the Audit Committee Charter. The Charter serves as the primary guideline in supporting the oversight function of the Board of Commissioners. The Audit Committee Charter was approved by the Board of Commissioners on June 30, 2022 and updated on January 24, 2025 as the basis for the implementation of Audit Committee activities. As part of its commitment to good corporate governance, the Audit Committee periodically reviews and evaluates the Charter to ensure that its contents and scope remain relevant to the Company's needs and aligned with applicable laws and regulations.

Duties and Responsibilities of the Audit Committee

The Audit Committee plays an important role in supporting the effectiveness of the oversight function carried out by the Board of Commissioners. The Audit Committee reviews and evaluates:

1. Proposals submitted by the Board of Directors concerning Written Decisions/Responses on matters under the authority of the Board of Directors that require Approval/Written Responses from the Board of Commissioners relating to regulatory and compliance matters.
2. The RKAP and Management Contract (Key Performance Indicators/KPI), including any amendments proposed by the Board of Directors.
3. Complaint reports submitted by Company stakeholders.
4. The internal control system implemented by the Company.
5. The effectiveness of internal and external audits.
6. Accounting policies and financial reporting systems.
7. The Company's quality and service policies.
8. The Company's level of compliance with Good Corporate Governance (GCG).
9. Management reports, Company performance related to the Management Contract (KPI), and realization of Directorate KPIs.
10. Fulfillment of resolutions and directives issued by the GMS.

Pelatihan Komite Audit

Komite Audit mengikuti program pelatihan dan pengembangan secara aktif untuk meningkatkan kapasitas, wawasan, dan kompetensi profesional. Kegiatan ini menjadi bagian dari komitmen Komite Audit untuk memperkuat peran dalam menjalankan fungsi pengawasan serta mendukung penerapan tata kelola perusahaan yang baik. Melalui pelatihan yang berkelanjutan, anggota Komite Audit diharapkan selalu mengikuti perkembangan regulasi, praktik audit, dan dinamika industri. Pada tahun 2025, Komite Audit mengikuti pelatihan Profesional Tata Kelola Risiko Berkualifikasi yang dilaksanakan pada tanggal 9 Juni 2025.

Rapat Komite Audit

Kebijakan penyelenggaraan rapat Komite Audit mengacu pada ketentuan dalam Piagam Komite Audit yang mengatur bahwa rapat dilaksanakan secara berkala, paling sedikit satu kali setiap triwulan. Selama tahun 2025, Komite Audit telah melaksanakan rapat sebanyak 4 kali. Tingkat kehadiran masing-masing anggota Komite Audit dalam rapat tersebut adalah sebagai berikut:

Audit Committee Training

The Audit Committee actively participates in training and development programs to enhance its capacity, knowledge, and professional competence. These activities form part of the Committee's commitment to strengthening its oversight role and supporting the implementation of good corporate governance. Through continuous training, Audit Committee members are expected to remain informed about regulatory developments, audit practices, and industry dynamics. In 2025, the Audit Committee participated in the Certified Risk Governance Professional training program held on June 9, 2025.

Audit Committee Meetings

The policy governing Audit Committee meetings refers to the provisions of the Audit Committee Charter, which stipulate that meetings must be held regularly, at least once every quarter. During 2025, the Audit Committee held four meetings. The attendance rates of Audit Committee members were as follows:

Frekuensi Rapat dan Tingkat Kehadiran Anggota Komite Audit
Frequency of meetings and attendance of Audit Committee members

Nama Name	Jabatan Position	Rapat Komite Manajemen Risiko Risk Management Committee Meetings		Rapat Internal Dewan Komisaris BOC Internal Meetings		Rapat Dewan Komisaris bersama Direksi Joint Meetings of BOC and BOD		RUPS GMS	
		Frekuensi Rapat Number of Meetings	Tingkat Kehadiran Attendance Rate	Frekuensi Rapat Number of Meetings	Tingkat Kehadiran Attendance Rate	Frekuensi Rapat Number of Meetings	Tingkat Kehadiran Attendance Rate	Frekuensi Rapat Number of Meetings	Tingkat Kehadiran Attendance Rate
Andriah Feby Misna	Ketua Komite Chairperson	4	100%	11	100%	12	100%	2	100%
Rahman Mulya[1]	Sekretaris merangkap Anggota Komite Secretary and Member	-	-	-	-	-	-	-	-
Yuli Fitrianingrum[2]	Sekretaris merangkap Anggota Komite Secretary and Member	4	100%	11	100%	12	100%	2	100%
Paul Kiring Kaloh	Anggota Komite Member	4	100%	11	100%	12	100%	2	100%

Katerangan:
1. Menjabat sampai dengan 2 Januari 2025
2. Menjabat sejak 2 Januari 2025

Notes:
1. Served until January 2, 2025.
2. Served from January 2, 2025.

Pelaksanaan Tugas Komite Audit

Komite Audit berperan sebagai pendukung utama dalam memperkuat fungsi pengawasan Dewan Komisaris. Komite Audit menjalankan peran tersebut melalui kegiatan penelaahan, pemantauan, dan pemberian rekomendasi sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya. Selama tahun 2025, Komite Audit telah melaksanakan tugasnya secara aktif dan independen melalui berbagai kegiatan pengawasan dan evaluasi. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Komite Audit selama tahun 2025 mencakup hal-hal sebagai berikut:

1. Melaksanakan rapat berkala Komite Audit dan mengikuti rapat-rapat Dewan Komisaris, baik berupa rapat Internal Dewan Komisaris maupun Rapat Gabungan (Koordinasi atau Konsultasi bersama Direksi) untuk membantu melakukan evaluasi dalam rangka pengawasan pelaksanaan pengurusan Perusahaan oleh Direksi PLN Energi Gas yang mencakup aspek pembahasan tugas dan kewajiban kepengurusan Perusahaan oleh Direksi serta isu-isu strategis terkait lingkungan bisnis Perusahaan;
2. Mengikuti Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS);
3. Mengkaji dan menelaah usulan Direksi terkait pemberian Keputusan/Tanggapan Tertulis atas Kewenangan Direksi yang memerlukan Persetujuan/Tanggapan Tertulis dari Dewan Komisaris yang bersifat kepatuhan terhadap peraturan dan ketentuan;
4. Melakukan penelaahan dan pengkajian atas RKAP dan Kontrak Manajemen yang diusulkan Direksi, laporan pengaduan dari *stakeholder* Perusahaan, sistem pengendalian internal yang dijalankan Perusahaan, efektivitas audit internal dan audit eksternal, sistem kebijakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan, kebijakan mutu dan pelayanan Perusahaan, tingkat kepatuhan Perusahaan terhadap GCG, laporan manajemen serta kinerja Perusahaan terkait Kontrak Manajemen (KPI) dan realisasi KPI Direktorat, serta pemenuhan arahan RUPS;
5. Mengikuti program pengembangan/peningkatan kompetensi bagi Dewan Komisaris dan Organ Pendukung (Komite) Dewan Komisaris;
6. Menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Komite Audit tahun berikutnya;
7. Membuat dan menyampaikan Laporan Kegiatan Triwulanan Komite Audit kepada Dewan Komisaris.

Implementation of Audit Committee Duties

The Audit Committee serves as a key supporting body in strengthening the oversight function of the Board of Commissioners. The Committee carries out this role through review, monitoring, and recommendation activities in accordance with its duties and responsibilities. Throughout 2025, the Audit Committee performed its duties actively and independently through various supervisory and evaluation activities. The implementation of its duties and responsibilities during 2025 included:

1. Holding regular Audit Committee meetings and attending meetings of the Board of Commissioners, including Internal Board of Commissioners Meetings and Joint Meetings (coordination or consultation meetings with the Board of Directors), to assist in evaluating the supervision of the management of PLN Energi Gas by the Board of Directors. These discussions covered the Directors' management duties and responsibilities as well as strategic issues related to the Company's business environment;
2. Attending General Meetings of Shareholders (GMS);
3. Reviewing proposals submitted by the Board of Directors regarding Written Decisions/ Responses on matters under the authority of the Board of Directors that require Approval/Written Responses from the Board of Commissioners relating to regulatory compliance matters;
4. Reviewing and evaluating the RKAP and Management Contract proposed by the Board of Directors, stakeholder complaint reports, the Company's internal control system, the effectiveness of internal and external audits, accounting policies and financial reporting systems, quality and service policies, the Company's level of GCG compliance, management reports and Company performance related to the Management Contract (KPI) and Directorate KPI realization, as well as compliance with GMS directives;
5. Participating in competency development and enhancement programs for the Board of Commissioners and its supporting organs (Committees);
6. Preparing the Audit Committee Work Plan and Budget for the following year; and
7. Preparing and submitting Quarterly Activity Reports of the Audit Committee to the Board of Commissioners.

Komite Nominasi & Remunerasi dan Komite Manajemen Risiko
Nomination & Remuneration Committee and Risk Management Committee

Komite Nominasi & Remunerasi dan Komite Manajemen Risiko merupakan organ pendukung Dewan Komisaris yang dibentuk untuk membantu pelaksanaan fungsi pengawasan dan pemberian rekomendasi. Komite ini berperan dalam bidang nominasi, remunerasi, serta pengelolaan risiko di Perusahaan. Keberadaan komite ini menunjukkan komitmen Dewan Komisaris untuk memastikan pengelolaan risiko serta pengaturan nominasi dan remunerasi oleh Direksi berjalan dengan baik, terarah, dan sesuai dengan prinsip tata kelola perusahaan yang baik. Dalam menjalankan tugasnya, Komite Nominasi & Remunerasi dan Komite Manajemen Risiko bekerja secara kolektif, profesional, dan independen. Komite melakukan evaluasi terhadap kebijakan dan pelaksanaan manajemen risiko, serta memberikan masukan terkait sistem pengelolaan risiko dan kebijakan nominasi serta remunerasi. Komite juga memastikan proses identifikasi dan pengendalian risiko dilakukan secara berkelanjutan untuk mendukung kinerja Perusahaan.

The Nomination & Remuneration Committee and the Risk Management Committee are supporting organs of the Board of Commissioners established to assist in the implementation of supervisory functions and the provision of recommendations. These Committees play roles in the areas of nomination, remuneration, and risk management within the Company. The existence of these Committees reflects the Board of Commissioners' commitment to ensuring that risk management as well as nomination and remuneration arrangements for the Board of Directors are implemented properly, systematically, and in accordance with the principles of Good Corporate Governance (GCG). In carrying out their duties, the Nomination & Remuneration Committee and the Risk Management Committee operate collectively, professionally, and independently. The Committees evaluate risk management policies and their implementation, as well as provide recommendations regarding risk management systems and nomination and remuneration policies. The Committees also ensure that risk identification and control processes are conducted on an ongoing basis to support the Company's performance.

Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi serta Komite Manajemen Risiko yang berasal dari Dewan Komisaris berhenti dengan sendirinya apabila masa jabatannya sebagai anggota Dewan Komisaris berakhir. Masa jabatan kumulatif seseorang sebagai anggota Komite Nominasi dan Remunerasi atau nama lain dengan fungsi yang sama pada satu Perusahaan paling lama 5 (lima) tahun. Sementara itu, masa jabatan anggota Komite Nominasi dan Remunerasi serta Komite Manajemen Risiko yang bukan berasal dari Dewan Komisaris Perusahaan paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan paling lama 2 (dua) tahun, tanpa mengurangi hak Dewan Komisaris Perusahaan untuk memberhentikan sewaktu-waktu.

Members of the Nomination & Remuneration Committee and the Risk Management Committee who originate from the Board of Commissioners shall automatically cease to serve upon the expiration of their tenure as members of the Board of Commissioners. The cumulative term of office of an individual as a member of the Nomination & Remuneration Committee, or any committee with an equivalent function within a Company, shall not exceed 5 (five) years. Meanwhile, members of the Nomination & Remuneration Committee and the Risk Management Committee who are not members of the Board of Commissioners may serve for a maximum term of 3 (three) years and may be reappointed for 1 (one) additional term of up to 2 (two) years, without prejudice to the right of the Board of Commissioners to dismiss them at any time.

Keanggotaan Komite Nominasi & Remunerasi dan Komite Manajemen Risiko

Komite Nominasi & Remunerasi dan Komite Manajemen Risiko paling sedikit terdiri dari 2 (dua) orang yang terdiri dari Ketua dan Anggota. Ketua Komite Nominasi & Remunerasi dan Komite Manajemen Risiko merupakan anggota Dewan

Membership of the Nomination & Remuneration Committee and Risk Management Committee

The Nomination & Remuneration Committee and the Risk Management Committee shall consist of at least 2 (two) members, comprising a Chairperson and Members. The Chairperson of the Nomination & Remuneration Committee and the Risk Management

Komite Nominasi & Remunerasi dan Komite Manajemen Risiko
Nomination & Remuneration Committee and Risk Management Committee

Komisaris. Anggota Komite Nominasi & Remunerasi dan Komite Manajemen Risiko dapat berasal dari Dewan Komisaris atau dari luar Perusahaan. Anggota Komite Nominasi & Remunerasi dan Komite Manajemen Risiko yang bukan berasal dari anggota Dewan Komisaris berjumlah paling banyak 2 (dua) orang.

Committee shall be a member of the Board of Commissioners. Members of the Committees may originate from the Board of Commissioners or from outside the Company. Members who are not members of the Board of Commissioners shall not exceed 2 (two) persons.

Susunan Komite Manajemen Risiko tahun 2025 ditetapkan berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris PT PLN Energi Gas Nomor: 009.K/DEKOM/PLNEG/2024 tanggal 30 Juni 2024 tentang Perpanjangan Masa Kerja dan Penetapan Kembali Komite Manajemen Risiko Dewan Komisaris PT PLN Energi Gas, dengan susunan keanggotaan Komite Manajemen Risiko sebagai berikut:

The composition of the Risk Management Committee in 2025 was established pursuant to the Board of Commissioners Decree of PT PLN Energi Gas Number: 009.K/DEKOM/PLNEG/2024 dated June 30, 2024 concerning the Extension of Term of Office and Reappointment of the Risk Management Committee of the Board of Commissioners of PT PLN Energi Gas, with the following composition:

- Ketua Komite : Anang Yahmadi
- Sekretaris merangkap Anggota Komite : Zulfiantora Tanjung
- Anggota Komite : Parlindungan Sihombing

Committee Chairperson: Anang Yahmadi
Secretary concurrently serving as Committee Member: Zulfiantora Tanjung
Committee Member: Parlindungan Sihombing

Pada tanggal 02 Januari 2025 diperbaharui berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris PT PLN Energi Gas Nomor: 002.K/DEKOM/PLNEG/2025 tanggal 02 Januari 2025 tentang Pemberhentian Anggota Komite Manajemen Risiko Dewan Komisaris PT PLN Energi Gas serta Pengangkatan dan Penetapan Komite Nominasi & Remunerasi dan Komite Manajemen Risiko Dewan Komisaris PT PLN Energi Gas, dengan susunan keanggotaan Komite Manajemen Risiko sebagai berikut:

Subsequently, on January 2, 2025, the composition was revised pursuant to the Board of Commissioners Decree of PT PLN Energi Gas Number: 002.K/DEKOM/PLNEG/2025 dated January 2, 2025 concerning the Dismissal of a Member of the Risk Management Committee of the Board of Commissioners of PT PLN Energi Gas and the Appointment and Determination of the Nomination & Remuneration Committee and Risk Management Committee of the Board of Commissioners of PT PLN Energi Gas, with the following composition:

- Ketua Komite : Bayu Satria Pratama
- Sekretaris merangkap Anggota Komite : Yeni Puspitasari
- Anggota Komite : Parlindungan Sihombing

Committee Chairperson: Bayu Satria Pratama
Secretary concurrently serving as Committee Member: Yeni Puspitasari
Committee Member: Parlindungan Sihombing

Profil Komite Nominasi & Remunerasi dan Komite Manajemen Risiko
Profile of the Nomination & Remuneration Committee and Risk Management Committee

Bayu Satria Pratama

Ketua Komite Nominasi & Remunerasi dan Komite Manajemen Risiko
Chairperson of the Nomination & Remuneration Committee and Risk Management Committee

Ditetapkan sebagai Ketua Komite Nominasi & Remunerasi dan Komite Manajemen Risiko terakhir kali berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris PT PLN Energi Gas Nomor: 002.K/DEKOM/PLNEG/2025 tanggal 02 Januari 2025 tentang Pemberhentian Anggota Komite Manajemen Risiko Dewan Komisaris PT PLN Energi Gas serta Pengangkatan dan Penetapan Komite Nominasi & Remunerasi dan Komite Manajemen Risiko Dewan Komisaris PT PLN Energi Gas.
Most recently appointed as Chairperson of the Nomination & Remuneration Committee and Risk Management Committee pursuant to the Board of Commissioners Decree of PT PLN Energi Gas Number: 002.K/DEKOM/PLNEG/2025 dated January 2, 2025 concerning the Dismissal of a Member of the Risk Management Committee of the Board of Commissioners of PT PLN Energi Gas and the Appointment and Determination of the Nomination & Remuneration Committee and Risk Management Committee of the Board of Commissioners of PT PLN Energi Gas.

Warga Negara Indonesia, Usia 42 tahun Per Desember 2025.
Indonesian citizen, 42 years old as of December 2025.

Periode Jabatan : Pertama
Term Period : First

Masa Jabatan : Mengikuti masa jabatan Dewan Komisaris di Perseroan.
Term of Office : Following the term of office of the Board of Commissioners of the Company

Rangkap Jabatan :
- Anggota Dewan Komisaris.
- Senior Vice President (SVP) Pengembangan Bisnis, Pemasaran, dan Perencanaan Pengadaan LNG di PT PLN Energi Primer Indonesia.

Concurrent Positions :
- Member of the Board of Commissioners
- Senior Vice President (SVP) of Business Development, Marketing, and LNG Procurement Planning

Riwayat Pendidikan
- Sarjana Teknik Kimia, Universitas Indonesia (2005);
- Magister Teknik Kimia, Universitas Indonesia (2011).

Educational Background
- Bachelor's Degree in Chemical Engineering, University of Indonesia (2005)
- Master's Degree in Chemical Engineering, University of Indonesia (2011)

Pengalaman Kerja
- Kepala Seksi pada Subdit Penyiapan Program Minyak dan Gas Bumi (2015-2017);
- Kasubdit Niaga Migas (2018–2019);
- Kasubdit Pengaturan Pemanfaatan Fasilitas BPH Migas (2019–2020);
- Koordinator Harga dan Subsidi (Plt Koordinator Niaga Migas) (2021); dan
- Koordinator Tata Kelola dan Neraca Komoditas Hilir Migas (2022–2023).

Professional Experience
- Section Head, Directorate of Oil and Gas Program Preparation (2015–2017)
- Head of Oil and Gas Commercial Sub-Directorate (2018–2019)
- Head of BPH Migas Facility Utilization Regulation Sub-Directorate (2019–2020)
- Coordinator of Pricing and Subsidies (Acting Coordinator of Oil and Gas Commerce) (2021)
- Coordinator of Downstream Oil and Gas Governance and Commodity Balance (2022–2023)

Yeni Puspitasari

Sekretaris merangkap Anggota Komite Nominasi & Remunerasi dan Komite Manajemen Risiko
Secretary concurrently serving as Member of the Nomination & Remuneration Committee and Risk Management Committee

Ditetapkan sebagai Anggota Komite Nominasi & Remunerasi dan Komite Manajemen Risiko terakhir kali berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris PT PLN Energi Gas Nomor: 002.K/DEKOM/PLNEG/2025 tanggal 02 Januari 2025 tentang Pemberhentian Anggota Komite Manajemen Risiko Dewan Komisaris PT PLN Energi Gas serta Pengangkatan dan Penetapan Komite Nominasi & Remunerasi dan Komite Manajemen Risiko Dewan Komisaris PT PLN Energi Gas.
Most recently appointed as a Member of the Nomination & Remuneration Committee and Risk Management Committee pursuant to the Board of Commissioners Decree of PT PLN Energi Gas Number: 002.K/DEKOM/PLNEG/2025 dated January 2, 2025 concerning the Dismissal of a Member of the Risk Management Committee of the Board of Commissioners of PT PLN Energi Gas and the Appointment and Determination of the Nomination & Remuneration Committee and Risk Management Committee of the Board of Commissioners of PT PLN Energi Gas.

Warga Negara Indonesia, Usia 40 tahun Per Desember 2025.
Indonesian citizen, 40 years old as of December 2025.

Periode Jabatan : Pertama
Term Period : First

Masa Jabatan : 2025 - 2028
Term of Office : 2025 - 2028

Rangkap Jabatan :
Manager Implementasi Pengendalian Kontrak Gas Pipa dan BBM PT PLN Energi Primer Indonesia (2024- saat ini).
Concurrent Positions :
Manager of Pipeline Gas and Fuel Contract Control Implementation, PT PLN Energi Primer Indonesia (2024–present)

Riwayat Pendidikan :
- Sarjana Teknik Kimia dari ITS Surabaya
- Magister Manajemen Gas dari Universitas Indonesia

Educational Background :
- Bachelor's Degree in Chemical Engineering, ITS Surabaya
- Master's Degree in Gas Management, University of Indonesia

Pengalaman Kerja :
- Inspektur Migas Pertama (2009-2014);
- Analis Kegiatan Usaha Hilir Migas (2015-2017);
- Analis Kebijakan Pertama pada Pokja Niaga Migas (2018-2019);
- Analis Kebijakan Muda pada Pokja Niaga Migas (2019-2022);
- Analis Kebijakan Muda pada Pokja Tata kelola Hilir Migas, Ditjen Migas (2022- 2023);
- Manager Pemasaran Gas Pipa dan BBM PT PLN Energi Primer Indonesia (2022 - 2024).

Professional Experience :
- Junior Oil and Gas Inspector (2009–2014)
- Analyst of Downstream Oil and Gas Business Activities (2015–2017)
- Junior Policy Analyst, Oil and Gas Commerce Working Group (2018–2019)
- Intermediate Policy Analyst, Oil and Gas Commerce Working Group (2019–2022)
- Intermediate Policy Analyst, Downstream Oil and Gas Governance Working Group, Directorate General of Oil and Gas (2022–2023)
- Manager of Pipeline Gas and Fuel Marketing, PT PLN Energi Primer Indonesia (2022–2024)

Parlindungan Sihombing

Anggota Komite Nominasi & Remunerasi dan Komite Manajemen Risiko
Member of the Nomination & Remuneration Committee and Risk Management Committee

Ditetapkan sebagai Anggota Komite Manajemen Risiko berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris PT PLN Energi Gas Nomor: 002.K/DEKOM/PLNEG/2025 tanggal 02 Januari 2025 tentang Pemberhentian Anggota Komite Manajemen Risiko Dewan Komisaris PT PLN Energi Gas serta Pengangkatan dan Penetapan Komite Nominasi & Remunerasi dan Komite Manajemen Risiko Dewan Komisaris PT PLN Energi Gas.
Appointed as a Member of the Risk Management Committee pursuant to the Board of Commissioners Decree of PT PLN Energi Gas Number: 002.K/DEKOM/PLNEG/2025 dated January 2, 2025 concerning the Dismissal of a Member of the Risk Management Committee of the Board of Commissioners of PT PLN Energi Gas and the Appointment and Determination of the Nomination & Remuneration Committee and Risk Management Committee of the Board of Commissioners of PT PLN Energi Gas.

Warga Negara Indonesia, Usia 55 tahun Per Desember 2025.
Indonesian citizen, 55 years old as of December 2025.

Periode Jabatan : Pertama
Term Period : First

Masa Jabatan : 2024-2025
Term of Office : 2024-2025

Rangkap Jabatan :
Vice President Risiko Energi Primer Dan Pembangkitan Pada Bidang Risiko Energi Primer Dan Pembangkitan Divisi Manajemen Risiko Operasi Direktorat Manajemen Risiko PT PLN (Persero) Kantor Pusat (2023 - Saat ini).
Concurrent Positions :
Vice President of Primary Energy and Generation Risk under the Primary Energy and Generation Risk Function, Operations Risk Management Division, Risk Management Directorate of PT PLN (Persero) Head Office (2023–present)

Riwayat Pendidikan :
- Sarjana Listrik dari Universitas ITM MINAESA (2001)
- Magister Energi Terbarukan bidang Sistem Tenaga Listrik, Curtin University of Technology, Western Australia (2010)

Educational Background :
- Bachelor's Degree in Electrical Engineering, ITM MINAESA University (2001)
- Master's Degree in Renewable Energy, specializing in Electrical Power Systems, Curtin University of Technology, Western Australia (2010)

Pengalaman Kerja :
- Manajer Sektor Pembangkitan Kapuas Pada Sektor Pembangkitan Kapuas PT PLN (Persero) Wilayah Kalimantan Barat (2014-2017),
- Senior Specialist II Quality Assurance (PLT Manajer Sistem Pembangkit) Pada PT PLN (Persero) Pusat Sertifikasi (2017-2018),
- Senior Engineer II Inspeksi Pembangkit (PLT Senior Manager Sistem Pembangkit) Pada Bidang Sistem Pembangkit PT PLN (Persero) Pusat Sertifikasi (2018-2023),
- Vice President Manajemen Risiko Pembangkitan Dan EBT Pada Bidang Manajemen Risiko Pembangkitan Dan EBT Divisi Manajemen Risiko Konstruksi, Pembangkitan Dan EBT Satuan Manajemen Risiko Direktorat Utama PT PLN (Persero) Kantor Pusat (2023-2024).

Professional Experience :
- Power Generation Sector Manager, Kapuas Generation Sector, PT PLN (Persero) West Kalimantan Region (2014–2017)
- Senior Specialist II Quality Assurance (Acting Generation Systems Manager), PT PLN (Persero) Certification Center (2017–2018)
- Senior Engineer II Generation Inspection (Acting Senior Manager of Generation Systems), Generation Systems Function, PT PLN (Persero) Certification Center (2018–2023)
- Vice President of Generation and Renewable Energy Risk Management, Construction, Generation and Renewable Energy Risk Management Division, Risk Management Unit, President Director Directorate, PT PLN (Persero) Head Office (2023–2024)

Independensi Komite Nominasi & Remunerasi dan Komite Manajemen Risiko

Setiap anggota Komite Nominasi & Remunerasi dan Komite Manajemen Risiko wajib menjaga independensi dengan tidak memiliki hubungan afiliasi maupun kepentingan pribadi yang dapat menimbulkan benturan kepentingan dengan Perusahaan, anak perusahaan, atau entitas afiliasi. Anggota Komite Nominasi & Remunerasi dan Komite Manajemen Risiko juga tidak diperkenankan melakukan transaksi yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan, serta wajib menghindari jabatan rangkap yang dapat memengaruhi objektivitas dan profesionalitas dalam pengambilan keputusan. Kepatuhan terhadap ketentuan ini harus dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk mendukung penerapan tata kelola perusahaan yang baik dan transparan.

Independence of the Nomination & Remuneration Committee and Risk Management Committee

Each member of the Nomination & Remuneration Committee and the Risk Management Committee is required to maintain independence by not having any affiliation or personal interest that may create a conflict of interest with the Company, its subsidiaries, or affiliated entities. Members are prohibited from engaging in transactions that may create conflicts of interest and must avoid holding concurrent positions that could affect their objectivity and professionalism in decision-making. Compliance with these provisions must be maintained in accordance with applicable laws and regulations to support the implementation of transparent and sound corporate governance.

Pernyataan Independensi Komite Manajemen Risiko
Independence Statement of the Risk Management Committee

Aspek Independensi Independence Aspect	Bayu Satria Pratama	Yeni Puspitasari	Parlindungan Sihombing
Tidak memiliki hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi dan/atau sesama anggota Komite Manajemen Risiko. No family relationship with the Board of Commissioners, Board of Directors, and/or fellow Risk Management Committee members	√	√	√
Tidak memiliki hubungan usaha baik langsung atau tidak langsung dengan usaha Perseroan. No direct or indirect business relationship with the Company's business activities	√	√	√
Tidak memiliki hubungan kepemilikan saham di Perseroan dan Anak Perusahaan. No share ownership relationship in the Company or its Subsidiaries	√	√	√
Tidak bekerja pada kantor akuntan publik, kantor konsultan hukum, atau pihak lain yang memberikan jasa audit dan non-audit atau jasa konsultasi lain kepada Perseroan sekurang-kurangnya dalam waktu 1 (satu) tahun. Has not worked for a public accounting firm, law firm, or any party providing audit, non-audit, or consulting services to the Company for at least the preceding 1 (one) year	√	√	√

Piagam Komite Nominasi & Remunerasi dan Komite Manajemen Risiko

Komite Nominasi & Remunerasi dan Komite Manajemen Risiko menjalankan tugas dan tanggung jawab berdasarkan pedoman kerja yang tercantum dalam Piagam Komite Manajemen Risiko. Piagam

Charter of the Nomination & Remuneration Committee and Risk Management Committee

The Nomination & Remuneration Committee and the Risk Management Committee carry out their duties and responsibilities based on the working guidelines set forth in the Risk Management

tersebut menjadi acuan utama dalam mendukung pelaksanaan fungsi pengawasan Dewan Komisaris. Piagam Komite Nominasi & Remunerasi dan Komite Manajemen Risiko telah disahkan oleh Dewan Komisaris pada 30 Juni 2022 dan diperbarui pada 24 Januari 2025 sebagai dasar pelaksanaan kegiatan Komite. Sebagai bentuk komitmen terhadap penerapan tata kelola perusahaan yang baik, Komite Nominasi & Remunerasi dan Komite Manajemen Risiko secara berkala melakukan peninjauan dan evaluasi terhadap isi Piagam. Hal ini dilakukan untuk memastikan substansi dan ruang lingkupnya tetap relevan, sesuai dengan kebutuhan Perusahaan, serta selaras dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Nominasi & Remunerasi dan Komite Manajemen Risiko

Komite Nominasi & Remunerasi dan Komite Manajemen Risiko memiliki peran penting dalam mendukung efektivitas fungsi pengawasan yang dijalankan oleh Dewan Komisaris. Tugas dan tanggung jawab utama terkait fungsi Komite Nominasi & Remunerasi mencakup:

1. Melakukan tinjauan secara berkala atas sistem Manajemen Talenta Perusahaan serta pengawasan dan evaluasi atas pelaksanaannya;
2. Melakukan evaluasi terhadap sistem dan prosedur pengklasifikasian Talenta yang dilakukan oleh Direksi Perusahaan;
3. Melakukan validasi dan kalibrasi atas Talenta Terseleksi (*selected talent*) untuk menghasilkan daftar Talenta Ternominasi (*nominated talent*) yang dinominasikan oleh Dewan Komisaris Perusahaan kepada RUPS;
4. Melakukan evaluasi terhadap calon wakil Perusahaan yang akan diusulkan sebagai anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris Anak Perusahaan, sebelum diajukan kepada RUPS;
5. Melakukan evaluasi atas usulan KPI individu anggota Direksi Perusahaan;
6. Menyiapkan usulan sistem evaluasi kinerja individu bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris Perusahaan;
7. Menyiapkan usulan program pengembangan

Committee Charter. The Charter serves as the primary reference in supporting the supervisory function of the Board of Commissioners. The Charter of the Nomination & Remuneration Committee and Risk Management Committee was approved by the Board of Commissioners on June 30, 2022 and updated on January 24, 2025 as the basis for the implementation of Committee activities. As part of its commitment to Good Corporate Governance, the Committees periodically review and evaluate the Charter to ensure that its substance and scope remain relevant, aligned with the Company's needs, and consistent with prevailing laws and regulations.

Duties and Responsibilities of the Nomination & Remuneration Committee and Risk Management Committee

The Nomination & Remuneration Committee and the Risk Management Committee play an important role in supporting the effectiveness of the supervisory function exercised by the Board of Commissioners. The primary duties and responsibilities relating to the Nomination & Remuneration Committee include:

1. Conducting periodic reviews of the Company's Talent Management system and monitoring and evaluating its implementation;
2. Evaluating the system and procedures for talent classification implemented by the Company's Board of Directors;
3. Conducting validation and calibration of Selected Talent to produce a list of Nominated Talent to be nominated by the Board of Commissioners to the GMS;
4. Evaluating candidates representing the Company who will be proposed as members of the Board of Directors or Board of Commissioners of Subsidiaries before submission to the GMS;
5. Evaluating proposed individual KPIs for members of the Company's Board of Directors;
6. Preparing proposals for individual performance evaluation systems for members of the Board of Directors and/or Board of Commissioners;
7. Preparing proposals for development programs

bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris Perusahaan;
8. Melakukan evaluasi atas kebijakan remunerasi bagi Pegawai yang membutuhkan persetujuan/ tanggapan dari Dewan Komisaris Perusahaan;
9. Melakukan evaluasi atas usulan Direksi Perusahaan mengenai struktur organisasi Perusahaan.

Selain itu, tugas dan tanggung jawab utama terkait Komite Manajemen Risiko mencakup:

1. Melakukan pemantauan dan penelaahan terhadap laporan Manajemen Risiko dan laporan lainnya terkait penerapan Manajemen Risiko baik Perusahaan maupun Anak Perusahaan;
2. Melakukan pemantauan dan evaluasi atas kesesuaian penerapan kebijakan dan strategi Manajemen Risiko Perusahaan dan Anak Perusahaan;
3. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris atas hal yang mendukung efektivitas penerapan Manajemen Risiko dan kesesuaian antara kebijakan Manajemen Risiko Perusahaan dan Manajemen Risiko Anak Perusahaan;
4. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan fungsi Manajemen Risiko lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan, Anggaran Dasar, dan/ atau Keputusan RUPS.

Pelatihan Komite Nominasi & Remunerasi dan Komite Manajemen Risiko

Komite Nominasi & Remunerasi dan Komite Manajemen Risiko secara aktif mengikuti program pelatihan dan pengembangan yang relevan untuk meningkatkan kapasitas, wawasan, dan kompetensi profesional. Kegiatan ini merupakan bagian dari komitmen untuk memperkuat peran Komite dalam menjalankan fungsi pengawasan yang efektif serta mendukung penerapan tata kelola perusahaan yang baik.

Melalui pelatihan yang berkelanjutan, anggota Komite Nominasi & Remunerasi dan Komite Manajemen Risiko diharapkan dapat terus mengikuti perkembangan regulasi, praktik pengelolaan risiko, serta dinamika industri. Hal ini bertujuan untuk

for members of the Board of Directors and/or Board of Commissioners;
8. Evaluating remuneration policies for Employees that require approval/response from the Company's Board of Commissioners;
9. Evaluating proposals from the Board of Directors regarding the Company's organizational structure.

In addition, the primary duties and responsibilities relating to the Risk Management Committee include:

1. Monitoring and reviewing Risk Management reports and other reports related to the implementation of Risk Management within the Company and its Subsidiaries;
2. Monitoring and evaluating the alignment of Risk Management policies and strategies implemented by the Company and its Subsidiaries;
3. Providing recommendations to the Board of Commissioners regarding matters that support the effectiveness of Risk Management implementation and the alignment between the Company's Risk Management policies and those of its Subsidiaries;
4. Monitoring and evaluating the implementation of other Risk Management functions in accordance with prevailing laws and regulations, the Articles of Association, and/or GMS resolutions.

Training of the Nomination & Remuneration Committee and Risk Management Committee

The Nomination & Remuneration Committee and the Risk Management Committee actively participate in relevant training and development programs to enhance their capacity, knowledge, and professional competencies. These activities form part of the Committees' commitment to strengthening their supervisory role and supporting the implementation of Good Corporate Governance.

Through continuous training, members of the Nomination & Remuneration Committee and the Risk Management Committee are expected to remain up to date with regulatory developments, risk management practices, and industry dynamics. This is intended

memastikan pelaksanaan pengawasan berjalan secara independen, objektif, dan berkualitas. Pada tahun 2025, Komite Nominasi & Remunerasi dan Komite Manajemen Risiko mengikuti pelatihan Profesional Tata Kelola Risiko Berkualifikasi yang dilaksanakan pada tanggal 9 Juni 2025.

to ensure that supervisory activities are carried out independently, objectively, and effectively. In 2025, the Nomination & Remuneration Committee and the Risk Management Committee participated in the Certified Risk Governance Professional training program conducted on June 9, 2025.

Rapat Komite Nominasi & Remunerasi dan Komite Manajemen Risiko

Meetings of the Nomination & Remuneration Committee and Risk Management Committee

Kebijakan penyelenggaraan rapat Komite Nominasi & Remunerasi dan Komite Manajemen Risiko merujuk pada ketentuan dalam Piagam Komite Manajemen Risiko yang menetapkan bahwa rapat dilaksanakan secara berkala, paling sedikit satu kali setiap triwulan. Sepanjang tahun 2025, Komite Nominasi & Remunerasi dan Komite Manajemen Risiko telah mengadakan sebanyak 4 (empat) kali rapat. Tingkat kehadiran masing-masing anggota Komite Nominasi & Remunerasi dan Komite Manajemen Risiko dalam rapat tersebut adalah sebagai berikut:

The policy governing meetings of the Nomination & Remuneration Committee and the Risk Management Committee refers to the provisions of the Risk Management Committee Charter, which stipulate that meetings shall be held periodically, at least once every quarter. Throughout 2025, the Nomination & Remuneration Committee and the Risk Management Committee conducted 4 (four) meetings. The attendance level of each Committee member was as follows:

Frekuensi Rapat dan Tingkat Kehadiran Angota Komite Manajemen Risiko
Meeting Frequency and Attendance of Risk Management Committee Members

Nama Name	Jabatan Position	Rapat Komite Manajemen Risiko Risk Management Committee Meetings		Rapat Internal Dewan Komisaris BOC Internal Meetings		Rapat Dewan Komisaris bersama Direksi Joint Meetings of BOC and BOD		RUPS GMS	
		Frekuensi Rapat Number of Meetings	Tingkat Kehadiran Attendance Rate	Frekuensi Rapat Number of Meetings	Tingkat Kehadiran Attendance Rate	Frekuensi Rapat Number of Meetings	Tingkat Kehadiran Attendance Rate	Frekuensi Rapat Number of Meetings	Tingkat Kehadiran Attendance Rate
Bayu Satria Pratama	Ketua Komite Chairperson	4	100%	11	100%	12	100%	2	100%
Zulfiantoro Tanjung [1]	Sekretaris merangkap Anggota Komite Secretary and Member	-	-	-	-	-	-	-	-
Yeni Puspitasari[2]	Sekretaris merangkap Anggota Komite Secretary and Member	4	100%	11	100%	12	100%	2	100%
Parlindungan Sihombing	Anggota Komite Member	4	100%	11	100%	12	100%	2	100%

Katerangan:
1. Menjabat sampai dengan 2 Januari 2025
2. Menjabat sejak 2 Januari 2025

Notes:
1. Served until January 2, 2025.
2. Served from January 2, 2025.

Pelaksanaan Tugas Komite Nominasi & Remunerasi dan Komite Manajemen Risiko

Komite Nominasi & Remunerasi dan Komite Manajemen Risiko berperan sebagai pendukung utama dalam memperkuat fungsi pengawasan Dewan Komisaris, khususnya melalui kegiatan penelaahan, pemantauan, dan pemberian rekomendasi sesuai dengan lingkup tugas dan tanggung jawabnya. Sepanjang tahun 2025, Komite Nominasi & Remunerasi dan Komite Manajemen Risiko telah melaksanakan perannya secara aktif dan independen melalui berbagai kegiatan pengawasan dan evaluasi. Adapun pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Komite Nominasi & Remunerasi dan Komite Manajemen Risiko selama tahun 2025 mencakup hal-hal sebagai berikut:

1. Melaksanakan rapat berkala Komite Nominasi & Remunerasi dan Komite Manajemen Risiko dan mengikuti rapat-rapat Dewan Komisaris, baik berupa rapat Internal Dewan Komisaris maupun Rapat Gabungan (Koordinasi atau Konsultasi bersama Direksi) untuk membantu melakukan evaluasi dalam rangka pengawasan pelaksanaan pengurusan Perusahaan oleh Direksi PLN EG yang mencakup aspek pembahasan tugas dan kewajiban kepengurusan Perusahaan oleh Direksi serta isu-isu strategis terkait lingkungan bisnis Perusahaan;
2. Mengikuti Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS);
3. Mengkaji dan menelaah usulan Direksi terkait pemberian Keputusan/Tanggapan Tertulis atas Kewenangan Direksi yang memerlukan Persetujuan/Tanggapan Tertulis dari Dewan Komisaris yang bersifat teknis;
4. Mengkaji dan menelaah program-program dan kegiatan Perusahaan;
5. Mengikuti program pengembangan/peningkatan kompetensi bagi Dewan Komisaris dan Organ Pendukung (Komite) Dewan Komisaris;
6. Menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Komite Nominasi & Remunerasi dan Komite Manajemen Risiko tahun berikutnya;
7. Membuat dan menyampaikan Laporan Kegiatan Triwulanan Komite Nominasi & Remunerasi dan Komite Manajemen Risiko kepada Dewan Komisaris.

Implementation of the Duties of the Nomination & Remuneration Committee and Risk Management Committee

The Nomination & Remuneration Committee and the Risk Management Committee serve as key supporting organs in strengthening the supervisory function of the Board of Commissioners, particularly through review, monitoring, and recommendation activities in accordance with their duties and responsibilities. Throughout 2025, the Committees carried out their roles actively and independently through various supervisory and evaluation activities. The implementation of their duties and responsibilities during 2025 included:

1. Conducting periodic meetings of the Nomination & Remuneration Committee and Risk Management Committee and attending Board of Commissioners meetings, including Internal Board of Commissioners Meetings and Joint Meetings (Coordination or Consultation Meetings with the Board of Directors), to assist in evaluating the supervision of the management of PLN Energi Gas by the Board of Directors, including discussions on management duties and responsibilities as well as strategic issues related to the Company's business environment;
2. Attending General Meetings of Shareholders (GMS);
3. Reviewing and evaluating proposals from the Board of Directors regarding Written Resolutions/ Written Responses on matters within the authority of the Board of Directors that require Approval/Written Responses from the Board of Commissioners and are technical in nature;
4. Reviewing and evaluating the Company's programs and activities;
5. Participating in competency development and enhancement programs for the Board of Commissioners and supporting organs (Committees) of the Board of Commissioners;
6. Preparing the Work Plan and Budget of the Nomination & Remuneration Committee and Risk Management Committee for the following year;
7. Preparing and submitting Quarterly Activity Reports of the Nomination & Remuneration Committee and Risk Management Committee to the Board of Commissioners.

Sekretaris Perusahaan
Corporate Secretary

Sekretaris Perusahaan memiliki peranan strategis sebagai salah satu fungsi pendukung dalam tata kelola Perusahaan. Tugas utamanya adalah menjadi penghubung *(liaison officer)* antara organ-organ Perusahaan serta memfasilitasi komunikasi antara Perusahaan dengan para pemangku kepentingan eksternal, seperti regulator, investor, dan masyarakat. Peran tersebut penting untuk menjaga kelancaran arus informasi, meningkatkan transparansi, serta memastikan kewajiban komunikasi Perusahaan dipenuhi secara tepat waktu dan akurat.

Secara struktural, Sekretaris Perusahaan berada di bawah tanggung jawab Direksi. Oleh karena itu, pengangkatan maupun pemberhentiannya dilakukan oleh Direksi dengan persetujuan terlebih dahulu dari Dewan Komisaris. Dalam menjalankan fungsinya, Sekretaris Perusahaan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama dan turut mendukung penerapan prinsip-prinsip GCG, terutama dalam aspek keterbukaan informasi, kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, serta pelaksanaan rapat-rapat Perusahaan.

The Corporate Secretary plays a strategic role as one of the supporting functions in the Company's governance structure. The primary responsibility of the Corporate Secretary is to act as the liaison officer between the Company's governing bodies and to facilitate communication between the Company and external stakeholders, including regulators, investors, and the public. This role is essential to ensure the smooth flow of information, enhance transparency, and ensure that the Company's communication obligations are fulfilled accurately and in a timely manner.

Structurally, the Corporate Secretary reports to the Board of Directors. Accordingly, the appointment and dismissal of the Corporate Secretary are carried out by the Board of Directors with the prior approval of the Board of Commissioners. In performing the role, the Corporate Secretary reports directly to the President Director and supports the implementation of GCG principles, particularly in information disclosure, compliance with applicable laws and regulations, and the administration of the Company's meetings.



Sekretaris Perusahaan
Corporate Secretary

Profil Sekretaris Perusahaan
Corporate Secretary Profile

Elok Faiqoh Saptining Ratri
Sekretaris Perusahaan **Corporate Secretary**
Ditetapkan sebagai Sekretaris Perusahaan berdasarkan Keputusan Direksi Nomor 0078.K/DIREG/2025 tetang Mutasi Jabatan tanggal 1 Agustus 2025 Appointed as Corporate Secretary pursuant to the Board of Directors Decree No. 0078.K/DIREG/2025 concerning Position Transfer on August 1, 2025.
Warga Negara Indonesia, Usia 37 tahun Per Desember 2025, Berdomisili di Jakarta Indonesian, 37 years old as of December 2025, based in Jakarta.
Riwayat Pendidikan : Sarjana Hukum dari Universitas Jenderal Soedirman (2010) Educational Background Bachelor of Laws, Jenderal Soedirman University (2010)
Pengalaman Kerja : • Manager Pelaksana Pengadaan Sub Bidang Pelaksana Pengadaan PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Lampung PT PLN (Persero) (2024- 2025) • Manager Perencana Pengadaan Sub Bidang Perencana Pengadaan PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Lampung PT PLN (Persero) (2024) • Manager Komunikasi dan TJSL Sub Bidang Komunikasi dan TJSL Bidang Keuangan, Komunikasi, dan Umum PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Lampung PT PLN (Persero) (2022-2024) • Analyst Kinerja Keuangan, Komunikasi dan Umum (PLT Manager Komunikasi dan TJSL) Sub Bidang Komunikasi dan TJSL Bidang Keuangan, Komunikasi, dan Umum PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Lampung PT PLN (Persero) (2021-2022) • Manager Bagian Keuangan dan Umum Bagian Keuangan dan Umum Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan Tanjung Karang PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Lampung PT PLN (Persero) (2021) • Manager Bagian Keuangan, SDM, dan Administrasi Bagian Keuangan, SDM dan Administrasi Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan Tanjung Karang PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Lampung PT PLN (Persero) (2020-2021) • Assistant Manager Hubungan Industrial dan Pengawasan Tenaga Kerja Bagian Hubungan Industrial dan Pengawasan Tenaga Kerja Sub Bidang Administrasi SDM Bidang Sumber Daya Manusia dan Umum PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Lampung PT PLN (Persero) (2018-2020) Professional Experience • Procurement Execution Manager, Procurement Execution Subdivision, PT PLN (Persero) Lampung Main Distribution Unit (2024–2025) • Procurement Planning Manager, Procurement Planning Subdivision, PT PLN (Persero) Lampung Main Distribution Unit (2024) • Communication and TJSL Manager, Communication and TJSL Subdivision, Finance, Communication, and General Affairs Division, PT PLN (Persero) Lampung Main Distribution Unit (2022–2024) • Financial Performance, Communication, and General Affairs Analyst (Acting Communication and TJSL Manager), Communication and TJSL Subdivision, Finance, Communication, and General Affairs Division, PT PLN (Persero) Lampung Main Distribution Unit (2021–2022) • Finance and General Affairs Manager, Finance and General Affairs Section, Tanjung Karang Customer Service Implementation Unit, PT PLN (Persero) Lampung Main Distribution Unit (2021) • Finance, Human Resources, and Administration Manager, Finance, Human Resources, and Administration Section, Tanjung Karang Customer Service Implementation Unit, PT PLN (Persero) Lampung Main Distribution Unit (2020–2021) • Assistant Manager of Industrial Relations and Labor Supervision, Industrial Relations and Labor Supervision Section, Human Resources Administration Subdivision, Human Resources and General Affairs Division, PT PLN (Persero) Lampung Main Distribution Unit (2018–2020)

Pedoman Kerja dan Tugas Tanggung Jawab Sekretaris Perusahaan

Sekretaris Perusahaan menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan mengacu pada *Board Manual* dan prosedur operasional standar (SOP) yang mengatur pelaksanaan fungsi Sekretaris Perusahaan. Dokumen tersebut menjadi pedoman utama dalam menjalankan tugas secara profesional, transparan, dan bertanggung jawab.

Tugas dan tanggung jawab Sekretaris Perusahaan mencakup berbagai hal penting untuk mendukung kinerja organisasi serta memastikan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku. Tugas Sekretaris Perusahaan meliputi:

1. Memastikan bahwa Perusahaan mematuhi peraturan tentang persyaratan keterbukaan

Corporate Secretary Work Guidelines and Duties

The Corporate Secretary carries out the duties and responsibilities by referring to the Board Manual and the Standard Operating Procedures (SOP) governing the implementation of the Corporate Secretary function. These documents serve as the primary guidelines for performing the role in a professional, transparent, and accountable manner.

The duties and responsibilities of the Corporate Secretary encompass various activities that support the Company's performance and ensure compliance with applicable laws and regulations. The duties of the Corporate Secretary include:

1. Ensuring that the Company complies with regulations concerning disclosure requirements

sejalan dengan penerapan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik;
2. Memberikan informasi yang dibutuhkan oleh Direksi dan Dewan Komisaris secara berkala dan/atau sewaktu-waktu apabila diminta;
3. Sebagai penghubung dengan pemangku kepentingan;
4. Menatausahakan serta menyimpan dokumen Perusahaan, termasuk tetapi tidak terbatas pada daftar Pemegang Saham, daftar khusus dan risalah Rapat Direksi, Rapat Dewan Komisaris dan RUPS;
5. Memberikan informasi yang materiil dan relevan kepada *stakeholder*; dan
6. Mengorganisasikan dan mengkoordinasikan Rapat Direksi, Rapat Direksi dan Dewan Komisaris, RUPS dan kegiatan lainnya dengan *stakeholder*.

in line with the implementation of Good Corporate Governance (GCG) principles;
2. Providing information required by the Board of Directors and the Board of Commissioners on a regular basis and/or whenever requested;
3. Acting as a liaison with stakeholders;
4. Administering and maintaining the Company's documents, including but not limited to the Register of Shareholders, the Special Register, and the minutes of the Board of Directors Meetings, Board of Commissioners Meetings, and General Meetings of Shareholders (GMS);
5. Providing material and relevant information to stakeholders; and
6. Organizing and coordinating the Board of Directors Meetings, Joint Meetings of the Board of Directors and the Board of Commissioners, GMS, and other activities involving stakeholders.

Pendidikan dan Pelatihan Sekretaris Perusahaan

Peningkatan kapasitas dan kompetensi merupakan hal penting untuk mendukung kinerja Sekretaris Perusahaan, khususnya dalam membantu Direksi menjalankan tugas serta mendukung penerapan tata kelola perusahaan yang baik. Selama tahun 2025, Sekretaris Perusahaan mengikuti berbagai pelatihan dan program pengembangan kompetensi untuk menambah pemahaman mengenai peraturan terbaru, meningkatkan kemampuan komunikasi dan hubungan dengan pemangku kepentingan, serta memperkuat peran dalam mendukung transparansi dan kepatuhan Perseroan. Pelatihan dan kegiatan pengembangan kompetensi yang telah diikuti antara lain sebagai berikut:

Corporate Secretary Education and Training

Capacity building and competency development are essential to support the performance of the Corporate Secretary, particularly in assisting the Board of Directors in carrying out its duties and supporting the implementation of good corporate governance. Throughout 2025, the Corporate Secretary participated in various training and competency development programs to enhance understanding of the latest regulations, strengthen communication and stakeholder engagement, and reinforce the role in supporting the Company's transparency and compliance. The training and competency development programs attended are as follows:

Program Pelatihan Fungsi Sekretaris Perusahaan
Corporate Secretary Function Training Program

No	Pelatihan Training	Tanggal Date
1.	Dasar Dasar Pelindungan Data Pribadi (PDP) Personal Data Protection (PDP) Fundamentals	5 Mei | May 2025
2.	IPMS 200 300 Aplikasi IPMS *Role Checker Approver* PLN IPMS 200/300 – IPMS Application Role Checker Approver PLN	13 Juni | June 2025
3.	Pola Kerja Normal dan Campuran (*Hybrid Working*) Normal and Hybrid Working Pattern	4 Juli | July 2025
4.	*Instructor Alignment Forum* 2025 *Workshop* Penguatan Kompetensi Instruktur dalam Sistem Pengendalian Internal Untuk Mendukung Tata Kelola dan Transformasi PLN Instructor Alignment Forum 2025: Workshop on Strengthening Instructor Competencies in Internal Control Systems to Support PLN Governance and Transformation	30 September | September 2025

Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Sekretaris Perusahaan

Sekretaris Perusahaan memiliki peran penting dalam membangun citra positif Perseroan melalui komunikasi yang efektif, terbuka, dan berkelanjutan kepada seluruh pemangku kepentingan, baik internal maupun eksternal. Peran ini mendukung peningkatan kepercayaan publik, reputasi Perseroan, serta hubungan yang baik dengan regulator, investor, media, dan masyarakat. Selama tahun 2025, Sekretaris Perusahaan telah menjalankan berbagai kegiatan komunikasi korporat yang sejalan dengan strategi Perseroan dan prinsip tata kelola perusahaan yang baik. Adapun tugas dan kegiatan utama yang dilakukan antara lain meliputi:

1. Menyelenggarakan RUPS RKAP Tahun Buku 2025 dan RUPS LPT Tahun Buku 2024;
2. Melaksanakan dokumentasi risalah RUPS, akta RUPS dan hal-hal lain yang berkenaan dengan RUPS;
3. Menyusun laporan korporat di antaranya Laporan Manajemen dan Laporan Tahunan;
4. Melaksanakan penilaian GCG tahun 2025;
5. Melaksanakan reviu berkala Pedoman Tata Laksana Kerja Dewan Komisaris dan Direksi (*Board Manual*);
6. Melakukan pengkinian informasi yang ada di dalam situs web Perusahaan.
7. Berpartisipasi dalam *non-deal roadshow*;
8. Melakukan korespondensi dengan para pemangku kepentingan;
9. Menerima kunjungan investor dan analis terkait update informasi Perusahaan periode triwulanan;
10. Mengelola hubungan dengan lembaga negara dan pemangku kepentingan lainnya.

Implementation of the Corporate Secretary's Duties and Responsibilities

The Corporate Secretary plays an important role in building the Company's positive image through effective, transparent, and continuous communication with all stakeholders, both internal and external. This role supports greater public trust, strengthens the Company's reputation, and fosters good relationships with regulators, investors, the media, and the public. Throughout 2025, the Corporate Secretary carried out various corporate communication activities aligned with the Company's strategy and the principles of good corporate governance. The key duties and activities performed include:

1. Organizing the GMS for the 2025 Corporate Work Plan and Budget (RKAP) and the GMS for the 2024 Annual Report (LPT);
2. Preparing and maintaining the documentation of GMS minutes, GMS deeds, and other documents related to the GMS;
3. Preparing corporate reports, including the Management Report and the Annual Report;
4. Conducting the 2025 GCG assessment;
5. Conducting a periodic review of the Board of Commissioners and Board of Directors Working Guidelines (Board Manual);
6. Updating information published on the Company's website;
7. Participating in non-deal roadshows;
8. Managing correspondence with stakeholders;
9. Receiving visits from investors and analysts regarding the Company's quarterly updates; and
10. Managing relationships with government institutions and other stakeholders.

Unit Audit Internal
Internal Audit Unit

Unit Audit Internal merupakan bagian dari struktur tata kelola perusahaan yang bersifat independen dan berfungsi melakukan audit secara objektif dalam mendukung pengendalian internal. Unit ini bertanggung jawab atas kegiatan audit yang mencakup pemberian keyakinan (*assurance*) dan layanan konsultasi (*consulting*) dengan tetap menjunjung profesionalisme dan integritas.

The Internal Audit Unit is an independent component of the Company's governance structure that performs objective audit activities to support the effectiveness of internal controls. The Unit is responsible for audit activities covering both assurance and consulting services while upholding professionalism and integrity.

Tujuan Unit Audit Internal adalah memberikan nilai tambah bagi Perusahaan serta mendukung pencapaian tujuan organisasi melalui peningkatan efektivitas dan efisiensi operasional. Pelaksanaan audit dilakukan secara sistematis dan terstruktur melalui evaluasi terhadap sistem pengendalian internal, manajemen risiko, dan tata kelola Perusahaan. Direktur Utama berwenang mengangkat dan memberhentikan Pimpinan Audit Internal dengan persetujuan Dewan Komisaris.

The objective of the Internal Audit Unit is to provide added value to the Company and support the achievement of organizational objectives by improving operational effectiveness and efficiency. Audit activities are conducted systematically and in a structured manner through evaluations of the internal control system, risk management, and the Company's governance practices. The President Director has the authority to appoint and dismiss the Head of Internal Audit with the approval of the Board of Commissioners.

Profil Pimpinan Unit Audit Internal
Profile of the Head of the Internal Audit Unit

Abdul Hadi
Manager Audit Internal **Internal Audit Manager**
Ditetapkan sebagai Manager Audit Internal berdasarkan Keputusan Direksi Nomor 0039.K/DIREG/2024 tetang Penetapan Jabatan tanggal 2 Mei 2024 Appointed as Internal Audit Manager pursuant to the Board of Directors Decree No. 0039.K/DIREG/2024 concerning Position Appointment on May 2, 2024.
Warga Negara Indonesia, Usia 32 tahun Per Desember 2025, Berdomisili di Bekasi, Jawa Barat. Indonesian, 32 years old as of December 2025, and based in Bekasi, West Java.
Sertifikasi : *Qualified Internal Auditor*. Certification Qualified Internal Auditor.
Riwayat Pendidikan : Sarjana Teknik Elektro dari Universitas Riau (2016) Educational Background Bachelor of Electrical Engineering, University of Riau (2016)
Pengalaman Kerja • Assistant Analyst Audit Transmisi Pada Satuan Pengawasan Intern PT PLN (Persero) (1 April 2017 - 30 September 2018), • Assistant Analyst Audit Transmisi & Distribusi Pada Satuan Pengawasan Intern PT PLN (Persero) (1 Oktober 2018 - 30 September 2020), • Assistant Officer Administrasi Pada Satuan Audit Internal PT PLN Gas & Geothermal (1 Oktober 2020 - 30 September 2023), • Assistant Officer Administrasi Pada Satuan Audit Internal PT PLN Energi Gas (1 Oktober 2023 - 30 April 2024), • Manager Audit Internal Pada PT PLN Energi Gas (1 Mei 2024 - Sekarang). Professional Experience • Assistant Analyst for Transmission Audit, Internal Supervisory Unit, PT PLN (Persero) (April 1, 2017 – September 30, 2018) • Assistant Analyst for Transmission and Distribution Audit, Internal Supervisory Unit, PT PLN (Persero) (October 1, 2018 – September 30, 2020) • Administrative Assistant Officer, Internal Audit Unit, PT PLN Gas & Geothermal (October 1, 2020 – September 30, 2023) • Administrative Assistant Officer, Internal Audit Unit, PT PLN Energi Gas (October 1, 2023 – April 30, 2024) • Internal Audit Manager, PT PLN Energi Gas (May 1, 2024 – Present)

Struktur dan Kedudukan Unit Audit Internal

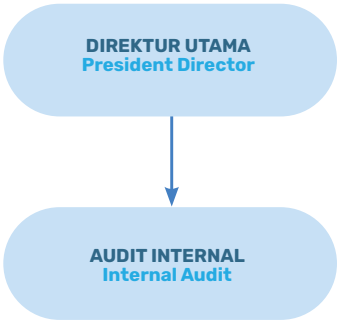
Unit Audit Internal dalam struktur organisasi berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama. Unit Audit Internal juga memiliki akses komunikasi langsung dengan Komite Audit untuk berkoordinasi serta menyampaikan informasi terkait pelaksanaan dan hasil audit. Struktur organisasi Unit Audit Internal ditetapkan melalui Peraturan Direksi tentang Organisasi dan Tata Kerja Nomor 0027.P/DIREG/2025 tanggal 1 Juli 2025.

Structure and Position of the Internal Audit Unit

Within the organizational structure, the Internal Audit Unit reports directly to and is accountable to the President Director. The Internal Audit Unit also has direct communication access to the Audit Committee to coordinate and communicate matters related to audit implementation and audit results. The organizational structure of the Internal Audit Unit was established pursuant to the Board of Directors Regulation on Organization and Work Procedures No. 0027.P/DIREG/2025 on July 1, 2025.

Struktur Organisasi Unit Audit Internal

Internal Audit Unit structure



Pedoman Unit Audit Internal

Unit Audit Internal Perusahaan menjalankan tugas dan tanggung jawab berdasarkan Piagam Pengawasan Internal Terintegrasi, yang menjadi pedoman utama dalam pelaksanaan fungsi pengawasan dan pemberian konsultasi di Perusahaan. Penetapan Piagam Pengawasan Intern Terintegrasi menunjukkan komitmen Perusahaan dalam memperkuat sistem pengawasan internal yang lebih baik serta menyesuaikan dengan perkembangan peraturan yang berlaku. Piagam ini ditetapkan pada 31 Desember 2024 melalui Keputusan Direksi Nomor 0102.K/DIREG/2024 tanggal 10 Desember 2024 sebagai perubahan atas piagam sebelumnya.

Internal Audit Unit Charter

The Company's Internal Audit Unit carries out its duties and responsibilities in accordance with the Integrated Internal Audit Charter, which serves as the primary guideline for implementing the Company's assurance and consulting functions. The adoption of the Integrated Internal Audit Charter reflects the Company's commitment to strengthening its internal control system and aligning it with the latest regulatory developments. The Charter was adopted on December 31, 2024 pursuant to Board of Directors Decree No. 0102.K/DIREG/2024 on December 10, 2024 and Board of Commissioners Letter No. 0209/STH.00.01/DEKOM/PLNEG/2024 on December 31, 2024, as an amendment to the previous charter.

Penyusunan Piagam Pengawasan Internal Terintegrasi dilakukan dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku agar pelaksanaan audit internal tetap sesuai dengan prinsip tata kelola perusahaan yang baik. Salah satu dasar yang digunakan adalah Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan BUMN.

Tugas dan Tanggung Jawab Unit Audit Internal

Unit Audit Internal Perusahaan memiliki tugas dan tanggung jawab sebagaimana diatur dalam Piagam Audit Internal, yaitu:

1. Menyusun dan menyempurnakan strategi SAI sesuai dengan visi dan misi;
2. Menyusun dan menyempurnakan Piagam Pengawasan Intern Terintegrasi/*Integrated Audit Charter* dan Pedoman RBIA, Rencana Jangka Panjang (RJP) SAI selaras dengan RJP PT PLN Energi Gas;
3. Menyusun dan menyempurnakan Program Kerja Pemeriksaan Tahunan (PKPT) Terintegrasi;
4. Melaksanakan evaluasi kualitas audit dan jasa konsultasi oleh jajaran SAI maupun pihak independen atas seluruh proses audit;
5. Melaksanakan analisis dan penyusunan laporan hasil audit bagi manajemen dan pihak eksternal, pengelolaan anggaran SAI, evaluasi dan pelaporan realisasi Program Kerja Pemeriksaan Tahunan (PKPT) Terintegrasi, Rencana Kerja Anggaran sesuai kewenangan bidang tugasnya;
6. Melaksanakan pengembangan SDM dan pengelolaan pendidikan SAI;
7. Melaksanakan koordinasi dan kerja sama di SAI maupun bidang dan unit lainnya, lembaga atau instansi/Lembaga pengawasan lainnya, guna memperlancar pencapaian target yang ditetapkan, peningkatan kinerja SAI dan Perseroan sesuai kewenangannya;
8. Memastikan sistem pengendalian internal Perseroan berjalan efisien dan efektif;
9. Melaksanakan fungsi pengawasan operasional dan audit investigasi;
10. Memberikan konsultasi atau saran perbaikan yang diperlukan manajemen; dan

The Integrated Internal Audit Charter was prepared in accordance with the prevailing laws and regulations to ensure that internal audit activities remain aligned with the principles of good corporate governance. One of the principal references is the Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises of the Republic of Indonesia No. PER-2/MBU/03/2023 concerning Guidelines for Governance and Significant Corporate Activities of State-Owned Enterprises.

Duties and Responsibilities of the Internal Audit Unit

The Company's Internal Audit Unit carries out the duties and responsibilities stipulated in the Internal Audit Charter, namely:

1. Develop and enhance the IAU strategy in line with the Company's vision and mission;
2. Develop and enhance the Integrated Internal Audit Charter, the Risk Based Internal Audit (RBIA) Guidelines, and the IAU Long-Term Plan (RJP) in alignment with the Long-Term Plan of PT PLN Energi Gas;
3. Prepare and enhance the Integrated Annual Audit Work Program (PKPT);
4. Conduct quality assessments of audit and consulting services performed by the IAU as well as by independent parties across all audit processes;
5. Conduct analyses and prepare audit reports for management and external parties, manage the IAU budget, evaluate and report the realization of the Integrated Annual Audit Work Program (PKPT), and prepare the Budget Work Plan in accordance with the Unit's authority;
6. Conduct human capital development and manage education and training programs for the IAU;
7. Coordinate and collaborate within the IAU, with other divisions and units, and with supervisory institutions or other agencies to facilitate the achievement of established targets and improve the performance of both the IAU and the Company within its authority;
8. Ensure that the Company's internal control system operates efficiently and effectively;
9. Carry out operational oversight and other audit functions;
10. Provide management with the necessary consultation and recommendations for improvement; and

11. Menindaklanjuti WBS dengan melakukan audit terhadap laporan pengaduan WBS untuk menciptakan iklim kondusif dan mendorong pelaporan terhadap hal-hal yang dapat menimbulkan kerugian finansial maupun non finansial dan citra Perseroan.

11. Follow up on Whistleblowing System (WBS) reports by conducting audits of reported complaints to foster a conducive reporting environment and encourage the reporting of matters that may result in financial or non-financial losses and damage to the Company's reputation.

Pendidikan dan Pelatihan Unit Audit Internal

Guna meningkatkan kapabilitas dan wawasan audit, personil Unit Audit Internal mengikuti berbagai pelatihan dan konferensi strategis sepanjang tahun 2025. Program pengembangan yang telah diikuti meliputi:

Internal Audit Unit Education and Training

To enhance audit capabilities and broaden professional knowledge, Internal Audit Unit personnel participated in various strategic training programs and conferences throughout 2025. The development programs attended are as follows:

Program Pelatihan Unit Audit Internal
Internal Audit Unit Training Program

No	Pelatihan Training	Tanggal Date
1.	*Fundamentals of IT Auditing Course* Fundamentals of IT Auditing Course	12 - 13 Februari | February 2025
2.	Sertifikasi *Qualified Risk Management Professional* (QRMP) Qualified Risk Management Professional (QRMP) Certification	2 - 4 Juni | June 2025
3.	*Workshop Internal Control Over Financial Reporting* (ICOFR) Internal Control Over Financial Reporting (ICOFR) Workshop	21 - 22 Mei | May 2025
4.	*Workshop* Audit Investigasi: Mengungkap Fakta Di Balik Data Investigative Audit Workshop: Uncovering the Facts Behind the Data	21 - 22 Juli | July 2025
5	Seminar Nasional Internal Audit National Internal Audit Seminar	4 - 5 Desember | December 2025





Pelaksanaan Tugas Unit Audit Internal

Sepanjang tahun 2025, Unit Audit Internal PLN EG melaksanakan audit internal sesuai dengan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) yang telah direncanakan. Untuk memastikan efektivitas pengelolaan risiko, efisiensi operasional, serta kepatuhan terhadap kebijakan dan regulasi, Perusahaan telah menyelesaikan empat audit internal yang mencakup berbagai aspek operasional dan pengendalian internal. Pelaksanaan tugas Unit Audit Internal sepanjang tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Pelaksanaan audit internal sesuai PKPT tahun 2025:
   a. Audit Operasional Infrastruktur Gas (31 Januari – 6 Maret 2025);
   b. Audit *Ad Hoc* (Implementasi ESG dan Evaluasi Rekomendasi Audit Tahun 2024) (24 April – 11 Juni 2025);
   c. Audit Sistem Pengendalian Internal dan Evaluasi Manajemen Risiko (15 Juli – 26 Agustus 2025); dan
   d. Audit Operasional Keuangan, SDM & *Enabler* (23 September – 12 November 2025).

Implementation of the Internal Audit Unit's Duties

Throughout 2025, the Internal Audit Unit of PT PLN Energi Gas carried out internal audit activities in accordance with the planned Annual Audit Work Program (PKPT). To ensure effective risk management, operational efficiency, and compliance with Company policies and applicable regulations, the Company completed four internal audits covering various operational and internal control aspects. The Internal Audit Unit's activities throughout 2025 are as follows:

1. Implementation of internal audits under the 2025 PKPT:
   a. Gas Infrastructure Operational Audit (January 31 – March 6, 2025);
   b. Ad Hoc Audit (ESG Implementation and Evaluation of 2024 Audit Recommendations) (April 24 – June 11, 2025);
   c. Internal Control System Audit and Risk Management Evaluation (July 15 – August 26, 2025); and
   d. Finance, Human Resources, and Enabler Operational Audit (September 23 – November 12, 2025).

2. Pendampingan dalam pelaksanaan audit yang dilakukan oleh SPI PT PLN (Persero) dan SPI PT PLN Energi Primer Indonesia:
   a. Audit Operasional PT PLN Energi Gas oleh SPI PT PLN Energi Primer Indonesia (14 April – 21 Mei 2025); dan
   b. Audit *End to End Security of Supply Gas* oleh SPI PT PLN (Persero) (14 Oktober – 12 Desember 2025)
3. Pelaksanaan Audit lain-lain diluar PKPT tahun 2025.
   Selain melaksanakan kegiatan audit berdasarkan PKPT tahun 2025, Unit Audit Internal PLN EG juga melaksanakan audit berdasarkan penugasan yang diberikan oleh Direksi ataupun dari Audit Internal PLN EPI Group selaku pemegang saham PLN EG sebagai berikut:
   a. Audit Internal Sistem Manajemen Mutu, Lingkungan dan K3 berdasarkan Keputusan Direksi PT PLN Energi Gas Nomor 0086.K/DIREG/2025 tanggal 15 Agustus 2025 (20 Agustus 2025 - 21 Agustus 2025);
   b. Review Manajemen Risiko PT PLN Energi Primer Indonesia Groups berdasarkan Surat Tugas Kepala Satuan Pengawasan Internal PT PLN Energi Primer Indonesia Nomor 0013.STg/SPI.01.04/PLNEPI0103/2025-R tanggal 9 Oktober 2025 (13 Oktober 2025 - 2 November 2025)
   c. Audit Internal Control Over Financial Report (ICOFR), Manajemen Risiko & Sistem Pengendalian Intern (SPIN) PT PLN Energi Primer Indonesia Group berdasarkan Keputusan Direksi PT PLN Energi Primer Indonesia Nomor 0773.K/DIRUT/2025 tanggal 25 September 2025 (17 November 2025 - 23 Desember 2025)
4. Pemantauan penyelesaian rekomendasi audit:
   Berdasarkan hasil monitoring tindak lanjut AOI dan rekomendasi audit, PLN EG telah menyelesaikan 100% dari seluruh rekomendasi yang diberikan baik oleh auditor internal maupun eksternal dengan penyelesaian sampai dengan 31 Desember 2025 yang terdiri dari 20 AOI dan 27 rekomendasi untuk audit internal dan 5 AOI dan 11 Rekomendasi untuk Audit Eksternal. Tindak lanjut AOI dan rekomendasi audit dengan target penyelesaian setelah 31 Desember 2025 dengan status open terdiri dari 4 rekomendasi untuk audit internal dan 2 rekomendasi untuk Audit Eksternal.

2. Assistance in audits conducted by the Internal Supervisory Unit (SPI) of PT PLN (Persero) and PT PLN Energi Primer Indonesia:
   a. Operational Audit of PT PLN Energi Gas conducted by the Internal Supervisory Unit of PT PLN Energi Primer Indonesia (April 14 – May 21, 2025); and
   b. End-to-End Security of Gas Supply Audit conducted by the Internal Supervisory Unit of PT PLN (Persero) (October 14 – December 12, 2025).
3. Implementation of audits outside the 2025 PKPT
   In addition to audits conducted under the 2025 PKPT, the Internal Audit Unit of PT PLN Energi Gas also carried out audits based on assignments from the Board of Directors and the Internal Audit Unit of the PLN EPI Group, as the shareholder of PT PLN Energi Gas, as follows:
   a. Internal Audit of the Quality, Environmental, and Occupational Health and Safety (OHS) Management System pursuant to PT PLN Energi Gas Board of Directors Decree No. 0086.K/DIREG/2025 on August 15, 2025 (August 20–21, 2025);
   b. Risk Management Review of the PT PLN Energi Primer Indonesia Group pursuant to Assignment Letter of the Head of the Internal Supervisory Unit of PT PLN Energi Primer Indonesia No. 0013.STg/SPI.01.04/PLNEPI0103/2025-R on October 9, 2025 (October 13 – November 2, 2025); and
   c. Internal Audit of Internal Control Over Financial Reporting (ICOFR), Risk Management, and the Internal Control System (SPIN) of the PT PLN Energi Primer Indonesia Group pursuant to PT PLN Energi Primer Indonesia Board of Directors Decree No. 0773.K/DIRUT/2025 on September 25, 2025 (November 17 – December 23, 2025).
4. Monitoring the completion of audit recommendations:
   Based on the monitoring results of follow-up actions on AOIs and audit recommendations, PT PLN Energi Gas completed 100% of all recommendations issued by both internal and external auditors as of December 31, 2025, comprising 20 AOIs and 27 recommendations from internal audits, and 5 AOIs and 11 recommendations from external audits. Follow-up actions on AOIs and audit recommendations with completion targets after December 31, 2025 that remained open consisted of 4 internal audit recommendations and 2 external audit recommendations.

Sistem Pengendalian Internal
Internal Control System

Sistem pengendalian internal yang diterapkan Perusahaan dirancang untuk memastikan bahwa seluruh aktivitas usaha, proses pengambilan keputusan, dan pelaksanaan transaksi dapat berjalan secara tepat, wajar, serta dapat dipertanggungjawabkan. Sistem ini juga menjadi fondasi penting dalam membangun operasional yang kuat dengan melibatkan seluruh unsur organisasi, mulai dari Dewan Komisaris, Direksi, manajemen, hingga karyawan.

Direksi memiliki tanggung jawab dalam menetapkan kebijakan pengendalian internal serta memastikan kepatuhan Perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sementara itu, Dewan Komisaris menjalankan fungsi pengawasan dan pemberian nasihat, khususnya terkait pelaporan keuangan dan pengelolaan risiko, dengan dukungan Komite Audit.

Keterlibatan seluruh elemen tata kelola perusahaan yang baik berperan penting dalam menjaga efektivitas dan efisiensi operasional, meningkatkan keandalan laporan keuangan, serta memastikan kepatuhan terhadap regulasi. Selain itu, sistem pengendalian internal juga berfungsi sebagai mekanisme pencegahan terhadap potensi kecurangan.

The Company's internal control system is designed to ensure that all business activities, decision-making processes, and transactions are conducted appropriately, fairly, and in a manner that can be accounted for. This system also serves as a vital foundation for building robust operations by involving all elements of the organization, from the Board of Commissioners and the Board of Directors to management and employees.

The Board of Directors is responsible for establishing internal control policies and ensuring the Company's compliance with applicable laws and regulations. Meanwhile, the Board of Commissioners performs oversight and advisory functions, particularly regarding financial reporting and risk management, with the support of the Audit Committee.

The involvement of all elements of good corporate governance plays a crucial role in maintaining operational effectiveness and efficiency, enhancing the reliability of financial statements, and ensuring regulatory compliance. Additionally, the internal control system serves as a preventive mechanism against potential fraud.

Kesesuaian Sistem Pengendalian Internal dengan Kerangka Kerja Pengendalian Internal COSO

Sistem pengendalian internal yang diterapkan Perusahaan mengacu pada standar internasional COSO (*Committee of the Sponsoring Organizations of the Treadway Commission*) – *Internal Control Integrated Framework*. COSO merupakan lembaga internasional yang mengembangkan kerangka kerja serta pedoman dalam pengelolaan risiko, pengendalian internal, dan pencegahan kecurangan (*fraud*).

Dalam implementasinya, kerangka COSO menjadi acuan utama bagi Perusahaan dalam merancang dan menjalankan sistem pengendalian internal. Standar ini pertama kali diperkenalkan pada tahun 1992 melalui *Internal Control – Integrated Framework*, kemudian disempurnakan pada tahun 2013 menjadi COSO 2013. Pembaruan tersebut dilakukan untuk menyesuaikan dengan dinamika lingkungan bisnis yang terus berkembang serta meningkatnya kebutuhan kepatuhan terhadap regulasi.

Alignment of the Internal Control System with the COSO Internal Control Framework

The internal control system implemented by the Company is based on the international COSO (Committee of the Sponsoring Organizations of the Treadway Commission) – Internal Control Integrated Framework standards. COSO is an international organization that develops frameworks and guidelines for risk management, internal control, and fraud prevention.

In its implementation, the COSO framework serves as the primary reference for the Company in designing and operating its internal control system. This standard was first introduced in 1992 through the "Internal Control – Integrated Framework," and was subsequently revised in 2013 to become COSO 2013. This update was made to align with the dynamics of the ever-evolving business environment and the increasing need for regulatory compliance.

Komponen dan Prinsip dari Kerangka Kerja Pengendalian Internal
Components and Principles of the Internal Control Framework

Komponen Pengendalian Internal Components of Internal Control	Prinsip-Prinsip dari Komponen Pengendalian Internal Principles of Internal Control Components	Implementasi di Perusahaan Implementation in the Company
Lingkungan Pengendalian Control Environment	1. Menunjukkan komitmen terhadap integritas dan nilainilai etika. 2. Melakukan pengawasan yang bertanggung jawab. 3. Menetapkan struktur, wewenang, dan tanggung jawab. 4. Menunjukkan komitmen terhadap kompetensi. 5. Menegakkan akuntabilitas. 1. Demonstrates a commitment integrity and ethical values. 2. Exercises responsible oversight. 3. Establishes structure, authority, and responsibility. 4. Demonstrates a commitment to competence. 5. Enforces accountability.	Dalam upaya meningkatkan pengendalian internal, Perusahaan mengambil langkah-langkah konkret, antara lain: 1. Menegakkan komitmen terhadap Nilai-Nilai Budaya dan Etika oleh seluruh insan Perusahaan. Hal ini menjadi landasan moral yang mendasari setiap keputusan dan tindakan yang diambil. 2. Membentuk Struktur Organisasi yang memisahkan fungsi dan tugas dari masing-masing organ Perusahaan. Dengan demikian, tercipta transparansi dan akuntabilitas yang jelas dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab. 3. Mengutamakan komitmen terhadap kompetensi. Perusahaan memastikan bahwa setiap individu yang terlibat memiliki keterampilan dan pengetahuan yang sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya, sehingga menjaga kualitas dan efektivitas operasional. 4. Mengapresiasi sikap profesionalisme dan akuntabilitas tinggi. Seluruh anggota Perusahaan diharapkan untuk bertindak secara profesional dan bertanggung jawab dalam setiap aspek kegiatan usaha, sehingga memperkuat integritas dan reputasi Perusahaan secara keseluruhan. In an effort to improve internal controls, the Company has taken concrete steps, including: 1. Upholding a commitment to Cultural Values and Ethics by all Company personnel. This serves as the moral foundation underpinning every decision and action taken. 2. Establishing an organizational structure that separates the functions and duties of each Company unit. This ensures clear transparency and accountability in the execution of duties and responsibilities. 3. Prioritizing a commitment to competence. The Company ensures that every individual involved possesses the skills and knowledge appropriate to their duties and responsibilities, thereby maintaining the quality and effectiveness of operations. 4. Valuing professionalism and a high level of accountability. All members of the Company are expected to act professionally and responsibly in every aspect of business activities, thereby strengthening the Company's overall integrity and reputation.
Penilaian Risiko Risk Assessment	1. Menentukan tujuan yang sesuai. 2. Identifikasi dan analisis risiko. 3. Penilaian risiko atas fraud. 4. Identifikasi dan analisis perubahan yang signifikan. 1. Sets appropriate objectives. 2. Identifies and analyzes risks. 3. Assesses the risk of fraud. 4. Identifies and analyzes significant changes.	Untuk mengidentifikasi dan menganalisis risiko berdasarkan dampak dan kecenderungan, Perusahaan dapat menggunakan suatu matriks risiko yang memetakan tingkat risiko pada masing-masing fungsi. Matriks tersebut dapat dibagi menjadi beberapa kategori risiko, seperti risiko operasional, keuangan, dan reputasi. Setiap kategori risiko dapat dianalisis berdasarkan dampaknya terhadap tujuan dan kinerja Perusahaan, serta kecenderungan atau probabilitas terjadinya. Dalam matriks risiko, risiko-risiko tersebut dapat diidentifikasi dan diberi bobot berdasarkan tingkat dampaknya terhadap tujuan bisnis Perusahaan dan kecenderungan terjadinya. Misalnya, risiko-risiko dengan dampak besar dan kecenderungan tinggi akan diberi prioritas lebih tinggi dalam upaya mitigasi dan pengendalian. To identify and analyze risks based on impact and likelihood, the Company may use a risk matrix that maps risk levels across each function. The matrix can be divided into several risk categories, such as operational, financial, and reputational risks. Each risk category can be analyzed based on its impact on the Company's objectives and performance, as well as its likelihood or probability of occurrence. In the risk matrix, these risks can be identified and weighted based on their level of impact on the Company's business objectives and their likelihood of occurrence. For example, risks with a high impact and high likelihood will be given higher priority in mitigation and control efforts.

Kegiatan Pengendalian Control Activities	1. Pemilihan dan pengembangan kegiatan pengendalian. 2. Pemilihan dan pengembangan pengendalian terhadap teknologi. 3. Implementasi melalui kebijakan dan prosedur. 1. Selection and development of control activities. 2. Selection and development of technology-based controls. 3. Implementation through policies and procedures.	Dalam mengelola pengendalian internal, Perusahaan melakukan langkah untuk: Memilih dan Mengembangkan Aktivitas Pengendalian: 1. Perusahaan secara cermat memilih dan mengembangkan aktivitas pengendalian yang sesuai dengan tujuan bisnis dan risiko yang dihadapi. Ini melibatkan identifikasi dan evaluasi aktivitas pengendalian yang paling efektif dalam mengurangi risiko serta melindungi aset dan reputasi Perusahaan. Aktivitas pengendalian ini dapat mencakup prosedur operasional, verifikasi, pemantauan, dan evaluasi kinerja secara teratur. 2. Menyusun Kebijakan, Prosedur, dan Petunjuk Teknis: Perusahaan menyusun kebijakan, prosedur, dan petunjuk teknis yang mendukung aktivitas pengendalian internal. Kebijakan ini mengatur standar dan prinsip-prinsip yang harus diikuti oleh seluruh anggota organisasi. Prosedur operasional yang terperinci menjelaskan langkah-langkah praktis yang harus diikuti untuk menjalankan aktivitas pengendalian. Petunjuk teknis memberikan panduan lebih spesifik atau instruksi teknis untuk menerapkan kebijakan dan prosedur secara efektif. In managing internal controls, the Company takes steps to: 1. Selecting and Developing Control Activities: The Company carefully selects and develops control activities that are appropriate for its business objectives and the risks it faces. This involves identifying and evaluating the control activities that are most effective in reducing risk and protecting the Company's assets and reputation. These control activities may include operational procedures, verification, monitoring, and regular performance evaluations. 2. Developing Policies, Procedures, and Technical Guidelines: The Company develops policies, procedures, and technical guidelines that support internal control activities. These policies establish the standards and principles that all members of the organization must follow. Detailed operational procedures outline the practical steps that must be followed to carry out control activities. Technical guidelines provide more specific guidance or technical instructions for effectively implementing policies and procedures.
Informasi dan komunikasi Information and Communication	1. Menggunakan informasi yang relevan. 2. Komunikasi secara internal. 3. Komunikasi secara eksternal. 1. Uses relevant information 2. Internal communication 3. External communication.	Dalam implementasi di Perusahaan, langkah yang dilakukan adalah: 1. Mengembangkan dan Mengontrol Sistem Akuntansi dan Komunikasi. Perusahaan memprioritaskan pengembangan dan pengendalian sistem akuntansi, informasi, dan komunikasi, baik secara internal maupun eksternal. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa informasi yang dihasilkan relevan, akurat, dan dapat dipercaya. 2. Menerapkan Sistem Informasi dan Komunikasi yang Relevan dan Terpercaya. Perusahaan menerapkan sistem informasi dan komunikasi yang relevan, terpercaya, tepat waktu, dan konsisten. Tujuannya adalah untuk memberikan informasi kepada seluruh stakeholders, baik internal maupun eksternal, sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan. In the Company's implementation, the steps taken are: 1. Developing and Controlling Accounting and Communication Systems.The company prioritizes the development and control of accounting, information, and communication systems, both internally and externally. This aims to ensure that the information produced is relevant, accurate, and reliable. 2. Implementing Relevant and Reliable Information and Communication Systems. The company implements information and communication systems that are relevant, reliable, timely, and consistent. The goal is to provide information to all stakeholders—both internal and external—in accordance with their needs and requirements.
Pemantauan Monitoring	1. Melakukan evaluasi berkelanjutan dan/atau terpisah. 2. Mengevaluasi dan mengkomunikasikan "*deficiencies*" (kelemahan). 1. Conducting ongoing and/or separate evaluations. 2. Evaluating and communicating "deficiencies" (weaknesses).	Dalam implementasinya di Perusahaan, dua langkah kunci yang diambil adalah: Melakukan Evaluasi dan Kontrol Secara Terus-Menerus. 1. Perusahaan secara berkelanjutan melakukan evaluasi dan kontrol terhadap sistem pengendalian internal yang telah diterapkan. Ini mencakup pemantauan secara teratur terhadap kinerja proses pengendalian, identifikasi potensi kelemahan atau risiko baru, serta peninjauan terhadap efektivitas langkah-langkah pengendalian yang ada. 2. Mengkomunikasikan Setiap Aspek yang Perlu Diperbaiki atau Ditingkatkan. Perusahaan memastikan komunikasi yang efektif tentang setiap aspek yang perlu diperbaiki atau ditingkatkan dalam sistem pengendalian internal. Ini melibatkan pelaporan transparan kepada pihak yang terkait, seperti manajemen senior, Dewan Komisaris, dan tim terkait lainnya, mengenai hasil evaluasi, temuan kelemahan, dan rekomendasi perbaikan. In its implementation within the Company, the two key steps taken are: 1. Conducting Continuous Evaluation and Control. The Company continuously evaluates and monitors the internal control system that has been implemented. This includes regularly monitoring the performance of control processes, identifying potential weaknesses or new risks, and reviewing the effectiveness of existing control measures. 2. Communicating Every Aspect That Needs to Be Corrected or Improved. The company ensures effective communication regarding any aspects of the internal control system that need to be corrected or improved. This involves transparent reporting to relevant parties—such as senior management, the Board of Commissioners, and other relevant teams—regarding evaluation results, identified weaknesses, and recommendations for improvement.

Pengendalian Aspek Keuangan

Aspek keuangan dalam penerapan sistem pengendalian internal Perusahaan difokuskan pada tiga tujuan utama, yaitu menjamin keakuratan dan keandalan informasi keuangan, meningkatkan efektivitas serta efisiensi pengelolaan, serta memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk mencapai tujuan tersebut, Perusahaan telah menerapkan berbagai langkah pengendalian yang dirancang secara sistematis, antara lain:

1. Pemisahan Fungsi, Tugas, dan Tanggung Jawab:
   Perusahaan memastikan adanya pemisahan yang jelas antara fungsi, tugas, dan tanggung jawab dalam organisasi. Hal ini bertujuan untuk mengurangi peluang terjadinya kesalahan atau penyimpangan akuntansi atau keuangan, serta mencegah adanya potensi konflik kepentingan yang dapat merugikan Perusahaan.
2. Pengembangan Kebijakan, Prosedur, dan Standar Akuntansi:
   Perusahaan secara berkala menyusun dan memperbarui kebijakan, prosedur, sistem operasional, dan standar akuntansi. Langkah ini membantu memastikan bahwa praktik pengelolaan keuangan Perusahaan selalu sesuai dengan perkembangan regulasi dan praktik terbaik industri.
3. Implementasi Sistem Pemantauan Berjenjang:
   Perusahaan menerapkan sistem pemantauan yang berjenjang untuk memastikan bahwa setiap transaksi keuangan telah dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Langkah ini meminimalkan risiko kesalahan atau kecurangan, serta memastikan bahwa setiap transaksi memiliki otorisasi yang tepat.
4. Penggunaan *Software* Akuntansi Terakreditasi:
   Perusahaan menggunakan *Software* akuntansi yang telah terakreditasi dan terbukti unggul. Hal ini bertujuan untuk mengurangi risiko kesalahan akibat human error dan meningkatkan akurasi serta keandalan proses pencatatan dan pelaporan keuangan.
5. Pengendalian Aset Fisik:
   Perusahaan melakukan pengendalian terhadap aset fisik melalui pengamanan, pencatatan, dokumentasi, dan pembatasan akses terhadap program aplikasi. Langkah-langkah ini membantu mencegah kerugian atau kehilangan aset yang dapat merugikan Perusahaan.

Financial Controls

The financial aspects of the Company's internal control system are focused on three main objectives: ensuring the accuracy and reliability of financial information; improving the effectiveness and efficiency of management; and ensuring compliance with applicable laws and regulations. To achieve these objectives, the Company has implemented various systematically designed control measures, including:

1. Separation of Functions, Duties, and Responsibilities: The Company ensures a clear separation of functions, duties, and responsibilities within the organization. This aims to reduce the likelihood of accounting or financial errors or irregularities, as well as prevent potential conflicts of interest that could harm the Company.
2. Development of Policies, Procedures, and Accounting Standards: The Company periodically formulates and updates policies, procedures, operational systems, and accounting standards. This measure helps ensure that the Company's financial management practices are always in line with regulatory developments and industry best practices.
3. Implementation of a Multi-Tiered Monitoring System: The company implements a multi-tiered monitoring system to ensure that every financial transaction is carried out in accordance with applicable procedures. This measure minimizes the risk of errors or fraud and ensures that every transaction has the proper authorization.
4. Use of Accredited Accounting Software: The company uses accredited accounting software that has proven to be superior. This is intended to reduce the risk of errors due to human error and improve the accuracy and reliability of financial recording and reporting processes.
5. Controls Over Physical Assets: The Company maintains controls over physical assets through security measures, record-keeping, documentation, and access restrictions to application programs. These measures help prevent asset loss or damage that could harm the Company.

6. Komite Audit:
   Komite Audit memiliki peran penting dalam mendukung efektivitas pengendalian aspek keuangan Perusahaan, khususnya dalam memastikan bahwa proses pelaporan keuangan berjalan secara akurat, transparan, dan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Komite Audit juga berfungsi memberikan telaah dan rekomendasi kepada Dewan Komisaris terkait laporan keuangan, sistem pengendalian internal, serta kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keuangan. Selain itu, Komite Audit melakukan pemantauan atas efektivitas pengendalian internal pada aspek keuangan, termasuk meninjau temuan audit internal maupun eksternal serta tindak lanjut perbaikannya. Peran ini bertujuan untuk memastikan bahwa pengelolaan keuangan Perusahaan dilaksanakan secara efektif, efisien, dan akuntabel, serta meminimalkan risiko terjadinya kesalahan maupun penyimpangan.

6. The Audit Committee:
   The Audit Committee plays a crucial role in supporting the effectiveness of the Company's financial controls, particularly in ensuring that financial reporting processes are conducted accurately, transparently, and in accordance with applicable accounting standards. The Audit Committee also reviews and provides recommendations to the Board of Commissioners regarding financial statements, internal control systems, and compliance with financial laws and regulations. In addition, the Audit Committee monitors the effectiveness of internal controls over financial matters, including reviewing the findings of internal and external audits and the follow-up actions taken to address them. This role aims to ensure that the Company's financial management is carried out effectively, efficiently, and accountably, while minimizing the risk of errors or irregularities.

Pengendalian Aspek Operasional

Pengendalian internal pada aspek operasional Perusahaan dilakukan melalui penilaian tingkat kepatuhan setiap fungsi atau unit kerja terhadap ketentuan internal yang berlaku, meliputi kebijakan, prosedur, pedoman operasional, petunjuk pelaksanaan, instruksi kerja, serta dokumen acuan lainnya. Pendekatan ini bertujuan memastikan seluruh aktivitas operasional dijalankan sesuai standar dan ketentuan yang telah ditetapkan.

Selain itu, Perusahaan secara berkala melaksanakan pemantauan dan evaluasi atas perangkat kebijakan internal. Kegiatan ini dilakukan untuk menjaga agar kebijakan dan prosedur tetap relevan, selaras dengan perubahan regulasi, serta mampu mengakomodasi dinamika bisnis yang berkembang. Hasil evaluasi tersebut digunakan sebagai dasar dalam melakukan penyesuaian maupun penyempurnaan kebijakan operasional. Perusahaan berupaya meningkatkan efektivitas dan efisiensi operasional, memperkuat tingkat kepatuhan, serta menekan potensi risiko kesalahan atau penyimpangan yang dapat berdampak pada kinerja maupun reputasi Perusahaan.

Operational Controls

Internal controls over the Company's operational aspects are implemented by assessing the level of compliance of each function or work unit with applicable internal regulations, including policies, procedures, operational guidelines, implementation guidelines, work instructions, and other reference documents. This approach aims to ensure that all operational activities are carried out in accordance with established standards and regulations.

In addition, the Company periodically monitors and evaluates its internal policies. These activities are conducted to ensure that policies and procedures remain relevant, aligned with regulatory changes, and capable of accommodating evolving business dynamics. The results of these evaluations serve as the basis for adjusting and refining operational policies. The Company strives to improve operational effectiveness and efficiency, strengthen compliance levels, and minimize the potential risks of errors or deviations that could impact the Company's performance or reputation.

Pengendalian Aspek Kepatuhan

Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan menjadi salah satu fokus utama dalam Sistem Pengendalian Internal Perusahaan. Sejalan dengan hal tersebut, Perusahaan secara berkesinambungan melakukan pemantauan serta penyesuaian terhadap setiap perubahan dan pembaruan regulasi, terutama yang terkait dengan pasar modal dan kegiatan usaha Perusahaan.

Langkah ini dilakukan untuk memastikan seluruh aktivitas Perusahaan tetap berada dalam kerangka hukum yang berlaku serta mampu merespons dinamika regulasi secara tepat waktu dan efektif. Dengan penerapan tersebut, potensi terjadinya pelanggaran peraturan dapat ditekan seminimal mungkin. Komitmen terhadap integritas dan kepatuhan pun menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari praktik bisnis Perusahaan dalam menjalankan kegiatan usahanya.

Tinjauan Atas Efektivitas Sistem Pengendalian Internal

Perusahaan telah melakukan peninjauan terhadap efektivitas Sistem Pengendalian Internal dan hasilnya menunjukkan kondisi yang baik. Proses evaluasi ini dilaksanakan oleh Satuan Audit Internal (SAI) yang bertugas menilai implementasi sistem serta tingkat kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku.

Hasil penilaian tersebut kemudian dimanfaatkan sebagai dasar untuk melakukan penguatan sistem, termasuk melalui perbaikan berkelanjutan berupa pemantauan kepatuhan terhadap regulasi dan penyempurnaan kebijakan internal. Temuan dan rekomendasi dari SAI berperan dalam mendukung peningkatan efektivitas operasional, penguatan pengelolaan risiko, serta memastikan kepatuhan terhadap praktik terbaik. Di samping itu, evaluasi ini juga memberikan identifikasi area yang masih perlu ditingkatkan, sehingga Sistem Pengendalian Internal Perusahaan dapat terus berkembang dan lebih siap menghadapi tantangan ke depan.

Compliance Controls

Compliance with laws and regulations is a key focus of the Company's Internal Control System. In line with this, the Company continuously monitors and adapts to any changes and updates in regulations, particularly those related to the capital markets and the Company's business activities.

This measure is taken to ensure that all of the Company's activities remain within the applicable legal framework and that the Company is able to respond to regulatory dynamics in a timely and effective manner. Through this implementation, the potential for regulatory violations can be minimized. A commitment to integrity and compliance is also an integral part of the Company's business practices in conducting its operations.

Review of the Effectiveness of the Internal Control System

The Company has conducted a review of the effectiveness of its Internal Control System, and the results indicate that the system is in good condition. This evaluation process was carried out by the Internal Audit Unit (SAI), which is tasked with assessing the system's implementation and the level of compliance with applicable regulations.

The results of this assessment are then used as a basis for strengthening the system, including through continuous improvement in the form of monitoring regulatory compliance and refining internal policies. The IAS's findings and recommendations play a role in supporting improved operational effectiveness, strengthening risk management, and ensuring adherence to best practices. In addition, this evaluation also identifies areas that still need improvement, so that the Company's Internal Control System can continue to evolve and be better prepared to face future challenges.

Pernyataan Direksi dan/atau Dewan Komisaris atas Kecukupan Sistem Pengendalian Internal

Hingga akhir tahun 2025, Direksi dan Dewan Komisaris menilai bahwa Sistem Pengendalian Internal Perusahaan telah berjalan secara memadai. Penilaian tersebut didasarkan pada hasil evaluasi menyeluruh, termasuk keterlibatan aktif Direksi dan Dewan Komisaris dalam pengawasan implementasi sistem, serta penguatan peran Unit Audit Internal.

Perusahaan telah menetapkan Peraturan No. 0083.P/DIRGG/2022 tentang Sistem Pengendalian Internal pada 16 November 2022. Ketentuan ini menjadi acuan utama dalam memastikan pengelolaan bisnis yang efektif, efisien, dan selaras dengan prinsip tata kelola perusahaan yang baik. Selain itu, Unit Audit Internal berperan dalam mendukung fungsi pengawasan melalui layanan assurance dan konsultasi yang independen serta objektif. Hasil audit yang dihasilkan menjadi bahan pertimbangan penting bagi manajemen dan Dewan Komisaris dalam upaya peningkatan kinerja serta penguatan pengendalian risiko.

Statement by the Board of Directors and/or Board of Commissioners on the Adequacy of the Internal Control System

As of the end of 2025, the Board of Directors and the Board of Commissioners assess that the Company's Internal Control System has been operating adequately. This assessment is based on the results of a comprehensive evaluation, including the active involvement of the Board of Directors and the Board of Commissioners in overseeing the system's implementation, as well as the strengthening of the role of the Internal Audit Unit.

The Company issued Regulation No. 0083.P/DIRGG/2022 on the Internal Control System on November 16, 2022. This regulation serves as the primary guideline for ensuring effective and efficient business management in line with the principles of good corporate governance. In addition, the Internal Audit Unit plays a role in supporting the oversight function through independent and objective assurance and consulting services. The audit results serve as an important consideration for management and the Board of Commissioners in their efforts to improve performance and strengthen risk controls.

Sistem Manajemen Risiko
Risk Management System

Sistem manajemen risiko menjadi bagian penting dalam mendukung pencapaian sasaran dan tujuan Perusahaan. Perusahaan menerapkan sistem manajemen risiko yang disusun secara terarah agar setiap potensi risiko dalam kegiatan operasional dapat dikelola dengan baik. Penerapan sistem ini dilakukan melalui proses identifikasi, analisis, pemantauan, dan pengendalian risiko secara berkelanjutan. Dengan cara ini, Perusahaan dapat mengurangi kemungkinan terjadinya gangguan terhadap kegiatan operasional maupun pencapaian kinerja. Selain itu, Perusahaan juga mendorong penerapan budaya sadar risiko di setiap level organisasi. Budaya ini diperlukan agar setiap unit kerja memiliki pemahaman dan kepedulian dalam mengelola risiko, sehingga sistem manajemen risiko dapat berjalan lebih efektif dan konsisten.

The risk management system is a crucial component in supporting the achievement of the Company's goals and objectives. The Company implements a structured risk management system, targeting every potential risk associated with operational activities, enabling effective management. The implementation of this system is carried out through the processes of identification, analysis, monitoring, and continuous risk control. In this way, the Company can reduce the chance of disruptions to operational activities and performance achievements. Additionally, the Company encourages the implementation of a risk-aware culture throughout the organization at every level. This culture is necessary so that each work unit has an understanding and concern in managing risks, allowing the risk management system to operate more effectively and consistently.

Manajemen Risiko Perusahaan

Perusahaan telah menetapkan kebijakan manajemen risiko melalui Peraturan Direksi Nomor 0008.E/DIREG/2025 tanggal 15 Agustus 2025 tentang Standar Prosedur Pedoman Umum Manajemen Risiko Terintegrasi, serta Peraturan Direksi Nomor 0460.P/DIRGG/2019 tanggal 30 Desember 2019 tentang Penerapan *Governance, Risk Management and Compliance* (GRC) di lingkungan PT PLN Gas dan Geothermal. Ketentuan tersebut masih berlaku berdasarkan Peraturan Direksi Nomor 0073.P/DIREG/2024 tentang Pemberlakuan Produk Hukum PT PLN Gas dan Geothermal pada PT PLN Energi Gas.

Direksi juga telah menetapkan fungsi yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan program manajemen risiko yang melekat pada tugas Manajer Manajemen Risiko dan Kepatuhan di bawah Divisi Pengembangan Bisnis dan Perencanaan Korporat. Selain itu, Direksi juga membentuk Tim *Risk Officer* berdasarkan Keputusan Direksi Nomor 0100.K/DIR/2025 tanggal 22 September 2025.

Company's Risk Management

The Company has determined a risk management policy through Board of Directors' Regulation Number 0008.E/DIREG/2025 dated August 15, 2025, regarding the Standard Procedure for General Guidelines on Integrated Risk Management, as well as Board of Directors' Regulation Number 0460.P/DIRGG/2019 dated December 30, 2019, regarding the Implementation of Governance, Risk Management, and Compliance (GRC) within PT PLN Gas dan Geothermal. These provisions are still in effect based on Board of Directors' Regulation Number 0073.P/DIREG/2024 regarding the Enforcement of Legal Products of PT PLN Gas dan Geothermal at PT PLN Energi Gas.

The Board of Directors additionally determined the function responsible for the risk management program, which is inherent in the duties of the Risk Management and Compliance Manager under the Business Development and Corporate Planning Division. Moreover, the Board of Directors has assembled the Risk Officer Team based on Board of Directors' Decision Number 0100.K/DIR/2025 dated September 22, 2025.

Profil dan Pengelolaan Risiko Korporat

Setelah mengidentifikasi risiko Perusahaan, PLN EG menetapkan sejumlah risiko utama yang memiliki dampak signifikan terhadap kegiatan operasional.

Corporate Risk Profile and Management

After identifying the Company's risks, PLN Energi Gas established several key risks that have a significant impact on operational activities. In

Selain risiko utama tersebut, risiko lain yang tidak termasuk dalam kategori utama tetap dikelola melalui rencana mitigasi dan dipantau secara berkelanjutan oleh setiap Divisi/Unit/Satuan. Risiko utama yang menjadi fokus Perusahaan pada tahun 2025 adalah sebagai berikut:

addition to these main risks, other risks that do not fall into the main category are still managed through mitigation plans and continuously monitored by each Division/Unit. The main risks that the Company focused on in 2025 are as follows:

No.	Deskripsi Risiko Risk Description	Mitigasi Mitigation
1	Kegagalan Penyediaan Fasilitas FSRU Sulawesi. Failure to Provide the Sulawesi FSRU Facility.	• Melakukan kajian teknis atas potensi FSRU eksisting sebagai fasilitas permanen. • Mencari FSRU pengganti dengan melakukan riset pasar LNG. • Melakukan kajian legal bersama dengan konsultan hukum atas potensi penggunaan FSRU eksisting sebagai fasilitas permanen. • Melakukan kajian kelayakan finansial, *Governance, Risk* dan *Compliance* bersama dengan BPKP. • Melakukan pendampingan hukum dan meminta Nota Pendapat dari Kejaksaan Agung. • Melakukan pengurusan perizinan secara mandiri jika dilakukan relokasi. • Penyelesaian sengketa melalui arbitrase dengan didampingi oleh konsultan hukum. • Menerapkan denda sesuai dengan ketentuan pada LOMA. • Conducting a technical assessment of the potential for the existing FSRU to serve as a permanent facility. • Identifying a replacement FSRU by conducting LNG market research. • Conducting a legal assessment in collaboration with legal consultants regarding the potential use of the existing FSRU as a permanent facility. • Conducting a financial feasibility, governance, risk, and compliance assessment in collaboration with BPKP. • Providing legal assistance and request a legal opinion from the Attorney General's Office. • Handling licensing procedures independently if relocation occurs. • Resolving disputes through arbitration with the assistance of legal consultants. • Imposing fines in accordance with the provisions of the LOMA.
2	Keterlambatan Penyelesaian Proyek Pembangunan Infrastruktur Gasifikasi Tarakan. Delays in the Completion of the Tarakan Gasification Infrastructure Project.	• Menyusun list monitoring dan melakukan penyelesaian perizinan. • Melakukan *checkpoint progress* pekerjaan secara berkala. • Melakukan percepatan pekerjaan EPC. • Percepatan pengadaan *long lead item* dengan memprioritaskan penyelesaian *detailed design* untuk *long lead item*. • Meminta penambahan tenaga kerja konstruksi kepada EPC kontraktor. • Percepatan gas in dengan metode *natural flow* (sesuai dengan kajian minimal operasi peralatan). • Mempersiapkan SDM dengan melaksanakan diklat dan sertifikasi. • Bekerjasama dengan konsultan terkait dengan konstruksi dan *commissioning*. • Menyusun SOP *commissioning* ketika *supply* gas ke pembangkit. • Compiling a monitoring list and completing licensing procedures. • Conducting periodic progress checkpoints. • Accelerating EPC work. • Accelerating the procurement of long-lead items by prioritizing the completion of detailed designs for those items. • Requesting additional construction personnel from the EPC contractor. • Accelerating gas-in using the natural flow method (according to the minimum equipment operation study). • Preparing HR by conducting training and certification. • Collaborating with consultants regarding construction and commissioning. • Developing commissioning SOPs for gas supply to the power plant.

3	Keterlambatan Penyelesaian Proyek Pembangunan Infrastruktur Gasifikasi Punagaya. Delays in the Completion of the Punagaya Gasification Infrastructure Project.	• Menyusun list monitoring dan melakukan penyelesaian perizinan. • Melakukan *checkpoint progress* pekerjaan secara berkala. • Meminta penambahan tenaga kerja konstruksi kepada EPC kontraktor. • Mempercepat penyelesaian ganti rugi petani rumput laut untuk mengurangi gangguan proses kontruksi. • Melakukan audiensi dengan Distrik Navigasi dan KSOP (KPP) sebagai upaya untuk mendapatkan rekomendasi izin penanaman pipa bawah laut. • Melakukan kontrak kerja sama PMC (*Project Management Consultant*) dan *review* DED untuk memastikan jadwal pelaksanaan pekerjaan sesuai target. • Berkolaborasi dengan UPK Punagaya dan PLN Batam untuk penyelesaian izin lingkungan dan tersus serta permasalahan masyarakat setempat. • Bekerjasama dengan konsultan lingkungan untuk memastikan seluruh persyaratan regulasi perizinan lingkungan dapat dipenuhi. • Mempersiapkan SDM dengan melaksanakan diklat dan sertifikasi. • Bekerjasama dengan konsultan terkait dengan konstruksi dan *commissioning*. • Menyusun SOP *commissioning* ketika *supply* gas ke pembangkit. • Melakukan kajian HAZID dan HAZOP. • Melakukan kontrak kerja sama PMC (*Project Management Consultant*) untuk pekerjaan konstruksi. • Compiling a monitoring list and completing licensing procedures. • Conducting periodic progress checks on the work. • Requesting additional construction workers from the EPC contractor. • Expediting the settlement of compensation for seaweed farmers to minimize disruptions to the construction process. • Holding meetings with the District Navigation Office and KSOP (KPP) to obtain recommendations for subsea pipeline installation permits. • Entering into a cooperation agreement with the PMC (Project Management Consultant) and reviewing the DED to ensure the work schedule aligns with targets. • Collaborating with UPK Punagaya and PLN Batam to resolve environmental and technical permits as well as local community issues. • Working with environmental consultants to ensure all regulatory requirements for environmental permits are met. • Preparing HR by conducting training and certification programs. • Collaborating with consultants regarding construction and commissioning. • Developing commissioning SOPs for gas supply to the power plant. • Conducting HAZID and HAZOP studies. • Entering into a cooperation agreement with the PMC (Project Management Consultant) for construction work.
4	Kegagalan Perpanjangan Persetujuan Layak Operasi (PLO) yang Masa Berlakunya Habis Pada 22 Januari 2025. Failure to Renew the Certificate of Operational Feasibility Approval (PLO).	• Perubahan skema kontraktual menjadi Perjanjian Pengangkutan Gas (PPG). • Pengajuan Hak Khusus Pipa Gas. • Pengajuan Izin Usaha Transportasi Gas Melalui Pipa. • Pengajuan Kepala Teknik dan Wakil Kepala Teknik. • Pengajuan Perpanjangan PLO. • Memastikan anggaran perpanjangan PLO tersedia. • Change in the contractual framework to a Gas Transportation Agreement (GTA). • Application for Special Rights for Gas Pipelines. • Application for a Gas Pipeline Transportation Business License. • Nomination of the Chief Engineer and Deputy Chief Engineer. • Application for a PLO Renewal. • Ensuring that the budget for the PLO renewal is available.
5	Kendala ketersedian Anggaran Investasi untuk Program Kerja RKAP 2025. Inadequate Investment Budget for the 2025 ABOP Program.	• Monitoring dan komunikasi berkala dengan PLN EPI untuk memastikan SHL dapat terlaksana sesuai dengan target waktu disbursement pencairan SHL. • Pengelolaan Keuangan secara efisien dengan menerapkan efisiensi biaya pada target KPI Divisi. • Mempersiapkan penggunaan dana internal untuk alokasi besarnya keterlambatan SHL. • Melakukan rekomposisi dan/atau revisi anggaran kepada Pemegang saham sehubungan dengan perubahan dari rencana RKAP 2025. • Mempersiapkan, memastikan, dan memonitor seluruh kebutuhan dokumen untuk pengajuan SHL khususnya terkait KKP (KKF), pelaksanaan GRC, persetujuan Direksi dan Dewan Komisaris, penyampaian kepada Pemegang Saham. • Menambahkan klausul perjanjian dan tata cara disbursement spesifik kepada suatu proyek berjalan. • Mengusulkan perubahan nilai Anggaran Investasi kepada Pemegang Saham dalam hal terdapat perbedaan nilai investasi saat perencanaan dan realisasi. • Regular monitoring and communication with PLN EPI to ensure that Shareholder Loans (SHL) is implemented in accordance with the SHL disbursement timeline. • Efficient financial management by implementing cost efficiencies in line with the Division's KPI targets. • Preparing the use of internal funds to cover significant SHL delays. • Conducting budget reallocation and/or revisions for shareholders in connection with changes to the 2025 ABOP plan. • Preparing, ensuring, and monitoring all necessary documentation for SHL submissions, particularly regarding the KKP (KKF), GRC implementation, Board of Directors and Board of Commissioners approvals, and submission to shareholders. • Adding specific agreement clauses and disbursement procedures to an ongoing project. • Proposing changes to the Investment Budget to Shareholders if there are discrepancies between the planned and actual investment amounts.

6	Gangguan Teknis Pada Infrastruktur Eksisting Pipa Gas Tanjung Batu. Technical Issues with the Existing Tanjung Batu Gas Pipeline Infrastructure.	• Pemeliharaan internal pipa dengan menggunakan metode *cleaning pigging* secara online tanpa menghentikan pengaliran gas ke PLTGU Tanjung Batu. • Digitalisasi pengelolaan O&M dan aset pipa gas Tanjung Batu. • Melakukan perbaikan *cathodic protection* untuk mengurangi lajunya tingkat korosi pada pipa. • Melakukan re-sertifikasi *Certificate of Inspection* (COI) pada setiap peralatan yang masa berlakunya sudah habis. • Menyediakan *sparepart* Cadangan bagi peralatan krusial dan peralatan yang memiliki probabilitas kerusakan tinggi. • Pelaksanaan tera ulang USM gas station Tanjung Batu. • Pengadaan tools preventif dan korektif. • Melakukan sertifikasi dan resertifikasi tenaga kerja O&M dan Tenaga Ahli Daya di Unit Tanjung Batu. • Internal pipeline maintenance using the online pigging method without interrupting gas flow to the Tanjung Batu CCPP. • Digitization of O&M and asset management for the Tanjung Batu gas pipeline. • Repairing cathodic protection systems to reduce the rate of corrosion in the pipelines. • Renewing the Certificate of Inspection (COI) for all equipment whose validity has expired. • Providing spare parts for critical equipment and equipment with a high probability of failure. • Re-calibration of the USM at the Tanjung Batu gas station. • Procurement of preventive and corrective tools. • Certification and recertification of O&M workforce and outsourced at the Tanjung Batu Unit.
7	Kecelakaan kerja dan/atau insiden keamanan. Occupational Accidents and/or Safety Incidents.	• Melakukan pemetaan titik koordinat lokasi pemasangan repeater untuk memperluas jangkauan sinyal di sistem pipa gas Tanjung Batu. • Menerapkan Sistem manajemen pengamanan (CCTV) pada aset yang tidak memiliki sistem pengawasan atau kehadiran personel. • Melakukan *site visit* inspeksi K3 oleh pihak manajemen dengan periode satu bulan sekali. • Penyusunan dan sosialisasi peraturan implementasi sistem pengendalian ketidaksesuaian secara digital (Inspekta). • Melaksanakan pengawasan K3 dalam kegiatan konstruksi pada proyek baru. • Mapping the coordinates of repeater installation sites to expand signal coverage in the Tanjung Batu gas pipeline system. • Implementing a security management system (CCTV) at assets that lack surveillance systems or on-site personnel. • Conducting monthly OHS site inspection visits by management. • Developing and disseminating regulations for the digital non-compliance control system (Inspekta). • Supervising OHS during construction activities on new projects.

Sepanjang tahun 2025, PLN Energi Gas melakukan pemantauan risiko sebagai bagian dari strategi manajemen untuk menjaga keberlanjutan dan keunggulan operasional. Perusahaan secara sistematis melakukan identifikasi, evaluasi, dan pengelolaan risiko pada berbagai aspek, termasuk operasional, keuangan, regulasi, dan keberlanjutan. Perusahaan menetapkan tujuh risiko utama yang telah dimitigasi hingga akhir Desember 2025.

Throughout 2025, PLN Energi Gas conducted risk monitoring as part of its management strategy to maintain sustainability and operational excellence. The Company systematically identified, evaluated, and managed risks across various aspects, including operational, financial, regulatory, and sustainability. The Company has identified seven key risks that have been mitigated by the end of December 2025.

Peta Risiko Perusahaan

Corporate Risk Map



Level Risiko Inherent | Inherent Risk Level
Level Risiko Target | Target Risk Level
Level Risiko Residual | Residual Risk Level

Tinjauan atas Efektivitas Sistem Manajemen Risiko

Pada tahun 2025, Perusahaan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap efektivitas Sistem Manajemen Risiko yang diterapkan. Evaluasi ini bertujuan untuk memastikan sistem tetap relevan dan mampu menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan bisnis serta perkembangan jenis risiko yang dihadapi. Perusahaan menilai kinerja sistem dalam proses identifikasi, analisis, dan pengelolaan risiko secara menyeluruh. Evaluasi ini juga digunakan untuk mengetahui area yang masih perlu diperbaiki agar efektivitas sistem dapat meningkat. Tinjauan atas Sistem Manajemen Risiko menjadi langkah strategis Perusahaan dalam menjaga kelangsungan operasional serta mendukung pencapaian tujuan jangka panjang.

Review on the Effectiveness of the Risk Management System

In 2025, the Company conducted a comprehensive evaluation of the effectiveness of the implemented Risk Management System. This evaluation aims to ensure that the system remains relevant and capable of adapting to changes in the business environment, as well as the development of the types of risks. The Company assesses the system's performance in the processes of comprehensive risk identification, analysis, and management. This evaluation is also used to identify areas of improvement; hence, the system's effectiveness can be enhanced. The review of the Risk Management System is a strategic step for the Company in maintaining operational continuity and supporting the achievement of long-term goals.

Pernyataan Direksi dan Dewan Komisaris atas Kecukupan Sistem Manajemen Risiko

Sistem manajemen risiko dipandang sebagai bagian penting dalam mendukung keberlangsungan usaha serta melindungi kepentingan pemangku kepentingan. Melalui pengelolaan risiko yang terstruktur, Perusahaan dapat mengantisipasi potensi kendala sekaligus mendukung pengambilan keputusan yang lebih tepat.

Perusahaan juga berkomitmen untuk terus melakukan penguatan dan penyempurnaan sistem manajemen risiko secara berkelanjutan. Langkah ini dilakukan agar sistem tetap adaptif terhadap perubahan serta mampu mendukung peningkatan kinerja dan daya saing Perusahaan di masa mendatang.

Direksi dan Dewan Komisaris menilai bahwa Sistem Manajemen Risiko yang diterapkan Perusahaan sepanjang tahun 2025 telah berjalan dengan baik dan cukup memadai dalam menghadapi perubahan lingkungan bisnis yang dinamis. Penilaian ini didasarkan pada hasil evaluasi dan penelaahan atas efektivitas penerapan sistem manajemen risiko di Perusahaan.

Statement of the Board of Directors and Board of Commissioners on the Adequacy of the Risk Management System

The risk management system is viewed as a crucial part of supporting business continuity and preserving stakeholder interests. Through structured risk management, the Company can anticipate potential obstacles while also supporting more accurate decision-making.

The Company is also committed to continuously strengthening and improving its risk management system sustainably. This step is taken to ensure the system remains adaptive to changes and capable of supporting the improvement of the Company's performance and competitiveness in the future.

The Board of Directors and the Board of Commissioners assess that the Risk Management System implemented by the Company throughout 2025 has been functioning satisfactorily and is sufficiently adequate in facing the dynamic changes in the business environment. This assessment is based on the results of the evaluation and review of the effectiveness of the risk management system within the Company.

Pengadaan Barang dan Jasa
Procurement of Goods and Services

Pengadaan barang dan jasa memiliki peran penting dalam menunjang kelancaran kegiatan operasional Perusahaan. Pada setiap tahap pengadaan, mulai dari perencanaan, pemilihan penyedia, hingga pelaksanaan kontrak, diterapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, kompetitif, transparan, adil, wajar, terbuka, dan akuntabel, serta senantiasa berpedoman pada ketentuan yang berlaku. Hal ini bertujuan untuk memastikan tersedianya sumber daya yang diperlukan dalam rangka mendukung pencapaian target dan tujuan Perusahaan, sekaligus mendorong efisiensi biaya, menjaga kualitas barang dan jasa, serta meminimalkan risiko operasional.

Perusahaan telah menetapkan pedoman pengadaan yang diatur melalui Peraturan Direksi No. 0003.P/DIR/2021 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa, yang kemudian diperbarui melalui Peraturan Direksi PT PLN Energi Gas Nomor 0008.P/DIR/2024 tanggal 26 Januari 2024 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa PT PLN Energi Gas. Pedoman ini mencakup berbagai aspek, antara lain organisasi pengadaan barang/jasa, ketentuan umum, perjanjian atau kontrak, administrasi dan dokumentasi, mekanisme pengendalian dan pengawasan, serta ketentuan pelaksanaan pengadaan barang/jasa.

Metode Pengadaan Barang dan Jasa

Pengadaan barang, pekerjaan konstruksi, dan jasa lainnya di Perusahaan dilaksanakan melalui berbagai metode, antara lain *e-purchasing*, pengadaan langsung, penunjukan langsung, penunjukan langsung dengan metode *open book*, tender terbatas, tender terbuka, tender cepat, serta *joint procurement*. Adapun pengadaan jasa konsultansi dilakukan melalui seleksi umum, seleksi terbatas, penunjukan langsung, dan pengadaan langsung. Di samping itu, pengadaan barang dan jasa juga dapat dilakukan melalui metode pengadaan khusus sesuai kebutuhan Perusahaan.

Informasi terkait pelaksanaan pengadaan beserta perkembangannya dapat diakses secara terbuka melalui situs resmi Perusahaan di www.plnenergigas.co.id. Selain itu, proses pengadaan juga difasilitasi melalui sistem elektronik PLN (*e-procurement pln*) sebagai sarana pelaksanaan pengadaan berbasis digital.

Procurement of goods and services plays an important role in supporting the smooth operation of the Company's activities. At every stage of procurement, from planning and supplier selection to contract implementation, the principles of efficiency, effectiveness, competitiveness, transparency, fairness, reasonableness, openness, and accountability are applied while consistently adhering to prevailing regulations. This is intended to ensure the availability of the resources required to support the achievement of the Company's targets and objectives, while also promoting cost efficiency, maintaining the quality of goods and services, and minimizing operational risks.

The Company has established procurement guidelines through Board of Directors Regulation No. 0003.P/DIR/2021 concerning Procurement Guidelines for Goods and Services, which were subsequently updated through PT PLN Energi Gas Board of Directors Regulation No. 0008.P/DIR/2024 dated January 26, 2024 concerning Procurement Guidelines for Goods and Services of PT PLN Energi Gas. These guidelines cover various aspects, including procurement organization, general provisions, agreements or contracts, administration and documentation, control and supervision mechanisms, and provisions governing the implementation of goods and services procurement.

Procurement Methods for Goods and Services

Procurement of goods, construction works, and other services within the Company is carried out through various methods, including e-purchasing, direct procurement, direct appointment, direct appointment using the open book method, limited tender, open tender, rapid tender, and joint procurement. Procurement of consulting services is conducted through general selection, limited selection, direct appointment, and direct procurement methods. In addition, procurement of goods and services may also be carried out through special procurement methods according to the Company's needs.

Information regarding procurement implementation and its developments can be accessed openly through the Company's official website at www.plnenergigas.co.id. In addition, procurement processes are facilitated through the PLN electronic procurement system (e-procurement PLN) as a platform for digital-based procurement activities.

Kode Etik Perusahaan
Corporate Code of Conduct

Perusahaan menegaskan komitmennya untuk membangun budaya kerja yang beretika dalam seluruh aktivitas operasional. Komitmen tersebut diwujudkan melalui penyusunan dan implementasi Kode Etik (*Code of Conduct)* yang menjadi pedoman perilaku bagi seluruh insan Perusahaan. Perusahaan memandang bahwa standar etika yang kuat merupakan fondasi penting dalam menciptakan lingkungan kerja yang harmonis, produktif, serta saling menghormati. Oleh karena itu, Kode Etik dirancang secara komprehensif dan diberlakukan di seluruh tingkatan organisasi agar nilai-nilai etika dapat terinternalisasi dalam setiap sikap, tindakan, dan pengambilan keputusan.

The Company reaffirms its commitment to building an ethical work culture across all operational activities. This commitment is realized through the development and implementation of a Code of Conduct, which serves as a behavioral guideline for all Company personnel. The Company views strong ethical standards as an essential foundation in creating a harmonious, productive, and mutually respectful working environment. Therefore, the Code of Conduct is designed comprehensively and applied across all organizational levels so that ethical values are internalized in every attitude, action, and decision-making process.

Penerapan Kode Etik tidak hanya bertujuan membentuk budaya kerja yang sehat, tetapi juga memastikan seluruh aktivitas Perusahaan dijalankan secara berintegritas, akuntabel, transparan, serta sejalan dengan prinsip efisiensi dan efektivitas pengelolaan.

The implementation of the Code of Conduct is not only intended to foster a healthy work culture but also to ensure that all Company activities are conducted with integrity, accountability, transparency, and in alignment with the principles of efficiency and effectiveness in management.

Pemberlakuan Kode Etik Bagi Direksi, Dewan Komisaris, dan Karyawan

Implementation of the Code of Conduct for the Board of Directors, Board of Commissioners, and Employees

Sebagai salah satu landasan dalam membangun budaya kerja yang beretika, Pedoman Perilaku Perusahaan menjadi acuan penting yang wajib dipahami, dihayati, dan diterapkan oleh seluruh insan Perusahaan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Pedoman ini telah ditandatangani oleh Komisaris Utama, Direktur Utama, serta seluruh karyawan pada 22 Februari 2024 sebagai bentuk komitmen bersama dalam menegakkan standar etika di setiap tingkatan organisasi.

As one of the foundations for building an ethical work culture, the Company's Code of Conduct serves as an important reference that must be understood, internalized, and applied by all Company personnel in carrying out their duties and responsibilities. This Code was signed by the President Commissioner, President Director, and all employees on 22 February 2024 as a form of collective commitment to uphold ethical standards at every level of the organization.

Dengan adanya pemahaman dan kepatuhan terhadap Pedoman Perilaku tersebut, Perusahaan berupaya membangun lingkungan kerja yang profesional, transparan, dan berkualitas, yang menjadi landasan dalam mendukung pencapaian kinerja serta tujuan Perusahaan secara berkelanjutan.

With understanding and compliance with the Code of Conduct, the Company seeks to build a professional, transparent, and high-quality working environment, which serves as a foundation to support sustainable performance achievement and the Company's objectives.

Pokok Muatan Kode Etik

Untuk memastikan relevansi terhadap perkembangan organisasi dan dinamika lingkungan bisnis, Perusahaan telah menetapkan Pedoman Perilaku pada tahun 2019 yang kemudian diperbarui pada tahun 2024. Pedoman Perilaku tersebut disusun sebagai acuan kode etik yang mengatur hubungan dan interaksi antara manajemen, karyawan, serta para pemangku kepentingan (*stakeholder*). Ketentuan di dalamnya berlandaskan nilai-nilai dan budaya Perusahaan yang dijunjung tinggi serta prinsip-prinsip tata kelola yang baik, sebagai berikut:

Key Content of the Code of Conduct

To ensure relevance to organizational development and the dynamics of the business environment, the Company established its Code of Conduct in 2019, which was subsequently updated in 2024. The Code of Conduct serves as an ethical guideline regulating relationships and interactions between management, employees, and stakeholders. The provisions are based on the Company's values and culture as well as good corporate governance principles, as follows:

Pokok Muatan Pedoman Perilaku
Key Content of the Code of Conduct

No.	Pokok Muatan Key Content
1.	Pernyataan Komitmen Direksi dan Komisaris. Statement of Commitment of the Board of Directors and Board of Commissioners
2.	Visi dan Misi Vision and Mission
3.	Tata Nilai Perusahaan Company Values
4.	Konflik Kepentingan Conflict of Interest
5.	Gratifikasi Gratification
6.	Komitmen, Kepedulian, dan Partisipasi Terhadap Pengelolaan Keselamatan, Kesehatan Kerja dan Lingkungan Commitment, Awareness, and Participation in Occupational Safety, Health, and Environmental Management
7.	Kesempatan yang Sama Mendapatkan Pekerjaan dan Promosi Equal Opportunity for Employment and Promotion
8.	Integritas Laporan Keuangan Financial Reporting Integrity
9.	Pengungkapan dan Keterbukaan Informasi Disclosure and Information Transparency
10.	*Whistleblowing System* Whistleblowing System
11.	Perlindungan Harta Perusahaan Protection of Company Assets
12.	Kegiatan Sosial dan Politik Social and Political Activities
13.	Etika Terkait dengan Stakeholder Stakeholders Ethics
14.	Mekanisme Penegakkan Pedoman Perilaku Termasuk Pelaporan Atas Pelanggaran Enforcement Mechanism of the Code of Conduct including Reporting of Violations
15.	Pelanggaran dan Sanksi Violations and Sanctions

Sosialisasi Kode Etik

Dalam rangka memperkuat implementasi standar etika di lingkungan organisasi, Perusahaan secara berkala menyelenggarakan sosialisasi Kode Etik bagi seluruh karyawan di berbagai jenjang jabatan. Kegiatan ini bertujuan untuk memperkenalkan dan menyebarluaskan Pedoman Perilaku kepada seluruh pegawai maupun pihak eksternal PLN EG, sehingga setiap individu dapat memahami serta mengimplementasikannya dalam pelaksanaan tugas sehari-hari.

Sosialisasi tersebut menjadi salah satu tahapan penting dalam penerapan Pedoman Perilaku di lingkungan Perusahaan. PLN EG berkomitmen untuk melaksanakan kegiatan sosialisasi secara efektif dan menyeluruh, sebagai berikut:

1. Melakukan sosialisasi Pedoman Perilaku kepada seluruh pegawai PLN EG dan pihak eksternal PLN EG serta melakukan penyegaran secara berkala;
2. Setiap Pegawai dapat mengakses Pedoman Perilaku melalui www.plnenergigas.co.id;
3. Setiap stakeholders dapat mengakses Pedoman Perilaku melalui www.plnenergigas.co.id;
4. Melakukan evaluasi atas pencapaian atau pemahaman kepada pegawai baik pada masa orientasi maupun masa bekerja;
5. Mengkaji secara berkala terhadap Pedoman Perilaku dalam rangka mengembangkan Pedoman Perilaku dan jika diperlukan dapat dijabarkan lebih lanjut dalam berbagai kebijakan dan Peraturan PLN EG.

Penegakan Kode Etik

Setiap pegawai yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap Pedoman Perilaku akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku di PLN EG. Jenis maupun mekanisme pemberian sanksi mengacu pada peraturan kepegawaian yang berlaku di PLN EG. Dalam hal pelaporan, penanganan, dan penegakan pelanggaran, PLN EG telah mengembangkan sistem pelaporan pelanggaran yang diatur melalui *Whistleblowing System*. Sepanjang tahun 2025, tidak terdapat laporan maupun kasus pelanggaran terhadap *Code of Conduct* yang dilakukan oleh insan Perusahaan.

Socialization of the Code of Conduct

In order to strengthen the implementation of ethical standards within the organization, the Company periodically conducts Code of Conduct socialization for all employees across various levels of position. This activity aims to introduce and disseminate the Code of Conduct to all employees as well as external parties of PLN Energi Gas, so that each individual may understand and implement it in daily work activities.

This socialization is one of the important stages in the implementation of the Code of Conduct within the Company. PLN Energi Gas is committed to conducting this activity effectively and comprehensively, as follows:

1. Conducting socialization of the Code of Conduct to all PLN Energi Gas employees and external parties, including periodic refreshment sessions;
2. Each employee may access the Code of Conduct through www.plnenergigas.co.id;
3. All stakeholders may access the Code of Conduct through www.plnenergigas.co.id;
4. Evaluating employee understanding and achievement during orientation and employment periods;
5. Periodically reviewing the Code of Conduct for development purposes and, if necessary, further elaborating it into various Company policies and regulations.

Enforcement of the Code of Conduct

Any employee proven to have violated the Code of Conduct will be subject to sanctions in accordance with applicable regulations within PLN Energi Gas. The type and mechanism of sanctions refer to the Company's employment regulations.
In terms of reporting, handling, and enforcement of violations, PLN Energi Gas has developed a violation reporting system through the Whistleblowing System. Throughout 2025, there were no reports or cases of Code of Conduct violations by Company personnel.

Kebijakan Informasi Perusahaan
Corporate Information Policy

Transparansi merupakan salah satu pilar utama dalam penerapan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG). Penerapan prinsip ini mencerminkan komitmen Perusahaan terhadap akuntabilitas, integritas, dan keterbukaan informasi kepada seluruh pemangku kepentingan. Melalui penerapan transparansi, Perusahaan berupaya memastikan bahwa setiap informasi yang bersifat publik disampaikan secara akurat, relevan, dan tepat waktu. Sebagai wujud komitmen terhadap keterbukaan informasi, Perusahaan menjamin pelaksanaan pengungkapan informasi publik dengan memperhatikan asas-asas sebagai berikut:

1. Informasi publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh masyarakat luas, kecuali informasi yang secara tegas dikecualikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Pengecualian terhadap informasi publik diterapkan secara ketat dan terbatas, hanya untuk informasi yang berpotensi mengganggu kepentingan nasional, kerahasiaan bisnis, atau hak-hak pribadi yang dilindungi hukum;
3. Informasi publik harus tersedia secara cepat, tepat waktu, dengan biaya yang terjangkau, dan melalui prosedur yang sederhana, sehingga tidak menimbulkan hambatan bagi publik dalam memperoleh informasi yang dibutuhkan;
4. Informasi yang dikecualikan bersifat rahasia, dan pengelolaannya mempertimbangkan kepatuhan terhadap hukum, perlindungan atas kepentingan umum, serta asas proporsionalitas antara manfaat pengungkapan dan potensi risiko dari keterbukaan informasi tersebut.

Untuk mendukung keterbukaan informasi, Perusahaan menyediakan akses informasi bagi pemegang saham, mitra usaha, dan pemangku kepentingan lainnya melalui situs resmi www.plnenergigas.co.id yang tersedia dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris guna menjangkau audiens yang lebih luas. Perusahaan juga menyediakan kanal khusus melalui email di alamat info@plnenergigas.co.id. Pengelolaan permintaan dan penyampaian informasi dilakukan dengan tetap memperhatikan prinsip perlindungan data, kode etik Perusahaan, serta ketentuan internal terkait kerahasiaan informasi.

Transparency is one of the main pillars in the implementation of Good Corporate Governance (GCG) principles. This principle reflects the Company's commitment to accountability, integrity, and information disclosure to all stakeholders. Through the implementation of transparency, the Company seeks to ensure that all public information is delivered accurately, relevantly, and in a timely manner. As a form of commitment to information disclosure, the Company ensures public information disclosure practices with the following principles:

1. Public information is open and accessible to the public, except for information explicitly excluded under applicable laws and regulations;
2. Exemptions from public information are applied strictly and limited to information that may affect national interests, business confidentiality, or legally protected personal rights;
3. Public information must be available quickly, in a timely manner, at an affordable cost, and through simple procedures;
4. Excluded information is confidential and managed with due regard to legal compliance, protection of public interest, and proportionality between the benefits of disclosure and its potential risks.

To support information transparency, the Company provides access to information for shareholders, business partners, and other stakeholders through the official website www.plnenergigas.co.id, available in both Indonesian and English to reach a wider audience. The Company also provides a dedicated communication channel via email at info@plnenergigas.co.id. Management of information requests and disclosures is carried out while ensuring data protection principles, the Company's code of ethics, and internal confidentiality regulations.

Selain itu, setiap pengungkapan informasi yang bersifat strategis atau sensitif hanya dapat dilakukan setelah memperoleh persetujuan dari pejabat yang berwenang, guna memastikan bahwa komunikasi eksternal berjalan sesuai dengan kebijakan kepatuhan dan tata kelola risiko Perusahaan.

In addition, any disclosure of strategic or sensitive information may only be conducted after obtaining approval from authorized officials, to ensure that external communications are aligned with compliance policies and the Company's risk governance framework.

Kebijakan Insider Trading
Insider Trading Policy

Pedoman Perilaku Perusahaan memuat ketentuan mengenai pencegahan konflik kepentingan, khususnya terkait pemanfaatan informasi internal Perusahaan untuk kepentingan pribadi maupun pihak lain. Ketentuan tersebut menjadi bagian dari upaya Perusahaan dalam menjaga integritas serta membangun budaya kerja yang profesional, etis, dan bertanggung jawab. Perusahaan juga menekankan pentingnya menjaga kerahasiaan informasi serta kepatuhan terhadap prinsip etika dalam menghadapi potensi benturan kepentingan *(conflict of interest)* maupun penyalahgunaan informasi *(insider trading)*.

The Company's Code of Conduct includes provisions on the prevention of conflicts of interest, particularly regarding the use of internal Company information for personal gain or the benefit of other parties. These provisions form part of the Company's efforts to maintain integrity and foster a professional, ethical, and responsible working culture. The Company also emphasizes the importance of confidentiality of information and compliance with ethical principles in addressing potential conflicts of interest and insider trading.

Hingga akhir tahun 2025 Perusahaan belum memiliki kebijakan khusus yang secara eksplisit mengatur mengenai *insider trading*. Hal ini sejalan dengan status Perusahaan yang bukan merupakan perusahaan terbuka (*non-public company*) dan berada dalam struktur *subholding* PLN Grup, dengan mayoritas saham dimiliki oleh PT PLN Energi Primer Indonesia. Meskipun demikian, Perusahaan tetap menerapkan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan informasi serta terus mempertimbangkan pengembangan kebijakan yang lebih spesifik sesuai dengan perkembangan regulasi dan kebutuhan tata kelola perusahaan yang baik.

As of the end of 2025, the Company has not established a specific policy explicitly regulating insider trading. This is in line with the Company's status as a non-public company and its position within the PLN Group sub-holding structure, with majority ownership held by PT PLN Energi Primer Indonesia. Nevertheless, the Company continues to apply prudential principles in information management and considers the development of more specific policies in line with regulatory developments and good corporate governance needs.

Kebijakan Pemenuhan Hak-Hak Kreditur
Creditors' Rights Fulfillment Policy

Perusahaan senantiasa memenuhi hak-hak kreditur dengan mengacu pada prinsip kehati-hatian serta ketentuan yang tercantum dalam setiap perjanjian atau kontrak yang telah disepakati. Komitmen ini diwujudkan melalui pemenuhan kewajiban keuangan secara tepat waktu dan sesuai dengan syarat yang berlaku, sebagai bagian dari upaya menjaga kepercayaan para pihak penyedia pembiayaan dan fasilitas kredit.

The Company consistently fulfills creditors' rights based on the principle of prudence and the provisions stated in each agreed contract or agreement. This commitment is implemented through timely fulfillment of financial obligations in accordance with applicable terms, as part of efforts to maintain the trust of financing providers and credit facilities.

Meskipun hingga 31 Desember 2025 Perusahaan belum menetapkan kebijakan internal khusus terkait pemenuhan hak-hak kreditur dalam bentuk dokumen tersendiri, pelaksanaan kewajiban kepada kreditur tetap menjadi bagian penting dalam pengelolaan keuangan dan risiko Perusahaan. Seluruh kewajiban tersebut dijalankan secara konsisten sesuai dengan ketentuan dalam masing-masing perjanjian yang berlaku.

Although as of 31 December 2025 the Company has not established a specific internal policy regarding the fulfillment of creditors' rights in a standalone document, the execution of obligations to creditors remains an important part of the Company's financial and risk management. All obligations are carried out consistently in accordance with the provisions of each applicable agreement.



Kebijakan Anti Korupsi
Anti-Corruption Policy

Penerapan kebijakan anti korupsi merupakan bagian dari komitmen Perusahaan dalam menjalankan kegiatan usaha yang berintegritas, transparan, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kebijakan ini menjadi pedoman bagi Perusahaan dalam membangun budaya kerja yang menjunjung tinggi etika bisnis serta menolak segala bentuk praktik korupsi, penyuapan, maupun penyalahgunaan wewenang.

The implementation of the anti-corruption policy is part of the Company's commitment to conducting business activities with integrity, transparency, and in accordance with applicable laws and regulations. This policy serves as a guideline for the Company in fostering a work culture that upholds business ethics and rejects all forms of corruption, bribery, and abuse of authority.

Sebagai bagian dari upaya tersebut, Perusahaan menerapkan standar etika dan perilaku yang wajib dipatuhi oleh seluruh karyawan maupun mitra kerja dalam menjalankan aktivitas bisnis. Perusahaan juga membangun mekanisme pengendalian dan pengawasan yang bertujuan untuk mencegah, mendeteksi, serta menindaklanjuti setiap indikasi pelanggaran yang berkaitan dengan praktik korupsi.

As part of this effort, the Company applies ethical standards and conduct that must be adhered to by all employees and business partners in carrying out business activities. The Company also establishes control and oversight mechanisms aimed at preventing, detecting, and following up on any indications of violations related to corrupt practices.

Dengan mengedepankan prinsip integritas, transparansi, dan tanggung jawab, Perusahaan berupaya menjaga kepercayaan para pemangku kepentingan sekaligus mendukung terciptanya operasional bisnis yang sehat, berkelanjutan, dan memberikan nilai tambah bagi masyarakat luas.

By prioritizing the principles of integrity, transparency, and accountability, the Company seeks to maintain stakeholder trust while supporting the creation of healthy, sustainable business operations that provide added value to society.

Pedoman Pengendalian Gratifikasi

Pengendalian gratifikasi merupakan bagian integral dari penerapan Pedoman Perilaku Perusahaan yang bertujuan untuk memastikan setiap insan Perusahaan beserta keluarganya memahami dan mematuhi kewajiban dalam menolak segala bentuk gratifikasi yang diketahui berkaitan dengan jabatan serta bertentangan dengan tugas dan tanggung jawabnya.

Gratification Control Guidelines

Gratification control is an integral part of the implementation of the Company's Code of Conduct, aimed at ensuring that all Company personnel and their families understand and comply with the obligation to refuse any form of gratification known to be related to their position and contrary to their duties and responsibilities.

Sebagai wujud implementasi komitmen tersebut, Perusahaan telah menetapkan kebijakan pengendalian gratifikasi melalui Keputusan Direksi No. 0057.K/DIRGG/2021 tentang Pembentukan Unit Pengendalian Gratifikasi yang berlaku sejak Agustus 2021. Selain itu, Perusahaan juga menerbitkan Peraturan Direksi PT PLN Energi Gas Nomor 0004.P/DIR/2024 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan PT PLN Energi Gas sebagai upaya memperkuat efektivitas pengelolaan gratifikasi. Melalui penerapan sistem pengendalian gratifikasi ini, Perusahaan terus memperkokoh nilai-nilai etika dan integritas, serta meningkatkan kepercayaan para pemangku

As a form of implementation of this commitment, the Company has established a gratification control policy through Board of Directors Decree No. 0057.K/DIRGG/2021 concerning the Establishment of the Gratification Control Unit, effective as of August 2021. In addition, the Company issued Board of Directors Regulation of PT PLN Energi Gas No. 0004.P/DIR/2024 concerning Gratification Control Guidelines within PT PLN Energi Gas as an effort to strengthen the effectiveness of gratification management. Through the implementation of this gratification control system, the Company continues to reinforce ethical values and integrity,

kepentingan. Perusahaan memastikan seluruh aktivitas operasional dijalankan secara transparan, bertanggung jawab, berintegritas, dan berkelanjutan.

Kebijakan Anti *Fraud*

Perusahaan telah mengimplementasikan kebijakan anti *Fraud* sebagai upaya sistematis dalam mencegah, mendeteksi, dan merespons potensi kecurangan di lingkungan kerja. Program ini didukung melalui penetapan Peraturan Direksi PT PLN Energi Gas Nomor 0003.P/DIR/2024 tanggal 3 Januari 2024 tentang Kebijakan Anti *Fraud*, yang menjadi landasan dalam penguatan sistem pengendalian internal.

Penerapan kebijakan tersebut merupakan bagian dari komitmen Perusahaan untuk meningkatkan kesadaran terhadap risiko kecurangan serta memperkuat budaya integritas di seluruh lini organisasi. Dengan adanya kebijakan ini, Perusahaan terus mendorong terciptanya lingkungan kerja yang lebih transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepatuhan.

Perusahaan juga menetapkan bahwa pengelolaan risiko kecurangan (*fraud risk management*) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari seluruh aktivitas operasional. Tanggung jawab atas pencegahan, deteksi, dan penanganan *fraud* tidak hanya berada pada unit tertentu, tetapi menjadi tanggung jawab bersama seluruh insan Perusahaan. Oleh karena itu, setiap karyawan diharapkan berperan aktif dalam mengidentifikasi, memitigasi, dan menangani potensi risiko kecurangan sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.

Pengelolaan Konflik Kepentingan

Sebagai bagian dari penguatan tata kelola perusahaan, Perusahaan telah menetapkan Peraturan Direksi PT PLN Energi Gas Nomor 0001.P/DIREG/2024 tentang Pengelolaan Konflik Kepentingan di Lingkungan PT PLN Energi Gas sebagai pedoman bagi seluruh insan Perusahaan dalam memahami serta memperkuat integritas dan sistem pengendalian internal. Ketentuan ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan kerja yang bebas dari praktik konflik kepentingan, korupsi, kolusi, dan nepotisme.

while enhancing stakeholder trust. The Company ensures that all operational activities are conducted in a transparent, responsible, integrity-based, and sustainable manner.

Anti-Fraud Policy

The Company has implemented an anti-fraud policy as a systematic effort to prevent, detect, and respond to potential fraud within the work environment. This program is supported by Board of Directors Regulation of PT PLN Energi Gas No. 0003.P/DIR/2024 on January 3, 2024, concerning the Anti-Fraud Policy, which serves as the foundation for strengthening the internal control system.

The implementation of this policy reflects the Company's commitment to increasing awareness of fraud risks and strengthening a culture of integrity across all organizational levels. Through this policy, the Company continues to promote a more transparent, accountable, and compliance-oriented working environment.

The Company also establishes that fraud risk management is an integral part of all operational activities. Responsibility for fraud prevention, detection, and response does not rest solely with specific units but is a shared responsibility of all Company personnel. Therefore, each employee is expected to actively participate in identifying, mitigating, and addressing potential fraud risks in accordance with their respective duties and functions.

Conflict of Interest Management

As part of strengthening corporate governance, the Company has issued Board of Directors Regulation of PT PLN Energi Gas No. 0001.P/DIREG/2024 concerning Conflict of Interest Management within PT PLN Energi Gas, serving as a guideline for all Company personnel to understand and reinforce integrity and the internal control system. This provision aims to create a working environment free from conflicts of interest, corruption, collusion, and nepotism.

Dalam pelaksanaannya, seluruh insan Perusahaan dilarang memanfaatkan jabatan maupun wewenang yang dimiliki untuk kepentingan pribadi, pihak lain, atau kelompok tertentu. Setiap insan Perusahaan juga diwajibkan untuk menghindari segala bentuk konflik kepentingan maupun potensi terjadinya konflik yang dapat merugikan kepentingan Perusahaan. Penerapan kebijakan ini diharapkan dapat mendukung terciptanya iklim usaha yang sehat, adil, dan kompetitif, serta memperkuat budaya integritas di seluruh lingkungan Perusahaan.

Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP)

Perusahaan menempatkan penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) sebagai bagian penting dalam penguatan tata kelola yang berintegritas serta upaya mitigasi risiko dan potensi kerugian yang timbul dari praktik penyuapan. Sertifikasi SMAP Perusahaan telah diperoleh pada 26 April 2022 dan berlaku hingga 26 April 2025.

Implementasi ini selaras dengan arahan Menteri BUMN melalui Surat No. S35/MBU/01/2020 tentang Implementasi SMAP di BUMN yang diperkuat dengan Surat No. S-17/S.MBU/02/2020 tanggal 17 Februari 2020, yang mewajibkan BUMN untuk mengembangkan, menerapkan, serta memperoleh sertifikasi SNI ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan. Penerapan SMAP juga menjadi bentuk kepatuhan Perusahaan terhadap Peraturan Mahkamah Agung No. 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi oleh Korporasi.

Dalam rangka mendukung implementasi tersebut, struktur organisasi Tim Penerapan SMAP ditetapkan melalui Keputusan Direksi PT PLN Energi Gas Nomor 0042.K/DIREG/2024 tentang Pembentukan Sistem Manajemen Terintegrasi yang mencakup Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015, Sistem Manajemen Lingkungan ISO 14001:2015, Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja PP 50 Tahun 2012, serta Sistem Manajemen Anti Penyuapan ISO 37001:2016, tertanggal 08 Mei 2024. Sebagai bentuk komitmen bersama, pada 22 Februari 2024 juga telah dilakukan penandatanganan komitmen implementasi SMAP oleh Dewan Komisaris, Direksi, organ pendukung Dewan Komisaris, manajemen, dan seluruh karyawan.

In its implementation, all Company personnel are prohibited from using their position or authority for personal gain, the benefit of others, or specific groups. All personnel are also required to avoid any form of conflict of interest or potential conflicts that may harm the interests of the Company. The implementation of this policy is expected to support the creation of a healthy, fair, and competitive business environment, as well as to strengthen a culture of integrity throughout the Company.

Anti-Bribery Management System (ABMS)

The Company places the implementation of the Anti-Bribery Management System (ABMS) as an important component in strengthening integrity-based governance and mitigating risks and potential losses arising from bribery practices. The Company obtained ABMS certification on 26 April 2022, valid until 26 April 2025.

This implementation is aligned with the directive of the Minister of State-Owned Enterprises through Letter No. S-35/MBU/01/2020 concerning the Implementation of ABMS in SOEs, further strengthened by Letter No. S-17/S.MBU/02/2020 on February 17, 2020, which requires SOEs to develop, implement, and obtain certification of SNI ISO 37001:2016 Anti-Bribery Management Systems. The implementation of ABMS also reflects the Company's compliance with Supreme Court Regulation No. 13 of 2016 concerning Procedures for Handling Corporate Criminal Cases of Corruption.

To support this implementation, the organizational structure of the ABMS Implementation Team was established through Board of Directors Decree of PT PLN Energi Gas No. 0042.K/DIREG/2024 concerning the Establishment of an Integrated Management System, which covers ISO 9001:2015 Quality Management System, ISO 14001:2015 Environmental Management System, Government Regulation No. 50 of 2012 Occupational Health and Safety Management System, and ISO 37001:2016 Anti-Bribery Management System, on May 8, 2024. As a form of collective commitment, a signing of ABMS implementation commitment was conducted on 22 February 2024 by the Board of Commissioners, Board of Directors, supporting organs of the Board of

Perusahaan telah melakukan penilaian terhadap sifat dan risiko penyuapan yang berkaitan dengan aktivitas, mitra kerja, serta personel yang dikategorikan memiliki risiko penyuapan di atas batas rendah. Proses uji kelayakan terhadap rekanan dilaksanakan mengacu pada Edaran Direksi PT PLN Energi Gas Nomor 0001.P/DIR/2024 tentang Pedoman Pelaksanaan Integrity Due Diligence tanggal 03 Januari 2024. Selain itu, komitmen anti penyuapan bagi rekanan diwujudkan melalui penandatanganan Pakta Integritas sebagai bentuk penguatan kepatuhan dan integritas dalam hubungan bisnis.

Commissioners, management, and all employees.
The Company has conducted assessments of bribery risks related to activities, business partners, and personnel categorized as having bribery risk above the low threshold. Due diligence on business partners is carried out in accordance with Board of Directors Circular Letter of PT PLN Energi Gas No. 0001.P/DIR/2024 concerning Integrity Due Diligence Guidelines on January 3, 2024. In addition, anti-bribery commitment from business partners is reinforced through the signing of Integrity Pacts as a form of compliance and integrity reinforcement in business relationships.

Pelaporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN)

Sebagai bagian dari penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas, pelaporan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) di Perusahaan dilaksanakan secara konsisten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Praktik ini juga mencerminkan komitmen Perusahaan dalam mendukung upaya pemberantasan korupsi serta penguatan integritas penyelenggaraan negara.

Untuk mendukung pelaksanaan tersebut, Perusahaan telah menetapkan pedoman pelaporan LHKPN yang berlaku di seluruh lingkungan Perusahaan. Pedoman ini diatur melalui Peraturan Direksi No. 115.P/DIR Tahun 2018 yang kemudian diperbarui melalui Peraturan Direksi PT PLN Energi Gas No. 0002.P/DIREG/2024 tanggal 3 Januari 2024 tentang Pedoman Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) di Lingkungan PT PLN Energi Gas.

Pada tahun 2025, jumlah wajib LHKPN di Perusahaan tercatat sebanyak 32 (tiga puluh dua) orang. Seluruhnya telah menyampaikan laporan LHKPN secara tepat waktu, sehingga tingkat kepatuhan pelaporan mencapai 100%. Seluruh laporan tersebut telah disampaikan oleh wajib lapor/penyelenggara negara ke sistem resmi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

State Officials' Wealth Report (LHKPN)

As part of the implementation of transparency and accountability principles, the reporting of the State Officials' Wealth Report (LHKPN) within the Company is consistently carried out in accordance with applicable laws and regulations. This practice also reflects the Company's commitment to supporting anti-corruption efforts and strengthening integrity in public administration.

To support its implementation, the Company has established LHKPN reporting guidelines applicable throughout the organization. These guidelines are regulated under Board of Directors Regulation No. 115.P/DIR of 2018, which was subsequently updated through Board of Directors Regulation of PT PLN Energi Gas No. 0002.P/DIREG/2024 on January 3, 2024, concerning LHKPN Reporting Guidelines within PT PLN Energi Gas.

In 2025, the number of LHKPN obligors within the Company was recorded at 32 (thirty-two) individuals. All have submitted their LHKPN reports in a timely manner, resulting in a compliance rate of 100%. All reports have been submitted by the obligated officials to the official system of the Corruption Eradication Commission (KPK).

Sosialisasi Kebijakan Anti Korupsi

Sebagai bagian dari komitmen berkelanjutan dalam memperkuat budaya integritas, Perusahaan pada tahun 2025 telah menyelenggarakan pelatihan dan sosialisasi antikorupsi di lingkungan organisasi. Kegiatan ini ditujukan untuk meningkatkan pemahaman serta kesadaran seluruh insan Perusahaan mengenai risiko, dampak, dan konsekuensi dari praktik korupsi, sekaligus menegaskan pentingnya penerapan nilai-nilai integritas dalam setiap aktivitas usaha.

Pelatihan tersebut juga bertujuan membekali karyawan dengan pengetahuan yang memadai dalam mengidentifikasi, mencegah, dan melaporkan setiap indikasi tindakan korupsi, sesuai dengan prinsip GCG serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan adanya inisiatif ini, Perusahaan terus mendorong terwujudnya lingkungan kerja yang transparan, adil, dan bebas dari praktik korupsi, guna memperkuat reputasi serta mendukung keberlanjutan usaha dalam jangka panjang.

Socialization of Anti-Corruption Policy

As part of its ongoing commitment to strengthening a culture of integrity, the Company conducted anti-corruption training and socialization activities within the organization in 2025. These activities aim to enhance the understanding and awareness of all Company personnel regarding the risks, impacts, and consequences of corruption, while reinforcing the importance of implementing integrity values in all business activities.

The training also aims to equip employees with adequate knowledge to identify, prevent, and report any indications of corrupt practices, in accordance with Good Corporate Governance principles and applicable laws and regulations. Through this initiative, the Company continues to promote a transparent, fair, and corruption-free working environment, thereby strengthening its reputation and supporting long-term business sustainability.



Perkara Hukum dan Sanksi Administratif
Legal Cases and Administrative Sanctions

Perusahaan secara konsisten melakukan pemantauan dan pengelolaan terhadap potensi perkara hukum serta sanksi administratif yang dapat timbul dalam kegiatan operasional yang dijalankan. Isu-isu hukum yang dihadapi, baik yang berasal dari hubungan kontraktual, kepatuhan perizinan, maupun dinamika regulasi, ditangani melalui mekanisme internal yang mengedepankan prinsip kehati-hatian dan penyelesaian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam hal terdapat indikasi pelanggaran atau ketidaksesuaian terhadap ketentuan yang berlaku, PLN EG mengambil langkah tindak lanjut secara terstruktur, termasuk koordinasi dengan fungsi terkait untuk melakukan klarifikasi, perbaikan, serta pemenuhan kewajiban administratif yang diperlukan. Pendekatan ini bertujuan untuk meminimalkan dampak hukum maupun operasional, sekaligus memastikan kepatuhan yang berkelanjutan terhadap regulasi sektor energi dan ketentuan tata kelola perusahaan yang baik.

The Company consistently conducts monitoring and management of potential legal cases and administrative sanctions that may arise in its operational activities. Legal issues encountered, whether originating from contractual relationships, licensing compliance, or regulatory developments, are handled through internal mechanisms that prioritize the principle of prudence and resolution in accordance with applicable laws and regulations. In the event of indications of violations or non-compliance with applicable provisions, PLN Energi Gas undertakes structured follow-up actions, including coordination with relevant functions to conduct clarification, corrective actions, and fulfillment of required administrative obligations. This approach aims to minimize legal and operational impacts, while ensuring continuous compliance with energy sector regulations and good corporate governance principles.

Perkara Hukum yang Dihadapi Perusahaan

Sebagai wujud komitmen terhadap penerapan tata kelola perusahaan yang baik, Perusahaan senantiasa memastikan seluruh kegiatan operasional dijalankan sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku. Sepanjang tahun 2025, Perusahaan tidak menghadapi perkara hukum, baik yang bersifat pidana maupun perdata, serta tidak terlibat dalam proses litigasi maupun nonlitigasi.

Perusahaan juga tidak sedang berstatus sebagai pihak dalam perkara hukum apa pun, termasuk namun tidak terbatas pada sengketa ketenagakerjaan, hubungan industrial, perlindungan konsumen, kepailitan, aktivitas komersial, persaingan usaha tidak sehat, maupun isu lingkungan hidup.

Legal Cases Faced by the Company

As part of its commitment to implementing good corporate governance, the Company ensures that all operational activities are conducted in accordance with applicable laws and regulations. Throughout 2025, the Company did not face any legal cases, whether civil or criminal, and was not involved in any litigation or non-litigation proceedings.

The Company is also not a party to any legal dispute, including but not limited to employment disputes, industrial relations issues, consumer protection cases, bankruptcy, commercial disputes, unfair business competition, or environmental matters.

Perkara Hukum yang Dihadapi Dewan Komisaris dan Direksi

Sepanjang tahun 2025, anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perusahaan tidak tercatat terlibat dalam perkara hukum apa pun, baik pidana maupun perdata. Seluruh anggota tetap menjalankan fungsi dan tanggung jawabnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta prinsip

Legal Cases Faced by the Board of Commissioners and the Board of Directors

Throughout 2025, members of the Board of Directors and the Board of Commissioners were not recorded as being involved in any legal cases, whether civil or criminal. All members continued to carry out their duties and responsibilities in accordance with applicable laws and regulations as well as good

tata kelola perusahaan yang baik. Selain itu, tidak terdapat sengketa hukum yang melibatkan individu dalam jajaran Direksi maupun Dewan Komisaris yang dapat berdampak pada pelaksanaan tugas, kondisi keuangan, operasional, maupun keberlanjutan usaha Perusahaan. Seluruh aktivitas dijalankan dengan mengedepankan integritas, kepatuhan, dan kehati-hatian dalam pengambilan keputusan.

corporate governance principles. In addition, there were no legal disputes involving individuals within the Board of Directors or the Board of Commissioners that could have an impact on the execution of duties, financial condition, operations, or business continuity of the Company. All activities were conducted with integrity, compliance, and prudence in decision-making.

Perkara Hukum yang Dihadapi Entitas Anak

Sampai dengan akhir tahun 2025, Perusahaan tidak memiliki entitas anak, sehingga tidak terdapat informasi terkait perkara hukum yang melibatkan anak perusahaan. Dengan demikian, tidak ditemukan adanya permasalahan hukum yang berasal dari entitas anak yang berpotensi memengaruhi kondisi keuangan, operasional, maupun keberlanjutan usaha Perusahaan.

Legal Cases Faced by Subsidiaries

As of the end of 2025, the Company does not have any subsidiaries; therefore, there is no information related to legal cases involving subsidiaries. Accordingly, no legal issues were identified from subsidiary entities that could potentially affect the Company's financial condition, operations, or business continuity.

Sanksi Administratif

Sepanjang tahun 2025, Perusahaan tidak menerima sanksi administratif maupun bentuk sanksi lainnya dari otoritas yang berwenang, baik yang ditujukan kepada Perusahaan maupun kepada anggota Dewan Komisaris dan Direksi. Selain itu, tidak terdapat indikasi maupun temuan atas ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk ketentuan terkait pencatatan dan pelaporan, di luar aspek pengungkapan yang telah dilakukan sesuai dengan regulasi.

Dalam kurun waktu tiga tahun terakhir, Perusahaan juga tidak pernah memperoleh putusan yang menyatakan bersalah dari pengadilan pajak tertinggi terkait permasalahan perpajakan. Perusahaan terus berupaya dalam menjaga kepatuhan terhadap regulasi, penerapan tata kelola perusahaan yang baik, serta pelaksanaan tanggung jawab hukum secara berintegritas.

Administrative Sanctions

Throughout 2025, the Company did not receive any administrative sanctions or other forms of sanctions from competent authorities, either imposed on the Company or on members of the Board of Commissioners and the Board of Directors. In addition, there were no indications or findings of non-compliance with applicable laws and regulations, including provisions related to recording and reporting, beyond disclosures made in accordance with regulatory requirements.

Within the past three years, the Company has also never received a final judgment from the highest tax court declaring it guilty in any tax-related matters. The Company continues to maintain regulatory compliance, implement good corporate governance, and carry out legal responsibilities with integrity.

Sistem Pelaporan Pelanggaran
Whistleblowing System

Perusahaan telah menetapkan dan meng-implementasikan Sistem Pelaporan Pelanggaran (*Whistleblowing System*) sebagai mekanisme pelaporan bagi para pemangku kepentingan untuk menyampaikan dugaan pelanggaran hukum, tindakan tidak etis, maupun perilaku yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan Perusahaan. Penerapan sistem ini merupakan bagian dari komitmen Perusahaan dalam memperkuat penerapan GCG secara berkelanjutan. Melalui *Whistleblowing System* (WBS), Perusahaan menyediakan saluran yang memungkinkan deteksi dini atas potensi pelanggaran, sehingga dapat diminimalkan risiko yang menimbulkan kerugian, baik secara materiil maupun nonmateriil.

The Company has established and implemented a Whistleblowing System as a reporting mechanism for stakeholders to report suspected legal violations, unethical conduct, or behavior that does not comply with applicable regulations within the Company. The implementation of this system is part of the Company's commitment to continuously strengthen the application of GCG. Through the Whistleblowing System (WBS), the Company provides a channel that enables the early detection of potential violations, thereby minimizing risks that could result in losses, whether material or non-material.

Dasar pelaksanaan WBS mengacu pada Peraturan Direksi PT PLN Energi Gas Nomor 0006.P/Dir/2024 tanggal 3 Januari 2024 tentang Sistem Pengaduan Pelanggaran (*Whistleblowing System*) di lingkungan PT PLN Energi Gas. Keberadaan WBS ditujukan untuk menjaga serta meningkatkan kepercayaan dan kredibilitas Perusahaan terhadap publik, pemegang saham, pemerintah, mitra kerja, dan seluruh pemangku kepentingan lainnya.

The basis for implementing the WBS is PT PLN Energi Gas Board of Directors Regulation No. 0006.P/Dir/2024 dated January 3, 2024, regarding the Whistleblowing System within PT PLN Energi Gas. The WBS is intended to maintain and enhance the Company's trust and credibility among the public, shareholders, the government, business partners, and all other stakeholders.

Pihak yang Mengelola Pengaduan

Pelaksanaan pengelolaan WBS berada di bawah tanggung jawab Unit Kerja yang menjalankan fungsi kepatuhan dan/atau pihak ketiga yang memiliki kompetensi dalam pengelolaan sistem pelaporan pelanggaran. Dalam hal pengelolaan WBS melibatkan pihak ketiga, mekanisme pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Direktur yang membawahi fungsi kepatuhan.

Apabila pihak yang dilaporkan merupakan pegawai pada Unit Kerja yang menjalankan fungsi kepatuhan, maka laporan pengaduan tidak dievaluasi maupun dianalisis oleh unit tersebut, melainkan langsung diteruskan kepada Audit Internal untuk dilakukan analisis lebih lanjut. Sementara itu, apabila pihak terlapor adalah Manajer Audit Internal, proses evaluasi dan analisis pengaduan dilakukan oleh Unit Kerja yang menjalankan fungsi kepatuhan sebelum hasilnya disampaikan kepada Direktur Utama. Adapun mekanisme penanganan pengaduan pelanggaran yang melibatkan Direksi dan Dewan Komisaris dilaksanakan secara tersendiri sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.

Party Responsible for Managing Reports

The management of the WBS falls under the responsibility of the work unit that performs compliance functions and/or a third party with expertise in managing whistleblowing systems. In cases where a third party is involved in managing the WBS, the implementation mechanism is further regulated by the Director overseeing compliance functions.

If the reported party is an employee of the Work Unit responsible for compliance functions, the complaint report is not evaluated or analyzed by that unit but is forwarded directly to Internal Audit for further analysis. Meanwhile, if the reported party is the Internal Audit Manager, the evaluation and analysis of the complaint are conducted by the Work Unit responsible for compliance functions before the results are submitted to the President Director. The mechanism for handling complaints of violations involving the Board of Directors and the Board of Commissioners is carried out separately in accordance with applicable provisions and regulations.

Perlindungan Bagi Pelapor

Perusahaan dapat memberikan fasilitas perlindungan kepada Pelapor dan/atau Saksi atas laporan yang disampaikan, berdasarkan permohonan dari Pelapor dan/atau Saksi yang bersangkutan, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Dalam hal Pelapor dan/atau Saksi merupakan Pegawai PLN EG, Unit Kerja yang melaksanakan fungsi kepatuhan berkoordinasi dengan Unit Kerja yang melaksanakan fungsi Sumber Daya Manusia (SDM) sesuai kewenangannya.
2. Dalam hal Pelapor dan/atau Saksi merupakan pihak eksternal PLN EG, Unit Kerja yang melaksanakan fungsi kepatuhan berkoordinasi dengan Unit Kerja yang melaksanakan fungsi hukum sesuai kewenangannya.

Perlindungan yang diberikan dapat mencakup perlindungan hukum berupa perlindungan dari tuntutan pidana dan/atau perdata, perlindungan atas keamanan pribadi dan/atau keluarga dari ancaman fisik maupun mental, perlindungan terhadap harta benda, serta jaminan atas kerahasiaan maupun penyamaran identitas Pelapor dan/atau Saksi.

Khusus bagi Pelapor dan/atau Saksi yang merupakan pegawai PLN EG, Perusahaan juga memberikan perlindungan dan rehabilitasi terhadap segala bentuk perlakuan yang merugikan maupun tindakan balasan atas pengaduan yang disampaikan. Perlindungan tersebut meliputi pencegahan terhadap pemutusan hubungan kerja, penurunan jabatan, grade, penilaian kinerja individu, penghasilan, dan/atau mutasi, serta tindakan pelecehan, diskriminasi dalam bentuk apa pun, maupun pencatatan informasi yang merugikan dalam data pribadi pegawai.

Penyampaian Laporan Pelanggaran

Pengaduan dapat disampaikan melalui satu atau lebih saluran maupun media pelaporan yang telah disediakan oleh Perusahaan. Adapun saluran dan media pelaporan yang dapat digunakan adalah sebagai berikut:

1. Website https://cos.pln.co.id/;
2. Telepon, *Short Message Service* (SMS) atau Whatsapp ke nomor resmi Pengaduan Pelanggaran di 0811-9861-901;

Protection for Reporters

The Company may provide protection to the Whistleblower and/or Witness regarding the report submitted, based on a request from the relevant Whistleblower and/or Witness, subject to the following conditions:

1. If the Whistleblower and/or Witness is an employee of PLN Energi Gas, the Work Unit responsible for compliance coordinates with the Work Unit responsible for Human Resources (HR) in accordance with its authority.
2. If the Whistleblower and/or Witness is an external party to PLN Energi Gas, the Work Unit responsible for compliance functions shall coordinate with the Work Unit responsible for legal affairs in accordance with its authority.

The protection provided may include legal protection in the form of protection from criminal and/or civil charges, protection of personal and/or family safety from physical or mental threats, protection of property, as well as guarantees of confidentiality and the concealment of the identity of the Reporter and/or Witness.

Specifically for Reporters and/or Witnesses who are employees of PLN Energi Gas, the Company also provides protection and rehabilitation against any form of detrimental treatment or retaliatory actions resulting from the complaints submitted. Such protection includes safeguards against termination of employment, demotion, downgrading, adverse individual performance evaluations, reductions in income, and/or transfers, as well as harassment, discrimination in any form, and the recording of detrimental information in employees' personal records.

Submission of Violation Reports

Complaints may be submitted through one or more of the reporting channels or media provided by the Company. The reporting channels and media that may be used are as follows:

1. The website https://cos.pln.co.id/;
2. Phone, Short Message Service (SMS), or WhatsApp to the official Violation Reporting number at 0811-9861-901;

3. Email ke wbpln@pln.co.id;
4. Surat kepada *Executive Vice President* Kepatuhan PT PLN (Persero) Kantor Pusat Jalan Trunojoyo Blok M/1 No. 135, Kebayoran Baru, Jakarta, 12160;
5. Media perusahaan lainnya sesuai perkembangan yang akan diinformasikan lebih lanjut secara tertulis oleh Unit Kerja yang melaksanakan fungsi kepatuhan.

Penanganan Pengaduan

Pengaduan yang telah diproses oleh Unit Kerja yang menjalankan fungsi kepatuhan selanjutnya ditindaklanjuti oleh Audit Internal dan/atau Unit Kerja terkait sesuai dengan kewenangannya. Dalam proses tersebut, Audit Internal melakukan analisis, evaluasi, pengujian data, serta akses terhadap seluruh informasi yang relevan sesuai dengan Piagam Pengawasan *Internal* Terintegrasi (*Audit Charter*), termasuk memperoleh data dan informasi yang diperlukan dari pihak terlapor.

Untuk mendukung proses penanganan pengaduan, Audit Internal membentuk Tim Audit Investigasi yang bertugas melakukan audit investigasi guna memperoleh alat bukti dan barang bukti yang kompeten, relevan, material, dan memadai. Tim Audit Investigasi selanjutnya melakukan evaluasi atas hasil investigasi untuk memastikan adanya indikasi *Fraud* yang memenuhi kriteria dugaan tindak pidana korupsi (Tipikor), dengan dilengkapi analisis hukum dari Unit Kerja yang menjalankan fungsi hukum. Pelaksanaan audit investigasi dilakukan sesuai jangka waktu yang telah ditetapkan dalam *Service Level Agreement* (SLA) investigasi.

Sementara itu, Unit Kerja yang menjalankan fungsi Sumber Daya Manusia (SDM) menindaklanjuti hasil audit investigasi terhadap Terlapor yang merupakan pegawai Perusahaan sesuai dengan Peraturan Disiplin Pegawai yang berlaku di PLN EG. Unit Kerja SDM juga melakukan pemantauan atas penanganan pelanggaran disiplin pegawai dan menyampaikan laporan monitoring secara berkala setiap bulan kepada Direktur Keuangan dan Sumber Daya Manusia.

3. Email to wbpln@pln.co.id;
4. Mail to the Executive Vice President of Compliance at PT PLN (Persero) Headquarters, Jalan Trunojoyo Blok M/1 No. 135, Kebayoran Baru, Jakarta, 12160;
5. Other company media channels as developments arise, which will be further communicated in writing by the work unit responsible for compliance functions.

Complaint Handling

Complaints that have been processed by the work unit responsible for compliance are subsequently followed up by Internal Audit and/or the relevant work unit in accordance with their respective authorities. During this process, Internal Audit conducts analysis, evaluation, and data testing, and accesses all relevant information in accordance with the Integrated Internal Oversight Charter (Audit Charter), including obtaining the necessary data and information from the party against whom the complaint is filed.

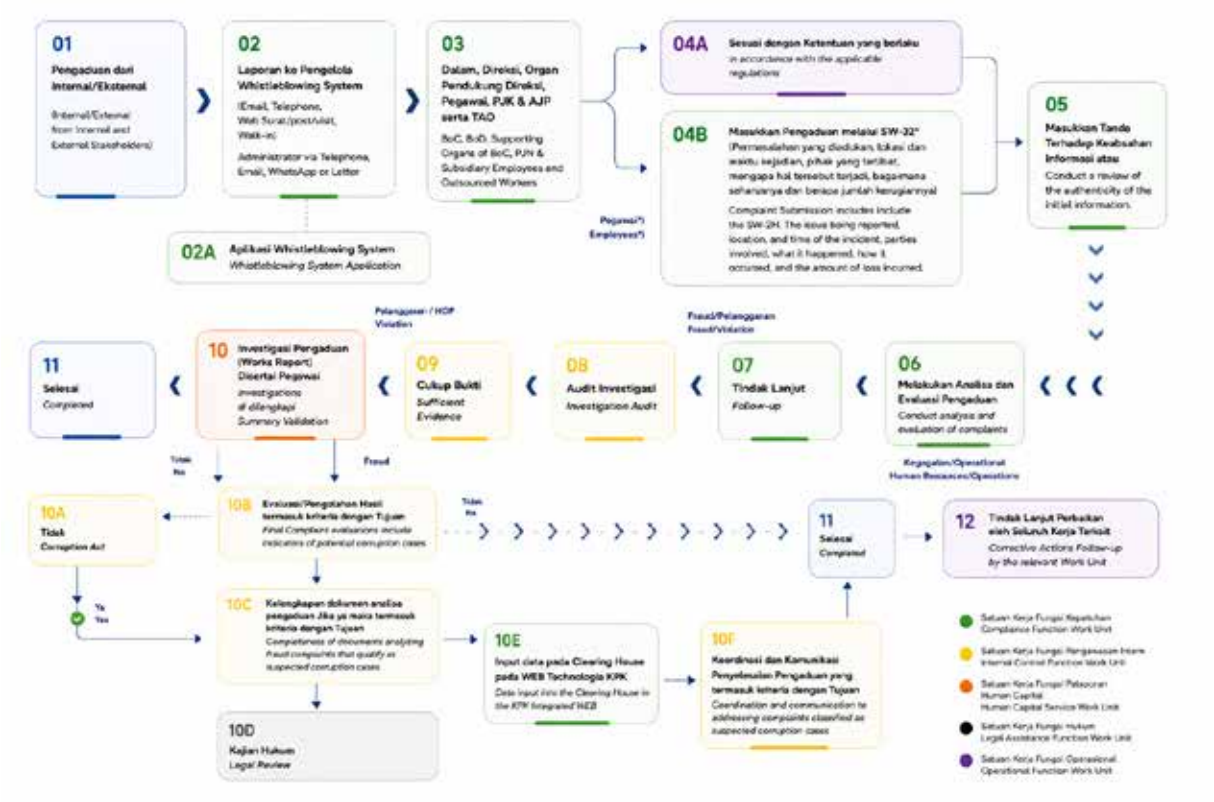
To support the complaint handling process, Internal Audit forms an Investigative Audit Team tasked with conducting investigative audits to obtain competent, relevant, material, and sufficient evidence and physical evidence. The Investigative Audit Team then evaluates the investigation results to confirm whether there are indications of fraud that meet the criteria for alleged corruption offenses (Tipikor), supplemented by a legal analysis from the department responsible for legal affairs. The investigative audit is conducted within the timeframe specified in the investigation Service Level Agreement (SLA).

Meanwhile, the work unit responsible for Human Resources (HR) follows up on the results of the investigative audit regarding the reported individual—who is a Company employee—in accordance with the Employee Disciplinary Regulations in effect at PLN Energi Gas. The HR work unit also monitors the handling of employee disciplinary violations and submits monthly monitoring reports to the Director of Finance and Human Resources.

Selain itu, Unit Kerja terkait turut menindaklanjuti pengaduan yang telah diproses oleh Unit Kerja fungsi kepatuhan sesuai dengan ruang lingkup kewenangannya, serta menyampaikan hasil tindak lanjut tersebut kepada Unit Kerja yang menjalankan fungsi kepatuhan.

In addition, the relevant work unit follows up on complaints that have been processed by the compliance unit in accordance with its scope of authority and reports the results of such follow-up to the compliance unit.

Mekanisme Penanganan Pengaduan
Complaint Handling Mechanism



Hasil Penanganan Pengaduan

Unit Kerja yang menjalankan fungsi kepatuhan menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan *Whistleblowing System* (WBS) secara berkala setiap bulan kepada Direktur Utama. Sepanjang tahun 2025, Perusahaan tidak menerima laporan pengaduan maupun pelanggaran yang disampaikan melalui saluran WBS Perusahaan.

Results of Complaint Handling

The work unit responsible for compliance submits a monthly report on the implementation of the Whistleblowing System (WBS) to the President Director. Throughout 2025, the Company received no reports of complaints or violations submitted through the Company's WBS channel.

Pemenuhan Standar Penerapan Tata Kelola Perusahaan
Compliance with Corporate Governance Standards

Perusahaan terus memperkuat penerapan tata kelola perusahaan yang baik dengan mengintegrasikan prinsip-prinsip governansi yang selaras dengan dinamika regulasi dan ekspektasi pemangku kepentingan. Praktik tata kelola dijalankan berdasarkan ketentuan Kementerian BUMN, *ASEAN Corporate Governance Scorecard* (ACGS) dan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka sebagaimana diatur dalam Surat Edaran OJK No. 32/SEOJK.04/2015 serta Pedoman Umum Governansi Indonesia (PUG-KI) sebagai panduan penerapan best practice. Dengan pendekatan yang sistematis dan terukur, integritas menjadi nilai inti yang menuntun pengambilan keputusan dan pelaksanaan kegiatan usaha. Melalui penguatan budaya integritas, Perusahaan berupaya menciptakan nilai jangka panjang yang berkontribusi terhadap peningkatan kepercayaan pemangku kepentingan, keunggulan operasional, dan keberlanjutan bisnis.

The Company continues to strengthen the implementation of good corporate governance by integrating governance principles that align with regulatory dynamics and stakeholder expectations. Corporate governance practices are carried out in accordance with the regulations of the Ministry of State-Owned Enterprises, the ASEAN Corporate Governance Scorecard (ACGS), and the Guidelines on Corporate Governance for Public Companies as stipulated in OJK Circular Letter No. 32/SEOJK.04/2015, as well as the General Guidelines on Indonesian Governance (PUG-KI) as a guide for implementing best practices. Through a systematic and measurable approach, integrity serves as the core value guiding decision-making and the conduct of business activities. By strengthening a culture of integrity, the Company strives to create long-term value that contributes to enhanced stakeholder trust, operational excellence, and business sustainability.

Standar Kementerian BUMN

Tata Kelola Perusahaan yang Baik merupakan elemen fundamental yang mendukung keberlangsungan usaha dan penciptaan nilai jangka panjang di PLN Energi Gas. Oleh karena itu, Perusahaan secara konsisten mengintegrasikan prinsip-prinsip GCG ke dalam seluruh proses bisnis guna memastikan pengelolaan perusahaan yang transparan, akuntabel, bertanggung jawab, independen, dan berkeadilan. Dalam memperkuat implementasi tata kelola, PLN Energi Gas berpedoman pada Peraturan Menteri BUMN Republik Indonesia Nomor PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan BUMN. Regulasi tersebut menjadi acuan bagi Perusahaan dalam membangun sistem tata kelola yang selaras dengan praktik terbaik, sekaligus mendukung pengelolaan usaha yang profesional dan berintegritas. PLN Energi Gas terus berupaya menciptakan nilai tambah yang berkelanjutan, meningkatkan kepercayaan pemangku kepentingan, memperkuat ketahanan organisasi, serta mendukung pencapaian tujuan strategis Perusahaan dalam jangka panjang.

Ministry of State-Owned Enterprises Standards

Good Corporate Governance is a fundamental element that supports business continuity and the creation of long-term value at PLN Energi Gas. Therefore, the Company consistently integrates GCG principles into all business processes to ensure transparent, accountable, responsible, independent, and fair corporate management. To strengthen the implementation of corporate governance, PLN Energi Gas adheres to Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises of the Republic of Indonesia No. PER-2/MBU/03/2023 regarding Guidelines on Corporate Governance and Significant Corporate Activities of State-Owned Enterprises. This regulation serves as a reference for the Company in establishing a corporate governance system aligned with best practices, while supporting professional and ethical business management. PLN Energi Gas continues to strive to create sustainable value, enhance stakeholder trust, strengthen organizational resilience, and support the achievement of the Company's long-term strategic objectives.

ASEAN *Corporate Governance Scorecard*

Perusahaan telah mengadopsi praktik-praktik terbaik dalam tata kelola perusahaan dengan mengacu pada *ASEAN Corporate Governance Scorecard* (ACGS). ACGS merupakan instrumen penilaian yang digunakan untuk mengukur tingkat penerapan GCG berdasarkan parameter yang terstandarisasi di tingkat regional, serta mengacu pada prinsip-prinsip internasional, termasuk OECD *Principles of Corporate Governance*.

Dalam rangka memperkuat implementasi tata kelola yang selaras dengan standar ACGS, PLN Energi Gas telah melaksanakan kegiatan pemetaan (*mapping*) untuk menilai tingkat kesesuaian antara praktik tata kelola yang diterapkan dengan kriteria dan indikator yang ditetapkan dalam ACGS. Proses ini bertujuan untuk mengidentifikasi area yang telah memenuhi standar serta aspek-aspek yang masih memerlukan penyempurnaan guna mencapai keselarasan yang lebih optimal dengan *best practice* di tingkat regional. Hasil pemetaan implementasi ACGS tahun 2025 disajikan sebagai berikut:

ASEAN Corporate Governance Scorecard

The Company has adopted best practices in corporate governance by referring to the ASEAN Corporate Governance Scorecard (ACGS). The ACGS is an assessment tool used to measure the level of GCG implementation based on regionally standardized parameters, as well as international principles, including the OECD Principles of Corporate Governance.

To strengthen the implementation of corporate governance in line with ACGS standards, PLN Energi Gas has conducted a mapping exercise to assess the level of alignment between its current governance practices and the criteria and indicators set forth in the ACGS. This process aims to identify areas that already meet the standards as well as aspects that still require improvement to achieve greater alignment with regional best practices. The results of the 2025 ACGS implementation mapping are presented as follows:

Pemetaan Penerapan ACGS Tahun 2025
2025 ACGS Implementation Mapping

Standar Tata Kelola Perusahaan Corporate Governance Standards		Jumlah Pertanyaan Number of Questions	Skor Maksimal Maximum Score (Points)	Pemenuhan Compliance			Total Score (Points)
				N/A	No	Yes	
Level 1							
Bagian A Part A	Hak-hak dan Perlakuan Setara terhadap Pemegang Saham Rights and Equitable Treatment of Shareholders	30	20,00	5	10	15	13,33
Bagian B Part B	Keberlanjutan dan Ketahanan Sustainability and Resilience	22	15,00	0	9	13	8,86
Bagian C Part C	Transparansi dan Pengungkapan Disclosure and Transparency	34	25,00	3	9	22	18,38
Bagian D Part D	Tanggung Jawab Dewan Responsibilities of the Board	63	40,00	4	15	44	30,48
Total Level 1		**149**	**100,00**	**12**	**43**	**94**	**71,06**
Level 2							
Bonus		18	30	4	12	2	3,33
Penalti Penalty		26	(67)	2	24	0	0,00
Total Level 2		**44**	**30,00**	**6**			**3,33**
Total		193	130,00	18			74,39

Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka

Sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas tata kelola, PLN Energi Gas melakukan pemetaan penerapan GCG berdasarkan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka yang mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 21/POJK.04/2015 serta Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) Nomor 32/SEOJK.04/2015.

Pemetaan ini mencakup implementasi 5 (lima) aspek tata kelola, 8 (delapan) prinsip GCG, serta 25 (dua puluh lima) rekomendasi yang menjadi pedoman penerapan praktik tata kelola perusahaan terbuka. Penilaian dilakukan dengan metode *comply or explain* guna mengukur tingkat kepatuhan sekaligus memberikan justifikasi atas area yang belum sepenuhnya memenuhi ketentuan yang berlaku. Hasil pemetaan penerapan tata kelola perusahaan terbuka tersebut disajikan sebagai berikut:

Guidelines for Corporate Governance of Public Companies

As part of its efforts to improve the quality of corporate governance, PLN Energi Gas conducted a mapping of GCG implementation based on the Guidelines for Corporate Governance of Public Companies, which refer to Financial Services Authority (OJK) Regulation No. 21/POJK.04/2015 and Financial Services Authority (OJK) Circular Letter No. 32/SEOJK.04/2015.

This assessment covers the implementation of 5 (five) aspects of corporate governance, 8 (eight) principles of GCG, and 25 (twenty-five) recommendations that serve as guidelines for the implementation of corporate governance practices in public companies. The evaluation was conducted using the "comply or explain" method to measure the level of compliance while providing justification for areas that do not yet fully meet applicable regulations. The results of the mapping of the implementation of corporate governance for public companies are presented as follows:

Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka
Implementation of the Corporate Governance Guidelines for Public Companies

Rekomendasi Recommendations	Status Status	Penjelasan Explanation
Aspek A. Hubungan Perusahaan Terbuka Dengan Pemegang Saham Dalam Menjamin Hak-Hak Pemegang Saham **Aspect A. The Relationship Between Public Companies and Shareholders in Safeguarding Shareholders' Rights**		
Prinsip 1. Meningkatkan Nilai Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Principle 1. Enhancing the Quality of General Shareholders' Meetings (GSM).		
1.1 Perusahaan Terbuka memiliki cara atau prosedur teknis pengumpulan suara (*voting*) baik secara terbuka maupun tertutup yang mengedepankan independensi, dan kepentingan pemegang saham. Public Companies shall have technical methods or procedures for collecting votes—whether by open or secret ballot—that prioritize independence and the interests of shareholders.	*Comply*	Perusahaan telah memiliki cara atau prosedur teknis pengumpulan suara (voting) baik secara terbuka maupun tertutup yang mengedepankan independensi, dan kepentingan pemegang saham sebagaimana yang dimuat dalam Tata Tertib RUPS LPT dan RKAP Tahun 2025 yang diungkapkan pada website Perusahaan. The Company has established technical methods or procedures for collecting votes—whether by open or secret ballot—that prioritize independence and the interests of shareholders, as set forth in the Rules of Procedure for the LPT GMS and the 2025 RKAP, which are disclosed on the Company's website.
1.2 Seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perusahaan hadir dalam RUPS Tahunan. All members of the Company's Board of Directors and Board of Commissioners attended the Annual General Meeting of Shareholders.	*Comply*	Seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perusahaan telah hadir dalam RUPST RKAP Tahun 2025 dan LPT Tahun Buku 2024 sebagai berikut: LPT 30 Juni 2025: Bayu (Komut) dan Andriah (Komisaris) serta Direksi: (Edwin Bangung (Dirut), Yusuf (Dirops), Rahmi (Dirkeu dan SDM) RAKP 30 Januari 2025: Dede (PLT Komut), Bayu (PLT Komisaris) dan Andriah (Komisaris) serta Direksi: (Edwin Bangung (PLT Dirut), Yusuf (PLT Dirops), Rahmi (PLT Dirkeu dan SDM) All members of the Company's Board of Directors and Board of Commissioners attended the Extraordinary General Meeting of Shareholders regarding the 2025 Annual Business Plan and the 2024 Financial Statements as follows: LPT June 30, 2025: Bayu (President Commissioner) and Andriah (Commissioner), as well as the Board of Directors: (Edwin Bangung (President Director), Yusuf (Director of Operations), Rahmi (Director of Finance and Human Resources) Annual Business Plan Meeting on January 30, 2025: Dede (Acting Chairman of the Board), Bayu (Acting Commissioner), and Andriah (Commissioner), as well as the Board of Directors: (Edwin Bangung (Acting President Director), Yusuf (Acting Director of Operations), Rahmi (Acting Director of Finance and Human Resources)

1.3	Ringkasan risalah RUPS tersedia dalam Situs Web Perusahaan paling sedikit selama 1 (satu) tahun. A summary of the minutes of the General Shareholders' Meeting is available on the Company's website for at least 1 (one) year.	*Explain*	Telah terdapat risalah RUPST RKAP dan LPT tersedia dalam Situs Web Perusahaan lebih dari 1 (satu) tahun. Namun belum terdapat Risalah RUPS sikuler pada website Perusahaan. The minutes of the Annual General Meeting of Shareholders (AGM) regarding the Annual Business Plan (RKAP) and the Annual Financial Report (LPT) have been available on the Company's website for more than 1 (one) year. However, the minutes of the extraordinary General Meeting of Shareholders (GMS) are not yet available on the Company's website
Prinsip 2. Meningkatkan Kualitas Komunikasi Perusahaan Terbuka dengan Pemegang Saham atau Investor. Principle 2. Improve the Quality of Public Company Communication with Shareholders or Investors.			
2.1	Perusahaan memiliki suatu kebijakan komunikasi dengan pemegang saham atau investor. The Company has a communication policy with shareholders or investors.	*Explain*	Belum terdapat Kebijkaan Komunikasi dengan Pemegang Saham atau Investor yang mengatur strategi, program, dan waktu pelaksanaan komunikasi, serta panduan yang mendukung pemegang saham atau investor untuk berpartisipasi dalam komunikasi tersebut. There is no Communication Policy with Shareholders or Investors that outlines the strategy, programs, and timing of communication, as well as guidelines to support shareholders or investors in participating in such communication.
2.2	Perusahaan mengungkapkan kebijakan komunikasi Perusahaan dengan pemegang saham atau investor dalam situs web. The Company discloses its communication policy with shareholders or investors on its website.	*Explain*	Perusahaan belum mengungkapkan kebijakan komunikasi Perusahaan dengan pemegang saham atau investor dalam situs web dikarenakan Perusahaan belum memiki kebijakab komunikasi tersebut The Company has not disclosed its communication policy with shareholders or investors on its website because the Company does not yet have such a communication policy.
Aspek B. Fungsi dan Peran Dewan Komisaris **Aspect B. Functions and Roles of the Board of Commissioners**			
Prinsip 3. Memperkuat Keanggotaan dan Komposisi Dewan Komisaris. Principle 3. Strengthening the Membership and Composition of the Board of Commissioners.			
3.1	Penentuan jumlah anggota Dewan Komisaris mempertimbang-kan kondisi Perusahaan. The determination of the number of members of the Board of Commissioners takes into account the Company's circumstances.	*Comply*	Penentuan jumlah anggota Dewan Komisaris telah mempertimbang-kan kondisi Perusahaan yaitu dengan berlandaksan pada Anggaran Dasar Perusahaan dimana Direksi dan Dewan komisaris lebih dari 1 (satu) orang. (Per 31 Desember 2025 Dewan Komisaris berjulan 3 orang dan Direksi berjumalh 3 orang). The determination of the number of members of the Board of Commissioners has taken the Company's circumstances into account, specifically in accordance with the Company's Articles of Association, which stipulate that the Board of Directors and the Board of Commissioners must each consist of more than 1 (one) person. (As of December 31, 2025, the Board of Commissioners consists of 3 members and the Board of Directors consists of 3 members).
3.2	Penentuan komposisi anggota Dewan Komisaris memperhatikan keberagaman keahlian, pengetahuan, dan pengalaman yang dibutuhkan. The composition of the Board of Commissioners is determined with due regard to the diversity of expertise, knowledge, and experience required.	*Comply*	Penentuan komposisi anggota Dewan Komisaris telah memperhatikan keberagaman keahlian, pengetahuan, dan pengalaman yang dibutuhkan. The composition of the Board of Commissioners was determined with due consideration for the diversity of expertise, knowledge, and experience required.
Prinsip 4. Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris. Principle 4. Improving the Quality of the Board of Commissioners' Performance of Duties and Responsibilities.			
4.1	Dewan Komisaris mempunyai kebijakan penilaian sendiri (*self assessment*) untuk menilai kinerja Dewan Komisaris. The Board of Commissioners has a self-assessment policy to evaluate the performance of the Board of Commissioners.	*Explain*	Dewan Komisaris mempunyai kebijakan penilaian sendiri (self assessment) untuk menilai kinerja Dewan Komisaris sebagaimana yang diatur dalam Pedoman Tata tertib Kerja Dewan Komisaris dan Direksi hal. 38. namun kebijakan tersebut belum mecakup kriteria penilaian yang digunakan sesuai dengan dengan rekomendasi yang diberikan oleh fungsi nominasi dan remunerasi. The Board of Commissioners has a self-assessment policy to evaluate the performance of the Board of Commissioners as stipulated in the Code of Conduct for the Board of Commissioners and the Board of Directors, p. 38. However, this policy does not yet include the assessment criteria used in accordance with the recommendations provided by the nomination and remuneration function.
4.2	Kebijakan penilaian sendiri (*self assessment*) untuk menilai kinerja Dewan Komisaris, diungkapkan melalui Laporan Tahunan Perusahaan. The self-assessment policy for evaluating the performance of the Board of Commissioners is disclosed in the Company's Annual Report.	*Explain*	Kebijakan penilaian sendiri (self assessment) untuk menilai kinerja Dewan Komisaris belum diungkapkan melalui Laporan Tahunan Perusahaan. The self-assessment policy for evaluating the performance of the Board of Commissioners has not been disclosed in the Company's Annual Report.

Pemenuhan Standar Penerapan Tata Kelola Perusahaan
Compliance with Corporate Governance Standards

4.3	Dewan Komisaris mempunyai kebijakan terkait pengunduran diri anggota Dewan Komisaris apabila terlibat dalam kejahatan keuangan. The Board of Commissioners has a policy regarding the resignation of Board members if they are involved in financial crimes.	*Comply*	Dewan Komisaris telah mempunyai kebijakan terkait pengunduran diri anggota Dewan Komisaris apabila terlibat dalam kejahatan keuangan yang diatur dalam Pedoman Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris dan Direksi. "Anggota Direksi yang terlibat dalam kejahatan keuangan wajib mengundurkan diri dalam rangka meningkatkan kepercayaan para pemangku kepentingan terhadap Perusahaan, sehingga integritas Perusahaan akan tetap terjaga. Selain itu, untuk membantu kelancaran proses hukum dan agar proses hukum tersebut tidak mengganggu jalannya kegiatan usaha". The Board of Commissioners has a policy regarding the resignation of Board members if they are involved in financial crimes, as stipulated in the Code of Conduct for the Board of Commissioners and the Board of Directors. "Members of the Board of Directors involved in financial crimes are required to resign in order to enhance stakeholder confidence in the Company' , thereby ensuring the Company's integrity is maintained. Additionally, this is to facilitate the legal process and ensure that such proceedings do not disrupt business operations."
4.4	Dewan Komisaris atau Komite yang menjalankan fungsi Nominasi dan Remunerasi menyusun kebijakan suksesi dalam proses nominasi anggota Direksi. The Board of Commissioners or the committee responsible for nominations and compensation shall formulate a succession policy as part of the process for nominating members of the Board of Directors.	*Explain*	Tugas dan tanggung jawab Komite Nominasi dan Remunerasi PLN Indonesia Power belum mencakup suksesi dalam proses nominasi anggota Direksi Perusahaan dikarenakan Pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris tahun 2025 dilakukan dengan RUPS sirkuler, serta pemilihan Direksi merupakan hak sepenuhnya Pemegang Saham sehingga *Not Applicable*. The duties and responsibilities of PLN Indonesia Power's Nomination and Remuneration Committee do not yet include succession planning in the nomination process for members of the Company's Board of Directors because the appointment of the Board of Directors and the Board of Commissioners in 2025 will be conducted via a circular General Meeting of Shareholders, and the election of the Board of Directors is the sole prerogative of the Shareholders; therefore, this is Not Applicable.
	Aspek C. Fungsi dan Peran Direksi Aspect C. Functions and Roles of the Board of Directors		
	Prinsip 5. Memperkuat Keanggotaan dan Komposisi Direksi. Principle 5. Strengthening the Membership and Composition of the Board of Directors.		
5.1	Penentuan jumlah anggota Direksi mempertimbangkan kondisi Perusahaan Terbuka serta efektifitas dalam pengambilan keputusan. The determination of the number of Board members takes into account the Company's status as a public company as well as the effectiveness of decision-making.	*Comply*	Penentuan jumlah anggota Direksi telah mempertimbang-kan kondisi Perusahaan yaitu dengan berlandaksan pada Anggaran Dasar Perusahaan dimana Direksi dan Dewan komisaris lebih dari 1 (satu) orang. (Per 31 Desember 2025 Dewan Komisaris berjulan 3 orang dan Direksi berjumalh 3 orang). The determination of the number of Board members has taken into account the Company's circumstances, specifically in accordance with the Company's Articles of Association, which stipulate that the Board of Directors and the Board of Commissioners must consist of more than 1 (one) person. (As of December 31, 2025, the Board of Commissioners consists of 3 members and the Board of Directors consists of 3 members).
5.2	Penentuan komposisi anggota Direksi memperhatikan keberagaman keahlian, pengetahuan, dan pengalaman yang dibutuhkan. The composition of the Board of Directors is determined with due regard to the diversity of expertise, knowledge, and experience required.	*Comply*	Penentuan komposisi anggota Direksi telah memperhatikan keberagaman keahlian, pengetahuan, dan pengalaman yang dibutuhkan. The composition of the Board of Directors has been determined with due consideration for the diversity of expertise, knowledge, and experience required.
5.3	Anggota Direksi yang membawahi bidang akuntansi dan keuangan memiliki keahlian dan/atau pengetahuan di bidang akuntansi. A member of the Board of Directors responsible for accounting and finance must have expertise and/or knowledge in the field of accounting.	*Explain*	Direksi yang membawahi bidang akuntansi dan keuangan belum memiliki keahlian dan/atau pengetahuan di bidang akuntansi. Per 31 Desember 2025 Direktur Kuangan dan SDM dijabat oleh sdr. Rahmi Harahap dengan lulusan S1 Psikologi dengan pengalaman kerja Specialist Sistem Manajemen Terintegrasi Pada PT PLN (Persero) Pusat Pendidikan Dan Pelatihan (01 November 2022 - 30 November 2022), Vice President Eksekutif Direksi Pada Bidang Eksekutif Direksi Direktorat Retail Dan Niaga PT PLN (Persero) Kantor Pusat (01 Desember 2022 - 30 September 2024) The Board member in charge of accounting and finance does not yet possess expertise and/or knowledge in the field of accounting. As of December 31, 2025, the position of Director of Finance and Human Resources is held by Ms. Rahmi Harahap, who holds a Bachelor's degree in Psychology and has work experience as an Integrated Management Systems Specialist at PT PLN (Persero) Education and Training Center (November 1, 2022 – November 30, 2022), Executive Vice President of the Executive Board in the Retail and Commercial Directorate at PT PLN (Persero) Headquarters (December 1, 2022 – September 30, 2024)

Prinsip 6. Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi. Principle 6. Improving the Quality of the Board of Directors' Performance of Duties and Responsibilities.			
6.1	Direksi mempunyai kebijakan penilaian sendiri (*self assessment*) untuk menilai kinerja Direksi. The Board of Directors has a self-assessment policy to evaluate the performance of the Board of Directors.	*Explain*	Direksi mempunyai kebijakan penilaian sendiri (self assessment) untuk menilai kinerja Dewan Komisaris sebagaimana yang diatur dalam Pedoman Tata tertib Kerja Dewan Komisaris dan Direksi halaman 38. namun kebijakan tersebut belum mecakup kriteria penilaian yang digunakan sesuai dengan dengan rekomendasi yang diberikan oleh fungsi nominasi dan remunerasi The Board of Directors has a self-assessment policy to evaluate the performance of the Board of Commissioners as stipulated in the Code of Conduct for the Board of Commissioners and the Board of Directors on page 38. However, this policy does not yet include the assessment criteria used in accordance with the recommendations provided by the nomination and remuneration function
6.2	Kebijakan penilaian sendiri (*self assessment*) untuk menilai kinerja Direksi diungkapkan melalui laporan tahunan Perusahaan. The self-assessment policy for evaluating the performance of the Board of Directors is disclosed in the Company's annual report.	*Explain*	Kebijakan penilaian sendiri (self assessment) untuk menilai kinerja Direksi belum diungkapkan melalui Laporan Tahunan Perusahaan. The self-assessment policy for evaluating the performance of the Board of Directors has not been disclosed in the Company's Annual Report.
6.3	Direksi mempunyai kebijakan terkait pengunduran diri anggota Direksi apabila terlibat dalam kejahatan keuangan. The Board of Directors has a policy regarding the resignation of Board members if they are involved in financial crimes.	*Comply*	Dierksi telah mempunyai kebijakan terkait pengunduran diri anggota Direksi apabila terlibat dalam kejahatan keuangan yang diatur dalam Pedoman Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris dan Direksi "Anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi yang terlibat dalam kejahatan keuangan wajib mengundurkan diri dalam rangka menjaga moralitas dan membangun budaya beretika di lingkungan Perusahaan. Kejahatan keuangan dimaksud seperti manipulasi dan berbagai bentuk penggelapan dalam kegiatan jasa keuangan serta Tindakan Pidana Pencucian Uang sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang." "Anggota Direksi yang terlibat dalam kejahatan keuangan wajib mengundurkan diri dalam rangka meningkatkan kepercayaan para pemangku kepentingan terhadap Perusahaan, sehingga integritas Perusahaan akan tetap terjaga. Selain itu, untuk membantu kelancaran proses hukum dan agar proses hukum tersebut tidak mengganggu jalannya kegiatan usaha" The Board of Directors has a policy regarding the resignation of Board members if they are involved in financial crimes, as stipulated in the Code of Conduct for the Board of Commissioners and the Board of Directors: "Members of the Board of Commissioners and the Board of Directors who are involved in financial crimes are required to resign in order to uphold integrity and foster an ethical culture within the Company." Such financial crimes include manipulation and various forms of embezzlement in financial services activities, as well as money laundering offenses as defined in Law No. 8 of 2010 on the Prevention and Eradication of Money Laundering Offenses." "Members of the Board of Directors involved in financial crimes are required to resign in order to enhance stakeholders' trust in the Company, thereby ensuring that the Company's integrity is maintained. Additionally, this is to facilitate the smooth progress of legal proceedings and to ensure that such proceedings do not disrupt business operations."
Aspek D. Partisipasi Pemangku Kepentingan Aspect D. Stakeholder Participation			
Prinsip 7. Meningkatkan Aspek Tata Kelola Perusahaan melalui Partisipasi Pemangku Kepentingan. Principle 7. Enhancing Corporate Governance through Stakeholder Participation.			
7.1	Perusahaan memiliki kebijakan untuk mencegah terjadinya *insider trading*. The Company has a policy to prevent insider trading.	*Explain*	Sampai dengan akhir tahun 2025, PLN Energi Gas bukan merupakan Perusahaan terbuka dan merupakan Anak Perusahaan dari grup PT PLN EPI. Sehingga tidak terdapat kebijakan untuk mencegah terjadinya *insider trading* yang memuat aturan yang jelas mengenai perdagangan apa pun dalam saham korporasi yang dilakukan oleh Direktur, Komisaris dan orang dalam sehingga *Not Applicable*. As of the end of 2025, PLN Energi Gas is not a publicly traded company and is a subsidiary of the PT PLN EPI group. Therefore, there is no policy to prevent insider trading that contains clear rules regarding any trading in corporate shares conducted by Directors, Commissioners, and insiders; thus, this is Not Applicable.
7.2	Perusahaan memiliki kebijakan anti korupsi dan anti fraud. The Company has anti-corruption and anti-fraud policies.	*Comply*	Perusahaan telah memiliki kebijakan anti korupsi yang diatur dalam Manual Terintegrasi terkait SMAP dan kebijakan anti *fraud* yang diatur dalam Peraturan Direksi PT PLN Energi Gas Nomor: 0003.P/DIR/2024, tanggal 3 Januari 2024 tentang Kebijakan Anti *Fraud*. The Company has an anti-corruption policy set forth in the Integrated Manual regarding SMAP and an anti-fraud policy set forth in PT PLN Energi Gas Board of Directors Regulation No. 0003.P/DIR/2024, dated January 3, 2024, regarding the Anti-Fraud Policy.

Pemenuhan Standar Penerapan Tata Kelola Perusahaan
Compliance with Corporate Governance Standards



7.3 Perusahaan memiliki kebijakan tentang seleksi dan peningkatan kemampuan pemasok atau vendor. The Company has a policy regarding the selection and capacity building of suppliers or vendors.	*Explain*	Perusahaan telah memiliki kebijakan pengadaan barang dan jasa yang mengatur seleksi vendor, namun belum mengatur peningkatan kemampuan pemasok atau vendor seperti: a. Pengetahuan visi misi dan bisnis Perusahaan. b. Pengetahuan ketentuan dalam Perjanjian/Kontrak, termasuk mekanisme pelaksanaan Perjanjian/Kontrak. c. Pengetahuan aspek Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3). d. Pengetahuan aspek sosial dan lingkungan dalam proses Pengadaan Barang/Jasa. e. Pengetahuan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP). f. Pengetahuan lain yang sekiranya diperlukan untuk disampaikan kepada Penyedia Barang/Jasa. The Company has a goods and services procurement policy that governs vendor selection, but it does not yet address the capacity building of suppliers or vendors, such as: 7. Knowledge of the Company's vision, mission, and business. 8. Knowledge of the provisions in Agreements/Contracts, including the mechanisms for implementing Agreements/Contracts. 9. Knowledge of Occupational Health and Safety (OHS) aspects. 10. Knowledge of social and environmental aspects in the procurement of goods and services. 11. Knowledge of the Anti-Bribery Management System (ABMS). 12. Other knowledge deemed necessary to be communicated to Goods/Services Providers.
7.4 Perusahaan memiliki kebijakan tentang pemenuhan hak-hak kreditur. The Company has a policy regarding the fulfillment of creditors' rights.	*Explain*	Perusahaan telah mengungkapkan informasi terkait Pemenuhan hak-hak kreditur oleh Perusahaan dilakukan berdasarkan prinsip kehati-hatian dan mengacu pada ketentuan yang tercantum dalam setiap perjanjian atau kontrak yang telah disepakati bersama kreditur. namun belum mecakup kebijakan dan praktik yang membahas perlindungan hak-hak kreditur. The Company has disclosed information regarding the fulfillment of creditors' rights, which is carried out based on the principle of prudence and in accordance with the provisions set forth in each agreement or contract mutually agreed upon with creditors. However, this has not yet covered policies and practices addressing the protection of creditors' rights.
7.5 Perusahaan memiliki kebijakan sistem whistleblowing. The Company has a whistleblowing policy.	*Comply*	Perusahaan telah memiliki kebijakan sistem *whistleblowing* yang diungkapkan pada *website* Perusahaan https://plnenergigas.co.id/tata-kelola/wbs dan Laporan Tahunan 2024 halaman 267. The Company has a whistleblowing system policy disclosed on the Company's website at https://plnenergigas.co.id/tata-kelola/wbs and in the 2024 Annual Report on page 267.

7.6	Perusahaan memiliki kebijakan pemberian insentif jangka panjang kepada Direksi dan karyawan. The Company has a policy on providing long-term incentives to the Board of Directors and employees.	*Explain*	Perusahaan belum memiliki kebijakan pemberian insentif jangka panjang kepada Direksi dan karyawan. The Company does not yet have a policy on providing long-term incentives to the Board of Directors and employees.
Aspek E. Keterbukaan Informasi **Aspect E. Information Disclosure**			
Prinsip 8. Meningkatkan Pelaksanaan Keterbukaan Informasi. Principle 8. Enhancing the Implementation of Information Disclosure.			
8.1	Perusahaan memanfaatkan penggunaan teknologi informasi secara lebih luas selain situs web sebagai media keterbukaan informasi. The Company makes broader use of information technology, in addition to its website, as a medium for information disclosure.	*Comply*	Perusahaan telah memanfaatkan teknologi informasi secara lebih luas. Selain website, Perusahaan memanfaatkan teknologi informasi dan aplikasi media lainnya seperti platform media sosial, yaitu: Instagram (@pln_energigas), Linkedin (PT PLN Energi Gas), Website (https://www.plnenergigas.co.id/), Email (info@plnenergigas.co.id), Youtube (@ptplnenergigas). The Company has made broader use of information technology. In addition to its website, the Company utilizes information technology and other media platforms such as social media, namely: Instagram (@pln_energigas), LinkedIn (PT PLN Energi Gas), Website (https://www.plnenergigas.co.id/), Email (info@plnenergigas.co.id), and YouTube (@ptplnenergigas).
8.2	Laporan Tahunan Perusahaan mengungkapkan pemilik manfaat akhir dalam kepemilikan saham Perusahaan Terbuka paling sedikit 5% (lima persen), selain pengungkapan pemilik manfaat akhir dalam kepemilikan saham Perusahaan Terbuka melalui pemegang saham utama dan pengendali. The Company's Annual Report discloses the ultimate beneficial owners holding at least 5% (five percent) of the Public Company's shares, in addition to disclosures regarding the ultimate beneficial owners of the Public Company's shares through major and controlling shareholders.	*Comply*	Laporan Tahunan Perusahaan telah mengungkapkan pemilik manfaat akhir dalam kepemilikan saham Perusahaan paling sedikit 5% (lima persen), selain pengungkapan pemilik manfaat akhir dalam kepemilikan saham Perusahaan Terbuka melalui pemegang saham utama dan pengendali. The Company's Annual Report has disclosed the ultimate beneficial owners holding at least 5% (five percent) of the Company's shares, in addition to the disclosure of ultimate beneficial owners holding shares in the Public Company through major and controlling shareholders.

Pedoman Umum Governansi Korporasi Indonesia

Pedoman Umum Governansi Korporat Indonesia (PUGKI) yang diterbitkan oleh Komite Nasional Kebijakan *Governance* (KNKG) pada tahun 2021 merupakan pembaruan atas Pedoman Umum *Good Corporate Governance* (GCG) Indonesia, yang bertujuan untuk menyelaraskan praktik governansi korporat dengan standar dan praktik terbaik global.

Sejalan dengan hal tersebut, Perusahaan melakukan pemetaan penerapan praktik governansi korporat berdasarkan prinsip dan rekomendasi PUGKI 2021 dengan pendekatan *apply or explain*. Hasil pemetaan tersebut digunakan untuk menilai tingkat implementasi serta mengidentifikasi area yang telah sesuai maupun yang masih memerlukan penyesuaian. Rincian implementasi disajikan sebagai berikut:

Indonesian General Guidelines on Corporate Governance

The General Guidelines on Indonesian Corporate Governance (PUGKI), published by the National Committee on Governance Policy (KNKG) in 2021, are an update to the General Guidelines on Good Corporate Governance (GCG) in Indonesia, aimed at aligning corporate governance practices with global standards and best practices.

In line with this, the Company conducted a mapping of the implementation of corporate governance practices based on the principles and recommendations of the 2021 PUGKI using an "apply or explain" approach. The results of this mapping were used to assess the level of implementation and to identify areas that are already compliant as well as those that still require adjustments. Details of the implementation are presented as follows:

Pemenuhan Standar Penerapan Tata Kelola Perusahaan
Compliance with Corporate Governance Standards

Penerapan Pedoman Umum Governansi Korporat Indonesia (PUGKI)
Implementation of the Indonesian General Corporate Governance Guidelines (PUGKI)

Rekomendasi Recommendations	Status Status	Penjelasan Explanation
Prinsip 1. Peran dan Tanggung Jawab Direksi dan Dewan Komisaris Principle 1. Roles and Responsibilities of the Board of Directors and the Board of Commissioners		
1.1. Peran dan Tanggung Jawab Direksi Roles and Responsibilities of the Board of Directors		
1.1.1 Untuk mencapai penciptaan nilai yang berkelanjutan, Direksi menjalankan peran kepemimpinannya dan berupaya mencapai hasil governansi sebagai berikut: a. berdaya saing dan berfokus ke kinerja jangka panjang; b. beretika dan bertanggung jawab dalam menjalankan bisnis; c. berkontribusi positif terhadap masyarakat dan lingkungan; serta d. berkemampuan dalam bertahan dan bertumbuh (*corporate resilience*). To achieve sustainable value creation, the Board of Directors exercises its leadership role and strives to achieve the following governance outcomes: e. competitive and focused on long-term performance; f. ethical and responsible in conducting business; g. making a positive contribution to society and the environment; and h. capable of sustaining and growing (*corporate resilience*).	*Apply*	Untuk mencapai penciptaan nilai yang berkelanjutan, Direksi telah menjalankan peran kepemimpinannya dan berupaya mencapai hasil governansi sebagai berikut: a. berdaya saing dan berfokus ke kinerja jangka panjang; b. beretika dan bertanggung jawab dalam menjalankan bisnis; c. berkontribusi positif terhadap masyarakat dan lingkungan; serta d. berkemampuan dalam bertahan dan bertumbuh (*corporate resilience*). To achieve sustainable value creation, the Board of Directors has exercised its leadership role and strived to achieve the following governance outcomes: a. being competitive and focused on long-term performance; b. ethical and responsible in conducting business; c. making a positive contribution to society and the environment; and d. capable of sustaining and growing (corporate resilience).
1.1.2 Direksi harus memastikan bahwa misi, visi, tujuan, sasaran, strategi, dan rencana tahunan dan jangka menengah korporasi konsisten dengan tujuan jangka panjang, dengan memanfaatkan inovasi dan teknologi secara efektif. The Board of Directors must ensure that the corporation's mission, vision, goals, objectives, strategies, and annual and medium-term plans are consistent with its long-term objectives, while effectively leveraging innovation and technology.	*Apply*	Direksi senantiasa memastikan bahwa seluruh perencanaan strategis mulai dari visi, misi, tujuan serta strategi Perusahaan telah disusun secara selaras dan konsisten dengan RJPP dan RKAP Perusahaan. Perusahaan juga telah mengintegrasikan pemanfaatan inovasi dan teknologi dalam penyusunan strategi dan perencanaan korporasi. Hal ini tercermin melalui berbagai inisiatif transformasi digital yang secara sistematis dituangkan dalam dokumen RJPP, RKAP, IT Masterplan. The Board of Directors consistently ensures that all strategic planning—from the Company's vision, mission, objectives, and strategies—is formulated in alignment with and consistent with the Company's RJPP and RKAP. The Company has also integrated the use of innovation and technology into the formulation of corporate strategies and planning. This is reflected through various digital transformation initiatives that are systematically incorporated into the RJPP, RKAP, and IT Master Plan documents.
1.1.3 Direksi memastikan bahwa korporasi menerapkan manajemen risiko dan sistem pengendalian internal yang tepat dan efektif yang selaras dengan visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategi korporasi serta mematuhi peraturan perundang-undangan dan standar yang berlaku. The Board of Directors ensures that the Corporation implements appropriate and effective risk management and internal control systems that are aligned with the Corporation's vision, mission, goals, objectives, and strategies, and that comply with applicable laws, regulations, and standards.	*Apply*	Direksi telah memastikan bahwa korporasi menerapkan manajemen risiko dan sistem pengendalian internal yang tepat dan efektif yang selaras dengan visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategi korporasi serta mematuhi peraturan perundang-undangan dan standar yang berlaku. The Board of Directors has ensured that the corporation implements appropriate and effective risk management and internal control systems that are aligned with the corporation's vision, mission, goals, objectives, and strategies, and that comply with applicable laws, regulations, and standards.

1.1.4	Direksi memastikan integritas akuntansi dan sistem pelaporan keuangan korporasi dan pengungkapan yang tepat waktu dan akurat atas semua informasi material mengenai korporasi. The Board of Directors ensures the integrity of the corporation's accounting and financial reporting systems and the timely and accurate disclosure of all material information regarding the corporation.	*Explain*	Direksi telah memastikan bahwa setiap orang yang terlibat dalam persiapan dan pengungkapan informasi korporasi memiliki pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman yang relevan. Selain itu, Direksi juga telah memastikan ketersediaan sumber daya (termasuk karyawan) yang memadai. Namun belum diperoleh bukti adanya program sertifikasi sumber daya yang mengelola pelaporan keuangan, serta belum terdapat publikasi laporan keuangan triwulanan dan laporan *analyst meeting* yang diinformasikan secara terbuka kepada investor, analis dan pemangku kepentingan lainnya. The Board of Directors has ensured that every person involved in the preparation and disclosure of corporate information possesses the relevant knowledge, skills, and experience. In addition, the Board has also ensured the availability of adequate resources (including employees). However, no evidence has been obtained regarding a certification program for personnel managing financial reporting, and there have been no quarterly financial reports or analyst meeting reports publicly disclosed to investors, analysts, and other stakeholders.
1.1.5.	Direksi memastikan pelaporan keberlanjutan telah disusun sebagaimana mestinya. The Board of Directors ensures that sustainability reporting has been prepared appropriately.	*Explain*	Direksi belum memastikan pelaporan keberlanjutan telah disusun sebagaimana mestinya. The Board of Directors has not ensured that sustainability reporting has been prepared as required.
1.1.6.	Direksi membangun kerangka kerja untuk governansi teknologi informasi (TI) korporasi yang selaras dengan kebutuhan dan prioritas bisnis korporasi, mendorong peluang dan kinerja bisnis, memperkuat manajemen risiko, serta mendukung tujuan dan strategi korporasi. The Board of Directors has established a framework for corporate information technology (IT) governance that aligns with the Company's business needs and priorities, drives business opportunities and performance, strengthens risk management, and supports the Company's objectives and strategies.	*Apply*	Perusahaan telah memiliki kerangka kerja untuk governansi teknologi informasi yang mendukung kegiatan bisnis Perusahaan. Saat ini Perusahaan telah menyusun IT *Master Plan*, dan IT *Disaster Recovery Plan*. The Company already has a framework for information technology governance that supports the Company's business activities. Currently, the Company has developed an IT Master Plan and an IT Disaster Recovery Plan.
1.1.7.	Bagi korporasi yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip Syariah, Direksi perlu memastikan kewenangan dan ketersediaan perangkat pendukung yang memadai agar Dewan Pengawas Syariah dapat menjalankan perannya dengan efektif. For corporations conducting business activities based on Sharia principles, the Board of Directors must ensure that the Sharia Supervisory Board has sufficient authority and access to adequate support tools to perform its role effectively.	*Explain*	Saat ini, PT PLN Energi Gas tidak menjalankan kegiatan usaha yang berbasis prinsip Syariah (*Not Applicable*). Oleh karena itu, Perusahaan tidak memiliki Dewan Pengawas Syariah atau perangkat pendukung lainnya yang terkait dengan penerapan prinsip Syariah dalam operasional bisnis. Currently, PT PLN Energi Gas does not conduct business activities based on Sharia principles (Not Applicable). Therefore, the Company does not have a Sharia Supervisory Board or other supporting mechanisms related to the application of Sharia principles in business operations.
1.1.8.	Piagam Direksi secara periodik ditinjau. Piagam mencakup antara lain pembagian peran Direktur secara individual dapat diatur di Piagam Direksi atau dengan surat keputusan Direksi. The Board of Directors' Charter is reviewed periodically. The Charter covers, among other things, the division of roles among individual Directors, which may be stipulated in the Board of Directors' Charter or by a Board of Directors' resolution.	*Apply*	Direksi secara periodik telah meninjau pembagian peran Direktur secara individual yang dapat diatur Surat Keputusan Pembagian Tugas masing-masing Direksi yang berlaku hingga per 31 Desember 2025. The Board of Directors has periodically reviewed the division of roles among individual Directors, which is governed by the Decree on the Division of Duties for each Director, effective through December 31, 2025.
1.1.9.	Direksi mempunyai kebijakan terkait pengunduran diri anggota Direksi apabila terlibat dalam kejahatan keuangan dan terbukti melakukan kesalahan. The Board of Directors has a policy regarding the resignation of Board members if they are involved in financial crimes and are proven to have committed misconduct.	*Apply*	Perusahaan telah menetapkan kebijakan khusus terkait pengunduran diri Direksi apabila terlibat dan terbukti melakukan kejahatan keuangan. Yang dimaksud dengan terlibat dalam kejahatan keuangan merupakan adanya status terpidana terhadap anggota Direksi dari pihak yang berwenang. Kejahatan keuangan dimaksud seperti manipulasi dan berbagai bentuk penggelapan dalam kegiatan jasa keuangan serta Tindakan Pidana Pencucian Uang sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Pemenuhan Standar Penerapan Tata Kelola Perusahaan
Compliance with Corporate Governance Standards

1.2.	Penilaian Kinerja - Direksi dan Anggotanya Performance Evaluation - Board of Directors and Its Members		
1.2.1	Dewan Komisaris melakukan evaluasi formal tahunan secara obyektif dan independen untuk menentukan efektivitas Direksi dan setiap individu direktur. The Board of Commissioners conducts an annual formal evaluation in an objective and independent manner to determine the effectiveness of the Board of Directors and each individual director.	*Apply*	Dewan Komisaris telah melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kinerja Direksi setiap bulan berdasarkan Kontrak Manajemen maupun *Key Performance Indicator* masing-masing Direksi. Hasil dari evaluasi tersebut kemudian disampaikan kepada Pemegang Saham sebagai bahan pembahasan dalam RUPS Tahunan. The Board of Commissioners has monitored and evaluated the performance of the Board of Directors on a monthly basis based on the Management Contracts and the Key Performance Indicators of each director. The results of these evaluations are then presented to the Shareholders for discussion at the Annual General Meeting of Shareholders.
1.2.2	Dewan Komisaris dengan pertimbangan Komite Nominasi dan Remunerasi, bertanggung jawab menentukan kriteria evaluasi kinerja dan menilai kinerja Direktur Utama dan anggota Direksi lainnya. The Board of Commissioners, with input from the Nomination and Remuneration Committee, is responsible for determining performance evaluation criteria and assessing the performance of the President Director and other members of the Board of Directors.	*Apply*	Setiap tahun, Dewan Komisaris bersama dengan Komite Nominasi dan Remunerasi melakukan penilaian atas capaian kinerja Direktur Utama dan anggota Direksi lainnya terhadap pencapaian target-target yang tercantum dalam KPI. Each year, the Board of Commissioners, together with the Nomination and Remuneration Committee, assesses the performance of the President Director and other members of the Board of Directors against the targets set forth in the KPIs.
1.3.	Peran dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris Roles and Responsibilities of the Board of Commissioners		
1.3.1.	Dewan Komisaris mereviu strategi korporasi paling tidak setiap tahun dan menyetujui misi, visi dan strategi korporasi yang dirumuskan oleh Direksi. Dewan Komisaris juga mereviu, memberikan saran dan menyetujui rencana bisnis dan rencana keuangan jangka panjang dan rencana keuangan jangka pendek korporasi. Dewan Komisaris memberikan advis dan melakukan pemantauan kepada Direksi atas pengelolaan implementasinya. Direksi dan Dewan Komisaris terlibat dalam keputusan yang sangat penting bagi korporasi, diatur dalam anggaran dasar korporasi. The Board of Commissioners reviews the corporate strategy at least once a year and approves the corporate mission, vision, and strategy formulated by the Board of Directors. The Board of Commissioners also reviews, provides advice on, and approves the corporation's long-term and short-term business and financial plans. The Board of Commissioners provides advice and monitors the Board of Directors regarding the management and implementation of these plans. The Board of Directors and the Board of Commissioners are involved in decisions of critical importance to the corporation, as stipulated in the corporation's articles of incorporation.	*Apply*	Dewan Komisaris telah memberikan tanggapan tertulis terkait RJPP 2024-2028. Adapun Dewan Komisaris juga telah memberikan tanggapan terkait atas Permohonan Telaahan dan Persetujuan Pendandatanganan RJPP 2024-2028. Dewan Komisaris telah memberikan persetujuan RKAP dan RJPP atas susulan Direksi. The Board of Commissioners has provided a written response regarding the 2024– 2028. Furthermore, the Board of Commissioners has also provided a response regarding the Request for Review and Approval of the Signing of the 2024–2028 RJPP. The Board of Commissioners has approved the RKAP and RJPP as submitted by the Board of Directors.
1.3.2	Jenis keputusan yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris harus diungkapkan dalam laporan tahunan. The types of decisions requiring the Board of Commissioners' approval must be disclosed in the annual report.	*Apply*	Laporan Tahunan Perusahaan telah mengungkapkan jenis keputusan Direksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris sesuai dengan yang tercantum dalam Anggaran Dasar Perusahaan. Berikut merupakan Keputusan Direksi yang Memerlukan Persetujuan Dewan Komisaris.
1.3.3	Dengan memperhatikan rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi, Dewan Komisaris mengusulkan kepada, dan untuk diputuskan oleh, RUPS pengangkatan dan/atau pemberhentian anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris. Dalam mengusulkan hal di atas, Dewan Komisaris memperhatikan keberagaman, unsur non diskriminatif dan memberikan kesempatan yang sama tanpa membedakan suku, agama, ras, antar golongan dan *gender*. Dewan Komisaris memastikan proses pencalonan dan pemilihan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris adalah formal dan transparan. Taking into account the recommendations of the Nomination and Remuneration Committee, the Board of Commissioners proposes to the General Meeting of Shareholders, for its decision, the appointment and/or dismissal of members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners. In proposing the above, the Board of Commissioners takes into account diversity, non-discrimination, and equal opportunity without distinction based on ethnicity, religion, race, social class, or gender. The Board of Commissioners ensures that the nomination and election processes for members of the Board of Directors and the Board of Commissioners are formal and transparent.	*Explain*	Dengan memperhatikan rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi, Dewan Komisaris mengusulkan kepada, dan untuk diputuskan oleh RUPS pengangkatan dan/atau pemberhentian anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris. Dalam mengusulkan hal di atas, Dewan Komisaris memperhatikan keberagaman, unsur nondiskriminatif dan memberikan kesempatan yang sama tanpa membedakan suku, agama, ras, antar golongan dan jender. Dewan Komisaris memastikan proses pencalonan dan pemilihan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris adalah formal dan transparan. *Not Applicable* (N/A) karena kewenangan ada di pemegang saham dan PLN Persero. Taking into account the recommendations of the Nomination and Remuneration Committee, the Board of Commissioners proposes to the General Meeting of Shareholders, for its decision, the appointment and/or dismissal of members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners. In proposing the above, the Board of Commissioners takes into account diversity, non-discrimination, and the provision of equal opportunities without distinction based on ethnicity, religion, race, social class, or gender. The Board of Commissioners ensures that the nomination and election processes for members of the Board of Directors and the Board of Commissioners are formal and transparent. Not Applicable (N/A) because the authority lies with the shareholders and PLN Persero.

1.3.4	Dewan Komisaris atau Komite yang menjalankan fungsi nominasi menyusun kebijakan suksesi dalam proses nominasi anggota Direksi. Setiap tahun Dewan Komisaris meninjau pelaporan pelaksanaan rencana pengembangan dan suksesi yang disampaikan Direktur Utama. The Board of Commissioners or the committee responsible for nomination functions develops a succession policy as part of the nomination process for members of the Board of Directors. Each year, the Board of Commissioners reviews the report on the implementation of the development and succession plan submitted by the President Director.	*Explain*	Dewan Komisaris atau Komite yang menjalankan fungsi nominasi menyusun kebijakan suksesi dalam proses nominasi anggota Direksi. Setiap tahun Dewan Komisaris meninjau pelaporan pelaksanaan rencana pengembangan dan suksesi yang disampaikan Direktur Utama. *Not Applicable* (N/A) karena kewenangan ada di pemegang saham dan PLN Persero. The Board of Commissioners or the committee performing the nomination function formulates succession policies in the nomination process for members of the Board of Directors. Each year, the Board of Commissioners reviews the report on the implementation of the development and succession plans submitted by the President Director. Not Applicable (N/A) because the authority lies with the shareholders and PLN Persero.
1.3.5	Dewan Komisaris a). mengajukan kepada RUPS, yang dapat didahului oleh usulan dari Komite yang menjalankan fungsi remunerasi, besaran remunerasi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang selaras dengan pengembangan korporasi yang berkelanjutan dan kepentingan jangka panjang korporasi dan pemegang saham; b). secara berkala mereviu sistem remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris. The Board of Commissioners a). submits to the General Meeting of Shareholders (GMS)—which may be preceded by a proposal from the committee performing the remuneration function—the amount of remuneration for members of the Board of Directors and the Board of Commissioners that is aligned with the corporation's sustainable development and the long-term interests of the corporation and its shareholders; b). periodically reviews the remuneration system for the Board of Directors and the Board of Commissioners.	*Apply*	Dewan Komisaris telah a). mengajukan kepada RUPS, yang dapat didahului oleh usulan dari Komite yang menjalankan fungsi remunerasi, besaran remunerasi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang selaras dengan pengembangan korporasi yang berkelanjutan dan kepentingan jangka panjang korporasi dan pemegang saham; b). secara berkala mereviu sistem remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris. The Board of Commissioners has a). submitted to the General Meeting of Shareholders, which may be preceded by a proposal from the committee responsible for remuneration, the amount of remuneration for members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners that is aligned with the Company's sustainable development and the long-term interests of the Company and its shareholders; b). periodically reviewed the remuneration systems for the Board of Directors and the Board of Commissioners.
1.3.6	Dewan Komisaris mengawasi efektivitas kebijakan governansi korporat dan implementasinya serta mengusulkan perubahan jika diperlukan. The Board of Commissioners oversees the effectiveness of corporate governance policies and their implementation and proposes changes as necessary.	*Apply*	Sesuai dengan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris untuk melakukan pengawasan termasuk kebijakan governansi di Perusahaan, secara berkala Dewan Komisaris telah mengawasi struktur, proses, dan hasil governansi Perusahaan serta mengusulkan perbaikannya. Hal ini diimplementasikan melalui pelaksanaan Laporan *Assessment Good Corporate* Governance PT PLN EG 2024 yang dilakukan oleh pihak independen sebagai bentuk penilaian atas penerapan tata kelola Perusahaan. In accordance with the Board of Commissioners' duties and responsibilities to conduct oversight, including corporate governance policies at the Company, the Board of Commissioners has periodically monitored the Company's governance structure, processes, and outcomes and proposed improvements. This is implemented through the PT PLN EG 2024 Good Corporate Governance Assessment Report, conducted by an independent party as an evaluation of the Company's governance practices.
1.3.7	Dewan Komisaris memantau dan mengarahkan agar korporasi menerapkan manajemen risiko dan sistem pengendalian internal yang tepat dan efektif yang selaras dengan tujuan, sasaran, dan strategi korporasi serta mematuhi peraturan perundang-undangan, kode perilaku dan standar yang berlaku. The Board of Commissioners monitors and directs the corporation to implement appropriate and effective risk management and internal control systems that are aligned with the corporation's goals, objectives, and strategies, and that comply with applicable laws and regulations, codes of conduct, and standards.	*Apply*	Dewan Komisaris bertugas untuk mengawasi dan memberikan masukan kepada Direksi dalam penerapan manajemen risiko dan sistem pengendalian internal yang efektif dan selaras dengan rencana bisnis Perusahaan. Melalui rapat internal, Dewan Komisaris melakukan telaah atas kebijakan dan implementasi manajemen risiko dan memberikan arahan dalam rapat gabungan agar Direksi senantiasa mematuhi peraturan perundang-undangan, kode etik dan standar yang berlaku. Dewan Komisaris juga telah memiliki Komite Investasi dan Manajemen Risiko yang membantu Dewan Komisaris dalam mengevaluasi sistem manajemen risiko termasuk sistem pengendalian internal serta menilai toleransi risiko Perusahaan. The Board of Commissioners is tasked with overseeing and providing input to the Board of Directors regarding the implementation of effective risk management and internal control systems that are aligned with the Company's business plan. Through internal meetings, the Board of Commissioners reviews risk management policies and their implementation and provides guidance during joint meetings to ensure the Board of Directors consistently complies with applicable laws and regulations, codes of ethics, and standards. The Board of Commissioners has also established an Investment and Risk Management Committee to assist the Board of Commissioners in evaluating the risk management system—including the internal control system—and assessing the Company's risk tolerance.

Pemenuhan Standar Penerapan Tata Kelola Perusahaan
Compliance with Corporate Governance Standards

1.3.8	Dewan Komisaris mengawasi dan mengarahkan agar tercapai integritas akuntansi dan sistem pelaporan keuangan korporat, serta independensi fungsi audit internal dan eksternal. The Board of Commissioners oversees and provides guidance to ensure the integrity of accounting and corporate financial reporting systems, as well as the independence of internal and external audit functions.	*Apply*	Dewan Komisaris telah memastikan bahwa integritas atas pelaporan akuntansi dan Laporan Keuangan Perusahaan dapat terjaga. Laporan Keuangan senantiasa di reviu dan disetujui oleh Dewan Komisaris berdasarkan hasil telaah Komite Audit sebelum sampaikan kepada Pemegang Saham maupun dipublikasikan kepada publik dalam Laporan Tahunan. Dewan Komisaris juga melakukan pengawasan atas kegiatan audit internal dan eksternal namun tidak mengintervensi proses dan hasil audit. The Board of Commissioners has ensured that the integrity of the Company's accounting reports and financial statements is maintained. The Financial Statements are always reviewed and approved by the Board of Commissioners based on the findings of the Audit Committee before being submitted to Shareholders or published to the public in the Annual Report. The Board of Commissioners also oversees internal and external audit activities but does not interfere with the audit process or results.
1.3.9	Dewan Komisaris memantau, mereviu dan menyetujui laporan tahunan dan laporan keberlanjutan Korporasi serta memastikan integritasnya, serta mengawasi proses pengungkapan dan pengkomunikasian korporasi. The Board of Commissioners monitors, reviews, and approves the Corporation's annual report and sustainability report, ensuring their integrity, and oversees the Corporation's disclosure and communication processes.	*Explain*	Dewan Komisaris telah memantau, merevieu dan menyetujui Laporan Tahunan serta memastikan integritas laporan dan mengawasi proses pengungkapan dan pengkomunikasiannya sebagaimana tertuang dalam penandatanganan Surat Pernyataan Dewan Komisaris dan Direksi tentang Tanggung Jawab atas Laporan Tahunan. Namun untuk laporan keberlanjutan belum ditandatangani oleh dewan komisaris dan direksi dikarenakan perusahaan belum memiliki laporan keberlanjutan. The Board of Commissioners has monitored, reviewed, and approved the Annual Report, ensured the integrity of the report, and overseen the disclosure and communication process, as set forth in the signed Statement by the Board of Commissioners and the Board of Directors regarding Responsibility for the Annual Report. However, the sustainability report has not yet been signed by the Board of Commissioners and the Board of Directors because the Company does not yet have a sustainability report.
1.3.10	Piagam Dewan Komisaris secara periodik ditinjau. The Board of Commissioners' Charter is reviewed periodically.	*Explain*	Pedoman Tata Tertib Dewan Komisaris dan Direksi Tahun 2024 telah menyesuaikan pada ketentuan baru. Namun belum mengacu pada UU BUMN terbaru serta ketentuan dari Danantara. The 2024 Code of Conduct for the Board of Commissioners and the Board of Directors has been updated to comply with new regulations. However, it does not yet align with the latest State-Owned Enterprises Law or the provisions of Danantara.
1.3.11	Dewan Komisaris mempunyai kebijakan terkait pengunduran diri anggota Dewan Komisaris apabila terlibat dalam kejahatan keuangan dan terbukti melakukan kesalahan. The Board of Commissioners has a policy regarding the resignation of Board members if they are involved in financial crimes or are proven to have committed misconduct.	*Apply*	Perusahaan telah menetapkan kebijakan terkait pengunduran diri Direksi apabila terlibat dalam tindakan yang merugikan perseroan dan atau keuangan negara. The Company has established a policy regarding the resignation of members of the Board of Directors if they are involved in actions that harm the Company and/or the state's finances.
1.3.12	Komisaris independen sangat diharapkan untuk dapat berkontribusi dalam diskusi yang jujur, obyektif, aktif dan konstruktif pada rapat Dewan Komisaris. Independent commissioners are strongly encouraged to contribute to honest, objective, active, and constructive discussions at Board of Commissioners meetings.	*Explain*	Komisaris Independen belum ditetapkan oleh Pemegang Saham. Independent Commissioners have not yet been appointed by the Shareholders.
1.3.13	Komisaris Utama berperan sebagai koordinator Dewan Komisaris dan memastikan efektivitasnya. Komisaris Utama mendorong budaya keterbukaan dan dialog konstruktif yang memungkinkan berbagai pandangan diungkapkan, termasuk mengkoordinasi penetapan agenda rapat dewan yang tepat dan memastikan waktu yang cukup tersedia untuk mendiskusikan semua agenda. Selain itu, juga harus ada kesempatan bagi Dewan Komisaris untuk bertemu dengan jajaran Direksi dan manajemen senior. The President Commissioner serves as the coordinator of the Board of Commissioners and ensures its effectiveness. The President Commissioner fosters a culture of openness and constructive dialogue that allows for the expression of diverse viewpoints, including coordinating the setting of an appropriate meeting agenda and ensuring sufficient time is available to discuss all agenda items. Additionally, there must be opportunities for the Board of Commissioners to meet with the Board of Directors and senior management.	*Explain*	Komisaris Utama memimpin seluruh anggota Dewan Komisaris lainnya. Tugas dan tanggung jawab Komisaris Utama belum diungkapkan dalam Laporan Terintegrasi dan Situs Web Perusahaan dan juga belum terdapat pengaturan terkait penugasan Komisaris Utama untuk mewakili Dewan Komisaris dalam urusan dengan pihak luar Dewan Komisaris. The President Commissioner leads all other members of the Board of Commissioners. The duties and responsibilities of the President Commissioner have not been disclosed in the Integrated Report or on the Company's website, and there are also no provisions regarding the assignment of the President Commissioner to represent the Board of Commissioners in matters involving parties outside the Board of Commissioners.

Pemenuhan Standar Penerapan Tata Kelola Perusahaan
Compliance with Corporate Governance Standards

1.4.	Pembentukan Komite Committee Formation		
1.4.1.	Korporasi memiliki komite-komite di bawah Dewan Komisaris sekurang-kurangnya terdiri dari: Komite Audit, Komite Nominasi dan Remunerasi dan Komite Pemantau Manajemen Risiko. The Company has committees under the Board of Commissioners consisting of at least the following: the Audit Committee, the Nomination and Remuneration Committee, and the Risk Management Oversight Committee.	*Apply*	Perusahaan telah memiliki 2 (dua) Komite, yaitu Komite Audit, Komite Nominasi dan Remunerasi dan Komite Manajemen Risiko The Company has established 2 (two) committees, namely the Audit Committee, the Nomination and Compensation Committee, and the Risk Management Committee
1.4.2.	Dewan Komisaris memastikan bahwa anggota Komite Audit seluruhnya independen dan komite lain yang dibentuk Dewan Komisaris adalah mayoritas dari pihak independen, serta semua anggota komite memiliki kompetensi, berkomitmen, serta memiliki wewenang yang memadai untuk menjalankan perannya secara efektif dan independen. The Board of Commissioners ensures that all members of the Audit Committee are independent and that a majority of the members of other committees formed by the Board of Commissioners are independent, and that all committee members are competent, committed, and have sufficient authority to carry out their roles effectively and independently.	*Explain*	Saat ini Anggota Komite Audit tidak seluruhnya Independen dan Komite lainnya tidak mayoritas Independen. Currently, not all members of the Audit Committee are independent, and the other committees do not have a majority of independent members.
1.4.3.	Untuk memastikan pemantauan atas pelaksanaan tugas Komite Audit berjalan obyektif dan independen, Komisaris Utama tidak boleh menjadi ketua Komite Audit, kecuali dalam keadaan luar biasa yang harus dijelaskan dalam laporan tahunan. To ensure that oversight of the Audit Committee's duties is conducted objectively and independently, the President Commissioner may not serve as the chair of the Audit Committee, except under extraordinary circumstances that must be explained in the annual report.	*Apply*	Saat ini Ketua Komite Audit dijabat oleh Sdri. Andriah Feby Misna yang merangkap sebagai Dewan Komisaris Currently, the Chair of the Audit Committee is Ms. Andriah Feby Misna, who also serves on the Board of Commissioners
1.5.	Penilaian Kinerja – Dewan Komisaris dan Anggotanya Performance Evaluation – Board of Commissioners and Its Members		
1.5.1	Dewan Komisaris melakukan evaluasi formal tahunan secara objektif untuk menentukan efektivitas Dewan, komitenya, dan setiap individu komisaris. The Board of Commissioners conducts an objective annual formal evaluation to determine the effectiveness of the Board, its committees, and each individual commissioner.	*Explain*	Dewan Komisaris melakukan evaluasi formal tahunan secara obyektif untuk menentukan efektivitas Dewan, komitenya, dan setiap individu komisaris. Dewan Komisaris telah memiliki kebijakan formal terkait penilaian mandiri (self-assessment) kinerja Dewan Komisaris yang dilakukan oleh masing-masing anggota untuk menilai pelaksanaan fungsi Dewan Komisaris secara kolegial, serta belum menetapkan tolok ukur atau kriteria penilaian atas kebijakan self-assessment maupun kebijakan penilaian lainnya bagi Dewan Komisaris. Namun pedoman penilaian kinerja Dewan Komisaris belum melibatkan peran konsultan eksternal independen untuk memfasilitasi evaluasi kinerja Dewan Komisaris yang objektif dan jujur. The Board of Commissioners conducts an objective annual formal evaluation to determine the effectiveness of the Board, its committees, and each individual commissioner. The Board of Commissioners has a formal policy regarding the self-assessment of the Board's performance, which is conducted by each member to evaluate the collective performance of the Board of Commissioners; however, it has not yet established benchmarks or evaluation criteria for the self-assessment policy or other evaluation policies for the Board of Commissioners. However, the guidelines for evaluating the Board of Commissioners' performance do not yet involve the role of an independent external consultant to facilitate an objective and impartial evaluation of the Board of Commissioners' performance.

Pemenuhan Standar Penerapan Tata Kelola Perusahaan
Compliance with Corporate Governance Standards

1.6.	Benturan Kepentingan Conflicts of Interest		
1.6.1.	Anggota Direksi yang mempunyai rangkap jabatan di luar korporasi, harus mendapatkan persetujuan dari Dewan Komisaris. Seorang Komisaris memberi tahu Dewan Komisaris dan ketua komite yang menjalankan fungsi nominasi, sebelum menerima penunjukan baru sebagai direktur atau komisaris dari korporasi terbuka, jabatan direktur lainnya atau posisi lain dengan komitmen waktu yang signifikan. Members of the Board of Directors who hold concurrent positions outside the corporation must obtain approval from the Board of Commissioners. A Commissioner must notify the Board of Commissioners and the chair of the committee responsible for nominations before accepting a new appointment as a director or commissioner of a publicly traded corporation, another directorship, or any other position requiring a significant time commitment.	*Apply*	Seluruh anggota Direksi yang menjabat tidak memiliki rangkap jabatan. Ketentuan rangkap jabatan Direksi telah ditetapkan dalam Anggaran Dasar Perusahaan dan Pedoman Tata Tertib Dewan Komisaris dan Direksi. None of the current members of the Board of Directors hold concurrent positions. Provisions regarding concurrent positions for members of the Board of Directors are set forth in the Company's Articles of Association and the Rules of Procedure for the Board of Commissioners and the Board of Directors.
1.6.2.	Dewan Komisaris memantau dan mengelola potensi benturan kepentingan manajemen, anggota Direksi, Dewan Komisaris dan pemegang saham, termasuk penyalahgunaan aset korporasi dan penyalahgunaan dalam transaksi pihak berelasi. Komisaris yang memiliki benturan kepentingan tidak turut serta dalam pemantauan dan pengambilan keputusan atas potensi benturan kepentingan yang melibatkan Komisaris atau afiliasi Komisaris yang bersangkutan. The Board of Commissioners monitors and manages potential conflicts of interest involving management, members of the Board of Directors, the Board of Commissioners, and shareholders, including the misuse of corporate assets and misconduct in related-party transactions. Commissioners of who have a conflict of interest do not participate in the monitoring or decision-making regarding potential conflicts of interest involving the Commissioner or the Commissioner's affiliates.	*Apply*	Dewan Komisaris telah memiliki prosedur untuk memastikan bahwa anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang memiliki benturan kepentingan tidak ikut serta dalam pengambilan keputusan terkait (abstain) benturan kepentingan tersebut sebagaimana tercantum dalam Pedoman Kerja Direksi dan Dewan Komisaris. The Board of Commissioners has established procedures to ensure that members of the Board of Directors and the Board of Commissioners who have conflicts of interest do not participate in decision-making related to such conflicts of interest (i.e., they abstain), as stipulated in the Work Guidelines for the Board of Directors and the Board of Commissioners.
1.7.	Peningkatan Kompetensi Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Enhancing the Competence of Members of the Board of Directors and the Board of Commissioners		
1.7.1	Dewan Komisaris memastikan bahwa anggota Direksi dan Dewan Komisaris memahami peran dan tanggung jawab mereka, karakteristik dan operasi korporasi, peraturan perundang-undangan dan standar yang relevan serta kewajiban lain yang berlaku. Direksi melalui sekretaris korporasi mendukung semua anggota Direksi dan Dewan Komisaris dalam memperbarui dan menyegarkan keterampilan dan pengetahuan mereka yang diperlukan untuk menjalankan peran mereka di Dewan. The Board of Commissioners ensures that members of the Board of Directors and the Board of Commissioners understand their roles and responsibilities, the characteristics and operations of the corporation, relevant laws and regulations and standards, as well as other applicable obligations. The Board of Directors, through the corporate secretary, supports all members of the Board of Directors and the Board of Commissioners in updating and refreshing the skills and knowledge necessary to fulfill their roles on the Board.	*Apply*	Direksi telah menetapkan kebijakan terkait program pengenalan Direktur dan/atau Komisaris yang baru diangkat sebagaimana diatur dalam Board Manual. The Board of Directors has established a policy regarding orientation programs for newly appointed Directors and/or Commissioners as set forth in the Board Manual.
	Prinsip 2. Komposisi dan Remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris **Principle 2. Composition and Remuneration of the Board of Directors and the Board of Commissioners**		
2.1.	Komposisi Direksi dan Dewan Komisaris Composition of the Board of Directors and the Board of Commissioners		
2.1.1.	Dalam menentukan kandidat calon direktur, Dewan Komisaris melalui Komite Nominasi dan Remunerasi tidak hanya mengandalkan rekomendasi dari Dewan Komisaris, manajemen atau pemegang saham mayoritas. Dewan Komisaris melalui Komite Nominasi dan Remunerasi dapat menggunakan sumber independen untuk menentukan kandidat yang memenuhi syarat. In determining candidates for directors, the Board of Commissioners, through the Nomination and Remuneration Committee, does not rely solely on recommendations from the Board of Commissioners, management, or majority shareholders. The Board of Commissioners, through the Nomination and Remuneration Committee, may use independent sources to identify qualified candidates.	*Explain*	Dalam menentukan kandidat calon Direktur, Dewan Komisaris melalui Komite Nominasi dan Remunerasi tidak hanya mengandalkan rekomendasi dari Dewan Komisaris, manajemen atau pemegang saham mayoritas. Dewan Komisaris melalui Komite Nominasi dan Remunerasi dapat menggunakan sumber independen untuk menentukan kandidat yang memenuhi syarat. (N/A karena kewenangan di pemegang saham dan PT PLN Persero). In determining candidates for directors, the Board of Commissioners, through the Nomination and Remuneration Committee, does not rely solely on recommendations from the Board of Commissioners, management, or majority shareholders. The Board of Commissioners, through the Nomination and Remuneration Committee, may use independent sources to identify qualified candidates. (N/A because the authority lies with the shareholders and PT PLN Persero).

Pemenuhan Standar Penerapan Tata Kelola Perusahaan
Compliance with Corporate Governance Standards

2.1.2.	Dewan Komisaris memastikan bahwa kriteria dalam menyeleksi anggota Direksi mencakup paling tidak pengetahuan, kemampuan, dan keahlian yang dibutuhkan untuk memenuhi secara tepat peran Direksi serta memperhatikan terpenuhinya keberagaman Direksi. The Board of Commissioners ensures that the criteria for selecting members of the Board of Directors include, at a minimum, the knowledge, abilities, and expertise required to properly fulfill the roles of the Board of Directors, while also ensuring diversity within the Board.	*Apply*	Dewan Komisaris telah memastikan bahwa kriteria dalam menyeleksi anggota Direksi mencakup paling tidak pengetahuan, kemampuan, dan keahlian yang dibutuhkan untuk memenuhi secara tepat peran Direksi serta memperhatikan terpenuhinya keberagaman Direksi. The Board of Commissioners has ensured that the criteria for selecting members of the Board of Directors include, at a minimum, the knowledge, abilities, and expertise required to properly fulfill the roles of the Board of Directors, while also ensuring diversity within the Board.
2.1.3	Kebijakan korporasi tentang keberagaman pada Direksi dan Dewan Komisaris diungkapkan dalam Laporan Tahunan. The corporate policy on diversity on the Board of Directors and the Board of Commissioners is disclosed in the Annual Report.	*Apply*	Korporasi telah mengungkapkan tentang keberagaman pada Direksi dan Dewan Komisaris dalam Laporan Tahunan. Tidak termasuk pengungkapan referensi tentang bagaimana keberagaman dicapai melalui perencanaan suksesi yang tepat di Direksi dan Dewan Komisaris, karena perencanaan suksesi menjadi kewenangan pemegang saham. The Company has disclosed information regarding diversity on the Board of Directors and the Board of Commissioners in the Annual Report; however, the disclosure does not yet cover how diversity is achieved through proper succession planning on the Board of Directors and the Board of Commissioners. However, the information does not yet include measurable composition targets and progress made toward achieving those targets, nor does it include references to how diversity is achieved through proper succession planning on the Board of Directors and the Board of Commissioners.
2.1.4	Dewan Komisaris memastikan bahwa kebijakan dan prosedur untuk seleksi dan nominasi Komisaris adalah jelas dan transparan sehingga dapat menghasilkan komposisi Dewan yang diinginkan. Dewan Komisaris menggunakan sumber independen untuk menentukan kandidat yang memenuhi syarat. The Board of Commissioners ensures that the policies and procedures for the selection and nomination of Commissioners are clear and transparent so as to produce the desired composition of the Board. The Board of Commissioners uses independent sources to identify qualified candidates.	*Explain*	Dewan Komisaris belum memastikan bahwa kebijakan dan prosedur untuk seleksi dan nominasi Komisaris adalah jelas dan transparan sesuai dengan Peraturan Menteri BUMN, sehingga dapat menghasilkan komposisi Dewan Komisaris yang diinginkan. Dewan Komisaris juga belum menggunakan sumber independen untuk menentukan kandidat yang memenuhi syarat. Kewenangan untuk menentukan kandidat Dewan Komisaris yang berdasarkan usulan dari pemegang saham dan PLN Persero. *Not Applicable* (N/A). The Board of Commissioners has not ensured that the policies and procedures for the selection and nomination of Commissioners are clear and transparent in accordance with the Minister of State-Owned Enterprises Regulation, so as to produce the desired composition of the Board of Commissioners. The Board of Commissioners has also not used independent sources to identify qualified candidates. The authority to determine candidates for the Board of Commissioners is based on proposals from shareholders and PLN Persero. Not Applicable (N/A).
2.1.5	Dewan Komisaris/Komite yang menjalankan fungsi nominasi menetapkan prosedur dan kriteria nominasi yang konsisten dengan matriks keahlian Dewan Komisaris yang telah disetujui Dewan Komisaris dan memastikan bahwa profil kandidat memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam matriks keahlian dan kriteria nominasi. The Board of Commissioners or the committee responsible for nominations establishes nomination procedures and criteria consistent with the Board of Commissioners' competency matrix—which has been approved by the Board of Commissioners—and ensures that candidates' profiles meet the requirements set forth in the competency matrix and nomination criteria.	*Explain*	Dewan Komisaris/Komite yang menjalankan fungsi nominasi menetapkan prosedur dan kriteria nominasi dengan matriks keahlian Dewan Komisaris yang telah disetujui Dewan Komisaris dan memastikan bahwa profil kandidat memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam matriks keahlian dan kriteria nominasi *Not Applicable* (N/A). Mengingat proses tersebut dijalankan oleh pemegang saham dan PLN Persero. The Board of Commissioners/Committee performing the nomination function establishes nomination procedures and criteria in accordance with the Board of Commissioners' competency matrix, which has been approved by the Board of Commissioners, and ensures that the candidates' profiles meet the requirements set forth in the competency matrix and nomination criteria. Not Applicable (N/A). Given that the process is carried out by shareholders and PLN Persero.
2.1.6	Komposisi Dewan Komisaris harus dibentuk sedemikian rupa sehingga anggota -anggotanya secara kelompok mencerminkan keberagaman dalam hal kemampuan, keahlian, pengetahuan, pengalaman, usia, latar belakang budaya, dan gender yang dibutuhkan untuk memenuhi secara tepat peran Dewan Komisaris. The composition of the Board of Commissioners must be structured such that its members, as a group, reflect the diversity in terms of capabilities, expertise, knowledge, experience, age, cultural background, and gender required to properly fulfill the role of the Board of Commissioners.	*Apply*	Komposisi Dewan Komisaris yang menjabat di tahun 2025 telah mencerminkan keberagaman dalam hal kemampuan, keahlian, pengetahuan, pengalaman, usia, latar belakang budaya, dan gender. The composition of the Board of Commissioners serving in 2025 reflects diversity in terms of capabilities, expertise, knowledge, experience, age, cultural background, and gender.

Pemenuhan Standar Penerapan Tata Kelola Perusahaan
Compliance with Corporate Governance Standards

2.1.7	Untuk memampukan Dewan Komisaris dalam memberikan advis dan supervisi secara independen kepada Direksi dan untuk peran-peran yang terdapat potensi benturan kepentingan, Dewan Komisaris terdiri dari Komisaris Independen yang cukup jumlahnya, dengan masa jabatan yang dibatasi dan terdapat pengungkapan jangka waktu keanggotaan Dewan Komisaris serta independensi mereka dari sudut pandang korporasi. To enable the Board of Commissioners to provide independent advice and supervision to the Board of Directors and to address roles where potential conflicts of interest may arise, the Board of Commissioners consists of a sufficient number of Independent Commissioners, with limited terms of office and disclosure regarding the duration of their membership on the Board of Commissioners as well as their independence from the corporation's perspective.	*Explain*	Untuk memampukan Dewan Komisaris dalam memberikan advis dan supervisi secara independen kepada Direksi dan untuk peran-peran yang terdapat potensi benturan kepentingan, Dewan Komisaris terdiri dari Komisaris Independen yang cukup jumlahnya, dengan masa jabatan yang dibatasi dan terdapat pengungkapan jangka waktu keanggotaan Dewan Komisaris serta independensi mereka dari sudut pandang korporasi. *Not Applicable* (N/A) karena dalam praktiknya, perusahaan tidak memiliki Komisaris Independen. To enable the Board of Commissioners to provide independent advice and supervision to the Board of Directors and to address roles involving potential conflicts of interest, the Board of Commissioners consists of a sufficient number of Independent Commissioners, with limited terms of office and disclosures regarding the duration of their membership on the Board of Commissioners as well as their independence from the corporation's perspective. Not Applicable (N/A) because, in practice, the Company does not have any Independent Commissioners.
2.1.8	Untuk memfasilitasi fungsi Direksi dan Dewan Komisaris yang efektif dan guna meningkatkan kepercayaan investor dan pemangku kepentingan, Komite Nominasi dan Remunerasi memastikan bahwa terdapat proses yang formal, ketat dan transparan untuk penunjukan dan pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris. To facilitate the effective functioning of the Board of Directors and the Board of Commissioners and to enhance the confidence of investors and stakeholders, the Nomination and Remuneration Committee ensures that there is a formal, rigorous, and transparent process for the nomination and appointment of members of the Board of Directors and the Board of Commissioners.	*Explain*	Untuk memfasilitasi fungsi Direksi dan Dewan Komisaris yang efektif dan guna meningkatkan kepercayaan investor dan pemangku kepentingan, Komite Nominasi dan Remunerasi memastikan bahwa terdapat proses yang formal, ketat dan transparan untuk penunjukan dan pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris, hal ini dikategorikan *Not Applicable* (N/A) dikarenakan kegiatan terkait menjadi kewenangan langsung Pemegang Saham dan juga perusahaan belum membentuk Komite Nominasi dan Remunerasi. To facilitate the effective functioning of the Board of Directors and the Board of Commissioners and to enhance the confidence of investors and stakeholders, the Nomination and Remuneration Committee ensures that there is a formal, rigorous, and transparent process for the nomination and appointment of members of the Board of Directors and the Board of Commissioners; this is categorized as Not Applicable (N/A) because the related activities fall under the direct authority of the Shareholders and the Company has not yet established a Nomination and Remuneration Committee.
2.2.	Remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris Remuneration of the Board of Directors and Board of Commissioners		
	Kebijakan remunerasi anggota Direksi terdiri atas struktur remunerasi yang berorientasi pada pengembangan korporasi yang berkelanjutan dan mendorong pencapaian tujuan jangka panjang. Remunerasi Direksi harus diusulkan, dapat dengan melalui Komite Nominasi dan Remunerasi, oleh Dewan Komisaris untuk diputuskan oleh RUPS. Jumlah remunerasi yang diusulkan kepada RUPS tersebut ditetapkan dengan mempertimbangkan peran setiap anggota Direksi dan situasi ekonomi serta kinerja korporasi. The remuneration policy for members of the Board of Directors consists of a remuneration structure oriented toward sustainable corporate development and designed to encourage the achievement of long-term goals. Remuneration for the Board of Directors must be proposed—potentially through the Nomination and Remuneration Committee—by the Board of Commissioners for approval by the General Meeting of Shareholders (GMS). The amount of remuneration proposed to the GMS is determined by considering the role of each member of the Board of Directors, as well as the economic situation and the Company's performance.	*Explain*	Kebijakan remunerasi anggota Direksi terdiri atas struktur remunerasi yang berorientasi pada pengembangan korporasi yang berkelanjutan. Remunerasi Direksi diusulkan melalui Komite Nominasi dan Remunerasi, oleh Dewan Komisaris untuk diputuskan oleh RUPS. Jumlah remunerasi yang diusulkan kepada RUPS tersebut ditetapkan dengan mempertimbangkan peran setiap anggota Direksi dan situasi ekonomi serta kinerja korporasi. Direksi tidak menerima fasilitas lain di luar fasilitas yang sudah diberikan berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham korporasi. Namun demikian, Perusahaan belum memiliki kebijakan remunerasi anggota Direksi yang berbasis kinerja dan selaras dengan pencapaian kepentingan jangka panjang korporasi, seperti ukuran kinerja sebagai berikut: bonus yang ditangguhkan, provisi pengembalian sebagian atau seluruh bonus/insentif yang telah dibayar (*clawback*). The remuneration policy for members of the Board of Directors consists of a remuneration structure oriented toward the sustainable development of the corporation. Remuneration for the Board of Directors is proposed through the Nomination and Remuneration Committee by the Board of Commissioners for approval by the General Meeting of Shareholders (GMS). The amount of remuneration proposed to the GMS is determined by taking into account the role of each member of the Board of Directors, as well as the economic situation and the corporation's performance. The Board of Directors does not receive any benefits other than those already granted based on the corporation's General Meeting of Shareholders. However, the Company does not yet have a performance-based remuneration policy for Board members that aligns with the corporation's long-term interests, such as the following performance metrics: deferred bonuses, and provisions for the partial or full clawback of bonuses or incentives that have already been paid.

2.2.1	Kebijakan remunerasi anggota Dewan Komisaris terdiri atas struktur remunerasi yang berorientasi pada pengembangan korporasi yang berkelanjutan dan mendorong pencapaian tujuan jangka panjang. Jumlah remunerasi yang diusulkan Dewan Komisaris kepada RUPS tersebut ditetapkan dengan mempertimbangkan peran setiap anggota Dewan Komisaris dan situasi ekonomi serta kinerja korporasi. Di samping itu juga harus dipertimbangkan posisinya sebagai Komisaris Utama dan ketua serta keanggotaannya dalam komite-komite. The remuneration policy for members of the Board of Commissioners consists of a remuneration structure oriented toward the sustainable development of the corporation and encouraging the achievement of long-term goals. The amount of remuneration proposed by the Board of Commissioners to the General Meeting of Shareholders is determined by taking into account the role of each member of the Board of Commissioners, as well as the economic situation and the corporation's performance. In addition, their positions as President Commissioner and Chairperson, as well as their membership in various committees, must also be considered.	*Explain*	Kebijakan remunerasi anggota Dewan Komisaris terdiri atas struktur remunerasi yang berorientasi pada pengembangan korporasi yang berkelanjutan. Jumlah remunerasi yang diusulkan kepada RUPS tersebut ditetapkan dengan mempertimbangkan peran setiap anggota Dewan Komisaris dan situasi ekonomi serta kinerja korporasi. Remunerasi Dewan Komisaris harus berupa remunerasi tetap. Jika anggota Dewan Komisaris diberi remunerasi terkait kinerja maka dasar pemberian harus terkait dengan pengembangan jangka panjang korporasi dan berbeda dengan anggota Direksi. (N/A karena adanya larangan insentif kinerja bagi Dewan Komisaris berdasarkan Surat Danantara Nomor S-063/DI-BP/VII/2025 tanggal 30 Juli 2025). The remuneration policy for members of the Board of Commissioners consists of a remuneration structure oriented toward the sustainable development of the corporation. The amount of remuneration proposed to the General Meeting of Shareholders is determined by taking into account the role of each member of the Board of Commissioners, as well as the economic situation and the corporation's performance. Remuneration for the Board of Commissioners must be in the form of fixed compensation. If members of the Board of Commissioners are granted performance-based remuneration, the basis for such grants must be tied to the corporation's long-term development and must differ from that of members of the Board of Directors. (N/A due to a prohibition on performance-based incentives for the Board of Commissioners pursuant to Danantara Letter No. S-063/DI-BP/VII/2025 dated July 30, 2025).
2.2.2	Untuk memastikan bahwa paket remunerasi ditentukan berdasarkan prestasi, kualifikasi dan kompetensi direktur dan komisaris dengan memperhatikan kinerja operasi korporasi, kinerja individu dan kondisi pasar, Komite Nominasi dan Remunerasi memastikan bahwa terdapat prosedur yang adil dan transparan untuk menetapkan kebijakan remunerasi anggota Direksi dan Dewan Komisaris. To ensure that compensation packages are determined based on the achievements, qualifications , and competencies of directors and commissioners, while taking into account the corporation's operational performance, individual performance, and market conditions, the Nomination and Compensation Committee ensures that there are fair and transparent procedures for establishing compensation policies for members of the Board of Directors and the Board of Commissioners.	*Explain*	Untuk memastikan bahwa paket remunerasi ditentukan berdasarkan prestasi, kualifikasi dan kompetensi direktur dan komisaris dengan memperhatikan kinerja operasi korporasi, kinerja individu dan kondisi pasar, Komite Nominasi dan Remunerasi memastikan bahwa terdapat prosedur yang adil dan transparan untuk menetapkan kebijakan remunerasi anggota Direksi dan Dewan Komisaris. To ensure that remuneration packages are determined based on the performance, qualifications, and competencies of directors and commissioners, taking into account the corporation's operational performance, individual performance, and market conditions, the Nomination and Remuneration Committee ensures that there are fair and transparent procedures for establishing remuneration policies for members of the Board of Directors and the Board of Commissioners.
	Prinsip 3. Hubungan Kerja antara Direksi dan Dewan Komisaris **Principle 3. Working Relationship between the Board of Directors and the Board of Commissioners**		
3.1	Sifat Hubungan Kerja Nature of the Working Relationship		
3.1.1	Terdapat diskusi yang terbuka antara Direksi dengan Dewan Komisaris serta di antara para anggota Direksi dan para anggota Dewan Komisaris. Namun, tetap penting menjaga kerahasiaan informasi agar tidak terjadi kebocoran informasi rahasia. There are open discussions between the Board of Directors and the Board of Commissioners, as well as among members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners. However, it remains important to maintain the confidentiality of information to prevent the leakage of confidential information.	*Apply*	Telah terdapat diskusi yang terbuka antara Direksi dengan Dewan Komisaris serta di antara para anggota Direksi dan para anggota Dewan Komisaris dengan tetap memandang penting menjaga kerahasiaan informasi agar tidak terjadi kebocoran informasi rahasia. There have been open discussions between the Board of Directors and the Board of Commissioners, as well as among members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners, while maintaining the importance of safeguarding the confidentiality of information to prevent the leakage of confidential information.
3.1.2	Sesuai dengan tugas dan perannya masing-masing, Direksi bekerjasama dengan Dewan Komisaris dalam merumuskan misi, visi dan strategi korporasi dan secara reguler membahas pengimplementasiannya. In accordance with their respective duties and roles, the Board of Directors collaborates with the Board of Commissioners in formulating the Company's mission, vision, and strategy, and regularly discusses their implementation.	*Apply*	Sesuai dengan tugas dan perannya masing-masing, Direksi telah bekerjasama dengan Dewan Komisaris dalam merumuskan misi, visi dan strategi korporasi dan secara reguler membahas pengimplementasiannya. In accordance with their respective duties and roles, the Board of Directors has collaborated with the Board of Commissioners in formulating the Company's mission, vision, and strategy and regularly discusses their implementation.

Pemenuhan Standar Penerapan Tata Kelola Perusahaan
Compliance with Corporate Governance Standards

3.1.3	Sekretaris Korporasi memiliki peran penting dalam mendukung efektivitas hubungan kerja antara Direksi dengan Dewan komisaris, mendorong implementasi praktek governansi korporat yang baik, termasuk komunikasi yang efektif dengan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya. The Corporate Secretary plays a crucial role in supporting effective working relationships between the Board of Directors and the Board of Commissioners, promoting the implementation of sound corporate governance practices, including effective communication with shareholders and other stakeholders.	*Explain*	Sekretaris Korporasi telah memiliki peran penting dalam mendukung efektivitas hubungan kerja antara Direksi dengan Dewan komisaris, mendorong implementasi praktek governansi korporat yang baik, termasuk komunikasi yang efektif dengan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya. Namun belum terdapat evidence pengangkatan Sekretaris Korporasi berdasarkan persetujuan Dewan Komisaris. The Corporate Secretary has played a key role in supporting effective working relationships between the Board of Directors and the Board of Commissioners and in promoting the implementation of sound corporate governance practices, including effective communication with shareholders and other stakeholders. However, there is currently no evidence that the Corporate Secretary was appointed with the approval of the Board of Commissioners.
3.2	Akses Informasi Dewan Komisaris Board of Commissioners' Access to Information		
3.2.1	Direksi bertanggung jawab untuk memastikan Dewan Komisaris mendapatkan akses informasi yang akurat, relevan dan tepat waktu. Dewan Komisaris sendiri memastikan bahwa ia memperoleh informasi yang memadai. Direksi menyediakan informasi kepada Dewan Komisaris secara teratur, tanpa penundaan dan secara komprehensif tentang semua masalah yang relevan dengan korporasi. Dewan Komisaris sewaktu-waktu dapat meminta Direksi untuk memberikan informasi tambahan. The Board of Directors is responsible for ensuring that the Board of Commissioners has access to accurate, relevant, and timely information. The Board of Commissioners itself ensures that it obtains adequate information. The Board of Directors provides the Board of Commissioners with regular, comprehensive, and timely information regarding all matters relevant to the corporation. The Board of Commissioners may, at any time, request the Board of Directors to provide additional information.	*Apply*	Direksi telah bertanggung jawab untuk memastikan Dewan Komisaris mendapatkan akses informasi yang akurat, relevan dan tepat waktu. Dewan Komisaris sendiri memastikan bahwa ia memperoleh informasi yang memadai. Direksi menyediakan informasi kepada Dewan Komisaris secara teratur, tanpa penundaan dan secara komprehensif tentang semua masalah yang relevan dengan korporasi. Dewan Komisaris sewaktu-waktu dapat meminta Direksi untuk memberikan informasi tambahan. The Board of Directors is responsible for ensuring that the Board of Commissioners has access to accurate, relevant, and timely information. The Board of Commissioners itself ensures that it receives adequate information. The Board of Directors provides information to the Board of Commissioners regularly, without delay, and comprehensively regarding all matters relevant to the corporation. The Board of Commissioners may at any time request the Board of Directors to provide additional information.
3.3	Tanggung Jawab Direksi dan Dewan Komisaris atas Dampak Struktur Kepemilikan terhadap Korporasi. Responsibilities of the Board of Directors and the Board of Commissioners Regarding the Impact of Ownership Structure on the Corporation.		
3.3.1	Dampak struktur kepemilikan terhadap korporasi. Direksi dan Dewan Komisaris mempertimbangkan tanggung jawabnya dalam konteks struktur kepemilikan saham dan hubungan antar-pemegang saham korporasi yang mungkin berdampak terhadap pengelolaan dan operasi korporasi. Impact of the ownership structure on the corporation. The Board of Directors and the Board of Commissioners consider their responsibilities in the context of the corporation's share ownership structure and relationships among shareholders that may impact the corporation's management and operations.	*Apply*	Dampak struktur kepemilikan terhadap korporasi. Direksi dan Dewan Komisaris telah mempertimbangkan tanggung jawabnya dalam konteks struktur kepemilikan saham dan hubungan antar-pemegang saham korporasi yang mungkin berdampak terhadap pengelolaan dan operasi korporasi. Impact of the ownership structure on the corporation. The Board of Directors and the Board of Commissioners have considered their responsibilities in the context of the corporation's share ownership structure and relationships among shareholders that may impact the corporation's management and operations.

Prinsip 4. Perilaku Etis dan Bertanggung Jawab
Principle 4. Ethical and Responsible Conduct

4.1 Pedoman Etika dan Perilaku
Ethics and Conduct Guidelines

Pernyataan ini dituangkan dalam Pedoman Perilaku dan Etika Usaha yang harus secara jelas mengungkapkan harapan korporasi bahwa setiap anggota Direksi dan Dewan Komisaris serta karyawan akan:
a. Bertindak untuk kepentingan terbaik korporasi.
b. Bertindak dengan jujur dan dengan integritas berstandar tinggi.
c. Bersikap independen dan bertindak berdasarkan informasi yang lengkap, dengan itikad baik, dengan uji tuntas dan kehati-hatian.
d. Mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi korporasi dan operasinya.
e. Menghindari tindakan yang melanggar peraturan perundang-undangan atau tindakan yang tidak etis berdasarkan pedoman etika korporasi.
f. Tidak terlibat atau berpartisipasi dalam kegiatan apapun yang akan menimbulkan benturan kepentingan dengan kepentingan terbaik korporasi atau yang akan berdampak negatif terhadap reputasi korporasi.
g. Tidak mengambil manfaat atas properti atau informasi yang dimiliki korporasi, kepemilikan aset lainnya atau pelanggannya untuk kepentingan pribadi atau yang menyebabkan kerugian bagi korporasi dan pelanggannya.
h. Tidak memanfaatkan jabatannya atau peluang yang dihasilkan oleh jabatannya untuk kepentingan pribadi.
i. Menghindari perbuatan meminta atau menerima dari pihak ketiga pembayaran, gratifikasi atau keuntungan lain untuk dirinya sendiri atau untuk orang lain yang menimbulkan benturan kepentingan/memberikan keuntungan kepada pihak ketiga secara melanggar peraturan perundang-undangan.
j. Menghormati perbedaan pendapat dan hak-hak setiap anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan karyawan.
k. Memastikan pengungkapan yang lengkap, adil, akurat, tepat waktu, dan dapat dipahami dalam laporan dan dokumen yang disampaikan korporasi kepada regulator dan dalam komunikasi publik lainnya.

This statement is set forth in the Code of Business Conduct and Ethics, which must clearly articulate the corporation's expectation that every member of the Board of Directors and the Board of Commissioners, as well as every employee, will:
a. Act in the best interests of the corporation.
b. Act with honesty and a high standard of integrity.
c. Remain independent and act based on complete information, in good faith, with due diligence and prudence.
d. Comply with laws and regulations applicable to the corporation and its operations.
e. Avoid actions that violate laws and regulations or unethical conduct as defined by the corporation's code of ethics.
f. Do not engage in or participate in any activities that would create a conflict of interest with the corporation's best interests or that would negatively impact the corporation's reputation.
g. Not taking advantage of the corporation's property or information, other assets, or its customers for personal gain or in a way that causes harm to the corporation and its customers.
h. Do not use one's position or opportunities arising from one's position for personal gain.
i. Avoid soliciting or accepting from third parties any payments, gratuities, or other benefits for oneself or for others that create a conflict of interest or provide an advantage to a third party in violation of laws and regulations.
j. Respect differing opinions and the rights of every member of the Board of Directors, Board of Commissioners, and employee.
k. Ensure complete, fair, accurate, timely, and understandable disclosure in reports and documents submitted by the corporation to regulators and in other public communications.

Apply

Pedoman Etika Perusahaan telah menuangkan secara jelas harapan korporasi bahwa setiap anggota Direksi dan Dewan Komisaris serta karyawan akan:
a. Bertindak untuk kepentingan terbaik korporasi.
b. Bertindak dengan jujur dan dengan integritas berstandar tinggi.
c. Bersikap independen dan bertindak berdasarkan informasi yang lengkap, dengan itikad baik, dengan uji tuntas dan kehati-hatian.
d. Mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi korporasi dan operasinya.
e. Menghindari tindakan yang melanggar peraturan perundang-undangan atau tindakan yang tidak etis berdasarkan pedoman etika korporasi.
f. Tidak terlibat atau berpartisipasi dalam kegiatan apapun yang akan menimbulkan benturan kepentingan dengan kepentingan terbaik korporasi atau yang akan berdampak negatif terhadap reputasi korporasi.
g. Tidak mengambil manfaat atas properti atau informasi yang dimiliki korporasi, kepemilikan aset lainnya atau pelanggannya untuk kepentingan pribadi atau yang menyebabkan kerugian bagi korporasi dan pelanggannya.
h. Tidak memanfaatkan jabatannya atau peluang yang dihasilkan oleh jabatannya untuk kepentingan pribadi.
i. Menghindari perbuatan meminta atau menerima dari pihak ketiga pembayaran, gratifikasi atau keuntungan lain untuk dirinya sendiri atau untuk orang lain yang menimbulkan benturan kepentingan/memberikan keuntungan kepada pihak ketiga secara melanggar peraturan perundang-undangan.
j. Menghormati perbedaan pendapat dan hak-hak setiap anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan karyawan.
k. Memastikan pengungkapan yang lengkap, adil, akurat, tepat waktu, dan dapat dipahami dalam laporan dan dokumen yang disampaikan korporasi kepada regulator dan dalam komunikasi publik lainnya.

The Corporate Code of Ethics clearly sets forth the corporation's expectation that every member of the Board of Directors and the Board of Commissioners, as well as every employee, will:
a. Act in the best interests of the corporation.
b. Act with honesty and a high standard of integrity.
c. Remain independent and act based on complete information, in good faith, with due diligence and prudence.
d. Comply with laws and regulations applicable to the corporation and its operations.
e. Avoid actions that violate laws and regulations or are unethical according to the Company's code of ethics.
f. Do not engage in or participate in any activities that would create a conflict of interest with the corporation's best interests or that would negatively impact the corporation's reputation.
g. Not taking advantage of the corporation's property or information, other assets, or its customers for personal gain or in a way that causes harm to the corporation and its customers.
h. Do not use one's position or opportunities arising from one's position for personal gain.
i. Avoid soliciting or accepting from third parties any payments, gratuities, or other benefits for oneself or for others that create a conflict of interest or provide an advantage to a third party in violation of laws and regulations.
j. Respect differing opinions and the rights of every member of the Board of Directors, Board of Commissioners, and employee.
k. Ensure complete, fair, accurate, timely, and understandable disclosure in reports and documents submitted by the corporation to regulators and in other public communications.

4.1.2	Direksi menetapkan kebijakan dan praktik anti pencucian uang dan pendanaan terorisme, anti suap, antikorupsi, anti kecurangan (*antifraud*), keterlibatan dalam politik dengan mengacu pada standar nasional atau internasional mengenai anti pencucian uang, anti suap, antikorupsi, anti kecurangan atau standar terkait lainnya. The Board of Directors establishes policies and practices regarding anti-money laundering and counter-terrorism financing, anti-bribery, anti-corruption, anti-fraud, and political engagement, in accordance with national or international standards on anti-money laundering, anti-bribery, anti-corruption, anti-fraud, or other relevant standards.	*Explain*	Direksi telah menetapkan kebijakan dan praktik anti suap, antikorupsi, anti kecurangan (*antifraud*), keterlibatan dalam politik dengan mengacu pada standar nasional atau internasional mengenai anti suap, antikorupsi, anti kecurangan atau standar terkait lainnya. Namun Perusahaan belum menetapkan kebijakan dan praktik anti pencucian uang dan pendanaan terorisme. The Board of Directors has established policies and practices regarding anti-bribery, anti-corruption, anti- -fraud, and political involvement, in accordance with national or international standards on anti-bribery, anti-corruption, anti-fraud, or other relevant standards. However, the Company has not yet established policies and practices regarding anti-money laundering and counter-terrorism financing.
4.2	Nilai-Nilai dan Budaya Organisasi Organizational Values and Culture		
4.2.1	Korporasi mengartikulasikan, menumbuhkan dan mengungkapkan budaya dan nilai-nilai korporasi. The Corporation articulates, fosters, and expresses its corporate culture and values.	*Apply*	Korporasi telah mengartikulasikan, menumbuhkan dan mengungkapkan budaya dan nilai-nilai korporasi, terdapat penilaian dan program pemantauan agar seluruh Direksi, Dewan Komisaris, serta seluruh karyawan korporasi memahami kode etik yang relevan dan menerapkannya secara efektif untuk menghindari keterlibatan korporasi dalam perilaku yang tidak tepat. The corporation has articulated, fostered, and communicated its corporate culture and values; there are assessment and monitoring programs in place to ensure that all members of the Board of Directors, the Board of Commissioners, and all employees understand the relevant code of ethics and apply it effectively to prevent the corporation's involvement in inappropriate conduct.
4.3	Penegakan dan Komunikasi Pedoman Etika, Nilai-nilai dan Budaya. Enforcement and Communication of Ethical Guidelines, Values, and Culture.		
4.3.1	Pedoman perilaku dan kode etik korporasi dikomunikasikan secara efektif kepada Direksi, Dewan Komisaris, serta seluruh karyawan, diintegrasikan ke dalam strategi dan operasi korporasi termasuk sistem manajemen risiko dan struktur remunerasi, serta ditegakkan. The Company's code of conduct and ethical guidelines are effectively communicated to the Board of Directors, the Board of Commissioners, and all employees; integrated into the Company's strategy and operations—including its risk management system and compensation structure; and enforced.	*Apply*	Pedoman perilaku dan kode etik serta nilai-nilai korporasi telah dikomunikasikan secara efektif kepada Direksi, Dewan Komisaris, serta seluruh karyawan, diintegrasikan ke dalam strategi dan operasi korporasi termasuk sistem manajemen risiko dan struktur remunerasi, serta ditegakkan. The code of conduct, ethical guidelines, and corporate values have been effectively communicated to the Board of Directors, the Board of Commissioners, and all employees; integrated into the Company's strategy and operations, including the risk management system and compensation structure; and enforced.
	Prinsip 5. Manajemen Risiko, Pengendalian Internal dan Kepatuhan **Principle 5. Risk Management, Internal Control, and Compliance**		
5.1	Pengendalian Internal dan Kepatuhan. Internal Controls and Compliance.		
5.1.1	Direksi melakukan reviu secara berkala atas ketepatan desain dan efektivitas operasional sistem governansi, pengelolaan risiko, pengendalian internal dan kepatuhan korporasi dan melaporkan pelaksanaan dan hasil reviu kepada para pemegang saham melalui laporan tahunan Korporasi. The Board of Directors periodically reviews the appropriateness of the design and the operational effectiveness of the Corporation's governance, risk management, internal control, and compliance systems and reports on the implementation and results of these reviews to shareholders through the Corporation's annual report.	*Apply*	Direksi telah melakukan reviu secara berkala atas ketepatan desain dan efektivitas operasional sistem governansi, pengelolaan risiko, pengendalian internal dan kepatuhan korporasi dan melaporkan pelaksanaan dan hasil reviu kepada para pemegang saham melalui laporan tahunan Korporasi. The Board of Directors has periodically reviewed the appropriateness of the design and the operational effectiveness of the corporate governance, risk management, internal control, and compliance systems, and reports on the conduct and results of these reviews to shareholders through the Corporation's annual report.
5.2	Manajemen Risiko Risk Management		
5.2.1	Strategi dan risiko merupakan satu kesatuan, diungkapkan secara transparan, masuk ke dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi dan Dewan Komisaris, serta dalam diskusi di rapat Dewan Komisaris dan Direksi. Strategy and risk are inseparable; they are disclosed transparently and integrated into the duties and responsi of the Board of Directors and the Board of Commissioners, as well as discussed at meetings of the Board of Commissioners and the Board of Directors.	*Apply*	Strategi dan risiko merupakan satu kesatuan, diungkapkan secara transparan, masuk ke dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi dan Dewan Komisaris, serta dalam diskusi di rapat Dewan Komisaris dan Direksi. Strategy and risk are inseparable; they are disclosed transparently and integrated into the duties and responsibilities of the Board of Directors and the Board of Commissioners, as well as into discussions at meetings of the Board of Commissioners and the Board of Directors.

5.2.2	Komite Pemantau Manajemen Risiko membantu pelaksanaan tugas Dewan Komisaris dengan menciptakan mekanisme yang transparan, fokus, dan independen dalam pengawasan manajemen risiko korporasi. The Risk Management Oversight Committee assists the Board of Commissioners in carrying out its duties by establishing transparent, focused, and independent mechanisms for overseeing corporate risk management.	*Explain*	Komite Nominasi dan Remunerasi dan Manajemen Risiko telah membantu pelaksanaan tugas Dewan Komisaris dengan menciptakan mekanisme yang transparan, fokus, dalam pengawasan manajemen risiko korporasi. Namun Seluruh anggota Komite Manajemen Risiko belum berasal dari *independent*. The Nomination, Compensation, and Risk Management Committees have assisted the Board of Commissioners in carrying out its duties by establishing transparent and focused mechanisms for overseeing corporate risk management. However, not all members of the Risk Management Committee are independent.
5.3	Integrasi Governansi, Manajemen Risiko dan Kepatuhan Integration of Governance, Risk Management, and Compliance		
5.3.1	Direksi membangun sistem governansi, manajemen risiko, dan kepatuhan (GRC) yang terintegrasi, dengan menangani berbagai ketidakpastian secara terpadu dan dengan integritas yang tinggi, untuk meyakinkan bahwa korporasi dapat mencapai tujuannya. The Board of Directors establishes an integrated governance, risk management, and compliance (GRC) system, addressing various uncertainties in a unified manner and with high integrity, to ensure that the corporation can achieve its objectives.	*Apply*	Direksi telah membangun sistem governansi, manajemen risiko, dan kepatuhan (GRC) yang terintegrasi, dengan menangani berbagai ketidakpastian secara terpadu dan dengan integritas yang tinggi, untuk meyakinkan bahwa korporasi dapat mencapai tujuannya. The Board of Directors has established an integrated governance, risk management, and compliance (GRC) system, addressing various uncertainties in a unified manner and with a high degree of integrity, to ensure that the corporation can achieve its objectives.
5.3.2	Direksi memastikan bahwa bagian yang membawahi fungsi kepatuhan tidak merangkap melaksanakan fungsi yang berpotensi menimbulkan benturan kepentingan. The Board of Directors ensures that the department overseeing compliance functions does not concurrently perform functions that could potentially give rise to conflicts of interest.	*Apply*	Direksi telah memastikan bahwa bagian yang membawahi fungsi kepatuhan tidak merangkap melaksanakan fungsi yang berpotensi menimbulkan benturan kepentingan. Saat ini fungsi kepatuhan dijabat oleh Sdr. Bagus Nugroho sebagai Manajer Manajemen Risiko dan Kepatuhan. The Board of Directors has ensured that the department responsible for compliance does not concurrently perform functions that could potentially create a conflict of interest. Currently, the compliance function is headed by Mr. Bagus Nugroho, who serves as Manager of Risk Management and Compliance.
5.4	Audit Internal Internal Audit		
5.4.1	Dewan Komisaris melalui Komite Audit memantau dan memastikan bahwa fungsi audit internal membantu korporasi untuk mencapai tujuannya dengan membawa pendekatan yang objektif dan disiplin untuk mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko, pengendalian internal, dan governansi korporat. The Board of Commissioners, through the Audit Committee, monitors and ensures that the internal audit function assists the corporation in achieving its objectives by applying an objective and disciplined approach to evaluating and improving the effectiveness of risk management, internal controls, and corporate governance.	*Explain*	Dewan Komisaris melalui Komite Audit telah memantau dan memastikan bahwa fungsi audit internal membantu korporasi untuk mencapai tujuannya dengan membawa pendekatan yang objektif dan disiplin untuk mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko, pengendalian internal, dan governansi korporat. Namun, Belum diperoleh evidence terkait Komite Audit merekomendasikan kepada Dewan Komisaris pengangkatan dan pemberhentian Kepala Audit Internal, lingkup pekerjaan, dan anggaran untuk fungsi Audit Internal dan juga belum ada penunjukkan konsultan eksternal independen untuk mengkaji ulang kinerja Audit Internal setiap tiga tahun sekali. The Board of Commissioners, through the Audit Committee, has monitored and ensured that the internal audit function assists the corporation in achieving its objectives by applying an objective and disciplined approach to evaluating and improving the effectiveness of risk management, internal controls, and corporate governance. However, no evidence has yet been obtained demonstrating that the Audit Committee has recommended to the Board of Commissioners the appointment and dismissal of the Head of Internal Audit, the scope of work, and the budget for the Internal Audit function. In addition, there is currently no evidence of the appointment of an independent external consultant to conduct a review of the performance of the Internal Audit function every three years.
	Prinsip 6. Pengungkapan dan Transparansi **Principle 6. Disclosure and Transparency**		
6.1	Kebijakan dan Pengungkapan Policies and Disclosure		

Pemenuhan Standar Penerapan Tata Kelola Perusahaan
Compliance with Corporate Governance Standards

6.1.1	Korporasi memiliki kebijakan dan prosedur pengungkapan dan transparansi yang memastikan pengungkapan informasi material dan menjaga informasi sensitif serta rahasia korporasi. The corporation has disclosure and transparency policies and procedures that ensure the disclosure of material information and safeguard the corporation's sensitive and confidential information.	*Apply*	Perusahaan telah memiliki kebijakan dan prosedur pengungkapan dan transparansi yang memastikan pengungkapan informasi material dan menjaga informasi sensitif serta rahasia Perusahaan yang diatur dalam Keputusan Direksi. The Company has disclosure and transparency policies and procedures in place that ensure the disclosure of material information and protect the Company's sensitive and confidential information as stipulated in the Board of Directors' Resolution.
6.1.2	Hak pemegang saham untuk memperoleh secara teratur dan tepat waktu informasi material yang relevan tentang korporasi harus dipenuhi. Shareholders' right to receive relevant material information about the corporation on a regular and timely basis must be fulfilled.	*Apply*	Perusahaan telah memiliki pengaturan terkait dengan hak pemegang saham untuk memperoleh secara teratur dan tepat waktu informasi material yang relevan tentang Perusahaan. Pemenuhan hak tersebut dipenuhi dengan adanya kewajiban pengungkapan kepada Pemegang Saham sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan *Board Manual*. The Company has established arrangements regarding shareholders' rights to receive relevant material information about the Company on a regular and timely basis. These rights are fulfilled through disclosure obligations to shareholders as stipulated in the Articles of Association and the Board Manual.
6.2	Laporan Keuangan dan Keberlanjutan Financial and Sustainability Reports		
6.2.1	Korporasi mengungkapkan sistem dan prosedur untuk memastikan bahwa laporan keuangan interim yang tidak diaudit atau direviu oleh auditor eksternal secara material adalah akurat, lengkap, dan memberikan investor informasi yang tepat untuk membuat keputusan investasi yang tepat. The corporation discloses the systems and procedures in place to ensure that interim financial reports that have not been audited or reviewed by an external auditor are, in all material respects, accurate, complete, and provide investors with the information necessary to make sound investment decisions.	*Explain*	Perusahaan telah mengungkapkan sistem dan prosedur untuk memastikan bahwa laporan keuangan interim yang tidak diaudit atau direviu oleh auditor eksternal secara material adalah akurat, lengkap, dan memberikan investor informasi yang tepat untuk membuat keputusan investasi yang tepat. Namun Perusahaan belum mengungkapkan sistem dan prosedur penyusunan Laporan Keuangan paling tidak mencakup pengendalian internal atas pelaporan keuangan, termasuk laporan keuangan interim, peran fungsi manajemen risiko/ kepatuhan/ pengawasan manajemen dan fungsi audit internal dalam memastikan integritas laporan keuangan interim, serta peran Komite Audit dalam mereviu laporan keuangan interim yang akan dipublikasikan. The Company has disclosed systems and procedures to ensure that interim financial statements that have not been audited or reviewed by an external auditor are, in all material respects, accurate, complete, and provide investors with the appropriate information to make sound investment decisions. However, the Company has not disclosed systems and procedures for the preparation of financial statements that at a minimum include internal controls over financial reporting, including interim financial statements; the roles of the risk management, compliance, and management oversight functions, as well as the internal audit function, in ensuring the integrity of interim financial statements; and the role of the Audit Committee in reviewing interim financial statements to be published.
6.2.2	Komite Audit memastikan kualitas audit laporan keuangan yang dilaksanakan oleh auditor eksternal. Kegiatan ini termasuk merekomendasikan penunjukan, penunjukan kembali dan, jika perlu, pemberhentian dan remunerasi auditor eksternal. The Audit Committee ensures the quality of the financial statement audit conducted by the external auditor. These activities include recommending the appointment, reappointment, and, if necessary, dismissal and compensation of the external auditor.	*Explain*	Komite Audit memastikan kualitas audit laporan keuangan yang dilaksanakan oleh auditor eksternal. Kegiatan ini termasuk merekomendasikan penunjukan, penunjukan kembali dan, jika perlu, pemberhentian dan remunerasi auditor eksternal. Namun belum terdapat dialog antara Komite Audit dengan auditor eksternal tanpa kehadiran manajemen dan Dewan Komisaris atau Komite Audit memastikan agar auditor eksternal segera menginformasikan semua temuan dan masalah signifikan yang ditemukan auditor eksternal selama pelaksanaan audit. The Audit Committee ensures the quality of the financial statement audits conducted by the external auditor. These activities include recommending the appointment, reappointment, and, if necessary, dismissal and remuneration of the external auditor. However, there has not yet been any dialogue between the Audit Committee and the external auditor without the presence of management and the Board of Commissioners; the Audit Committee ensures that the external auditor promptly reports all significant findings and issues identified during the audit.

6.2.3	Laporan keberlanjutan harus disiapkan dan diungkapkan dengan akurat dan disusun sesuai kerangka pelaporan keberlanjutan nasional atau internasional. Sustainability reports must be prepared and disclosed accurately and structured in accordance with national or international sustainability reporting frameworks.	*Explain*	Laporan keberlanjutan belum disiapkan dan diungkapkan dengan akurat dan disusun sesuai kerangka pelaporan keberlanjutan nasional atau internasional yaitu GRI Standards dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 51/POJK.03/2017, dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia (SEOJK) Nomor 16/SEOJK.04/2021. The sustainability report has not been prepared and disclosed accurately and structured in accordance with national or international sustainability reporting frameworks, namely the GRI Standards and Financial Services Authority Regulation (POJK) No. 51/POJK.03/2017, and the Circular Letter of the Financial Services Authority of the Republic of Indonesia (SEOJK) No. 16/SEOJK.04/2021.
6.2.4	Korporasi menerbitkan laporan tahunan secara terintegrasi yang menempatkan kinerja historis ke dalam konteks dan menggambarkan risiko, peluang, dan prospek korporasi di masa depan, sehingga membantu pemegang saham dan pemangku kepentingan memahami tujuan strategis korporasi dan kemajuannya dalam menciptakan nilai yang berkelanjutan. The corporation publishes an integrated annual report that places historical performance in context and describes the corporation's future risks, opportunities, and prospects, thereby helping shareholders and stakeholders understand the corporation's strategic objectives and its progress in creating sustainable value.	*Apply*	Perusahaan telah menerbitkan laporan tahunan yang menempatkan kinerja historis ke dalam konteks dan menggambarkan risiko, peluang, dan prospek Perusahaan di masa depan berupa ikhtisar kinerja keuangan selama 5 (lima) tahun terakhir, realisasi kinerja keuangan selama 2 (dua) tahun terakhir, perbandingan antara target dan realisasi, serta proyeksi di tahun selanjutnya. Selain itu dalam Laporan Tahunan juga memuat Prospek Usaha sehingga membantu pemegang saham dan pemangku kepentingan memahami tujuan strategis Perusahaan dan kemajuannya dalam menciptakan nilai yang berkelanjutan. The Company has published an annual report that places historical performance in context and describes the Company's future risks, opportunities, and prospects in the form of a summary of financial performance over the past 5 (five) years, actual financial performance over the past 2 (two) years, a comparison between targets and actual results, and projections for the coming year. In addition, the Annual Report also includes a Business Outlook to help shareholders and stakeholders understand the Company's strategic objectives and its progress in creating sustainable value.
6.3	Diseminasi Informasi Information Dissemination		
6.3.1	Saluran penyebaran informasi harus menyediakan akses yang setara, tepat waktu, dan relatif murah untuk informasi yang relevan bagi pengguna. Information dissemination channels must provide equal, timely, and relatively inexpensive access to information relevant to users.	*Explain*	Perusahaan telah memiliki saluran penyebaran informasi yang menyediakan akses setara, tepat waktu, dan *relative* murah untuk informasi yang relevan bagi pengguna selain situs web berupa sosial media. Namun, belum melaksanakan secara berkala pertemuan dengan analis keuangan. The Company already has information dissemination channels that provide equal, timely, and relatively inexpensive access to information relevant to users, in addition to its website and social media platforms. However, it has not yet held regular meetings with financial analysts.
6.3.2	Korporasi memastikan bahwa pernyataan tahunan terhadap penerapan Pedoman Umum Governansi Korporat Indonesia, termasuk penjelasan atas penerapan atas masing-masing Rekomendasi dan Panduan tersedia di situs web selama jangka waktu minimal lima tahun. The Corporation ensures that its annual statement on the implementation of the Indonesian General Corporate Governance Guidelines, including an explanation of the implementation of each Recommendation and Guideline, is available on its website for a minimum period of five years.	*Explain*	Pernyataan tahunan terhadap penerapan Pedoman Umum Governansi Korporat Indonesia, termasuk penjelasan atas penerapan atas masing-masing Rekomendasi dan Panduan belum tersedia di situs web selama jangka waktu minimal lima tahun. The annual statement on the implementation of the Indonesian General Corporate Governance Guidelines, including explanations of the implementation of each Recommendation and Guideline, has not been available on the website for a minimum period of five years.
6.3.3	Untuk korporasi yang terdaftar di pasar modal di yurisdiksi selain yurisdiksi asal, peraturan perundang-undangan atas governansi korporat yang berlaku harus diungkapkan dengan jelas. Dalam hal *cross listing*, kriteria dan prosedur *cross listing*, kriteria dan prosedur untuk mengakui persyaratan *listing* untuk *listing* utama harus transparan dan didokumentasikan. For corporations listed on capital markets in jurisdictions other than their home jurisdiction, the applicable laws and regulations on corporate governance must be clearly disclosed. In the case of cross-listing, the criteria and procedures for cross-listing, as well as the criteria and procedures for recognizing the listing requirements for the primary listing, must be transparent and documented.	*Explain*	Untuk korporasi yang terdaftar di pasar modal di yurisdiksi selain yurisdiksi asal, peraturan perundang-undangan atas governansi korporat yang berlaku harus diungkapkan dengan jelas. Dalam hal *cross listing*, kriteria dan prosedur *cross listing*, kriteria dan prosedur untuk mengakui persyaratan *listing* untuk *listing* utama harus transparan dan didokumentasikan. (N/A dikarenakan Perusahaan merupakan bukan Perusahaan Terbuka atau *listed* di Bursa). For corporations listed on a capital market in a jurisdiction other than their home jurisdiction, the applicable laws and regulations governing corporate governance must be clearly disclosed. In the case of cross-listing, the criteria and procedures for cross-listing, as well as the criteria and procedures for recognizing the listing requirements for the primary listing, must be transparent and documented. (N/A because the Company is not a public company or listed on a stock exchange).

Pemenuhan Standar Penerapan Tata Kelola Perusahaan
Compliance with Corporate Governance Standards

Prinsip 7. Pengungkapan dan Transparansi **Principle 7. Disclosure and Transparency**			
7.1	Hak Pemegang Saham Shareholder Rights		
7.1.1	Korporasi memiliki suatu kebijakan komunikasi yang memfasilitasi dan mendorong partisipasi pemegang saham atau investor. The corporation has a communication policy that facilitates and encourages shareholder or investor participation.	*Explain*	Perusahaan belum menyusun kebijakan komunikasi Perusahaan dengan pemegang saham atau investor, termasuk pengaturan upaya memfasilitasi dan mendorong partisipasi pemegang saham atau investor sehingga belum ada pengungkapan kebijakan tersebut dalam website dan laporan Perusahaan. Namun demikian, dalam prakteknya Perusahaan telah menyediakan wadah atau platform dialog konstruktif antara pemegang saham dengan manajemen, serta telah mengungkapkan kepada publik semua fakta baru yang material yang tersedia bagi analis keuangan dan pihak lainnya. The Company has not yet formulated a communication policy regarding its interactions with shareholders or investors, including provisions to facilitate and encourage shareholder or investor participation; therefore, no such policy has been disclosed on the Company's website or in its reports. However, in practice, the Company has provided a forum or platform for constructive dialogue between shareholders and management, and has disclosed to the public all material new facts available to financial analysts and other parties.
7.1.2	Korporasi yang merupakan entitas induk memastikan bahwa kebijakan governansi korporatnya berlaku bagi entitas anak dan entitas sepengendali yang di dalamnya investasi korporasi adalah signifikan. The parent company ensures that its corporate governance policies apply to subsidiaries and jointly controlled entities in which the parent company has a significant investment.	*Apply*	Perusahaan telah memastikan bahwa kebijakan governansi korporatnya berlaku bagi entitas anak berupa kerangka kerja dan kebijakan governansi korporat di entitas anak termasuk kebijakan tertulis. Perusahaan tidak memiliki entitas anak yang berbadan hukum selain Perseroan Terbatas. Untuk investasi di entitas anak yang signifikan namun di bawah mayoritas (seperti kepemilikan antara 20 persen sampai 50 persen saham), Direksi memastikan bahwa terdapat perjanjian pemegang saham atau perjanjian lain yang memungkinkan korporasi memantau kinerja korporasi dan berpartisipasi dalam kepengurusan, termasuk untuk persetujuan transaksi dan keputusan yang signifikan. (N/A, karena PLN EG tidak memiliki Anak Perusahaan). The Company has ensured that its corporate governance policies apply to its subsidiaries in the form of a corporate governance framework and policies at the subsidiary level, including written policies. The Company has no subsidiaries with legal entity status other than limited liability companies. For significant but non-controlling investments in subsidiaries (such as ownership of between 20 percent and 50 percent of shares), the Board of Directors ensures that there are shareholder agreements or other agreements that allow the corporation to monitor the subsidiary's performance and participate in its management, including for the approval of significant transactions and decisions. (N/A, as PLN EG has no subsidiaries).
7.1.3	Korporasi memiliki aturan dan prosedur yang mengatur akuisisi, pengambilalihan, dan transaksi luar biasa seperti merger dan penjualan aset korporasi yang substansial untuk memastikan transaksi terjadi secara transparan dan dalam kondisi yang wajar dan melindungi hak-hak semua pemegang saham sesuai dengan kelasnya. The Corporation has rules and procedures governing acquisitions, takeovers, and extraordinary transactions such as mergers and the sale of substantial corporate assets to ensure that transactions occur transparently and under fair conditions and protect the rights of all shareholders according to their class.	*Explain*	Perusahaan belum mengungkapkan aturan dan prosedur yang mengatur akuisisi, pengambil alihan, dan transaksi luar biasa seperti *merger* dan penjualan aset sehingga investor memahami hak-hak mereka dan hak untuk memperoleh kompensasi. Selain itu Perusahaan juga belum memiliki kebijakan yang mengatur taktik yang mencegah pengambil alihan (*anti-take-over devices*) tidak boleh digunakan untuk melindungi manajemen dan Dewan Komisaris dari akuntabilitas. The Company has not disclosed the rules and procedures governing acquisitions, takeovers, and extraordinary transactions such as mergers and asset sales so that investors understand their rights and their right to receive compensation. Furthermore, the Company does not yet have a policy stipulating that anti-takeover devices must not be used to shield management and the Board of Commissioners from accountability.

7.2	Perlakuan Adil Terhadap Pemegang Saham Fair Treatment of Shareholders		
7.2.1	Korporasi memiliki aturan dan prosedur yang memastikan: a. semua pemegang saham dari seri yang sama dalam satu kelas saham harus diperlakukan setara; b. pengungkapan aturan dan prosedur tersebut serta pengungkapan struktur modal dan pengaturan yang memungkinkan pemegang saham tertentu memperoleh pengaruh atau kendali yang tidak proporsional dengan kepemilikan sahamnya. The corporation has rules and procedures that ensure: a. all shareholders of the same series within a single class of stock are treated equally; b. the disclosure of these rules and procedures, as well as the disclosure of the capital structure and arrangements that allow certain shareholders to obtain influence or control that is disproportionate to their share ownership.	*Explain*	Mengingat Perusahaan belum mencatatkan sahamnya di bursa manapun, maka tidak ada ketentuan para investor memperoleh informasi tentang hak yang melekat pada semua seri maupun kelas saham sebelum mereka membelinya. Setiap perubahan dalam nilai ekonomi saham atau hak suara mendapat persetujuan dari kelas saham yang terdampak secara negatif. Namun Perusahaan belum menyusun mekanisme/prosedur yang memungkinkan pemegang saham memiliki kesempatan untuk mendapatkan ganti rugi yang efektif atas pelanggaran hak-hak pemegang saham sesuai dengan aturan perundangan berlaku dengan biaya yang wajar dan tanpa penundaan yang berlebihan. Since the Company has not listed its shares on any stock exchange, there are no provisions requiring investors to obtain information about the rights attached to all series and classes of shares before they purchase them. Any change in the economic value of shares or voting rights requires the approval of the share class that is negatively affected. However, the Company has not yet established mechanisms or procedures that allow shareholders the opportunity to obtain effective redress for violations of shareholder rights in accordance with applicable laws and regulations, at a reasonable cost and without undue delay.
7.2.2	Korporasi memiliki aturan dan prosedur yang memastikan transaksi pihak berelasi disetujui dan dilaksanakan sedemikian rupa yang dapat meyakinkan bahwa benturan kepentingan telah dikelola dengan tepat, dan melindungi kepentingan korporasi dan pemegang saham. The Corporation has rules and procedures that ensure related-party transactions are approved and executed in a manner that ensures conflicts of interest are properly managed and that the interests of the Corporation and its shareholders are protected.	*Explain*	Perusahaan telah memiliki kebijakan dan prosedur operasional baku terkait transaksi dengan pihak berelasi untuk memastikan bahwa transaksi dilakukan secara adil dan wajar (*arm's length transaction*). Dewan Komisaris dan Komite Audit berperan dalam memberikan arahan dan masukan kepada Direksi agar transaksi dengan pihak berelasi dapat dilaksanakan sesuai dengan prinsip transaksi yang wajar (*arm's-length principle*). Perusahaan juga telah memiliki kebijakan terkait pelarangan transaksi yang merugikan pemegang saham. Namun belum terdapat kebijakan terkait bantuan keuangan kepada Direksi mendapatkan persetujuan dari Dewan Komisaris serta belum terdapat pengungkapan dalam Laporan Tahunan terkait kesimpulan dari kajian Komite Audit atas transaksi pihak berelasi/benturan kepentingan yang signifikan termasuk proses persetujuan Dewan Komisaris atas transaksi tersebut. The Company has established standard operating policies and procedures regarding transactions with related parties to ensure that such transactions are conducted fairly and on an arm's-length basis. The Board of Commissioners and the Audit Committee play a role in providing guidance and input to the Board of Directors to ensure that transactions with related parties are conducted in accordance with the arm's-length principle. The Company also has a policy prohibiting transactions that are detrimental to shareholders. However, there is no policy regarding financial assistance to the Board of Directors that requires approval from the Board of Commissioners, nor is there any disclosure in the Annual Report regarding the Audit Committee's conclusions on significant related-party transactions or conflicts of interest, including the Board of Commissioners' approval process for such transactions.
7.2.3	Korporasi memiliki dan mengungkapkan kebijakan untuk mencegah terjadinya insider trading. Korporasi memiliki aturan yang jelas mengenai perdagangan apa pun dalam saham korporasi yang dilakukan oleh direktur, komisaris dan orang dalam untuk memastikan bahwa siapapun tidak boleh mendapatkan keuntungan secara langsung atau tidak langsung dari informasi yang tidak/belum tersedia di pasar. The corporation has and discloses policies to prevent insider trading. The corporation has clear rules regarding any trading in the corporation's shares by directors, commissioners, and insiders to ensure that no one may derive direct or indirect benefit from information that is not yet available in the market.	*Explain*	Korporasi memiliki dan mengungkapkan kebijakan untuk mencegah terjadinya insider trading. Korporasi memiliki aturan yang jelas mengenai perdagangan apa pun dalam saham korporasi yang dilakukan oleh direktur, komisaris dan orang dalam untuk memastikan bahwa siapapun tidak boleh mendapatkan keuntungan secara langsung atau tidak langsung dari informasi yang tidak/belum tersedia di pasar. (N/A) Mengingat saat ini Perusahaan tidak melakukan perdagangan saham, maka Perusahaan belum memiliki kebijakan khusus untuk mencegah terjadinya insider trading. The Corporation has and discloses a policy to prevent insider trading. The Corporation has clear rules regarding any trading in the Corporation's shares by directors, commissioners, and insiders to ensure that no one may derive direct or indirect benefit from information that is not yet available in the market. (N/A) Given that the Company is not currently trading shares, it does not yet have a specific " " policy to prevent insider trading.

Pemenuhan Standar Penerapan Tata Kelola Perusahaan
Compliance with Corporate Governance Standards

7.3	Rapat Umum Pemegang Saham Annual General Meeting of Shareholders		
7.3.1	Korporasi melakukan panggilan RUPS dengan agenda dan materi RUPS selengkap dan sedini mungkin (paling lambat 28 hari sebelum RUPS) untuk memberikan waktu dan materi yang cukup bagi pemegang saham untuk mempelajari dengan baik agenda rapat. Undangan rapat dan seluruh informasi RUPS diungkapkan melalui sarana elektronik seperti melalui situs web korporasi. The Corporation issues a notice of the General Meeting of Shareholders (GMS) with a complete agenda and meeting materials as early as possible (no later than 28 days before the GMS) to provide shareholders with sufficient time and materials to thoroughly review the meeting agenda. The meeting invitation and all GMS information are disclosed via electronic means, such as the Corporation's website.	*Explain*	Perusahaan belum melakukan panggilan RUPS dengan agenda dan materi lengkap dan tidak terlambat (paling lambat 28 hari sebelum RUPS) dan menyampaikan informasi yang relevan dan lengkap yang diperlukan dalam pengambilan keputusan dalam RUPS sebagaimana tercantum dalam undangan RUPS dan surat kelengkapan. Selain itu, undangan RUPS yang diungkapkan dalam website belum disertai penjelasan untuk setiap agenda. Undangan RUPS RKAP tanggal 15 Januari 2025, RUPS tanggal 30 Januari 2025. Adapun undangan RUPS LPT tanggal 5 Juni 2025, RUPS tanggal 26 Juni 2025. The Company has not issued a notice of the AGM with a complete agenda and materials in a timely manner (no later than 28 days before the AGM) and has not provided the relevant and complete information necessary for decision-making at the AGM as stated in the AGM notice and supporting documents. Furthermore, the GM invitations published on the website do not include explanations for each agenda item. The GM invitation for the Annual Business Plan (RKAP) was dated January 15, 2025, and the GM was held on January 30, 2025. The GM invitation for the Annual Performance Report (LPT) was dated June 5, 2025, and the GM was held on June 26, 2025.
7.3.2	Korporasi memiliki dan mengungkapkan aturan dan prosedur yang memfasilitasi pemegang saham dalam berpartisipasi dan memberikan suara secara efektif di RUPS. The corporation has and discloses rules and procedures that facilitate shareholders in participating and voting effectively at the GMS.	*Explain*	Perusahaan telah memiliki aturan dan prosedur yang memfasilitasi pemegang saham dalam berpartisipasi dan memberikan suara secara efektif di RUPS yang diatur secara umum dalam Anggaran Dasar. Pada saat RUPS LPT dan RUPS RKAP terdapat anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang tidak hadir. Namun, Perusahaan belum memiliki prosedur pemungutan suara secara elektronik, serta belum menunjuk pihak independen untuk menghitung dan/atau mengesahkan suara dalam RUPS dan mengungkapkannya dalam risalah RUPS. The Company has rules and procedures that facilitate shareholders' effective participation and voting at GMS, which are generally stipulated in the Articles of Association. During the LPT GMS and the RKAP GMS, some members of the Board of Commissioners and the Board of Directors were absent. However, the Company does not yet have procedures for electronic voting, nor has it appointed an independent party to count and/or certify votes at the GMS and disclose them in the GMS minutes.
7.3.3	Pemegang saham berpartisipasi efektif dalam menetapkan penunjukan anggota Direksi dan Dewan Komisaris. Shareholders participate effectively in determining the appointment of members of the Board of Directors and the Board of Commissioners.	*Apply*	Pemegang saham telah berpartisipasi efektif dalam menetapkan penunjukan anggota Direksi dan Dewan Komisaris. Dewan Komisaris melalui Komite Nominasi dan Remunerasi melakukan pemeriksaan yang mendalam atas kandidat Direktur dan Komisaris serta menyampaikan semua informasi relevan yang material mengenai kandidat kepada pemegang saham dalam proses pemilihan anggota dewan. Namun Pemegang saham tidak melakukan pemungutan suara secara langsung untuk tiap-tiap kandidat Direktur dan Komisaris. Penetapan untuk jabatan Direktur dan Komisaris kewenangannya ada di Pemegang Saham dan dilakukan melalui Keputusan RUPS secara sirkuler. (N/A) Shareholders have effectively participated in determining the appointment of members of the Board of Directors and the Board of Commissioners. The Board of Commissioners, through the Nomination and Remuneration Committee, conducts a thorough review of candidates for Directors and Commissioners and provides all relevant and material information regarding the candidates to shareholders during the board member selection process. However, shareholders do not cast votes directly for each candidate for Director and Commissioner. The authority to appoint Directors and Commissioners rests with the shareholders and is exercised through a circular resolution of the General Meeting of Shareholders. (N/A)
7.3.4	Korporasi memastikan transparansi dan akuntabilitas auditor eksternal di RUPS. The Corporation ensures the transparency and accountability of the external auditor at the GMS.	*Explain*	Dalam Undangan RUPS LPT Tahun Buku 2024, Perusahaan belum memberikan penjelasan dalam agenda terkait calon auditor eksternal yang akan ditunjuk atau ditunjuk kembali dalam RUPS. Perusahaan juga belum memastikan bahwa auditor eksternal menghadiri RUPS dan berkewajiban menjawab pertanyaan dari pemegang saham terkait dengan audit atas laporan keuangan. In the invitation to the LPT GMS for Fiscal Year 2024, the Company has not provided an explanation in the agenda regarding the candidates for external auditors to be appointed or reappointed at the GMS. The Company has also not ensured that the external auditors attend the GMS and are obligated to answer questions from shareholders regarding the audit of the financial statements.

7.3.5	Penyampaian hasil pemungutan suara dan ringkasan risalah RUPS secara lengkap diumumkan ke publik pada hari kerja berikutnya. The results of the voting and a complete summary of the GMS minutes are announced to the public on the following business day.	*Explain*	Risalah RUPS diinformasikan kepada pemegang saham selambat-lambatnya 30 hari kerja setelah RUPS. Namun Risalah RUPS belum memuat pertanyaan yang diajukan oleh pemegang saham dan jawaban yang diberikan oleh pimpinan rapat atau pihak yang menjawab. Selain itu, media digital komunikasi resmi Perusahaan belum memuat dan menyediakan Penyelenggaraan RUPS, beserta semua materi rapat, laporan dan dokumen terkait yang meliputi antara lain laporan tahunan dan hasil pemungutan suara, termasuk agenda rapat yang bersangkutan selama paling tidak 10 (sepuluh) tahun. The minutes of the General Meeting are provided to shareholders no later than 30 business days after the meeting. However, the minutes do not include questions raised by shareholders and the responses provided by the chairperson or the designated representative. In addition, the Company's official digital communication channels have not published or made available information regarding the conduct of the GMS, along with all meeting materials, reports, and related documents—including, among others, the annual report and voting results, as well as the relevant meeting agenda—for a period of at least 10 (ten) years.
	Prinsip 8. Penghargaan Terhadap Pemangku Kepentingan **Principle 8. Respect for Stakeholders**		
8.1	Keterlibatan Pemangku kepentingan Kunci (*Stakeholder Engagement*) Key Stakeholder Engagement		
8.1.1	Korporasi melalui Sekretaris Korporasi melaksanakan komunikasi yang regular, transparan dan efektif dengan pemangku kepentingan kunci serta melibatkan mereka untuk memahami harapan dan keluhan mereka serta dampak korporasi terhadap mereka. The Corporation, through the Corporate Secretary, maintains regular, transparent, and effective communication with key stakeholders and engages them to understand their expectations and concerns, as well as the Corporation's impact on them.	*Explain*	Perusahaan melalui Sekretaris Perusahaan melaksanakan komunikasi yang regular, transparan dan efektif dengan pemangku kepentingan kunci Perusahaan telah mengungkapkan proses dalam mengidentifikasi dan memilih pemangku kepentingan kunci yang akan dilibatkan. Perusahaan telah menyediakan saluran yang dapat digunakan para pemangku kepentingan kunci (misalnya pelanggan, pemasok, masyarakat umum, dll) untuk menyampaikan pendapat dan masukan, menyuarakan keluhan dan/atau pengaduan mereka atas kemungkinan pelanggaran hak-hak mereka melalui Media Pelaporan Pelanggaran (*whistleblowing system*) serta telah mengungkapkan pendekatan dan kegiatan dalam menangani keterlibatan pemangku kepentingan kunci beserta frekuensinya. Namun belum mengungkapkan proses identifikasi dan memilih pemangku kepentingan kunci yang akan dilibatkan, dimana Perusahaan membagi pemangku kepentingan dalam dua kategori, yaitu pemangku kepentingan internal dan eksternal serta mengungkapkan pendekatan dan kegiatan dalam menangani keterlibatan pemangku kepentingan kunci sesuai dengan peran, posisi, dan pengaruh masing-masing pemangku kepentingan dan termasuk frekuensinya. Selain itu, Perusahaan belum mengungkapkan pandangan, masukan dan keluhan signifikan yang disampaikan para pemangku kepentingan kunci yang diperoleh dari keterlibatan pemangku kepentingan kunci, termasuk: a. respons Perusahaan, dan b. kelompok pemangku kepentingan kunci yang menyampaikan pandangan dan masukan dimuat dalam Laporan Keberlanjutan. The Company, through the Corporate Secretary, maintains regular, transparent, and effective communication with key stakeholders. The Company has disclosed the process for identifying and selecting key stakeholders to be engaged. The Company has provided channels that key stakeholders (e.g., , customers, suppliers, the general public, etc.) can use to express their opinions and feedback, voice their complaints and/or reports regarding potential violations of their rights through the Whistleblowing System, and has disclosed its approach and activities in managing engagement with key stakeholders, along with the frequency of such engagement. However, the Company has not disclosed the process for identifying and selecting the key stakeholders to be engaged, whereby the Company categorizes stakeholders into two groups—internal and external stakeholders—nor has it disclosed the approaches and activities used to manage engagement with key stakeholders in accordance with each stakeholder's role, position, and influence, including the frequency of such engagement. Furthermore, the Company has not disclosed significant views, feedback, and complaints expressed by key stakeholders obtained through key stakeholder engagement, including: a. the Company's responses, and b. the groups of key stakeholders who provided views and feedback as included in the Sustainability Report.

Pemenuhan Standar Penerapan Tata Kelola Perusahaan
Compliance with Corporate Governance Standards

8.2	Integrasi Keberlanjutan dalam Model Bisnis Integration of Sustainability into the Business Model		
8.2.1	Dewan Komisaris bersama-sama dengan Direksi bertanggung jawab, akuntabel dan transparan atas governansi keberlanjutan, termasuk menetapkan strategi, prioritas, dan target keberlanjutan korporasi. Direksi dan Dewan Komisaris memasukkan pertimbangan keberlanjutan ketika menjalankan perannya, termasuk antara lain dalam pengembangan dan implementasi strategi korporasi, rencana bisnis, rencana aksi utama dan manajemen risiko. The Board of Commissioners, together with the Board of Directors, is responsible, accountable, and transparent regarding sustainability governance, including setting the Company's sustainability strategies, priorities, and targets. The Board of Directors and the Board of Commissioners incorporate sustainability considerations when carrying out their roles, including, among other things, in the development and implementation of the Company's strategy, business plans, key action plans, and risk management.	*Explain*	Dewan Komisaris bersama-sama dengan Direksi bertanggung jawab, akuntabel dan transparan atas governansi keberlanjutan, termasuk menetapkan strategi, prioritas, dan target keberlanjutan Perusahaan. Direksi memastikan bahwa strategi, prioritas dan target keberlanjutan Perusahaan serta kinerja terhadap target ini dikomunikasikan kepada para pemangku kepentingan. Direksi dan Dewan Komisaris senantiasa mengikuti dan memahami masalah keberlanjutan yang relevan bagi Perusahaan dan bisnisnya. Evaluasi kinerja Direksi dan Dewan Komisaris telah mencakup kinerja mereka dalam mengawasi dan menangani risiko serta peluang yang signifikan tentang keberlanjutan. Namun Direksi belum memastikan bahwa strategi, prioritas dan target keberlanjutan Perusahaan serta kinerja terhadap target ini dikomunikasikan kepada para pemangku kepentingan dengan jelas seperti investor, karyawan, pemerintah dan masyarakat, serta telah diungkapkan dalam Laporan Tahunan dan/atau Laporan Keberlanjutan. The Board of Commissioners, together with the Board of Directors, is responsible, accountable, and transparent regarding sustainability governance, including establishing the Company's sustainability strategies, priorities, and targets. The Board of Directors ensures that the Company's sustainability strategies, priorities, and targets—as well as performance against these targets—are communicated to stakeholders. The Board of Directors and the Board of Commissioners consistently monitor and understand sustainability issues relevant to the Company and its business. The performance evaluation of the Board of Directors and the Board of Commissioners has included their performance in overseeing and addressing significant risks and opportunities related to sustainability. However, the Board of Directors has not yet ensured that the Company's sustainability strategies, priorities, and targets, as well as its performance against these targets, are clearly communicated to stakeholders—such as investors, employees, the government, and the public—and disclosed in the Annual Report and/or Sustainability Report.
8.3	Perlindungan Terhadap Pemangku Kepentingan Protection of Stakeholders		
8.3.1	Direksi memastikan dan mengungkapkan bahwa operasi korporasi mencerminkan penerapan standar etika, tanggung jawab sosial dan lingkungan yang tinggi di seluruh korporasi dan memastikan bahwa kebijakan dan prosedur yang tepat diterapkan untuk menghormati serta mematuhi hak-hak pemangku kepentingan. The Board of Directors ensures and discloses that corporate operations reflect the application of high ethical, social, and environmental standards throughout the corporation and ensures that appropriate policies and procedures are in place to respect and comply with the rights of stakeholders.	*Apply*	Direksi telah memastikan bahwa seluruh aktivitas perusahaan dijalankan secara etis, bertanggung jawab secara sosial dan lingkungan dan transparan, serta menghormati hak-hak semua pemangku kepentingan, termasik pengaturan kebijakan kreditur secara khusus yang mengatur terkait: (a) Dewan Komisaris mengawasi dan Direksi memonitor likuiditas dan solvabilitas keuangan korporasi; (b) Direksi memastikan bahwa risiko terhadap posisi keuangan atau kesulitan keuangan segera teridentifikasi, dikelola, dimitigasi serta dilaporkan. Dewan Komisaris memantau penanganan Direksi atas risiko atau kesulitan keuangan dan menerima laporan rutin. The Board of Directors has ensured that all corporate activities are conducted ethically, in a socially and environmentally responsible and transparent manner, and respect the rights of all stakeholders, including specific creditor policy provisions governing the following: (a) The Board of Commissioners oversees and the Board of Directors monitors the corporation's financial liquidity and solvency; (b) The Board of Directors ensures that risks to the financial position or financial difficulties are promptly identified, managed, mitigated, and reported. The Board of Commissioners monitors the Board of Directors' handling of financial risks or difficulties and receives regular reports.

8.3.2	Direksi mendorong karyawan bekerja untuk kepentingan jangka panjang korporasi dan mengedepankan keberlanjutan. The Board of Directors encourages employees to work in the corporation's long-term best interests and to prioritize sustainability.	*Explain*	Direksi telah mendorong karyawan bekerja untuk kepentingan jangka panjang Perusahaan dan mengedepankan keberlanjutan. Perusahaan telah memastikan remunerasi berbasis kinerja untuk karyawan harus memperhatikan unsur risiko, Direksi telah memastikan Perusahaan memiliki program pengembangan dan manajemen sumber daya manusia yang efektif serta Perusahaan telah membentuk Dana Pensiun. Namun Perusahaan belum memiliki kebijakan pemberian insentif jangka panjang kepada karyawan (LTI/ *Long Term Insentif*), guna mendorong penciptaan nilai yang berkelanjutan dan belum adanya kebijakan terkait keberagaman untuk pengisian posisi manajerial. The Board of Directors has encouraged employees to work in the Company's long-term best interests and to prioritize sustainability. The Company has ensured that performance-based compensation for employees takes risk factors into account; the Board of Directors has ensured the Company has effective human resource management development and programs; and the Company has established a Pension Fund. However, the Company does not yet have a policy for providing long-term incentives (LTI) to employees to encourage sustainable value creation, nor does it have a diversity policy for filling managerial positions.





Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

Corporate Social Responsibility

Strategi Penerapan Program Tanggung Jawab Sosial Lingkungan
Strategy for Social and Environmental Responsibility Program Implementation

Strategi program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) yang diterapkan oleh PLN Energi Gas berfokus pada 5 (lima) aspek, yaitu pendidikan, pemberdayaan masyarakat, lingkungan, kesehatan, serta sosial budaya dan keagamaan. Program tersebut dijalankan sebagai bentuk komitmen Perusahaan dalam memberikan dampak positif bagi masyarakat dan lingkungan di sekitar wilayah operasional Perusahaan. Penerapan program TJSL PLN Energi Gas juga sejalan dengan visi dan misi Perusahaan dalam mendukung pembangunan berkelanjutan serta menciptakan nilai sosial yang berkesinambungan.

PLN Energi Gas juga berkomitmen untuk berencana menyusun laporan keberlanjutan berbasis standar yang umum digunakan meliputi *Global Reporting Initiative* (GRI), *Sustainability Accounting Standards Board* (SASB), dan IFRS *Sustainability Standards* serta memperhatikan peraturan perundang undangan yang berlaku, seperti Peraturan OJK terkait keuangan berkelanjutan di Indonesia.

PLN Energi Gas implements strategy of the Social and Environmental Responsibility (CSER) program by focusing on 5 (five) aspects: education, community empowerment, environment, health, and socio-cultural and religious matters. The Company actualizes the programs as the Company's commitment to creating positive impact on the community and environment in the areas surrounding the Company's operational sites. CSER program implementation by PLN Energi Gas is also aligned with the Company's vision and mission to support sustainable development and create sustainable social value.

PLN Energi Gas is also committed to preparing a sustainability report based on commonly used standards, including the Global Reporting Initiative (GRI), Sustainability Accounting Standards Board (SASB), and IFRS Sustainability Standards, while also observing applicable laws and regulations, such as the FSA Regulation on sustainable finance in Indonesia.

Tata Kelola (Governansi) Berkelanjutan

Dalam penerapan tata kelola berkelanjutan, PLN Energi Gas terus memperkuat implementasi *Good Corporate Governance* (GCG) sebagai fondasi dalam mendukung keberlanjutan usaha dan penciptaan nilai jangka panjang Perusahaan. PLN Energi Gas meyakini bahwa keberlanjutan tidak hanya dicapai melalui kinerja ekonomi, tetapi juga melalui penerapan tata kelola yang transparan, akuntabel, bertanggung jawab, independen, serta selaras dengan prinsip-prinsip GCG. Melalui penerapan tata kelola yang baik, Perusahaan dapat menjaga keseimbangan antara kepentingan bisnis, sosial, dan lingkungan secara berkelanjutan.

Sebagai bentuk dukungan terhadap penerapan governansi keberlanjutan, PLN Energi Gas telah memiliki struktur dan infrastruktur tata kelola Perusahaan yang terdiri atas Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Dewan Komisaris, dan Direksi. Dewan Komisaris bertugas melakukan pengawasan serta memberikan nasihat terhadap pelaksanaan kebijakan dan program Perusahaan, termasuk pelaksanaan program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL). Selain itu, sebagai

Sustainable Governance

In implementing sustainable governance, PLN Energi Gas continues to strengthen the implementation of Good Corporate Governance (GCG) as a foundation for supporting business sustainability and the creation of long-term value for the Company. PLN Energi Gas believes that sustainability is achieved not only through economic performance, but also through the implementation of governance that is transparent, accountable, responsible, independent, and aligned with GCG principles. Through the implementation of good governance, the Company can maintain a balance between business, social, and environmental interests in a sustainable manner.

As support for the sustainable governance implementation, PLN Energi Gas has established a corporate governance structure and infrastructure consisting of the General Meeting of Shareholders (GMS), the Board of Commissioners, and the Board of Directors. The Board of Commissioners is tasked with overseeing and providing advice on the implementation of the Company policies and programs, including the implementation of the Social and Environmental Responsibility (CSER) program.

bentuk komitmen terhadap implementasi TJSL yang efektif dan terintegrasi, PLN Energi Gas telah menunjuk Satuan Sekretariat Perusahaan sebagai penanggung jawab pelaksanaan TJSL sesuai dengan Peraturan Direksi PT PLN Energi Gas Nomor 0027/DIREG/01/07/2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja PT PLN Energi Gas.

Furthermore, as a commitment to the effective and integrated implementation of CSER, PLN Energi Gas has appointed the Corporate Secretary Unit as the party in charge of CSER according to the Board of Directors Regulation of PT PLN Energi Gas Number 0027/DIREG/01/07/2025 concerning the Organization and Work Procedures of PT PLN Energi Gas.

Penerapan tata kelola berkelanjutan di PLN Energi Gas dilakukan secara konsisten dan terintegrasi dalam setiap proses bisnis Perusahaan. Melalui penerapan tersebut, Perusahaan berupaya memperkuat integritas, meningkatkan kualitas pengambilan keputusan, serta memastikan seluruh kegiatan operasional berjalan sejalan dengan tujuan keberlanjutan jangka panjang. Dengan demikian, tata kelola berkelanjutan tidak hanya menjadi pedoman dalam menjalankan kegiatan usaha, tetapi juga menjadi bagian penting dalam mendukung pertumbuhan Perusahaan yang sehat, adaptif, dan berkelanjutan.

PLN Energi Gas carries out sustainable governance consistently and integrated into every business process of the Company. Through this implementation, the Company strives to strengthen integrity, improve the quality of decision-making, and ensure that all operational activities are aligned with long-term sustainability goals. Thus, sustainable governance is not only a guideline in undertaking business activities, but also an important part in supporting the Company's healthy, adaptive, and sustainable growth.

Dasar Hukum dan Pendekatan

Dasar pelaksanaan program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan berlandaskan pada beberapa aspek hukum dan pendekatan, di antaranya:

1. Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
2. Undang-undang No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
3. Undang-Undang No. 1 tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja;
4. Undang-Undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
5. Undang-Undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
6. Peraturan Menteri BUMN nomor PER-1/MBU/03/2023 tentang Penugasan Khusus dan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara
7. Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas;
8. Peraturan Presiden No. 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

Legal Basis and Approach

The Company undertakes Social and Environmental Responsibility program following several legal aspects and approaches, including:

1. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies;
2. Law No. 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management;
3. 1 of 1970 concerning Occupational Safety;
4. 13 of 2003 concerning Manpower;
5. 8 of 1999 concerning Consumer Protection;
6. Minister of State-Owned Enterprises Regulation No. PER-1/MBU/03/2023 concerning Special Assignments and Social and Environmental Responsibility Program of State-Owned Enterprises
7. 47 of 2012 concerning Social and Environmental Responsibility of Limited Liability Companies;
8. 59 of 2017 concerning the Implementation of the Achievement of Sustainable Development Goals

9. Peraturan Direksi PT PLN Energi Gas nomor 0052.P/ DIREG/2024 tentang Kebijakan Strategis Komunikasi Korporat dan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) pada PT PLN Energi Gas.

Pengembangan Kompetensi Terkait Keuangan Berkelanjutan

PLN Energi Gas senantiasa mendukung pengembangan kompetensi terkait penerapan keuangan berkelanjutan sebagai bagian dari upaya memperkuat implementasi bisnis dan tata kelola berkelanjutan di lingkungan Perusahaan. Dalam pelaksanaannya, Dewan Komisaris, Direksi, serta unit kerja yang bertanggung jawab terhadap penerapan keberlanjutan dan tata kelola Perusahaan secara aktif mengikuti berbagai kegiatan pengembangan kompetensi, seperti seminar, workshop, pelatihan, dan forum diskusi yang berkaitan dengan keuangan berkelanjutan serta aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Melalui kegiatan tersebut, PLN Energi Gas berupaya meningkatkan pemahaman, kapasitas, dan kualitas pengambilan keputusan guna mendukung penerapan prinsip keuangan berkelanjutan secara efektif dan terintegrasi dalam proses bisnis Perusahaan. Sepanjang tahun 2025 program kompetensi terkait keuangan berkelanjutan yang diikuti oleh Manajemen Perusahaan Adalah sebagai berikut:

9. PT PLN Energi Gas Board of Directors Regulation No. 0052.P/DIREG/2024 concerning Strategic Policy of Corporate Communication and Social and Environmental Responsibility (CSER) at PT PLN Energi Gas.

Competency Development Related to Sustainable Finance

PLN Energi Gas continuously supports the competencies development related to the implementation of sustainable finance as part of efforts to strengthen the implementation of sustainable business and governance within the Company. In the implementation, the Board of Commissioners, Board of Directors, and work units are responsible for the implementation of sustainability and corporate governance actively participate in various competency development activities, such as seminars, workshops, training, and discussion forums related to sustainable finance as well as economic, social, and environmental aspects. Through these activities, PLN Energi Gas seeks to enhance understanding, capacity, and quality of decision-making to support effective and integrated implementation of sustainable finance principles in the Company's business processes. Throughout 2025, competency programs related to sustainable finance attended by the Company's Management are as follows: Through these activities, PLN Energi Gas seeks to enhance understanding, capacity, and quality of decision-making to support the effective and integrated implementation of sustainable finance principles in the Company's business processes. Throughout 2025, the competency programs related to sustainable finance attended by the Company's Management are as follows:

Nama Pelatihan Training	Penyelenggara Organizer	Waktu Pelaksanaan Date
Pelatihan Berbasis Kompetensi Pelaksana Program Pemberdayaan Masyarakat Competency-Based Training for Community Empowerment Program Executive	Socialimpact.id	23 Oktober 2025 October 23, 2025
Sertifikasi Pelaksana Program Pemberdayaan Masyarakat Certification for Community Empowerment Program Executive	LSP RI	17 November 2025 November 17, 2025

Penilaian Risiko Atas Penerapan Keuangan Berkelanjutan

PLN Energi Gas melakukan penilaian risiko atas penerapan keuangan berkelanjutan sebagai bagian dari upaya untuk memastikan keberlangsungan usaha serta penerapan tata kelola yang prudent dan bertanggung jawab. Penilaian risiko tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai aspek ekonomi, sosial, lingkungan, dan tata kelola yang berpotensi mempengaruhi kinerja serta keberlanjutan bisnis Perusahaan dalam jangka panjang.

Dalam pelaksanaannya, proses identifikasi dan evaluasi risiko dilakukan secara terintegrasi melalui penerapan manajemen risiko Perusahaan guna mengantisipasi potensi risiko yang dapat timbul dari aktivitas operasional maupun implementasi program keberlanjutan. Risiko-risiko yang dinilai mencakup antara lain risiko operasional, kepatuhan, lingkungan, sosial, reputasi, serta risiko terkait perubahan regulasi dan dinamika industri energi.

Melalui penilaian risiko tersebut, PLN Energi Gas berupaya memastikan bahwa penerapan keuangan berkelanjutan dapat berjalan secara efektif, terukur, dan selaras dengan strategi bisnis Perusahaan. Selain itu, hasil penilaian risiko juga menjadi dasar dalam penyusunan langkah mitigasi dan pengambilan keputusan guna mendukung terciptanya pertumbuhan usaha yang sehat, adaptif, dan berkelanjutan.

Risk Assessment on the Sustainable Finance Implementation

PLN Energi Gas undertakes risk assessments on the sustainable finance implementation as part of its efforts to ensure business continuity and the application of prudent and responsible governance. The Company assesses those risks by considering various economic, social, environmental, and governance aspects that could potentially affect the Company's performance and long-term business sustainability.

In the implementation, PLN Energi Gas identifies and evaluates the risks in an integrated manner through the application of the Company's risk management to anticipate potential risks that may arise from operational activities or the implementation of sustainability programs. The assessed risks include operational, compliance, environmental, social, reputational risks, as well as risks related to regulatory changes and dynamics of the energy industry.

Through these risk assessments, PLN Energi Gas seeks to ensure that the implementation of sustainable finance can run effectively, measurably, and in line with the Company's business strategy. Additionally, the results of the risk assessments serve as a basis for formulating mitigation measures and decision-making to support the creation of healthy, adaptive, and sustainable business growth.



Pelibatan Pemangku Kepentingan

PLN Energi Gas menempatkan para pemangku kepentingan sebagai pihak yang memiliki peran penting dalam mendukung keberlanjutan usaha Perusahaan. Dalam menjalankan kegiatan operasional dan program keberlanjutan, PLN Energi Gas secara aktif membangun komunikasi yang transparan serta kolaborasi yang konstruktif guna memastikan setiap kebijakan dan inisiatif yang dijalankan selaras dengan kebutuhan dan harapan para pemangku kepentingan.

Keberlanjutan usaha PLN Energi Gas juga sangat dipengaruhi oleh kemampuan Perusahaan dalam menjalin hubungan dan interaksi yang positif dengan para pemangku kepentingan. Perusahaan memandang pemangku kepentingan sebagai pihak yang memiliki pengaruh dan/atau terdampak oleh kegiatan operasional Perusahaan. Oleh karena itu, PLN Energi Gas melakukan identifikasi terhadap kelompok pemangku kepentingan utama berdasarkan tingkat pengaruhnya terhadap keberlangsungan usaha Perusahaan.

Melalui pelibatan pemangku kepentingan, PLN Energi Gas berupaya menjaga keseimbangan antara aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan dalam setiap kegiatan usaha dan pengambilan keputusan. Pelibatan tersebut dilakukan dalam proses perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi program keberlanjutan guna mendukung terciptanya manfaat yang berkelanjutan bagi seluruh pemangku kepentingan. Adapun pemangku kepentingan PLN Energi Gas terdiri antara lain:

Stakeholders Engagement

PLN Energi Gas considers stakeholders as parties with substantial role in supporting business sustainability of the Company. In running operational activities and sustainability programs, PLN Energi Gas actively builds transparent communication and constructive collaboration to ensure that every policy and initiative implemented aligns with the stakeholders needs and expectations.

PLN Energi Gas business sustainability is also greatly influenced by the Company's ability to establish positive relationships and interactions with the stakeholders. The Company views stakeholders as parties that influence and/or are affected by the Company's operational activities. Therefore, PLN Energi Gas identifies key stakeholder groups based on their level of influence on the Company's business continuity.

Through stakeholder engagement, PLN Energi Gas strives to maintain a balance between economic, social, and environmental aspects in every business activity and decision-making process. Such engagement is carried out in the planning, implementation, and evaluation stages of sustainability programs to support the creation of sustainable benefits for all stakeholders. The stakeholders of PLN Energi Gas include, among others:

Pemangku Kepentingan Stakeholders	Mekanisme Keterlibatan Engagement Mechanism	Isu/Topik Issue/Topic
Pihak Internal Internal Party		
Pemegang Saham Shareholders	• Rapat; • Laporan Kinerja. • Meetings; • Performance Reports.	- Peningkatan Kinerja; - Dukungan oleh Pemegang Saham. - Performance Improvement; - Shareholders Support.
Pegawai Employee	• Perjanjian Kerja Pegawai; • Pendidikan dan Pelatihan. • Employee Employment Agreements; • Education and Training.	• Terjaminnya kesejahteraan Pegawai dan keluarganya; • Suasana kerja kondusif. Sehat, dan aman; • Jenjang karir dan penilaian kinerja yang jelas, setara, dan tidak terdapat praktik diskriminasi. • Guaranteed welfare for employees and their families; • Conducive, healthy, and safe work environment; • Clear, equal career paths and performance appraisals, free from discrimination.
Pihak Eksternal External Party		
Masyarakat Community	• Komunikasi melalui media telepon dan tertulis; • Pelatihan Masyarakat; • Forum tatap muka; • Program tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan • Communication via telephone and written media; • Community training; • Face-to-face forums; • Social and Environmental Responsibility programs	• Hubungan yang harmonis; • Dampak negatif terhadap lingkungan terminimalisir. • Being able to grow and develop in harmony with PLN Energi Gas development; • Harmonious relationships; • Minimizing negative impacts on the environment.
Pemasok Supplier	• Kontrak dan Perjanjian. • Contracts and Agreements.	• Proses pengadaan yang adil dan transparan; • Pembayaran tepat waktu; • Hubungan yang harmonis. • Fair and transparent procurement process; • Timely payments; • Harmonious relationships.
Pemerintah Government	• Kepatuhan terhadap Peraturan; • Kontribusi ekonomi pada Pemerintah (pajak dan subsidi). • Compliance with Regulations; • Economic Contribution to the Government (taxes and subsidies).	• Kepatuhan terhadap peraturan; • Kontribusi ekonomi pada Pemerintah (pajak dan subsidi). • Compliance with regulations; • Economic contributions to the government (taxes and subsidies).
Media Massa Mass Media	• Konferensi pers. • Press conference.	• Mendapatkan akses informasi yang mudah dan luas. • Obtaining easy and broad access to information.

Tantangan dalam Penerapan Keuangan Berkelanjutan

Dalam penerapan keuangan berkelanjutan, PLN Energi Gas menghadapi berbagai tantangan yang berasal dari dinamika industri energi, perkembangan regulasi, serta meningkatnya perhatian terhadap aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola (ESG). Tantangan tersebut meliputi upaya integrasi prinsip keuangan berkelanjutan ke dalam proses bisnis dan pengambilan keputusan, penguatan kompetensi sumber daya manusia, serta penyesuaian kebijakan

Challenges in Implementing Sustainable Finance

In implementing sustainable finance, PLN Energi Gas faces various challenges arising from the dynamics of the energy industry, regulatory developments, and increasing attention to environmental, social, and governance (ESG) aspects. These challenges include efforts to integrate sustainable finance principles into business processes and decision-making, strengthening human resource competencies, as well as adjusting policies and risk management

dan sistem pengelolaan risiko agar selaras dengan standar dan ekspektasi para pemangku kepentingan. Untuk menghadapi tantangan tersebut, PLN Energi Gas terus memperkuat tata kelola, meningkatkan kapasitas internal, serta membangun koordinasi dan kolaborasi guna mendukung penerapan keuangan berkelanjutan yang efektif, adaptif, dan berkelanjutan.

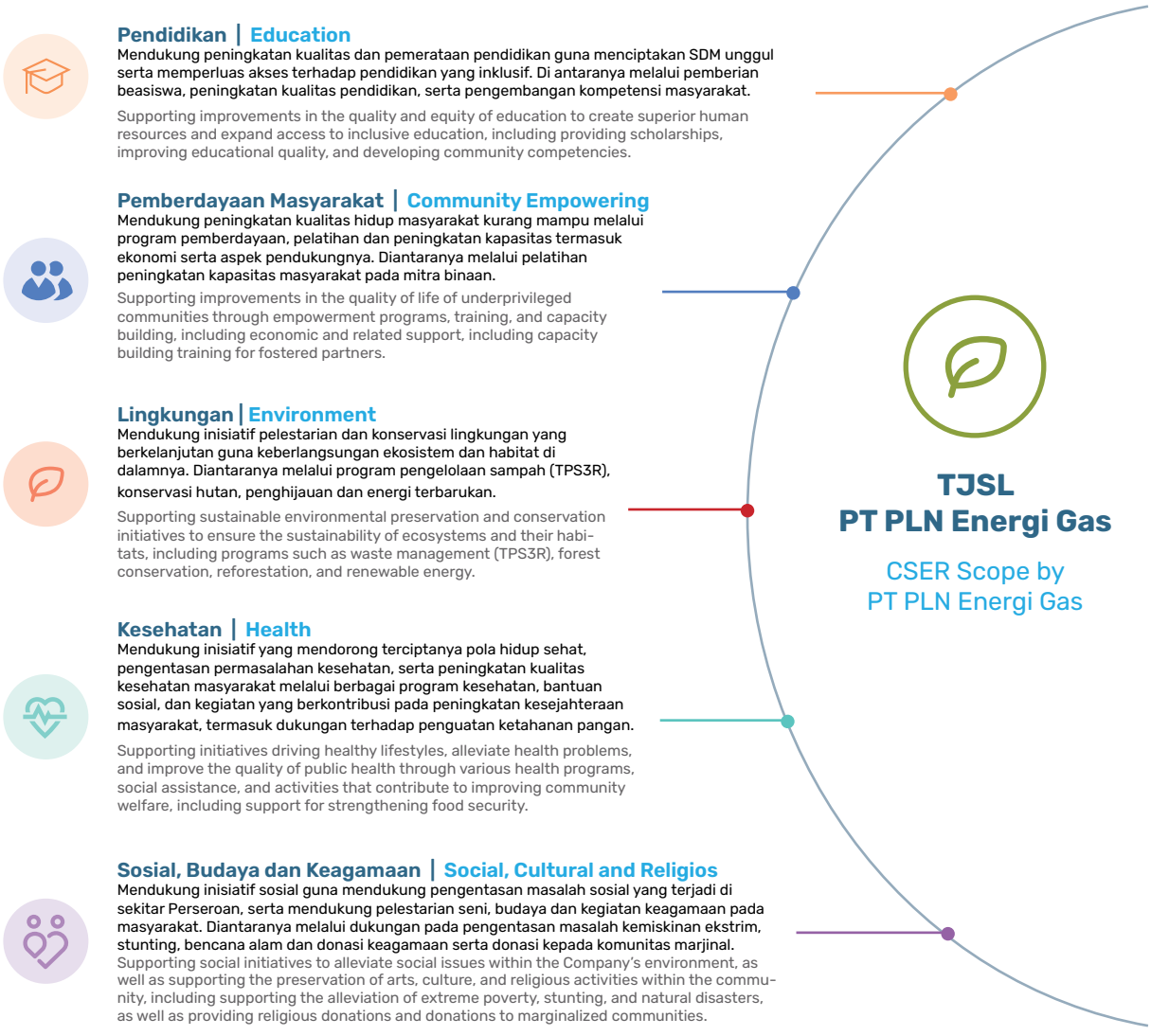
systems to align with the stakeholders standards and expectations. To address these challenges, PLN Energi Gas continues to strengthen governance, enhance internal capacity, and build coordination and collaboration to support the effective, adaptive, and sustainable implementation of sustainable finance.

Ruang Lingkup Program TJSL Perusahaan

Program TJSL PLN Energi Gas difokuskan pada 5 (lima) sektor, yaitu:

Corporate Social and Environmental Responsibility (CSER) Program Scope

PLN Energi Gas CSER Program focuses on 5 (five) sectors, namely:



Pendidikan | Education
Mendukung peningkatan kualitas dan pemerataan pendidikan guna menciptakan SDM unggul serta memperluas akses terhadap pendidikan yang inklusif. Di antaranya melalui pemberian beasiswa, peningkatan kualitas pendidikan, serta pengembangan kompetensi masyarakat.

Supporting improvements in the quality and equity of education to create superior human resources and expand access to inclusive education, including providing scholarships, improving educational quality, and developing community competencies.

Pemberdayaan Masyarakat | Community Empowering
Mendukung peningkatan kualitas hidup masyarakat kurang mampu melalui program pemberdayaan, pelatihan dan peningkatan kapasitas termasuk ekonomi serta aspek pendukungnya. Diantaranya melalui pelatihan peningkatan kapasitas masyarakat pada mitra binaan.

Supporting improvements in the quality of life of underprivileged communities through empowerment programs, training, and capacity building, including economic and related support, including capacity building training for fostered partners.

Lingkungan | Environment
Mendukung inisiatif pelestarian dan konservasi lingkungan yang berkelanjutan guna keberlangsungan ekosistem dan habitat di dalamnya. Diantaranya melalui program pengelolaan sampah (TPS3R), konservasi hutan, penghijauan dan energi terbarukan.

Supporting sustainable environmental preservation and conservation initiatives to ensure the sustainability of ecosystems and their habitats, including programs such as waste management (TPS3R), forest conservation, reforestation, and renewable energy.

Kesehatan | Health
Mendukung inisiatif yang mendorong terciptanya pola hidup sehat, pengentasan permasalahan kesehatan, serta peningkatan kualitas kesehatan masyarakat melalui berbagai program kesehatan, bantuan sosial, dan kegiatan yang berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, termasuk dukungan terhadap penguatan ketahanan pangan.

Supporting initiatives driving healthy lifestyles, alleviate health problems, and improve the quality of public health through various health programs, social assistance, and activities that contribute to improving community welfare, including support for strengthening food security.

Sosial, Budaya dan Keagamaan | Social, Cultural and Religios
Mendukung inisiatif sosial guna mendukung pengentasan masalah sosial yang terjadi di sekitar Perseroan, serta mendukung pelestarian seni, budaya dan kegiatan keagamaan pada masyarakat. Diantaranya melalui dukungan pada pengentasan masalah kemiskinan ekstrim, stunting, bencana alam dan donasi keagamaan serta donasi kepada komunitas marjinal.
Supporting social initiatives to alleviate social issues within the Company's environment, as well as supporting the preservation of arts, culture, and religious activities within the community, including supporting the alleviation of extreme poverty, stunting, and natural disasters, as well as providing religious donations and donations to marginalized communities.

Biaya dan Anggaran Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan

PLN Energi Gas menyediakan anggaran khusus untuk mendukung pelaksanaan program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) sebagai wujud komitmen Perusahaan dalam memberikan manfaat bagi masyarakat dan lingkungan. Besaran anggaran TJSL ditetapkan melalui proses penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) dengan mempertimbangkan kebutuhan program serta prioritas pelaksanaan TJSL pada tahun berjalan. Dalam pencatatan keuangan Perusahaan, anggaran TJSL diakui sebagai bagian dari beban usaha. Pada tahun 2025, PLN Energi Gas mengalokasikan anggaran TJSL sebesar Rp1,59 Miliar dengan realisasi sebesar Rp 1,33 Miliar atau 83,65% dari anggaran yang ditetapkan, termasuk biaya dalam pelaksanaan social mapping dan pengukuran nilai SROI dari program serta biaya pendukung pelaksanaan program.

Costs and Budget for Social and Environmental Responsibility

PLN Energi Gas allocates special budget to support the implementation of the Social and Environmental Responsibility (CSER) program as the Company's actualized commitment to providing benefits to the community and the environment. The CSER budget amount is determined through the process of preparing the Company's Work Plan and Budget (RKAP) by considering program needs and CSER implementation priorities for the current year. In the Company's financial records, the CSER budget is recognized as part of operating expenses. In 2025, PLN Energi Gas allocated CSER budget of Rp1.59 Billion, with a realization of Rp1.33 Billion or 83,65% of the allocated budget, including costs associated with conducting social mapping and measuring the program's SROI value, as well as costs supporting program implementation.

Membangun Budaya Keberlanjutan

PLN Energi Gas senantiasa menerapkan budaya keberlanjutan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kegiatan usaha dan proses pengambilan keputusan Perusahaan. Komitmen tersebut diwujudkan melalui berbagai program dan inisiatif keberlanjutan yang dilaksanakan secara konsisten serta ditanamkan kepada seluruh pemangku kepentingan guna mendukung terciptanya nilai jangka panjang bagi Perusahaan, masyarakat, dan lingkungan. Dalam pelaksanaannya, ruang lingkup program keberlanjutan PLN Energi Gas mencakup aspek pengelolaan lingkungan hidup, ketenagakerjaan, kesehatan dan keselamatan kerja (K3), pengembangan sosial kemasyarakatan, serta tanggung jawab kepada pelanggan. Berbagai aspek tersebut dijalankan secara terintegrasi dan saling mendukung satu sama lain sehingga mampu berkontribusi terhadap pencapaian tujuan, sasaran, dan keberlanjutan usaha Perusahaan.

Building a Culture of Sustainability

PLN Energi Gas consistently implements a culture of sustainability as an integral part of its business activities and decision-making processes. The Company actualizes this commitment through various sustainability programs and initiatives carried out consistently and instilled in all stakeholders to support the creation of long-term value for the Company, society, and the environment. In its implementation, the scope of PLN Energi Gas's sustainability program covers aspects of environmental management, employment, occupational health and safety (OHS), social and community development, as well as responsibility towards customers. These various aspects are carried out in an integrated and mutually supportive manner so as to contribute to the achievement of the Company's goals, targets, and business sustainability.

Inisiatif Program Keberlanjutan
Sustainability Program Initiatives

Pada tahun 2025, PLN Energi Gas terus memperkuat komitmennya dalam menjalankan berbagai program keberlanjutan sebagai bentuk dukungan terhadap upaya pemerintah dalam mewujudkan transisi energi. Pelaksanaan program keberlanjutan tersebut dilakukan dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan, standar yang berlaku, serta prinsip-prinsip keberlanjutan yang relevan dengan kegiatan usaha Perusahaan. Berbagai inisiatif yang dijalankan mencakup aspek ekonomi, lingkungan, dan sosial yang terintegrasi dalam kegiatan operasional maupun pengembangan bisnis Perusahaan. Melalui pelaksanaan program-program tersebut, PLN Energi Gas berupaya menciptakan nilai tambah bagi para pemangku kepentingan sekaligus mendukung pertumbuhan usaha yang berkelanjutan.

In 2025, PLN Energi Gas continued to strengthen commitment to implementing various sustainability programs as support for the government efforts in realizing energy transition and achieving emission reduction targets. Sustainability programs by referring to applicable laws and regulations, standards, and sustainability principles relevant to the Company's business activities. The various initiatives undertaken cover economic, environmental, and social aspects integrated into the Company's operational activities and business development. Through the implementation of these programs, PLN Energi Gas strives to create added values for the stakeholders while supporting sustainable business growth.

Ikhtisar Kinerja Aspek Keberlanjutan Tahun 2025

Overview of 2025 Sustainability Aspect Performance

Kinerja Aspek Ekonomi

Economic Aspect Performance

Total Pendapatan Usaha
Total Operating Revenue

Rp 480,95 miliar
Rp 480.95 billion

Laba Tahun Berjalan
Profit for the Year

Rp 94,74 miliar
Rp 94.74 billion

Kinerja Aspek Lingkungan Hidup — Environmental Aspect Performance

Pengelolaan Limbah

Limbah B3 yang dihasilkan dari kegiatan operasional Perusahaan dikelola sesuai dengan ketentuan yang berlaku melalui proses pengumpulan, penyimpanan sementara, dan penyerahan kepada pihak ketiga berizin untuk pengangkutan serta pengolahan lebih lanjut. Volume dan jenis limbah yang dihasilkan dicatat dalam logbook dan dilaporkan secara berkala kepada instansi terkait sebagai bentuk kepatuhan terhadap regulasi lingkungan.

Jumlah Emisi GRK yang dihasilkan sekitar 217 Ton CO2eq
The amount of GHG emissions generated is approximately 217 tonnes of CO2e.

Pelestarian Keanekaragaman Hayati tahun 2025
Penanaman 1.000 bibit Pohon Mangrove
Biodiversity Conservation through the Planting of 1,000 Mangrove Seedlings

Jumlah Limbah B3 yang dihasilkan 775,095 kg
The amount of hazardous and toxic waste (B3) generated is 775,095 kg.

Biaya Pengelolaan Lingkungan sebesar Rp 834 Juta , meningkat sekitar 218% dari tahun 2024.
Environmental management costs amount to Rp834 million, an increase of approximately 218% from 2024.

Hazardous Waste Management

The *Management* of hazardous waste at PLN EG is carried out through a partnership with a third party that holds the proper permits and has the expertise in the transportation and *Management* of hazardous waste. This partnership ensures that all hazardous waste generated from the Company's operational activities is handled safely, from collection and transportation through to treatment or final disposal, in accordance with applicable regulations.

Pengelolaan limbah Non B3

Di kantor pusat, total timbulan limbah padat non B3 tercatat sebesar 2,70663 ton selama tahun 2025. Sementara itu, pada kantor unit, total timbulan limbah padat non B3 tercatat sebesar 1.926,6 kg atau setara dengan 1,9266 ton.

Pengelolaan limbah padat non B3 di PLN EG tetap dilaksanakan melalui pemilahan sejak dari sumber, penyediaan sarana tempat sampah terpilah, serta kerja sama dengan pihak ketiga yang berizin untuk pengangkutan dan pengelolaan lanjutan. PLN EG juga terus mendorong penerapan prinsip reduce, reuse, dan recycle (3R) guna menekan volume timbulan limbah serta meningkatkan efisiensi pengelolaan sumber daya.

Non-Hazardous Waste Management

At the headquarters, the total generation of non-B3 solid waste was recorded at 2.70663 metric tons during 2025. Meanwhile, at branch offices, the total generation of non-B3 solid waste was recorded at 1,926.6 kg, equivalent to 1.9266 metric tons.
The management of non-B3 solid waste at PLN EG continues to be carried out through source separation, the provision of separate waste bins, and collaboration with licensed third parties for transportation and further management. PLN EG also continues to promote the application of the principles of reduce, reuse, and recycle (3R) to reduce the volume of waste generated and improve resource management efficiency.

Kinerja Aspek Sosial — Social Aspect Performance

Capaian Program Pengelolaan Sumber Daya Manusia

Tingkat Rekrutmen Karyawan 15,5 % dengan tingkat *turnover* sebesar 2%.
Jumlah Karyawan pada tahun 2025 sebanyak 167
Survei Kepuasan Pelanggan 78,39
KPI Nihil Kecelakaan dengan nilai 0 (nol)

Capaian Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan

Realisasi Penyaluran Program TJSL Rp 1.33 miliar.

Human Resource Management Program Achievements

Employee Recruitment Rate is 15.5% with a turnover rate of 2%.
Number of employees in 2025 is 167.
Customer Satisfaction Survey 78.39%.
KPI Zero Accidents with a value of 0 (zero).

Social and Environmental Responsibility Program Achievements

Realization of TJSL Program Distribution of IDR 1.47 billion.

Kinerja Ekonomi
Economic Performance

Kontribusi Ekonomi

Sebagai bagian dari PLN Group, PLN Energi Gas berkomitmen untuk memberikan kontribusi ekonomi yang berkelanjutan melalui pengelolaan usaha yang sehat, efisien, dan berorientasi pada penciptaan nilai. Komitmen tersebut tercermin dari kemampuan Perusahaan dalam mempertahankan kinerja yang optimal sepanjang tahun 2025, sehingga mampu menghasilkan nilai ekonomi yang tidak hanya mendukung pertumbuhan usaha Perusahaan, tetapi juga memberikan manfaat bagi para pemangku kepentingan melalui distribusi nilai ekonomi yang dihasilkan.

Economic Contribution

As part of the PLN Group, PLN Energi Gas is committed to making a sustainable economic contribution through sound, efficient, and value-oriented business management. The Company reflects this commitment through the ability to maintain optimal performance during 2025, thereby generating economic value that not only supports the Company's business growth but also provides benefits to the stakeholders through the distribution of the economic value generated.

Perolehan dan Pendistribusian Nilai Ekonomi

Berbagai strategi dan upaya yang telah dilakukan Perusahaan sepanjang tahun 2025 telah mendukung kemampuan PLN Energi Gas dalam mempertahankan kinerja yang optimal dan berkelanjutan. PLN Energi Gas juga dapat mendistribusikan sebagian dari pendapatan usaha yang diperoleh kepada para pemangku kepentingan sebagai bentuk penciptaan nilai ekonomi. Pada tahun 2025, jumlah penghasilan komprehensif tahun berjalan PLN Energi Gas mengalami kenaikan 14,81% atau sebesar Rp94,74 miliar dibandingkan tahun 2024 sebesar Rp80,70 miliar, menjadi sebesar Rp80.70 miliar pada tahun 2025. Sementara itu, realisasi pendapatan usaha tahun 2025 mengalami kenaikan 0,49% atau sebesar Rp480,95 miliar dibandingkan tahun 2024 sebesar Rp 478,62 miliar.

Economic Value Generated and Distributed

The various strategies and efforts implemented by the Company throughout 2025 have supported PLN Energi Gas's ability to maintain optimal and sustainable performance. PLN Energi Gas can also distribute a portion of its operating revenue to stakeholders as a form of economic value creation. In 2025, PLN Energi Gas's current-year comprehensive income increased 14.81%, or IDR 94.74 billion, compared to IDR 80.70 billion in 2024, to IDR 80.70 billion in 2025. Meanwhile, realized operating revenue in 2025 increased 0.49%, or IDR 480.95 billion, compared to IDR 478.62 billion in 2024.

Selain menciptakan nilai ekonomi bagi para pemangku kepentingan, PLN Energi Gas juga turut berperan dalam mendukung pembangunan nasional melalui pemenuhan kewajiban Perusahaan sebagai Wajib Pajak. Komitmen tersebut diwujudkan melalui kepatuhan terhadap peraturan perpajakan dan pemenuhan kewajiban keuangan kepada negara sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Adapun realisasi pemenuhan kewajiban keuangan kepada negara sampai dengan tahun 2025 adalah sebesar Rp86.434 miliar.

Apart from creating economic value for the stakeholders, PLN Energi Gas also plays a role in supporting national development by fulfilling the Company's obligations as a taxpayer. This commitment is realized through compliance with tax regulations and fulfilment of financial obligations to the state according to applicable provisions. The realized fulfilment of financial obligations to the state as of 2025 amounted to Rp86.434 billion.

Kinerja Lingkungan
Environmental Performance

Komitmen dan Kebijakan Dalam Pengelolaan dan Pelestarian Lingkungan

PLN Energi Gas senantiasa memperhatikan dampak lingkungan yang timbul dari kegiatan operasional Perusahaan sebagai bagian dari komitmen dalam menjalankan bisnis yang bertanggung jawab dan berkelanjutan. Oleh karena itu, Perusahaan berupaya menerapkan pengelolaan lingkungan yang baik melalui pemanfaatan sumber daya secara bijaksana serta kepatuhan terhadap seluruh peraturan perundang-undangan dan persyaratan lainnya yang berkaitan dengan aspek lingkungan.

Dalam mendukung komitmen tersebut, PLN Energi Gas telah menetapkan berbagai Standar Operasional Prosedur (SOP) yang mengatur pengelolaan aspek lingkungan dalam kegiatan operasional Perusahaan. SOP tersebut mencakup pengelolaan material B3 dan bahan kimia, pengelolaan limbah B3 dan non-B3, pemantauan kualitas lingkungan, serta pengendalian dampak lingkungan. Seluruh prosedur tersebut disusun dengan mengacu pada ketentuan yang berlaku dan prinsip-prinsip keberlanjutan guna memastikan pengelolaan lingkungan dilakukan secara konsisten dan efektif.

Komitmen PLN Energi Gas terhadap pengelolaan lingkungan juga diwujudkan melalui penerapan Sistem Manajemen Lingkungan yang mengacu pada standar ISO 14001:2015, yang telah diperbarui sertifikasinya pada 27 April 2022. Penerapan standar tersebut menjadi bagian dari upaya Perusahaan dalam meningkatkan kinerja lingkungan serta mendukung keberlanjutan usaha secara berkelanjutan.

Commitment and Policy in Environmental Management and Conservation

PLN Energi Gas consistently considers the environmental impacts arising from the Company's operational activities as part of commitment to performing responsible and sustainable business. Therefore, the Company strives to implement good environmental management through prudent resource utilization and compliance with all laws and regulations as well as other requirements related to environmental aspects.

To support this commitment, PLN Energi Gas has established various Standard Operating Procedures (SOP) governing the management of environmental aspects in operational activities by the Company. These SOPs cover the management of hazardous and toxic materials (B3) and chemicals, management of B3 and non-B3 waste, environmental quality monitoring, and environmental impact control. All procedures are developed based on applicable regulations and sustainability principles to ensure consistent and effective environmental management.

PLN Energi Gas actualizes commitment to environmental management by implementing an Environmental Management System that refers to ISO 14001:2015, with the certification last updated on April 27, 2022. The adoption of this standard is part of the Company's efforts to improve environmental performance and support sustainable business continuity.

Inisiatif Program Pengelolaan Lingkungan Tahun 2025

Sepanjang tahun 2025, PLN Energi Gas telah melaksanakan berbagai upaya pengelolaan dan pemantauan lingkungan sebagai bagian dari komitmen terhadap tata kelola keberlanjutan pada aspek lingkungan. Program dan inisiatif yang dijalankan mencakup pengelolaan limbah B3 dan non-B3, pemantauan kualitas lingkungan, pengendalian dampak lingkungan, pengelolaan emisi, serta pengelolaan penggunaan sumber daya seperti energi, air, dan kertas. Seluruh kegiatan tersebut

Environmental Management Program Initiatives for 2025

Throughout 2025, PLN Energi Gas implemented various environmental management and monitoring efforts as part of the commitment to sustainability governance in the environmental aspect. The programs and initiatives undertaken include management of B3 and non-B3 waste, environmental quality monitoring, environmental impact control, emission management, and management of resource use such as energy, water, and paper. All activities are carried out in accordance with

dilaksanakan dengan mengacu pada ketentuan yang berlaku serta prinsip-prinsip pengelolaan lingkungan yang bertanggung jawab.

Untuk mendukung pelaksanaan program tersebut, Perusahaan mengalokasikan anggaran operasional sebesar Rp 514 juta yang digunakan untuk berbagai kegiatan pengelolaan lingkungan, antara lain pengelolaan limbah B3 melalui pihak ketiga berizin, pemantauan kualitas lingkungan, pelaksanaan inspeksi K3L, pengukuran lingkungan kerja, audit lingkungan, serta kegiatan lainnya yang bertujuan menjaga kepatuhan terhadap regulasi dan meningkatkan kinerja lingkungan Perusahaan secara berkelanjutan.

Pengelolaan Energi

PLN Energi Gas membutuhkan energi listrik sebagai salah satu sumber energi utama dalam mendukung kegiatan operasional Perusahaan. Perusahaan menyadari bahwa sebagian besar pasokan listrik masih berasal dari sumber energi tak terbarukan yang memiliki keterbatasan ketersediaan, sehingga penggunaan energi secara efisien menjadi salah satu upaya penting dalam mendukung keberlanjutan lingkungan. Oleh karena itu, PLN Energi Gas secara konsisten mendorong penerapan budaya hemat energi di lingkungan kerja melalui berbagai inisiatif efisiensi guna mengoptimalkan penggunaan listrik dan mengurangi konsumsi energi yang tidak diperlukan. Adapun berbagai inisiatif efisiensi penggunaan energi yang telah dilakukan antara lain:

- Menggunakan lampu dengan daya yang lebih kecil dibandingkan dengan sebelumnya;
- Menyediakan pencahayaan yang memadai di setiap ruangan sehingga dapat mengurangi penggunaan listrik termasuk saat mendesain gedung);
- Mematikan lampu di area yang tidak digunakan dan pada waktu malam/selesai bekerja dan pada ruangan tidak dipakai;
- Mengatur letak perabot/barang agar tidak menghalangi cahaya lampu dalam ruangan;
- Memilih AC hemat energi dan daya yang sesuai dengan besarnya ruangan;
- Memasang Stiker Hemat Listrik;
- Melakukan pengawasan penggunaan BBM untuk mobil protokoler dan operasional milik Perusahaan; serta

applicable regulations and principles of responsible environmental management.

To support the implementation of this program, the Company allocated operational budget of Rp514 million for various environmental management activities, including B3 waste management through licensed third parties, environmental quality monitoring, K3L inspections, workplace environment measurements, environmental audits, and other activities purposed at maintaining regulatory compliance and continuously improving environmental performance of the Company.

Energy Management

PLN Energi Gas requires electrical energy as one of primary energy sources to support the Company's operational activities. The Company recognizes that most of the electricity supply still comes from non-renewable energy sources with limited availability, making efficient energy use a key effort in supporting environmental sustainability. Therefore, PLN Energi Gas consistently promotes a culture of energy conservation in the workplace through various efficiency initiatives to optimize electricity use and reduce unnecessary energy consumption. The Company already implemented various energy efficiency initiatives, including:

- Using lights with lower wattage than before;
- Providing adequate lighting in every room to reduce electricity usage, including during building design;
- Turning off lights in unused areas, at night/ after work, and in unoccupied rooms;
- Arranging furniture/items so as not to block indoor lighting;
- Choosing energy-efficient air conditioners with capacity appropriate to room size;
- Installing Energy Saving Stickers;
- Monitoring the use of fuel for the Company's protocol and operational vehicles; and

- Melakukan perawatan dan perbaikan kendaraan operasional bekerjasama dengan pihak ketiga/ vendor;
- Melakukan pemantauan dan evaluasi konsumsi energi listrik secara berkala untuk mengidentifikasi peluang peningkatan efisiensi;
- Mendorong penggunaan kendaraan listrik untuk kegiatan operasional perusahaan sebagai upaya pengurangan konsumsi bahan bakar fosil;
- Mendorong penggunaan transportasi umum dan berjalan kaki pada hari tertentu sebagai upaya penghematan energi dan pengurangan emisi.

- Performing maintenance and repair of operational vehicles in collaboration with third parties/vendors;
- Regularly monitoring and evaluating electrical energy consumption to identify opportunities for efficiency improvement;
- Encouraging the use of electric vehicles for company operational activities as an effort to reduce fossil fuel consumption;
- Encouraging the use of public transportation and walking on certain days as an effort to save energy and reduce emissions.

Pengelolaan Penggunaan dan Konservasi Air

PLN Energi Gas berkomitmen untuk menggunakan air secara bijak dan menjaga keberlanjutan sumber daya air melalui penerapan prinsip efisiensi dan konservasi. Sepanjang tahun 2025, Perusahaan melaksanakan berbagai upaya pengelolaan air melalui pendekatan reduce, reuse, and recycle, antara lain dengan memanfaatkan limbah cair hasil pengolahan *Sewage Treatment Plant* (STP) serta air kondensat dari sistem pendingin udara (AC) untuk kebutuhan tertentu. Penggunaan air dalam kegiatan operasional yang bersumber dari air tanah dan PDAM juga dipantau secara berkala guna memastikan pemanfaatannya dilakukan secara efisien, terkendali, dan tidak menimbulkan pemborosan. Melalui berbagai inisiatif tersebut, PLN Energi Gas berupaya mendukung pengelolaan sumber daya air yang berkelanjutan dan bertanggung jawab.

Water Use Management and Conservation

PLN Energi Gas is committed to using water wisely and maintaining the sustainability of water resources through the application of efficiency and conservation principles. Throughout 2025, the Company implemented various water management efforts through reduce, reuse, and recycle approach, including utilizing treated wastewater from the Sewage Treatment Plant (STP) and condensate water from air conditioning (AC) systems for specific needs. Water usage in operational activities sourced from groundwater and PDAM is also periodically monitored to ensure it is used efficiently, controllably, and without waste. Through these initiatives, PLN Energi Gas strives to support sustainable and responsible water resource management.

Pengelolaan Emisi Gas Rumah Kaca dan Emisi Bahan Perusak Ozon

PLN Energi Gas mendukung upaya pemerintah dalam mitigasi emisi Gas Rumah Kaca (GRK) melalui berbagai inisiatif yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi penggunaan energi dan mengurangi dampak lingkungan dari kegiatan operasional Perusahaan. Sepanjang tahun 2025, upaya pengurangan emisi dilakukan antara lain melalui penerapan program efisiensi energi, pengelolaan penggunaan bahan bakar secara bijaksana, serta pelaksanaan kegiatan penghijauan yang berkontribusi terhadap penyerapan emisi karbon.

Management for Greenhouse Gas and Ozone-Depleting Substance Emission

PLN Energi Gas supports the government efforts to mitigate greenhouse gas (GHG) emissions through various initiatives aimed at improving energy efficiency and reducing the environmental impact of operational activities by the Company. Throughout 2025, emission reduction efforts were carried out through, among others, the implementation of energy efficiency programs, prudent fuel usage management, and reforestation activities that contribute to carbon sequestration.

Dalam mendukung kegiatan operasional, PLN Energi Gas menggunakan kendaraan operasional yang memanfaatkan bahan bakar minyak sebagai sumber energi. Mengingat ketersediaan bahan bakar fosil yang terbatas serta dampaknya terhadap lingkungan, Perusahaan terus mendorong penggunaan energi secara efisien melalui pengendalian konsumsi bahan bakar dan penerapan praktik operasional yang lebih ramah lingkungan. Selain itu, Perusahaan menggunakan bahan bakar beroktan tinggi yang memiliki emisi lebih rendah serta melakukan perawatan kendaraan secara berkala untuk memastikan kinerja kendaraan tetap optimal dan emisi gas buang yang dihasilkan tetap sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

In supporting operational activities, PLN Energi Gas uses operational vehicles that rely on petroleum-based fuel as an energy source. Given the limited availability of fossil fuels and their environmental impact, the Company continues to promote efficient energy use by controlling fuel consumption and implementing more environmentally friendly operational practices. Also, the Company uses high-octane fuel with lower emissions and performs regular vehicle maintenance to ensure optimal performance and that exhaust emissions comply with applicable regulations.

Pengelolaan Limbah

Sepanjang tahun 2025, PLN Energi Gas secara konsisten melakukan pengelolaan limbah yang dihasilkan dari kegiatan operasional Perusahaan, baik limbah B3 maupun non-B3, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Limbah B3 dikelola melalui proses pengumpulan, penyimpanan sementara, dan penyerahan kepada pihak ketiga berizin untuk pengangkutan serta pengolahan lebih lanjut. Untuk memastikan pengelolaan limbah dilakukan secara tertib dan terdokumentasi, volume serta jenis limbah yang dihasilkan dicatat dalam *logbook* dan dilaporkan secara berkala kepada instansi terkait.

Selain itu, PLN Energi Gas juga melakukan pengelolaan limbah cair melalui fasilitas pengolahan air limbah yang tersedia guna memastikan kualitas air limbah yang dihasilkan memenuhi baku mutu lingkungan sebelum dilepas ke lingkungan. Pemantauan dan pemeriksaan kualitas air limbah dilakukan secara berkala sebagai bagian dari upaya Perusahaan dalam menjaga kepatuhan terhadap regulasi lingkungan serta meminimalkan dampak operasional terhadap lingkungan sekitar.

Waste Management

Throughout 2025, PLN Energi Gas consistently managed waste generated from the Company's operational activities, both hazardous and non-hazardous, following the applicable laws and regulations. Hazardous waste is managed through collection, temporary storage, and handover to licensed third parties for transportation and further processing. To ensure orderly and documented waste management, the volume and type of waste generated are recorded in a logbook and reported periodically to relevant authorities.

Additionally, PLN Energi Gas also manages wastewater through available wastewater treatment facilities to ensure that the quality of the wastewater produced meets the environmental quality standards before being released into the environment. PLN Energi Gas periodically monitors and inspects the wastewater quality as part of the Company's efforts to maintain compliance with environmental regulations and minimize the operational impact on the surrounding environment.

Pelestarian Keanekaragaman Hayati

Pada tahun 2025, Sebagai bagian dari komitmen terhadap pelestarian lingkungan, PLN Energi Gas berkolaborasi dengan PT PLN Energi Primer Indonesia (PLN EPI) dalam melaksanakan program konservasi mangrove yang bertujuan mendukung pemulihan ekosistem pesisir serta meningkatkan ketahanan lingkungan. Program ini diwujudkan melalui kegiatan penanaman mangrove sebagai upaya rehabilitasi kawasan pesisir yang memiliki peran penting dalam mencegah abrasi, menyerap emisi karbon, menjaga kualitas lingkungan pesisir, serta mendukung keberlangsungan habitat berbagai biota yang hidup di wilayah tersebut. Dalam pelaksanaannya, Perusahaan bersama PLN EPI menanam 1.000 bibit mangrove sebagai langkah awal pemulihan ekosistem pesisir yang selama ini menjadi benteng alami Kota Tarakan. Selain memberikan manfaat ekologis, program konservasi mangrove juga menjadi bagian dari upaya Perusahaan dalam meningkatkan kesadaran akan pentingnya pelestarian lingkungan dan pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan. Program ini bertujuan untuk mengurangi dampak lingkungan akibat aktivitas industri energi sebagai bentuk penerapan prinsip ESG pada aspek lingkungan (*Environmental*), menjaga keseimbangan ekosistem dan mengurangi risiko erosi tanah, serta mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*/SDGs), khususnya SDG 13 (*Climate Action*) dan SDG 15 (*Life on Land*) yang berkaitan dengan aksi iklim dan pelestarian lingkungan.

Biodiversity Conservation

In 2025, as part of the commitment to environmental conservation, PLN Energi Gas collaborated with PT PLN Energi Primer Indonesia (PLN EPI) in mangrove conservation program aimed at supporting coastal ecosystem restoration and enhancing environmental resilience. The Company actualized this program through mangrove planting activities as part of efforts to rehabilitate coastal areas with crucial role in preventing erosion, absorbing carbon emissions, maintaining coastal environmental quality, and supporting the habitats sustainability for various biota living in the region. In its implementation, the Company, together with PLN EPI, planted 1,000 mangrove seedlings as an initial step in restoring coastal ecosystems that have long served as natural defences' for Tarakan City. Apart from providing ecological benefits, mangrove conservation program is also part of the Company's efforts to raise awareness of the importance of environmental conservation and sustainable natural resource management. This program purposes to reduce the environmental impact of energy industry activities as the ESG principles application in the environmental aspect, ecosystem balance maintenance, risk of soil erosion reduction, and support for the achievement of the Sustainable Development Goals (SDGs), particularly SDG 13 (Climate Action) and SDG 15 (Life on Land) related to climate action and environmental preservation.

Mekanisme Penanganan Pengaduan Masalah Lingkungan

PLN Energi Gas menyediakan mekanisme bagi para pemangku kepentingan untuk menyampaikan pengaduan terkait masalah lingkungan yang dapat disampaikan melalui website Perusahaan yaitu https://www.plnenergigas.co.id/contact. Pengaduan juga dapat disampaikan secara langsung kepada Perusahaan untuk selanjutnya ditindaklanjuti secara responsif dan terbuka oleh PLN Energi Gas.

Sepanjang tahun 2025, PLN Energi Gas tidak menerima laporan terkait masalah lingkungan.

Sertifikasi

Perusahaan telah menerapkan Sistem Manajemen Lingkungan ISO 14001:2015 pada tanggal 13 Januari 2021, sertifikasi ini menunjukkan komitmen perusahaan dalam mengidentifikasi, mengelola, dan meminimalkan dampak lingkungan dari setiap kegiatan operasional.

Environmental Complaint Handling Mechanism

PLN Energi Gas provides a mechanism for the stakeholders to submit complaints regarding environmental issues, which can be submitted through the Company's website. Complaints can also be submitted directly to the Company for further responsive and transparent follow-up by PLN Energi Gas.https://www.plnenergigas.co.id/contact

Throughout 2025, PLN Energi Gas received no reports related to environmental issues.

Certification

The Company has implemented the ISO 14001:2015 Environmental Management System since January 13, 2021. This certification demonstrates the Company's commitment to identifying, managing, and minimizing the environmental impact of all operational activities.

Kinerja Sosial
Social Performance

PLN Energi Gas berkomitmen untuk memenuhi tanggung jawab sosial kepada para pemangku kepentingan, khususnya pelanggan, karyawan, dan masyarakat. Komitmen tersebut diwujudkan melalui berbagai program yang bertujuan menciptakan nilai sosial yang berkelanjutan serta memberikan manfaat bagi lingkungan sekitar. Pada aspek pelanggan, Perusahaan berupaya meningkatkan kualitas layanan dan memahami kebutuhan pelanggan melalui pelaksanaan survei kepuasan pelanggan. Pada aspek ketenagakerjaan, PLN Energi Gas mendukung pengembangan sumber daya manusia melalui program pendidikan, pelatihan, pengembangan kompetensi, pemberian kesejahteraan, serta penerapan kesetaraan kesempatan dalam bekerja. Sementara itu, pada aspek kemasyarakatan, Perusahaan melaksanakan berbagai program sosial yang mencakup dukungan terhadap sektor pendidikan, penguatan kapasitas dan pemberdayaan ekonomi masyarakat, bantuan keagamaan, serta bantuan tanggap darurat dan pemulihan pasca bencana. Melalui berbagai program tersebut, PLN Energi Gas berupaya memberikan kontribusi positif bagi pembangunan sosial yang inklusif dan berkelanjutan.

PLN Energi Gas is committed to fulfilling social responsibilities to the stakeholders, especially customers, employees, and the community. The Company actualizes this commitment through various programs aimed at creating sustainable social value and providing benefits to the surrounding environment. In terms of customers, the Company strives to improve service quality and understand customer needs through customer satisfaction surveys. On the employment aspect, PLN Energi Gas supports human resource development through education, training, competency development, welfare provision, and the implementation of equal employment opportunities. Meanwhile, in terms of community, the Company carries out various social programs including support for the education sector, capacity building and community economic empowerment, religious assistance, as well as emergency response and post-disaster recovery assistance. Through these programs, PLN Energi Gas seeks to contribute positively to inclusive and sustainable social development. Through these various programs, PLN Energi Gas seeks to contribute positively to inclusive and sustainable social development.

Kinerja Sosial – Ketenagakerjaan

Social Performance – Employment

Komitmen dan Kebijakan Dalam Pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM)

Bagi PLN Energi Gas, Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan aset penting yang berperan dalam mendukung keberlanjutan dan pencapaian tujuan Perusahaan. Oleh karena itu, PLN Energi Gas berkomitmen untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman, nyaman, inklusif, dan kondusif, serta memberikan kesempatan yang setara bagi seluruh karyawan dalam mengembangkan potensi dan kariernya. Pengelolaan ketenagakerjaan dilaksanakan dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana telah diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, serta berbagai kebijakan dan regulasi lainnya yang relevan. Selain itu, Perusahaan juga menempatkan aspek Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3)

Commitment and Policy in Human Resource (HR) Management

For PLN Energi Gas, Human Resources (HR) is primary asset that supports sustainability and goal achievement of the Company. Therefore, PLN Energi Gas is committed to creating a safe, comfortable, inclusive, and conducive work environment, and providing equal opportunities for all employees to develop their potential and careers. The Company manages employment according to applicable laws and regulations, including Law No. 13 of 2003 on Manpower as amended by Law No. 11 of 2020 on Job Creation, as well as various other relevant policies and regulations. Furthermore, the Company prioritizes Occupational Health and Safety (OHS) as a key priority in operational activities to ensure a safe and healthy work environment for all workers. The Company actualized this commitment through the implementation of OHS systems and programs that

sebagai prioritas utama dalam pelaksanaan kegiatan operasional guna memastikan terciptanya lingkungan kerja yang aman dan sehat bagi seluruh pekerja. Komitmen tersebut diwujudkan melalui penerapan sistem dan program K3 yang mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai bagian dari upaya mendukung produktivitas dan keberlanjutan usaha Perusahaan.

Inisiatif Program Pengelolaan Sumber Daya Manusia Tahun 2025

PLN Energi Gas menempatkan pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) sebagai salah satu aspek penting dalam mendukung keberlanjutan usaha dan peningkatan kinerja Perusahaan. Perusahaan berkomitmen untuk menciptakan lingkungan kerja yang mendukung pengembangan kompetensi, produktivitas, kesejahteraan, serta keselamatan dan kesehatan kerja bagi seluruh karyawan. Upaya tersebut dilakukan melalui berbagai program pengelolaan SDM yang mencakup peningkatan kompetensi melalui pendidikan dan pelatihan, pemberian kesejahteraan dan benefit, penerapan sistem kompensasi yang kompetitif dan berbasis kinerja, pengembangan budaya kerja yang selaras dengan nilai Perusahaan, serta penerapan program Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) guna menciptakan lingkungan kerja yang aman, sehat, dan produktif. Melalui berbagai program tersebut, PLN Energi Gas berupaya membangun sumber daya manusia yang profesional, kompeten, adaptif, dan berdaya saing dalam mendukung pencapaian tujuan Perusahaan secara berkelanjutan. Adapun beberapa program dan kegiatan yang dilaksanakan Perusahaan adalah sebagai berikut:

1. Pendidikan, Pelatihan, dan Pengembangan Kompetensi Karyawan;
2. Penghargaan Produktivitas Karyawan;
3. Pemberian Kesejahteraan;
4. Pengelolaan HSE.

Kesetaraan Dalam Kesempatan Kerja

PLN Energi Gas menerapkan proses rekrutmen yang menjunjung tinggi prinsip transparansi, objektivitas, dan kesetaraan kesempatan bagi seluruh calon pegawai tanpa membedakan suku,

comply with applicable regulatory requirements as part of efforts to support the Company's productivity and business sustainability.

Human Resource Management Program Initiatives for 2025

For PLN Energi Gas, Human Resource (HR) management is priority aspect in supporting business sustainability and improving Company performance. The Company is committed to creating work environment that fosters competency development, productivity, well-being, and occupational safety and health for the entire employees. The Company carries out these efforts through various HR management programs, including competency enhancement through education and training, provision of welfare and benefits, implementation of a competitive and performance-based compensation system, development of a work culture aligned with Company values, and implementation of Occupational Health and Safety (OHS) programs to create a safe, healthy, and productive work environment. Through these programs, PLN Energi Gas strives to build a professional, competent, adaptive, and competitive workforce to support the sustainable achievement of Company goals. The Company organizes the following programs and activities:

1. Employee Education, Training, and Competency Development;
2. Employee Productivity Awards;
3. Provision of Welfare Benefits;
4. HSE Management.

Equal Employment Opportunity

PLN Energi Gas implements a recruitment process that upholds the principles of transparency, objectivity, and equal opportunity for all candidates without distinction of ethnicity, religion, race, gender,

agama, ras, *gender*, maupun latar belakang lainnya. Seluruh proses penerimaan pegawai dilaksanakan berdasarkan kebutuhan Perusahaan serta kompetensi yang dipersyaratkan untuk setiap posisi, sehingga terhindar dari praktik diskriminasi dalam bentuk apa pun. Dalam pelaksanaannya, Perusahaan senantiasa berpedoman pada peraturan ketenagakerjaan yang berlaku serta kebijakan internal yang mendukung penerapan praktik ketenagakerjaan yang adil dan bertanggung jawab.

or other background. The Company applies the entire employee recruitment process following the needs and competencies required for each position, thus avoiding any form of discriminatory practices. In the implementation, the Company always adheres to applicable labor regulations and internal policies that support fair and responsible employment practices.

Pada tahun 2025, PLN Energi Gas memiliki 167 pegawai dengan komposisi pegawai pria sebanyak 139 orang dan pegawai wanita sebanyak 28 orang. Perusahaan terus berupaya menciptakan lingkungan kerja yang profesional dan inklusif dengan memberikan kesempatan yang setara bagi seluruh pegawai untuk berkembang sesuai kompetensi dan kinerjanya.

In 2025, PLN Energi Gas had 167 employees, consisting of 139 male and 28 female employees. The Company keeps striving to create a professional and inclusive work environment by providing equal opportunities for all employees to develop according to their competencies and performance.

Selain itu, PLN Energi Gas berkomitmen untuk menciptakan lingkungan kerja yang inklusif, aman, dan bebas dari segala bentuk diskriminasi. Sepanjang tahun 2025, tidak terdapat laporan maupun pengaduan terkait tindakan diskriminasi berdasarkan ras, warna kulit, jenis kelamin, agama, pandangan politik, asal usul sosial, maupun bentuk diskriminasi lainnya yang melibatkan pemangku kepentingan internal maupun eksternal Perusahaan. Hal tersebut mencerminkan komitmen PLN Energi Gas dalam menerapkan prinsip kesetaraan, keberagaman, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia di lingkungan kerja.

Furthermore, PLN Energi Gas is committed to creating an inclusive, safe, and discrimination-free work environment. Throughout 2025, there were no reports or complaints related to discrimination based on race, skin colour, gender, religion, political views, social origin, or any other form of discrimination involving the Company's internal or external stakeholders. This reflects PLN Energi Gas's commitment to implementing the principles of equality, diversity, and respect for human rights in the workplace.

Pekerja Anak dan Kerja Paksa

PLN Energi Gas berkomitmen untuk menghormati dan melindungi hak asasi manusia dalam seluruh kegiatan operasional Perusahaan, termasuk melalui pencegahan praktik pekerja anak dan kerja paksa. Perusahaan memastikan tidak mempekerjakan anak maupun melakukan praktik kerja paksa dalam bentuk apa pun, sejalan dengan prinsip ketenagakerjaan yang bertanggung jawab dan berkelanjutan.

Child Labor and Forced Labor

PLN Energi Gas is committed to respecting and protecting human rights in all of the Company's operational activities, including through the prevention of child labor and forced labor practices. The Company ensures to not employ children or engage in any form of forced labor, in line with responsible and sustainable employment principles.

Dalam pelaksanaannya, PLN Energi Gas menerapkan kebijakan ketenagakerjaan yang mengatur usia minimum karyawan sebesar 18 tahun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, Perusahaan menerapkan jam kerja normal selama 8 jam per hari serta memberikan

In the implementation, PLN Energi Gas applies the employment policy that sets a minimum employee age of 18 years, based on applicable laws and regulations. Furthermore, the Company enforces a normal working hours of 8 hours per day and provides compensation for overtime work

kompensasi atas pekerjaan lembur sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Perusahaan. Seluruh hubungan kerja dilaksanakan atas dasar kesukarelaan tanpa adanya unsur paksaan, intimidasi, maupun pembatasan kebebasan pekerja.

Kebijakan tersebut mendukung kepatuhan Perusahaan terhadap regulasi ketenagakerjaan dan hak asasi manusia di Indonesia, termasuk ketentuan yang mengacu pada konvensi *International Labour Organization* (ILO) terkait usia minimum bekerja, penghapusan pekerja anak, dan penghapusan kerja paksa. Sepanjang tahun 2025, tidak ditemukan kasus pekerja anak maupun praktik kerja paksa di lingkungan PLN Energi Gas. Hal ini mencerminkan komitmen Perusahaan dalam menciptakan lingkungan kerja yang aman, adil, dan menghormati hak-hak dasar setiap pekerja.

Kesetaraan Dalam Pengembangan Kompetensi

PLN Energi Gas berkomitmen untuk terus meningkatkan kompetensi dan kapabilitas sumber daya manusia sebagai bagian dari upaya mendukung produktivitas, profesionalisme, dan keberlanjutan usaha Perusahaan. Pengembangan kompetensi dilakukan secara berkelanjutan melalui berbagai program pendidikan, pelatihan, *workshop*, sertifikasi, serta kegiatan pengembangan keterampilan lainnya yang disesuaikan dengan kebutuhan organisasi dan pengembangan karier pegawai. Program tersebut mencakup peningkatan kompetensi di bidang teknis, manajerial, maupun *soft skills* guna mendukung kemampuan pegawai dalam menghadapi dinamika industri dan tantangan bisnis yang terus berkembang. Melalui berbagai inisiatif tersebut, PLN Energi Gas berupaya membangun SDM yang unggul, adaptif, dan mampu memberikan kontribusi optimal terhadap pencapaian tujuan Perusahaan. Informasi lebih lanjut mengenai pengembangan kompetensi SDM dapat dilihat pada Sub Bab Tinjauan Pendukung Bisnis bagian SDM dalam Laporan Tahunan ini.

Remunerasi dan Kesejahteraan Pegawai

PLN Energi Gas berkomitmen untuk memberikan remunerasi dan fasilitas kesejahteraan yang kompetitif, adil, dan selaras dengan kontribusi

in accordance with the provisions stipulated in the Company Regulations. All employment relationships are entered into voluntarily, without any element of coercion, intimidation, or restriction of workers' freedom.

This policy supports the Company's compliance with labor and human rights regulations in Indonesia, including provisions that refer to International Labour Organization (ILO) conventions regarding minimum working age, elimination of child labor, and elimination of forced labor. Throughout 2025, no cases of child labor or forced labor practices were found within PLN Energi Gas. This reflects the Company's commitment to creating a safe, fair work environment that respects the fundamental rights of every worker.

Equality in Competency Development

PLN Energi Gas is committed to continuously improving the human resources competence and capability as part of its efforts to support the Company's productivity, professionalism, and business sustainability. The Company conducts competency development on an ongoing basis through various education, training, workshop, certification, and other skill development programs tailored to organizational needs and employee career development. These programs cover competency enhancement in technical, managerial, and soft skills areas to support employees' ability to navigate industry dynamics and evolving business challenges. Through these initiatives, PLN Energi Gas strives to build superior, adaptive human resources capable of making optimal contributions to the achievement of Company goals. Further information on human resource competency development can be found in the Business Support Review subsection on HR in this Annual Report.

Employee Remuneration and Welfare

PLN Energi Gas is committed to providing competitive, fair remuneration and welfare benefits that align with each employees contributions and

serta tanggung jawab setiap pegawai. Pemberian remunerasi dilakukan berdasarkan klasifikasi jabatan, pengalaman kerja, kompetensi, tanggung jawab pekerjaan, dan pencapaian kinerja individu tanpa membedakan jenis kelamin. Sebagai bentuk penerapan prinsip kesetaraan, rasio remunerasi antara pegawai wanita dan pria pada level jabatan yang sama adalah 1:1, sehingga seluruh pegawai memperoleh kesempatan dan perlakuan yang setara sesuai dengan peran dan tanggung jawabnya.

Remunerasi yang diberikan kepada pegawai mencakup gaji pokok, tunjangan operasional, tunjangan kesehatan, hak cuti, program kesejahteraan, serta berbagai manfaat lainnya sesuai dengan kebijakan Perusahaan. Penetapan remunerasi dan tunjangan dilakukan dengan mempertimbangkan kinerja pegawai, kinerja Perusahaan, serta tetap mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk standar upah minimum yang ditetapkan pemerintah.

Selain itu, PLN Energi Gas juga memberikan perlindungan dan jaminan sosial ketenagakerjaan sebagai bentuk kepedulian terhadap kesejahteraan pegawai, baik selama masa kerja maupun setelah memasuki masa purnabakti. Seluruh pegawai diikutsertakan dalam program BPJS Ketenagakerjaan yang mencakup Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, Jaminan Hari Tua, dan Jaminan Pensiun sebagai bagian dari komitmen Perusahaan dalam memberikan perlindungan serta jaminan masa depan bagi seluruh pegawai.

Pengelolaan Dana Pensiun

PLN Energi Gas berkomitmen untuk mendukung kesiapan finansial pegawai setelah memasuki masa purnabakti melalui penyelenggaraan program dana pensiun yang dikelola secara aman, transparan, dan berkelanjutan. Perusahaan meyakini bahwa kesejahteraan pegawai tidak hanya menjadi perhatian selama masa kerja, tetapi juga perlu dijaga setelah pegawai memasuki masa pensiun. Oleh karena itu, pengelolaan dana pensiun dilakukan dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian, kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku, serta pengelolaan investasi yang optimal guna menjaga keberlanjutan manfaat pensiun bagi peserta.

responsibilities. Remuneration is determined based on job classification, work experience, competencies, job responsibilities, and individual performance achievements without discrimination based on gender. As the implementation of the principle of equality, the remuneration ratio between male and female employees at the same job level is 1:1, ensuring that all employees receive equal opportunities and treatment following their roles and responsibilities.

Remuneration provided to employees includes base salary, operational allowances, health benefits, leave entitlements, welfare programs, and various other benefits in accordance with Company policy. The Company determines remuneration and allowances by considering employee performance, Company performance, and remains in compliance with applicable laws and regulations, including the minimum wage standards set by the government.

Moreover, PLN Energi Gas also provides employment social security and protection as a form of concern for employee welfare, both during their employment and after entering retirement. All employees are enrolled in the Employment BPJS program, which includes Work Accident Insurance, Death Insurance, Old Age Savings, and Pension Insurance, as part of the Company's commitment to providing protection and future security for all employees.

Pension Fund Management

PLN Energi Gas is committed to supporting employees financial readiness after retirement through a pension fund program that is managed safely, transparently, and sustainably. The Company believes that employee welfare is not only a concern during employment but must also be maintained after they retire. Therefore, pension fund management is carried out with due regard to the principles of prudence, compliance with applicable regulations, and optimal investment management to maintain the sustainability of pension benefits for participants.

Dalam pelaksanaannya, PLN Energi Gas mengikutsertakan pegawai dalam dua skema program pensiun, yaitu Dana Pensiun PT PLN (Persero) dan Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK). Kontribusi Perusahaan dalam bentuk Iuran Pemberi Kerja (IPK) ditetapkan sebesar 19.14% untuk peserta Dana Pensiun PT PLN (Persero) dan 4% untuk peserta DPLK. Sementara itu, pegawai turut berkontribusi melalui iuran sebesar 6% dari P1 (*Pay for Person*), sehingga total iuran pensiun mencapai 25,14% bagi peserta Dana Pensiun PT PLN (Persero) dan 10% bagi peserta DPLK.

Melalui program tersebut, PLN Energi Gas berupaya memastikan tersedianya perlindungan finansial jangka panjang bagi pegawai sekaligus mendukung terciptanya kesejahteraan yang berkelanjutan bagi seluruh insan Perusahaan.

In its implementation, PLN Energi Gas enrolls employees in two pension scheme programs: the PT PLN (Persero) Pension Fund and the Financial Institution Pension Fund (DPLK). The Company's contribution in the form of Employer Contributions (IPK) is set at 19.14% for PT PLN (Persero) Pension Fund participants and 4% for DPLK participants. Meanwhile, employees contribute through contributions of 6% of P1 (Pay for Person), so that total pension contributions reach 25.14% for PT PLN (Persero) Pension Fund participants and 10% for DPLK participants.

Through this program, PLN Energi Gas strives to ensure the availability of long-term financial protection for employees while also supporting the creation of sustainable welfare for all Company personnel.

Program Membangunan Budaya HSE

PLN Energi Gas menempatkan aspek Kesehatan, Keselamatan Kerja, dan Lingkungan (K3L) sebagai bagian penting dalam mendukung keberlanjutan operasional Perusahaan. Sepanjang tahun 2025, berbagai program dan inisiatif K3L telah dilaksanakan secara konsisten guna menciptakan lingkungan kerja yang aman, sehat, dan produktif bagi seluruh pekerja. Kegiatan yang dilaksanakan antara lain meliputi pelaksanaan Bulan K3 Nasional, simulasi tanggap darurat, inspeksi fasilitas operasional dan perkantoran, serta pelaksanaan rapat dan evaluasi kinerja K3 secara berkala untuk memastikan efektivitas penerapan sistem keselamatan kerja di seluruh unit kerja.

Dalam mendukung implementasi Sistem Manajemen K3, Perusahaan juga melakukan penguatan tata kelola keselamatan melalui penyusunan dan peninjauan kebijakan serta prosedur K3L, tindak lanjut hasil audit, pelaksanaan *self-assessment*, inspeksi keselamatan migas, serta penerapan *Contractor Safety Management System* (CSMS) bagi mitra kerja dan vendor. Berbagai upaya tersebut dilakukan untuk memastikan kepatuhan terhadap standar keselamatan yang berlaku sekaligus meningkatkan pengendalian risiko dalam kegiatan operasional.

HSE Culture Development Program

PLN Energi Gas places Health, Safety, and Environment (HSE) as a key aspect in supporting the Company's operational sustainability. Throughout 2025, the Company consistently applied various HSE programs and initiatives to create a safe, healthy, and productive work environment for all employees, including National HSE Month, emergency response, inspections of operational and office facilities, as well as regular HSE performance meetings and evaluations to ensure the effectiveness of the safety management system across all work units.

In supporting the implementation of the HSE Management System, the Company also strengthens safety governance through the development and review of HSE policies and procedures, follow-up on audit results, self-assessments, oil and gas safety inspections, and the implementation of the Contractor Safety Management System (CSMS) for partners and vendors. The Company undertakes these efforts in order to ensure compliance with applicable safety standards while improving risk control in operational activities.

Selain itu, PLN Energi Gas secara berkelanjutan melaksanakan program pencegahan penyakit akibat kerja melalui *Medical Check Up* (MCU), pemantauan lingkungan kerja, serta berbagai kegiatan edukasi, pelatihan, dan sertifikasi di bidang K3 guna meningkatkan kompetensi dan kesadaran keselamatan seluruh pekerja. Melalui penerapan program K3L yang terintegrasi, Perusahaan berupaya mencegah terjadinya kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja, meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi, serta mendukung keberlangsungan operasional dan pertumbuhan usaha yang berkelanjutan.

HSE Meeting

PLN Energi Gas secara rutin menyelenggarakan HSE Meeting sebagai forum koordinasi dan evaluasi dalam lingkup manajemen yang membahas kinerja, temuan, serta berbagai isu terkait aspek *Health, Safety, and Environment* (HSE). HSE *Meeting* dilaksanakan secara berkala setiap bulan dengan melibatkan unit-unit kerja di lingkungan PLN Energi Gas guna memastikan efektivitas penerapan program dan kebijakan HSE di seluruh area operasional. Selain menjadi sarana pemantauan kinerja HSE, forum ini juga berfungsi sebagai media *knowledge sharing* dan *knowledge update* terkait perkembangan pengelolaan HSE, sehingga dapat meningkatkan pemahaman, kesadaran, dan budaya keselamatan kerja di lingkungan Perusahaan secara berkelanjutan.

Kecelakaan Kerja

Komitmen terhadap keselamatan kerja merupakan salah satu prioritas utama dalam penerapan *Health, Safety, and Environment* (HSE) di PLN Energi Gas. Sepanjang tahun 2025, Perusahaan berhasil mempertahankan capaian KPI Nihil Kecelakaan dengan nilai 0 (nol), yang menunjukkan tidak terjadinya kecelakaan kerja selama periode pelaporan. Capaian tersebut mencerminkan efektivitas penerapan budaya keselamatan kerja serta komitmen seluruh insan Perusahaan dalam menjalankan aktivitas operasional secara aman dan sesuai prosedur. Untuk mendukung pencapaian tersebut, PLN Energi Gas secara konsisten menerapkan Sistem Manajemen K3, meningkatkan kesadaran dan budaya keselamatan kerja melalui berbagai program edukasi

Furthermore, PLN Energi Gas continuously implements occupational disease prevention programs through Medical Check-Ups (MCU), workplace environment monitoring, and various HSE education, training, and certification activities to enhance the competence and safety awareness of all employees. Through the implementation of an integrated HSE program, the Company strives to prevent workplace accidents and occupational diseases, improve regulatory compliance, and support sustainable operational continuity and business growth.

HSE Meeting

PLN Energi Gas regularly holds HSE Meetings as coordination and evaluation forum within management to discuss performance, findings, and various issues related to Health, Safety, and Environment (HSE). The Company organizes HSE Meetings monthly involving work units within PLN Energi Gas to ensure the effectiveness of HSE programs and policies across all operational areas. More than monitoring HSE performance, this forum also serves as a platform for knowledge sharing and knowledge updates on HSE management developments, thereby continuously improving understanding, awareness, and safety culture within the Company.

Work Accidents

Commitment to work safety is one of the main priorities in the implementation of Health, Safety, and Environment (HSE) at PLN Energi Gas. Throughout 2025, the Company successfully maintained Zero Accident KPI achievement with a value of 0 (zero), indicating no work accidents occurred during the reporting period. This achievement reflects the effectiveness of the work safety culture and the commitment by the entire Company personnel in carrying out operational activities safely and in accordance with procedures. To support this achievement, PLN Energi Gas consistently implements the HSE Management System, enhances work safety awareness and culture through various educational and socialization programs,

dan sosialisasi, serta melaksanakan monitoring dan evaluasi secara berkala guna memastikan efektivitas penerapan aspek K3 di seluruh kegiatan operasional Perusahaan.

Penanganan Pengaduan Pegawai

PLN Energi Gas berkomitmen untuk menciptakan lingkungan kerja yang kondusif, harmonis, dan terbuka dengan memberikan ruang bagi karyawan untuk menyampaikan aspirasi, masukan, maupun pengaduan terkait permasalahan yang dihadapi, baik yang berkaitan dengan pekerjaan maupun aspek lainnya di lingkungan kerja. Sebagai bentuk implementasi komitmen tersebut, Perusahaan menyediakan mekanisme pengaduan yang dapat diakses oleh seluruh karyawan melalui *Whistleblowing System* (WBS) sebagai sarana pelaporan yang aman, transparan, dan menjaga kerahasiaan pelapor.

Melalui mekanisme tersebut, setiap laporan yang diterima akan ditindaklanjuti sesuai dengan prosedur yang berlaku guna memastikan terciptanya lingkungan kerja yang menjunjung tinggi integritas, etika, dan prinsip tata kelola perusahaan yang baik. Sepanjang tahun 2025, tidak terdapat pengaduan yang diterima oleh PLN Energi Gas terkait pelanggaran kode etik karyawan, yang menunjukkan komitmen seluruh insan Perusahaan dalam menerapkan nilai-nilai etika dan profesionalisme dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya.

Sertifikasi K3

PLN Energi Gas berkomitmen untuk menerapkan Sistem Manajemen Terpadu (SMT) sebagai bagian dari upaya meningkatkan kinerja, keselamatan kerja, dan keberlanjutan operasional Perusahaan. Proses sertifikasi sistem manajemen dimulai pada tahun 2019 dan terus dikembangkan secara berkelanjutan. Pada tahun 2020, PLN Energi Gas memperoleh sertifikat Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) berdasarkan PP Nomor 50 Tahun 2012 yang diterbitkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan. Selanjutnya, pada tahun 2022 Perusahaan mengintegrasikan berbagai sistem manajemen yang diterapkan dan memperoleh sertifikat SMK3 yang diterbitkan oleh TUV Nord Indonesia pada 27 April 2022.

and conducts regular monitoring and evaluation to ensure the effectiveness of HSE aspects in all operational activities of the Company.

Employee Complaint Handling

PLN Energi Gas is committed to creating a conducive, harmonious, and open work environment by providing space for employees to voice their aspirations, input, and complaints regarding issues they face, whether related to work or other aspects of the workplace. As part of implementing this commitment, the Company provides a complaint mechanism accessible to all employees through the Whistleblowing System (WBS) as a safe, transparent, and confidential reporting channel.

Through this mechanism, every report received will be followed up according to applicable procedures to ensure the creation of a work environment that upholds integrity, ethics, and good corporate governance principles. Throughout 2025, no complaints were received by PLN Energi Gas regarding violations of the employees code of conducts, demonstrating the commitment of all Company personnel to applying ethical values and professionalism in performing duties and responsibilities.

OHS Certification

PLN Energi Gas is committed to implementing an Integrated Management System as part of the efforts to improve performance, occupational safety, and operational sustainability. Management system certification process began in 2019 and has been continuously developed. In 2020, PLN Energi Gas obtained the Occupational Safety and Health Management System (OHSMS) certificate based on Government Regulation No. 50 of 2012 issued by the Ministry of Manpower. Subsequently, in 2022, the Company integrated the various management systems in place and obtained the OHSMS certificate issued by TUV Nord Indonesia on April 27, 2022.

Untuk memastikan efektivitas penerapan Sistem Manajemen Terpadu, PLN Energi Gas secara konsisten melaksanakan *surveillance* atau audit pengawasan secara berkala setiap tahun yang dilakukan oleh auditor eksternal. Kegiatan tersebut bertujuan untuk memastikan kesesuaian implementasi sistem manajemen dengan standar yang berlaku, mendorong perbaikan berkelanjutan, serta menjaga validitas sertifikasi hingga pelaksanaan sertifikasi ulang (*recertification*) pada tahun 2025. Melalui penerapan dan pengawasan yang berkelanjutan, PLN Energi Gas terus berupaya memperkuat budaya keselamatan, kepatuhan, dan keunggulan operasional di seluruh kegiatan usaha Perusahaan.

In order to ensure the effectiveness of the Integrated Management System implementation, PLN Energi Gas consistently carries out periodic surveillance audits by external auditors. These activities purpose to ensure the conformity of management system implementation with applicable standards, encourage continuous improvement, and maintain certification validity until the recertification in 2025. Through ongoing implementation and monitoring, PLN Energi Gas continues to strengthen the culture of safety, compliance, and operational excellence across all Company business activities.

Kinerja Sosial – Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat
Social Performance – Community Development and Empowerment

Komitmen dan Kebijakan Dalam Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat

PLN Energi Gas berkomitmen untuk mendukung pembangunan sosial yang berkelanjutan melalui pelaksanaan program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) yang dilaksanakan secara terencana, terukur, dan berkesinambungan. Pelaksanaan program TJSL berpedoman pada kebijakan Perusahaan yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Direksi, dengan pengelolaan program berada di bawah koordinasi Fungsi Sekretaris Perusahaan serta dilakukan evaluasi secara berkala oleh Direktur Utama.

Melalui program TJSL, PLN Energi Gas berupaya memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat sekaligus mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan. Berbagai program yang dijalankan difokuskan pada bidang pendidikan, pemberdayaan ekonomi masyarakat, kesehatan, lingkungan, sosial, budaya, serta pengembangan sarana dan prasarana yang mendukung peningkatan kualitas hidup masyarakat di sekitar wilayah operasional Perusahaan.

Commitment and Policy in Community Development and Empowerment

PLN Energi Gas is committed to supporting sustainable social development through the implementation of Social and Environmental Responsibility (CSER) programs that are planned, measurable, and continuous. The Company applies CSER programs with guidelines by the Company policies established through the Board of Directors' Decree, with program management under the coordination of the Corporate Secretary Function and periodic evaluation by the President Director.

Through the CSER program, PLN Energi Gas strives to provide tangible benefits to the community while supporting the achievement of sustainable development goals. The various programs implemented focus on education, economic empowerment of communities, health, environment, social affairs, culture, and the development of facilities and infrastructure that support improving the quality of life of communities around the Company's operational areas.

Inisiatif Program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2025

Sepanjang tahun 2025, realisasi penyaluran dana yang dikeluarkan PLN Energi Gas untuk membiayai program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat mencapai Rp1,33 Milyar. Realisasi kegiatan yang dilaksanakan meliputi bidang pendidikan, sosial, kerohanian, kesehatan, olahraga, bencana alam dan lingkungan hidup.

Berikut ini ringkasan program unggulan TJSL yang telah dilaksanakan PLN Energi Gas sepanjang tahun 2025:

1. Program Bantuan Sarana Prasarana MTQ dan Sumur Bor sebagai bentuk dukungan terhadap pembangunan sosial dan peningkatan kualitas hidup masyarakat, PLN Energi Gas melaksanakan program bantuan sarana prasarana kegiatan

Community Development and Empowerment Program Initiative for 2025

Throughout 2025, PLN Energi Gas released actual disbursement of funds to finance community development and empowerment programs reached Rp1.33 billion. These implemented activities covered the sectors of education, social affairs, spirituality, health, sports, natural disasters, and the environment.

The following is summary of the flagship CSER programs implemented by PLN Energi Gas throughout 2025:

1. MTQ Facilities and Borehole Assistance Program
As support for social development and improving the quality of life of the community, PLN Energi Gas organized program to provide facilities for the Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ) activities

Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ) serta pembangunan fasilitas air bersih melalui sumur bor di Desa Balai Pungut, Riau. Program TJSL ini dilaksanakan bekerja sama dengan Koramil 03/Mandau sebagai wujud kolaborasi dalam mendukung kebutuhan masyarakat di sekitar wilayah operasional Perusahaan. Program ini berfokus pada peningkatan fasilitas kegiatan sosial dan keagamaan masyarakat melalui dukungan sarana MTQ (ESG – *Social*), peningkatan akses masyarakat terhadap sumber air bersih yang layak melalui pembangunan sumur bor, serta mendukung pencapaian SDG 6 (*Clean Water and Sanitation*) terkait akses air bersih dan sanitasi yang layak serta SDG 11 (*Sustainable Cities and Communities*) melalui peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

and the construction of clean water facilities through boreholes in Balai Pungut Village, Riau. This CSER program was carried out in collaboration with Koramil 03/Mandau as a form of collaboration in supporting the needs of the community around the Company's operational area. The program focuses on improving community social and religious activity facilities through support for MTQ infrastructure (ESG – Social), increasing community access to adequate clean water sources through borehole construction, and supporting the achievement of SDG 6 (Clean Water and Sanitation) regarding access to clean water and adequate sanitation, as well as SDG 11 (Sustainable Cities and Communities) through sustainable improvement of community quality of life and welfare.

2. Program Bantuan Sarana Prasarana Posyandu
Sebagai bentuk dukungan terhadap peningkatan kualitas kesehatan masyarakat, PLN Energi Gas melaksanakan Program Bantuan Sarana Prasarana Posyandu di Desa Balai Pungut, Riau. Program ini bertujuan untuk mendukung penyediaan fasilitas dan sarana pendukung layanan kesehatan masyarakat, khususnya bagi ibu, bayi, dan balita, sehingga kegiatan Posyandu dapat berjalan lebih optimal. Melalui program ini, PLN Energi Gas berupaya meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan kesehatan dasar, mendukung upaya pencegahan dan pemantauan kesehatan sejak dini, serta mendorong terciptanya masyarakat yang lebih sehat dan sejahtera. Program tersebut sejalan dengan penerapan aspek ESG pada pilar sosial (*Social*) serta mendukung pencapaian SDG 3 (*Good Health and Well-being*) melalui peningkatan kualitas layanan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

2. Integrated Health Post (Posyandu) Facilities and Infrastructure Assistance Program
As a form of support for improving the quality of community health, PLN Energi Gas delivered Posyandu Facilities and Infrastructure Assistance Program in Balai Pungut Village, Riau. This program purposed to support the provision of facilities and supporting infrastructure for public health services, especially for mothers, infants, and toddlers, so that Posyandu activities can run more optimally. Through this program, PLN Energi Gas seeks to increase community access to basic health services, support early prevention and health monitoring efforts, and encourage the creation of a healthier and more prosperous society. The program aligns with the implementation of ESG aspects on the social pillar (Social) and supports the achievement of SDG 3 (Good Health and Well-being) through sustainable improvement of health service quality and community welfare.

3. Program Bantuan Hari Raya Keagamaan
Sebagai bentuk kepedulian terhadap masyarakat serta dukungan terhadap kegiatan sosial dan keagamaan, PLN Energi Gas melaksanakan program penyerahan hewan kurban Idul Adha kepada masyarakat di sekitar wilayah operasional Perusahaan melalui Masjid Agung Jeneponto, Sulawesi Selatan. Program TJSL ini bertujuan untuk mempererat hubungan antara

3. Religious Holiday Assistance Program
As PLN Energi Gas' concern for the community and support for social and religious activities, there was a program to distribute Eid al-Adha sacrificial animals to communities around the Company's operational area through the Great Mosque of Jeneponto, South Sulawesi. This CSER program aims to strengthen the relationship between the Company and the community,

Perusahaan dan masyarakat, meningkatkan nilai-nilai kepedulian sosial, kebersamaan, serta memperkuat semangat berbagi kepada masyarakat yang membutuhkan. Melalui kegiatan tersebut, PLN Energi Gas berupaya memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat sekaligus mendukung penerapan aspek ESG pada pilar sosial (*Social*). Program ini juga sejalan dengan pencapaian SDG 2 (*Zero Hunger*) melalui distribusi pangan kepada masyarakat serta SDG 11 *(Sustainable Cities and Communities*) melalui penguatan solidaritas dan kesejahteraan sosial di lingkungan sekitar wilayah operasional Perusahaan.

enhance values of social care, togetherness, and strengthen the spirit of sharing with those in need. Through this activity, PLN Energi Gas seeks to provide tangible benefits to the community while supporting the implementation of ESG aspects on the social pillar (Social). This program also aligns with the achievement of SDG 2 (Zero Hunger) through food distribution to the community, as well as SDG 11 (Sustainable Cities and Communities) through strengthening solidarity and social welfare in the environment around the Company's operational area.

4. Program Saji Farm, sebagai bentuk dukungan terhadap pemberdayaan ekonomi masyarakat, PLN Energi Gas berkolaborasi dengan PLN Nusantara Power melaksanakan program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) SAJI FARM (Sapi dan Jagat Hijau Farm) bagi kelompok peternak sapi di Desa Balai Pungut, Riau. Program ini diwujudkan melalui bantuan pembangunan sarana kandang sapi serta pelatihan pengembangan pakan ternak berbasis potensi lokal guna meningkatkan produktivitas usaha peternakan dan memperkuat kemandirian ekonomi masyarakat. Selain mendukung peningkatan kapasitas dan kesejahteraan peternak, program ini juga mendorong pemanfaatan sumber daya lokal secara berkelanjutan serta memperkuat kolaborasi antara perusahaan, akademisi, dan masyarakat. Program SAJI FARM sejalan dengan penerapan aspek ESG pada pilar sosial (*Social*) dan mendukung pencapaian SDG 8 (*Decent Work and Economic Growth*) melalui peningkatan produktivitas dan peluang ekonomi masyarakat, serta SDG 12 (*Responsible Consumption and Production*) melalui pemanfaatan sumber daya lokal yang lebih efisien dan berkelanjutan.

4. Saji Farm Program, PLN Energi Gas supported the community economic empowerment throught the collaboration with PLN Nusantara Power to organize the SAJI FARM (Cattle and Green Earth Farm) Social and Environmental Responsibility (CSER) program for cattle farmer groups in Balai Pungut Village, Riau. The Company actualized this program through assistance in building cattle sheds and training on the development of livestock feed based on local potential to increase livestock business productivity and strengthen community economic independence. In addition to supporting capacity building and welfare for farmers, this program also encourages the sustainable use of local resources and strengthens collaboration between companies, academia, and the community. The SAJI FARM program aligns with the implementation of ESG aspects in the social pillar and supports the achievement of SDG 8 (Decent Work and Economic Growth) through increased productivity and economic opportunities for the community, as well as SDG 12 (Responsible Consumption and Production) through more efficient and sustainable use of local resources

5. Program Bugar Rama, sebagai bentuk dukungan terhadap peningkatan kemandirian ekonomi masyarakat desa berbasis potensi lokal, pada November 2025, PT PLN Energi Gas bersama PLN Nusantara Power ULPLTG/MG Duri melaksanakan program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) BUGAR RAMA (Budidaya Gurame – Rakyat Maju) yang berlokasi di Desa Balai Pungut, Kecamatan Bengkalis, Riau. Program ini juga

5. Bugar Rama Program, in November 2025, PT PLN Energi Gas together with PLN Nusantara Power ULPLTG/MG Duri supported the increasing of economic independence of village communities based on local potential, through the implementation of BUGAR RAMA (Gourami Cultivation - People's Progress) Social and Environmental Responsibility (CSER) program located in Balai Pungut Village, Bengkalis District,

merupakan wujud sinergi antar unit PLN dalam memperkuat pemberdayaan ekonomi masyarakat di sektor perikanan air tawar. Program ini berfokus pada: pengembangan usaha budidaya ikan gurame dan ikan air tawar sebagai sumber ekonomi berkelanjutan masyarakat desa (ESG - *Social*); peningkatan kapasitas dan keterampilan masyarakat melalui pelatihan teknis budidaya serta pembuatan pakan ikan mandiri yang didampingi oleh tenaga ahli dari Institut Pertanian Bogor (IPB); serta mendukung SDG 1 (*No Poverty*) melalui peningkatan pendapatan masyarakat, SDG 8 (*Decent Work and Economic Growth*) dengan penciptaan peluang usaha produktif berbasis potensi lokal, dan penguatan ketahanan ekonomi desa melalui pengembangan usaha perikanan yang mandiri dan berkelanjutan.

Riau. This program was also a manifestation of synergy among PLN units in strengthening community economic empowerment in the freshwater fisheries sector. The program focuses on: developing gourami and freshwater fish farming businesses as a sustainable economic source for village communities (ESG - Social); increasing community capacity and skills through technical training on cultivation and making independent fish feed, assisted by experts from Bogor Agricultural University (IPB); and supporting SDG 1 (No Poverty) through increasing community income, SDG 8 (Decent Work and Economic Growth) through the creation of productive business opportunities based on local potential, and strengthening village economic resilience through the development of independent and sustainable fisheries businesses.

6. Mangrove untuk kehidupan Kota Tarakan, PLN Energi Gas dan PLN Energi Primer Indonesia bersama masyarakat melakukan penanaman sebanyak 1.000 bibit mangrove di kawasan pesisir Tarakan. Kegiatan ini bertujuan untuk mendukung rehabilitasi ekosistem mangrove yang memiliki peran penting dalam mencegah abrasi, menyerap karbon, serta menjaga keberlangsungan keanekaragaman hayati di wilayah pesisir.

6. Mangroves for the life of Tarakan City, PLN Energi Gas and PLN Energi Primer Indonesia, together with the community, planted 1,000 mangrove seedlings in the coastal area of Tarakan.This activity aims to support the rehabilitation of mangrove ecosystems, which play a crucial role in preventing coastal erosion, sequestering carbon, and maintaining biodiversity in coastal areas.

7. Program TPS 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*), Penguatan pengelolaan lingkungan berbasis masyarakat melalui program TPS 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*) dan Urban Farming. Dalam kegiatan tersebut, insan PLN Energi Gas dan PLN Energi Primer Indonesia bersama masyarakat melakukan pembersihan kawasan hutan mangrove di sekitar TPS, mengumpulkan sampah yang kemudian ditimbang untuk diolah menjadi produk yang memiliki nilai tambah dan manfaat ekonomi.

7. The TPS 3R (Reduce, Reuse, Recycle) Program, Strengthens community based environmental management through TPS 3R initiatives and urban farming. As part of this activity, personnel from PLN Energi Gas and PLN Energi Primer Indonesia collaborated with the local community to clean up the mangrove forest area near the TPS facility; they collected waste, which was then weighed and processed into products offering added value and economic benefits.

Pelaksanaan program ini bertujuan untuk:

1. Mendorong penerapan prinsip ekonomi sirkular melalui pengelolaan sampah yang berkelanjutan.
2. Meningkatkan ketahanan pangan masyarakat melalui pengembangan kegiatan urban farming.
3. Menciptakan peluang ekonomi baru bagi masyarakat melalui pemanfaatan dan pengolahan limbah.
4. Mendukung pemulihan dan pelestarian ekosistem pesisir melalui kegiatan rehabilitasi mangrove.
5. Memperkuat sinergi antara perusahaan, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.

Pelaksanaan program ini juga mendukung pencapaian beberapa target *Sustainable Development Goals* (SDGs), antara lain:

1. SDG 12 – *Responsible Consumption* and Production, melalui penerapan prinsip ekonomi sirkular, pengurangan timbulan sampah, serta peningkatan kegiatan daur ulang.
2. SDG 14 – *Life Below Water*, melalui rehabilitasi kawasan mangrove dan perlindungan ekosistem pesisir.
3. SDG 13 – C*limate Actio*n, melalui upaya mitigasi perubahan iklim dan peningkatan ketahanan lingkungan.

The implementation of this program aims to:

1. Encourage the adoption of circular economy principles through sustainable waste management.
2. Enhance community food security by developing urban agriculture activities.
3. Create new economic opportunities for the community through waste utilization and processing.
4. Support the restoration and conservation of coastal ecosystems through mangrove rehabilitation activities.
5. Strengthen synergy among companies, local governments, and the community to achieve sustainable development.

The implementation of this program also supports the achievement of several Sustainable Development Goals (SDGs), including:

1. SDG 12 – Responsible Consumption and Production, through the application of circular economy principles, the reduction of waste generation, and increased recycling activities.
2. SDG 14 – Life Below Water, through the rehabilitation of mangrove areas and the protection of coastal ecosystems.
3. SDG 13 – Climate Action, through climate change mitigation efforts and enhanced environmental resilience.

Program Pelaksanaan TJSL PLN Energi Gas Tahun 2025
PLN Energi Gas Implementation CSER Program for 2025



Penanaman 1000 Bibit Mangrove di Tarakan
Planting of 1.000 Mangroves Seedlings in Tarakan



Bantuan Hari Raya Keagamaan
Religious Holiday Assistance



Program TPS3R (Reduce, Reuse, Recycle)
TPS3R Program (Reduce, Reuse, Recycle)



Bantuan Sarana Prasarana MTQ
MTQ Facilities and Borehole Assistance



Program Saji Farm
Saji Farm Program



Program Bugar Rama
Bugar Rama Program

Penanganan Pengaduan Masyarakat

PLN Energi Gas menyediakan berbagai sarana bagi para pemangku kepentingan untuk menyampaikan pengaduan, masukan, maupun laporan atas dugaan pelanggaran yang berkaitan dengan etika, integritas, norma, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, mekanisme ini juga mencakup pelaporan atas tindakan yang berpotensi mengganggu keamanan sosial, lingkungan hidup, maupun aspek lain di wilayah operasional Perusahaan.

Untuk memastikan kemudahan akses dan efektivitas penanganan, PLN Energi Gas mengimplementasikan mekanisme *Whistleblowing System* yang dapat digunakan oleh masyarakat maupun insan Perusahaan, serta menyediakan kanal pengaduan melalui email dan contact center yang tersedia pada situs resmi Perusahaan (https://plnenergigas.co.id/contact). Seluruh kanal tersebut dirancang untuk menjamin kerahasiaan pelapor, transparansi proses, serta tindak lanjut yang akuntabel sesuai ketentuan yang berlaku.

Hingga akhir tahun 2025, PLN Energi Gas mencatat bahwa tidak terdapat pengaduan dari masyarakat terkait aktivitas operasional Perusahaan yang diterima maupun yang memerlukan tindak lanjut. Hal ini mencerminkan bahwa kegiatan operasional Perusahaan berjalan sesuai dengan prinsip tata kelola yang baik (*Good Corporate Governance*), serta mematuhi standar etika dan kepatuhan yang ditetapkan.

Public Complaint Handling

PLN Energi Gas provides various facilities for the stakeholders to submit complaints, suggestions, or reports of suspected violations related to ethics, integrity, norms, and applicable laws and regulations. Also, this mechanism includes reporting actions that have the potential to disrupt social security, the environment, or other aspects in the Company's operational area.

To ensure ease of access and effectiveness of handling, PLN Energi Gas implements a whistleblowing system mechanism that can be used by the public and Company personnel, and provides complaint channels via email and contact center available on the Company's official website. All these channels are designed to ensure reporter confidentiality, process transparency, and accountable follow-up in accordance with applicable regulations.https://plnenergigas.co.id/contact.

As of the end of 2025, PLN Energi Gas recorded that there were no public complaints received regarding the Company's operational activities that required follow-up action. This reflects that the Company's operations are conducted in accordance with the principles of good corporate governance and comply with established ethical standards and compliance requirements.

Kinerja Sosial – Pelanggan
Social Performance – Customers

Komitmen dan Kebijakan Dalam Pengembangan Produk dan Layanan

Untuk memastikan terpenuhinya kualitas layanan kepada pelanggan, PLN Energi Gas telah memiliki kebijakan perusahaan terkait layanan pelanggan sebagai komitmen dalam menjaga dan meningkatkan mutu pelayanan secara berkelanjutan. Komitmen tersebut diperkuat dengan penerapan standar manajemen mutu yang dibuktikan melalui perolehan Sertifikat Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015 pada 25 Desember 2019 sebagai pengakuan atas penerapan sistem pengelolaan mutu berstandar internasional. Tidak hanya berhenti pada perolehan sertifikasi, PLN Energi Gas juga secara konsisten melakukan pembaruan dan penguatan sistem manajemen mutu melalui integrasi Sistem Manajemen Terpadu (SMT) ISO 9001:2015 pada 27 April 2022, sebagai bentuk continuous improvement dalam memastikan kualitas layanan yang semakin efektif, andal, dan sesuai dengan standar yang berlaku.

Commitment and Policy in Products and Services Development

To ensure the fulfilments of service quality for customers, PLN Energi Gas has established corporate policies related to customer services as commitment to maintaining and continuously improving services quality. This commitment is strengthened by the implementation of quality management standards, evidenced by the attainment of the ISO 9001:2015 Quality Management System Certificate on December 25, 2019, as recognition of the implementation of an internationally standardized quality management system. Not stopping at certification, PLN Energi Gas consistently updates and strengthens the quality management system through the integration of the Integrated Management System (IMS) ISO 9001:2015 on April 27, 2022, as manifestation of continuous improvement to ensure services quality that is increasingly effective, reliable, and based on the applicable standards.

Kesetaraan Pemenuhan Kualitas Layanan kepada Pelanggan

PLN Energi Gas berfokus untuk menyediakan produk dan layanan yang andal dengan kualitas serta spesifikasi yang sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Dalam menjalankan komitmen tersebut, PLN Energi Gas senantiasa memastikan bahwa setiap produk dan layanan yang diberikan memenuhi standar mutu yang telah ditetapkan serta didukung oleh penerapan sertifikasi yang berlaku. Penerapan standar ini dilakukan secara konsisten, setara, dan adil kepada seluruh pelanggan tanpa pengecualian, sebagai bentuk komitmen Perusahaan dalam menjaga kualitas layanan dan kepuasan pelanggan secara berkelanjutan.

Equality in Fulfilling Service Quality for Customers

PLN Energi Gas focuses on providing reliable products and services with quality and specifications that meet customer needs. In carrying out this commitment, PLN Energi Gas always ensures that every product and service provided meets the established quality standards and is supported by the application of applicable certifications. This standard is implemented consistently, equally, and fairly to all customers without exception, as a form of the Company's commitment to maintaining service quality and customer satisfaction on an ongoing basis.

Peningkatan Layanan Pelanggan

PLN Energi Gas berkomitmen untuk terus meningkatkan standar mutu dan layanan sebagai bentuk tanggung jawab Perusahaan terhadap pelanggan. Komitmen tersebut diwujudkan melalui berbagai upaya strategis dalam rangka meningkatkan

Customer Service Improvement

PLN Energi Gas is committed to continuously improving quality and service standards as a form of the Company's responsibility towards customers. The Company actualized this commitment through various strategic efforts to improve service quality

kualitas pelayanan secara berkelanjutan, adaptif, dan berorientasi pada kepuasan pelanggan. Adapun langkah-langkah yang dilakukan Perusahaan dalam upaya meningkatkan pelayanan kepada pelanggan yaitu:

1. Memberikan kemudahan layanan bagi Pelanggan untuk memperoleh informasi terkait produk, layanan, dan operasional bisnis Perusahaan di *call center, website,* dan media sosial Perusahaan;
2. Melakukan survei kepuasan Pelanggan;
3. Menangani keluhan serta pendapat Pelanggan untuk terus menyempurnakan proses dan kualitas pelayanan;
4. Mempercepat rangkaian proses bisnis dan pekerjaan lainnya sehingga dapat memberikan pelayanan yang lancar dan optimal;
5. Memberi kepastian dalam penyelesaian klaim sehingga dapat meningkatkan kepuasan Pelanggan.

Melalui pelaksanaan program-program tersebut diharapkan kepuasan pelanggan dapat terus meningkat sehingga mendorong pencapaian kinerja operasional dan keuangan Perusahaan.

Inovasi Pengembangan Produk dan Layanan Perusahaan

PLN Energi Gas senantiasa memastikan bahwa produk dan layanan yang diberikan tetap relevan, efisien, serta mampu memberikan manfaat yang optimal bagi seluruh pemangku kepentingan, khususnya pelanggan. Dalam rangka menjaga dan meningkatkan daya saing layanan, PLN Energi Gas terus mendorong inovasi serta pengembangan produk dan layanan secara berkelanjutan. Upaya ini dilakukan sebagai bagian dari komitmen Perusahaan untuk menghadirkan peningkatan kualitas layanan dari waktu ke waktu secara konsisten dan berkesinambungan setiap tahunnya.

Survei Kepuasan Pelanggan

Pada tahun 2025, PLN Energi Gas telah melaksanakan survei kepuasan pelanggan yang dilakukan oleh pihak independen sebagai bagian dari upaya evaluasi dan peningkatan kualitas layanan secara berkelanjutan. Berdasarkan hasil survei tersebut, Indeks Kepuasan

sustainably, adaptively, and with a focus on customer satisfaction. The Company applied steps in improving customer service, including:

1. Providing convenient services for the customers to obtain information related to the Company's products, services, and business operations via the call center, website, and social media;
2. Customer satisfaction surveys;
3. Handling the customers complaints and feedback to continuously improve service processes and quality;
4. Accelerating business processes and other tasks to provide smooth and optimal service;
5. Providing certainty in claims settlement, thereby increasing the customers satisfaction.

Through these programs implementation, it is expected that customers satisfaction will continue to increase, so as to encourage operational and financial performance of the Company.

Products and Services Development Innovation

PLN Energi Gas continuously ensures that the products and services provided remain relevant, efficient, and able to deliver optimal benefits to all stakeholders, especially customers. In order to maintain and enhance the competitiveness of its services, PLN Energi Gas consistently drives innovation and the ongoing development of products and services. These efforts are part of the Company's commitment to consistently and sustainably improving service quality over time, year after year.

Customers Satisfaction Survey

In 2025, PLN Energi Gas conducted customer satisfaction survey through independent party as part of its ongoing efforts to evaluate and improve service quality. Based on the survey results, the PLN Energi Gas Customer Satisfaction Index was

Pelanggan PLN Energi Gas tercatat sebesar 78,39. Hasil survei ini menunjukkan bahwa tingkat pelayanan PLN Energi Gas berada pada kategori Mutu Pelayanan "Puas", yang mencerminkan tingginya tingkat kepuasan pelanggan terhadap kinerja pelayanan Perusahaan.

Layanan Pengaduan Pelanggan

Pengaduan dapat disampaikan pelanggan melalui berbagai media berupa surat, telepon, email, wa, sms dan/atau dengan mengunjungi website Perusahaan di alamat : https://www.plnenergigas.co.id/

Perusahaan berupaya untuk senantiasa memenuhi harapan pelanggan melalui penerapan program pengaduan pelanggan sebagai salah satu sarana penting dalam peningkatan kualitas layanan. Pengaduan atau keluhan pelanggan dipandang sebagai informasi strategis yang dapat digunakan untuk melakukan perbaikan dan peningkatan berkelanjutan terhadap layanan yang diberikan oleh Perusahaan. Setiap keluhan yang diterima ditindaklanjuti melalui mekanisme penanganan yang telah diatur secara khusus dalam kebijakan penanganan keluhan PLN Energi Gas yang merujuk pada standar ISO 9001:2015, sehingga proses penanganan dilakukan secara terstruktur, konsisten, dan sesuai dengan prinsip sistem manajemen mutu.

Realisasi Anggaran Peningkatan Kualitas Layanan Pelanggan

Perusahaan telah mengalokasikan anggaran khusus untuk pelaksanaan program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (TJSL) yang berfokus pada pelanggan. Anggaran ini digunakan oleh PLN Energi Gas untuk mengelola serta meningkatkan kualitas hubungan dengan pelanggan secara berkelanjutan, termasuk dalam penanganan berbagai isu yang berkaitan dengan kesehatan dan keselamatan pelanggan. Melalui alokasi anggaran tersebut, Perusahaan berupaya memastikan bahwa aspek perlindungan pelanggan menjadi bagian penting dalam setiap aktivitas operasional dan pelayanan yang diberikan.

recorded at 78.39, which indicates that the service level of PLN Energi Gas falls under the category of "Satisfied" Service Quality, reflecting a high level of customer satisfaction with the Company's service performance.

Customers Complaint Service

Customers may submit complaints through various channels, including mail, telephone, email, WhatsApp, SMS, and/or by visiting the Company's website at: https://www.plnenergigas.co.id/

The Company strives to always meet customer expectations by implementing customers complaint program as an important tool for improving service quality. Customer complaints are viewed as strategic information that can be used to make continuous improvements and enhancements to the services provided by the Company. Each complaint received is followed up through a handling mechanism specifically regulated in the PLN Energi Gas complaint handling policy, which refers to the ISO 9001:2015 standard, ensuring that the handling process is structured, consistent, and in accordance with quality management system principles.

Realization of Budget for Improving Customer Service Quality

The Company has allocated special budget for implementing Corporate Social Responsibility (CSR) programs focused on customers. This budget is used by PLN Energi Gas to manage and continuously improve the quality of relationships with customers, including handling various issues related to customer health and safety. Through this budget allocation, the Company strives to ensure that customer protection aspects become an important part of every operational activity and service provided.



Laporan Keuangan Audited

Audited Financial Statements

PT PENGEMBANG LISTRIK NASIONAL ENERGI GAS

LAPORAN KEUANGAN/
FINANCIAL STATEMENTS

31 DESEMBER 2025/
31 DECEMBER 2025

PLN Energi Gas

SURAT PERNYATAAN DIREKSI TENTANG/
DIRECTORS' STATEMENT REGARDING

TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN PADA TANGGAL DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025

THE RESPONSIBILITY FOR THE FINANCIAL STATEMENTS AS AT AND FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2025

PT PENGEMBANG LISTRIK NASIONAL ENERGI GAS

Atas nama Dewan Direksi, kami yang bertanda tangan di bawah ini

On behalf of the Board of Directors, we, the undersigned:

1. Nama/*Name* : Edwin Bangun
   Alamat Kantor/Office Address : Menara Bidakara 2 Lantai 10, Jl. Gatot Subroto Kav. 71-73, RT.8/RW.8, Menteng Dalam, Kec. Tebet, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12870
   Nomor telepon/*Phone number* : 021-29069464
   Alamat domisili sesuai KTP atau kartu identitas lain/ *Domicile as stated in ID Card* : Kompleks Griya Kenanga Asri Blok D-14 RT 001 RW 010, Kel/Desa Tanjung Rejo, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan, Sumatera Utara
   Jabatan/*Position* : PLT Direktur Utama/*President Director*

2. Nama/*Name* : Rahmi Asnidar Harahap
   Alamat Kantor/Office Address : Menara Bidakara 2 Lantai 10, Jl. Gatot Subroto Kav. 71-73, RT.8/RW.8, Menteng Dalam, Kec. Tebet, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12870
   Nomor telepon/*Phone number* : 021-29069464
   Alamat domisili sesuai KTP atau kartu identitas lain/ *Domicile as stated in ID Card* : Perumahan Bintaro Permai RT 010/RW 004, Jl. Rosalia II TM I, Kel/Desa Pondok Betung, Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan, Banten
   Jabatan/*Position* : PLT Direktur Keuangan dan SDM/*Finance and Human Resource Director*

menyatakan bahwa:

declare that:

1. Kami bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan PT Pengembang Listrik Nasional Energi Gas ("Perusahaan");

   We are responsible for the preparation and presentation of the financial statements of PT Pengembang Listrik Nasional Energi Gas (the "Company");

2. Laporan keuangan Perusahaan telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia;

   The Company's financial statements have been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards;

3. a. Semua informasi dalam laporan keuangan Perusahaan telah dimuat secara lengkap dan benar;

   All information has been disclosed in a complete and truthful manner in the Company's financial statements;

   b. Laporan keuangan Perusahaan tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material; dan

   The Company's financial statements do not contain any incorrect information or material facts, nor do they omit information or material facts; and

4. Kami bertanggung jawab atas sistem pengendalian internal Perusahaan.

   We are responsible for the Company's internal control systems.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

This statement is confirmed to the best of our knowledge and belief.

Atas nama dan mewakili Dewan Direksi.

For and on behalf of the Board of Directors.

Edwin Bangun
PLT Direktur Utama/*President Director*

Rahmi Asnidar Harahap
PLT Direktur Keuangan dan SDM/*Finance and Human Resource Director*

JAKARTA
13 Mei/*May* 2026

Laporan/*Report* No. 00906/2.1457/AU.1/02/1789-5/1/V/2026

Laporan auditor independen
Kepada para Pemegang Saham

PT Pengembang Listrik Nasional Energi Gas

Independent auditors' report
To the Shareholders of

PT Pengembang Listrik Nasional Energi Gas

Opini

Kami telah mengaudit laporan keuangan PT Pengembang Listrik Nasional Energi Gas ("Perusahaan"), yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2025, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta catatan atas laporan keuangan, termasuk informasi kebijakan akuntansi material.

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Perusahaan tanggal 31 Desember 2025, serta kinerja keuangan dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia.

Opinion

We have audited the financial statements of PT Pengembang Listrik Nasional Energi Gas (the "Company"), which comprise the statement of financial position as at 31 December 2025, and the statement of profit or loss and other comprehensive income, statement of changes in equity and statement of cash flows for the year then ended, and notes to the financial statements, including material accounting policy information.

In our opinion, the accompanying financial statements present fairly, in all material respects, the financial position of the Company as at 31 December 2025, and its financial performance and its cash flows for the year then ended, in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.

Basis opini

Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Tanggung jawab kami menurut standar tersebut diuraikan lebih lanjut dalam paragraf Tanggung jawab auditor terhadap audit atas laporan keuangan pada laporan kami. Kami independen terhadap Perusahaan berdasarkan ketentuan etika yang relevan dalam audit kami atas laporan keuangan di Indonesia, dan kami telah memenuhi tanggung jawab etika lainnya berdasarkan ketentuan tersebut. Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Basis for opinion

We conducted our audit in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants. Our responsibilities under those standards are further described in the Auditors' responsibilities for the audit of the financial statements paragraph of our report. We are independent of the Company in accordance with the ethical requirements that are relevant to our audit of the financial statements in Indonesia, and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with these requirements. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion.

Kantor Akuntan Publik Rintis, Jumadi, Rianto & Rekan
WTC 3, Jl. Jend. Sudirman Kav. 29-31, Jakarta 12920 – Indonesia
T: +62 (21) 5099 2901 / 3119 2901
F: +62 (21) 5290 5555 / 5290 5050

Nomor Izin Usaha: KEP-315/KM.1/2024.

Tanggung jawab manajemen dan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola terhadap laporan keuangan

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Dalam penyusunan laporan keuangan, manajemen bertanggung jawab untuk menilai kemampuan Perusahaan dalam mempertahankan kelangsungan usahanya, mengungkapkan, sesuai dengan kondisinya, hal-hal yang berkaitan dengan kelangsungan usaha dan menggunakan basis akuntansi kelangsungan usaha kecuali manajemen memiliki intensi untuk melikuidasi Perusahaan atau menghentikan operasi, atau tidak memiliki alternatif yang realistis selain melaksanakannya.

Pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bertanggung jawab untuk mengawasi proses pelaporan keuangan Perusahaan.

Responsibilities of management and those charged with governance for the financial statements

Management is responsible for the preparation and fair presentation of the financial statements in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, and for such internal control as management determines is necessary to enable the preparation of financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

In preparing the financial statements, management is responsible for assessing the Company's ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going concern basis of accounting unless management either intends to liquidate the Company or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so.

Those charged with governance are responsible for overseeing the Company's financial reporting process.

Tanggung jawab auditor terhadap audit atas laporan keuangan

Tujuan kami adalah untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, dan untuk menerbitkan laporan auditor yang mencakup opini kami. Keyakinan memadai merupakan suatu tingkat keyakinan tinggi, namun bukan merupakan suatu jaminan bahwa audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit akan selalu mendeteksi kesalahan penyajian material ketika hal tersebut ada. Kesalahan penyajian dapat disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan dan dianggap material jika, baik secara individual maupun secara agregat, dapat diekspektasikan secara wajar akan memengaruhi keputusan ekonomi yang diambil oleh pengguna berdasarkan laporan keuangan tersebut.

Auditors' responsibilities for the audit of the financial statements

Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the financial statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditors' report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with Standards on Auditing will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these financial statements.

Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit. Kami juga:

- Mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, merancang dan melaksanakan prosedur audit yang responsif terhadap risiko tersebut, serta memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyediakan basis bagi opini kami. Risiko tidak terdeteksinya kesalahan penyajian material yang disebabkan oleh kecurangan lebih tinggi dari yang disebabkan oleh kesalahan, karena kecurangan dapat melibatkan kolusi, pemalsuan, penghilangan secara sengaja, pernyataan salah, atau pengabaian pengendalian internal.
- Memperoleh suatu pemahaman tentang pengendalian internal yang relevan dengan audit untuk merancang prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas efektivitas pengendalian internal Perusahaan.
- Mengevaluasi ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan serta kewajaran estimasi akuntansi dan pengungkapan terkait yang dibuat oleh manajemen.
- Menyimpulkan ketepatan penggunaan basis akuntansi kelangsungan usaha oleh manajemen dan, berdasarkan bukti audit yang diperoleh, apakah terdapat suatu ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan Perusahaan untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Ketika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu ketidakpastian material, kami diharuskan untuk menarik perhatian dalam laporan auditor kami ke pengungkapan terkait dalam laporan keuangan atau, jika pengungkapan tersebut tidak memadai, harus menentukan apakah perlu untuk memodifikasi opini kami. Kesimpulan kami didasarkan pada bukti audit yang diperoleh hingga tanggal laporan auditor kami. Namun, peristiwa atau kondisi masa depan dapat menyebabkan Perusahaan tidak dapat mempertahankan kelangsungan usaha.
- Mengevaluasi penyajian, struktur dan isi laporan keuangan secara keseluruhan, termasuk pengungkapannya, dan apakah laporan keuangan mencerminkan transaksi dan peristiwa yang mendasarinya dengan suatu cara yang mencapai penyajian wajar.

As part of an audit in accordance with Standards on Auditing, we exercise professional judgement and maintain professional scepticism throughout the audit. We also:

- *Identify and assess the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control.*
- *Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the Company's internal control.*
- *Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures made by management.*
- *Conclude on the appropriateness of management's use of the going concern basis of accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the Company's ability to continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our auditors' report to the related disclosures in the financial statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of our auditors' report. However, future events or conditions may cause the Company to cease to continue as a going concern.*
- *Evaluate the overall presentation, structure and content of the financial statements, including the disclosures, and whether the financial statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation.*

Kami mengomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola mengenai, antara lain, ruang lingkup dan saat yang direncanakan atas audit serta temuan audit signifikan, termasuk setiap defisiensi signifikan dalam pengendalian internal yang teridentifikasi oleh kami selama audit.

We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during our audit.

Jakarta,
13 Mei/*May* 2026

Firman Sababalat, CPA
Izin Akuntan Publik/*Public Accountant License* No. AP.1789

Pengembang Listrik Nasional Energi Gas
00906/2.1457/AU.1/02/1789-5/1/V/2026

PT PENGEMBANG LISTRIK NASIONAL ENERGI GAS

Lampiran 1/1 *Schedule*

LAPORAN POSISI KEUANGAN
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2025
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali nilai nominal dan data saham)

STATEMENT OF FINANCIAL POSITION
AS AT 31 DECEMBER 2025
(Expressed in millions of Rupiah,
except for par value and share data)

	Catatan/ *Notes*	2025	2024	
ASET				***ASSETS***
ASET LANCAR				***CURRENT ASSETS***
Kas dan setara kas	4	114,121	113,361	*Cash and cash equivalents*
Piutang usaha	5			*Trade receivables*
- Pihak ketiga		10,128	24,070	*Third parties -*
- Pihak berelasi		51,542	46,544	*Related parties -*
Piutang non-usaha		1,210	1,391	*Non-trade receivables*
Piutang sewa pembiayaan, bagian lancar	7	136,922	120,361	*Finance lease receivables, current portion*
Aset lancar lainnya		34	688	*Other current assets*
Jumlah aset lancar		**313,957**	**306,415**	***Total current assets***
ASET TIDAK LANCAR				***NON-CURRENT ASSETS***
Aset tetap	6	143,597	61,434	*Fixed assets*
Piutang sewa pembiayaan, bagian tidak lancar	7	1,823,756	1,960,672	*Finance lease receivables, non-current portion*
Aset hak-guna	8	14,508	13,775	*Right-of-use assets*
Pajak dibayar di muka	12a			*Prepaid taxes*
- Pajak lainnya		70,115	97,037	*Other taxes -*
Aset tidak lancar lainnya		13,285	3,347	*Other non-current assets*
Jumlah aset tidak lancar		**2,065,261**	**2,136,265**	***Total non-current assets***
JUMLAH ASET		**2,379,218**	**2,442,680**	***TOTAL ASSETS***

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan.

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of these financial statements.

PT PENGEMBANG LISTRIK NASIONAL ENERGI GAS

Lampiran 1/2 *Schedule*

LAPORAN POSISI KEUANGAN
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2025
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali nilai nominal dan data saham)

STATEMENT OF FINANCIAL POSITION
AS AT 31 DECEMBER 2025
(Expressed in millions of Rupiah, except for par value and share data)

	Catatan/ *Notes*	2025	2024	
LIABILITAS DAN EKUITAS				***LIABILITIES AND EQUITY***
LIABILITAS				***LIABILITIES***
LIABILITAS JANGKA PENDEK				***CURRENT LIABILITIES***
Utang usaha	9			*Trade payables*
- Pihak ketiga		57,557	60,186	*Third parties -*
- Pihak berelasi		14,296	16,207	*Related parties -*
Utang lain-lain		4,204	2,449	*Other payables*
Utang pajak	12b			*Taxes payable*
- Pajak lain-lain		3,158	5,103	*Other taxes -*
Biaya masih harus dibayar	10	13,055	9,221	*Accrued expenses*
Liabilitas jangka panjang jatuh tempo dalam satu tahun:				*Current maturities of long-term liabilities*
- Liabilitas sewa	11	134,327	122,578	*Lease liabilities -*
- Pinjaman pemegang saham	13	55,275	52,456	*Shareholder loan -*
Liabilitas imbalan pascakerja, jangka pendek		160	160	*Post-employment benefits liabilities, current portion*
Jumlah liabilitas jangka pendek		**282,032**	**268,360**	***Total current liabilities***
LIABILITAS JANGKA PANJANG				***NON-CURRENT LIABILITIES***
Liabilitas jangka panjang, setelah dikurangi bagian jatuh tempo dalam satu tahun				*Long-term liabilities, net of current maturities*
- Liabilitas sewa	11	1,402,911	1,532,356	*Lease liabilities -*
- Pinjaman pemegang saham	13	156,583	202,604	*Shareholder loan -*
Liabilitas imbalan pascakerja, jangka panjang		3,180	2,083	*Post-employment benefits liabilities, non-current portion*
Liabilitas pajak tangguhan	12d	13,028	10,531	*Deferred tax liabilities*
Jumlah liabilitas jangka panjang		**1,575,702**	**1,747,574**	***Total non-current liabilities***
JUMLAH LIABILITAS		**1,857,734**	**2,015,934**	***TOTAL LIABILITIES***
EKUITAS				***EQUITY***
Modal saham:				*Share capital:*
Modal dasar 100.000 lembar saham, ditempatkan dan disetor penuh 25.000 lembar saham dengan nilai nominal Rp1.000.000 (nilai penuh) per lembar saham	14	25,000	25,000	*Authorised 100,000 shares, issued and fully paid 25,000 shares at par value of Rp1,000,000 (full amount) per share*
Tambahan modal disetor	13	112,848	112,848	*Additional paid-in capital*
Saldo laba		383,636	288,898	*Retained earnings*
JUMLAH EKUITAS		**521,484**	**426,746**	***TOTAL EQUITY***
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS		**2,379,218**	**2,442,680**	***TOTAL LIABILITIES AND EQUITY***

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan.

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of these financial statements.

PT PENGEMBANG LISTRIK NASIONAL ENERGI GAS

Lampiran 2 *Schedule*

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2025
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah)

STATEMENT OF PROFIT OR LOSS AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME FOR THE YEAR ENDED AS AT 31 DECEMBER 2025
(Expressed in millions of Rupiah)

	Catatan/ *Notes*	2025	2024	
PENDAPATAN	15	480,955	478,620	***REVENUE***
BEBAN USAHA	16	(180,650)	(200,605)	***OPERATING EXPENSES***
LABA USAHA		**300,305**	**278,015**	***OPERATING PROFIT***
Beban keuangan	17	(176,405)	(177,341)	*Finance expense*
Penghasilan keuangan		1,645	1,944	*Finance income*
(Beban)/penghasilan lain-lain, bersih		(5,144)	2,425	*Other (expense)/income, net*
LABA SEBELUM PAJAK		**120,401**	**105,043**	***PROFIT BEFORE TAX***
Beban pajak penghasilan	12c	(25,515)	(24,365)	*Income tax expense*
LABA TAHUN BERJALAN		**94,886**	**80,678**	***PROFIT FOR THE YEAR***
Penghasilan komprehensif lain tahun berjalan:				***Other comprehensive income for the year:***
Pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi:				*Item that will not be reclassified to profit or loss:*
Pengukuran kembali liabilitas imbalan pascakerja		(190)	38	*Remeasurement of post-employment benefit liabilities*
Manfaat/(beban) pajak terkait	12d	42	(8)	*Benefit/(expense) related income tax*
Jumlah penghasilan komprehensif tahun berjalan		**(148)**	**30**	***Total comprehensive income for the year***
JUMLAH PENGHASILAN KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN		**94,738**	**80,708**	***TOTAL COMPREHENSIVE INCOME FOR THE YEAR***

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan.

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of these financial statements.

PT PENGEMBANG LISTRIK NASIONAL ENERGI GAS

Lampiran 3 *Schedule*

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2025
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah)

STATEMENT OF CHANGES IN EQUITY
FOR THE YEAR ENDED
AS AT 31 DECEMBER 2025
(Expressed in millions of Rupiah)

	Modal saham/ *Share capital*	Tambahan modal disetor/ *Additional paid-in capital*	Saldo laba/ *Retained earnings*	Jumlah ekuitas/ *Total equity*	
Saldo pada tanggal 1 Januari 2024	**25,000**	**112,848**	**208,190**	**346,038**	***Balance as at 1 January 2024***
Laba tahun berjalan	-	-	80,678	80,678	*Profit for the year*
Penghasilan komprehensif lain	-	-	30	30	*Other comprehensive income*
Saldo pada tanggal 31 Desember 2024	**25,000**	**112,848**	**288,898**	**426,746**	***Balance as at 31 December 2024***
Laba tahun berjalan	-	-	94,886	94,886	*Profit for the year*
Penghasilan komprehensif lain	-	-	(148)	(148)	*Other comprehensive income*
Saldo pada tanggal 31 Desember 2025	**25,000**	**112,848**	**383,636**	**521,484**	***Balance as at 31 December 2025***

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan.

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of these financial statements.

PT PENGEMBANG LISTRIK NASIONAL ENERGI GAS

Lampiran 4 *Schedule*

LAPORAN ARUS KAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2025
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah)

STATEMENT OF CASH FLOWS
FOR THE YEAR ENDED
AS AT 31 DECEMBER 2025
(Expressed in millions of Rupiah)

	2025	2024	
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI			***CASH FLOW FROM OPERATING ACTIVITIES***
Penerimaan dari pelanggan	489,899	477,595	*Receipts from customers*
Pembayaran kepada pemasok dan karyawan	(98,165)	(94,334)	*Payments to suppliers and employees*
Pembayaran pajak penghasilan	(22,847)	(20,370)	*Payments of income taxes*
Pembayaran beban keuangan	(176,975)	(167,698)	*Payments of finance expense*
Penerimaan restitusi pajak	65,789	11,333	*Receipts of tax refund*
Penerimaan penghasilan keuangan	1,645	1,944	*Receipts of finance income*
Kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi	**259,346**	**208,470**	***Net cash generated from operating activities***
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI			***CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES***
Penambahan aset tetap	(82,163)	(61,434)	*Addition of fixed asset*
Kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi	**(82,163)**	**(61,434)**	***Net cash used in investing activities***
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN			***CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES***
Pembayaran liabilitas sewa	(123,967)	(161,498)	*Payments of lease liabilities*
Pembayaran pinjaman pemegang saham	(52,456)	(40,648)	*Payments of shareholder loan*
Kas bersih yang digunakan untuk aktivitas pendanaan	**(176,423)**	**(202,146)**	***Net cash used in financing activities***
KENAIKAN/(PENURUNAN) BERSIH KAS DAN SETARA KAS	**760**	**(55,110)**	***NET INCREASE/(DECREASE) IN CASH AND CASH EQUIVALENTS***
KAS DAN SETARA KAS AWAL TAHUN	**113,361**	**168,471**	***CASH AND CASH EQUIVALENTS AT BEGINNING OF THE YEAR***
KAS DAN SETARA KAS AKHIR TAHUN	**114,121**	**113,361**	***CASH AND CASH EQUIVALENTS AT END OF THE YEAR***

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan.

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of these financial statements.

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2025
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2025
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

1. UMUM

a. Pendirian dan informasi umum

PT Pengembang Listrik Nasional Energi Gas ("Perusahaan") didirikan berdasarkan Akta Notaris No.10 tanggal 28 Januari 2009 dari Lenny Janis Ishak, S.H., notaris di Jakarta, yang disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. AHU-11269.AH.01.01.Tahun 2009 tanggal 16 April 2009 serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 49 tanggal 19 Juni 2009 Tambahan No. 16263/2009. Pada tanggal 27 September 2023 dalam akta nomor 24 sesuai surat keputusan No. AHU-0059109.AH.01.02 tahun 2023, Perusahaan secara resmi berganti nama menjadi PT Pengembang Listrik Nasional Energi Gas.

Anggaran Dasar Perusahaan telah mengalami beberapa kali perubahan. Perubahan terakhir berdasarkan Akta Notaris No. 36 tanggal 29 Agustus 2025 dari Sutra Oktaviani, S.H, M.Kn notaris di Jakarta, sehubungan dengan perubahan dewan komisaris, yang disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. AHU-AH.01.09-0336536 tanggal 11 September 2025.

Berdasarkan akta No.75 tanggal 30 Desember 2022 dari Muhammad Hanafi, S.H., notaris di Jakarta, tentang:

1. Persetujuan pengalihan saham PT Perusahaan Listrik Negara ("PLN") sejumlah 24.999 saham atau setara 99,96% dari total saham yang ditempatkan dan disetor dalam Perusahaan kepada PT PLN Energi Primer Indonesia ("PLN EPI") melalui penyertaan modal non tunai (inbreng);

2. Persetujuan pengambilalihan Perusahaan oleh PLN EPI sebagai akibat dari penyertaan modal non tunai (inbreng).

Akta ini telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana dibuktikan dengan Surat Penerimaan Perubahan Data Perseroan Nomor AHU-AH.01.09-0000025 tanggal 1 Januari 2023 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0000016.AH.01.11.Tahun 2023 tanggal 1 Januari 2023. Keputusan ini akan efektif berlaku sejak tanggal 1 Januari 2023.

1. GENERAL

a. Establishment and general Information

PT Pengembang Listrik Nasional Energi Gas (the "Company") was established based on Notarial Deed No. 10 dated 28 January 2009 of Lenny Janis Ishak, S.H., notary in Jakarta, which was approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in his Decision Letter No. AHU-11269.AH.01.01.Tahun 2009 dated 16 April 2009, and was published in the State Gazette of the Republic of Indonesia No. 49 dated 19 June 2009 Supplement No. 16263/2009. On 27 September 2023 in deed number 24 according to decision letter no. AHU-0059109.AH.01.02 year 2023, the Company officially changed its name to PT Pengembang Listrik Nasional Energi Gas.

The Company's Articles of Association has been amended several times. The latest amendment was based on Notarial Deed No. 36 dated 29 August 2025 of Sutra Oktaviani, S.H, M.Kn notary in Jakarta, regarding the changes on board of commissioner, which was approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in Decision Letter No. AHU-AH.01.09-0336536 dated 11 September 2025.

Based on Deed No. 75 dated 30 December 2022, executed before Muhammad Hanafi, S.H., a notary in Jakarta, concerning the following matters:

1. *Approval of the transfer of shares owned by PT Perusahaan Listrik Negara ("PLN") totaling 24,999 shares, or equivalent to 99.96% of the total issued and paid-up shares in the Company, to PT PLN Energi Primer Indonesia ("PLN EPI") through non-cash capital contribution (inbreng);*

2. *Approval of the acquisition of the Company by PT PLN Energi Primer Indonesia ("PLN EPI") arising from the non-cash capital contribution (inbreng).*

This deed has been notified to the Minister of Law and Human Rights as evidenced by the Letter of Acceptance of Changes in Company Data Number AHU-AH.01.09-0000025 dated 1 January 2023 and has been registered in the Company Register No. AHU-0000016.AH.01.11.Tahun 2023 dated 1 January 2023. This decision will become effective on 1 January 2023.

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2025
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2025
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

1. UMUM (lanjutan)

a. Pendirian dan informasi umum (lanjutan)

Perusahaan berdomisili di Jakarta, dan kantor pusat Perusahaan beralamat di Menara Bidakara 2 Lt. 10, Jl. Gatot Subroto Kav. 71-73, Menteng Dalam, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan.

Sesuai dengan pasal 3 Anggaran Dasar Perusahaan, maksud dan tujuan Perusahaan adalah menyelenggarakan usaha ketenagalistrikan dalam rangka ikut serta melaksanakan dan menunjang kebijakan dan program Pemerintah di bidang pengembangan dan penyediaan energi listrik untuk kepentingan umum yang bermutu dan niaga yang sehat yang mencakup aktivitas-aktivitas sebagai berikut:

a. Angkutan melalui saluran pipa;
b. Penyimpanan minyak dan gas bumi;
c. Perdagangan eceran bahan bakar minyak, Bahan Bakar Gas ("BBG"), dan *Liquefied Petroleum Gas* ("LPG") selain di sarana pengisian bahan bakar transportasi darat, laut dan udara;
d. Industri bahan bakar dari pemurnian dan pengilangan minyak bumi;
e. Pengadaan gas alam dan buatan;
f. Angkutan bermotor untuk barang khusus.

Entitas induk Perusahaan adalah PLN EPI.

Pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, Perusahaan memiliki karyawan sebanyak 38 dan 36 karyawan (tidak diaudit).

b. Lain-lain

Pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan adalah sebagai berikut:

	2025	2024	
Dewan Komisaris			*Board of Commissioners*
PLT Komisaris Utama	Bayu Satria Pratama	Dedi Budi Utomo	*Acting as President Commissioner*
PLT Komisaris	Andriah Feby Misna	Bayu Satria Pratama	*Acting as Commissioner*
PLT Komisaris	-	Andriah Feby Misna	*Acting as Commissioner*
Dewan Direksi			*Board of Directors*
PLT Direktur Utama	Edwin Bangun	Edwin Bangun	*Acting as President Director*
PLT Direktur Operasi	Yusuf Kusdinar	Yusuf Kusdinar	*Acting as Operation Director*
PLT Direktur Keuangan dan Sumber Daya Manusia	Rahmi Asnidar Harahap	Rahmi Asnidar Harahap	*Acting as Finance and Human Resource Director*

***1. GENERAL** (continued)*

***a. Establishment and general Information** (continued)*

The Company is domiciled in Jakarta and its head office is located at Menara Bidakara 2, 10th Floor, Jl. Gatot Subroto Kav. 71-73, Menteng Dalam, Tebet District, South Jakarta.

In accordance with article 3 of the Company's Articles of Association, the scope of its activities is to run electricity business in order to participate to implement and support the Government's policies and programs in the field of energy development and supply of electricity for public use in high quality and healthy commerce including the following activities:

a. Pipeline transportation;
b. Storage of oil and natural gas;
c. Retail sale of fuel oil, Gas Fuel ("BBG"), and Liquefied Petroleum Gas ("LPG"), other than through refuelling facilities for land, sea, and air transport;
d. Manufacture of fuel products from petroleum purification and refining;
e. Supply of natural gas and manufactured gas;
f. Motor vehicle transportation for specialised goods.

The Company's parent entity is PLN EPI.

As at 31 December 2025 and 2024, the Company had a total of 38 and 36 employees (unaudited).

b. Others

As at 31 December 2025 and 2024, the Company's Boards of Commissioners and Directors were as follows:

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL

Laporan keuangan ini telah disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia, yang mencakup Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan ("PSAK") dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan ("ISAK").

Berikut ini adalah kebijakan akuntansi material yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan Perusahaan. Kebijakan ini telah diaplikasikan secara konsisten terhadap semua tahun yang disajikan, kecuali dinyatakan lain.

a. Dasar penyusunan laporan keuangan

Laporan keuangan disusun dan disajikan berdasarkan asumsi kelangsungan usaha dan dengan pengukuran nilai historis, kecuali beberapa akun tertentu disusun berdasarkan pengukuran lain sebagaimana diuraikan dalam kebijakan akuntansi masing-masing akun tersebut. Dasar penyusunan laporan keuangan, kecuali untuk laporan arus kas adalah dasar akrual.

Laporan arus kas disusun menggunakan metode langsung dengan mengklasifikasikan arus kas berdasarkan aktivitas operasi, investasi dan pendanaan.

Seluruh angka dalam laporan keuangan ini dibulatkan dan disajikan dalam jutaan Rupiah ("Rp"), kecuali dinyatakan lain.

Untuk memberi pemahaman yang lebih baik atas kinerja keuangan Perusahaan, karena sifat dan jumlahnya yang signifikan, beberapa *item* pendapatan dan beban telah disajikan secara terpisah.

Kecuali dinyatakan dibawah ini, kebijakan akuntansi telah diterapkan secara konsisten dengan laporan keuangan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2024 yang telah disusun berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia.

Penyusunan laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia mengharuskan penggunaan estimasi dan asumsi akuntansi penting. Hal tersebut juga mengharuskan manajemen untuk membuat pertimbangan dalam proses penerapan kebijakan akuntansi Perusahaan. Area yang kompleks atau memerlukan tingkat pertimbangan yang lebih tinggi atau area di mana asumsi dan estimasi dapat berdampak signifikan terhadap laporan keuangan diungkapkan di Catatan 3.

2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION

The financial statements have been prepared in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, including Statements of Financial Accounting Standards ("SFAS") and Interpretations of Financial Accounting Standards ("IFAS").

Presented below are the material accounting policies adopted in preparing the Company financial statements. These policies have been consistently applied to all of the years presented, unless otherwise stated out below.

a. Basis of preparation of the financial statements

The financial statements have been prepared and presented based on the going concern assumption and using the historical cost basis of measurement, except for certain accounts which are measured on other bases as described in the respective accounting policies for those accounts. The financial statements, except for the statement of cash flows, have been prepared using the accrual basis.

The statement of cash flows is prepared using the direct method by classifying cash flows into operating, investing and financing activities.

Figures in the financial statements are rounded to and stated in millions of Rupiah ("Rp"), unless otherwise stated.

In order to provide further understanding of the financial performance of the Company, due to their significant nature or amount, several items of income or expenses have been shown separately.

Unless otherwise stated below, the accounting policies have been applied consistently with those used in the financial statements for the year ended 31 December 2024, which were prepared in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.

The preparation of financial statements in conformity with Indonesian Financial Accounting Standards requires the use of certain critical accounting estimates and judgements. It also requires management to exercise its judgement in the process of applying the Company's accounting policies. Those areas involving a higher degree of judgement or complexity, or areas where assumptions and estimates are significant to the financial statements are disclosed in Note 3.

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

a. Dasar penyusunan laporan keuangan (lanjutan)

Perubahan pada PSAK dan ISAK

Penerapan dari amendemen berikut yang berlaku efektif mulai 1 Januari 2025, tidak menimbulkan perubahan substansial terhadap kebijakan akuntansi Perusahaan dan pengaruh yang material atas jumlah yang dilaporkan atas periode berjalan atau tahun-tahun sebelumnya.

- Amendemen PSAK 221 "Pengaruh Perubahan Kurs Valuta Asing" - Kekurangan Ketertukaran
- PSAK 117 "Kontrak Asuransi"

Penerapan dari amendemen berikut yang berlaku efektif mulai 1 Januari 2026, tidak menimbulkan perubahan substansial terhadap kebijakan akuntansi Perusahaan dan pengaruh yang material atas jumlah yang dilaporkan atas periode berjalan atau tahun-tahun sebelumnya.

- Amendemen PSAK 109 dan PSAK 107 "Pengungkapan tentang Klasifikasi dan Pengukuran Instrumen Keuangan"
- Amendemen PSAK 109 dan PSAK 107 terkait Kontrak yang Mengacu pada Listrik Bergantung Alam
- Revisi atas PSAK 338 "Kombinasi Bisnis Entitas Sepengendali"

Penerapan dari standar baru berikut berlaku efektif mulai 1 Januari 2027. Penerapan retrospektif diwajibkan, sehingga informasi komparatif untuk tahun keuangan yang berakhir pada 31 Desember 2026 akan disajikan ulang sesuai dengan standar ini:

- PSAK 118 "Penyajian dan Pengungkapan dalam Laporan Keuangan"

Pada tanggal laporan keuangan ini, Perusahaan sedang mempelajari dampak yang mungkin timbul dari penerapan standar baru, amendemen dan interpretasi pada laporan keuangan Perusahaan.

2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION *(continued)*

a. Basis of preparation of the financial statements *(continued)*

Changes to SFAS and IFAS

The adoption of this amendments that is effective beginning 1 January 2025, did not result in substantial changes to the Company's accounting policies and had no material effect on the amounts reported for the current or prior financial years.

- *Amendment of SFAS 221 "The Effects of Changes in Foreign Exchange Rate" - Lack of Exchangeability*
- *SFAS 117 "Insurance Contracts"*

The adoption of this amendments that is effective beginning 1 January 2026, did not result in substantial changes to the Company's accounting policies and had no material effect on the amounts reported for the current or prior financial years.

- *Amendment of SFAS 109 and SFAS 107 "Classification and Measurement of Financial Instruments"*
- *Amendments to SFAS 109 and SFAS 107 of Contracts Referencing Nature-dependent Electricity*
- *Revision to SFAS No. 338 "Business Combinations of Entities Under Common Control"*

The adoption of the new standard is effective beginning 1 January 2027. Retrospective application is required, and the comparative information for the financial year ending 31 December 2026 will be restated in accordance with this standard:

- *SFAS 118 "Presentation and Disclosure in Financial Statements"*

As at the date of these financial statements, the Company is evaluating the potential impact of these new standards, amendments and interpretations on the Company's financial statements.

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

b. Penjabaran mata uang asing

i. Mata uang fungsional dan penyajian

Akun-akun yang dimuat dalam laporan keuangan Perusahaan diukur menggunakan mata uang yang sesuai dengan lingkungan ekonomi utama di mana Perusahaan beroperasi ("mata uang fungsional").

Laporan keuangan disajikan dalam Rupiah Indonesia ("Rp") yang merupakan mata uang fungsional dan penyajian Perusahaan.

ii. Transaksi dan saldo

Transaksi dalam mata uang asing dijabarkan menjadi mata uang fungsional menggunakan kurs yang berlaku pada tanggal transaksi. Pada tanggal pelaporan, setiap aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing disesuaikan untuk mencerminkan kurs yang berlaku pada tanggal tersebut. Keuntungan dan kerugian selisih kurs yang timbul dari penyelesaian transaksi dalam mata uang asing dan dari penjabaran aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing menggunakan kurs yang berlaku pada akhir tahun pelaporan diakui dalam laba rugi.

Kurs yang digunakan pada tanggal laporan posisi keuangan, berdasarkan kurs penutup yang diterbitkan Bank Indonesia, adalah sebagai berikut:

	2025	2024	
Dolar Amerika Serikat ("US$")	16,720	16,157	*United States Dollar ("US$")*

c. Transaksi pihak-pihak berelasi

Perusahaan telah melakukan transaksi dengan pihak-pihak berelasi tertentu, sesuai dengan PSAK No. 224, "Pengungkapan Pihak-pihak Berelasi" sebagai berikut:

a) Orang atau anggota keluarga dekatnya mempunyai relasi dengan entitas pelapor jika orang tersebut:
   (i) Memiliki pengendalian atau pengendalian bersama atas entitas pelapor;
   (ii) Memiliki pengaruh signifikan atas entitas pelapor; atau
   (iii) Merupakan personil manajemen kunci entitas pelapor atau entitas induk dari entitas pelapor

2. *MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION* *(continued)*

b. Foreign currency translation

i. Functional and presentation currency

Items included in the financial statements of the Company are measured using the currency of the primary economic environment in which the Company operates (the "functional currency").

The financial statements are presented in Indonesian Rupiah ("Rp"), which is the functional and presentation currency of the Company.

ii. Transactions and balances

Foreign currency transactions are translated into the functional currency using the exchange rates prevailing as at the date of the transactions. As at the reporting date, monetary assets and liabilities denominated in foreign currency were adjusted to reflect the exchange rates prevailing at this date. Foreign exchange gains and losses resulting from the settlement of such transactions and from the translation at year-end exchange rates of monetary assets and liabilities denominated in foreign currencies are recognised in profit or loss.

As at the statement of financial position dates, the exchange rates used, based on the closing rates published by Bank Indonesia, were as follows:

c. Transactions with related parties

The Company has performed transactions with certain related parties in accordance with SFAS No. 224, "Related Party Disclosures", as follows:

a) A person or a close member of that person's family is related to a reporting entity if that person:
   (i) Has control or joint control over the reporting entity;
   (ii) Has significant influence over the reporting entity; or
   (iii) Is a member of the key management personnel of the reporting entity or of a parent of the reporting entity.

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

d. Aset keuangan

i. Klasifikasi, pengakuan dan pengukuran

Perusahaan mengklasifikasikan aset keuangannya dalam kategori pengukuran berikut:
- aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi; dan
- aset keuangan yang diukur pada nilai wajar (baik melalui penghasilan komprehensif lain, atau melalui laba rugi).

Klasifikasi tersebut tergantung pada model bisnis entitas untuk mengelola aset keuangan dan persyaratan kontraktual arus kas apakah penentuan arus kas tersebut semata-mata dari pembayaran pokok pinjaman dan bunga.

Untuk aset yang diukur pada nilai wajar, keuntungan dan kerugian akan dicatat dalam laporan laba rugi atau penghasilan komprehensif lain. Untuk investasi pada instrumen utang, hal ini akan bergantung pada model bisnis dimana investasi tersebut diadakan. Untuk investasi pada instrumen ekuitas yang tidak dimiliki untuk diperdagangkan, hal ini akan tergantung pada apakah Perusahaan telah melakukan pemilihan tak terbatalkan pada saat pengakuan awal untuk mencatat investasi ekuitas pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain.

Perusahaan mereklasifikasi investasi utang jika dan hanya jika model bisnis untuk mengelola aset tersebut berubah.

Pada pengakuan awal, Perusahaan mengukur aset keuangan pada nilai wajarnya ditambah, dalam hal aset keuangan tidak diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi, biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung dengan perolehan aset keuangan. Biaya transaksi dari aset keuangan yang dicatat pada nilai wajar melalui laporan laba rugi dibebankan pada laba rugi.

Aset keuangan dengan derivatif melekat dipertimbangkan secara keseluruhan saat menentukan apakah arus kasnya hanya merupakan pembayaran pokok dan bunga.

Pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, Perusahaan hanya memiliki aset keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi.

2. *MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION* *(continued)*

d. Financial assets

i. Classification, recognition and measurement

The Company classifies its financial assets in the following measurement categories:

- *financial assets to be measured at amortised cost; and*
- *financial assets to be measured at fair value (either through other comprehensive income ("FVOCI"), or through profit or loss) ("FVTPL").*

The classification depends on the entity's business model for managing the financial assets and the contractual terms of the cash flows are solely payment of principle and interest ("SPPI").

For assets measured at fair value, gains and losses will either be recorded in profit or loss or other comprehensive income. For investments in debt instruments, this will depend on the business model in which the investment is held. For investments in equity instruments that are not held for trading, this will depend on whether the Company has made an irrevocable election at the time of initial recognition to account for the equity investment at fair value through other comprehensive income.

The Company reclassifies debt investments when and only when its business model for managing such assets changes.

At initial recognition, the Company measures a financial asset at its fair value plus, in the case of a financial asset not at fair value through profit or loss, transaction costs that are directly attributable to the acquisition of the financial asset. Transaction costs of financial assets carried at fair value through profit or loss are expensed in profit or loss.

Financial assets with embedded derivatives are considered in their entirety when determining whether their cash flows are solely payments of principal and interest.

As at 31 December 2025 and 2024, the Company only had financial assets measured at amortised cost.

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2025
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2025
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

d. Aset keuangan (lanjutan)

i. Klasifikasi, pengakuan dan pengukuran (lanjutan)

Instrumen utang

Pengukuran selanjutnya instrumen utang bergantung pada model bisnis Perusahaan dalam mengelola aset dan karakteristik arus kas dari aset tersebut. Ada tiga kategori pengukuran yang Perusahaan mengklasifikasikan instrumen utangnya:

- Biaya perolehan diamortisasi : Aset yang dimiliki untuk mengumpulkan arus kas kontraktual dimana arus kas tersebut hanya mewakili pembayaran pokok dan bunga diukur dengan biaya perolehan diamortisasi. Keuntungan atau kerugian dari investasi utang yang selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi dan bukan merupakan bagian dari hubungan lindung nilai, diakui dalam laporan laba rugi pada saat aset tersebut dihentikan pengakuannya atau penurunan nilainya. Pendapatan bunga dari aset keuangan tersebut dimasukkan ke dalam pendapatan keuangan dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

- Nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain: Aset yang dimiliki untuk mendapatkan arus kas kontraktual dan untuk menjual aset keuangan, di mana arus kas aset tersebut hanya atas pembayaran pokok dan bunga, diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain. Perubahan nilai tercatat dilakukan melalui penghasilan komprehensif lain, kecuali untuk pengakuan keuntungan atau kerugian penurunan nilai, pendapatan keuangan dan keuntungan dan kerugian selisih kurs yang diakui dalam laba rugi. Ketika aset keuangan dihentikan pengakuannya, keuntungan atau kerugian kumulatif yang sebelumnya diakui di penghasilan komprehensif lain direklasifikasi dari ekuitas ke laba rugi dan diakui dalam pendapatan lain-lain, bersih. Pendapatan keuangan dari aset keuangan tersebut dimasukkan ke dalam pendapatan keuangan dengan menggunakan metode suku bunga efektif. Keuntungan dan kerugian selisih kurs disajikan dalam penghasilan lain-lain, bersih dan beban penurunan nilai pada beban lain-lain.

2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION *(continued)*

d. Financial assets *(continued)*

i. Classification, recognition and measurement *(continued)*

Debt instruments

Subsequent measurement of debt instruments depends on the Company's business model for managing the asset and the cash flow characteristics of the asset. There are three measurement categories into which the Company classifies its debt instruments:

- *Amortised cost: Assets that are held for the collection of contractual cash flows in cases where such cash flows represent solely payments of principal and interest are measured at amortised cost. A gain or loss on a debt investment that is subsequently measured at amortised cost and that is not part of a hedging relationship is recognised in profit or loss when the asset is derecognised or impaired. Interest income from these financial assets is included in finance income using the effective interest rate method.*

- *FVOCI: Assets that are held for the collection of contractual cash flows and for selling the financial assets, in cases where the assets' cash flows represent solely payments of principal and interest, are measured at fair value through other comprehensive income. Movements in the carrying amount are taken through other comprehensive income, except for the recognition of impairment gains or losses, interest revenue and foreign exchange gains and losses which are recognised in profit or loss. When the financial asset is derecognised, the cumulative gain or loss previously recognised in other comprehensive income is reclassified from equity to profit or loss and recognised in other income, net. Financial income from these financial assets is included in finance income using the effective interest rate method. Foreign exchange gains and losses are presented in other income, net and impairment expenses in other expenses.*

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

d. Aset keuangan (lanjutan)

i. Klasifikasi, pengakuan dan pengukuran (lanjutan)

Instrumen utang (lanjutan)

- Nilai wajar melalui laba rugi: Aset yang tidak memenuhi kriteria untuk biaya perolehan diamortisasi atau nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi. Keuntungan atau kerugian dari investasi utang yang selanjutnya diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi dan bukan merupakan bagian dari hubungan lindung nilai, diakui dalam laporan laba rugi dan disajikan bersih dalam laporan laba rugi di dalam penghasilan lain-lain, bersih dalam periode kemunculannya.

ii. Penghentian pengakuan

Aset keuangan dihentikan pengakuannya ketika hak untuk menerima arus kas dari investasi tersebut telah jatuh tempo atau telah ditransfer dan Perusahaan telah mentransfer secara substansial seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset.

iii. Saling hapus antar instrumen keuangan

Aset keuangan dan liabilitas keuangan disalinghapuskan dan jumlah netonya dilaporkan pada laporan posisi keuangan ketika terdapat hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui tersebut dan adanya niat untuk menyelesaikan secara neto, atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitas secara bersamaan. Hak saling hapus tidak kontinjen atas peristiwa di masa depan dan dapat dipaksakan secara hukum dalam situasi bisnis yang normal dan dalam peristiwa gagal bayar, atau peristiwa kepailitan atau kebangkrutan Perusahaan atau pihak lawan.

2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION *(continued)*

d. Financial assets *(continued)*

i. Classification, recognition and measurement *(continued)*

Debt instruments (continued)

- *FVTPL: Assets that do not meet the criteria for amortised cost or fair value through other comprehensive income are measured at fair value through profit or loss. A gain or loss on a debt investment that is subsequently measured at fair value through profit or loss and that is not part of a hedging relationship is recognised in profit or loss and presented net in the statement of profit or loss within other income, net in the period in which it arises.*

ii. Derecognition

Financial assets are derecognised when the rights to receive cash flows from the investments have expired or have been transferred and the Company has transferred substantially all the risks and rewards of ownership.

iii. Offsetting financial instruments

Financial assets and liabilities are offset and the net amount is reported in the statement of financial position when there is a legally enforceable right to offset the recognised amounts and there is an intention to settle on a net basis, or realise the asset and settle the liability simultaneously. Such right of set-off is not dependent on a future event and is legally enforceable in the normal course of business and in the event of default, insolvency, or bankruptcy of the Company or the counterparty.

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

e. Penurunan nilai aset keuangan

Pada setiap periode pelaporan, Perusahaan menilai apakah risiko kredit dari instrumen keuangan telah meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal. Ketika melakukan penilaian, Perusahaan menggunakan perubahan atas risiko gagal bayar yang terjadi sepanjang perkiraan usia instrumen keuangan daripada perubahan atas jumlah Kerugian Kredit Ekspektasian ("KKE"). Dalam melakukan penilaian, Perusahaan membandingkan antara risiko gagal bayar yang terjadi atas instrumen keuangan pada saat periode pelaporan dengan risiko gagal bayar yang terjadi atas instrumen keuangan pada saat pengakuan awal dan mempertimbangkan kewajaran serta ketersediaan informasi yang tersedia pada saat tanggal pelaporan terkait dengan kejadian masa lalu, kondisi terkini dan perkiraan atas kondisi ekonomi di masa depan, yang mengindikasikan kenaikan risiko kredit sejak pengakuan awal.

Perusahaan menerapkan "pendekatan yang disederhanakan" untuk mengukur KKE yang menggunakan cadangan KKE seumur hidup untuk seluruh saldo piutang usaha dan piutang non-usaha dan aset kontrak tanpa komponen pendanaan yang signifikan. Penelaahan KKE termasuk asumsi mengenai risiko gagal bayar dan tingkat kerugian ekspektasian. Untuk mengukur KKE, piutang usaha telah dikelompokkan berdasarkan karakteristik risiko kredit dan jatuh tempo yang serupa, terkecuali kepada piutang-piutang yang dapat dinilai sendiri kerugian kredit ekspektasiannya.

f. Kas dan setara kas

Kas dan setara kas mencakup kas di bank dan deposito berjangka dengan jangka waktu tiga bulan atau kurang, setelah dikurangi cerukan (jika ada).

g. Piutang usaha dan piutang non-usaha

Piutang usaha adalah jumlah piutang pelanggan atas jasa yang diberikan sehubungan dengan kegiatan usaha biasa. Piutang non-usaha adalah jumlah piutang pihak ketiga atau pihak berelasi di luar kegiatan usaha biasa. Jika piutang diperkirakan dapat ditagih dalam waktu satu tahun atau kurang, piutang diklasifikasikan sebagai aset lancar. Jika tidak, piutang disajikan sebagai aset tidak lancar pada laporan posisi keuangan.

***2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION** (continued)*

e. Impairment of financial assets

At each reporting date, the Company assesses whether the credit risk on a financial instrument has increased significantly since initial recognition. In making this assessment, the Company considers the change in the risk of default occurring over the expected life of the financial instrument, rather than the change in the amount of Expected Credit Losses ("ECL"). For this purpose, the Company compares the risk of default on the financial instrument at the reporting date with the risk of default at initial recognition, and considers reasonable and supportable information available at the reporting date regarding past events, current conditions, and forecasts of future economic conditions that indicate an increase in credit risk since initial recognition.

The Company applies the simplified approach in measuring ECL, which uses lifetime ECL allowance for all trade receivables, non-trade receivables, and contract assets that do not contain a significant financing component. The ECL assessment includes assumptions regarding the risk of default and the expected loss rate. In measuring ECL, trade receivables are grouped based on similar credit risk characteristics and due dates, except for receivables for which the expected credit losses can be assessed individually.

f. Cash and cash equivalents

Cash and cash equivalents include cash in banks and time deposits with a maturity of three months or less, net of overdrafts (if any).

g. Trade and non-trade receivables

Trade receivables are amounts due from customers for services rendered in the ordinary course of business. Non-trade receivables are amounts due from third parties or related parties arising outside the ordinary course of business. Receivables are classified as current assets if they are expected to be collected within one year or less; otherwise, they are classified as non-current assets.

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

g. Piutang usaha dan piutang non-usaha (lanjutan)

Piutang usaha dan piutang lain-lain pada awalnya diakui sebesar imbalan yang tidak bersyarat, kecuali jika piutang tersebut mengandung komponen pendanaan yang signifikan, dalam hal ini mereka diakui pada nilai wajar. Selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif, dikurangi penyisihan kerugian.

Kerugian penurunan nilai piutang disajikan sebagai bagian dari beban usaha pada laba rugi. Jumlah yang selanjutnya dapat dipulihkan kembali atas piutang yang sebelumnya telah dihapusbukukan, dikreditkan terhadap item baris yang sama.

h. Aset tetap

Pada awalnya, aset tetap dinyatakan sebesar biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dan penurunan nilai, jika ada. Biaya perolehan mencakup pengeluaran yang dapat diatribusikan secara langsung dengan perolehan barang tersebut. Biaya legal awal untuk mendapatkan hak legal diakui sebagai bagian biaya akuisisi tanah dan biaya-biaya tersebut tidak didepresiasikan.

Penyusutan dihitung dengan menggunakan metode garis lurus. Tanah tidak disusutkan. Kecuali untuk tanah, penyusutan atas aset tetap berdasarkan estimasi masa manfaat sebagai berikut:

	Tahun/*Years*	
Bangunan	10	*Building*
Mesin dan peralatan	30 – 40	*Machinery and equipment*
Perlengkapan pengolahan data	10	*Processing equipment*
Perlengkapan telekomunikasi	10	*Telecommunication equipment*
Perlengkapan umum	5	*General equipment*
Kendaraan bermotor	5	*Motor vehicle*

Nilai sisa aset, masa manfaat dan metode penyusutan ditelaah dan jika perlu disesuaikan, pada setiap akhir periode pelaporan.

Biaya selanjutnya termasuk dalam jumlah tercatat aset atau diakui sebagai aset terpisah, jika sesuai, hanya jika kemungkinan besar manfaat ekonomi masa depan terkait dengan item tersebut akan mengalir ke Perusahaan dan biaya item tersebut dapat diukur dengan andal. Nilai tercatat suku cadang yang diganti dihentikan pengakuannya.

2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION *(continued)*

g. Trade and non-trade receivables *(continued)*

Trade receivables and other receivables are initially recognised at the amount of unconditional consideration, unless they contain a significant financing component, in which case they are recognised at fair value. Subsequent to initial recognition, these receivables are measured at amortised cost using the effective interest method, less allowance for impairment losses.

Impairment losses on receivables are presented as part of operating expenses in profit or loss. Recoveries of receivables previously written off are recognised as a credit to the same expense line item.

h. Fixed assets

Fixed assets are initially stated at cost less accumulated depreciation and impairment, if any. Historical cost includes expenditure that is directly attributable to the acquisition of the items. Initial legal costs incurred to obtain legal rights are recognised as part of the acquisition cost of the land and these costs are not depreciated.

Depreciation is calculated using the straight- line method. Land is not depreciated. Except for land, fixed assets are depreciated based on the following estimated useful lives;

The assets' residual values, useful lives and depreciation methods are reviewed and adjusted if appropriate, at the end of each reporting period.

Subsequent costs are included in the asset's carrying amount or recognised as a separate asset, as appropriate, only when it is probable that future economic benefits associated with the item will flow to the Company and the cost of the item can be measured reliably. The carrying amounts of replaced parts are derecognised.

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

h. Aset tetap (lanjutan)

Nilai tercatat aset segera diturunkan sebesar jumlah yang dapat dipulihkan jika nilai tercatat aset lebih besar dari estimasi jumlah yang dapat dipulihkan.

Keuntungan atau kerugian bersih atas pelepasan aset tetap ditentukan dengan membandingkan hasil yang diterima dengan nilai tercatat dan diakui pada "penghasilan lain-lain – bersih" dalam laporan laba rugi.

Pekerjaan dalam pelaksanaan ("PDP")

PDP merupakan biaya-biaya yang berhubungan langsung dengan pembangunan aset tetap. PDP dinyatakan sebesar biaya perolehan, termasuk biaya pinjaman selama masa pembangunan dari pinjaman yang digunakan untuk pembangunan. PDP akan dipindahkan ke aset tetap yang bersangkutan pada saat selesai dan siap digunakan. Penyusutan dimulai pada saat aset tersebut siap untuk digunakan sesuai dengan tujuan yang diinginkan manajemen.

i. Penurunan nilai aset non-keuangan

Aset yang memiliki masa manfaat yang tidak terbatas tidak diamortisasi namun diuji penurunan nilainya setiap tahun atau lebih sering apabila terdapat peristiwa atau perubahan pada kondisi yang mengindikasikan kemungkinan penurunan nilai. Aset yang diamortisasi diuji ketika terdapat indikasi bahwa nilai tercatatnya mungkin tidak dapat dipulihkan. Penurunan nilai diakui jika nilai tercatat aset melebihi jumlah terpulihkan. Jumlah terpulihkan adalah yang lebih tinggi antara nilai wajar aset dikurangi biaya untuk menjual dan nilai pakai aset. Untuk tujuan menentukan penurunan nilai, aset dikelompokkan pada tingkat yang paling rendah dimana terdapat arus kas yang dapat diidentifikasi (unit penghasil kas).

Aset non-keuangan, selain *goodwill*, yang mengalami penurunan nilai diuji setiap tanggal pelaporan untuk menentukan apakah terdapat kemungkinan pembalikan penurunan nilai.

***2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION** (continued)*

***h. Fixed assets** (continued)*

An asset's carrying amount is written down immediately to its recoverable amount if the asset's carrying amount is greater than its estimated recoverable amount.

Net gains or losses on disposals are determined by comparing the proceeds with the carrying amount and are recognised within "other income – net" in profit or loss.

Construction in progress ("CIP")

CIP represents costs directly attributable to the construction of property and equipment. CIP is stated at cost, including borrowing costs incurred during the construction period on borrowings used to finance the construction. CIP is reclassified to the relevant property and equipment account when the construction is completed and the asset is ready for its intended use. Depreciation commences when the asset is ready for its intended use by management.

i. Impairment of non-financial assets

Assets that have an indefinite useful life are not subject to amortisation but are tested annually for impairment or more frequently if events or changes in circumstances indicate that they might be impaired. Assets that are subject to amortisation are reviewed for impairment whenever events or changes in circumstances indicate that the carrying value may not be recoverable. An impairment loss is recognised for the amount by which the asset's carrying value exceeds its recoverable amount. The recoverable amount is the higher of an asset's fair value less costs to sell and its value in use. For the purposes of assessing impairment, assets are grouped at the lowest level for which there are separately identifiable cash flows (cash generating units).

Non-financial assets, other than goodwill, that suffer impairment are reviewed for possible reversal of the impairment at each reporting date.

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

i. Penurunan nilai aset non-keuangan (lanjutan)

Pembalikan rugi penurunan nilai untuk aset selain *goodwill*, diakui jika dan hanya jika, terdapat perubahan estimasi yang digunakan dalam menentukan jumlah terpulihkan aset sejak pengujian penurunan nilai terakhir kali dilakukan. Pembalikan rugi penurunan nilai tersebut diakui segera dalam laba rugi. Pembalikan tersebut tidak boleh mengakibatkan nilai tercatat aset melebihi biaya perolehan disusutkan sebelum adanya pengakuan penurunan nilai pada tanggal pembalikan dilakukan. Rugi penurunan nilai yang diakui atas *goodwill* tidak dibalik lagi.

Beban dan pembalikan penurunan nilai disajikan secara terpisah dalam laba rugi, setelah penyajian laba usaha.

j. Utang usaha dan utang lain-lain

Utang usaha adalah kewajiban untuk membayar barang atau jasa yang diperoleh dari pemasok dalam kegiatan usaha biasa. Utang lain-lain adalah kewajiban untuk membayar barang atau jasa yang diperoleh dari pemasok diluar kegiatan usaha biasa. Utang usaha dan utang lain-lain diklasifikasikan sebagai liabilitas jangka pendek bila pembayaran dilakukan dalam jangka waktu satu tahun atau kurang. Bila tidak, akan disajikan sebagai liabilitas jangka panjang.

k. Pinjaman

Pinjaman diakui pada awalnya sebesar nilai wajar, dikurangi dengan biaya transaksi yang terjadi. Pinjaman kemudian dicatat sebesar biaya perolehan diamortisasi; selisih antara penerimaan (dikurangi biaya transaksi) dan nilai pelunasan dicatat pada laba rugi selama periode pinjaman dengan menggunakan metode bunga efektif.

2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION *(continued)*

i. Impairment of non-financial assets *(continued)*

Reversal of impairment losses for assets other than goodwill would be recognised, if and only if, there has been a change in the estimates used to determine the asset's recoverable amount since the last impairment test was carried out. Reversal of impairment losses will be immediately recognised in profit or loss. The reversal should not result in the carrying amount of an asset exceeding what the depreciated cost would have been had the impairment not been recognised as the date of which the impairment was reversed. Impairment losses relating to goodwill would not be reversed.

Impairment charges and reversals are disclosed in a separate line item within profit or loss, below the operating profit line.

j. Trade and other payables

Trade payables are obligations to pay for goods or services that have been acquired in the ordinary course of business from suppliers. Other payables are obligations to pay for goods or services that have been acquired outside of the ordinary course of business. Trade and other payables are classified as current liabilities if payment is due within one year or less. If not, they are presented as non-current liabilities.

k. Borrowings

Borrowings are initially recognised at fair value, net of transaction costs incurred. Borrowings are subsequently stated at amortised cost; any difference between the proceeds (net of transaction costs) and the redemption value is recognised in profit or loss over the period of the borrowing using the effective interest method.

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

k. Pinjaman (lanjutan)

Biaya-biaya yang dibayar untuk mendapatkan fasilitas pinjaman diakui sebagai biaya pinjaman tersebut, apabila kemungkinan akan dilakukan penarikan atas sebagian atau seluruh fasilitas tersebut. Dalam hal ini, biaya ditangguhkan sampai penarikan terjadi. Sepanjang tidak terdapat bukti bahwa besar kemungkinan sebagian atau seluruh fasilitas akan ditarik, biaya-biaya ini dikapitalisasi sebagai pembayaran di muka untuk jasa likuiditas dan diamortisasi selama periode fasilitas yang terkait.

Pinjaman akan dihentikan pengakuannya dari laporan posisi keuangan ketika kewajiban yang tertulis pada kontrak diselesaikan, dibatalkan, atau sudah tidak berlaku. Selisih antara nilai tercatat dari liabilitas keuangan yang sudah berakhir atau dialihkan ke pihak lain dan imbalan yang dibayarkan, termasuk aset non kas yang dialihkan atau liabilitas yang ditanggung, diakui dalam laba rugi sebagai pendapatan lain-lain atau biaya keuangan.

Pinjaman diklasifikasikan sebagai liabilitas jangka pendek kecuali Perusahaan memiliki hak tanpa syarat untuk menunda pembayaran liabilitas selama paling tidak 12 bulan setelah tanggal pelaporan.

l. Biaya pinjaman

Biaya bunga dan biaya pinjaman lainnya baik yang secara langsung ataupun tidak langsung dapat diatribusikan dengan akuisisi, konstruksi atau produksi aset kualifikasian, dikapitalisasi sebagai bagian biaya perolehan aset tersebut sampai aset tersebut siap untuk digunakan sesuai dengan maksudnya atau dijual. Untuk pinjaman yang dapat diatribusi secara langsung pada suatu aset kualifikasian, jumlah yang dikapitalisasi adalah sebesar biaya pinjaman yang terjadi selama tahun berjalan, dikurangi pendapatan investasi jangka pendek dari pinjaman tersebut. Untuk pinjaman yang tidak dapat diatribusi secara langsung pada suatu aset kualifikasian. Tingkat kapitalisasi dihitung berdasarkan rata-rata tertimbang biaya pinjaman yang dibagi dengan jumlah pinjaman yang tersedia selama periode, selain pinjaman yang secara spesifik diambil untuk tujuan memperoleh suatu aset kualifikasian.

***2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION** (continued)*

***k. Borrowings** (continued)*

Fees paid on the establishment of loan facilities are recognised as transaction costs of the loan, granted that it is probable that some or all of the facilities will be drawn down. In this case, the fee is deferred until draw-down occurs. To the extent that there is no evidence that it is probable that some or all of the facility will be drawn down, the fee is capitalised as a prepayment for liquidity services and amortised over the period of the facility to which it relates.

Borrowings are derecognised from the statement of financial position when the obligation specified in the contract is discharged, cancelled, or expires. The difference between the carrying amount of the financial liability derecognized or transferred to another party and the consideration paid, including any non-cash assets transferred or liabilities assumed, is recognized in profit or loss as other income or finance costs.

Borrowings are classified as current liabilities unless the Company has an unconditional right to defer the settlement of the liability for at least 12 months after the reporting date.

l. Borrowing costs

Interest costs and other borrowing costs, whether directly or indirectly attributable to the acquisition, construction, or production of a qualifying asset, are 14apitalizat as part of the cost of that asset until the asset is ready for its intended use or sale. For borrowings that are directly attributable to a qualifying asset, the amount of borrowing costs eligible for 14apitalization is the actual borrowing costs incurred during the year, less any investment income earned from the temporary investment of those borrowings. For borrowings that are not directly attributable to a qualifying asset, the 14 apitalization rate is determined based on the weighted average of the borrowing costs applicable to the borrowings outstanding during the period, excluding borrowings made specifically for the purpose of obtaining a qualifying asset.

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

m. Sewa

Perusahaan sebagai pemberi sewa

Ketika Perusahaan bertindak sebagai pemberi sewa, Perusahaan akan mengklasifikasi masing-masing sewanya, baik sewa operasi atau sewa pembiayaan.

Untuk mengklasifikasi masing-masing sewa, Perusahaan membuat penilaian secara keseluruhan atas apakah sewa mengalihkan secara substansial seluruh risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan aset pendasar. Jika penilaian membuktikan hal tersebut, maka sewa diklasifikasikan sebagai sewa pembiayaan; jika tidak, maka diklasifikasikan sebagai merupakan sewa operasi.

Pendapatan sewa dari sewa operasi dimana Perusahaan bertindak sebagai pesewa diakui sebagai pendapatan secara garis lurus selama masa sewa. Biaya langsung awal yang terjadi saat mendapatkan sewa operasi ditambahkan pada nilai tercatat aset pendasar dan diakui sebagai beban selama masa sewa dengan basis yang sama dengan pendapatan sewa. Aset terkait yang disewakan ditampilkan di laporan posisi keuangan berdasarkan sifatnya.

Perusahaan sebagai penyewa

Penentuan apakah suatu perjanjian merupakan, atau mengandung, sewa dibuat berdasarkan substansi perjanjian itu sendiri dan penilaian apakah pemenuhan atas perjanjian bergantung dari penggunaan aset tertentu atau aset, dan apakah perjanjian memberikan hak untuk menggunakan aset.

Perusahaan menyewa aset tetap tertentu. Kontrak sewa biasanya dibuat untuk periode tetap dari 1 hingga 20 tahun tetapi mungkin memiliki opsi ekstensi. Kontrak dapat berisi komponen sewa dan non-sewa berdasarkan harga relatif yang berdiri sendiri.

Sewa diakui sebagai aset hak guna dan liabilitas terkait pada tanggal di mana aset sewaan tersedia untuk digunakan oleh Perusahaan.

2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION *(continued)*

m. Leases

The Company as a lessor

When the Company acts as a lessor, the Company will classify each of its leases as either an operating lease or a finance lease.

To classify each lease, the Company makes an overall assessment of whether the lease transfers substantially all of the risks and rewards incidental to ownership of the underlying asset. If this is the case, then the lease is classified as a finance lease; if not, then it is classified as an operating lease.

Lease income from operating leases where the Company is a lessor is recognised in income on a straight-line basis over the lease term. Initial direct costs incurred in obtaining an operating lease are added to the carrying amount of the underlying asset and recognised as expense over the lease term on the same basis as lease income. The respective leased assets are included in the statement of financial position based on their nature.

The Company as lessee

Determination of whether an arrangement is, or contains, a lease is made based on the substance of the arrangement and an assessment of whether the fulfilment of the arrangement is dependent on the use of a specific asset or assets, and the arrangement conveys a right to use the asset.

The Company leases certain property, plant and equipment. The rental contracts are typically made for fixed periods of 1 to 20 years but may have extension options. Contracts may contain both lease and non-lease components based on their relative stand-alone prices.

Leases are recognised as a right-of-use asset and a corresponding liability at the date on which the leased asset is available for use by the Company.

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

m. Sewa (lanjutan)

Perusahaan sebagai penyewa (lanjutan)

Aset dan liabilitas yang timbul dari sewa pada awalnya diukur dengan basis nilai kini. Liabilitas sewa termasuk nilai bersih sekarang dari pembayaran sewa berikut:

- pembayaran tetap (termasuk pembayaran tetap secara substansi), dikurangi piutang insentif sewa;
- pembayaran sewa variabel yang didasarkan pada indeks atau tingkat, pada awalnya diukur menggunakan indeks atau tingkat pada tanggal mulai;
- jumlah yang diperkirakan akan dibayarkan oleh penyewa berdasarkan jaminan nilai residu;
- harga pelaksanaan dari opsi pembelian jika penyewa cukup yakin untuk menggunakan opsi tersebut; dan
- pembayaran penalti untuk penghentian sewa, jika masa sewa mencerminkan penyewa yang melaksanakan opsi tersebut.

Pembayaran sewa yang harus dilakukan berdasarkan opsi perpanjangan tertentu juga termasuk dalam pengukuran liabilitas.

Pembayaran sewa didiskontokan dengan menggunakan suku bunga implisit dalam sewa. Jika tarif tidak dapat segera ditentukan, di mana hal tersebut secara umum terjadi pada sewa dalam Perusahaan, suku bunga pinjaman inkremental penyewa digunakan, yaitu tarif yang harus dibayar oleh penyewa untuk meminjam dana yang diperlukan untuk memperoleh aset dengan nilai yang sama dengan aset hak guna dalam lingkungan ekonomi serupa dengan syarat dan ketentuan yang serupa.

Untuk menentukan suku bunga pinjaman inkremental, Perusahaan:

- jika memungkinkan, menggunakan pembiayaan pihak ketiga terkini yang diterima oleh penyewa individu sebagai titik awal, disesuaikan untuk mencerminkan perubahan kondisi pembiayaan sejak pembiayaan pihak
- ketiga diterima;
- menggunakan pendekatan build-up yang dimulai dengan suku bunga bebas risiko yang disesuaikan dengan risiko kredit untuk sewa yang dimiliki oleh Perusahaan, yang tidak memiliki pembiayaan pihak ketiga
- baru-baru ini; dan
- membuat penyesuaian spesifik untuk sewa, misalnya jangka waktu, mata uang dan jaminan.

2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION *(continued)*

m. Leases *(continued)*

The Company as lessee (continued)

Assets and liabilities arising from a lease are initially measured on a present value basis. Lease liabilities include the net present value of the following lease payments:

- *fixed payments (including in-substance fixed payments), less any lease incentives receivable;*
- *variable lease payments that are based on an index or a rate, initially measured using the index or rate as at the commencement date;*
- *amounts expected to be payable by the lessee under residual value guarantees;*
- *the exercise price of a purchase option if the lessee is reasonably certain to exercise that option; and*
- *payments of penalties for terminating the lease, if the lease term reflects the lessee exercising that option.*

Lease payments to be made under reasonably certain extension options are also included in the measurement of the liability.

The lease payments are discounted using the interest rate implicit in the lease. If the rate cannot be readily determined, which is generally the case for leases in the Company, the lessee's incremental borrowing rate is used, being the rate that the individual lessee would have to pay to borrow the funds necessary to obtain an asset of similar value to the right-of-use asset in a similar economic environment with similar terms, security and conditions.

To determine the incremental borrowing rate, the Company:

- *where possible, uses recent third-party financing received by the individual lessee as a starting point, adjusted to reflect changes in financing conditions since third party financing was received;*
- *uses a build-up approach that starts with a risk-free interest rate adjusted for credit risk for leases held by the Company, which does not have recent third-party financing; and*
- *makes adjustments specific to the lease, e.g. term, currency and security.*

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

m. Sewa (lanjutan)

Perusahaan sebagai penyewa (lanjutan)

Perusahaan dihadapkan pada potensi kenaikan di masa depan dalam pembayaran sewa variabel berdasarkan indeks atau tarif yang tidak termasuk dalam liabilitas sewa sampai diberlakukan. Ketika penyesuaian pembayaran sewa berdasarkan indeks atau suku bunga mulai berlaku, liabilitas sewa dinilai kembali dan disesuaikan dengan aset hak guna.

Pembayaran sewa dialokasikan antara biaya pokok dan keuangan. Biaya keuangan dibebankan pada laporan laba rugi selama masa sewa sehingga menghasilkan suku bunga periodik yang konstan atas sisa saldo liabilitas untuk setiap tahun.

Aset hak guna diukur pada biaya perolehan yang terdiri dari berikut ini:

- jumlah pengukuran awal liabilitas sewa;
- pembayaran sewa yang dilakukan pada atau sebelum tanggal dimulainya dikurangi insentif sewa yang diterima;
- biaya langsung awal; dan
- biaya restorasi.

Aset hak guna umumnya disusutkan sepanjang waktu yang lebih pendek antara lama masa manfaat aset dan jangka waktu sewa menggunakan metode garis lurus. Jika Perusahaan cukup yakin untuk melaksanakan opsi pembelian, aset hak guna disusutkan selama masa manfaat aset yang mendasarinya.

Pembayaran terkait dengan sewa jangka pendek dan sewa aset bernilai rendah diakui atas dasar garis lurus sebagai beban dalam laporan laba rugi. Sewa jangka pendek adalah sewa dengan masa sewa 12 bulan atau kurang. Aset bernilai rendah terdiri dari perlengkapan umum.

Sewa jangka-pendek

Perusahaan memutuskan untuk tidak mengakui aset hak-guna dan liabilitas sewa untuk sewa jangka-pendek yang memiliki masa sewa 12 bulan atau kurang. Perusahaan mengakui pembayaran sewa atas sewa tersebut sebagai beban dengan dasar garis lurus selama masa sewa.

2. *MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION* *(continued)*

m. Leases *(continued)*

The Company as lessee (continued)

The Company is exposed to potential future increases in variable lease payments based on an index or rate which are not included in the lease liability until they take effect. When adjustments to lease payments based on an index or rate take effect, the lease liability is reassessed and adjusted against the right-of-use asset.

Lease payments are allocated between principal and finance cost. The finance cost is charged to profit or loss over the lease period so as to produce a constant periodic rate of interest on the remaining balance of the liability for each year.

Right-of-use assets are measured at cost comprising the following:

- *the amount of the initial measurement of the lease liability;*
- *any lease payments made at or before the commencement date less any lease incentives received;*
- *any initial direct costs; and*
- *biaya restorasi.*

Right-of-use assets are generally depreciated over the shorter of the asset's useful life and the lease term on a straight-line basis. If the Company is reasonably certain to exercise a purchase option, the right-of-use assets are depreciated over the underlying asset's useful life.

Payments associated with short-term leases and leases of low-value assets are recognised on a straight-line basis as an expense in profit or loss. Short-term leases are leases with a lease term of 12 months or less. Low-value assets comprise general equipment.

Short-term leases

The Company has elected not to recognise right-of-use assets and lease liabilities for short-term leases that have a lease term of 12 months or less. The Company recognises the lease payments associated with these leases as an expense on a straight-line basis over the lease term.

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

m. Sewa (lanjutan)

Modifikasi sewa

Perusahaan mencatat modifikasi sewa sebagai sewa terpisah jika:

- modifikasi meningkatkan ruang lingkup sewa dengan menambahkan hak untuk menggunakan satu aset pendasar atau lebih; dan
- imbalan sewa meningkat sebesar jumlah yang setara dengan harga tersendiri untuk peningkatan dalam ruang lingkup dan penyesuaian yang tepat pada harga tersendiri tersebut untuk merefleksikan kondisi kontrak tertentu.

Untuk modifikasi sewa yang tidak dicatat sebagai sewa terpisah, pada tanggal efektif modifikasi sewa, penyewa harus:

- mengalokasikan imbalan kontrak modifikasian;
- menentukan masa sewa dari sewa modifikasian;
- mengukur kembali liabilitas sewa dengan mendiskontokan pembayaran sewa revisian menggunakan tingkat diskonto revisian. Tingkat diskonto revisian ditentukan sebagai suku bunga implisit dalam sewa untuk sisa masa sewa, jika dapat ditentukan; atau suku bunga pinjaman inkremental penyewa pada tanggal efektif modifikasi, jika suku bunga implisit dalam sewa tidak dapat ditentukan;
- menurunkan jumlah tercatat aset hak guna untuk merefleksikan penghentian parsial atau penuh sewa untuk modifikasi sewa yang menurunkan ruang lingkup sewa.Penyewa mengakui dalam laba rugi setiap keuntungan atau kerugian yang terkait dengan penghentian parsial atau penuh sewa tersebut; dan
- membuat penyesuaian terkait dengan aset hak guna untuk seluruh modifikasi sewa lainnya.

2. *MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION* *(continued)*

m. *Leases* *(continued)*

Lease modification

The Company accounts for a lease modification as a separate lease if both:

- *the modification increases the scope of the lease by adding the right to use one or more underlying assets; and*
- *the consideration for the lease increases by an amount commensurate with the stand-alone price for the increase in scope and any appropriate adjustments to that stand-alone price to reflect the circumstances of the particular contract.*

For a lease modification that is not accounted for as a separate lease, at the effective date of the lease modification, a lessee shall:

- *allocate the consideration in the modified contract;*
- *determine the lease term of the modified lease;*
- *remeasure the lease liability by discounting the revised lease payments using a revised discount rate. The revised discount rate is determined as the interest rate implicit in the lease for the remainder of the lease term, if that rate can be readily determined, or the lessee's incremental borrowing rate at the effective date of the modification, if the interest rate implicit in the lease cannot be readily determined;*
- *decreasing the carrying amount of the right-of-use asset to reflect the partial or full termination of the lease for lease modifications that decrease the scope of the lease. The lessee shall recognise in profit or loss any gain or loss relating to the partial or full termination of the lease; and*
- *making a corresponding adjustment to the right-of-use asset for all other lease modifications.*

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

m. Sewa (lanjutan)

Subsewa

Perusahaan sebagai penyewa aset tetap tertentu juga menyewakan kembali aset tetap tersebut ke penyewa. Dalam transaksi ini, Perusahaan bertindak sebagai *intermediate lessor*. Ketika *intermediate lessor* melakukan transaksi subsewa, *intermediate lessor*:

- menghentikan pengakuan aset hak-guna untuk aset tetap tertentu yang disewakan kembali ke penyewa dan mengakui piutang sewa pembiayaan.
- mengakui selisih antara aset hak-guna dan piutang sewa pembiayaan tersebut di laba rugi.
- tetap mengakui liabilitas sewa yang berhubungan dengan aset tetap tertentu tersebut.
- mengakui penghasilan keuangan dari subsewa dan beban keuangan dari sewa utamanya selama periode subsewa.

n. Provisi

Provisi diakui ketika Perusahaan memiliki kewajiban kini (baik bersifat hukum maupun konstruktif) sebagai akibat peristiwa masa lalu dankemungkinan besar Perusahaan diharuskan menyelesaikan kewajiban dan estimasi andal mengenai jumlah kewajiban tersebut dapat dibuat.

Jumlah yang diakui sebagai provisi adalah hasil estimasi terbaik pengeluaran yang diperlukan untuk menyelesaikan kewajiban kini pada akhir periode pelaporan, dengan mempertimbangkan risiko dan ketidakpastian yang meliputi kewajibannya. Proses kajian tersebut melibatkan penggunaan berbagai pertimbangan dan asumsi. Apabila suatu provisi diukur menggunakan arus kas yang diperkirakan untuk menyelesaikan kewajiban kini, maka nilai tercatatnya adalah nilai kini dari arus kas.

o. Modal saham

Saham biasa dikelompokkan sebagai ekuitas dan biaya langsung yang berkaitan dengan penerbitan saham baru atau opsi disajikan sebagai pengurang ekuitas, setelah dikurangi pajak dari jumlah yang diterima.

2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION *(continued)*

m. Leases *(continued)*

Sublease

The Company as the lessee of certain fixed assets also leases back the fixed assets to the lessee. In this transaction, the Company acts as an intermediate lessor. When an intermediate lessor enters into a sublease transaction, the intermediate lessor:

- *not recognising right-of-use assets for certain fixed assets that are leased back to lessees and recognise finance lease receivables.*
- *recognise the difference between the right-of-use assets and the finance lease receivables in profit or loss.*
- *continue to recognise the lease liability associated with certain fixed assets.*
- *recognises finance income from the sublease and finance expenses from the main lease over the period of the sublease.*

n. Provisions

Provisions are recognised when the Company has a present obligation (legal or constructive) as a result of a past event and it is probable that the Company will be required to settle the obligation and a reliable estimate can be made of the amount of the obligation.

The amount recognised as a provision is the best estimate of the consideration required to settle the present obligation at the end of the reporting period, taking into account the risks and uncertainties surrounding the obligation.Such assessments would typically involve significant use of judgement and estimates. Where a provision is measured using the cash flows estimated to settle the present obligation, its carrying amount is the present value of those cash flows.

o. Share capital

Ordinary shares are classified as equity and incremental costs directly attributable to the issuance of new shares or options are shown in equity as a deduction, net of tax from the proceeds.

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

p. Pengakuan pendapatan dan beban

Pendapatan jasa dari kontrak dengan pelanggan

Pendapatan jasa dari kontrak dengan pelanggan terdiri atas empat jenis sumber pendapatan, yaitu jasa terminal fasilitas penyimpanan dan regasifikasi, jasa pengelolaan operasi dan pemeliharaan *operation and maintenance* ("OM") infrastruktur gas, dan jasa sewa kapal tunda, yang diakui pada periode akuntansi saat jasa tersebut diberikan.

Pendapatan bunga sewa

Pendapatan bunga sewa yang berasal dari jasa penyewaan *floating storage regasification* unit ("FSRU"), fasilitas *custody flow meter*, fasilitas kompresi gas di Tanjung Batu, dan kapal tunda diakui selama masa sewa dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

Beban

Beban diakui pada saat terjadinya dengan dasar akrual.

q. Pajak penghasilan kini dan tangguhan

Beban pajak terdiri dari pajak kini dan pajak tangguhan. Pajak diakui dalam laba rugi, kecuali jika pajak tersebut terkait dengan transaksi atau kejadian yang diakui di rugi komprehensif lain atau langsung diakui ke ekuitas. Dalam hal ini, pajak tersebut masing-masing diakui dalam rugi komprehensif lain atau ekuitas.

Beban pajak kini dihitung berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku pada tanggal pelaporan keuangan, di negara di mana Perusahaan beroperasi dan menghasilkan pendapatan kena pajak. Manajemen secara periodik mengevaluasi posisi yang dilaporkan di Surat Pemberitahuan Tahunan ("SPT") sehubungan dengan situasi di mana aturan pajak yang berlaku membutuhkan interpretasi. Jika perlu, manajemen menentukan provisi berdasarkan jumlah yang diharapkan akan dibayar kepada otoritas pajak.

2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION *(continued)*

p. Revenues and expenses recognition

Revenue from contracts with customers

Service revenue from contracts with customers consists of four revenue streams, namely terminal services for storage and regasification facilities, operation and maintenance ("OM") services for gas infrastructure, and tugboat lease services, which are recognised in the accounting period in which the services are rendered.

Lease income

Finance income from lease derived from the lease of the floating storage regasification unit ("FSRU"), custody flow meter facility, gas compression facility in Tanjung Batu, and tugboat is recognised over the lease term using the effective interest method.

Expenses

Expenses are recognised when incurred using the accrual basis.

q. Current and deferred income tax

The tax expense comprised current and deferred taxes. Tax is recognised in profit or loss, except to the extent that it relates to items recognised in other comprehensive loss or directly in equity. In this case, the tax is also recognised in other comprehensive loss or directly in equity, respectively.

The current income tax is calculated on the basis of the tax laws enacted at the reporting date in the countries where the Company operates and generates taxable income. Management periodically evaluates the positions taken in the annual tax returns with respect to situations in which the applicable tax regulations are subject to interpretation. It establishes provisions where appropriate on the basis of the amounts expected to be paid to the tax authorities.

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2025
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2025
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

q. Pajak penghasilan kini dan tangguhan (lanjutan)

Pajak penghasilan tangguhan diakui, dengan menggunakan metode *balance sheet liability* untuk semua perbedaan sementara antara dasar pengenaan pajak aset dan liabilitas dengan nilai tercatatnya pada laporan keuangan. Namun, liabilitas pajak penghasilan tangguhan tidak diakui jika berasal dari pengakuan awal *goodwill* atau pada saat pengakuan awal aset dan liabilitas yang timbul dari transaksi selain kombinasi bisnis yang pada saat transaksi tersebut tidak mempengaruhi laba rugi akuntansi dan laba rugi kena pajak. Pajak penghasilan tangguhan ditentukan dengan menggunakan tarif pajak yang telah berlaku atau secara substantif telah berlaku pada akhir periode pelaporan dan diharapkan diterapkan ketika aset pajak penghasilan tangguhan direalisasi atau liabilitas pajak penghasilan tangguhan diselesaikan.

Aset pajak penghasilan tangguhan diakui hanya jika besar kemungkinan jumlah penghasilan kena pajak di masa depan akan memadai untuk dikompensasi dengan perbedaan temporer yang masih dapat dimanfaatkan.

Aset dan liabilitas pajak penghasilan tangguhan dapat saling hapus jika terdapat hak yang berkekuatan secara hukum untuk melakukan saling hapus antara aset pajak kini dengan liabilitas pajak kini.

2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION *(continued)*

q. Current and deferred income tax *(continued)*

Deferred income tax is recognised, using the balance sheet liability method, on temporary differences arising between the tax bases of assets and liabilities and their carrying amounts in the financial statements. However, deferred tax liabilities are not recognised if they arise from the initial recognition of goodwill and deferred income tax is not accounted for if it arises from initial recognition of an asset or liability in a transaction other than a business combination that at the time of the transaction affects neither accounting nor taxable profit or loss. Deferred income tax is determined using tax rates that have been enacted or substantially enacted as at the reporting period end and are expected to apply when the related deferred income tax asset is realised or the deferred income tax liability is settled.

Deferred income tax assets are recognised only to the extent that it is probable that future taxable profit will be available against which the temporary differences can be utilised.

Deferred income tax assets and liabilities are offset when there is a legally enforceable right to offset current tax assets against current tax liabilities.

3. PERTIMBANGAN AKUNTANSI PENTING DAN ESTIMASI AKUNTANSI SIGNIFIKAN

Penyusunan laporan keuangan yang sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia mengharuskan manajemen untuk membuat estimasi, pertimbangan dan asumsi yang mempengaruhi jumlah aset dan liabilitas yang dilaporkan dan pengungkapan aset dan liabilitas kontinjensi pada tanggal pelaporan, serta jumlah pendapatan dan beban selama tahun pelaporan. Estimasi, asumsi dan pertimbangan tersebut dievaluasi secara terus menerus dan berdasarkan pengalaman historis dan faktor-faktor lainnya, termasuk harapan peristiwa di masa datang yang diyakini wajar berdasarkan kondisi yang ada.

Perusahaan telah mengidentifikasi hal-hal berikut dimana diperlukan pertimbangan, estimasi dan asumsi signifikan dan dimana hasil aktual dapat berbeda dari estimasi tersebut jika menggunakan asumsi dan kondisi yang berbeda dan dapat mempengaruhi secara material hasil keuangan atau posisi keuangan Perusahaan yang dilaporkan dalam tahun mendatang.

3. CRITICAL ACCOUNTING JUDGMENTS AND SIGNIFICANT ACCOUNTING ESTIMATES

The preparation of financial statements in conformity with Indonesian Financial Accounting Standards requires management to make estimates, judgements and assumptions that affect the reported amounts of assets and liabilities and the disclosure of contingent assets and liabilities at the reporting date and the reported amounts of revenue and expenses during the reporting year. Estimates, assumptions and judgements are continually evaluated and are based on historical experience and other factors, including expectations of future events that are believed to be reasonable under the circumstances.

The Company has identified the following matters under which significant judgements, estimates and assumptions are made and where actual results may differ from these estimates under different assumptions and conditions and may materially affect the financial results or financial position of the Company as reported in future years.

3. PERTIMBANGAN AKUNTANSI PENTING DAN ESTIMASI AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

Pertimbangan penting dalam penerapan kebijakan akuntansi

Dalam proses penerapan kebijakan akuntansi yang dijelaskan dalam Catatan 2, Perusahaan telah menentukan hal-hal berikut yang memerlukan pertimbangan signifikan:

Sewa

Penentuan apakah suatu perjanjian mengandung unsur sewa membutuhkan pertimbangan yang cermat untuk menilai apakah perjanjian tersebut memberikan hak untuk mendapatkan secara substansial seluruh manfaat ekonomi dari penggunaan aset identifikasian dan hak untuk mengarahkan penggunaan aset identifikasian, bahkan jika hak tersebut tidak dijabarkan secara eksplisit di perjanjian.

Perusahaan mempunyai beberapa perjanjian sewa di mana Perusahaan bertindak sebagai penyewa untuk beberapa aset tertentu. Perusahaan mengevaluasi apakah terdapat risiko dan manfaat kepemilikan yang signifikan dari aset sewaan yang dialihkan kepada berdasarkan PSAK No. 116, yang mensyaratkan Perusahaan untuk membuat pertimbangan dan estimasi dari pengalihan risiko dan manfaat terkait atas kepemilikan aset sewaan.

Karena Perusahaan tidak dapat dengan mudah menentukan suku bunga implisit, manajemen menggunakan suku bunga pinjaman inkremental Perusahaan sebagai tingkat diskonto. Ada beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan dalam menentukan suku bunga pinjaman inkremental, yang banyak di antaranya memerlukan pertimbangan untuk dapat secara andal mengukur penyesuaian yang diperlukan untuk sampai pada tingkat diskonto akhir. Dalam menentukan suku bunga pinjaman inkremental, Perusahaan mempertimbangkan faktor-faktor utama berikut: risiko kredit korporat Perusahaan, jangka waktu sewa, jangka waktu pembayaran sewa, lingkungan ekonomi, waktu di mana sewa dimasukkan, dan mata uang di mana pembayaran sewa ditentukan.

Dalam menentukan jangka waktu sewa, Perusahaan mempertimbangkan semua fakta dan keadaan yang menimbulkan insentif ekonomi untuk menggunakan opsi perpanjangan, atau tidak menggunakan opsi penghentian. Opsi perpanjangan (atau periode setelah opsi penghentian kontrak kerja) hanya termasuk dalam jangka waktu sewa jika cukup pasti akan diperpanjang (atau tidak dihentikan).

3. CRITICAL ACCOUNTING JUDGMENTS AND SIGNIFICANT ACCOUNTING ESTIMATES *(continued)*

Critical judgements in applying accounting policies

In the process of applying the accounting policies described in Note 2, the Company has identified the following matters under which significant judgements are made:

Leases

Determining whether an arrangement is or contains a lease requires careful judgement to assess whether the arrangement conveys a right to obtain substantially all the economic benefits from use of the asset throughout the period of use and right to direct the use of the asset, even if the right is not explicitly specified in the arrangement.

The Company has various lease agreements where the Company acts as a lessee in respect of certain assets. The Company evaluates whether significant risks and rewards of ownership of the leased asset are transferred to the lessee based on SFAS No. 116, which requires the Company to make judgements and estimates of transfer of risks and rewards of ownership of the leased asset.

Since the Company could not readily determine the implicit rate, management used the Company's incremental borrowing rate as a discount rate. There are a number of factors to consider in determining an incremental borrowing rate, many of which need judgement in order to be able to reliably quantify any necessary adjustments to arrive at the final discount rates. In determining the incremental borrowing rate, the Company considers the following main factors: the Company's corporate credit risk, the lease term, the lease payment term, the economic environment, the time at which the lease is entered into, and the currency in which the lease payments are denominated.

In determining the lease term, the Company considers all facts and circumstances that create an economic incentive to exercise an extension option, or not exercise a termination option. Extension options (or periods after termination options) are only included in the lease term if the lease is reasonably certain to be extended (or not terminated).

3. PERTIMBANGAN AKUNTANSI PENTING DAN ESTIMASI AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

Pertimbangan penting dalam penerapan kebijakan akuntansi (lajutan)

Pajak penghasilan

Pertimbangan dan asumsi diperlukan dalam menentukan pengurangan biaya tertentu selama perhitungan estimasi pajak penghasilan untuk Perusahaan. Terdapat banyak transaksi dan perhitungan dimana penentuan pajak akhir menjadi tidak pasti selama kegiatan usaha biasa. Dimana perhitungan pajak akhir dari hal-hal tersebut berbeda dengan jumlah yang sebelumnya dicatat, perbedaan tersebut akan berdampak pada penetapan pajak penghasilan dan pajak penghasilan yang ditangguhkan dalam tahun penentuan pajak tersebut.

Aset pajak tangguhan, termasuk yang timbul dari rugi fiskal dan perbedaan temporer, diakui apabila dianggap lebih mungkin daripada tidak bahwa mereka dapat diterima kembali, dimana hal ini tergantung pada kecukupan pembentukan laba kena pajak di masa depan. Asumsi atas pembentukan laba kena pajak sangat dipengaruhi oleh estimasi dan asumsi manajemen atas tingkat penjualan dan biaya-biaya terkait yang terdapat risiko ketidakpastian, sehingga ada kemungkinan perubahan estimasi dan asumsi tersebut akan mengubah proyeksi laba kena pajak di masa mendatang.

Estimasi dan asumsi akuntansi yang penting

Perusahaan membuat estimasi dan asumsi mengenai masa depan. Estimasi akuntansi yang dihasilkan, menurut definisi, akan jarang sekali sama dengan hasil aktualnya. Estimasi dan asumsi yang secara signifikan berisiko menyebabkan penyesuaian material terhadap jumlah tercatat aset dan liabilitas selama 12 bulan ke depan dipaparkan di bawah ini.

Provisi atas KKE piutang usaha dan aset keuangan lainnya

Perusahaan menggunakan matriks provisi untuk menghitung KKE piutang usaha. Tingkat provisi adalah berdasarkan hari jatuh tempo atas kelompok segmen pelanggan yang mempunyai karakteristik risiko kredit yang serupa (misalnya berdasarkan geografi, tipe produk, dan bentuk lain).

3. CRITICAL ACCOUNTING JUDGMENTS AND SIGNIFICANT ACCOUNTING ESTIMATES *(continued)*

Critical judgements in applying accounting policies *(continued)*

Income taxes

Judgement and assumptions are required in determining the deductibility of certain expenses during the estimation of the calculations for income taxes for the Company. There are many transactions and calculations for which the ultimate tax determination is uncertain during the ordinary course of business. Where the final tax outcome of these matters is different from the amounts initially recorded, such differences will impact the income tax and deferred income tax provisions in the period in which such determination is made.

Deferred tax assets, including those arising from tax losses carried forward and temporary differences, are recognised only where it is considered more likely than not that they will be recovered, which is dependent on the generation of sufficient future taxable profits. The assumptions about the generation of future taxable profits are heavily affected by the level of sales and the associated costs which are subject to risk and uncertainty and hence there is a possibility that changes in circumstances will alter the projected future taxable profits.

Critical accounting estimates and assumptions

The Company makes estimates and assumptions concerning the future. The resulting accounting estimates will, by definition, seldom equal the related actual results. The estimates and assumptions that have a significant risk of causing a material adjustment to the carrying amounts of assets and liabilities within the next 12 months are addressed below.

Provision for ECL of trade receivables and other financial assets

The Company uses a provision matrix to calculate ECL for trade receivables. The provision rates are based on days past due for Company of various customer segments that have similar credit risk characteristics (e.g. by geography, product type and other matters).

3. PERTIMBANGAN AKUNTANSI PENTING DAN ESTIMASI AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

Estimasi dan asumsi akuntansi yang penting (lanjutan)

Provisi atas KKE piutang usaha dan aset keuangan lainnya (lanjutan)

Matriks provisi pada mulanya didasarkan pada tingkat gagal bayar historis Perusahaan yang diobservasi. Perusahaan akan memperbaharui matriks untuk menyesuaikan pengalaman kerugian kredit historis dengan informasi *forward-looking*. Sebagai contoh, jika perkiraan atas kondisi ekonomi diperkirakan memburuk selama periode/tahun depan, yang dapat menyebabkan meningkatnya jumlah gagal bayar, tingkat gagal bayar historis disesuaikan. Pada setiap tanggal pelaporan, tingkat gagal bayar historis diperbaharui dan perubahan estimasi *forward-looking* dianalisis.

Penilaian atas korelasi antara tingkat gagal bayar historis yang diobservasi, perkiraan atas kondisi ekonomi dan KKE merupakan estimasi yang signifikan. Jumlah KKE paling dipengaruhi oleh perubahan keadaan dan perkiraan kondisi ekonomi. Pengalaman kerugian kredit historis Perusahaan dan perkiraan kondisi ekonomi juga mungkin tidak menggambarkan gagal bayar aktual pelanggan di masa yang akan datang.

3. CRITICAL ACCOUNTING JUDGMENTS AND SIGNIFICANT ACCOUNTING ESTIMATES *(continued)*

Critical accounting estimates and assumptions *(continued)*

Provision for ECL of trade receivables and other financial assets (continued)

The provision matrix is initially based on the Company's historical observed default rates. The Company will calibrate the matrix to adjust the historical credit loss experience with forward-looking information. For instance, if forecast economic conditions are expected to deteriorate over the next year, which can lead to an increased number of defaults, the historical default rates are adjusted. At every reporting date, the historical observed default rates are updated and changes in the forward-looking estimates are analysed.

The assessment of the correlation between historical observed default rates and forecast economic conditions and ECL is a significant estimate. The amount of ECL is sensitive to changes in circumstances and of forecast economic conditions. The Company's historical credit loss experience and forecast of economic conditions may also not be representative of a customer's actual default in the future.

4. KAS DAN SETARA KAS

4. *CASH AND CASH EQUIVALENTS*

	2025	2024	
Kas di bank - pihak berelasi			*Cash in banks - related parties*
Rupiah			*Rupiah*
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. ("Mandiri")	56,085	53,591	*PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. ("Mandiri")*
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. ("BNI")	3,719	3,643	*PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. ("BNI")*
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. ("BRI")	7,098	8,703	*PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. ("BRI")*
PT Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk. ("BSI")	17,132	32,340	*PT Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk. ("BSI")*
	84,034	98,277	
US$			*US$*
Mandiri	87	84	*Mandiri*
	84,121	98,361	
Deposito berjangka - pihak berelasi			*Time deposits - related party*
Rupiah			*Rupiah*
BSI	30,000	15,000	*BSI*
	114,121	113,361	

Lihat Catatan 18 untuk rincian transaksi dengan pihak berelasi.

Refer to Note 18 for details of related party transactions.

5. PIUTANG USAHA / *5. TRADE RECEIVABLES*

	2025	2024	
Pihak berelasi			*Related parties*
PLN Nusantara Power ("PLN NP")	34,831	33,667	*PLN Nusantara Power ("PLN NP")*
PLN EPI	16,711	-	*PLN EPI*
PLN Indonesia Power ("PLN IP")	-	12,877	*PLN Indonesia Power ("PLN IP")*
	51,542	46,544	
Pihak ketiga	10,128	24,070	*Third parties*
	61,670	70,614	

Analisis umur piutang usaha yang belum jatuh tempo atau lewat jatuh tempo namun tidak mengalami penurunan nilai adalah sebagai berikut:

Aging analysis of trade receivables not yet overdue or overdue but not impaired is as follows:

	2025	2024	
Belum jatuh tempo	56,306	51,650	*Not yet due*
Lewat jatuh tempo:			*Overdue:*
1 s/d 30 hari	5,364	-	*1 to 30 days*
31 s/d 90 hari	-	9,760	*31 to 90 days*
Lebih dari 90 hari	-	9,204	*More than 90 days*
	61,670	70,614	

Berdasarkan penilaian manajemen terhadap penyisihan KKE atas piutang usaha, manajemen berpendapat bahwa penyisihan KKE tidak material, sehingga penyisihan KKE tidak diperlukan.

Based on management's assessment of the allowance for ECL on trade receivables, management is of the opinion that the allowance for ECL is not material, therefore the allowance for ECL is not necessary.

Lihat Catatan 18 untuk rincian transaksi dengan pihak berelasi.

Refer to Note 18 for details of related party transactions.

6. ASET TETAP / *6. FIXED ASSETS*

Aset tetap Perusahaan seluruhnya terdiri dari PDP. Pada tanggal 31 Desember 2025, Perusahaan memiliki PDP sebesar Rp143.597 (2024: Rp61.434) terkait pembangunan fasilitas pembangkit *gas onshore* Tarakan dan Punagaya. Pembangunan fasilitas tersebut diperkirakan akan selesai pada tahun 2026 dan 2027.

All of the Company's property and equipment consisted of CIP. As at 31 December 2025, the Company had CIP amounting to Rp143,597 (2024: Rp61,434), relating to the construction of onshore gas plant facilities in Tarakan and Punagaya. The construction of these facilities is expected to be completed in 2026 and 2027.

Berdasarkan penelaahan manajemen, tidak terdapat peristiwa atau perubahan keadaan yang mengindikasikan adanya penurunan nilai aset tetap secara signifikan pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024.

Based on management's assessment, there were no events or changes in circumstances indicating any significant impairment in the value of property and equipment as at 31 December 2025 and 2024.

Selama tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024, Perusahaan tidak mengkapitalisasi beban bunga ke PDP.

During the years ended 31 December 2025 and 2024, the Company did not capitalise borrowing costs to CIP.

7. PIUTANG SEWA PEMBIAYAAN

Di tahun 2022, Perusahaan melakukan subsewa fasilitas *custody flow meter station* dan fasilitas kompresi gas, dengan menggunakan aset yang disewa dari PT Pelayanan Energi Batam ("PEB"), dan fasilitas pipa gas ruas PK 52 - Tanjung Batu, yang merupakan aset tetap milik Perusahaan kepada PLN IP, berdasarkan perjanjian dengan PLN dan PLN IP masa sewa akan berakhir pada tanggal 30 Agustus 2047. Pada tahun 2025, perjanjian tersebut telah diamendemen dan dinovasi, di mana posisi PLN IP dialihkan kepada PLN EPI. Lihat Catatan 19 untuk rincian perjanjian Perusahaan.

Di tahun 2022, Perusahaan melakukan subsewa fasilitas *floating storage regasification unit ("FSRU")*, dengan menggunakan aset yang disewa dari PT Sulawesi Regas kepada PLN NP, berdasarkan perjanjian dengan PLN dan PLN NP masa sewa akan berakhir pada tanggal 18 September 2035. Lihat Catatan 19 untuk rincian perjanjian Perusahaan.

Di tahun 2023, Perusahaan melakukan subsewa fasilitas kapal tunda untuk wilayah operasional Jawa Satu Power kepada PT Jasa Armada Indonesia. Perjanjian ini berlaku sampai dengan 30 Agustus 2028. Lihat Catatan 19 untuk rincian perjanjian Perusahaan.

Analisis jatuh tempo piutang sewa pembiayaan bruto dan piutang sewa neto adalah sebagai berikut:

7. *FINANCE LEASE RECEIVABLES*

In 2022, the Company entered into a sublease of the custody flow meter station facility and gas compression facility using leased assets from PT Pelayanan Energi Batam ("PEB"), as well as the PK 52 – Tanjung Batu gas pipeline facility, which is part of the Company's property and equipment, to PLN IP under an agreement with PLN and PLN IP, with a lease term ending on 30 August 2047. In 2025, the agreement was amended and novated, whereby PLN IP's position was transferred to PLN EPI. Refer to Note 19 for details of the Company's agreement.

In 2022, the Company entered into a sublease of the floating storage regasification unit ("FSRU") using leased assets from PT Sulawesi Regas to PLN NP under an agreement with PLN and PLN NP, with a lease term ending on 18 September 2035. Refer to Note 19 for details of the Company's agreement.

In 2023, the Company entered into a sublease arrangement for tugboat facilities in the operational area of Jawa Satu Power with PT Jasa Armada Indonesia. The agreement is valid until 30 August 2028. Refer to Note 19 for details of the Company's agreement.

The maturity analysis of gross finance lease receivables and net lease receivables is as follows:

	2025	2024	
Piutang sewa bruto:			***Gross lease receivables:***
Jatuh tempo dalam waktu satu tahun	423,513	423,513	*Maturity within one year*
Jatuh tempo dalam waktu dua sampai lima tahun	1,933,762	1,653,207	*Maturity within two to five years*
Jatuh tempo dalam waktu lebih dari lima tahun	1,949,426	2,653,494	*Maturity for more than five years*
	4,306,701	4,730,214	
Dikurangi: pendapatan keuangan sewa yang belum terealisasi	(2,346,023)	(2,649,181)	*Less: unrealised finance income from leases*
Piutang sewa neto	1,960,678	2,081,033	*Net lease receivables*
Dikurangi: bagian lancar	**(136,922)**	**(120,361)**	***Less: current portion***
Bagian tidak lancar	**1,823,756**	**1,960,672**	***Non-current portion***

Piutang sewa bagian tidak lancar akan terealisasi dalam jangka waktu dua sampai dua puluh dua tahun.

The non-current portion of finance lease receivables will be realised within two until twenty two years.

7. PIUTANG SEWA PEMBIAYAAN (lanjutan)

Perusahaan tidak melakukan penyisihan KKE atas aset keuangan ini karena manajemen berpendapat bahwa penyisihan tersebut tidak material sehingga cadangan KKE tidak diperlukan.

Lihat Catatan 18 untuk rincian transaksi dengan pihak berelasi.

7. *FINANCE LEASE RECEIVABLES (continued)*

Company does not provide any allowance for ECL for these financial assets as management believes that provision for ECL is not material, therefore the allowance for expected credit losses is not necessary.

Refer to Note 18 for details of related party transactions.

8. ASET HAK-GUNA

Rincian aset hak-guna pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

8. *RIGHT-OF-USE ASSETS*

The detail of the right-of-use assets as at 31 December 2025 and 2024 are as follows:

	31 Desember/*December* 2025				
	Saldo awal/ *Beginning balance*	Penambahan/ *Additions*	Pengurangan/ *Deduction*	Saldo akhir/ *Ending balance*	
Biaya perolehan					***Acquisition cost***
Tanah	16,369	-	-	16,369	*Land*
Bangunan	-	4,355	-	4,355	*Buildings*
Kendaraan	3,236	1,916	-	5,152	*Vehicles*
	19,605	6,271	-	25,876	
Akumulasi penyusutan					***Accumulated depreciation***
Tanah	(3,981)	(3,274)	-	(7,255)	*Land*
Bangunan	-	(1,089)	-	(1,089)	*Buildings*
Kendaraan	(1,849)	(1,175)	-	(3,024)	*Vehicles*
	(5,830)	(5,538)	-	(11,368)	
Nilai buku bersih	**13,775**			**14,508**	***Net book value***

	31 Desember/*December* 2024				
	Saldo awal/ *Beginning balance*	Penambahan/ *Additions*	Pengurangan/ *Deduction*	Saldo akhir/ *Ending balance*	
Biaya perolehan					***Acquisition cost***
Tanah	-	16,369	-	16,369	*Land*
Bangunan	2,884	-	(2,884)	-	*Buildings*
Kendaraan	2,022	1,916	(702)	3,236	*Vehicles*
	4,906	18,285	(3,586)	19,605	
Akumulasi penyusutan					***Accumulated depreciation***
Tanah	-	(3,981)	-	(3,981)	*Land*
Bangunan	(2,884)	-	2,884	-	*Buildings*
Kendaraan	(1,472)	(1,079)	702	(1,849)	*Vehicles*
	(4,356)	(5,060)	3,586	(5,830)	
Nilai buku bersih	**550**			**13,775**	***Net book value***

Beban penyusutan dicatat sebagai bagian beban usaha (Catatan 16) pada laba rugi.

Berdasarkan penilaian manajemen, tidak terdapat peristiwa atau perubahan keadaan yang mengindikasikan adanya penurunan nilai aset hak-guna secara signifikan pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024.

Depreciation expense was recorded as part of operating expenses (Note 16) in profit or loss.

Based on management's assessment, there were no events or changes in circumstances that may significantly impair the value of right-of-use assets as at 31 December 2025 and 2024.

9. UTANG USAHA / *9. TRADE PAYABLES*

	2025	2024	
Pihak berelasi			*Related parties*
PEB	10,229	10,931	*PEB*
PT Adhi Guna Putera ("AGP")	4,067	5,276	*PT Adhi Guna Putera ("AGP")*
	14,296	16,207	
Pihak ketiga	57,557	60,186	*Third parties*
	71,853	76,393	

Lihat Catatan 18 untuk rincian transaksi dengan pihak berelasi.

Refer to Note 18 for details of related party transactions.

10. BIAYA MASIH HARUS DIBAYAR / *10. ACCRUED EXPENSES*

	2025	2024	
Bonus dan insentif prestasi kerja	13,031	9,092	*Bonus and performance incentives*
Lain-lain	24	129	*Others*
	13,055	9,221	

11. LIABILITAS SEWA / *11. LEASE LIABILITIES*

Berdasarkan jatuh tempo: / ***Based on maturity:***

Nilai tunai pembayaran minimum atas liabilitas sewa pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

The present value minimum payments for the lease liabilities as of 31 December 2025 and 2024 are as follows:

	2025	2024	
Pembayaran sewa minimum yang Jatuh tempo dalam waktu:			*Minimum lease payments due:*
Tidak lebih dari satu tahun	251,983	249,819	*Not later than a year*
Lebih dari satu tahun dan kurang dari tiga tahun	487,910	498,663	*More than one year and not later than three years*
Lebih dari tiga tahun dan kurang dari lima tahun	446,007	459,003	*More than three year and not later than five years*
Lebih dari lima tahun	1,000,204	1,223,235	*More than five years*
Jumlah pembayaran minimum sewa	2,186,104	2,430,720	Total minimum lease payments
Dikurangi: bunga	(648,866)	(775,786)	Less: interest
Nilai tunai pembayaran minimum sewa pembiayaan masa datang	1,537,238	1,654,934	Present value of future minimum lease payments
Dikurangi: jatuh tempo Dalam satu tahun	**(134,327)**	**(122,578)**	***Less: current portion***
Bagian jangka panjang	**1,402,911**	**1,532,356**	***Non-current portion***

Jumlah pengeluaran kas untuk sewa selama tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 adalah Rp123.967 (2024: Rp106.149)

The total cash outflow for leases for the year ended 31 December 2025 was Rp123,967 (2024: Rp106,149)

11. LIABILITAS SEWA (lanjutan) / *LEASE LIABILITIES (continued)*

Berdasarkan jatuh tempo: (lanjutan) / ***Based on maturity:*** *(continued)*

Jumlah terkait sewa yang dicatat pada laba rugi adalah sebagai berikut: / *The amount related to leases recorded in profit or loss are as follows:*

	2025	2024	
Beban bunga (disajikan sebagai beban keuangan)	156,874	154,111	*Interest expense (presented as finance costs)*
Beban terkait sewa jangka pendek (disajikan sebagai beban usaha)	2,615	3,114	*Expenses relating to short-term leases* (presented as operating expense)
Jumlah	**159,489**	**157,225**	***Total***

Berdasarkan pemberi sewa: / ***Based on lessor:***

Nilai tunai pembayaran minimum sewa pembiayaan masa datang: / *The amount of future minimum lease payments:*

	2025	2024	
Pihak berelasi			*Related party*
PEB	53,163	61,456	*PEB*
PT Indonesia Comnet Plus ("ICON+")	1,521	-	*PT Indonesia Comnet Plus ("ICON+")*
Pihak ketiga	1,482,554	1,593,478	*Third parties*
	1,537,238	1,654,934	
Dikurangi: bagian jatuh tempo Dalam satu tahun	**(134,327)**	**(122,578)**	***Less: current portion***
Bagian jangka panjang	**1,402,911**	**1,532,356**	***Non-current portion***

12. PERPAJAKAN / *TAXATION*

a. Pajak dibayar di muka / ***a. Prepaid taxes***

	2025	2024	
Pajak lain-lain:			***Other taxes:***
Pajak Pertambahan Nilai	70,115	97,037	*Value Added Tax*
Dikurangi: bagian lancar	**-**	**-**	***Less: current portion***
Bagian tidak lancar	**70,115**	**97,037**	***Non-current portion***

12. PERPAJAKAN (lanjutan) / ***12. TAXATION*** *(continued)*

b. Utang pajak / ***b. Taxes payables***

	2025	2024	
Pajak lain-lain:			***Other taxes:***
Pasal 29	1,815	1,351	*Article 29*
Pasal 23	1,035	941	*Article 23*
Pasal 21	282	821	*Article 21*
Pasal 4(2)	26	1,990	*Article 4(2)*
	3,158	5,103	

c. Beban pajak penghasilan / ***c. Income tax expense***

	2025	2024	
Beban pajak kini	23,311	21,721	*Current tax expenses*
Beban pajak tangguhan	2,539	2,157	*Deferred tax expenses*
Penyesuaian pajak tahun sebelumnya:			*Prior year adjustments:*
- Kini	(335)	288	*Current -*
- Tangguhan	-	199	*Deferred -*
	25,515	24,365	

Rekonsiliasi antara beban pajak penghasilan dengan jumlah teoritis atas laba sebelum pajak adalah sebagai berikut:

The reconciliation between the income tax expense and the theoretical tax amount on profit before tax is as follows:

	2025	2024	
Laba sebelum pajak	120,401	105,043	*Profit before tax*
Pajak penghasilan pada tarif yang berlaku (22%)	26,488	23,109	*Income tax at applicable tax rate (22%)*
Penghasilan keuangan yang dikenakan pajak final	(362)	(427)	*Final income subject to final tax*
Pendapatan yang dikoreksi secara pajak	(2,894)	(3,170)	*Revenue corrected for fiscal purposes*
Beban lain yang tidak dapat dikurangkan	2,618	4,366	*Other non-deductible expense*
Penyesuaian tahun sebelumnya	(335)	487	*Prior year adjustment*
Beban pajak penghasilan	25,515	24,365	*Corporate income tax expense*

12. PERPAJAKAN (lanjutan) / *12. TAXATION (continued)*

d. Liabilitas pajak tangguhan / *d. Deferred tax liabilities*

	2025				
	1 Januari/ *January 2025*	(Dibebankan)/ dikreditkan pada laba rugi/ *(Charged)/ credited to profit or loss*	Dikreditkan/ (dibebankan) ke penghasilan komprehensif lain/*Credited/ (charged) to other comprehensive income*	31 Desember/ *December 2025*	
Liabilitas sewa	310	902	-	1,212	*Lease liabilities*
Aset hak-guna	(297)	(882)	-	(1,179)	*Right of use-assets*
Aset tetap	(11,037)	(2,759)	-	(13,796)	*Fixed assets*
Liabilitas imbalan pascakerja	493	200	42	735	*Post-employment benefits liabilities*
	(10,531)	(2,539)	42	(13,028)	

	2024				
	1 Januari/ *January 2024*	(Dibebankan)/ dikreditkan pada laba rugi/ *(Charged)/ credited to profit or loss*	Dikreditkan/ (dibebankan) ke penghasilan komprehensif lain/*Credited/ (charged) to other comprehensive income*	31 Desember/ *December 2024*	
Liabilitas sewa	126	184	-	310	*Lease liabilities*
Aset hak-guna	(121)	(176)	-	(297)	*Right of use-assets*
Aset tetap	(8,278)	(2,759)	-	(11,037)	*Fixed assets*
Liabilitas imbalan pasca kerja	103	398	(8)	493	*Post-employment benefits liabilities*
	(8,170)	(2,353)	(8)	(10,531)	

e. Pemeriksaan pajak / *e. Tax audit*

Pada tanggal 31 Desember 2025, perusahaan masih memiliki audit pajak yang berjalan terkait kelebihan bayar PPN sebesar Rp40.020 untuk periode pajak September 2024 – Juni 2025.

Selama tahun yang berakhir 31 Desember 2025, Perusahaan telah menerima pengembalian pajak sebesar Rp65.789 atas kelebihan bayar PPN.

As of 31 December 2025, the company still has an ongoing tax audit related to an overpayment of VAT amounting to Rp40,020 for the tax period of September 2024 – June 2025.

During the year ended 31 December 2025, the Company has received tax refunds amounting to Rp65,789 for overpayment of VAT.

f. Administrasi / *f. Administration*

Berdasarkan Undang-Undang Perpajakan yang berlaku di Indonesia, Perusahaan menghitung, menetapkan dan membayar sendiri besarnya jumlah pajak yang terutang. DJP dapat menetapkan atau mengubah liabilitas pajak tersebut dalam batas waktu lima tahun sejak saat terutangnya pajak.

Under the taxation laws of Indonesia, the Company submits tax returns on the basis of self assessment. The DGT may assess or amend taxes within five years from the time the tax becomes due.

12. PERPAJAKAN (lanjutan)

g. Aturan Model Pilar Dua Organization for Economic Cooperation and Development ("OECD")

Peraturan Menteri Keuangan ("PMK") No. PMK-136 Tahun 2024 ("PMK-136") telah diundangkan di Indonesia, yurisdiksi dimana tempat Perseroan didirikan, dan akan berlaku mulai 1 Januari 2025.

Perusahaan berada dalam cakupan ketentuan model OECD Pilar Dua dan menerapkan pengecualian untuk pengakuan serta pengungkapan informasi terkait aset dan liabilitas pajak tangguhan yang berhubungan dengan pajak penghasilan Pilar Dua mulai 1 Januari 2025.

Entitas induk utama ("UPE") dari Perusahaan berada dalam lingkup aturan model OECD Pilar Dua dan telah menerapkan pengecualian untuk mengakui dan mengungkapkan informasi tentang aset dan liabilitas pajak tangguhan yang berkaitan dengan pajak penghasilan Pilar Dua mulai 1 Januari 2025. Undang-undang Pilar Dua telah diundangkan atau hampir diundangkan di beberapa yurisdiksi tempat UPE beroperasi. Undang-undang tersebut mulai berlaku untuk tahun keuangan Perusahaan yang berakhir setelah 31 Desember 2024. UPE tunduk pada undang-undang yang telah diundangkan atau hampir diundangkan tersebut dan telah melakukan penilaian terhadap potensi eksposurnya terhadap pajak penghasilan Pilar Dua.

Berdasarkan hasil penilaian tersebut, tingkat pajak efektif di seluruh yurisdiksi tempat Perusahaan beroperasi berada di atas 15%. Oleh karena itu, tidak diperlukan pajak tambahan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2025.

***12. TAXATION** (continued)*

g. Organization for Economic Cooperation and Development ("OECD") Pillar Two Model Rules

The Ministry of Finance ("MoF") Regulation No. PMK-136 Tahun 2024 ("PMK-136") was enacted in Indonesia, the jurisdiction in which the Company is incorporated, and will come into effect from 1 January 2025.

The Company is within the scope of the OECD Pillar Two model rules and applied the exception to recognizing and disclosing information about deferred tax assets and liabilities relating to Pillar Two income taxes from 1 January 2025.

The ultimate parent entity ("UPE") of the Company is within the scope of the OECD Pillar Two model rules and has applied the exception to recognising and disclosing information about deferred tax assets and liabilities relating to Pillar Two income taxes from 1 January 2025. Pillar Two legislation has been enacted or substantially enacted in certain jurisdictions in which the UPE operates. The legislation has become effective for the Company's financial year ended after 31 December 2024. The UPE is subject to the enacted or substantially enacted legislation and has conducted an assessment of its potential exposure to Pillar Two income taxes.

Based on the assessment, the effective tax rates in all jurisdictions in which the Company operates are above 15%. Therefore, there was no top-up tax required for the year ended 31 December 2025.

13. PINJAMAN PEMEGANG SAHAM / *13. SHAREHOLDER LOAN*

	2025	2024	
PLN	211,858	255,060	*PLN*
Dikurangi: Bagian jangka pendek	**(55,275)**	**(52,456)**	***Less: Current portion***
Bagian jangka panjang	**156,583**	**202,604**	***Non-current portion***

Informasi terkait dengan fasilitas pinjaman berdasarkan perubahan terakhir adalah sebagai berikut:

Information related to the loan facilities based on the latest amendment is as follows:

Jenis fasilitas/ *Facility type*	Tanggal perjanjian/ *Agreement date*	Jumlah fasilitas/ *Total facility*	Periode pinjaman/ *Loan terms*	Masa tenggang/ *Grace period*	Tingkat suku bunga per tahun/ *Annual interest rate*
Fasilitas/*Facility* 1	25 Juli 2019 dan diamendemen pada 27 Desember 2021/ *25 July 2019 and amended on 27 December 2021*	272,960	8 tahun/*years*	2 tahun sejak tanggal perjanjian/ *2 years from signing date*	0.2% per tahun/ *per annum*
Fasilitas/*Facility* 2	10 Agustus 2020/ *10 August 2020*	184,830	9 tahun/*years*	2 tahun sejak 31 Desember 2020/ *2 years from 31 December 2020*	8.70% per tahun/ *per annum*

Pada tanggal 27 Desember 2021, Perusahaan mengadakan amendemen perjanjian pinjaman pemegang saham untuk fasilitas 1 dengan PLN yang merubah tingkat suku bunga per tahun dari 8,76% menjadi 0,2%. Perusahaan mencatat perubahan nilai wajar pinjaman pemegang saham tersebut sebesar Rp112.848 di ekuitas sebagai tambahan modal disetor.

On 27 December 2021, the Company entered into a shareholder loan amendment for facility 1 with PLN which changed the annual interest rate from 8.76% to 0.2%. The Company recognised changes in the fair value of shareholder loans amounted to Rp112,848 in equity as additional paid-in capital.

Tidak ada batasan keuangan yang dikenakan atas pinjaman pemegang saham ini.

There is no financial covenant applied for this shareholder loan.

Beban pinjaman pemegang saham tahun 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp19.531 dan Rp23.230 (Catatan 17).

The shareholder loan finance costs in 2025 and 2024 amounted to Rp19,531 and Rp23,230 respectively (Note 17).

Lihat Catatan 18 untuk rincian transaksi dengan pihak berelasi.

Refer to Note 18 for details of related party transactions.

14. MODAL SAHAM / *14. SHARE CAPITAL*

Komposisi modal saham Perusahaan yang berlaku pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

The composition of the Company's share capital on 31 December 2025 and 2024 are as follows:

Pemegang saham/*Shareholders*	Saham ditempatkan dan disetor penuh/ *Issued and fully paid-up capital*		
	Jumlah saham/ *Number of shares*[*)]	Persentase kepemilikan/ *Percentage of ownership*	Jumlah modal disetor/ Total paid-up *share capital*
PLN EPI	24,999	99.996%	24,999
Yayasan Pendidikan dan Kesejahteraan PLN ("YPK PLN")	1	0.004%	1
Jumlah/*Total*	**25,000**	**100%**	**25,000**

*) Dalam jumlah penuh/*In full amount*

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2025
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2025
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

14. MODAL SAHAM (lanjutan) / *14. SHARE CAPITAL (continued)*

Cadangan wajib / ***Statutory reserve***

Undang-Undang Perseroan Terbatas Republik Indonesia No. 40/2007 yang diterbitkan pada bulan Agustus 2007, mengharuskan setiap Perusahaan untuk membentuk cadangan wajib sampai cadangan menjadi paling sedikit 20% dari modal yang telah ditempatkan dan disetor penuh. Tidak ada batasan waktu tertentu yang ditetapkan untuk pembentukan cadangan wajib tersebut. Pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, Perusahaan belum membentuk cadangan wajib tersebut.

The Limited Liability Company Law of the Republic of Indonesia No. 40/2007 introduced in August 2007, requires the establishment of a statutory reserve from net profits amounting to at least 20% of a company's issued and paid-up capital. There is no set period of time over which this reserve should be established. As at 31 December 2025 and 2024, the Company has not yet established the statutory reserve.

15. PENDAPATAN / *15. REVENUE*

	2025	2024	
Pendapatan bunga sewa	347,870	355,328	*Lease income*
Jasa terminal fasilitas penyimpanan dan regasifikasi	113,087	113,622	*Floating storage and regasification terminal services*
Pengelolaan OM infrastruktur gas	8,447	2,982	*Gas infrastructure OM management*
Sewa kapal tunda	7,716	6,688	*Tugboat lease*
Lain-lain	3,835	-	*Others*
	480,955	478,620	

Lihat Catatan 18 untuk rincian transaksi dengan pihak berelasi. / *Refer to Note 18 for details of related party transactions.*

16. BEBAN USAHA / *16. OPERATING EXPENSE*

	2025	2024	
Beban transportasi	64,765	87,391	*Transportation expense*
Beban administrasi	48,288	36,744	*Administration expense*
Instalasi dan pemeliharaan	35,364	43,091	*Installation and maintenance*
Beban pegawai	26,695	28,319	*Employee expense*
Depresiasi aset hak guna (Catatan 8)	5,538	5,060	*Depreciation of right of use assets (Note 8)*
	180,650	200,605	

17. BEBAN BUNGA / *17. FINANCE EXPENSE*

	2025	2024	
Liabilitas sewa (Catatan 11)	156,874	154,111	*Lease liabilities (Note 11)*
Pinjaman pemegang saham (Catatan 13)	19,531	23,230	*Shareholder loan (Note 13)*
	176,405	177,341	

18. SIFAT DAN TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI

18. NATURE OF RELATIONSHIP AND TRANSACTION WITH RELATED PARTIES

Sifat hubungan dengan pihak berelasi

a. PLN EPI dan YPK PLN merupakan pemegang saham Perusahaan;
b. Pemerintah Republik Indonesia merupakan pemegang saham PLN dan Badan Usaha Milik Negara ("BUMN") lainnya; dan
c. Dewan Komisaris dan Direksi merupakan personil manajemen kunci Perusahaan.

Berikut adalah daftar pihak berelasi yang memiliki transaksi dengan Perusahaan:

Nature of relationships with related parties

a. PLN EPI and YPK PLN are the shareholders of the Company;
b. The Government of the Republic of Indonesia is the shareholder of PLN and other State-Owned Enterprises ("SOE");
c. Boards of Commissioners and Directors are the key management personnel of the Company.

Below is the list of related parties in which the Company has transaction with:

Pihak-pihak berelasi/ ***Related parties***	**Sifat hubungan/** ***Nature of relationship***	**Sifat transaksi/** ***Nature of transactions***
PLN	Entitas induk Utama/ *Ultimate parent company*	Piutang usaha, utang usaha pinjaman kepada pemegang saham pendapatan/*Trade receivables, trade payables, shareholder loan, revenue.*
Mandiri	Entitas berelasi dengan Pemerintah/ *Government-related entity*	Penempatan kas dan setara kas/ *Placement of cash and cash equivalents*
BRI	Entitas berelasi dengan Pemerintah/ *Government-related entity*	Penempatan kas dan setara kas/ *Placement of cash and cash equivalents*
BNI	Entitas berelasi dengan Pemerintah/ *Government-related entity*	Penempatan kas dan setara kas/ *Placement of cash and cash equivalents*
BSI	Entitas berelasi dengan Pemerintah/ *Government-related entity*	Penempatan kas dan setara kas/ *Placement of cash and cash equivalents*
PLN EPI	Entitas induk perusahaan/ *Parent company entity*	Utang usaha/*Trade payable*
PLN NP	Entitas sepengendali dengan perusahaan/ *Entity under common control*	Utang usaha, piutang usaha, piutang sewa, pendapatan/*Trade payables, account receivables, lease receivables, revenue*
PLN IP	Entitas sepengendali dengan perusahaan/ *Entity under common control*	Utang usaha, piutang usaha, piutang sewa, pendapatan/*Trade payables, account receivables, lease receivables, revenue*

18. SIFAT DAN TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI (lanjutan)

Sifat hubungan dengan pihak berelasi (lanjutan)

Berikut adalah daftar pihak berelasi yang memiliki transaksi dengan Perusahaan: (lanjutan)

18. NATURE OF RELATIONSHIP AND TRANSACTION WITH RELATED PARTIES *(continued)*

Nature of relationships with related parties *(continued)*

Below is the list of related parties in which the Company has transaction with: (continued)

Pihak-pihak berelasi/ ***Related parties***	**Sifat hubungan/** ***Nature of relationship***	**Sifat transaksi/** ***Nature of transactions***
HPI	Entitas anak PT PLN Electricity Services, entitas sepengendali dengan Perusahaan/ *Subsidiary of PLN Electricity Services, entity under common control*	Utang lain-lain dan jasa penyedia tenaga alih daya/*Other payables and outsourcing services*
PLN ND	Entitas sepengendali dengan Perusahaan/*Entity under common control*	Utang lain-lain dan jasa penyedia tenaga alih daya/*Other payables and outsourcing services*
ICON+	Entitas sepengendali dengan Perusahaan/*Entity under common control*	Utang usaha, jasa internet dan sewa kendaraan/*Trade payables, internet services and vehicle lease*
PEB	Entitas anak PT PLN Batam, entitas sepengendali dengan Perusahaan/*Subsidiary of PT PLN Batam, entity under common control services*	Utang usaha, sewa instalasi dan mesin dan jasa operasi dan pemeliharaan/*Trade payables, installation and machine lease and operation and maintenance*
PCN	Entitas anak PLN ND, entitas sepengendali dengan perusahaan/*Subsidiary of PLN ND, entity under common control*	Jasa tenaga kerja dan utang usaha/ *Manpower service and trade payables*
FAGP	Entitas Asosiasi Pelayaran Bahtera Adhiguna ("BAG")/ *Associate of BAG*	Utang usaha/*Accounts payable*
PT PLN Nusantara Power Construction ("NPC")	Entitas anak PLN NP, entitas sepengendali dengan Perusahaan/ *Subsidiaries of PLN NP, entity under common control*	Penambahan PDP proyek Tarakan/ *Addition of construction in progress Tarakan Project*

18. SIFAT DAN TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI (lanjutan)

18. NATURE OF RELATIONSHIP AND TRANSACTION WITH RELATED PARTIES (continued)

Saldo dan transaksi-transaksi pihak berelasi

Balances and transactions with related parties

Saldo dan transaksi dengan pihak berelasi yang tidak diungkapkan pada bagian lain dalam laporan keuangan ini adalah sebagai berikut:

Related party balances and transactions not disclosed elsewhere in these financial statements are as follows:

	2025	2024	
Pendapatan			***Revenue***
PLN NP	323,269	358,310	*PLN NP*
PLN IP	127,938	113,622	*PLN IP*
PLN EPI	15,272	-	*PLN EPI*
	466,479	471,932	
Beban usaha			***Operating expenses***
PEB	83,457	87,161	*PEB*
ICON+	47,551	951	*ICON+*
PLNE	7,504	-	*PLNE*
NPC	872	-	*NPC*
PLN EPI	835	-	*PLN EPI*
PLN NP	251	158	*PLN NP*
PLN	146	-	*PLN*
HPI	-	8,443	*HPI*
AGP	-	3,204	*AGP*
PCN	-	2,912	*PCN*
	140,616	102,829	

19. PERJANJIAN PENTING

19. SIGNIFICANT AGREEMENTS

a. FSRU

a. FSRU

PLN NP

Pada tanggal 16 September 2020, Perusahaan dan PLN menandatangani perjanjian tentang jasa terminal fasilitas penyimpanan dan regasifikasi klaster Sulawesi dan transportasi LNG. Perjanjian ini awalnya berlaku sampai 31 Oktober 2020. Perjanjian ini telah diubah beberapa kali di mana perubahan terakhir disepakati di tanggal 20 Desember 2022 menjadi perjanjian dengan PLN NP yang berlaku sampai dengan 18 September 2035.

PLN NP

On 16 September 2020, the Company and PLN signed an agreement regarding Floating Storage and Regasification Terminal Services for Cluster Sulawesi and LNG Transportation. This agreement was originally valid until 31 October 2020. This agreement has been amended several times with the latest amendment agreed on 20 December 2022 which change the second party to PLN NP and is valid until 18 September 2035.

PT Sulawesi Regas Satu

Pada tanggal 11 Februari 2020, Perusahaan dan PT Sulawesi Regas Satu menandatangani perjanjian sewa, operasi dan pemeliharaan fasilitas penyimpanan dan regasifikasi terapung untuk proyek gasifikasi klaster Sulawesi yang berlaku selama 15 tahun dari tanggal *Commercial Operation Date* ("COD").

PT Sulawesi Regas Satu

On 11 February 2020, the Company and PT Sulawesi Regas Satu entered into a floating storage and regasification facility rental, operation and maintenance agreement for the Sulawesi cluster gasification project which is valid for 15 years from the Commercial Operation Date ("COD").

19. PERJANJIAN PENTING (lanjutan)

b. Pipa Gas Tanjung Batu

PLN IP

Pada tanggal 27 April 2021, Perusahaan dan PLN menandatangani perjanjian tentang pemanfaatan fasilitas pipa gas ruas PK 52 - Tanjung Batu. Perjanjian ini telah diubah beberapa kali di mana perubahan terakhir disepakati pada tanggal 30 Agustus 2022 yang berlaku sampai 30 Agustus 2047. Perjanjian tersebut kini dialihkan menjadi perjanjian dengan PLN IP mulai dari tahun 2022. Pada tahun 2025, perjanjian tersebut telah diamendemen dan dinovasi, di mana posisi PLN IP dialihkan kepada PLN EPI.

PEB

Pada tanggal 18 Desember 2019, Perusahaan dan PEB menandatangani perjanjian tentang jasa pengukuran, pengoperasian dan pemeliharaan fasilitas *custody flow meter* di PK 52 Kaltimra. Kesepakatan ini berlaku sampai 18 Desember 2029.

c. Jasa penyewaan kapal tunda

PT Jawa Satu Power

Pada tanggal 1 September 2023, Perusahaan dan PT Jawa Satu Power ("JSP") menandatangani Perjanjian Sewa Kapal Tunda dengan Jawa Satu Power untuk penyewaan sebanyak 2 kapal tunda yang berlaku 5 tahun dari tanggal ditandanganinya perjanjian.

PT Jasa Armada Indonesia

Pada tanggal 1 September 2023, Perusahaan menandatangani kontrak kerja sama dengan PT Jasa Armada Indonesia ("JAI") tentang Sewa Kapal Tunda Untuk Wilayah Operasional JSP. Perjanjian ini berlaku sampai dengan lima tahun, dan dapat diubah sewaktu waktu.

AGP

Dalam perjanjiannya, JAI mengetahui bahwa terdapat Kerja Sama Operasi yang dilakukan oleh Perusahaan dan AGP. Dalam perjanjian ini, diketahui bahwa AGP bersedia untuk menanggung dan menerima sebesar 30% bagian dalam melaksanakan sewa.

***19. SIGNIFICANT AGREEMENTS** (continued)*

b. Tanjung Batu Pipeline

PLN IP

On 27 April 2021, the Company and PLN signed an agreement regarding the utilisation of gas pipeline facility for PK 52 - Tanjung Batu. This agreement has been amended several times with the latest amendment agreed on 30 August 2022 and is valid until 30 August 2047. This agreement are now foreclosed to PLN IP starting in 2022. In 2025, the agreement was amended and novated, whereby PLN IP's position was transferred to PLN EPI.

PEB

On 18 December 2019, the Company and PEB entered into an agreement regarding the measurement, operation and maintenance services for custody flow meter facilities at PK 52 Kaltimra. This agreement is valid until 18 December 2029.

c. Tugboat leases

PT Jawa Satu Power

On 1 September 2023, the Company and PT Jawa Satu Power ("JSP") signed a Tugboat Rental Agreement with Jawa Satu Power for the rental of 2 tugboats which is valid for 5 years from the date of signing the agreement.

PT Jasa Armada Indonesia

On 1 September 2023, the Company signed a cooperation contract with PT Jasa Armada Indonesia ("JAI") regarding Tugboat Rental for the JSP Operational Area. This agreement is valid for up to five years, and can be changed at any time.

AGP

In the agreement, JAI acknowledges that there is a Joint Operation carried out by the Company and AGP. In this agreement, it is known that AGP is willing to bear and receive 30% from carrying out the lease.

19. PERJANJIAN PENTING (lanjutan)

d. Pekerjaan *Engineering, Construction,* dan Pembangunan Fasilitas Regasifikasi di Tarakan

NPC

Pada tanggal 26 September 2024, Perusahaan menandatangani kontrak kerja sama dengan NPC dalam hal pembangunan fasilitas regasifikasi di Tarakan dalam semua aspek mulai dari perancangan sampai dengan pemeliharaan dalam rangka rencana pemindahan FSRU ke Tarakan.

PLN EPI

Pada 4 September 2024, Perusahaan ditunjuk oleh PLN EPI untuk mengelola dan menyediakan jasa midstream LNG ke PLTMG Gunung Belah dan Pembangkit Kampung Satu (atas nama PLN EPI) dalam halnya meliputi jasa penyimpanan LNG, jasa transportasi LNG, jasa regasifikasi dan jasa penyaluran gas. Pekerjaan berakhir tiga tahun setelah tanggal efektif.

e. Pekerjaan *Engineering, Procurement, Construction* (EPC) Pembangunan *Onshore Gas Facility* Pembangkit di Punagaya

PEB

Pada tanggal 17 Desember 2024, Perusahaan mengadakan kontrak dengan PEB untuk pekerjaan EPC atas pembangunan fasilitas gas bagi pembangkit di Punagaya sampai dengan diterimanya COD proyek.

f. Pengadaan jasa pengelolaan CNG *Plant* 10 MMSDCFD Riau

Pada tanggal 27 Mei 2024, Perusahaan menandatangani kontrak dengan PLN NP atas jasa pengelolaan operasional kinerja pembangkit dan aset CNG Riau 10 MMSCFD milik PT PLN. Pendapatan dari perjanjian ini terdiri atas dua tahap kegiatan, yaitu kegiatan praoperasi dan kegiatan operasi. Jangka waktu perjanjian ini berlaku sampai dengan 1 Desember 2025. Perjanjian ini telah diperpanjang selama 12 bulan setelah berakhirnya masa perjanjian.

***19. SIGNIFICANT AGREEMENTS** (continued)*

d. Engineering, Construction, and Construction Work for the Development of a Regasification Facility in Tarakan

NPC

On 26 September 2024, the Company signed a cooperation contract with NPC for the development of a regasification facility in Tarakan, covering all aspects from design to maintenance, as part of the plan to relocation of the FSRU to Tarakan.

PLN EPI

On 4 September 2024, the Company is appointed by PLN EPI to manage and provide midstream LNG services to PLTMG Gunung Belah and Pembangkit Kampung Satu (on behalf of PLN EPI), including LNG storage services, LNG transportation services, regasification services, and gas distribution service. The expected completion of this work are three years after effective date.

e. Engineering, Procurement, Construction (EPC) Work for the Development of an Onshore Gas Facility for the Power Plant in Punagaya

PEB

On 17 December 2024, the Company entered into a contract with PEB for EPC works for the construction of gas facilities for the power plant in Punagaya up to the acceptance of the project's COD.

f. Procurement of management services for a CNG Plant with a capacity of 10 MMSCFD in Riau

On 27 May 2024, the Company entered into a contract with PLN NP for operational management services relating to the performance of the power plant and the 10 MMSCFD Riau CNG assets owned by PT PLN. Revenue under this agreement consists of two phases of activities, namely pre-operational activities and operational activities. The term of this agreement is until 1 December 2025. The agreement has been extended for a further 12 months after the expiry of the original agreement term.

20. ASET KEUANGAN DAN LIABILITAS KEUANGAN

Pada tanggal 31 Desember 2025, aset keuangan Perusahaan terdiri dari kas dan setara kas, piutang usaha, piutang sewa pembiayaan dan piutang non usaha sebesar Rp2.137.679 (2024: Rp2.266.399). Perusahaan hanya memiliki aset keuangan dalam kategori aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi.

Pada tanggal 31 Desember 2025, liabilitas keuangan Perusahaan terdiri dari utang usaha, biaya masih harus dibayar, liabilitas sewa, pinjaman pemegang saham, dan utang lain-lain sebesar Rp1.825.177 (2024: Rp1.988.965). Perusahaan hanya memiliki liabilitas keuangan dalam kategori liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi.

20. FINANCIAL ASSETS AND FINANCIAL LIABILITIES

As at 31 December 2025, the Company's financial assets comprised cash and cash equivalents, trade receivables, finance lease receivables and non-trade receivables amounted to Rp2,137,679 (2024: Rp2,266,399). The Company only has financial assets categorised as financial assets held at amortised cost.

As at 31 December 2025, the Company's financial liabilities comprised trade payables, accrued expenses, lease liabilities, shareholder loans and other payables amounted to Rp1,825,177 (2024: Rp1,988,965). The Company only has financial liabilities categorised as financial liabilities held at amortised cost.

21. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN

a. Faktor risiko keuangan

Aktivitas Perusahaan rentan terhadap berbagai risiko keuangan: risiko pasar (termasuk risiko nilai tukar mata uang asing dan risiko tingkat bunga), risiko kredit dan risiko likuiditas. Program manajemen risiko Perusahaan secara keseluruhan dipusatkan pada pasar keuangan yang tidak dapat diprediksi dan Perusahaan berusaha untuk memperkecil efek yang berpotensi merugikan kinerja keuangan Perusahaan.

Manajemen risiko merupakan tanggung jawab Direksi. Direksi bertugas menentukan prinsip dasar kebijakan manajemen risiko Perusahaan secara keseluruhan serta kebijakan pada area tertentu seperti risiko mata uang asing, risiko suku bunga, risiko kredit dan risiko likuiditas.

i. Risiko pasar

(i) Risiko nilai tukar mata uang asing

Secara kas, mayoritas transaksi Perusahaan dilakukan dalam mata uang Rupiah sehingga mengurangi dampak dari fluktuasi nilai tukar mata uang asing. Oleh karena itu, Perusahaan menilai bahwa risiko nilai tukar mata uang asing adalah minimal.

21. FINANCIAL RISK MANAGEMENT

a. Financial risk factors

The Company's activities are exposed to a variety of financial risks: market risk (including foreign exchange risk and interest rate risk), credit risk and liquidity risk. The Company's overall risk management program focuses on the unpredictability of financial markets and seeks to minimise potential adverse effects on the Company's financial performance.

Risk management is the responsibility of the Board of Directors. The Board of Directors has the responsibility to determine the basic principles of the Company's risk management as well as principles covering specific areas, such as foreign exchange risk, interest rate risk, credit risk and liquidity risk.

i. Market risk

(i) Foreign exchange rate risk

On a cash basis, the majority of the Company's transactions are denominated in Rupiah, which reduces the impact of fluctuations in foreign exchange rates. Therefore, the Company assesses the foreign exchange risk as minimal.

21. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

a. Faktor risiko keuangan (lanjutan)

i. Risiko pasar

(ii) Risiko suku bunga

Eksposur terhadap suku bunga dimonitor untuk meminimalkan dampak negatif terhadap Perusahaan. Pinjaman pemegang saham Perusahaan menggunakan suku bunga tetap, sehingga tidak terdapat risiko pengaruh suku bunga mengambang dari pinjaman pemegang saham.

Pada tanggal 31 Desember 2025, aset keuangan dan liabilitas keuangan Perusahaan yang dipengaruhi oleh suku bunga mengambang adalah kas dan setara kas di bank. Risiko pengaruh suku bunga mengambang pada kas dan setara kas dan setara kas di bank tidak signifikan.

ii. Risiko kredit

Risiko kredit terutama berasal dari kas dan setara kas di bank, piutang usaha, piutang non-usaha, dan piutang sewa pembiayaan.

Untuk piutang usaha dan piutang sewa pembiayaan, Perusahaan menilai bahwa risiko kredit adalah minimal karena piutang usaha dan piutang sewa pembiayaan berasal dari PLN. Untuk kas dan setara kas, Perusahaan meminimalisir risiko kredit dengan melakukan penempatan pada beberapa bank untuk menghindari pemusatan yang signifikan dengan satu institusi.

21. FINANCIAL RISK MANAGEMENT *(continued)*

a. Financial risk factors *(continued)*

i. Market risk

(ii) Interest rate risk

Interest rate exposure is monitored to minimise any negative impact to the Company. Interest rate of the Company's shareholder loans are using fixed rates, therefore there is no floating interest rate risk from the shareholder loans.

As at 31 December 2025, the financial assets and financial liabilities of the Company which are impacted by floating interest rates are cash and cash equivalents in banks. Floating interest rate risk on cash and cash equivalents in banks is not significant.

ii. Credit risk

Credit risk arises from cash and cash equivalents in bank, trade receivables, non-trade receivables and finance lease receivables.

For trade receivables and finance lease receivables, the Company assesses the credit risk is minimal as trade receivables and finance lease receivables are from PLN. For cash and cash equivalents, the Company minimise credit risk by placing the funds in several banks to avoid significant concentration of cash and cash equivalents with one institution.

	2025	2024	
Kas dan setara kas di bank			***Cash and cash equivalents in banks***
Pefindo idAAA	114,121	113,361	*Pefindo idAAA*
Total	114,121	113,361	***Total***
Piutang usaha			***Trade receivables***
Dengan pihak yang tidak memiliki peringkat kredit eksternal			*Counterparties without external credit rating*
Grup 1	61,670	70,614	*Group 1*
Total	61,670	70,614	***Total***

- Grup 1 - pelanggan baru/pihak-pihak berelasi (kurang dari enam bulan).

- *Group 1 - new customers/related parties (less than six months).*

21. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan) / *21. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (continued)*

a. Faktor risiko keuangan (lanjutan) / *a. Financial risk factors (continued)*

iii. Risiko likuiditas / *iii. Liquidity risk*

Risiko likuiditas muncul dalam situasi Perusahaan kesulitan memperoleh pendanaan. Kebijakan manajemen risiko likuiditas yang berhati-hati dilakukan dengan menjaga kecukupan kas. Perusahaan mengelola risiko likuiditas dengan memonitor perkiraan arus kas dan arus kas aktual serta menyesuaikan profil jatuh tempo dari aset dan liabilitas keuangan.

Liquidity risk arises in situations where the Company has difficulties in obtaining funding. Prudent liquidity risk management implies maintaining sufficient cash. The Company manages liquidity risk by continuously monitoring forecast and actual cash flows and matching the maturity profiles of financial assets and liabilities.

Tabel di bawah ini menggambarkan liabilitas keuangan Perusahaan berdasarkan jatuh temponya. Jumlah yang terdapat di tabel ini adalah nilai kontraktual yang tidak didiskontokan:

The table below describes the Company's financial liabilities based on their maturities. The amounts disclosed in the table are the contractual undiscounted cash flows:

	Jatuh tempo kontraktual liabilitas keuangan/ *Contractual maturities of financial liabilities*					
	Kurang dari satu tahun/ *Less than one year*	Lebih dari satu tahun tetapi tidak lebih dari tiga tahun/ *Over one year but not longer than three years*	Lebih dari tiga tahun tetapi tidak lebih dari lima tahun/ *Over three years but not longer than five years*	Lebih dari lima tahun/ *More than five years*	Jumlah/ *Total*	
31 Desember 2025						**31 December 2025**
Utang usaha	71,853	-	-	-	71,853	*Trade payables*
Biaya masih harus dibayar	13,055	-	-	-	13,055	*Accrued expenses*
Utang lain-lain	4,204	-	-	-	4,204	*Other payables*
Pinjaman pemegang saham	60,397	115,746	74,886	-	251,029	Shareholder loans
Liabilitas sewa	251,983	487,910	446,007	1,000,204	2,186,104	*Lease liabilities*
	401,492	603,656	520,893	1,000,204	2,526,245	

	Jatuh tempo kontraktual liabilitas keuangan/ *Contractual maturities of financial liabilities*					
	Kurang dari satu tahun/ *Less than one year*	Lebih dari satu tahun tetapi tidak lebih dari tiga tahun/ *Over one year but not longer than three years*	Lebih dari tiga tahun tetapi tidak lebih dari lima tahun/ *Over three years but not longer than five years*	Lebih dari lima tahun/ *More than five years*	Jumlah/ *Total*	
31 Desember 2024						**31 December 2024**
Utang usaha	76,393	-	-	-	76,393	*Trade payables*
Biaya masih harus dibayar	9,221	-	-	-	9,221	*Accrued expenses*
Utang lain-lain	2,449	-	-	-	2,449	*Other payables*
Pinjaman pemegang saham	34,449	122,343	115,608	40,713	313,113	*Shareholder loans*
Liabilitas sewa	249,819	498,663	459,003	1,223,235	2,430,720	*Lease liabilities*
	372,331	621,006	574,611	1,263,948	2,831,896	

b. Manajemen risiko permodalan / *b. Capital risk management*

Perusahaan mengelola risiko modal untuk memastikan bahwa mereka akan mampu untuk melanjutkan kelangsungan usaha dan untuk memastikan pemenuhan batasan rasio kecukupan modal. Struktur modal Perusahaan terdiri dari pinjaman ekuitas pemegang saham. Direksi Perusahaan secara berkala melakukan tinjauan struktur permodalan Perusahaan. Sebagai bagian dari tinjauan ini, Direksi mempertimbangkan biaya permodalan dan risiko yang berhubungan.

The Company manages capital risk to ensure that it will be able to continue as a going concern. The Company's capital structure consists of shareholders' equity. The Board of Directors of the Company regularly reviews the Company's capital structure. As part of this review, the Board of Directors considers the cost of capital and related risks.

21. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

c. Estimasi nilai wajar

Manajemen berpendapat bahwa nilai buku dari aset dan liabilitas keuangannya mendekati nilai wajar dari aset dan liabilitas keuangan tersebut pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024.

21. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (continued)

c. Fair value estimation

Management is of the opinion that the carrying value of its financial assets and liabilities approximates the fair value of the financial assets and liabilities as at 31 December 2025 and 2024.

22. REKONSILIASI LIABILITAS YANG TIMBUL DARI AKTIVITAS PENDANAAN

Tabel di bawah ini menjelaskan perubahan dalam liabilitas Perusahaan yang timbul dari aktivitas pendanaan, termasuk perubahan yang timbul dari arus kas dan perubahan non-kas. Liabilitas yang timbul dari aktivitas pendanaan adalah liabilitas yang arus kas, atau arus kas masa depannya, diklasifikasikan dalam laporan arus kas Perusahaan sebagai arus kas dari aktivitas pendanaan.

22. RECONCILIATION OF LIABILITIES ARISING FROM FINANCING ACTIVITIES

The table below details changes in the Company's liabilities arising from financing activities, including both cash and non-cash changes. Liabilities arising from financing activities are those for which cash flows were, or future cash flows will be, classified in the Company's statement of cash flows as cash flows from financing activities.

	31 Desember/ *December* 2024	Penambahan/ *Addition*	Pembayaran/ *Repayment*	Penyesuaian nilai wajar/ *Adjustment fair value*	31 Desember/ *December* 2025	
Pinjaman pemegang saham	255,060	(1,245)	(52,456)	10,499	211,858	*Shareholder loan*
Liabilitas sewa	1,654,934	6,271	(123,967)	-	1,537,238	*Lease liabilities*
	1,909,994	5,026	(176,423)	10,499	1,749,096	

	31 Desember/ *December* 2023	Penambahan/ *Addition*	Pembayaran/ *Repayment*	Penyesuaian nilai wajar/ *Adjustment fair value*	31 Desember/ *December* 2024	
Pinjaman pemegang saham	295,708	-	(40,648)	-	255,060	*Shareholder loan*
Liabilitas sewa	1,816,432	-	(161,498)	-	1,654,934	*Lease liabilities*
	2,112,140	-	(202,146)	-	1,909,994	

23. PERISTIWA SETELAH PERIODE PELAPORAN

Perubahan susunan Dewan Komisaris

Berdasarkan Akta No. 06 tanggal 12 Mei 2026 yang dibuat di hadapan Sutra Oktaviani, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, para pemegang saham menyetujui perubahan susunan Dewan Komisaris Perusahaan sebagai berikut:

23. EVENTS AFTER THE REPORTING PERIOD

Change in the composition of the Board of Commissioners

Based on Deed No. 06 dated 12 May 2026, executed before Sutra Oktaviani, S.H., M.Kn., Notary in South Jakarta, the shareholders approved the change in the composition of the Company's Board of Commissioners as follows:

	2026	
Dewan Komisaris		*Board of Commissioners*
Komisaris Utama	Saiful Chaniago	*President Commissioner*
Komisaris	Airil Tanjung	*Commissioner*

23. PERISTIWA SETELAH PERIODE PELAPORAN (lanjutan)

PDP fasilitas regasifikasi Tarakan

Berdasarkan Berita Acara No. 0072.BA/EPI.01.02/EG010000/2026 tanggal 30 Januari 2026, pembangunan fasilitas regasifikasi Tarakan telah mencapai COD pada tanggal 30 Januari 2026.

23. EVENTS AFTER THE REPORTING PERIOD (continued)

CIP of the Tarakan regasification facility

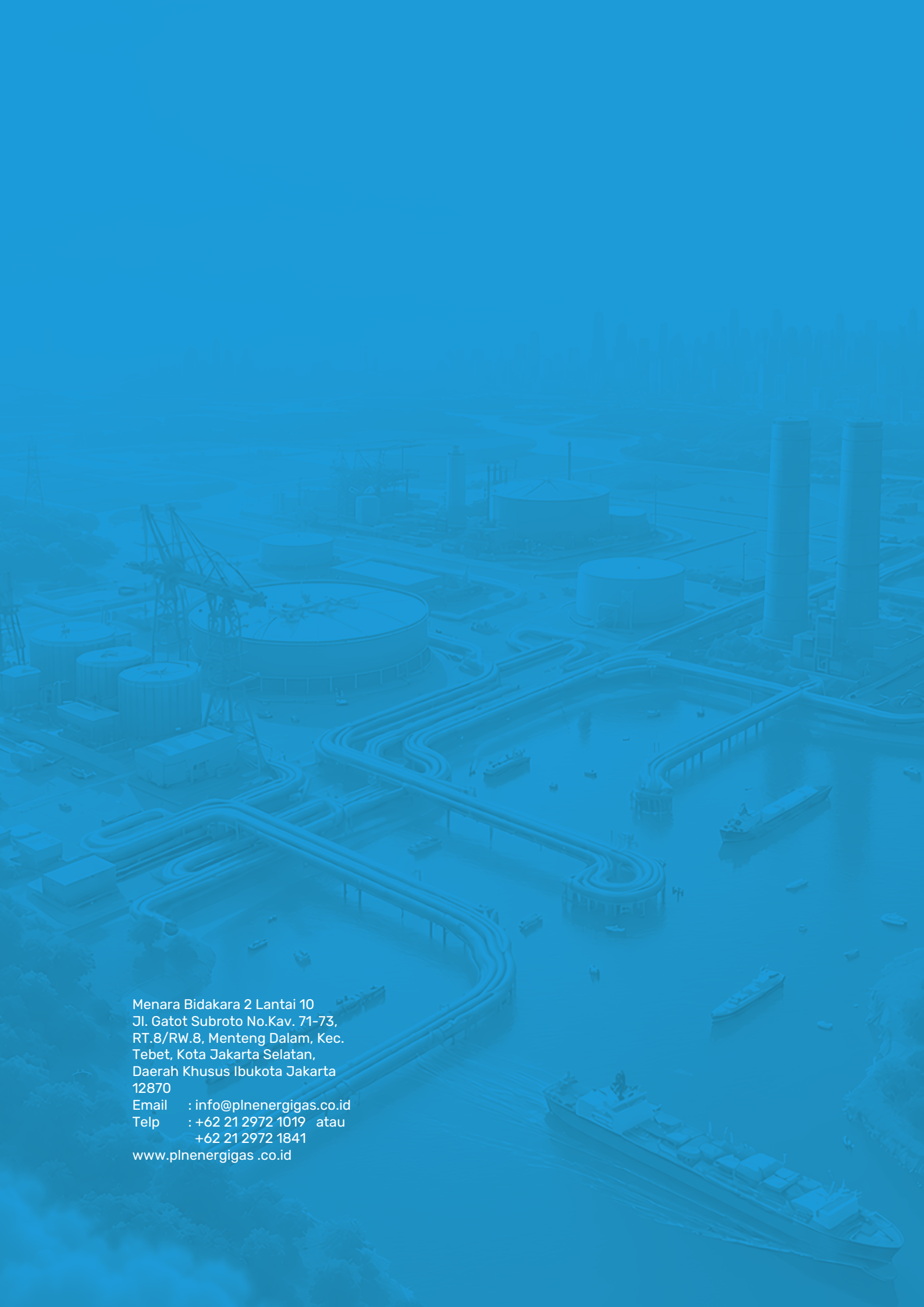
Based on Minutes No.0072.BA/EPI.01.02/EG010000/2026 dated 30 January 2026, the construction of the Tarakan regasification facility reached its COD on 30 January 2026.

24. TANGGUNG JAWAB MANAJEMEN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan merupakan tanggung jawab manajemen dan telah disetujui oleh Dewan Direksi untuk diterbitkan pada tanggal 13 Mei 2026.

24. MANAGEMENT RESPONSIBILITY ON FINANCIAL STATEMENTS

The preparation and fair presentation of the financial statements were the responsibilities of the management and were approved by the Board of Directors and authorised for issue on 13 May 2026.



Menara Bidakara 2 Lantai 10
Jl. Gatot Subroto No.Kav. 71-73,
RT.8/RW.8, Menteng Dalam, Kec.
Tebet, Kota Jakarta Selatan,
Daerah Khusus Ibukota Jakarta
12870
Email : info@plnenergigas.co.id
Telp : +62 21 2972 1019 atau
+62 21 2972 1841
www.plnenergigas .co.id